

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 22 Juli 2021	Tanggal Distribusi HMETD	: 10 September 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	: 30 Agustus 2021	Tanggal Pra-Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 13 September 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	: 9 September 2021	Periode Perdagangan HMETD	: 13-22 September 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right)		Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 13-22 September 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 7 September 2021	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 15-24 September 2021
Pasar Tunai	: 9 September 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 24 September 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)		Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan	: 27 September 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 8 September 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	: 29 September 2021
Pasar Tunai	: 10 September 2021		

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung BRI I

Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210

Tel: (62-21) 251-0244 Faks: (62-21) 250-0065

E-mail: humas@bri.co.id Website: www.bri.co.id

JARINGAN KANTOR PER 31 MARET 2021

Per 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 5 unit kerja luar negeri), 596 kantor cabang pembantu (termasuk 3 unit kerja luar negeri), 542 kantor kas, 1.997 Teras dan Teras Keliling, dan 5.241 BRI Unit serta 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 18,62% (delapan belas koma enam dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut. Jumlah dana dan hasil inbreng yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,- (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham Seri B yang telah disetor penuh lainnya dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu 8 (delapan) Hari Kerja mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 13 September 2021.

Negara Republik Indonesia ("Negara RI") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara RI memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam Perseroan. Negara RI akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ("Inbreng") dimana pelaksanaannya adalah sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("PP No. 73/2021"). Penyetoran modal Negara RI akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian") atau sejumlah 6.249.999 saham Seri B (inbreng saham Pegadaian), dengan nilai seluruhnya sebesar Rp48,67 triliun dan dalam bentuk kepemilikan 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PNM") atau sejumlah 3.799.999 saham Seri B (inbreng saham PNM), dengan nilai seluruhnya sebesar Rp6,10 triliun.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 22 September 2021 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 8 (DELAPAN) HARI KERJA MULAI TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN 22 SEPTEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 18,62% DARI PORSI KEPEMILIKANNYA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG MUNCUL AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERUSAHAAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN PEMERINTAH NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD (selanjutnya disebut "PMHMETD I") melalui surat No. R.444-DIR/CDS/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 ("POJK No. 32/2015") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM").

Perseroan, semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini, dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan PP No. 29/1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Perbankan") ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3 PP No. 29/1999);
- Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat (1) PP No. 29/1999);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 29/1999; yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia ("WNI") atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat (3) PP No. 29/1999).

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Pengumuman Pencatatan Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) (Tercatat di Papan: Utama) No. Peng-P-00271/BEI.PP/11-2017 tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, sejumlah 1.233.458.100 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek, di mana saham tersebut adalah atas nama Negara Republik Indonesia.

Setelah pelaksanaan PMHMETD I, jumlah saham yang diterbitkan dalam Perseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham, di mana akan terdapat tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek yaitu sebanyak 282.131.916 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) saham milik Negara RI. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29/1999, total jumlah saham Perseroan milik Negara RI yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMHMETD I adalah sebanyak-banyaknya 1.515.590.016 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu enam belas) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Negara RI selaku salah satu pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PERNY-5/MBU/Wk2/07/2021 tanggal 21 Juli 2021, akan mempertahankan kepemilikan saham dalam Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang tidak dicatatkan di BEI sebesar sekurang-kurangnya 1% dari modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan setelah PMHMETD I dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP No. 29/1999.

Sehubungan dengan rencana inbreng saham Negara RI di Pegadaian dan PNM ke Perseroan sebagai bentuk partisipasi Negara RI pada PMHMETD I, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 73/2021, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA YANG ANDA TUNJUK UNTUK DAPAT MEMAHAMI KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG ANDA MILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ANDA.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT DAN PERSEROAN DIBEBAHKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	9
III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG	10
A. Ringkasan Penilaian Saham Pegadaian	35
B. Ringkasan Penilaian Saham PNM	36
C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran	37
IV. PERNYATAAN UTANG	41
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	62
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	68
VII. FAKTOR RISIKO	99
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	125
IX. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	126
1. Riwayat Singkat Perseroan	126
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	128
3. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan	129
4. Tata Kelola Perusahaan	136
5. Sumber Daya Manusia	155
6. Struktur Kepemilikan Perseroan	159
7. Struktur Organisasi Perseroan	160
8. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Perusahaan Anak	160
9. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak	161
10. Keterangan Tentang Transaksi dengan Pihak-Pihak Terafiliasi	178
11. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	183
12. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	205
13. Asuransi	205
14. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan	206
15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	256
16. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	258
17. Riset dan Pengembangan	270

X. EKUITAS	271
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	273
XII. PERPAJAKAN	274
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	276
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	279
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	285
LAMPIRAN – PEKEMBANGAN TERKINI	287
LAMPIRAN – LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM TANGGAL 30 JUNI 2021	289

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	<p>Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.</p>
Anak Perusahaan atau Perusahaan Anak	<p>Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atau lebih dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p>
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.</p>
Bank Indonesia atau BI	<p>Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai <i>lender of the last resort</i>, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
BEI atau Bursa Efek	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
BNRI	<p>Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.</p>
BMPK	<p>Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada selain pihak terkait.</p>
BOPO	<p>Berarti singkatan dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, yaitu rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 17/POJK.03/2018.</p>
BUMN	<p>Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.</p>

CAR	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> atau Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
Dilusi	Berarti penurunan persentase kepemilikan saham, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya HMETD dalam PMHMETD I ini.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE yang berisi seluruh nama pemegang saham Perseroan beserta kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 24 POJK No. 32/2015, yaitu: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
ESA	Berarti <i>Employee Stock Allocation</i> (alokasi saham kepada karyawan).
ESOP	Berarti singkatan dari <i>Employee Stock Option Plan</i> atau program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada karyawan Perseroan.
FPPS	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.
FPPS Tambahan	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

HMETD	Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain sesuai dengan POJK No. 32/ 2015.
Kemenkumham	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM .
KUR	Berarti Kredit Usaha Rakyat.
LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> yaitu rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/ badan Indonesia maupun warga negara asing/badan asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
MSOP	Berarti singkatan dari <i>Management Stock Option Plan</i> atau program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen Perseroan.
Negara RI	Berarti Negara Republik Indonesia.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Margin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.
NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
OSL	Berarti singkatan dari <i>Outstanding Loan</i> .
PBI	Berarti singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.
PDN	Berarti singkatan dari Posisi Devisa Neto yang merupakan selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I atau PMHMETD I	Berarti penawaran sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 September 2021 pukul 16.00 WIB, berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) lembar Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham yang wajib dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS dan/atau FPPS Tambahan.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Periode Perdagangan	Berarti periode Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Administrasi Saham	Pengelolaan Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 62 tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 21 tanggal 10 Agustus 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD I termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perpu No. 1/2020	Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (<i>COVID-19</i>) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Perseroan atau BRI	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang akan melaksanakan PMHMETD I.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.

POJK	Berarti singkatan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
POJK No. 33/2014	Berarti POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 06/2015	Berarti POJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 06/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
POJK No. 30/2015	Berarti POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2015	Berarti POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	Berarti POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 55/2015	Berarti POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 55/2016	Berarti POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
POJK No. 1/2019	Berarti POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
POJK No. 15/2020	Berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
PP No. 29/1999	Berarti Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
PP No. 73/2021	Berarti Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
PSAK	Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Rencana Transaksi	Berarti rencana PMHMETD I dan rencana Inbreg.
ROA	Berarti singkatan dari <i>Return on Assets</i> , yang merupakan laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset.
ROE	Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> , yang merupakan laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata total ekuitas tier 1.
Rp atau Rupiah	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPS	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.
Saham Lama	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SAK	Berarti singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan, yaitu suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.
SDM	Berarti singkatan dari Sumber Daya Manusia.
SEOJK No. 15/2015	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
Sertifikat Bukti HMETD	Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru.
SMA	Berarti singkatan dari <i>Simple Moving Average</i> .
SOTK	Berarti singkatan dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
STL	Berarti singkatan dari Standar Taksiran Logam.
Tanggal Pencatatan HMETD di BEI	Berarti tanggal pencatatan atas seluruh saham tambahan hasil dari pelaksanaan HMETD dari PMHMETD I di Bursa Efek yaitu tanggal 13 September 2021.
Undang-Undang BI	Berarti Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, lalu diubah dengan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diundangkan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, dan sebagaimana telah diubah lebih lanjut dengan Perpu No. 1/2020.

Undang-Undang BUMN	Berarti Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan <i>juncto</i> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
USD atau US\$ atau ASD	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya.

PERUSAHAAN ANAK

BRC	:	BRI Remittance Co. Ltd.
BRINS	:	PT BRI Asuransi Indonesia
BRI AGRO	:	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
BRI Danareksa	:	PT BRI Danareksa Sekuritas
BRI Finance	:	PT BRI Multifinance Indonesia
BRI Life	:	PT Asuransi BRI Life
BRI Ventura	:	PT BRI Ventura Investama

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah diaudit beserta catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut yang tidak dicantumkan dalam Prospektus ini namun dapat dilihat pada situs Bursa Efek.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan ("**Persero**"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No.133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("**Akta No. 3/2021**").

Per 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 1 kantor cabang khusus dan 5 unit kerja luar negeri), 596 kantor cabang pembantu (termasuk 3 unit kerja luar negeri), 542 kantor kas, 1.997 Teras dan Teras Keliling, dan 5.241 BRI Unit serta 4 Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956 sebagaimana dimuat dalam Surat No. 5/117/DPwB2/PwB24 tanggal 15 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Bank 2 mengenai pemberian izin sebagai Bank Devisa;
- c. Surat Bank Indonesia No. 11/427/DASP tanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, di mana Bank Indonesia telah menyetujui Perseroan sebagai penerbit kartu ATM dan kartu Debet sekaligus sebagai *acquirer* atas penerbitan Kartu ATM dan Kartu Debet tersebut;
- d. Surat Bank Indonesia No. 20/259/DKSP/Srt/B tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia telah memberikan perpanjangan kepada Perseroan atas izin sebagai penerbit uang elektronik, dengan demikian Izin Penerbit Uang Elektronik Perseroan berlaku sampai dengan 4 Mei 2023.
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-9/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal;
- f. Surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*), yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank I, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan *Trust*;
- g. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, di mana Perseroan telah terdaftar sebagai Wali Amanat.

Dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan menyediakan jasa perbankan dan keuangan untuk kelompok nasabah korporasi dan individual. Per 31 Maret 2021, total aset Perseroan mencapai Rp1.411.051.974 juta, dengan total kredit yang diberikan - neto Rp841.864.799 juta dan total simpanan nasabah mencapai sebesar Rp1.049.314.773 juta.

Perseroan telah melakukan beberapa kali pencatatan saham dengan kronologis sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Tambahan/ Pengurangan Saham	Modal Disetor Saham (Rp Juta)	Lembar Saham yang Beredar
Penawaran Umum Saham Perdana	2003	11.764.705.000	5.882.353	11.764.705.000
Exercise MSOP 85.385.500	2004	85.385.500	5.925.045	11.850.090.500
Exercise MSOP 185.610.000	2005	185.610.000	6.017.850	12.035.700.500
Exercise MSOP 250.721.000	2006	250.721.000	6.143.211	12.286.421.500
Exercise MSOP 31.379.000	2007	31.379.000	6.158.900	12.317.800.500
Exercise MSOP 7.499.000	2008	7.499.000	6.162.650	12.325.299.500
Exercise MSOP 4.553.000	2009	4.553.000	6.164.926	12.329.852.500
Exercise MSOP 4.728.500	2010	4.728.500	6.167.291	12.334.581.000
Stock Split 1:2 tanggal 11 Januari 2011	2011	12.334.581.000	6.167.291	24.669.162.000
Stock Buy-Back 221.718.000 lembar saham	2015 -2016	-	6.167.291	24.669.162.000
Stock Split 1:5 tanggal 10 November 2017	2017	98.676.648.000	6.167.291	123.345.810.000
Exercise ESOP 143.415.500	2019	-	6.167.291	123.345.810.000
Exercise ESA 231.111.000	2020	-	6.167.291	123.345.810.000
Stock Buy-Back 16.400.000 lembar saham	2020	-	6.167.291	123.345.810.000
Exercise ESA 2.181.000	2021	-	6.167.291	123.345.810.000

Perseroan tidak akan melakukan konversi saham treasuri sampai dengan *recording date* PMHMETD I.

2. Keterangan tentang HMETD

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("Akta No. 3/2021") dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
	Jumlah Lembar Saham			
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna	1		50	
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999		14.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000		15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Negara Republik Indonesia				
- Saham Seri A Dwiwarna	1		50	0
- Saham Biasa Atas Nama Seri B Masyarakat	69.999.999.999		3.499.999.999.950	56,75
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing- masing di bawah 5%)*	53.345.810.000		2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000		6.167.290.500.000	100
Saham dalam Portepel	176.654.190.000		8.832.709.500.000	

*termasuk saham treasuri sebesar 748.282.500

Sehubungan dengan PMHMETD I, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham melalui PMHMETD I.

Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 9 September 2021 pada pukul 16.00 WIB berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana dan hasil inbreng yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,- (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).

Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Saham Baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh Saham Lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Treasury stock tidak dialihkan menjadi program kepemilikan saham kepada pekerja Perseroan, sehingga tidak ada HMETD yang dilaksanakan dari jumlah **treasury stock** saat ini.

a) Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I Dengan Asumsi Seluruh HMETD Diambil Bagian oleh Seluruh Pemegang Saham

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi setiap pemegang saham hanya melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya dan tidak melaksanakan pembelian saham tambahan:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	1	50		1	50	
Nilai Nominal Rp50,00						
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950		299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Nilai Nominal Rp50,00						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
Saham Seri A	1	50	0,00	1	50	0,00
Saham Seri B	<u>69.999.999.999</u> 70.000.000.000	<u>3.499.999.999.950</u> 3.500.000.000.000	56,75	<u>86.108.998.709</u> 86.108.998.710	<u>4.305.449.935.450</u> 4.305.449.935.500	56,82
2. Masyarakat						
Saham Seri B	52.597.527.500	2.629.876.375.000	42,64	64.701.720.394	3.235.086.019.700	42,69
Sub-jumlah	122.597.527.500	6.129.876.375.000	99,39	150.810.719.104	7.540.535.955.200	99,51
Saham treasury	748.282.500	37.414.125.000	0,61	748.282.500	37.414.125.000	0,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	176.654.190.000	8.832.709.500.000		148.440.998.396	7.422.049.919.800	

b) Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I Dengan Asumsi HMETD Hanya Diambil oleh Negara RI dan Seluruh Pemegang Saham Lainnya Tidak Melaksanakan Haknya.

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi HMETD hanya diambil bagian oleh Negara RI sesuai dengan porsi kepemilikannya:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A Nilai Nominal Rp50,00	1	50		1	50	
Saham Seri B Nilai Nominal Rp50,00	299.999.999.999	14.999.999.999.950		299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
Saham Seri A	1	50	0,00	1	50	0,00
Saham Seri B	<u>69.999.999.999</u> 70.000.000.000	<u>3.499.999.999.950</u> 3.500.000.000.000	56,75	<u>86.108.998.709</u> 86.108.998.710	<u>4.305.449.935.450</u> 4.305.449.935.500	61,75
2. Masyarakat						
Saham Seri B	52.597.527.500	2.629.876.375.000	42,64	52.597.527.500	2.629.876.375.000	37,72
Sub-jumlah	122.597.527.500	6.129.876.375.000	99,39	138.706.526.210	6.935.326.310.500	99,46
Saham treasuri	748.282.500	37.414.125.000	0,61	748.282.500	37.414.125.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00	139.454.808.710	6.972.740.435.500	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	176.654.190.000	8.832.709.500.000		160.545.191.290	8.027.259.564.500	

Negara RI adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara RI memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam Perseroan. Negara RI akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang ("Inbreng"), dimana pelaksanaannya adalah sebagaimana ditetapkan melalui PP No. 73/2021. Penyetoran modal Negara RI akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian") atau sejumlah 6.249.999 saham Seri B (inbreng saham Pegadaian), dengan nilai seluruhnya sebesar Rp48,67 triliun dan dalam bentuk kepemilikan 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PNM") atau sejumlah 3.799.999 saham Seri B (inbreng saham PNM), dengan nilai seluruhnya sebesar Rp6,10 triliun.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik lainnya yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah 22 September 2021 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021, sesuai dengan POJK No. 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum 18,62% (delapan belas koma enam dua persen).

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 22 September 2021 dimana HMETD yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Perseroan bersama-sama Pemegang Saham Utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A tanggal 27 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh

pemegang saham bukan pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor.

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Pembentukan *holding* BUMN ultra mikro, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam:
 - a. Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan
 - b. PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM, sebagai hasil Inbreng saham Negara RI.
2. Selebihnya, dalam bentuk tunai, sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

Penjelasan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum secara lengkap dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Keunggulan Bersaing

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing utama sebagai berikut:

- a) Posisi yang kuat dalam pasar pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (MKM)
- b) Jaringan kerja yang terbesar dan terluas, didukung oleh SDM yang handal serta kapabilitas teknologi dan digital yang terdepan (*Hybrid Bank*)
- c) Produk dan Jasa Keuangan yang lengkap dalam memberikan *Integrated Financial Services* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari background yang berbeda
- d) Manajemen Risiko yang Kuat dan *Good Corporate Governance*
- e) Salah satu *pioneer* dalam implementasi ESG
- f) *Brand recognition* dan *brand loyalty* yang kuat

Untuk penjelasan keunggulan bersaing secara lengkap dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

5. Strategi Usaha Perseroan

Kondisi perbankan Indonesia di masa depan akan didefinisikan ulang dengan perubahan tren dalam perkembangan demografis, perubahan perilaku pelanggan, peningkatan fokus ESG secara signifikan, perubahan peraturan, tren suku bunga rendah yang berkelanjutan, kemajuan data dan teknologi, dan pergeseran struktur industri sebagai akibat munculnya penyedia layanan keuangan digital. Perseroan berkeinginan untuk dapat berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan yang memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan mengakomodir dua kepentingan utama tersebut, Perseroan merumuskan rencana jangka panjang untuk periode 2021-2025 bertajuk BRIVolution 2.0 dengan harapan menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*" dengan memperhatikan parameter sebagai berikut:

1. Grup Perbankan Paling Berharga di Asia Tenggara, ditunjukkan dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 75 juta.
2. *Champion of Financial Inclusion*, ditunjukkan dengan komposisi kredit mikro yang mencapai minimal 45% pada tahun 2025 dan berkontribusi terhadap pencapaian target inklusi keuangan Pemerintah sebesar 90% melalui perluasan layanan perbankan kepada populasi *unbanked*.

BRIVolution 2.0 dimaksudkan untuk melanjutkan semangat transformasi BRIVolution 1.0 yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan hal ini dilakukan dengan memperkuat dan mempertajam beberapa aspek operasional bisnis Perseroan. BRIVolution 2.0 merupakan representasi dari semangat Perseroan untuk menciptakan bisnis yang lebih berkualitas, kuat, dan berkelanjutan.

BRIVolution 2.0 akan diimplementasikan dalam tiga fase yang saling terkait sebagai berikut:

- **Fase 1 : *Strengthened The Core for Growth* (2021 – 2022)**
- **Fase 2 : *Scale Up & Scope Up* (2023 – 2024)**
- **Fase 3 : *Mempertahankan Posisi Top Tier* di Asia Tenggara (2025 dan seterusnya)**

Untuk penjelasan strategi usaha secara lengkap dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

6. Faktor Risiko

Perseroan telah mengungkapkan risiko-risiko yang dipandang material, dan faktor-faktor risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot dampak risiko tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko kredit
Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Untuk aktivitas pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit yang diberikan, Perseroan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontijensi.

2. Risiko Usaha Yang Berkaitan dengan Perseroan

- Risiko terkait pandemi Covid-19
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional
- Risiko hukum
- Risiko strategik
- Risiko reputasi
- Risiko kepatuhan
- Risiko transaksi intra group
- Risiko asuransi

3. Risiko Umum

- Risiko kondisi ekonomi makro
- Risiko tingkat suku bunga
- Risiko nilai tukar
- Risiko kebijakan Pemerintah

4. Risiko Terkait Investasi Saham

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 2019, sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasian serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1681) dan Danil Setiadi Handaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	1.411.051.974	1.511.804.628	1.416.758.840	
Total Liabilitas	1.216.287.688	1.278.346.276	1.183.155.670	
Total Dana <i>Syirkah</i> Temporer	-	33.546.976	24.818.834	
Total Ekuitas	194.764.286	199.911.376	208.784.336	

Laporan Laba Rugi Perseroan
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019
Pendapatan Bunga, Syariah Dan Premi – Neto	23.650.685	21.526.092	80.091.568	82.718.033
Total Pendapatan Operasional Lainnya	8.257.070	8.001.928	29.463.839	28.439.130
Laba Operasional	8.970.458	10.126.968	26.774.164	43.431.933
Pendapatan (Beban) Non-Operasional – Neto	(169)	28.737	(49.318)	(67.880)
Laba Sebelum Beban Pajak	8.970.289	10.155.705	26.724.846	43.364.053
Beban Pajak	(2.110.207)	(1.985.803)	(8.064.453)	(8.950.228)
Laba Tahun Berjalan	6.860.082	8.169.902	18.660.393	34.413.825

**tidak diaudit*
Rasio Keuangan (Bank Saja)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Permodalan				
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	19,40%	18,23%	20,61%	22,55%
Aktiva Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,98%	1,84%	1,82%	1,74%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,97%	2,13%	1,81%	1,98%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	6,17%	5,09%	5,42%	3,36%
NPL bruto	3,12%	2,81%	2,94%	2,62%
NPL neto	0,86%	0,63%	0,80%	1,04%
Profiltabilitas				
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset (ROA)	2,65%	3,19%	1,98%	3,50%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	15,47%	20,39%	11,05%	19,41%
Marjin bunga bersih (NIM)	7,00%	6,66%	6,00%	6,98%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,83%	72,97%	81,22%	70,10%
Cost to Income Ratio (CIR)	41,71%	41,50%	45,40%	40,03%
Likuiditas				
Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,77%	90,39%	83,66%	88,64%
Solvabilitas				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	6,24	6,44	6,39	5,67
Rasio Liabilitas terhadap Aset (kali)	0,86	0,85	0,85	0,84
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
- Utama Rupiah	3,03%	5,57%	3,19%	6,15%
- Valuta Asing	4,01%	4,00%	4,01%	8,07%
Posisi Devisa Neto	0,80%	2,05%	1,07%	1,87%
Persentase pelanggaran BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**tidak diaudit*

Penjelasan ikhtisar data keuangan penting secara lengkap dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Seluruh saham Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Seri B dari Saham Lama, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan dan (2) Perseroan memiliki saldo laba yang positif.

Berdasarkan UUPT dan anggaran dasar Perseroan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non WNI akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XII mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

Dalam memutuskan pemberian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, Perseroan memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan *sustainability* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Perseroan kepada pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Secara historis, Perseroan membagikan dividen dengan kisaran 20% - 75% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan pemberian dividen ini akan tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Sejak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan November 2003, Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebanyak 18 kali.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

9. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham Baru

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom selaku BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham dan sebagai Agen Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Saham pada PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai persyaratan pemesanan pembelian Saham Baru dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 22 Juli 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 61/2021**”), di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham melalui mekanisme PMHMETD I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada OJK;
 - c. Menentukan tanggal DPS yang berhak atas HMETD;
 - d. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan HMETD;
 - e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - f. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan HMETD ;
 - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI, kecuali atas 1% saham yang tidak dicatatkan pada BEI;
 - j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan HMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.

Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.bri.co.id), situs web BEI, dan situs web KSEI pada tanggal 23 Juli 2021 sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD I, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 9 September 2021 pada pukul 16.00 WIB berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana dan hasil inbreng yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,- (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah saham yang berasal dari portepel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Saham Seri B dari Saham Lama dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 13 September 2021.

Negara RI adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Negara RI memiliki 1 (satu saham) Seri A Dwiwarna dan 69.999.999.999 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dalam Perseroan. Negara RI akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dengan cara Inbreng, dimana pelaksanaannya adalah sebagaimana ditetapkan melalui PP No. 73/2021. Penyetoran modal Negara RI akan disetorkan dalam bentuk kepemilikan 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Pegadaian atau sejumlah 6.249.999 saham Seri B (inbreng saham Pegadaian), dengan nilai seluruhnya sebesar Rp48,67 triliun dan dalam bentuk kepemilikan 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PNM atau sejumlah 3.799.999 saham Seri B (inbreng saham PNM), dengan nilai seluruhnya sebesar Rp6,10 triliun. Hal ini juga memperhatikan keputusan Negara RI sebagai pemegang saham yang akan melakukan penyetoran sesuai penilaian independen KJPP.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik lainnya yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 22 September 2021 dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan**

Berkedudukan di Jakarta Pusat

2.1. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("Akta No. 3/2021") dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Jumlah Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia			

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0
- Saham Biasa Atas Nama Seri B Masyarakat	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing di bawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100
	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

*termasuk saham treasuri sebesar 748.282.500

Sehubungan dengan PMHMETD I, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 9 September 2021 pada pukul 16.00 WIB berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana dan hasil inbreng yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,- (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).

Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I

Seluruh pemegang saham berhak memperoleh HMETD sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya. Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Treasury stock tidak dialihkan menjadi program kepemilikan saham kepada pekerja Perseroan, sehingga tidak ada HMETD yang dilaksanakan dari jumlah **treasury stock** saat ini.

a) Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I Dengan Asumsi Seluruh HMETD Diambil Bagian oleh Seluruh Pemegang Saham

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi setiap pemegang saham hanya melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya dan tidak melaksanakan pembelian saham tambahan:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	1	50		1	50	
Nilai Nominal Rp50,00						
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950		299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Nilai Nominal Rp50,00						

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
Saham Seri A	1	50	0,00	1	50	0,00
Saham Seri B	<u>69.999.999.999</u> 70.000.000.000	<u>3.499.999.999.950</u> 3.500.000.000.000	56,75	<u>86.108.998.709</u> 86.108.998.710	<u>4.305.449.935.450</u> 4.305.449.935.500	56,82
3. Masyarakat						
Saham Seri B	52.597.527.500	2.629.876.375.000	42,64	64.701.720.394	3.235.086.019.700	42,69
Sub-jumlah	122.597.527.500	6.129.876.375.000	99,39	150.810.719.104	7.540.535.955.200	99,51
Saham treasury	748.282.500	37.414.125.000	0,61	748.282.500	37.414.125.000	0,49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	176.654.190.000	8.832.709.500.000		148.440.998.396	7.422.049.919.800	

b) Struktur Permodalan Perseroan Setelah PMHMETD I Dengan Asumsi HMETD Hanya Diambil oleh Negara RI dan Seluruh Pemegang Saham Lainnya Tidak Melaksanakan Haknya.

Berikut ini merupakan proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dengan asumsi HMETD hanya diambil bagian oleh Negara RI sesuai dengan porsi kepemilikannya:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD I			SETELAH PMHMETD I		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A	1	50		1	50	
Nilai Nominal Rp50,00						
Saham Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950		299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Nilai Nominal Rp50,00						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
Saham Seri A	1	50	0,00	1	50	0,00
Saham Seri B	<u>69.999.999.999</u> 70.000.000.000	<u>3.499.999.999.950</u> 3.500.000.000.000	56,75	<u>86.108.998.709</u> 86.108.998.710	<u>4.305.449.935.450</u> 4.305.449.935.500	61,75
2. Masyarakat						
Saham Seri B	52.597.527.500	2.629.876.375.000	42,64	52.597.527.500	2.629.876.375.000	37,72
Sub-jumlah	122.597.527.500	6.129.876.375.000	99,39	138.706.526.210	6.935.326.310.500	99,46
Saham treasury	748.282.500	37.414.125.000	0,61	748.282.500	37.414.125.000	0,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00	139.454.808.710	6.972.740.435.500	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Seri A	-	-		-	-	
Saham Seri B	176.654.190.000	8.832.709.500.000		160.545.191.290	8.027.259.564.500	

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021, sesuai dengan POJK No. 32/2015. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan porsi sahamnya, dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan (terdilusi) sampai dengan maksimum 18,62% (delapan belas koma enam dua persen).

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 22 September 2021 dimana HMETD yang tidak dilaksanakan setelah tanggal tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Perseroan bersama-sama Pemegang Saham Utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A tanggal 27 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mengatur mengenai jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham dalam modal disetor.

Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di BEI sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal setor bank yang bersangkutan, dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di BEI. Saat ini Perseroan telah memenuhi ketentuan PP No. 29/1999 tersebut.

Struktur PMHMETD I

Jenis Penawaran	:	Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Dengan Memberikan HMETD
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) setiap saham
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya Rp95.924.851.453.600,- (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Rupiah)
Rasio Konversi	:	1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama berhak atas sebanyak 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD.
Dilusi Kepemilikan	:	Maksimum 18,62% (delapan belas koma enam dua persen)
Tanggal RUPSLB yang menyetujui PMHMETD I	:	22 Juli 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	13 – 22 September 2021
Periode Pelaksanaan HMETD	:	13 – 22 September 2021
Tanggal Pra-Pencatatan Efek di Bursa	:	13 September 2021
Pencatatan	:	BEI

1.1 Keterangan tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

A. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September 2021 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-raguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut.

Sebagai ilustrasi, setiap pemegang saham Perseroan sebesar 1 lot atau 100 lembar saham, maka akan memperoleh HMETD sesuai rasio HMETD. Ilustrasi di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung HMETD yang diterima:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Jumlah kepemilikan saham 1 lot | = 100 lembar (a) |
| - Rasio Saham Lama | = 1.000.000.000 lembar (b) |
| - HMETD yang diterima atas Saham Lama | = 230.128.553 HMETD (c) |
| - HMETD yang diterima atas Saham Lama 1 lot | = (a/b) x c |

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah.

B. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli atau pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

C. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

D. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

F. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

G. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD	= Rp a
- Harga Pelaksanaan PMHMETD I	= Rp b
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I	= B
- Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
	= Rp a - Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham menjadi bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

I. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham yang berhak, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual, sehingga Perseroan hanya akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat. Selanjutnya HMETD dalam bentuk pecahan tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

J. Pencatatan Saham Baru di Bursa Efek

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Pengumuman Pencatatan Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) (Tercatat di Papan: Utama) No. Peng-P-00271/BEI.PP1/11-2017 tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia, sejumlah 1.233.458.100 (satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di Bursa Efek, di mana saham tersebut adalah atas nama Negara Republik Indonesia.

Setelah pelaksanaan PMHMETD I, jumlah saham yang diterbitkan dalam Perseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham, di mana akan terdapat tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek yaitu sebanyak 282.131.916 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) saham milik Negara RI. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29/1999, total jumlah saham Perseroan milik Negara RI yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMHMETD I adalah sebanyak-banyaknya 1.515.590.016 (satu miliar lima ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh ribu enam belas) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I.

K. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

L. Kinerja saham Perseroan di BEI

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (juta)
Juli 2020	3.190	3.030	3.190
Agustus 2020	3.800	2.990	3.980
September 2020	3.660	3.030	4.003
Oktober 2020	3.360	3.100	3.332
November 2020	4.320	3.290	4.865
Desember 2020	4.400	4.130	3.368
Januari 2021	4.890	4.170	3.690
Februari 2021	4.790	4.360	2.807
Maret 2021	4,850	4.400	2.539
April 2021	4.410	4.050	3.061
Mei 2021	4.260	3.870	3.378
Juni 2021	4.360	3.900	3.622
Juli 2021	3.990	3.710	2.411

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan terhadap saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Sehubungan dengan penerbitan HMETD, Perseroan telah memperoleh persetujuan berdasarkan: (a) PP No. 73/2021, dan (b) Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.06/2021 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Pembentukan *holding* BUMN ultra mikro, yang dilakukan melalui penyertaan saham Perseroan dalam:
 - a. Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan
 - b. PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM, sebagai hasil Inbreng saham Negara RI.
2. Selebihnya, dalam bentuk tunai, sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro, serta bisnis mikro dan kecil.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkannya pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 (“Peraturan I-E”), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD I setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil PMHMETD I tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil PMHMETD I seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I ini bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil PMHMETD I dan transaksi tersebut merupakan afiliasi atau benturan kepentingan dan transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Rencana pembentukan *holding* BUMN ultra mikro yang dilakukan melalui mekanisme Inbreng merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dikarenakan (i) pendapatan usaha Pegadaian dan PNM dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20% namun tidak melebihi 50% dari pendapatan usaha Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2021 dan (ii) nilai transaksi Inbreng melebihi 20% namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2021. Dengan demikian, rencana Inbreng bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan RUPS dan/atau RUPS Independen. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 0,0910% (nol koma nol sembilan satu nol persen) dari total dana dan hasil inbreng yang diperoleh dari PMHMETD I. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa konsultasi keuangan (*financial advisory fee*) sebesar 0,0528% (nol koma nol lima dua delapan persen) dari nilai emisi;
- Biaya jasa akuntan publik sebesar 0,0089% (nol koma nol nol delapan sembilan persen) dari nilai emisi;
- Biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,0167% (nol koma nol satu enam tujuh persen) dari nilai emisi;
- Biaya notaris sebesar 0,0105% (nol koma nol satu nol lima persen) dari nilai emisi;
- Biaya jasa penilai sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari nilai emisi;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0002% (nol koma nol nol nol dua persen) yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya pernyataan pendaftaran ke OJK sebesar 0,0008% (nol koma nol nol nol delapan persen) dari nilai emisi; dan
- Biaya lain-lain sebesar 0,0105% (nol koma nol satu nol lima persen), termasuk biaya pencatatan di BEI, auditor penjatahan, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD I ini.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

1. Latar Belakang Transaksi

Sesuai dengan aspirasi Perseroan untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* dan *Champion of Financial Inclusion*, Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan segmen ultra-mikro sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan di masa depan. Pemerintah Indonesia saat ini mendefinisikan segmen ultra mikro sebagai bisnis yang membutuhkan pembiayaan di bawah Rp10 juta. Pinjaman untuk segmen ini disalurkan melalui lembaga keuangan non bank (LKNB) dalam bentuk pinjaman individu atau kelompok, disertai dengan program pendampingan dan pelatihan wajib. Sebagian besar segmen ultra mikro adalah masyarakat yang baru memulai usaha kecil, membutuhkan pembiayaan dalam waktu singkat (3 – 6 bulan), dan limit di bawah Rp5 juta. Perseroan mendefinisikan segmen ultra mikro sebagai bisnis yang memperoleh pinjaman dengan batas maksimum Rp50 juta. Dengan definisi tersebut, program pemberdayaan yang menjadi ciri khas kredit bagi segmen ultra mikro dapat terus dilakukan untuk memastikan nasabah dapat “upgrade” diri ke segmen mikro sejalan dengan perkembangan usahanya.

Pada tahun 2019, segmen ultra mikro terdiri dari sekitar 65 juta unit usaha mikro yang mewakili 99% dari total jumlah usaha di Indonesia, menurut Kementerian Koperasi dan UKM. Segmen mikro dan ultra mikro berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Perseroan memperkirakan bahwa dari 45 juta usaha ultra-mikro di Indonesia pada tahun 2019, hanya sekitar 20 juta usaha ultra-mikro yang memperoleh akses pendanaan dari sumber formal seperti bank, BPR, lembaga keuangan lainnya, kredit mikro dan pinjaman berbasis kelompok, gadai dan koperasi. Sekitar 12 juta usaha ultra-mikro lainnya mendapatkan akses pendanaan dari sumber informal seperti pemberi pinjaman dan dari keluarga atau kerabat. Ada sekitar 14 juta usaha ultra-mikro yang belum memiliki akses pendanaan sama sekali, baik dari sumber formal maupun informal. Beberapa faktor penyebab terbatasnya akses pendanaan usaha ultra mikro diantaranya adalah belum meratanya cakupan layanan dari unit kerja lembaga keuangan formal. Peran agen keuangan belum optimal dalam memberikan layanan keuangan disebabkan oleh literasi keuangan yang rendah pada segmen ultra mikro untuk mengakses layanan keuangan secara digital. Dengan potensi pembiayaan bagi bisnis ultra-mikro, Perseroan percaya bahwa segmen ultra-mikro dapat menjadi sumber pertumbuhan bisnis baru yang berkelanjutan dimana segmen ultra-mikro dapat memperkuat kompetensi inti Perseroan di segmen usaha mikro dan kecil.

Aspirasi Perseroan di atas sejalan dengan visi Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah mencanangkan peningkatan aksesibilitas layanan keuangan segmen ultra mikro sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (“RPJMN”). Dari tujuh agenda pembangunan nasional yang tertera dalam RPJMN, tiga agenda memiliki fokus yang akan berdampak besar pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”), termasuk segmen ultra mikro sebagai berikut:

1. Agenda pertama yang berbunyi “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas” memiliki metrik yang jelas untuk peningkatan pertumbuhan segmen UMKM.
2. Agenda kedua yang berbunyi “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan” memiliki metrik pertumbuhan untuk seluruh wilayah di Indonesia, dengan fokus dalam membangun akses finansial di daerah terpencil di Indonesia, menurunkan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3. Agenda ketiga yang berbunyi “meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing” juga dapat membantu pertumbuhan segmen ultra mikro. Sebagai bagian dari agenda pembangunan, Pemerintah berusaha meningkatkan jumlah penduduk yang tercakup dalam jaminan sosial dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan subsidi tepat sasaran.

Demikian pula optimalisasi peran BUMN sangat dibutuhkan sebagai agen penciptaan nilai dan agen pembangunan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya pada sektor UMKM. Saat ini terdapat 3 BUMN yang memiliki peranan besar dalam pengembangan sektor UMKM khususnya segmen mikro dan ultra mikro, yaitu Perseroan, PT Pegadaian (Persero) (“Pegadaian”) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (“PNM”).

Perseroan telah terbukti mampu memberikan akses produk perbankan kepada segmen ultra mikro dan mikro selama lebih dari 100 tahun kepada lebih dari 120 juta nasabah. Pegadaian telah memberikan kredit berbasis gadai kepada lebih dari 10 juta nasabah ultra mikro di Indonesia. PNM telah menjadi salah satu pemimpin pinjaman berbasis kelompok dari segi basis nasabah dengan hampir 8 juta nasabah di Indonesia per 31 Maret 2021. Ketiga perusahaan tersebut memiliki 3 model bisnis yang berbeda untuk memenuhi mayoritas kebutuhan segmen ultra mikro hingga hari ini. Peran ketiga BUMN tersebut dalam pengembangan segmen ultra mikro akan dioptimalisasi melalui pembentukan ekosistem ultra mikro melalui skema *holding* dengan Perseroan sebagai induknya dan Pegadaian dan PNM sebagai anggota *holding*.

Sehubungan dengan itu, Perseroan merencanakan PMHMETD I dengan keterlibatan Negara RI di dalamnya melalui pelaksanaan HMETD dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, Negara RI akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya ("**Inbreg**") kepada Perseroan dalam:

1. Pegadaian, sejumlah 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian; dan
2. PNM, sejumlah 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Setelah transaksi Perseroan akan memiliki 99,99% saham pada masing-masing Pegadaian dan PNM, sedangkan Negara RI akan tetap memiliki 1 Lembar saham Seri A Dwiwarna pada masing-masing Pegadaian dan PNM.

Pembentukan *holding* ultra mikro juga dapat berdampak pada pemerataan akses keuangan terutama di segmen ultra mikro yang nantinya berkontribusi pada pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar kurang lebih 90% pada tahun 2024. Selain itu *holding* ultra mikro juga membantu penciptaan lapangan kerja khususnya di segmen ultra mikro yang merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Mekanisme mengenai rencana Inbreg oleh Negara RI telah sesuai dengan tata cara penyertaan modal negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, di mana salah satu sumber penyertaan modal dari Negara RI dapat berupa saham milik Negara RI pada BUMN lain. Pelaksanaan penambahan penyertaan modal negara melalui penyetoran dengan cara Inbreg oleh Negara RI dalam PMHMETD I ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.

2. Penjelasan tentang *Holding Ultra Mikro*

Secara umum, tujuan dari *holding* ultra mikro adalah untuk memperkuat pertumbuhan bisnis Perseroan dengan memperluas target segmen dan meningkatkan varian produk sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi Perseroan dan memberikan kontribusi positif kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Secara khusus, *holding* ultra mikro bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan mudah bagi segmen ultra mikro di Indonesia. Model bisnis Perseroan, Pegadaian, dan PNM akan saling melengkapi untuk melayani layanan yang lebih terintegrasi dalam tiga fase yaitu "*Empower, Integrate dan Upgrade*", sehingga dapat memberdayakan bisnis ultra mikro: PNM memberikan pemberdayaan awal kepada yang *unfeasible* dan *unbanked* sehingga nasabah dapat mendirikan usaha dan menjadi wirausaha mandiri (*Empower*); serta Perseroan dan Pegadaian memberikan akses yang lebih luas ke produk pinjaman dan layanan keuangan lainnya bagi nasabah ultra-mikro yang layak dan memenuhi syarat perbankan (*Integrate*). Sejalan dengan peningkatan kapabilitas bisnis, nasabah ultra mikro dapat melakukan *upgrade* untuk bergabung dengan segmen mikro (*Upgrade*).

Layanan keuangan yang terintegrasi akan diwujudkan melalui berbagai upaya sinergi dan kolaborasi oleh ketiga entitas dengan 6 *value proposition* utama yaitu:

1. Pilihan produk keuangan yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen ultra mikro
Ekosistem ultra mikro akan memberikan produk dan layanan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan mereka, antara lain pinjaman individual, pinjaman gadai dan pinjaman berbasis fidusia dengan memanfaatkan atau memodifikasi produk yang ada. Perseroan akan terus focus pada penyediaan pembiayaan individual melalui produk pinjaman mikro bank seperti pinjaman KUR bersubsidi bunga, semi agunan kupedes, pinjaman modal kerja dan produk yang baru diluncurkan, yang ketiga entitasnya akan dipasarkan secara bersama.
2. Akuisisi pelanggan bersama dengan memanfaatkan peran agen BRILink dan *platform* penjualan terintegrasi (UMi Corner)
Kombinasi bisnis ultra mikro akan mendapatkan keuntungan dari akuisisi pelanggan yang kuat melalui pendekatan akuisisi bersama dengan memanfaatkan peran agen BRILink dan *tools* terintegrasi (UMi Corner). Agen BRILink akan berperan sentral dan terintegrasi dalam *cross-selling* produk dan layanan Pegadaian dan PNM ke segmen ultra mikro dan mendorong akuisisi nasabah.

Selain itu, *Integrated Sales Platform ("ISP")* untuk produk ultra-mikro dapat diciptakan, di mana *platform* ini dapat memberikan informasi produk ultra-mikro yang komprehensif, alokasi dan pengiriman prospek, pelacakan aplikasi, kompilasi daftar pelanggan, dan pemantauan kinerja. *Platform* tersebut akan digunakan oleh tim *sales*, jaringan cabang, dan agen dari Perseroan, Pegadaian, dan PNM.

Pengembangan ISP akan memanfaatkan aplikasi Pegadaian dan PNM yang sudah ada yaitu BRI e-FORM, BRISPOT (aplikasi originasi pinjaman digital BRI), BRILink Mobile (aplikasi digital untuk Agen BRILink), Pegadaian e-form, Selena (sistem manajemen *pipeline* Pegadaian), agen Pegadaian dan Inisiasi Mekaar (aplikasi originasi pinjaman digital PNM). Dalam aplikasi ini akan dikembangkan menu pojok UMi yang akan membawa pengguna ke ISP.

Tim *sales* Perseroan, Pegadaian dan PNM akan menggunakan *platform* ini untuk mengirimkan prospek baik untuk produk Perseroan sendiri maupun produk entitas lain. Hal ini akan memudahkan tim *sales* untuk memberikan solusi yang paling tepat bagi pelanggan dan menjangkau lebih banyak pelanggan di segmen ultra mikro.

3. Titik akses pelanggan yang luas melalui *co-location*
Inisiatif *co-location* memanfaatkan jaringan kerja bersama antara Pegadaian dan PNM dalam bentuk Sentra Layanan Ultra Mikro atau *ultra micro service center*, dan mengoptimalkan agen BRILink sebagai titik akses untuk memberikan peningkatan penawaran layanan keuangan kepada pelanggan setiap perusahaan. Melalui inisiatif ini, Pegadaian dan PNM juga akan mendapatkan akses kepada nasabah baru di daerah-daerah yang biasanya tidak mereka operasikan atau memiliki jangkauan jika ketiga perusahaan tersebut beroperasi sendiri. Kombinasi bisnis ultra mikro akan memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan mudah kepada masyarakat melalui lebih dari 16.000 unit kerja dan lebih dari 440.000 agen BRILink di seluruh Indonesia.
4. Penyediaan akses terhadap ekosistem *Micro Payment* dan produk diluar perbankan
Nasabah Pegadaian dan PNM akan mendapatkan akses ke ekosistem pembayaran mikro Perseroan, sehingga memfasilitasi rangkaian transaksi dan layanan yang komprehensif kepada nasabah ultra-mikro. Dibandingkan dengan *platform* perbankan digital yang terbatas pada pelanggan ini sebelumnya, pelanggan akan menerima perluasan akses ke transaksi pembayaran non-tunai, termasuk tabungan, kartu debit, *internet banking*, *mobile banking*, dan fitur *e-wallet*. Pelanggan juga akan dapat melakukan transaksi lain seperti deposit, penarikan tunai, transfer uang dan pembayaran. Transaksi ini diaktifkan oleh prosesor seperti ATM, agen, kartu, *virtual* dan kode QR pembayaran, didukung oleh berbagai penyedia jaringan yang sudah terhubung ke sistem Perseroan, seperti Mastercard, Visa dan GPN.

Seiring berjalannya waktu, penawaran yang lebih canggih seperti asuransi mikro (asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti) dan produk investasi emas (Tabungan Pegadaian Emas, Pegadaian Mulia) dapat diperkenalkan secara bertahap seiring dengan meningkatnya akses keuangan dan kesadaran segmen ini. Metode penyampaian layanan melalui ekosistem akan memastikan pengalaman yang terintegrasi dan koheren untuk semua pelanggan ultra mikro.

5. *Data analytics* untuk meningkatkan produktivitas bisnis, meningkatkan efisiensi dan memperkuat kualitas pinjaman
Perseroan, Pegadaian dan PNM dapat saling memanfaatkan *database* nasabah ultra-mikro masing-masing untuk mengoptimalkan proses *cross-selling* dan akuisisi nasabah, serta memperkuat proses *underwriting* pinjaman di masing-masing entitas. Optimalisasi *database* akan memungkinkan ketiga entitas untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan, memberikan penilaian kepada pelanggan UMi, dan memberikan kemampuan transaksi komprehensif dan kemampuan penyesuaian dengan untuk mengintegrasikan solusi *cross-selling* dengan gaya hidup pelanggan. Hal ini diharapkan akan menguntungkan ketiga entitas dengan meningkatkan kualitas model *underwriting* untuk mengurangi biaya pembiayaan, mengoptimalkan kerjasama dengan tujuan akhir yaitu *cross-selling* dan memperkuat sistem peringatan dini dan sistem deteksi penipuan.
6. Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan untuk naik kelas dari segmen ultra mikro ke segmen mikro
Kombinasi bisnis ultra mikro akan memposisikan bisnis ultra-mikro, khususnya nasabah Pegadaian dan PNM, untuk bergabung di segmen mikro melalui inisiatif pemberdayaan usaha dan peningkatan kapabilitas bisnis. Beberapa inisiatif pemberdayaan nasabah ultra mikro tersebut antara lain mendorong nasabah PNM untuk menabung melalui pencairan non-tunai dan pembayaran pinjaman, melakukan pelatihan pengembangan bisnis, literasi keuangan dan digital *awareness*, mendorong *cross-selling* produk keuangan lainnya untuk meningkatkan kemandirian finansial dan membantu menyediakan akses ke pemasaran produk di pasar.

Program pemberdayaan ini akan mendukung pencapaian *integrated journey* bagi pelanggan ultra-mikro untuk ditingkatkan ke segmen mikro (*Empower, Integrate, Upgrade*). PNM pertama-tama akan memberdayakan nasabah ultra-mikro yang tidak layak dan *unbanked* untuk menjadi wirausaha mandiri. Pegadaian dan Perseroan selanjutnya akan melayani kebutuhan pinjaman individu para nasabah lulusan PNM yang telah menjadi layak dan *bankable* melalui penawaran produk yang lebih luas. Nasabah ultra-mikro diharapkan pada akhirnya menjadi dewasa dan ditingkatkan ke segmen mikro dengan Perseroan.

Pembentukan ekosistem ultra mikro diharapkan mampu menciptakan sinergi kepada ketiga entitas baik berupa peningkatan pendapatan (*revenue enhancement*) dan penurunan biaya (*cost reduction*), antara lain:

1. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di segmen mikro dan ultra mikro
Sinergi ini akan didorong oleh penawaran produk pembiayaan yang komprehensif, program akuisisi nasabah bersama yang intensif, integrasi data, dan kelulusan nasabah ultra mikro melalui pemberdayaan kesejahteraan.
2. Penurunan biaya pinjaman (*cost of fund*)
Pengurangan *cost of fund* Pegadaian dan PNM akan berasal dari perluasan akses ke sumber pendanaan yang lebih optimal, seperti suku bunga pinjaman yang kompetitif dari Perseroan dan penerbitan obligasi ESG murah sebagai sumber pendanaan alternatif. Sebagai lembaga keuangan *non-bank*, Pegadaian dan PNM belum mampu menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat, sehingga struktur pendanaannya terutama bertumpu pada pinjaman bank atau penerbitan surat berharga. Per 31 Maret 2021 baik Pegadaian maupun PNM memiliki *cost of fund* berturut-turut sebesar 6,31% dan 8,70%.

Bagi Perseroan, penurunan *cost of fund* akan diperoleh dari pertumbuhan yang lebih tinggi dari rekening tabungan yang didukung oleh akuisisi nasabah bersama di rekening tabungan dasar melalui penyaluran pinjaman melalui rekening tersebut untuk nasabah Pegadaian dan PNM. Nasabah tersebut juga akan memiliki akses ke ekosistem pembayaran mikro dan produk di luar perbankan tradisional, serta manfaat pemberdayaan kesejahteraan yang diharapkan dapat meningkatkan rasio CASA Perseroan.

3. Penurunan biaya operasional
Pengurangan biaya operasional akan didapat dari beberapa hal diantaranya dari infrastruktur dan sumber daya yang dioperasikan secara bersama-sama yang berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi bisnis melalui perluasan dan fasilitasi akses layanan keuangan melalui *co-location outlet* PNM dan Pegadaian dalam jaringan perbankan Perseroan, serta percepatan proses akuisisi pelanggan bersama melalui *platform* penjualan yang terintegrasi.

Per 31 Maret 2021, baik Pegadaian maupun PNM mencatatkan *Cost to Income Ratio* masing-masing sebesar 60,44% dan 81,06%, lebih tinggi dibandingkan Perseroan sebesar 41,71%. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ketiga entitas tersebut khususnya Pegadaian dan PNM untuk menciptakan kinerja bisnis yang lebih kuat bagi Perseroan secara grup.

4. Penurunan biaya kredit
Kombinasi bisnis ultra mikro akan memungkinkan ketiga entitas memperkuat proses akuisisi dan *underwriting* pinjaman dengan memanfaatkan kemampuan optimalisasi *database*, yang didukung oleh kemampuan digital dan analitik.

Model bisnis Pegadaian dan PNM yang unik dapat melengkapi *core competent* Perseroan di segmen mikro. Pegadaian dan PNM dapat memberikan nilai tambah dengan menawarkan produk dan layanan keuangan yang dapat diintegrasikan ke dalam satu ekosistem.

3. Beberapa Ilustrasi Rasio Operasi Paska Integrasi

Berikut adalah rasio yang dihitung berdasarkan laporan pro-forma 31 Maret 2021:

Rasio	Konsolidasi Perseroan	Pro-forma Konsolidasi Perseroan Paska Intergrasi
ROAE (<i>after tax</i>)	13,91%	14,56%
ROAA (<i>after tax</i>)	1,88%	2,05%

Keterangan:

ROAA (*after tax*) : Laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset (pendapatan yang disetahunkan)

ROAE (*after tax*) : Laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata ekuitas (pendapatan yang disetahunkan)

4. Rencana Integrasi Holding Ultra Mikro

Untuk menghasilkan dampak sinergi tersebut, Perseroan akan melaksanakan rencana integrasi yang komprehensif sebagai berikut:

1. Memperkuat proposisi produk dengan menawarkan rangkaian produk yang komprehensif dalam ekosistem, dan meluncurkan beberapa produk baru seperti *intraday loan* dan *purchase financing* yang memanfaatkan jaringan *supply chain* eksisting.
2. Meluncurkan program *cross-sell* yang dapat memperkuat hubungan bisnis dengan nasabah.
3. Memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan integrasi jaringan holding UMi melalui inisiatif *co-location*.

4. Mengembangkan *tools* ultra-mikro dan digital akuisisi lainnya dengan mengintegrasikan *lead management platform* untuk tenaga pemasar, dan menciptakan platform *self service digital* untuk nasabah yang telah memiliki pemahaman digital.
5. Meluncurkan program *agent-led acquisition* dengan memberdayakan para agen untuk menjadi *lead generator* nasabah potensial.
6. Membentuk *project management organization* untuk mengawal *progress* eksekusi dari pencapaian inisiatif strategis *holding* ultra mikro.
7. Mengoptimalkan data untuk ekosistem ultra mikro di seluruh entitas yang berfokus pada pemanfaatan data dan sistem analitik untuk memperoleh wawasan bisnis serta mendukung proses pengambilan keputusan.
8. Memperkuat model dan proses *credit underwriting* dan *collection* dengan memanfaatkan kemampuan analitik *database*.
9. Mengoptimalkan *funding* dengan meluncurkan program tabungan bagi nasabah Pegadaian dan PNM.
10. Meluncurkan program pemberdayaan sosial untuk meningkatkan literasi keuangan, memperbaiki stabilitas pendapatan dan peningkatan penetrasi digital khususnya segmen ultra mikro.

Inisiatif ekosistem ultra mikro tersebut di atas akan diimplementasikan dalam 3 fase utama yaitu:

1. **Set up the foundation (Tahun 1)** dengan membangun fondasi yang kuat melalui rencana pasca integrasi.
 - a) Membentuk tim *Integration Management Office (IMO)* untuk mengawal proses implementasi inisiatif strategis *holding* ultra mikro.
 - b) Memulai proses implementasi inisiatif *co-location* untuk memperluas jangkauan layanan.
 - c) Mengembangkan *digital acquisition sales platform* untuk memudahkan proses *cross-selling* Perseroan, Pegadaian dan PNM.
 - d) Memperkenalkan nasabah dengan rangkaian produk yang komprehensif dari Perseroan, Pegadaian dan PNM.
 - e) Membangun *core underlying capabilities* termasuk optimalisasi data, *process engineering*, dan *underwriting model*.
2. **Strengthen the core (Tahun 2)** untuk memastikan pencapaian sinergi.
 - a) Mengembangkan kanal digital untuk nasabah sehingga memudahkan akses layanan keuangan yang komprehensif.
 - b) Memperkuat portofolio produk Perseroan, Pegadaian dan PNM yang berfokus pada *core business* dari masing-masing entitas.
 - c) Memperkenalkan program pemberdayaan yang berfokus pada literasi finansial dan pendidikan digital.
 - d) Meluncurkan program CASA untuk mendapatkan nasabah tabungan baru.
 - e) Memperkuat *core underlying capabilities* termasuk integrasi data, *process engineering*, dan *underwriting model*.
3. **Scale up and sustain (Tahun 3 dan berikutnya)** untuk mencapai tujuan Perseroan yang berkontribusi pada pencapaian aspirasi inklusi keuangan di Indonesia.
 - a) Meluncurkan program pemberdayaan secara komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan nasabah, pertumbuhan bisnis, dan penetrasi digital.
 - b) Meningkatkan kemitraan dengan pemain strategis (misalnya, pemain yang berfokus pada telekomunikasi, *agriculture*, industri *life style & e-commerce* dan *merchant*) memanfaatkan basis pelanggan dan jaringan distribusi mitra untuk meningkatkan akuisisi, memperluas penyaluran pinjaman dan saluran pembayaran dan meningkatkan kapabilitas proses *underwriting* pinjaman melalui data alternatif.
 - c) Memanfaatkan data dan sistem analitik Perseroan untuk memperoleh wawasan bisnis serta mendukung proses pengambilan keputusan di Perseroan, Pegadaian dan PNM.

Rencana integrasi tersebut juga akan diperkuat dengan pengalaman Perseroan yang lebih dari 125 tahun melayani segmen mikro dan segmen ultra mikro, serta infrastruktur Perseroan yang memadai termasuk jaringan yang luas di seluruh Indonesia (seperti gerai fisik, *e-channel* dan *branchless banking*), sumber daya manusia serta strategi digital yang, secara bersama-sama merupakan model *hybrid bank* Perseroan, sangat sesuai dengan karakteristik segmen ultra mikro. Strategi ini telah memosisikan Perseroan sebagai *market leader* di sektor perbankan mikro di Indonesia dengan lebih dari 60% pangsa pasar industri pinjaman mikro (*standalone basis*, per 31 Maret 2021).

Kombinasi bisnis ultra mikro juga didukung oleh strategi manajemen Perusahaan Anak Perseroan yang akan fokus pada aspek-aspek utama berikut: (1) strategi kohesif di seluruh Perusahaan Anak untuk memastikan keselarasan strategis dengan Perseroan sebagai induk dan Perusahaan Anak untuk mengoptimalkan penciptaan nilai sinergi Perseroan sebagai grup, (2) eksekusi strategi yang kuat dengan memperkuat perencanaan, implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi Perusahaan Anak, dan (3) peluang pertumbuhan baru dengan mengoptimalkan sinergi dalam grup Perseroan. Strategi-strategi ini akan didukung oleh manajemen risiko terintegrasi dan inisiatif tata kelola, pengembangan IT terintegrasi (strategi One BRI IT, arsitektur dan *support*) serta *human capital* dan *culture* (One BRI Culture & Capability).

5. Pertimbangan dan Tujuan Transaksi

Secara umum, tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan bisnis Perseroan terutama di segmen mikro melalui pembentukan ekosistem ultra mikro dengan menambah portofolio perusahaan anak yang bergerak di segmen ultra mikro. Hal ini sangat diperlukan sebagai sumber pertumbuhan baru ke depan sehingga Perseroan dapat tumbuh berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Transaksi ini juga diharapkan mampu mendukung Perseroan dalam melakukan pengelolaan modal yang *prudent*, baik untuk memitigasi risiko yang tidak terprediksi dalam lingkungan yang menantang maupun untuk mendanai pertumbuhan bisnis di masa depan sehingga mampu memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham.

Selain bertujuan untuk memperkuat sumber pertumbuhan baru, transaksi ini juga sejalan dengan rencana Pemerintah dalam meningkatkan *financial inclusion*. Ekosistem ultra mikro bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada segmen ultra mikro di Indonesia. Dengan adanya ekosistem ini, bisnis model Perseroan, Pegadaian dan PNM yang saling melengkapi akan mampu memberikan *journey* layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro. Didukung oleh model bisnis pembiayaan kelompok, PNM akan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan pemberdayaan awal kepada kelompok masyarakat pra-sejahtera (*unfeasible* dan *unbanked*) agar dapat memiliki usaha dan menjadi wirausahawan mandiri. Perseroan dan Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan PNM melalui akses produk pinjaman dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang *feasible* dan *banked*. Sejalan dengan peningkatan kemampuan bisnis, nasabah ultra mikro dapat naik kelas menjadi segmen mikro.

Dengan demikian, Perseroan menganggap bahwa Pegadaian dan PNM memiliki model bisnis yang dapat melengkapi *core competence* Perseroan di segmen mikro. Model bisnis yang saling melengkapi tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu ekosistem. Lebih lanjut, Rencana Inbreng dilakukan sebagai langkah Pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat segmen ultra mikro terhadap produk finansial.

6. Obyek, Nilai dan Skema Rencana Transaksi

Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Negara RI, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 56,75% (lima puluh enam koma tujuh lima persen), akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas saham milik Negara RI sebagai berikut:

1. 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian; dan
2. 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

Sehubungan dengan nilai harga pasar wajar saham 99,99% saham dalam Pegadaian dan 99,99% saham dalam PNM, Penilai yang telah ditunjuk Perseroan yakni Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah menyatakan berdasarkan Laporan No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 dan Laporan No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 keduanya tertanggal 30 Juni 2021 bahwa nilai pasar wajar Pegadaian pada 31 Maret 2021 sebesar Rp48.670.527.621.242 dan nilai pasar wajar PNM pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp6.100.068.061.095. Hal ini juga memperhatikan keputusan Pemerintah sebagai pemegang saham yang akan melakukan penyetoran sesuai penilaian independen KJPP.

Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan inbreng atas nilai saham Pegadaian dan PNM serta eksekusi hak Pemegang Saham Publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp95.924.851.453.600,-. Nilai total PMHMETD I ini terdiri dari (i) nilai inbreng atas nilai saham Pegadaian dan PNM seluruhnya bernilai sekitar Rp54.770.595.614.000,- dan (ii) apabila seluruh Pemegang Saham Publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing maka perkiraan dana tunai yang dapat dihasilkan dari rencana PMHMETD I maksimal bernilai sekitar Rp41.154.255.839.600,-.

7. Keterangan Mengenai Perusahaan Sasaran atau Objek Transaksi

1. PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian")

Riwayat Singkat

Pegadaian, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana Pegadaian didirikan sebagai suatu Perusahaan Negara berdasarkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961, tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian dan sebagaimana terakhir kali diubah menjadi suatu Perusahaan Umum berdasarkan pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, tanggal 10 November 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan mengubah bentuk badan hukum Pegadaian dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan bentuk badan hukum Pegadaian tersebut kemudian dituangkan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 1 tanggal 1 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012.

Sejak pendirian, anggaran dasar Pegadaian telah mengalami perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir Pegadaian adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Pegadaian No. 3 tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AHU-0028534.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065614.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 8 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065614.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020 ("**Akta No. 3/2020**"). Berdasarkan Akta No. 3/2020, para pemegang saham Pegadaian telah menyetujui hal-hal sebagaimana berikut: (i) mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar tentang Maksud dan Tujuan; (ii) mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1) anggaran dasar tentang Direksi; (iii) mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (21) anggaran dasar tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi; dan (iv) mengubah ketentuan Pasal 12 ayat (12) anggaran dasar tentang Rapat Direksi.

Kegiatan dan Prospek Usaha

Pegadaian berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas dengan risiko rendah secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan. Bisnis yang dikembangkan oleh Pegadaian tidak hanya mengembangkan bisnis secara konvensional, namun juga mengembangkan bisnisnya dengan prinsip syariah.

Maksud dan tujuan Pegadaian sebagaimana termuat dalam Akta No. 3/2020, adalah menjalankan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah berbasis teknologi informasi/platform digital ("**TI**") dan non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pegadaian untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Pegadaian dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian dapat melaksanakan kegiatan usaha pergadaian, baik secara konvensional maupun Syariah, yang berbasis TI maupun non TI sebagai berikut:

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan
4. Pelayanan jasa taksiran dan sertifikasinya terhadap barang berharga.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Pegadaian, Pegadaian dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Kegiatan di luar usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee-based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, yaitu layanan pengiriman uang dan layanan transaksi pembayaran;
2. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan OJK yang dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi fitur produk usaha Pegadaian selain produk konvensional Pegadaian:
 - Produk Tabungan Emas
 - Kartu Tabungan Emas (dalam bentuk kartu kredit yang dijamin dengan deposit emas)
 - Produk rahn (rahn merupakan produk syariah Pegadaian) dengan sertifikat tanah sebagai jaminan.

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Pegadaian melalui usaha properti dengan mengoptimalkan aset strategis yang dimiliki dengan menyewakan gedung untuk berbagai keperluan (pernikahan, perkumpulan (reuni), rapat, seminar, dan lain-lain), dan sewa komersial (penyewaan toko dan penyediaan lahan untuk kegiatan ekonomi rakyat yang disebut sebagai Pasar Bersih Pegadaian).

Prospek Usaha

Pegadaian konsisten dengan mengembangkan bisnis dengan mencari pelanggan baru. Per 31 Maret 2021, Pegadaian memiliki total 14,2 juta nasabah gadai, 0,4 juta nasabah non-gadai dan 3,8 juta nasabah simpanan emas. Secara *year-on-year* dari 2018 sampai 2020, nasabah gadai, nasabah non-gadai dan nasabah simpanan emas tumbuh masing-masing sebesar 17,34%, 8,94%, dan 39,66%.

Pegadaian menargetkan untuk meningkatkan pangsa pasar melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai ekonomi dan sosial, yaitu dengan melakukan integrasi/sinerji layanan ultra mikro, perluasan inklusi keuangan, serta mendukung program *sustainable development goals*.
2. Meningkatkan *customer experience*, melalui peningkatan interaksi dengan nasabah untuk menjaga loyalitas nasabah, standarisasi *outlet* dan layanan, serta optimalisasi *customer touchpoint* melalui teknologi dan layanan yang mampu memberikan *seamless*, efektivitas dan efisiensi layanan.
3. Diversifikasi produk dan customer, dengan memfokuskan pada *specific target market*, pengembangan *fee based*, serta *monetizing* nasabah eksisting.
4. Pengembangan budaya dan kemampuan organisasi yang kuat, memberdayakan bakat internal dan memperkuat infrastruktur serta pengembangan digital; dan
5. Inovasi berkelanjutan dengan terus beradaptasi dengan industri agresif yang berfokus pada perluasan produk dan layanan yang menghasilkan *customer value* dan berperan aktif sebagai bagian dari ekosistem untuk masyarakat dan UMKM.

Faktor Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pegadaian tidak terlepas dari berbagai macam risiko, yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum. Pesatnya perkembangan lingkungan internal dan eksternal Pegadaian menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha yang dihadapi oleh Pegadaian.

Pengelolaan risiko dimulai dari proses identifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko agar tidak berdampak besar terhadap sasaran/tujuan strategis Pegadaian. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat melindungi perusahaan dari ancaman kegagalan dalam melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis serta memberikan nilai tambah (*value added*) yang dapat digunakan dalam setiap pengambilan keputusan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Pegadaian yang dapat mempengaruhi kinerja Pegadaian secara umum dan terbagi menjadi 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola oleh Pegadaian yakni sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit dapat timbul karena kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Pegadaian. Sebagai contoh, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap nasabah khususnya yang bergerak di sektor mikro dan UMKM sehingga mengakibatkan peningkatan *Loan to Asset Ratio* dan NPL untuk produk pembiayaan akibat menurunnya kemampuan *Repayment Capacity* (kapasitas pelunasan) untuk membayar lunas atau membayar cicilan kredit dan eksekusi barang jaminan kurang optimal. Jika Pegadaian tidak mampu mengelola risiko kredit, maka bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi dapat terpengaruh secara material.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional dapat timbul karena kinerja yang tidak tepat atau kegagalan proses internal, orang, sistem teknologi informasi termasuk risiko *cybersecurity* dan pengambilan data secara ilegal, dan/atau kejadian yang berasal dari luar lingkungan Pegadaian, yang secara langsung atau tidak langsung dapat berimbas pada operasional Pegadaian dan menimbulkan kerugian bagi Pegadaian. Meskipun Pegadaian telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi potensi risiko operasional, seperti penurunan harga emas, penerapan sistem pengawasan oleh Unit Audit Internal, penerapan pengawasan yang ketat oleh Kepala Unit Kerja, dan penggunaan teknologi CCTV, Pegadaian tidak dapat menjamin bahwa risiko operasional ini tidak akan terjadi. Jika harga emas mengalami penurunan maka Standar Estimasi Logam Emas yang digunakan juga akan turun sehingga akan berdampak pada pendapatan Pegadaian yang pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan Pegadaian. Selanjutnya, faktor eksternal seperti bencana, baik alam maupun buatan, dapat menimbulkan risiko dalam menjaga kelangsungan operasi Pegadaian.

Di masa pandemi COVID-19, operasional bisnis Pegadaian tidak bisa berjalan maksimal karena kurangnya sumber daya manusia akibat semakin banyaknya pegawai operasional yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, terdapat penutupan sementara di beberapa gerai akibat kegiatan sterilisasi dan terbatasnya kegiatan usaha (pelayanan, program pemasaran, program penjualan, dan lain-lain) akibat kebijakan PPKM oleh Pemerintah. Program pemasaran dan penjualan lebih rendah dari yang diharapkan, menyebabkan penurunan *outstanding* pinjaman yang signifikan dan penurunan pendapatan serta keuntungan bagi Pegadaian.

3. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak terhadap dimensi sosial dan ekonomi di seluruh dunia termasuk bagi Indonesia. Perlambatan ekonomi Indonesia menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Pegadaian. Bisnis Pegadaian terpengaruh jika tidak dapat membuat dan/atau menerapkan keputusan strategis untuk mengatasi peningkatan persaingan di pasar ini.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, dan mempengaruhi aset, kewajiban, posisi ekuitas dan/atau rekening administratif Pegadaian termasuk transaksi derivatif. Risiko pasar utama yang dihadapi Pegadaian antara lain fluktuasi harga emas dan perubahan nilai tukar Rupiah. Pegadaian telah terkena imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah pada triwulan II tahun 2021 akibat melemahnya perekonomian Indonesia akibat merebaknya pandemi COVID-19 di samping fluktuasi harga emas. Selain itu, kenaikan suku bunga pinjaman bank berdampak pada Pegadaian karena kenaikan biaya modal sehingga mempengaruhi laba bersih Pegadaian.

5. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan Pegadaian untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber arus kas dan/atau dari instrumen keuangan likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Pegadaian. Peningkatan rasio aset lancar terhadap utang lancar Pegadaian dan rasio utang terhadap modal dapat mengakibatkan tidak tersedianya pendanaan dan modal untuk memenuhi kebutuhan ekspansi usaha dan kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, Pegadaian mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Setiap kendala atau keterbatasan likuiditas signifikan dapat berdampak material yang merugikan terhadap bisnis Pegadaian, kondisi keuangan dan hasil operasi.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul karena ketidakmampuan Pegadaian untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegadaian berkewajiban untuk memberikan pelaporan secara berkala antara lain karena persyaratan peraturan, persyaratan perizinan, dan keputusan pengadilan. Pegadaian dapat menghadapi potensi keterlambatan pelaporan ke regulator terkait karena kurangnya pemantauan dari unit kerja terkait yang dapat mengakibatkan Pegadaian menerima peringatan atau denda. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Pegadaian.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kekurangan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian. Terdapat paparan berupa kasus litigasi yang melibatkan Pegadaian dan nasabahnya serta pihak ketiga lainnya, serta gugatan perdata yang belum terselesaikan dan putusan pengadilan yang merugikan Pegadaian. Setiap kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berdampak material yang merugikan bagi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Pegadaian.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul karena menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan akibat publisitas negatif terkait kegiatan usaha Pegadaian, atau persepsi negatif terhadap Pegadaian sebagai akibat perampokan, kegagalan sistem operasional, dan keluhan pelanggan terhadap produk atau layanan. Risiko reputasi yang sering mengancam Pegadaian adalah menurunnya citra Pegadaian di mata *stakeholders*. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab risiko ini, seperti keluhan pelanggan terhadap penggunaan Aplikasi Pegadaian Digital, meningkatnya keluhan pelanggan di media sosial atau surat dari pembaca terkait layanan Pegadaian dan juga berita negatif tentang Pegadaian. Meningkatnya jumlah keluhan nasabah mengakibatkan menurunnya reputasi Pegadaian.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 16 Juni 2016 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016, dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 29 Januari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pegadaian pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Negara RI			
- Saham biasa terdiri dari :			
- Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,000004
- Saham seri B	24.999.999	24.999.999.000.000,-	99,999996
Jumlah Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000.000,-	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara RI			
- Saham biasa terdiri dari :			
- Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,000016
- Saham seri B	6.249.999	6.249.999.000.000,-	99,999984
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.250.000	6.250.000.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam portepel	18.750.000	18.750.000.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 8 Maret 2021 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147484 tanggal 8 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043021.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 8 Maret 2021 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 April 2021 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0263157 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076290.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pegadaian, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Loto Srinaita Ginting
Komisaris	:	Otok Kuswandar
Komisaris	:	Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris	:	Sudarto
Komisaris	:	Rini Widyantini
Komisaris Independen	:	Makmur Keliat
Komisaris Independen	:	Muhammad Sulhan Fauzi

Direksi

Direktur Utama	:	Kuswiyoto
Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko	:	Ninis Kesuma Adriani
Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan	:	Damar Latri Setiawan
Direktur Umum	:	Gunawan Sulisty
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	:	Harianto Widodo
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	:	Teguh Wahyono
Direktur SDM	:	Ridwan Arbian Syah*

*) dalam proses memperoleh persetujuan *fit and proper test* OJK.

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Pegadaian dan anak perusahaan Pegadaian. Informasi keuangan pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan auditan konsolidasian interim Pegadaian pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan laporan keuangan auditan konsolidasian Pegadaian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 30 April 2021, 29 Januari 2021 dan 31 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Drs M.Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (AP.0222).

Informasi untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 telah disajikan dari Laporan keuangan konsolidasi Grup Pegadaian yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 (muncul sebagai pembanding atas laporan keuangan konsolidasi interim Grup Pegadaian pada dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021). Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2020 telah direview sesuai dengan Standar Perikatan Review 2410, “Reviu Informasi Keuangan Interim yang Dilakukan oleh Auditor Independen Entitas” (“SRE 2410”).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Jumlah Aset	72.193.827	71.468.960	65.324.177	
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	58.303.268	57.474.599	50.843.920	
Jumlah Liabilitas	46.682.645	46.865.344	42.263.867	
Jumlah Ekuitas	25.511.182	24.603.616	23.060.310	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	5.453.974	5.029.931	21.964.403	17.674.527
Beban usaha	4.520.495	3.879.350	19.173.144	13.485.100
Laba usaha	933.479	1.150.581	2.791.259	4.189.427
Laba sebelum pajak penghasilan	939.076	1.155.993	2.873.290	4.211.866
Laba bersih tahun/periode berjalan	705.460	809.075	2.022.447	3.108.078
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	907.566	809.075	1.835.812	4.331.432

*tidak diaudit

Tabel Rasio

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Keuangan				
Rasio imbal hasil aset (ROA)	3,91%	2,83%	4,76%	
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	11,06%	8,22%	13,48%	
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	82,88%	87,29%	76,30%	
Gearing Ratio (x)	1,57x	1,64x	1,61x	
Non Performing Loan (NPL) (%) – Gross*	3,59%	1,01%	1,75%	

*Perhitungan NPL menggunakan kolektibilitas macet untuk usaha gadai dan kolektibilitas kurang lancar, kolektibilitas diragukan, dan kolektibilitas macet untuk usaha non-gadai.

ROA 31 Maret 2021: ((Laba bersih periode berjalan / 3) x 12/ Jumlah Aset)

ROE 31 Maret 2021: ((Laba bersih periode berjalan / 3) x 12/ Jumlah Ekuitas)

ROA: (Laba bersih tahun berjalan / Jumlah Aset)

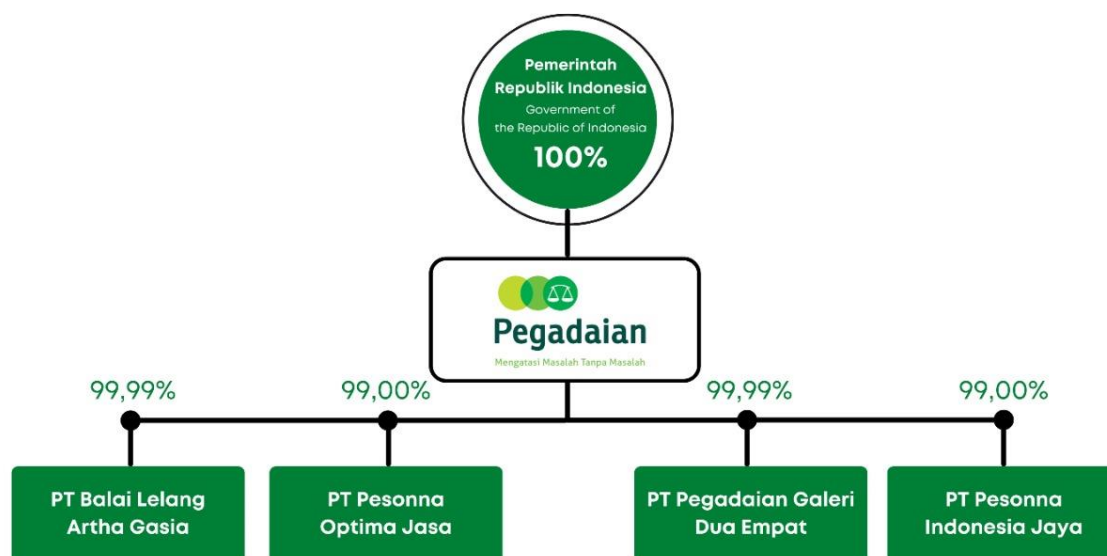
ROE: (Laba bersih tahun berjalan / Jumlah Ekuitas)

BOPO: (Beban Usaha / Pendapatan Usaha)

Gearing Ratio: (Utang Berbunga – Kas dan Setara Kas) / Jumlah Ekuitas

NPL - Gross: (Jumlah NPL / Jumlah Pinjaman yang Diberikan)

Struktur kepemilikan Pegadaian dan perusahaan anak Pegadaian adalah sebagai berikut:



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Oleh karena itu, Pegadaian menerapkan strategi pengelolaan SDM dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam merespon tantangan dan menyesuaikan perkembangan industri pergadaian yang siap dengan era industri 4.0.

Pegadaian berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM yang dimilikinya agar dapat menunjang pencapaian visi Pegadaian, yaitu “Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”. Komitmen tersebut bahkan dengan tegas dituangkan dalam salah satu butir misi Pegadaian, yaitu “memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui SDM yang profesional berbudaya kinerja baik”.

2. Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Karyawan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pekerja Tetap	12.668		12.709	12.745
Pekerja Kontrak	1.643		1.528	1.290
<i>Outsourcing</i>	16.787		16.576	16.862
Jumlah	31.098		30.813	30.897

3. Jaringan Kerja dan Layanan

Untuk menjangkau nasabah yang lebih luas, Pegadaian terus meningkatkan penetrasi bisnis ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, Pegadaian memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 61 Kantor Area, 4.086 outlet yang terdiri dari 642 Kantor Cabang dan 3.444 Kantor Unit Pelayanan Cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Tabel Sebaran Unit Kerja per Wilayah

Unit Kerja	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Kantor Pusat	1		1	1
Kantor Wilayah	12		12	12
Kantor Area	61		61	61
Kantor Cabang	540		540	540
Kantor Unit	2.887		2.888	2.919
Kantor Cabang Syariah	102		102	102
Kantor Unit Syariah	557		557	562
Jumlah Unit Kerja Operasional	4.160		4.161	4.197

Tabel Sebaran Unit Kerja per Pulau

Pulau	31 Maret 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Unit Kerja	Agen	Unit Kerja	Agen	Unit Kerja	Agen
Sumatera	746	3.167	747	3.459	748	2.132
Jawa – selain DKI Jakarta	1.582	6.126	1.582	6.292	1.598	3.799
DKI Jakarta	350	1.291	350	1.481	368	593
Kalimantan	341	1.012	341	1.008	341	734
Sulawesi	582	2.214	582	2.243	583	1.350
Bali	139	463	139	465	139	208
Nusa Tenggara	293	1.162	293	1.016	293	667
Maluku	52	98	52	102	52	49
Papua	75	223	75	247	75	142
Jumlah	4.160	15.756	4.161	16.713	4.197	9.674

Tabel Jumlah Agen

Agen	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total	15.756	16.713	16.713	9.674

4. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak Pegadaian

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pegadaian memiliki 4 perusahaan anak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Kontribusi Terhadap Pendapatan Pegadaian	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Balai Lelang Artha Gasia ("BLAG")	Jasa lelang	99,99%	2000	-	2000	Tidak Beroperasi*
2.	PT Pesonna Indonesia Jaya	Perhotelan, Properti, Jasa Konstruksi, dan Travel Manajemen Pengelola The Gade Cafe	99,00%	2015	0,32%	2015	Beroperasi
3.	PT Pesonna Optima Jasa	Penyedia Jasa Outsourcing, Jasa Rental, Ekspedisi, dan Jasa Umum Lainnya	99,00%	2014	4,34%	2014	Beroperasi
4.	PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Perdagangan Emas, Perhiasan dan Batu Mulia	99,999%	2018	31,44%	2018	Beroperasi

*Proses untuk mendapatkan persetujuan RUPS Pegadaian atas likuidasi BLAG sedang berlangsung. BLAG telah membekukan semua operasinya sejak 2017 karena kinerja keuangan yang buruk.

PT Balai Lelang Artha Gasia tidak lagi beroperasi disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Sejak berdirinya pada tahun 2000 sampai dengan saat ini, BLAG relatif belum dapat memberikan kontribusi kepada Pegadaian dan terus mengalami penurunan kinerja bahkan kerugian terutama pada beberapa tahun terakhir sebelum akhirnya diputuskan untuk dilakukan beku operasi pada tahun 2017. Hal tersebut dapat tercermin pada kinerja keuangan BLAG di mana sampai dengan Desember 2017 membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp2,12 miliar.
- Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keberlangsungan BLAG, Manajemen Pegadaian selaku Pemegang Saham mayoritas telah melakukan kajian kelayakan dan didapatkan hasil bahwa cukup banyak prasyarat (*critical success factor*) yang dibutuhkan untuk mengembangkan BLAG, baik terkait permodalan maupun sumber daya lainnya. Namun disisi lain, potensi *income* yang akan diperoleh BLAG dinilai kurang signifikan, sehingga tidak sebanding atas pemenuhan *critical success factor* sebagaimana dimaksud.
- Selain kajian keberlangsungan BLAG, Manajemen Pegadaian telah melakukan kajian perubahan peruntukkan Perusahaan dan didapatkan hasil bahwa perubahan peruntukkan BLAG tidak *feasible* untuk dilakukan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Manajemen Pegadaian memutuskan untuk mengusulkan likuidasi BLAG dan saat ini prosesnya sedang berjalan untuk dimintakan persetujuan dari RUPS Pegadaian.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai perusahaan anak Pegadaian yang dikonsolidasikan terhadap Pegadaian:

a. PT Pesonna Indonesia Jaya (“PIJ”)

Umum

PIJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 6 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005845.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0016098.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015.

Anggaran dasar PIJ terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 22 November 2019, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098438.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0228070.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 27 November 2019.

PIJ berkantor pusat di Jl. Salemba Raya No. 02, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan PIJ adalah bergerak dalam bidang-bidang (i) penyediaan akomodasi; (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; (iii) aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya; (iv) aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; (v) penyediaan makanan dan minuman; (vi) perdagangan eceran bukan mobil dan motor; (vii) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (viii) aktivitas penyediaan jasa untuk gedung dan pertamanan; (ix) aktivitas administrasi kantor, penunjang kantor dan penunjang usaha lainnya; (x) *real estate*; (xi) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (xii) aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya; (xiii) aktivitas arsitektur dan keinsinyuran analisa dan uji teknis; (xiv) konstruksi gedung; (xv) konstruksi bangunan sipil; (xvi) konstruksi khusus; dan (xvii) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PIJ yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham PIJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	%
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	
Pegadaian	49.500	49.500.000.000	99,00
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	500	500.000.000	1,00

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000,00	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PIJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ridwan Arbian Syah

Direksi

Direktur : Sriyani

b. PT Pesonna Optima Jasa ("POJ")

Umum

POJ didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 19 November 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-35439.40.10.2014 tanggal 19 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120662.40.80.2014 tanggal 19 November 2014.

Anggaran dasar POJ terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 22 November 2019, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098455.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0228101.AH.01.TAHUN 2019 tanggal 27 November 2019.

POJ berkantor pusat di Jl. Kramat Raya 162, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan POJ adalah bergerak dalam bidang-bidang (i) aktivitas ketenagakerjaan; (ii) aktivitas keamanan dan penyelidikan; (iii) aktivitas administrasi kantor, penunjang kantor dan penunjang usaha lainnya; (iv) aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dan personil domestik; (v) aktivitas penyediaan jasa untuk gedung dan pertamanan; (vi) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (vii) reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; (viii) aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang berhubungan dengan itu; (ix) aktivitas administrasi kantor pusat dan konsultasi manajemen; (x) perdagangan, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor (xi); aktivitas pos dan kurir; (xii) aktivitas angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa; (xiii) periklanan dan penelitian pasar; (xiv) pendidikan; (xv) perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (xvi) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (xvii) aktivitas penerbitan; (xviii) industri percetakan dan reproduksi media rekaman; (xix) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; (xx) aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisa dan uji teknis; (xxi) real estat; (xxii) konstruksi gedung; (xxiii) konstruksi khusus; dan (xxiv) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki POJ untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham POJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp 1.000.000,00	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	
Pegadaian	99.000	99.000.000.000	99,00

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp 1.000.000,00	%
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	1.000	1.000.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	100,00
	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi POJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Alfian Noor

Direksi

Direktur Utama : Syahrul Rusli

Direktur : Yul Afian

c. PT Pegadaian Galeri Dua Empat ("PGDE")

Umum

PGDE didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 1 tanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037424.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0103659.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Anggaran dasar PGDE terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 22 November 2019, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098421.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0228025.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 27 November 2019.

PGDE berkantor pusat di Gedung Wisma Bhakti Mulia, Jl. Kramat Raya No. 160, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan PGDE adalah bergerak dalam bidang – bidang (i) perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (ii) perdagangan eceran, bukan mobil dan motor; (iii) reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; (iv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (v) industri logam dasar; (vi) industri pengolahan lainnya; (vii) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun; (viii) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (ix) aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis; (x) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; dan (xi) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PGDE untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham PGDE pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	132.700	132.700.000.000	
Pegadaian	132.699	132.699.000.000	99,999
POJ	1	1.000.000	0,001

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	132.700	132.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PGDE pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Agus Priyabodo

Direksi

Direktur : Arifmon

2. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) ("PNM")

Riwayat Singkat

PNM didirikan khusus sebagai perusahaan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 1999 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Ida Sofia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah Nomor 4758/BH.09.05/VIII/99 dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09051837708 tanggal 27 Agustus 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 5681 tanggal 10 September 1999 ("**Akta Pendirian PNM**").

Anggaran Dasar PNM sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PNM telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PNM No. 12 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021 ("**Akta No. 12/2021**"). Berdasarkan Akta No. 12/2021, pemegang saham PNM telah menyetujui, di antaranya, peningkatan modal ditempatkan dan disetor PNM dari semula sebesar Rp 2.300.000.000.000 menjadi sebesar Rp 3.800.000.000.000, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PNM.

Maksud dan tujuan PNM sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan PNM No. 42 tanggal 29 September 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020052.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0093860 tanggal 28 Oktober 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128107.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 ("**Akta No. 42/2016**") adalah melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PNM dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

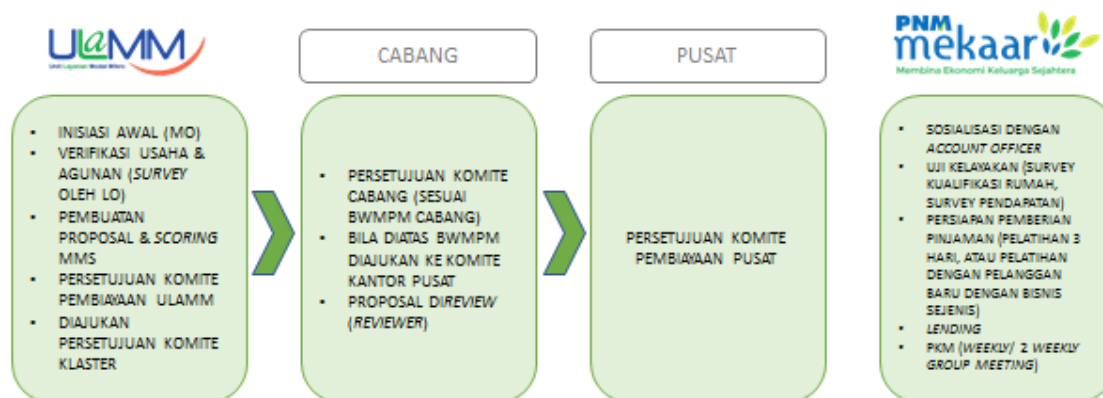
Kegiatan dan Prospek Usaha

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh PNM dan perusahaan anak PNM adalah jasa pembiayaan, jasa manajemen dan pembiayaan modal ventura.

Kegiatan usaha PNM dan perusahaan anak PNM berfokus pada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi ("**UMKMK**"). PNM bergerak dalam bidang jasa pembiayaan dan juga jasa manajemen untuk kreditur UMKMK. PNM memiliki dua perusahaan anak, PT PNM Investment Management, yang memberikan jasa manajemen investasi dan PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital yang bersama dengan PNM menyediakan jasa modal ventura untuk Usaha Kecil, Medium dan korporasi. PNM juga menjalankan usaha jasa pembiayaan secara langsung kepada usaha ultra-mikro yang dijalankan perempuan melalui Mekaar (*group based lending*) dan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan juga secara langsung melalui Bank Pembiayaan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S). Melalui ULaMM dan Mekaar, PNM memberdayakan nasabah-nasabahnya dengan memberikan dukungan finansial dan membantu nasabah-nasabah membangun kapasitas bisnis untuk kemajuan masa depan. PNM merupakan sumber pendapatan utama dari konsolidasian PNM dan perusahaan anak PNM, menghasilkan lebih dari 90% pendapatan PNM dan perusahaan anak PNM.

PNM menjalankan usaha jasa pembiayaan secara langsung melalui UlaMM dan Mekaar, serta secara tidak langsung melalui Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/S), Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S) lainnya, termasuk pembiayaan channeling melalui LKM/S dan pembiayaan kredit melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Proses Pembiayaan Mikro adalah sebagai berikut:



Prospek Usaha PNM

Sesuai APBN 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% dan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 65%. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih berdampak pada ekonomi pada tahun 2021, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% *year-on-year*. Sektor UMKM ini rentan terhadap perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, karena mempekerjakan sekitar 97% dari tenaga kerja Indonesia dengan jumlah UMKM sekitar 64 juta unit (menurut data dari Bloomberg, per Agustus 2021). Menanggapi krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19, manajemen PNM terus berupaya membantu pengusaha ultra-mikro dan UMK nasabah PNM menghadapi krisis.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19, PNM telah mengambil langkah-langkah strategis termasuk relaksasi kewajiban pembayaran kembali pelanggan yang terkena dampak dan pengurangan kegiatan pelatihan kelompok untuk pekerja. Dari sisi operasional dan manajemen risiko, langkah-langkah yang dilakukan antara lain: mitigasi risiko melalui pemetaan wilayah terdampak dan pelanggan, mengurangi kegiatan operasional baik dari segi jumlah pekerja melalui mekanisme *work from home* dan pengurangan jam operasional yang berlaku baik di kantor pusat maupun seluruh jaringan kantor layanan PNM di seluruh Indonesia yang berjumlah 3.424 kantor.

Di tengah kondisi ekonomi saat ini PNM berhasil menjangkau 8.869.081 nasabah aktif PNM Mekaar per tanggal 31 Maret 2021. Berbagai langkah telah dan akan terus dilakukan oleh PNM untuk membantu nasabah dalam bertransaksi ditengah kondisi pandemi COVID-19. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, PNM memiliki target untuk terus fokus pada pemberdayaan pelanggan dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah untuk mengembangkan, memajukan dan memelihara UMKM.

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan dan pengembangan *Human Capital* seluruh Insan PNM dirumuskan secara komprehensif dan ditingkatkan secara berkala untuk mewujudkan visi PNM menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi UMKM yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perusahaan berkomitmen untuk pengembangan organisasi serta pemenuhan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan bisnis PNM untuk mendukung peningkatan efektivitas pengembangan bisnis dan operasional. Peningkatan peran *Human Capital* PNM dalam menunjang strategi bisnis khususnya melalui peningkatan kompetensi *digital* dan transformasi Teknologi Informasi yang lebih fundamental disertai penguatan pengelolaan *Human Capital* yang fokus dalam menghadapi era digitalisasi dan generasi milenial optimis akan dapat menangkap berbagai peluang sehingga mampu bertumbuh dengan sangat baik.

Wujud komitmen PNM dalam mengembangkan *human capital* ini dalam upaya mendukung transformasi *digital* perseroan dengan upaya memperkuat fundamental bisnis untuk mengelola tantangan bisnis ke depannya, dalam membantu pelaku UMKM meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKM guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan PNM dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian bangsa.

Profil SDM

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kpegawaian:

Status Karyawan	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	3.629	3.683	3.456
Pekerja Kontrak	5.508	5.346	4.851
<i>Outsourcing</i>	41.455	40.098	30.958
Jumlah	50.582	49.127	38.905

Faktor Risiko

1. Risiko Pembiayaan/ Risiko Kredit

Risiko kredit PNM timbul sebagai akibat dari pinjaman yang diberikan melalui ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro) dan pembiayaan PNM Mekaar kepada Usaha Kecil dan Mikro (“UKM”).

Dalam menjalankan kegiatan utama PNM, yang fokus pada pemberian pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil, risiko kredit utama yang dihadapi PNM adalah ketidakmampuan nasabah UKM untuk melunasi utang, baik pokok maupun bunga pinjaman. Risiko ini timbul jika pembiayaan kepada nasabah tidak dikelola dengan hati-hati atau proses penentuan kelayakan nasabah tidak dikelola dengan baik sehingga mengakibatkan piutang pembiayaan kepada nasabah tidak tertagih dan peningkatan piutang tak tertagih yang pada gilirannya berdampak buruk pada laba bersih PNM. Selain itu, eksposur industri terbesar PNM dalam portofolio kreditnya adalah industri perdagangan, yang menciptakan risiko kredit tambahan bagi PNM. Jika PNM tidak dapat mengelola risiko kreditnya, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasinya dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila kondisi ekonomi yang merugikan dengan tingkat suku bunga tinggi terjadi secara berkepanjangan dan mengakibatkan lembaga keuangan memperketat kebijakan kredit yang berdampak pada keterbatasan ketersediaan likuiditas. Hal ini tentu memengaruhi kemampuan PNM untuk menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan. Tidak tercapainya target penyaluran pembiayaan sesuai rencana kerja PNM secara langsung berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan. Kendala atau keterbatasan likuiditas yang signifikan dapat berdampak material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi PNM.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yang meliputi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Risiko pasar yang memiliki dampak langsung bagi PNM adalah perubahan tingkat suku bunga, khususnya apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada naiknya beban dana PNM. Perubahan material dalam kondisi pasar dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi PNM.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh tidak memadainya atau kegagalan atau kesalahan proses, manusia, dan sistem secara internal atau ketaklayakan atau kegagalan dalam proses, manusia, dan sistem atau dari kejadian eksternal. Kejadian risiko operasional dapat mengakibatkan kerugian material yang berpengaruh terhadap penurunan laba PNM dan kerugian immaterial berupa reputasi PNM dan dapat menimbulkan tuntutan hukum kepada PNM dari pihak luar yang merasa dirugikan. Jika PNM tidak dapat mengelola risiko operasionalnya, hal itu dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasinya.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna, ketidaksanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi PNM. Setiap litigasi atau perselisihan material dapat memiliki dampak material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi PNM.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan/*stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PNM. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi antara lain: citra dan konflik internal. Ancaman apa pun yang ada maupun belum ada terhadap reputasi PNM dapat memiliki dampak material yang merugikan terhadap bisnis dan operasi PNM.

7. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko strategis: visi perusahaan, rencana strategis dan peluncuran produk baru. Kegagalan PNM untuk berhasil menerapkan strategi dan mengatasi risiko strategis, serta membuat keputusan bisnis yang tidak sejalan dengan perubahan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PNM dan memiliki dampak material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasinya.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat PNM tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kepatuhan adalah: perubahan peraturan eksternal, komunikasi internal, budaya disiplin karyawan, dan infrastruktur. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan dapat berdampak material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi PNM.

Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 12/2021 dan Daftar Pemegang Saham tertanggal 27 Januari 2021, struktur permodalan dan pemegang saham PNM pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Negara RI			
- Saham biasa terdiri dari :			
- Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,00001
- Saham seri B	9.199.999	9.199.999.000.000,-	99,99999
Jumlah Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000,-	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Negara RI			
- Saham biasa terdiri dari :			
- Saham seri A Dwiwarna	1	1.000.000,-	0,00003
- Saham seri B	3.799.999	3.799.999.000.000,-	99,99997
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.800.000	3.800.000.000.000,-	100,00
Jumlah saham dalam portepel	5.400.000	5.400.000.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PNM No. 19 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0430810 tanggal 23 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0127520.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021, susunan Dewan Komisaris PNM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Arif Rahman Hakim
Komisaris Independen	:	Muhammad Sholeh Amin
Komisaris Independen	:	Veronica Colondam
Komisaris Independen	:	Meidyah Indreswari
Komisaris	:	Parman Nataatmadja

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 39 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana kemudian berdasarkan Surat Keterangan No. 078/NOT/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dipertegas melalui akta nomor 30 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih dalam

proses permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan pada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan, susunan Direksi PNM adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Arief Mulyadi
Direktur Keuangan dan Operasional	:	Tjatur Herry Priyono
Direktur Bisnis	:	Kindaris
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	:	Anton Fahlevie
Direktur Kelembagaan dan Perencanaan	:	Sunar Basuki

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian PNM dan perusahaan anak PNM, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian PNM (ii) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 tidak diaudit, dan (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA (AP.0518).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Jumlah Aset	35.102.708	31.664.889	24.906.517	
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	26.831.615	22.763.500	18.528.636	
Jumlah Liabilitas	29.319.387	26.077.979	22.042.024	
Jumlah Ekuitas	5.783.321	5.586.910	2.864.493	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	1.761.771	1.548.350	5.605.264	4.924.088
Beban usaha	1.511.194	(988.611)	1.689.808	1.595.095
Laba usaha	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba sebelum pajak penghasilan	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba bersih tahun/periode berjalan	186.359	202.602	358.595	977.311
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	196.930	208.244	351.672	972.195

*tidak diaudit

Tabel Rasio

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Keuangan				
Rasio imbal hasil aset (ROA)	2,12%	1,13%		3,92%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	12,89%	6,42%		34,12%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	89,25%	96,26%		94,47%
Gearing ratio (x)	3,67x	3,24x		5,87x
Non Performing Loan (NPL) (%)	1,06%	1,23%		1,32%

Keterangan:

ROA 31 Maret 2021: ((Laba sebelum pajak periode berjalan / 3) X 12 / rata-rata jumlah Aset)

ROE 31 Maret 2021: ((Laba setelah pajak periode berjalan / 3) X 12 / rata-rata jumlah ekuitas)

ROA: (Laba sebelum pajak tahun berjalan / rata-rata jumlah Aset)

ROE: (Laba setelah pajak tahun berjalan / rata-rata jumlah Ekuitas)

BOPO: (Beban Usaha / Pendapatan Usaha)

Gearing Ratio: (Utang Berbunga – Kas dan Setara Kas) / Jumlah Ekuitas

NPL: Perhitungan NPL menggunakan kriteria keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 60 hari untuk kredit Mekaar dan keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari untuk kredit lainnya.

Struktur kepemilikan PNM dan perusahaan anak PNM adalah sebagai berikut:



Jaringan Kerja dan Layanan

Tabel Sebaran Unit Kerja per Wilayah

Pulau	31 Maret 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Unit Kerja	Agen	Unit Kerja	Agen	Unit Kerja	Agen
Sumatera	747	-	736	-	571	-
Jawa – selain DKI						
Jakarta	2.058	-	2.020	-	1.787	-
DKI Jakarta	57	-	57	-	46	-
Kalimantan	99	-	99	-	88	-
Sulawesi	243	-	232	-	194	-
Bali	32	-	32	-	25	-
Nusa Tenggara	166	-	159	-	134	-
Maluku	16	-	16	-	13	-
Papua	6	-	6	-	5	-
Jumlah	3.424	-	3.357	-	2.863	-

Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak PNM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PNM memiliki penyertaan saham secara langsung pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kinerja PNM sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Tahun Pendirian	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Terhadap Pendapatan PNM
1.	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi	1996	99,99%	1999	Beroperasi	0,87%
2.	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital ("PNM VC")	Modal Ventura	1999	99,99%	1999	Beroperasi	1,61%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai perusahaan anak PNM yang dikonsolidasikan terhadap PNM:

a. PT PNM Investment Management (“PNM IM”)

Umum

PNM IM didirikan dengan nama PT Rashid Hussain Asset Management berdasarkan Akta No. 23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8304.HT.01.01.TH.96. tanggal 7 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 055/BH.09.03/VIII/96 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09031823180 tanggal 21 Agustus 1996, serta telah diumumkan BNRI No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230.

Anggaran dasar PNM IM terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PNM IM No. 02 tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-001697.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0027579.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2020, yang telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana dibuktikan berdasarkan tanda terima OJK No. 76799 tertanggal 30 Januari 2020 (“Akta No. 2/2020”). Berdasarkan Akta No. 2/2020, para pemegang saham PNM IM telah menyetujui untuk, di antaranya, melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PNM IM untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PNM IM.

PNM IM berkantor pusat di Menara Taspen, Lt. 8, Jl. Jendral Sudirman, Kav. 2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan PNM IM berdasarkan Akta No. 2/2020 adalah bergerak dalam bidang perusahaan efek.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham PNM IM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000	%
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
PNM	109.999	109.999.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	130.000	130.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM IM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi
 Komisaris : Tjatur Herry Priyono
 Komisaris Independen : Drs. Bagus Rumbogo

Direksi

Direktur Utama : Bambang Siswaji
 Direktur : Ade Santoso Djajanegara
 Direktur : Solahuddin

b. PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital (“PNM VC”)

Umum

PNM VC didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 28 Oktober 1999, dibuat oleh Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20518 HT.01.01-TH.99 tanggal 23 Desember 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 532/BH.09.05/1/2000, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4530.

Anggaran dasar PNM VC terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 30 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0246569 tanggal 14 Mei 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076832.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 14 Mei 2019 (“**Akta No. 30/2019**”). Berdasarkan Akta No. 30/2019, para pemegang saham PNM VC telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 16 Anggaran Dasar PNM VC tentang rapat Dewan Komisaris.

PNM VC berkantor pusat di Menara Taspen, Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan PNM VC adalah bergerak dalam bidang perusahaan modal ventura.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham PNM VC pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp1.000.000	%
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
PNM	364.199	364.199.000.000	99,99
Koperasi Karyawan Madani	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	364.200	364.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	635.800	635.800.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PNM VC pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Mulyadi
 Komisaris : Agus Wibowo*
 Komisaris Independen : Mirawati Sudjono

*) dalam proses memperoleh persetujuan *fit and proper test* OJK

Direksi

Direktur Utama : Sasono Hantarto
 Direktur : Rendy Putra Jaya
 Direktur : Feber Netyantaka

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian PNM VC dan perusahaan anak PNM VC, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian PNM VC (ii) pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020 tidak diaudit, dan (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tertanggal 10 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, SE, CPA.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Jumlah Aset	35.102.708	31.664.889	24.906.517	
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	26.110.026	22.088.985	18.252.174	
Jumlah Liabilitas	29.319.387	26.077.979	22.042.024	
Jumlah Ekuitas	5.783.321	5.586.910	2.864.493	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan usaha	1.761.771	1.548.350	5.605.264	4.924.088
Beban usaha	1.511.194	988.611	1.689.808	1.595.095
Laba usaha	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba sebelum pajak penghasilan	250.577	271.491	399.135	1.291.319
Laba bersih tahun/periode berjalan	186.359	202.602	358.595	977.311
Laba komprehensif tahun/periode berjalan	196.930	208.244	351.672	972.195

*tidak diaudit

Tabel Rasio

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Keuangan				
Rasio imbal hasil aset (ROA)	0,53	1,13	3,92	
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE)	3,22	6,42	34,12	
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	85,78%	96,26%	94,47%	
Gearing ratio (x)	3,67	3,24	5,87	
Non Performing Loan (NPL) (%)	1,06	0,97	1,25	

Keterangan:

ROA 31 Maret 2021: ((Laba sebelum pajak periode berjalan / 3) X 12 / rata-rata jumlah Aset)

ROE 31 Maret 2021: ((Laba setelah pajak periode berjalan / 3) X 12 / rata-rata jumlah ekuitas)

ROA: (Laba sebelum pajak tahun berjalan / rata-rata jumlah Aset)

ROE: (Laba setelah pajak tahun berjalan / rata-rata jumlah Ekuitas)

BOPO: (Beban Usaha / Pendapatan Usaha)

Gearing Ratio: (Utang Berbunga – Kas dan Setara Kas) / Jumlah Ekuitas

NPL: Perhitungan NPL menggunakan kriteria keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui 60 hari untuk kredit Mekaar dan keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari untuk kredit lainnya.

INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

Bahwa penysetoran modal sebagaimana dimaksud dalam transaksi ini akan dilakukan dengan menggunakan setoran aset (inbreng) oleh pemegang saham Pegadaian dan PNM, yaitu Negara RI sejumlah 6.249.999 saham Seri B milik Negara RI pada Pegadaian dan sejumlah 3.799.999 saham Seri B milik Negara RI pada PNM, ke dalam Perseroan. Setelah proses penambahan modal dan penysetoran modal dengan inbreng selesai, Negara RI yang saat ini merupakan salah satu pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 100% di Pegadaian dan 100% di PNM berdasarkan Daftar Pemegang Saham masing-masing per tanggal 29 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, akan memperoleh tambahan saham di Perseroan sebanyak - banyaknya 16.108.998.710 lembar saham. Sehingga pada akhirnya kepemilikan Negara RI dalam Perseroan akan menjadi sebanyak-banyaknya 86.108.998.710 lembar saham.

Rencana penggunaan dana Perseroan untuk melakukan penyertaan di Pegadaian dan PNM tidak bertentangan dengan UU Perbankan *juncto* Pasal 3 POJK No. 36/2017. Perseroan memahami bahwa apabila transaksi penysetoran inbreng dalam PMHMETD I ini dilakukan, maka Perseroan akan memiliki penyertaan secara tidak langsung dalam PT Pegadaian Galeri Dua Empat (“PGDE”), PT Pesonna Indonesia Jaya (“PIJ”), PT Pesonna Optima Jasa (“POJ”), BLAG yang bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pada khususnya BLAG, BLAG tidak lagi beroperasi dan sedang dalam proses likuidasi. Perseroan sedang dalam proses dengan OJK Perbankan terkait dengan perlakuan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut setelah Pegadaian menjadi perusahaan anak Perseroan.

1. Pendapat dari Pihak Independen

Perseroan telah menunjuk KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR”) sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap:

(i) 6.249.999 saham Seri B Pegadaian (“Saham Pegadaian”); dan (ii) 3.799.999 saham Seri B PNM (“Saham PNM”), berikut penyusunan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

SRR menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas Saham Pegadaian dan Saham PNM telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan dari POJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (“POJK 35/2020”) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“SPI 2018”).

A. RINGKASAN PENILAIAN SAHAM PEGADAIAN

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun SRR dalam No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 (“Laporan Penilaian Saham Pegadaian”):

1. Objek Penilaian

Penilaian dilakukan terhadap saham Pegadaian.

2. Tujuan Penilaian

- a. Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar saham Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- b. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar saham Pegadaian kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Saham Pegadaian bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Pegadaian dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Saham Pegadaian terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Pegadaian.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham Pegadaian dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Saham Pegadaian dari Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian saham Pegadaian menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian saham Pegadaian mengingat kegiatan usaha Pegadaian di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai perkiraan atas perkembangan usahanya. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Pegadaian diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usahanya. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek tetap digunakan dalam penilaian saham Pegadaian meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara. Namun demikian, data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham Pegadaian.

Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari tiap pendekatan direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham Pegadaian.

5. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, nilai pasar saham Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp48,67 triliun.

B. RINGKASAN PENILAIAN SAHAM PNM

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun SRR dalam laporannya No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 ("**Laporan Penilaian Saham PNM**"):

1. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah Saham PNM.

2. Tujuan Penilaian

- a. Penilaian ditujukan untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar saham PNM pada tanggal 31 Maret 2021 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
- b. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang nilai pasar saham PNM kepada manajemen Perseroan demi mendukung pelaksanaan Rencana Transaksi.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Penilaian Saham PNM bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan; mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen PNM dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan Penilaian Saham PNM terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional PNM.
- g. SRR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham PNM dan kesimpulan nilai akhir.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas status hukum saham PNM dari Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian saham PNM menggunakan pendekatan pendapatan (*income based approach*) dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian saham PNM mengingat kegiatan usaha PNM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai perkiraan atas perkembangan usahanya. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi PNM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usahanya. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek tetap digunakan dalam penilaian saham PNM meskipun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara. Namun demikian, data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham PNM.

Selanjutnya, nilai yang diperoleh dari tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham PNM.

5. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima oleh SRR dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, SRR berpendapat bahwa nilai pasar Saham PNM pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 6,10 triliun.

C. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Berikut ringkasan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun SRR dalam laporannya No. 00246/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Perseroan dan Negara RI, selaku pemegang saham pengendali Pegadaian dan PNM, merupakan pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu rencana PMHMETD I dan rencana Inbreng, yang terkait dengan rencana pembentukan *holding* ultra mikro dengan melakukan setoran modal dalam bentuk non tunai ke dalam Pegadaian dan PNM, sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham Pegadaian dan PNM.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Pendapat Kewajaran disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran kepada Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 32/2015.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, SRR telah melakukan:

- a. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi
Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri perbankan yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri perbankan, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit. Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

- b. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi
Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Kewajaran, SRR berpendapat Rencana Transaksi adalah **wajar**.

2. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Rencana Inbreng memenuhi kriteria transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Adapun sifat hubungan afiliasi dimaksud adalah dikarenakan Negara RI merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dan Wakil Menteri BUMN II sebagai Komisaris Utama Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 42/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dan tidak terdapat benturan kepentingan maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, di mana Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan (a) tanggal Transaksi Material atau (b) tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal Transaksi Material wajib memperoleh persetujuan RUPS, tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat melalui sekurang-kurangnya situs web Perseroan dan situs web BEI;
- c. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin (b) dan dokumen pendukungnya kepada OJK, yang meliputi laporan Penilai dan dokumen pendukung lainnya;

Keterbukaan informasi pada poin (b) dan (c) di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Material atau bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.

- d. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dalam hal antara lain:
 - (i) Transaksi Material memiliki nilai lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - (ii) Laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar.

Apabila Transaksi Material yang telah disetujui RUPS belum dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: (i) mengungkapkan dalam laporan tahunan; dan (ii) memberikan penjelasan khusus atas tidak terlaksananya Transaksi Material tersebut dalam RUPS terdekat. Apabila Transaksi Material dimaksud akan dilaksanakan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS kembali atas Transaksi Material tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila Transaksi Material dimaksud tidak memperoleh persetujuan RUPS, maka rencana Transaksi Material baru dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui Transaksi Material tersebut.

- e. melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.

Apabila Transaksi Material merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka selain memenuhi ketentuan di atas, Perseroan wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Selain pemenuhan kewajiban di atas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian poin (a), poin (b), dan poin (c) di atas serta memperoleh persetujuan RUPS independen, apabila:

- a. Transaksi Material, yang harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, mengandung transaksi afiliasi;
- b. Transaksi Material mengandung benturan kepentingan; dan/atau
- c. Transaksi Material berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha perusahaan terbuka.

Dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

3. Materialitas Transaksi

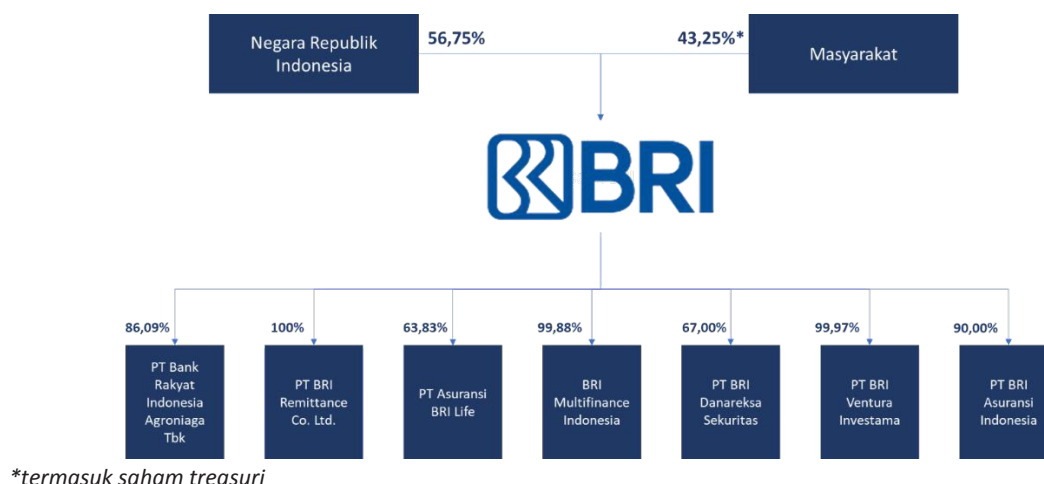
Rencana Inbreng merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dikarenakan (i) pendapatan usaha Pegadaian dan PNM dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20% namun tidak melebihi 50% dari pendapatan usaha Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2021 dan (ii) nilai transaksi Inbreng melebihi 20% namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Maret 2021. Dengan demikian:

- Berdasarkan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan cukup memenuhi ketentuan POJK 17/2020;
- Rencana Inbreng bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan RUPS dan/atau RUPS Independen.

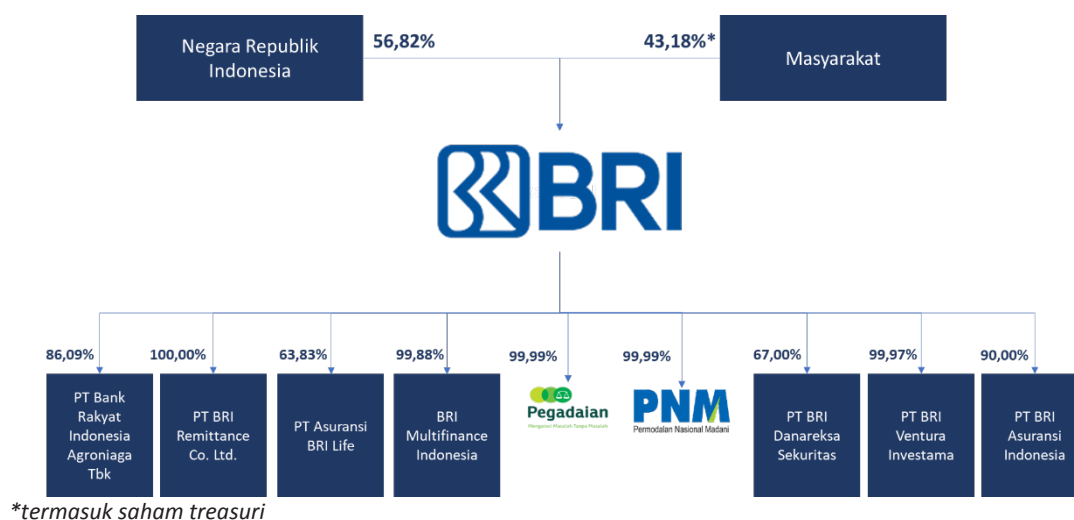
Berkeenaan dengan hal tersebut, Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 17/2020, antara lain dengan mengumumkan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan penilai sehubungan dengan rencana Inbreng dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi Inbreng.

4. Struktur Grup Perseroan Sebelum dan Sesudah Transaksi

Struktur Grup Perseroan Sebelum Rencana Transaksi



Struktur Grup Perseroan Setelah Rencana Transaksi (apabila seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD)



5. Dampak Keuangan Perseroan akibat dari Transaksi

Dalam informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan telah diterapkan perikatan keyakinan memadai oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim historis auditan Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Saldo konsolidasian historis Perseroan dan Perusahaan Anaknya bila dibandingkan dengan saldo konsolidasian proforma penggabungan Perseroan dan Perusahaan Anaknya, Pegadaian dan PNM sebagai berikut:

(dalam triliunan Rupiah)

Keterangan	Saldo Konsolidasian Historis Perseroan per 31 Maret 2021	Saldo Konsolidasian Proforma Penggabungan Perseroan, Pegadaian dan PNM per 31 Maret 2021
Aset	1.411	1.515
Liabilitas	1.216	1.289
Ekuitas	195	226

(dalam triliunan Rupiah)

Keterangan	Saldo Konsolidasian Historis Perseroan per 31 Maret 2021	Saldo Konsolidasian Proforma Penggabungan Perseroan, Pegadaian dan PNM per 31 Maret 2021
Pendapatan	40	47
Beban Usaha	31	37
Laba Bersih	7	8

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasian serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1681) dan Danil Setiadi Handaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008).

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp1.216.287.688 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret 2021
LIABILITAS	
Liabilitas segera	22.802.245
Simpanan nasabah	
- Giro	174.329.968
- Tabungan	443.867.205
- Deposito berjangka	431.117.600
Total simpanan nasabah	1.049.314.773
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	20.074.302
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.556.514
Liabilitas derivatif	878.258
Liabilitas akseptasi	5.400.017
Utang pajak	3.680.900
Surat berharga yang diterbitkan	32.334.036
Pinjaman yang diterima	35.123.555
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	4.897.385
Liabilitas imbalan kerja	8.933.841
Liabilitas lain-lain	21.790.794
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.068
TOTAL LIABILITAS	1.216.287.688

1. Rincian Masing-Masing Liabilitas

1.1. Liabilitas segera

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp22.802.245 juta. Rincian dari saldo liabilitas segera adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Rupiah	
Titipan Pembayaran Dividen	12.125.589
Titipan <i>advance payment</i>	4.108.207
Titipan setoran pajak	690.505
Titipan ATM dan kartu kredit	586.611
Titipan asuransi	171.329
Titipan pinjaman kelolaan	59.937
Titipan kerjasama pihak ketiga	47.553
Titipan setoran kliring	39.964
Titipan pengiriman uang	21.985
Penampungan dana bantuan sosial	7.572
Lain-lain	4.187.862
	22.047.114
Mata uang asing	
Titipan <i>advance payment</i>	127.279
Titipan setoran pajak	20.194
Titipan ATM dan kartu kredit	1.913
Lain-lain	605.745
	755.131
TOTAL LIABILITAS SEGERA	22.802.245

1.2. Giro

Saldo giro pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp174.329.968 juta. Rincian dari saldo giro adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
Rupiah	91.557.444
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	28.694.408
Dolar Singapura	1.996.407
Renminbi	370.177
Euro Eropa	137.396
Dolar Hong Kong	78.132
Dolar Australia	20.789
Yen Jepang	18.467
Pound Sterling Inggris	6.345
Dirham Uni Emirat Arab	1.570
Ringgit Malaysia	14
	31.323.705
	122.881.149
Pihak berelasi	
Rupiah	22.099.175
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	29.212.607
Euro Eropa	91.687
Yen Jepang	45.350
	29.349.644
	51.448.819
TOTAL GIRO	174.329.968

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	31 Maret 2021
Rupiah	2,03%
Mata uang asing	0,79

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan anak adalah sebesar Rp649.748 juta pada tanggal 31 Maret 2021.

1.3. Tabungan

Saldo tabungan per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp443.867.205 juta. Rincian dari saldo tabungan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
Rupiah	
Simpedes	275.496.864
Britama	153.865.031
Lain-lain	10.396.690
	439.758.585
Mata uang asing	
Britama	
Dolar Amerika Serikat	2.580.264
Yen Jepang	512.932
Dolar Singapura	326.996
Euro Eropa	31.606
Dolar Australia	15.677
Pound Sterling Inggris	13.883
Renminbi	2.216
Riyal Arab Saudi	889
Dolar Hong Kong	49
Dirham Uni Emirat Arab	31
	3.484.543
	443.243.128

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak berelasi	
Rupiah	
Britama	218.800
Simpedes	8.022
Lain-lain	199.790
	426.612
Mata uang asing	
Britama	
Dolar Amerika Serikat	197.431
Pound Sterling Inggris	24
Dolar Singapura	4
Renminbi	1
	197.460
Lain-lain	
Dolar Amerika Serikat	5
	197.465
	624.077
TOTAL TABUNGAN	443.867.205

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	31 Maret 2021
Rupiah	0,53%
Mata uang asing	0,20

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp115.113 juta pada tanggal 31 Maret 2021.

1.4. Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp431.117.600 juta. Rincian dari saldo deposito berjangka adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
Rupiah	282.228.394
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	57.253.568
Renminbi	588.635
Dolar Australia	323.771
Dolar Singapura	285.143
Euro Eropa	207.126
Pound Sterling Inggris	1.846
Yen Jepang	262
Riyal Arab Saudi	19
	58.660.370
	340.888.764
Pihak berelasi	
Rupiah	46.945.843
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	43.167.899
Euro Eropa	113.304
Dolar Singapura	1.790
	43.282.993
	90.228.836
TOTAL DEPOSITO BERJANGKA	431.117.600

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
Rupiah	
<i>Deposits on call</i>	16.247.174
Deposito	
1 bulan	95.571.889
3 bulan	107.993.099
6 bulan	28.719.766
12 bulan	23.662.948
Lebih dari 12 bulan	10.033.518
	282.228.394
Mata uang asing	
<i>Deposits on call</i>	4.908.837
Deposito	
1 bulan	22.527.980
3 bulan	9.290.640
6 bulan	5.981.276
12 bulan	15.673.847
Lebih dari 12 bulan	277.790
	58.660.370
	340.888.764
Pihak berelasi	
Rupiah	
<i>Deposits on call</i>	5.792.723
Deposito	
1 bulan	24.669.872
3 bulan	14.387.137
6 bulan	1.010.456
12 bulan	1.085.655
	46.945.843
Mata uang asing	
<i>Deposits on call</i>	833.505
Deposito	
1 bulan	23.486.898
3 bulan	6.765.903
6 bulan	10.443.585
12 bulan	1.068.417
Lebih dari 12 bulan	684.685
	43.282.993
	90.228.836
TOTAL DEPOSITO BERJANGKA	431.117.600

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	31 Maret 2021
Rupiah	3,78%
Mata uang asing	0,99

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar Rp249.122 juta pada tanggal 31 Maret 2021.

1.5. Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya

Saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp20.074.302 juta. Rincian dari saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Pihak ketiga	
Rupiah	
<i>Deposits on call</i>	17.191.000
Deposito berjangka	462.190
Giro	288.824
Tabungan	6.307
	17.948.321

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	JUMLAH
Dolar Amerika Serikat	
Deposito berjangka	363.125
Giro	290.330
Inter-bank call money	145.250
	798.705
	18.747.026
Pihak berelasi	
Rupiah	
Giro	937.555
	937.555
Dolar Amerika Serikat	
Inter-bank call money	290.500
Giro	99.221
	1.327.276
TOTAL SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	20.074.302

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

KETERANGAN	Rupiah	Dolar Amerika Serikat
Deposits on call	3,82 %	-
Inter-bank call money	-	0,20%
Deposito berjangka	3,84%	1,50%
Giro	1,57%	0,15%
Tabungan	1,63%	-

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	≤ 1 bulan	>1 - 3 bulan	Total
Pihak ketiga			
Rupiah			
Deposits on call	17.191.000	-	17.191.000
Deposito Berjangka	433.690	28.500	462.190
Giro	288.824	-	288.824
Tabungan	6.307	-	6.307
	17.919.821	28.500	17.948.321
Mata Uang Asing			
Deposito Berjangka	72.625	290.500	363.125
Giro	290.330	-	290.330
Inter-bank call money	145.250	-	145.250
	508.205	290.500	798.705
	18.428.026	319.000	18.747.026
Pihak berelasi			
Rupiah			
Giro	937.555	-	937.555
Mata Uang Asing			
Inter-bank call money	290.500	-	290.500
Giro	99.221	-	99.221
	389.721	-	389.721
Total	19.755.302	319.000	20.074.302

1.6. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Maret 2021, terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tanggal jual	Tanggal beli kembali	Nilai nominal	Nilai jual	Nilai Tercatat
--------	--------------	----------------------	---------------	------------	----------------

Pihak Ketiga

Rupiah

Bank Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tanggal jual	Tanggal beli kembali	Nilai nominal	Nilai jual	Nilai Tercatat
Obligasi Pemerintah					
FR0063	08 Maret 2021	15 Mei 2023	1.593.000	1.424.873	1.424.873
FR0053	07 Mei 2019	15 Juli 2021	550.000	519.218	519.218
FR0081	30 Maret 2021	06 April 2021	550.000	508.112	508.161
FR0081	29 Maret 2020	09 April 2021	500.000	461.680	461.770
FR0063	7 November 2017	15 Mei 2021	500.000	446.090	446.090
FR0087	18 Maret 2021	01 April 2021	500.000	442.275	442.831
FR0053	06 September 2016	15 Juli 2021	450.000	437.025	437.025
FR0053	09 September 2016	15 Juli 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	28 Februari 2017	15 Juli 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	06 September 2016	15 Juni 2021	300.000	344.315	344.315
FR0034	07 Mei 2019	15 Juni 2021	300.000	313.520	313.520
FR0061	28 Februari 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0081	22 Maret 2021	01 April 2021	330.000	303.692	303.959
FR0081	29 Maret 2021	01 April 2021	300.000	277.008	277.053
FR0082	26 Februari 2021	31 Mei 2021	205.000	200.106	200.773
FR0081	24 Maret 2021	01 April 2021	200.000	184.303	184.428
FR0081	24 Maret 2021	06 April 2021	110.000	101.366	101.436
FR0081	31 Maret 2021	12 April 2021	50.000	46.184	46.184
			7.656.000	7.087.179	7.089.048
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0081	01 Maret 2021	31 Mei 2023	100.000	99.087	99.400
			7.756.000	7.186.266	7.188.448
Mata Uang Asing					
Bank Lain					
Obligasi Pemerintah					
FR0061	3 Juni 2020	15 Mei 2022	842.000	727.000	727.000
FR0043	14 Januari 2019	15 Juli 2022	500.000	462.152	462.152
RI0124	19 Maret 2021	20 September 2021	145.250	157.996	158.011
RI0124	18 Maret 2021	20 September 2021	145.250	156.271	156.288
RI0230	30 Desember 2020	23 Juni 2021	145.250	134.488	134.726
RI0521	28 Januari 2021	08 April 2021	145.250	130.760	130.850
FR0061	27 Desember 2018	12 Mei 2022	150.000	117.878	117.878
RI 1023	23 Oktober 2020	13 Oktober 2021	101.675	109.235	109.529
RI0423	23 Oktober 2020	13 Oktober 2021	72.625	73.133	73.330
US TREASURY 0623	11 Maret 2021	13 September 2021	72.625	72.727	72.734
RI 0428	30 Desember 2020	23 Juni 2021	72.625	72.096	72.223
US TREASURY 0623	18 Maret 2021	18 Juni 2021	58.100	58.155	58.159
			2.450.650	2.271.891	2.272.880
Sukuk Berharga Syariah Negara					
INDOIS 24	23 Maret 2021	23 April 2021	821.723	726.250	726.298
INDOIS 24	11 Februari 2021	11 Mei 2021	290.500	311.173	311.343
INDOIS 22	23 Oktober 2020	13 Oktober 2021	58.100	57.390	57.545
			1.170.323	1.094.813	1.095.186
			3.620.973	3.366.704	3.368.066
Total			11.376.973	10.552.970	10.556.514

Suku bunga efektif untuk liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali ini adalah 12,49% untuk Rupiah dan 3,97% untuk mata uang asing.

1.7. Surat Berharga yang diterbitkan

Saldo surat berharga Perseroan per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp32.334.036 juta. Rincian dari saldo surat berharga adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Rupiah	
Obligasi Berkelanjutan I BRI	
Tahap III Tahun 2016	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp21 pada tanggal 31 Maret 2021	681.885
Obligasi Berkelanjutan II BRI	
Tahap I Tahun 2016	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp2.195 pada tanggal 31 Maret 2021	2.944.531
Tahap II Tahun 2017	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp787 pada tanggal 31 Maret 2021	2.224.713
Tahap III Tahun 2017	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.310 pada tanggal 31 Maret 2021	4.147.497
Tahap IV Tahun 2018	
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.134 pada tanggal 31 Maret 2021	2.431.005
Negotiable Certificate of Deposits Tahun 2020	
setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp11.253 pada tanggal 31 Maret 2021	838.747
Obligasi Berkelanjutan III BRI	
Tahap I Tahun 2019	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp4.625 pada tanggal 31 Maret 2021	4.218.696
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp297 pada tanggal 31 Maret 2021	218.164
MTN I BRI Finance	
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp345 pada tanggal 31 Maret 2021	158.676
	17.863.914
Dolar Amerika Serikat	
Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)	
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp25.391 pada tanggal 31 Maret 2021	7.237.109
Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)	
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp 29.487 pada tanggal 31 Maret 2021	7.233.013
	14.470.122
TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	32.334.036

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp41.665 juta. Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI

Pada tanggal 25 Juni 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 19 Januari 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.650.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp808.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.018.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.823.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Mei 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindodengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 4 Mei 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.350.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.212.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.437.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp701.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Obligasi Berkelanjutan I BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp655.000 juta, Rp925.000 juta, Rp1.420.000 juta, Rp808.000 juta, Rp1.018.500 juta, Rp2.823.500 juta, Rp1.212.000 juta dan Rp2.437.000 juta telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 2 Desember 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 juta dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 12 April 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 juta dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 25 Agustus 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 juta dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Obligasi Berkelanjutan II BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri B dan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp616.000 juta, Rp.964.000 juta, Rp1.131.000 juta dan Rp1.743.500 juta dan Rp980.500 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

c) Obligasi Berkelanjutan III BRI

Pada tanggal 7 November 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp737.850 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.089.350 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.172.800 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Februari 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Obligasi Berkelanjutan III Perseroan memperoleh *rating* AAA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp737.850 juta telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

d) Obligasi I BRI Agro

Pada tanggal 7 Juli 2017, setelah menerima Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK No. S-348/D.04/2017 tertanggal 22 Juni 2017, BRI Agro menerbitkan Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 juta dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp261.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp239.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022.

Bunga Obligasi I BRI Agro dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Oktober 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Obligasi I BRI Agro memperoleh *rating* AA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi I BRI Agro adalah BRI Agro tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Obligasi I BRI Agro Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp261.000 juta telah dilunasi oleh BRI Agro pada tanggal jatuh temponya.

e) Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)

Pada tanggal 16 Juli 2018, Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% atau setara dengan ASD498.480.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Perseroan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pendanaan umum Perseroan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal 31 Maret 2021, *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)* Tahun 2018 memperoleh *rating* Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

f) Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2019 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tingkat bunga tetap 3,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,713% atau setara dengan ASD498.565.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Perseroan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal 31 Maret 2021, *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)* memperoleh rating Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

g) MTN I BRI Finance Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, BRI Finance menerbitkan MTN I BRI Finance Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp300.000 juta untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 13 Maret 2020. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAA-.

Pada tanggal 31 Maret 2021, MTN I BRI Finance Tahun 2019 memperoleh peringkat AA- dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing* rasio paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000 juta, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat Kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

h). *Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Tahun 2020*

Pada tanggal 29 Juni 2020, Perseroan menerbitkan *Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Tahun 2020* dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut :

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp630.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 5,35% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp520.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 5,30% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp850.000 juta dengan tingkat bunga sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021.

Penerimaan neto dari penerbitan NCD tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Seri A dan *Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Seri B* dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp630.000 juta dan Rp520.000 juta telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal jatuh temponya.

1.8. Pinjaman Yang Diterima

Saldo pinjaman yang diterima per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp35.123.555 juta. Rincian dari saldo pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pihak ketiga	
<u>Rupiah</u>	
Bank Indonesia	
Pinjaman likuiditas	15.658
Pinjaman lainnya	12.273
Pinjaman lainnya	249.789
	277.720
<u>Mata uang asing</u>	
Pinjaman Sindikasi <i>Club Loan</i>	
setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	21.651.367
Pinjaman dari BNP Paribas	
setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	452.905

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pinjaman lainnya	11.743.398
	33.847.670
	34.125.390
Pihak berelasi	
Pinjaman dari	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	964.921
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.068
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.176
	998.165
TOTAL PINJAMAN YANG DITERIMA	35.123.555

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
≤ 1 bulan	71
> 3 bulan - 1 tahun	256.253
> 1 tahun - 5 tahun	7.802
> 5 tahun	13.594
	277.720
Mata uang asing	
≤ 1 bulan	1.887.748
> 1 bulan - 3 bulan	3.848.348
> 3 bulan - 1 tahun	16.329.889
> 1 tahun - 5 tahun	11.781.685
	33.847.670
	34.125.390
Pihak berelasi	
> 3 bulan - 1 tahun	386.849
> 1 tahun - 5 tahun	594.140
> 5 Tahun	17.176
	998.165
TOTAL PINJAMAN YANG DITERIMA	35.123.555

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Pinjaman ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur Perseroan antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman sindikasi *club loan*

Pada tanggal 30 September 2015, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (*agent*), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019 (telah dilunasi oleh Perseroan). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- Bank of America N.A., sebesar ASD50.000.000,
- Citibank, N.A., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
- Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,

- The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000,
 - Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000,
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
 - BNP Paribas sebesar ASD20.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000, dan
 - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD155.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 (telah dilunasi oleh Perseroan). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
 - BNP Paribas sebesar ASD30.000.000,
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000,
 - Westpac Banking Corporation sebesar ASD15.000.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD70.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 (telah dilunasi oleh Perseroan). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD30.000.000,
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD10.000.000,
 - DBS Bank Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - United Overseas Bank Limited sebesar ASD10.000.000, dan
 - Westpac Banking Corporation sebesar ASD10.000.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* Perseroan. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (*agent*), yang terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019 (telah dilunasi oleh Perseroan). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
 - Commerzbank AG, sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - PT Bank HSBC Indonesia, sebesar ASD10.000.000,
 - Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD55.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD22.500.000,
 - Wells Fargo Bank, N.A., cabang London sebesar ASD52.500.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD235.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- Cathay United Bank, sebesar ASD30.000.000,

- Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD10.000.000,
 - Commerzbank AG, sebesar ASD30.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD30.000.000,
 - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD32.500.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD32.500.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD265.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- Cathay United Bank, sebesar ASD20.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Hong Kong sebesar ASD20.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD36.000.000,
 - DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Standard Chartered Bank, cabang Singapura ASD63.500.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD25.000.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD20.500.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* Perseroan. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD1.000.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh Citicorp International Limited (agent), yang telah dilakukan penarikan sebagian atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Agustus 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- MUFG Bank Ltd sebesar ASD32.000.000,
 - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD86.000.000,
 - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD20.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000,
 - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD22.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD20.000.000.

Pada tanggal 14 Oktober 2020, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar AS800.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh Citicorp International Limited (agent), yang telah dilakukan penarikan sebagian atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- MUFG Bank Ltd sebesar ASD48.000.000,
 - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD129.000.000,
 - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD30.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
 - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD33.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD27.000.000,
 - Wells Fargo Bank, sebesar ASD900.000,
 - The Hyakugo Bank, Ltd., sebesar ASD600.000,
 - PT Bank Permata Tbk, sebesar ASD600.000,
 - DZ Bank AG, Deutsche Zentral, sebesar ASD900.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD20.000.000,

- BNP Paribas, Cabang Singapura, sebesar ASD50.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, sebesar ASD50.000.000,
 - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD70.000.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025. Bank yang berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- China Development Bank, sebesar ASD150.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD25.000.000,
 - MUFG Bank Ltd, cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000,
 - Standard Chartered Bank (Singapura) Limited, sebesar ASD50.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura, sebesar ASD50.000.000,
 - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD5.000.000.

c) Pinjaman dari China Development Bank Corporation

Pada tanggal 16 September 2015, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari China Development Bank Corporation untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri di Indonesia yang bersifat jangka panjang serta transaksi lintas batas antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas Tranche A senilai ASD700.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Perseroan melakukan penarikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar ASD223.953.383 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar ASD476.046.617 (angka penuh). Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perseroan tanggal 28 Februari 2020.
- Fasilitas Tranche B senilai RMB1.906.080.000 (ekuivalen ASD300.000.000) (angka penuh), dengan suku bunga SHIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Perseroan melakukan penarikan pertama pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar RMB609.818.661 (angka penuh) dan penarikan kedua pada tanggal 6 November 2015 sebesar RMB1.296.261.339 (angka penuh). Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perseroan tanggal 28 Februari 2020.

Fasilitas jangka panjang ini memiliki tenor 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2025 (telah dilunasi oleh Perseroan tanggal 28 Februari 2020). Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche A*, jumlah angsuran pokok adalah sebesar ASD46.666.667 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche B*, jumlah angsuran pokok adalah sebesar RMB127.072.000 (angka penuh) dimulai pada tanggal 16 September 2018 sampai dengan jatuh tempo. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio modal inti (Tier 1) minimum 6%,
- Rasio modal inti utama (Core Tier 1) minimum 5%,
- Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) minimum 6,5%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%,
- Rasio *Return on Assets* (ROA) minimum 0,6%.

d) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECF) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh *Arianespace* Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas Tranche Banque Publique d'Investissement (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (angka penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. Perseroan melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas Tranche Hermes senilai ASD9.901.308,77 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Perseroan melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche BPI*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (angka penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche Hermes*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD660.087 sampai dengan jatuh tempo. Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (financial covenants) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

e) Pinjaman bilateral

Pinjaman dari Emirates NBD Bank

Pada tanggal 28 Agustus 2018, BRI (Kantor Cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI Kantor Cabang Singapura. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 24 Mei 2019.

Pada tanggal 11 Oktober 2018, BRI (Kantor Cabang Singapura) dan Emirates NBD Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD25.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI Kantor Cabang Singapura. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 8 Juli 2019.

Pinjaman dari Bank Of America

Pada tanggal 2 Desember 2018, BRI (Kantor Cabang Singapura) dan Bank of America menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman sebesar ASD50.000.000 (angka penuh) untuk memenuhi kebutuhan likuiditas BRI Kantor Cabang Singapura. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019.

f) Pinjaman lainnya

Saldo pinjaman lainnya per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp12.005.460 juta. Rincian dari saldo pinjaman lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pihak ketiga	
Rupiah	
Bank Indonesia	12.273
PT Bank Victoria Internasional	249.789
	262.062
Mata uang asing	
Dolar Amerika Serikat	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	2.789.364
BNP Paribas	2.357.186
The Bank of New York Mellon	1.452.500
PT Bank UOB	1.452.500
Citibank N.A	726.250
JP Morgan	399.094
PT Bank CTBC Indonesia	286.583
PT Bank BTPN Tbk	146.157
	9.609.634
Dolar Singapura	
Wells Fargon Bank N.A	1.436.319
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	406.232
Chinatrust Commercial Bank Cabang Singapura	290.166
	2.132.717
Euro Eropa	
JP Morgan	1.047
	1.047
	11.743.398
TOTAL PINJAMAN LAINNYA	12.005.460

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah margin tertentu, termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

1.9. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp8.933.841 juta.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Cadangan Bonus dan Insentif	3.823.331
Cadangan atas program imbalan jangka panjang bagi pekerja	5.110.510
TOTAL LIABILITAS IMBALAN KERJA	8.933.841

1.10. Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp21.790.794 juta. Rincian dari liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Pihak ketiga	
<u>Rupiah</u>	
Liabilitas manfaat polis masa depan	6.490.053
Liabilitas kontrak investasi	3.318.017
Pendapatan diterima di muka	1.956.875
Premi yang belum merupakan pendapatan	1.283.877
Cadangan kewajiban litigasi	1.135.070
Utang bunga	963.052
Estimasi liabilitas klaim	263.057
Dana syirkah temporer	155.331
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu	138.214
Utang reasuransi	120.053
Cadangan pajak hadiah simpedes	31.457
Liabilitas kartu kredit	30.397
Setoran jaminan	15.171
Lain-lain	3.275.934
	19.176.558
<u>Mata uang asing</u>	
Pendapatan diterima di muka	214.739
Utang bunga	176.716
Lain-lain	2.222.781
	2.614.236
TOTAL LIABILITAS LAIN-LAIN	21.790.794

1.11. Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi

Saldo pinjaman dan surat berharga subordinasi per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp501.068 juta. Rincian dari pinjaman dan surat berharga subordinasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
<u>Rupiah</u>	
Obligasi Subordinasi III	497.922
Pinjaman <i>two-step loan</i>	3.146
TOTAL PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI	501.068

Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat suku bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,09% untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

Obligasi Subordinasi III Tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dibayarkan 3 (tiga) bulanan sejak tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating AA.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Obligasi Subordinasi III tahun 2018 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
Rupiah	
> 1 tahun - 5 tahun	497.922
> 5 tahun	3.146
Total	501.068

1.12 Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Saldo Tagihan dan Liabilitas Derivatif per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.420.985 juta. Rincian dari tagihan dan Liabilitas Derivatif adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Transaksi	31 Maret 2021	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap Mata Uang Asing	262.108	214.029
Swap Suku Bunga	172.942	207.707
Swap mata uang dan suku bunga	61.829	37.140
Pembelian dan Penjualan <i>Spot</i> Mata Uang Asing	37.718	411.099
Option mata uang	4.375	4.375
Pembelian dan Penjualan <i>Forward</i> Mata Uang Asing	3.755	3.908
TOTAL TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF	542.727	878.258

1.13 Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Saldo Tagihan dan Liabilitas Akseptasi per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp5.158.923 juta. Rincian dari Tagihan dan Liabilitas Akseptasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
<u>Pihak Ketiga</u>	
<u>Rupiah</u>	
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	1.713.199
<u>Mata Uang Asing</u>	
L/C Impor dan SKBDN	
Dolar Amerika Serikat	1.947.155
Euro Eropa	124.243
Renminbi	54.566
Yen Jepang	25.187
Dolar Singapura	11.717
Poundsterling Inggris	3.223
	2.166.091
	3.879.290

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
<u>Pihak Berelasi</u>	
<u>Rupiah</u>	
L/C Impor dan SKBDN	1.117.211
<u>Mata Uang Asing</u>	
L/C Impor dan SKBDN	
Dolar Amerika Serikat	403.516
	403.516
	1.520.727
Total	5.400.017
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(241.094)
TOTAL - Bersih	5.158.923

Pada tanggal 31 Maret 2021 semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai “Lancar”, kecuali Rp16.116 juta dengan kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”.

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
<u>Pihak Ketiga</u>	
> 1 bulan – 3 bulan	1.489.273
> 3 bulan – 1 Tahun	2.390.017
	3.879.290
<u>Pihak Berelasi</u>	
< 1 bulan	3.560
> 1 bulan – 3 bulan	768.798
> 3 bulan – 1 Tahun	748.369
Total	1.520.727
	5.400.017
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(241.094)
Total – Bersih	5.158.923

1.14 Utang Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2021, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	Jumlah
<u>Perseroan (entitas induk)</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 25	516.368
Pasal 29	2.947.794
	3.464.162
<u>Perusahaan Anak</u>	
Pajak Penghasilan	200.954
Pajak Pertambahan Nilai	15.784
	216.738
TOTAL UTANG PAJAK	3.680.900

2. Perjanjian, Komitmen dan Kontinjensi Signifikan

2.1 Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 5 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan SPK Sewa Jaringan Komunikasi MPLS Provider Satkomindo untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp82.144 juta.

Pada tanggal 5 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Menara BRI Medan untuk jangka waktu 420 (empat ratus dua puluh) hari dengan nilai kontrak senilai Rp316.500 juta.

Pada tanggal 4 Februari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Layanan 145.500 juta Simcard M2M EDC Provider Telkomsel untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp96.030 juta.

Pada tanggal 2 Maret 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT iZeno Teknologi Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Penambahan Nilai Kontrak Payung Jasa Layanan *Google Cloud Platform* untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp71.000 juta.

Pada tanggal 2 Maret 2021, BRI menandatangani Perjanjian Distribusi (*Distribution Agreement*) dengan BRI Life sehubungan dengan kerjasama pemasaran produk BRI Life melalui saluran distribusi BRI.

Pada tanggal 26 Maret 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 4 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp225.435 juta.

Pada tanggal 8 Oktober 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perpanjangan SPK Sewa Jaringan Komunikasi MPLS *Provider* dengan nilai kontrak Rp65.713 juta.

Pada tanggal 13 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi dan PT Datindo Infonet Prima sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* CRM RBB Tahun 2020 (Zona 1, 2 dan 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp682.328 juta dan Rp308.396 juta.

Pada tanggal 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Pengadaan Sewa Saluran Komunikasi untuk Kebutuhan Penggantian Perangkat BRISPOT bagi Pejabat Kredit Lini Bisnis Mikro dengan nilai kontrak Rp260.899 juta.

Pada tanggal 8 Juli 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* VSAT *Remote Terminal* dan VSAT *Satlink* untuk Integrasi BRISat Fase 3 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp181.776 juta.

Pada tanggal 27 November 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan *Managed Service* CRM EBB Tahun 2019 dan *Replacement* beserta Perangkat Pendukungnya untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp399.299 juta.

Pada tanggal 4 November 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Surya Sudeco sehubungan dengan Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 untuk Operasional Unit Kerja Mikro BRI untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp110.453 juta.

Pada tanggal 8 Agustus 2019, Perseroan mengadakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan *Managed Service* VSAT *Remote Terminal* dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp67.004 juta.

Pada tanggal 8 Februari 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* VSAT *Remote Terminal* dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 2, 3 dan 4) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp211.105 juta.

Pada tanggal 7 Februari 2019, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* *Offsite Data Center* (ODC), *Data Center* (DC) GTI Ragunan dan Tabanan Tahap I untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp149.500 juta.

Pada tanggal 29 Desember 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT PP (Persero) sehubungan dengan pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto Paket 2 (dua) untuk jangka waktu 720 (tujuh ratus dua puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp845.950 juta.

Pada tanggal 8 November 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan pengadaan 600 (enam ratus) Unit CRM (*Cash Recycling Machine*) untuk RBB BRI tahun 2018 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp92.400 juta.

Pada tanggal 16 Oktober 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pengadaan upgrade 230 unit server di DC GTI dan Tabanan untuk jangka waktu 19 (sembilan belas) minggu dengan nilai kontrak sebesar Rp69.027 juta.

Pada tanggal 14 Februari 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT PP (Persero) sehubungan dengan pengadaan jasa kontraktor pembangunan Gedung Menara BRI Gatot Subroto Paket 1 (satu) untuk jangka waktu 380 (tiga ratus delapan puluh) hari kalender dengan nilai kontrak sebesar Rp112.900 juta.

Pada tanggal 24 Januari 2018, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan pengadaan sewa saluran komunikasi pejabat kredit lini sebagai sarana pendukung aplikasi BRISPOT dan MYBRI untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp275.895 juta.

2.2 Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan telah membentuk cadangan untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan sebesar Rp1.135.070 juta. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISALINKAN DALAM BAB IV PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020 beserta catatan - catatan atas laporan - laporan keuangan tersebut. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 2019, sedangkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasi serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1681) dan Danil Setiadi Handaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008).

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
ASET				
Kas	18.682.911	32.161.564		30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	36.409.115	51.530.969		71.416.449
Giro pada bank lain	13.205.459	9.154.378		10.237.736
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(59.437)	(93.843)		-
	13.146.022	9.060.535		10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain	70.422.419	66.539.685		116.854.727
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.319)	(18.070)		-
	70.410.100	66.521.615		116.854.727
Efek-efek	296.936.755	327.615.655		195.840.931
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(392.338)	(348.941)		(758)
	296.544.417	327.266.714		195.840.173
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.979.627	27.573.004		34.317.499
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.295.784)	(1.326.190)		(132.241)
	26.683.843	26.246.814		34.185.258
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	-		1.130.306
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.176.411	46.818.568		22.582.244
Tagihan derivatif	542.727	1.576.659		210.396
Kredit yang diberikan	914.189.177	899.458.207		877.431.193
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(72.324.378)	(65.165.002)		(38.363.840)
	841.864.799	834.293.205		839.067.353
Piutang dan pembiayaan syariah	-	38.915.673		25.766.197
- Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.449.489)		(745.029)
	-	37.466.184		25.021.168
Piutang Sewa Pembiayaan	3.758.505	3.619.224		4.191.596
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(225.829)	(213.060)		(87.500)
	3.532.676	3.406.164		4.104.096
Tagihan akseptasi	5.400.017	6.817.436		9.346.063
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.094)	(546.260)		-
	5.158.923	6.271.176		9.346.063
Penyertaan saham	5.303.449	1.489.800		745.354
- Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-		(50)
	5.303.449	1.489.800		745.304
Aset tetap:				
- Biaya perolehan	46.643.444	46.837.964		44.075.680
- Akumulasi penyusutan	(14.751.483)	(14.652.804)		(12.643.051)
Nilai buku	31.891.961	32.185.160		31.432.629

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Aset pajak tangguhan - neto	9.958.711	8.313.545	4.541.298	
Aset lain-lain - neto	28.745.909	27.195.956	19.824.426	
TOTAL ASET	1.411.051.974	1.511.804.628	1.416.758.840	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	22.802.245	11.845.910	7.549.312	
Simpanan nasabah				
- Giro	174.329.968	185.151.229	168.826.135	
- Giro <i>wadiah</i>	-	6.303.202	2.020.866	
- Tabungan	443.867.205	460.453.588	405.355.483	
- Tabungan <i>wadiah</i>	-	9.247.604	6.951.688	
- Deposito berjangka	431.117.600	426.399.550	413.223.653	
Total simpanan nasabah	1.049.314.773	1.087.555.173	996.377.825	
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	20.074.302	23.785.996	17.969.829	
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.556.514	40.478.672	49.902.938	
Liabilitas derivatif	878.258	407.774	184.605	
Liabilitas akseptasi	5.400.017	6.817.436	9.346.063	
Utang pajak	3.680.900	1.400.638	185.443	
Surat berharga yang diterbitkan	32.334.036	34.489.091	38.620.837	
Pinjaman yang diterima	35.123.555	35.968.985	30.921.771	
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	4.897.385	3.681.709	609.493	
Liabilitas imbalan kerja	8.933.841	10.397.201	10.662.581	
Liabilitas lain-lain	21.790.794	20.052.299	19.359.607	
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.068	1.465.392	1.465.366	
TOTAL LIABILITAS	1.216.287.688	1.278.346.276	1.183.155.670	
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Giro <i>mudharabah</i>	-	1.623.563	4.080.803	
Tabungan <i>mudharabah</i>	-	6.147.015	2.025.354	
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	-	25.776.398	18.712.677	
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	-	33.546.976	24.818.834	
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham				
Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)	6.167.291	6.167.291	6.167.291	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)				
Tambahan modal disetor	3.981.135	3.411.813	2.900.994	
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.018.966	17.099.207	17.099.207	
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(49.087)	(54.749)	(14.970)	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (<i>securities</i>) setelah dikurangi pajak tangguhan	1.501.059	4.623.064	-	
Cadangan kerugian penurunan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (<i>securities</i>)	964.411	975.877	-	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual -bersih	-	-	715.770	
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(452.254)	(1.469.726)	189.519	
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(1.644.317)	(1.649.076)	(2.106.014)	
Opsi Saham	79.486	72.894	22.409	
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.532.631	1.228.805	21.796	
Dampak transaksi pengendalian non pengendali	1.758.580	-	-	
Saldo laba				
- Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	3.022.685	
- Belum ditentukan penggunaannya	157.742.954	163.949.482	178.304.746	
Total saldo laba	160.765.639	166.972.167	181.327.431	
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	191.623.540	197.377.567	206.323.433	
Kepentingan non-pengendali	3.140.746	2.533.809	2.460.903	
TOTAL EKUITAS	194.764.286	199.911.376	208.784.336	
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	1.411.051.974	1.511.804.628	1.416.758.840	

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah:				
- Pendapatan bunga	29.634.922	30.381.543	112.584.087	118.379.729
- Pendapatan syariah	359	961.320	4.348.425	3.376.547
Total pendapatan bunga dan syariah	29.635.281	31.342.863	116.932.512	121.756.276
Beban bunga dan syariah:				
- Beban bunga	(6.450.101)	(10.030.976)	(36.190.771)	(38.671.838)
- Beban syariah	-	(344.600)	(1.531.824)	(1.377.133)
Total beban bunga dan syariah	(6.450.101)	(10.375.576)	(37.722.595)	(40.048.971)
Pendapatan bunga dan syariah neto	23.185.180	20.967.287	79.209.917	81.707.305
Pendapatan premi	1.695.569	1.516.078	6.208.716	5.373.757
Beban klaim	(1.230.064)	(957.273)	(5.327.065)	(4.363.029)
Pendapatan premi - neto	465.505	558.805	881.651	1.010.728
Pendapatan operasional lainnya:				
- Provisi dan komisi lainnya	3.797.575	4.167.458	15.122.682	14.505.762
- Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.795.245	1.637.278	7.239.896	7.065.981
- Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	1.079.094	635.574	2.860.653	1.839.341
- Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	366.871	82.860	1.257.984	154.157
- Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	-	342.351	80.980
- Lain-lain	1.218.285	1.478.758	2.640.273	4.792.909
Total pendapatan operasional lainnya	8.257.070	8.001.928	29.463.839	28.439.130
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(8.462.730)	(6.549.451)	(30.617.491)	(21.556.319)
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto	(1.218.431)	(38.420)	(2.157.162)	(608.271)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto	(137.403)	(5.214)	(75.231)	(595.015)
Beban operasional lainnya:				
- Tenaga kerja dan tunjangan	(7.663.337)	(7.061.704)	(26.319.791)	(24.243.276)
- Umum dan administrasi	(3.963.953)	(3.631.666)	(17.269.844)	(15.366.752)
- Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - Neto	(71.621)	(192.759)	-	-
- Lain-lain	(1.419.822)	(1.921.838)	(6.341.724)	(5.355.597)
Total beban operasional lainnya	(13.118.733)	(12.807.967)	(49.931.359)	(44.965.625)
LABA OPERASIONAL	8.970.458	10.126.968	26.774.164	43.431.933
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(169)	28.737	(49.318)	(67.880)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	8.970.289	10.155.705	26.724.846	43.364.053
BEBAN PAJAK	(2.110.207)	(1.985.803)	(8.064.453)	(8.950.228)
LABA TAHUN BERJALAN	6.860.082	8.169.902	18.660.393	34.413.825

Pendapatan komprehensif lainnya:

Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

- Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.228.218	(915.295)	(2.034.087)	(1.291.782)
- Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(209.800)	228.824	367.922	322.945
- Surplus revaluasi aset tetap	(80.276)	-	-	3.316.985
- Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	5.662	14.036	(39.779)	(64.820)
- Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.748.071)	(3.364.417)	4.633.561	-
- Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.057)	-	868.461	-
- Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	-	-	3.696.914
- Pajak penghasilan terkait akun – akun yang akan	624.812	841.104	(698.692)	(895.470)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
direklasifikasi ke laba rugi				
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(2.180.512)	(3.195.748)	3.097.386	5.084.772
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.679.570	4.974.154	21.757.779	39.498.597
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
- Pemilik entitas induk	6.826.171	8.162.840	18.654.753	34.372.609
- Kepentingan non-pengendali	33.911	7.062	5.640	41.216
TOTAL	6.860.082	8.169.902	18.660.393	34.413.825
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
- Pemilik entitas induk	4.635.593	5.003.669	21.727.515	39.403.628
- Kepentingan non-pengendali	43.977	(29.515)	30.264	94.969
TOTAL	4.679.570	4.974.154	21.757.779	39.498.597
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)				
- Dasar	56	67	152	281
- Dilusian	55	66	151	281

*) Tidak diaudit

3. Laporan Arus-Kas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Arus Kas dari Kegiatan Operasi				
Pendapatan yang diterima				
Penerimaan bunga dan investasi	26.398.945	29.064.010	109.112.566	117.464.011
Pendapatan syariah	-	961.320	4.348.425	3.376.547
Pendapatan premi	1.695.569	1.516.078	6.208.716	5.373.757
Beban yang dibayar				
Beban bunga	(6.737.186)	(10.356.102)	(36.190.771)	(38.666.742)
Beban syariah	-	(344.600)	(1.531.824)	(1.377.133)
Beban klaim	(1.230.064)	(957.273)	(5.327.065)	(4.363.029)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.795.245	1.637.278	7.239.896	7.065.981
Pendapatan operasional lainnya	8.075.842	5.646.308	25.210.052	22.212.741
Beban operasional lainnya	(13.400.335)	(11.163.148)	(49.474.810)	(46.257.369)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(14.573)	26.171	(84.532)	(68.021)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(1.128.455)	(1.661.969)	(4.953.877)	(9.357.307)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	15.454.988	14.368.073	54.556.776	55.403.436
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain	(39.524)	934.149	264.550	(2.854.149)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	9.612.526	(5.209.656)	(11.940.401)	(12.637.154)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(406.623)	(4.443.287)	6.744.495	(6.172.212)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	24.642.157	2.433.828	(24.236.324)	(13.185.691)
Kredit yang diberikan	(14.730.970)	(26.268.235)	(35.685.632)	(74.427.400)
Piutang dan pembiayaan syariah	38.915.673	(3.219.072)	(13.149.476)	(6.025.669)
Piutang sewa pembiayaan	(139.281)	80.362	572.372	(803.779)
Aset lain-lain	(3.448.749)	(3.461.409)	(11.322.226)	6.655.602
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(1.169.254)	(129.876)	4.296.598	(913.645)
Simpanan:				
Giro	(10.821.261)	1.101.501	16.325.094	(9.271.846)
Giro Wadiah	(6.303.202)	1.009.490	4.282.336	(256.984)
Tabungan	(16.586.383)	(16.940.357)	55.098.105	25.436.778
Tabungan Wadiah	(9.247.604)	86.255	2.295.916	1.349.877
Deposito berjangka	4.718.050	24.592.513	13.175.897	55.810.139

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(3.711.694)	(3.069.300)	5.816.167	8.838.671
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(29.922.158)	(30.341.515)	(9.424.266)	12.523.543
Liabilitas lain-lain	2.464.835	4.322.086	291.044	1.252.567
Kenaikan (penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer	(33.546.976)	(2.049.577)	8.728.142	3.859.957
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi	(34.265.450)	(46.204.027)	66.689.187	44.582.044
Arus Kas Dari Kegiatan Investasi				
Hasil penjualan aset tetap	14.404	2.566	35.214	141
Penyertaan saham	(180.467)	(129.116)	(280.175)	(228.110)
Penerimaan dividen	-	-	6.669	6.753
Perolehan aset tetap	(895.676)	(1.383.175)	(3.129.034)	(3.695.364)
Penurunan / (kenaikan) efek-efek dan Obligasi				
Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	(1.270.825)
Penurunan/ (Kenaikan) efek-efek dan Obligasi				
Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Biaya perolehan diamortisasi	17.314.822	(1.316.891)	(112.640.485)	-
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi	16.253.083	(2.826.616)	(116.007.811)	(5.187.405)
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan				
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman yang diterima	(927.142)	(10.135.171)	4.935.803	(9.592.989)
Pembagian laba untuk dividen	-	(20.623.565)	(20.623.565)	(16.175.565)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.998.840	12.102.950
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(2.823.500)	-	(6.292.850)	(4.419.500)
Penambahan modal saham	-	-	-	-
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan	(3.750.642)	(30.758.736)	(19.981.772)	(18.085.104)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(21.763.009)	(79.789.379)	(69.300.416)	21.309.532
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode	167.253.135	236.906.429	236.906.429	215.757.148
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode	145.923.125	158.651.829	167.253.135	236.906.429
Kas dan Setara Kas akhir tahun/periode terdiri dari:				
Kas	18.682.911	20.887.985	32.161.564	30.219.214
Giro Pada Bank Indonesia	36.409.115	59.718.025	51.530.969	71.416.449
Giro Pada Bank Lain	13.205.459	13.832.037	9.154.378	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	67.580.978	53.693.363	63.732.017	113.800.580
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	10.044.662	10.520.419	10.674.207	11.232.450
Total Kas dan Setara Kas	145.923.125	158.651.829	167.253.135	236.906.429

*) Tidak diaudit

4. Tabel Rasio (Bank Saja)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Permodalan				
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	19,40%	18,23%	20,61%	22,55%
Aktiva Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,98%	1,84%	1,82%	1,74%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,97%	2,13%	1,81%	1,98%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	6,17%	5,09%	5,42%	3,36%
NPL bruto	3,12%	2,81%	2,94%	2,62%
NPL neto	0,86%	0,63%	0,80%	1,04%
Profitabilitas				
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset (ROA)	2,65%	3,19%	1,98%	3,50%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1)	15,47%	20,39%	11,05%	19,41%

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Marjin bunga bersih (NIM)	7,00%	6,66%	6,00%	6,98%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,83%	72,97%	81,22%	70,10%
<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	41,71%	41,50%	45,40%	40,03%
Likuiditas				
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	86,77%	90,39%	83,66%	88,64%
Solvabilitas				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	6,24	6,44	6,39	5,67
Rasio Liabilitas terhadap Aset (kali)	0,86	0,85	0,85	0,84
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
- Utama Rupiah	3,03%	5,57%	3,19%	6,15%
- Valuta Asing	4,01%	4,00%	4,01%	8,07%
Posisi Devisa Neto	0,80%	2,05%	1,07%	1,87%
Persentase pelanggaran BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*) Tidak diaudit

Berdasarkan POJK No. 06/2015 yang antara lain mengatur mengenai kewajiban bank untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK, Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan bulanan dan triwulanan terkini di dalam *website* Perseroan bri.co.id.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan posisi keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 30 Maret, 31 Desember 2020, dan 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang disajikan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasi serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1681) dan Danil Setiadi Handaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008).

1. Umum

1.1 Kegiatan Usaha

Perseroan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan *customer base* lebih dari 100 juta nasabah, Perseroan memiliki produk dan layanan perbankan yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari segmen mikro hingga korporasi. Bisnis Perseroan juga didukung oleh jaringan kerja yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia, SDM yang handal serta infrastruktur serta kapabilitas teknologi dan digital yang terdepan. Dengan dukungan tersebut serta pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, perseroan mampu mencatat prestasi sebagai Bank dengan laba terbesar selama 14 tahun berturut-turut.

Pada era digitalisasi perbankan saat ini, Perseroan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanannya. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut inovasi produk dan layanan perbankan yang terintegrasi dengan sistem digital. Kemampuan beradaptasi dari sisi teknologi ini tidak hanya didorong oleh perilaku nasabah yang berubah, tetapi juga kompetisi layanan keuangan yang kini diwarnai oleh pemain-pemain baru jasa keuangan yang bertumpu pada teknologi, yaitu perusahaan *financial technology* atau *fin-tech*. Untuk dapat terus memberikan layanan terbaik dan menyeluruh bagi nasabah, Perseroan telah menetapkan tiga kerangka strategi digital yaitu *Digitizing the Core*, *Digital Ecosystem* dan *New Digital Proposition*.

Strategi *Digitizing the Core* diimplementasikan Perseroan melalui digitalisasi proses bisnis bank dengan tujuan meningkatkan produktifitas dan menangkap potensi bisnis yang lebih besar. Hal ini diwujudkan antara lain melalui BRISpot dan Agen BRILink. BRISpot merupakan sebuah aplikasi berbasis *digital* dengan konsep *one stop service* yang memungkinkan *Loan Officer* untuk melakukan proses kredit secara *end-to-end*, dimanapun dan kapanpun. BRISpot terbukti dapat mempercepat *turn-around-time* proses pelayanan pinjaman sehingga produktifitas *Loan Officer* meningkat. BRISpot juga telah dilengkapi dengan aspek mitigasi risiko terbaik di kelasnya.

Sementara itu, BRILink merupakan layanan *branchless banking* untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sebagai perwujudan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dan LKD (Layanan Keuangan Digital). Perseroan bekerja sama dengan nasabah sebagai Agen BRILink dalam melakukan pelayanan finansial kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sampai dengan 31 Maret 2021 jumlah Agen BRILink telah mencapai sebesar 466.864 agen dengan cakupan lebih dari 70% desa di Indonesia, kedepan cakupan ini akan terus ditingkatkan.

Selanjutnya, Strategi *Digital Ecosystem* diimplementasikan dengan membangun ekosistem yang mampu menawarkan produk dan layanan di luar bisnis inti Perseroan dengan tujuan menangkap potensi likuiditas, peluang bisnis dan sumber pertumbuhan baru. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan *digital platform* untuk bisnis nasabah, *new business model* maupun *partnership* dengan *Fintech*. Inisiatif yang telah dikembangkan Perseroan antara lain Indonesia Mall, BRIBill, BRIMola, BRISStore, Junio Smart dan API (*Application Programming Interface*).

Kerangka strategi ketiga adalah *New Digital Proposition* yang diimplementasikan melalui inovasi produk dan layanan digital yang sama sekali baru dan mampu memberikan kontribusi *profit* bagi Perseroan di masa depan, dengan tujuan menjangkau segmen yang belum terjangkau (*tapped the untapped*) dan menjadikan Perseroan bagian dari kehidupan nasabah.

Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan cakupan usahanya untuk mengoptimalkan *economic of scale* yang dimiliki, antara lain dengan meningkatkan sinergi dengan Perusahaan Anak dalam rangka mendukung visi Perseroan untuk menjadi "*Integrated Financial Solution*". Sampai dengan 31 Maret 2021 Perseroan telah memiliki 7 Perusahaan Anak, dengan cakupan bisnis yang beragam, mulai dari bank konvensional yang berfokus pada digital, asuransi jiwa, asuransi umum, multifinance, perusahaan sekuritas, remitansi dan venture capital.

Perseroan juga memiliki teknologi terdepan diantaranya BRISat, satelit yang dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Perseroan. Perseroan memanfaatkan BRISat sebagai *backbone* jaringan untuk membentuk *financial ecosystem* yang menyatukan seluruh penjuru negeri melalui unit-unit kerja Perseroan yang terus bertumbuh. Melalui BRISat, Perseroan mampu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, “*reach the unreachable*”. Seluruh keunggulan Perseroan tersebut kini didukung kinerja yang kuat, sehingga diyakini akan semakin meningkatkan kemampuan Perseroan untuk terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Kinerja Perseroan

Kegiatan dan Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal Perseroan maupun faktor eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

Perekonomian Global

Jumlah kasus Covid-19 di dunia masih menunjukkan tren kenaikan. Namun demikian, negara-negara di dunia terus mengakselerasi program vaksinasi sebagai salah satu upaya menekan penyebaran kasus Covid-19. Pandemi ini telah memberikan efek yang nyata terhadap perekonomian dunia dimana perekonomian secara global diperkirakan berkontraksi -3,3% (IMF) pada tahun 2020.

Perekonomian dunia telah diperkirakan akan mulai memasuki tahap pemulihan di tahun 2021. IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh sebesar 6% di 2021, 4,4% di tahun 2022, dan 3,3% dalam jangka menengah. Pertumbuhan yang terjadi akan kembali ditopang oleh naiknya aktivitas ekonomi; kebijakan fiskal dan moneter yang diakomodasi dari sebagian besar negara-negara di dunia; serta vaksinasi yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak positif pada keyakinan konsumen dan peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi. Negara-negara maju dan China diperkirakan akan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi global di tahun ini yang akan diikuti oleh negara-negara berkembang di tahun berikutnya.

Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia

(angka tersaji dalam %)

Negara/Kawasan	2020	2021F	2022F
United States	-3,5	7,0	4,9
China	2,3	8,1	5,7
Germany	-4,8	3,6	4,1
Japan	-4,7	2,8	3,0
United Kingdom	-9,8	7,0	4,8
India	-7,3	9,5	8,5
ASEAN-5	-3,4	4,3	6,3

Sumber: *World Economic Outlook Update* Juli 2021, IMF

Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Periode kontraksi ekonomi berlanjut sejak kuartal II tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun ini, namun terus dalam tren perbaikan. Kinerja ekonomi di Triwulan I 2021 memperlihatkan bahwa kondisi resesi ekonomi Indonesia belum berakhir. Kontraksi ekonomi di Q1 2021 disebabkan oleh turunnya pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga (-2,23% yoy) dan komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (atau PMTDB, -0,23% yoy), serta komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar -4,53%. Di sisi lain, pertumbuhan pengeluaran rutin pemerintah mampu tumbuh sebesar 2,96% yang diiringi dengan pertumbuhan positif dari sisi ekspor dan impor (ekspor: 6,74% yoy; impor 5,27% yoy). Pertumbuhan positif ekspor dan impor memberikan sinyal positif bahwa permintaan global mulai menguat dan pelaku usaha domestik mulai mempersiapkan diri untuk memasuki tahap pemulihan ekonomi.

Tabel Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

(angka tersaji dalam %)

Sumber	2020	2021F
World Bank	4,4	4,8
ADB	4,5	5,0
IMF	4,3	5,8
APBN	5,0	-
OECD	4,9	5,4
BRI	3,1 – 4,2	4,8 – 5,2

Sumber: Bloomberg, BRI

Nilai Tukar USD/IDR

Nilai tukar Rupiah terhadap USD merupakan salah satu indikator utama kesehatan perekonomian Indonesia, dan diperhatikan oleh banyak pelanggan, baik besar maupun kecil, mengingat pengalaman krisis ekonomi regional tahun 1997. Nilai tukar yang menurun meningkatkan biaya impor yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dan UMKM. Belakangan ini, nilai tukar Rupiah terhadap USD juga pulih, karena sempat membaik ke level sebelum pandemi, ditutup pada Rp14.050/USD pada akhir tahun 2020 sebelum melemah hingga mencapai Rp14.600/USD pada pertengahan April 2021. Per 15 Juni 2021, Rupiah terdepresiasi lebih lanjut sebesar 1,23% menjadi Rp14.225 per dolar AS dari Rp14.050 per dolar AS per 30 Desember 2020. Tekanan signifikan terhadap Rupiah telah terjadi sejak Maret 2021, yang dipengaruhi dengan meningkatnya inflasi di AS seiring pulihnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi AS dari pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa dinamika pada triwulan I tahun 2021 seperti peningkatan jumlah kasus di beberapa negara turut mempengaruhi pergerakan modal keluar dari Indonesia dan memberikan tekanan pada Rupiah. Posisi cadangan devisa Indonesia juga terjaga dengan baik, tercatat sebesar USD135,9 miliar per Desember 2020 atau setara dengan 10,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Per 30 Juni 2021, cadangan devisa meningkat menjadi USD137,1 miliar, setara dengan 8,8 bulan cakupan impor dan persyaratan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia memproyeksikan volatilitas nilai tukar yang lebih rendah selama tahun 2021 dibandingkan yang dialami selama tahun 2020, didorong oleh ekspektasi pemulihan ekonomi domestik secara bertahap, kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia dan membaiknya kinerja keuangan peluang investasi portofolio domestik. Ketiga hal tersebut diharapkan dapat menjadi landasan masuknya dana dari investor global dan diharapkan menjadi faktor utama yang menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Inflasi dan Suku Bunga

Tingkat inflasi sepanjang tahun 2021 tercatat masih rendah dibandingkan rata-rata kinerja inflasi Indonesia. Rendahnya tingkat inflasi menunjukkan permintaan domestik masih belum kuat sejak awal virus Covid-19 mewabah. Secara tahunan, inflasi pada April 2021 tercatat hanya sebesar 1,42 persen, sedikit meningkat dibandingkan bulan Maret yang sebesar 1,36 persen. Perkembangan inflasi tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga bahan pangan dan energi, sedangkan inflasi inti cenderung masih dalam tren pelemahan. Meskipun naik, inflasi kelompok bahan pangan yang fluktuatif (*volatile food*) relative terjaga dipengaruhi oleh pasokan yang memadai pada masa panen sehingga memitigasi kenaikan permintaan di pola musiman Ramadhan.

Pada tahun ini, Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan (*BI 7 Days Reserve Repo Rate*) sebesar 25 bps, tepatnya pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Februari. Pemangkasan suku bunga pada RDG tersebut melanjutkan pemangkasan suku bunga acuan yang telah dilakukan pada tahun 2020 dengan pemangkasan sebesar 125 bps. Rendahnya tingkat inflasi mendorong Bank Indonesia untuk menjaga suku bunga acuan tetap pada angka yang rendah (3,5%). Hal ini sejalan dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat upaya pemulihan ekonomi.

Bank Indonesia diperkirakan akan tetap menjaga suku bunga acuan pada tingkat yang rendah untuk dua tahun mendatang dengan ekspektasi inflasi yang terkendali. Kebijakan tersebut mungkin saja diambil dengan memperhatikan kecenderungan suku bunga global dan keinginan Bank Indonesia untuk menstimulus kegiatan ekonomi di tengah upaya pemulihan ekonomi dari efek pandemi

Strategi Pemerintah Menghadapi *Second Wave Covid*

PPKM Darurat

Indonesia telah memasuki gelombang 2 Covid-19 pada pertengahan tahun 2021. Dengan adanya *second wave* Covid-19, Pemerintah kembali menerapkan PPKM Darurat sejak tanggal 3 -20 Juli 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Kasus konfirmasi Covid-19 mengalami peningkatan tertinggi dalam seminggu terakhir (14 Juli – 20 Juli) dan mencapai titik tertinggi penambahan kasus sebesar 56.757 pada 15 Juli 2021. Sementara itu tingkat keterisian tempat tidur (TT) isolasi dan intensif telah meningkat dua kali lipat, per 20 Juli BOR sebesar 74%, dibandingkan titik terendahnya pada Mei 2021. Hal tersebut melatarbelakangi diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah. PPKM darurat diterapkan di tujuh provinsi utama pusat penularan Covid-19 yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Adapun ketentuan dari PPKM darurat tersebut sebagai berikut:

- 100% WFH untuk sektor *non-esensial*, 50% WFH untuk sektor esensial, dan 100% WFO dengan protokol kesehatan yang ketat untuk sektor kritikal.
- Supermarket, pasar tradisional dan toko bahan pangan dapat beroperasi hingga pukul 20.00 dengan maksimum pengunjung 50%.
- Restoran dapat beroperasi hanya untuk *delivery/takeaway*.
- Transportasi publik dapat beroperasi dengan kapasitas penumpang 70% dan protokol kesehatan yang ketat.
- Konstruksi dapat beroperasi 100% dengan protokol Kesehatan yang ketat.
- Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.
- Tempat ibadah ditutup.
- Fasilitas dan area publik ditutup.

Kondisi ini tentunya akan menghambat laju perekonomian Indonesia yang sebelumnya sudah dalam fase pemulihan. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan tetap tumbuh positif.

Realokasi APBN untuk Dana PEN

Untuk menghadapi gelombang 2 Covid-19, pemerintah Indonesia melakukan realokasi APBN dengan meningkatkan pagu anggaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebelumnya, anggaran PEN sebesar Rp699,43 T kemudian ditingkatkan menjadi Rp744,75 T. Dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Perlindungan Sosial meningkat menjadi Rp187,84 T dari semula Rp153,86 T. Aspek yang ditambahkan adalah tambahan bansos tunai, tambahan penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik dan tambahan pra kerja.
- Anggaran Kesehatan meningkat menjadi Rp214,95 T dari semula Rp193,93 T. Aspek yang ditambahkan adalah tambahan untuk kenaikan klaim pasien, RS darurat dan percepatan vaksinasi.
- Anggaran Insentif Usaha tetap di angka Rp62,83 T yang mencakup angsuran PPh 25, tarif PPh badan, PPh final UMKM, PPnBM Kendaraan Bermotor & PPN Perumahan.
- Anggaran Dukungan UMKM dan Korporasi menurun menjadi Rp161,20 T dari semula Rp171,77 T yang mencakup tambahan pembebasan rekening minimum s.d Desember dan penurunan perkiraan penempatan dana.
- Anggaran Program Prioritas meningkat menjadi Rp117,94 T dari semula Rp117,04 T yang mencakup dukungan untuk sektor ketahanan pangan, ICT dan pariwisata.

Kondisi Industri Perbankan di Indonesia

Secara umum kinerja perbankan Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator kunci sebagai berikut:

Tabel Indikator Keuangan Utama Perbankan Indonesia

(angka tersaji dalam %)

Indikator	2019	2020	Mar20	Mar21
Aset (Rp triliun)	8.501	9.158	8.793	9.276
Kredit (Rp triliun)	5.617	5.482	5.712	5.496
Dana Pihak Ketiga (Rp triliun)	5.999	6.665	6.214	6.804
Laba setelah pajak (Rp triliun)	156	105	42	33
CAR (%)	23,40	23,89	21,67	24,04
NPL (%)	2,56	3,06	2,77	3,17
NIM (%)	4,91	4,45	4,31	4,62
ROA (%)	2,47	1,59	2,57	1,87
BOPO (%)	79,39	86,58	88,84	86,44
LDR (%)	94,43	82,54	92,55	80,93

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, OJK

Berdasarkan tabel tersebut, secara umum kondisi kinerja perbankan nasional sampai dengan Maret 2021 masih terjaga, hal ini tercermin dari permodalan perbankan yang stabil dimana *Capital Adequacy Ratio* (CAR) masih berada pada level yang aman yakni sebesar 24,04%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 9,50% terutama didorong oleh peningkatan giro yang masih signifikan sebesar 14,84%. Namun, pertumbuhan kredit masih dalam tren pertumbuhan negatif, penyaluran kredit perbankan sampai dengan Maret 2021 tercatat berada pada level negatif yaitu 3,77% secara yoy. Perlambatan kredit perbankan diakibatkan pandemi Covid-19 yang masih membuat kegiatan ekonomi masyarakat melemah sehingga permintaan terhadap kredit menjadi rendah.

Kondisi Industri Perbankan di Indonesia

Peraturan di Industri Perbankan

Struktur Industri Perbankan Ke Depan

Sejak tahun 2014, BI telah mengimplementasikan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk serta tatanan industry perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Hal ini dilakukan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat serta upaya lanjutan program penyehatan perbankan nasional.

Penyusunan API difokuskan pada enam pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional, yaitu: struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan. Beberapa program yang akan dilakukan BI untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global adalah sebagai berikut:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional, untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) serta meningkatkan daya saing dan akses kredit BPR untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membuat rencana bisnis yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Pencapaiannya dapat dilakukan melalui penambahan modal baru, memberi kesempatan untuk melakukan penggabungan untuk mencapai persyaratan modal minimum baru, menerbitkan saham baru atau melakukan secondary offering di pasar modal serta menerbitkan obligasi. Dalam waktu 10 - 15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal.
2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan oleh BI serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision secara bertahap dan menyeluruh. BI diharapkan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan hal-hal tersebut dalam lima tahun kedepan dan memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dalam dua tahun kedepan.
3. Program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh BI, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi BI sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, kompetensi pemeriksa bank, dan efektivitas enforcement, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di BI. Diharapkan BI dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam dua tahun kedepan.
4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang difokuskan untuk *meningkatkan good corporate governance (GCG)*, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Peningkatan standar GCG yang didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan semakin kuat.
5. Program peningkatan perlindungan nasabah, untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan keterbukaan informasi produknya. Program ini juga diharapkan mendorong pembentukan lembaga mediasi independen antara nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan akan meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan dalam dua sampai lima tahun kedepan

3. Langkah – Langkah yang Ditempuh Perseroan dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan

Memperhatikan tantangan yang masih akan dihadapi Perseroan, serta prospek usaha yang diharapkan membaik, pada tahun 2020 Perseroan juga telah mengkaji kembali program transformasi BRIVolution 1.0. dan mempertajamnya menjadi BRIVolution 2.0 dengan visi menjadi ***“The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion”*** di tahun 2025.

BRIVolution 2.0 akan fokus pada penguatan BRI sebagai Grup untuk mendiversifikasi pendapatan serta untuk mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan baru khususnya di segmen mikro dan ultra mikro. Perseroan akan tetap menjaga komitmen untuk menumbuhkan segmen UMKM khususnya Mikro yang telah menjadi *core competence* Perseroan selama lebih dari 100 tahun terutama melalui penguatan ultra mikro. Segmen mikro & ultra mikro merupakan segmen yang memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi. Namun demikian, BRI terus berinovasi dan bertransformasi sehingga pelayanan dapat diberikan dengan lebih baik dan menjangkau lebih banyak nasabah khususnya nasabah mikro & ultra mikro. Penetrasi BRI ke segmen ultra mikro merupakan langkah inisiatif BRI untuk mendapatkan sumber pertumbuhan baru bagi bisnis BRI kedepan. Pencapaian visi Perseroan tersebut akan didukung dengan *Digital and Culture Transformation* serta Penguatan praktis bisnis yang berbasis *Economic, Social & Governance (ESG)*.

Transformasi digital akan terus dilakukan untuk memperkuat *positioning* Perseroan sebagai hybrid bank, yang mengkombinasikan kekuatan jaringan kerja konvensional dan *branchless banking* (Agen BRILink) yang tersebar di seluruh Indonesia, *financial advisor* yang handal dan kemampuan teknologi dan digital yang terdepan untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang pasar Indonesia yang unik khususnya di segmen mikro dan ultra mikro.

Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar, dimana populasi Indonesia didominasi penduduk usia produktif. Selain itu, potensi pasar pada segmen mikro dan khususnya ultra mikro masih besar. Segmen ultra mikro saat ini tercatat sebagai bagian dari kurang lebih 63 juta unit usaha mikro atau mencapai 99% dari jumlah usaha di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018).

Berdasarkan hasil analisis Perseroan, dari sekitar 45 juta usaha ultra mikro di Indonesia pada tahun 2018, hanya terdapat sekitar 15 juta usaha ultra mikro yang memperoleh akses pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti bank, lembaga pegadaian, lembaga pembiayaan kelompok, BPR dan koperasi. Sekitar 12 juta usaha ultra mikro lainnya mendapatkan akses pendanaan dari sumber informal seperti rentenir dan keluarga/kerabat. Sementara masih terdapat sekitar 18 juta usaha ultra mikro yang belum mendapatkan akses pendanaan sama sekali, baik dari lembaga keuangan formal maupun informal. Di lain sisi, kondisi geografis Indonesia memberikan tantangan yang sangat besar bagi perbankan untuk menjangkau dan melayani masyarakat yang tersebar sampai ke seluruh pelosok. Disisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang mulai bertransisi ke ekonomi digital membawa perubahan yang luar biasa pada aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali layanan finansial. Dengan *Hybrid Bank* yang memadukan digital *capabilities* dan *physical networks* serta layanan financial advisors yang dimiliki Perseroan, Perseroan yakin mampu menjangkau dan memberikan layanan yang sesuai dengan journey literasi digital masyarakat Indonesia.

Transformasi digital akan difokuskan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi bisnis yang diterjemahkan dalam 3 *framework* yang menjadi acuan BRI dalam melakukan Transformasi Digital, yaitu :

1. *Digitizing Core*, yang bertujuan meningkatkan produktifitas dan efisiensi serta menciptakan layanan nasabah yang handal, (*operational excellence*) melalui *business process reengineering*;
2. *Digital Ecosystem* yang bertujuan menciptakan platform berbasis digital (*Bank As A Platform*) yang mampu menawarkan produk dan layanan baru diluar bisnis utama Bank;
3. *New Digital Proposition* yang bertujuan menciptakan produk dan model bisnis baru dengan fokus pada *customer centric*, inovasi, dan *customer experience*;

Selain Transformasi digital, Perseroan juga menempatkan transformasi budaya perusahaan sebagai pondasi penting untuk pencapaian visi perusahaan. Di dalam *Culture transformation* diarahkan agar *mindset* dan perilaku *Human Capital* dalam bekerja sesuai dengan kebutuhan di era digital dan fokus kepada kebutuhan nasabah. Perseroan akan melakukan pengembangan Sistem Organisasi dan *Human Capital* yang baru mulai dari rekrutmen, development, *grooming talent*, sampai dengan penilaian kinerja untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. *Culture* yang dibentuk akan mengarah kepada *performance driven culture*, dimana setiap individu akan mampu merancang dan merencanakan suksesnya sendiri dan perusahaan bertugas untuk menyiapkan sistem dan kebijakan yang berlaku.

Dalam menjalankan bisnis kedepan, Perseroan juga fokus untuk memastikan *sustainability* perusahaan. Sejak tahun 2017, Perseroan telah menjadi salah satu *First Movers on Sustainable Finance* di Indonesia. Melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan, Perseroan memastikan bahwa Kerangka Keuangan Berkelanjutan diterapkan dalam aktivitas perbankan Perseroan. Di sisi Aset, 64,7% dari pinjaman Perseroan dikategorikan sebagai portofolio pinjaman berkelanjutan. Di sisi pendanaan, Perseroan telah menerbitkan *Sustainability Bond* pada tahun 2019 dan menggunakan semua dana untuk proyek sosial dan hijau yang memenuhi syarat. Terakhir, pada *Operation & Culture*, Perseroan telah mengembangkan inisiatif digital untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kesadaran karyawan & nasabah tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan. Perseroan berkomitmen untuk terus terdepan dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengintegrasikan ESG kedalam aktivitas bisnis dengan mengacu pada *best practice ESG framework*.

4. Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, antara lain yaitu:

No.	Kebijakan Akuntansi	Materi Perubahan	Dampak Perubahan terhadap Perseroan
1.	PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi"	Mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
2.	PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Ventura Bersama"	Mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK No. 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama sebagaimana dimaksud dalam PSAK No. 15 paragraf 38.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
3.	PSAK No. 24 (Amandemen 2018), "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"	Amandemen ini memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada saat awal pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK No.24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlibat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak atas aset berubah.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
4.	PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi"	Amandemen ini mengizinkan asuradur yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK No. 71 (<i>deferral approach</i>) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (<i>overlay approach</i>).	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
5.	PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"	Mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

No.	Kebijakan Akuntansi	Materi Perubahan	Dampak Perubahan terhadap Perseroan
6.	PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"	Mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
7.	PSAK No. 73, "Sewa"	Menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (<i>right-of-use assets</i>) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (<i>underlying assets</i>) bernilai rendah.	Perubahan kebijakan akuntansi ini menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
8.	ISAK No. 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"	Mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
9.	ISAK No. 34, "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"	mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.	Perubahan kebijakan akuntansi ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Sebelum 1 Februari 2021, BRIS (Perusahaan Anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi wa'd" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

5. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
1 Dolar Amerika	14.525,00	16.310,00	14.050,00	13.882,50
1 Pound Sterling Inggris	19.961,71	20.090,66	19.012,46	18.238,14
1 Yen Jepang	131,17	150,44	135,97	127,81
1 Euro Eropa	17.040,73	17.936,11	17.234,43	15.570,61
1 Dolar Hong Kong	1.868,49	2.103,68	1.812,30	1.782,75
1 Riyal Arab Saudi	3.872,50	4.341,00	3.744,50	3.701,00
1 Dolar Singapura	10.792,44	11.454,86	10.606,18	10.315,05
1 Ringgit Malaysia	3.497,89	3.786,44	3.481,17	3.391,77
1 Dolar Australia	11.052,80	10.057,56	10.752,47	9.725,39
1 Renminbi	2.214,28	2.299,47	2.150,26	1.994,18
1 Baht Thailand	463,17	497,64	468,10	465,16
1 Franc Swiss	15.414,42	16.929,64	15.900,87	14.336,99
1 Dolar Kanada	11.525,04	11.498,06	10.980,86	10.639,97
1 Dolar Brunei Darussalam	10.558,65	11.856,22	10.213,36	10.290,96
1 Kroner Denmark	2.291,19	2.401,60	2.316,42	2.083,37
1 Won Korea Selatan	12,84	13,38	12,94	12,02
1 Dolar Selandia Baru	10.150,07	9.772,96	10.087,90	9.335,29
1 Kina Papua Nugini	4.139,67	4.762,61	3.951,60	4.047,54
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.954,37	4.440,33	3.825,06	3.779,66
1 Kroner Swedia	1.666,38	1.616,62	1.713,65	1.487,05
1 Kroner Norwegia	1.702,24	1.549,55	1.635,74	1.579,16
1 Rupee India	197,9	216,45	191,65	194,74
1 Peso Filipina	299,24	320,12	292,47	274,09
1 Rupee Pakistan	1,99	1,99	1,99	1,99
1 Dolar Taiwan	509,62	539,02	499,77	464,19
1 Dong Vietnam	0,63	0,69	0,61	0,60

6. Analisis Laporan Keuangan

Analisa Laporan Keuangan dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan posisi keuangan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang disajikan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasi serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1681) dan Danil Setiadi Handaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008).

6.1 Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah:				
- Pendapatan bunga	29.634.922	30.381.543	112.584.087	118.379.729
- Pendapatan syariah	359	961.320	4.348.425	3.376.547
Total pendapatan bunga dan syariah	29.635.281	31.342.863	116.932.512	121.756.276
Beban bunga dan syariah:				
- Beban bunga	(6.450.101)	(10.030.976)	(36.190.771)	(38.671.838)
- Beban syariah	-	(344.600)	(1.531.824)	(1.377.133)
Total beban bunga dan syariah	(6.450.101)	(10.375.576)	(37.722.595)	(40.048.971)
Pendapatan bunga dan syariah neto	23.185.180	20.967.287	79.209.917	81.707.305

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Pendapatan premi	1.695.569	1.516.078	6.208.716	5.373.757
Beban klaim	(1.230.064)	(957.273)	(5.327.065)	(4.363.029)
Pendapatan premi - neto	465.505	558.805	881.651	1.010.728
Pendapatan operasional lainnya:				
- Provisi dan komisi lainnya	3.797.575	4.167.458	15.122.682	14.505.762
- Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.795.245	1.637.278	7.239.896	7.065.981
- Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	1.079.094	635.574	2.860.653	1.839.341
- Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	366.871	82.860	1.257.984	154.157
- Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	-	342.351	80.980
- Lain-lain	1.218.285	1.478.758	2.640.273	4.792.909
Total pendapatan operasional lainnya	8.257.070	8.001.928	29.463.839	28.439.130
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(8.462.730)	(6.549.451)	(30.617.491)	(21.556.319)
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontijensi - neto	(1.218.431)	(38.420)	(2.157.162)	(608.271)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan - neto	(137.403)	(5.214)	(75.231)	(595.015)
Beban operasional lainnya:				
- Tenaga kerja dan tunjangan	(7.663.337)	(7.061.704)	(26.319.791)	(24.243.276)
- Umum dan administrasi	(3.963.953)	(3.631.666)	(17.269.844)	(15.366.752)
- Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - Neto	(71.621)	(192.759)	-	-
- Lain-lain	(1.419.822)	(1.921.838)	(6.341.724)	(5.355.597)
Total beban operasional lainnya	(13.118.733)	(12.807.967)	(49.931.359)	(44.965.625)
LABA OPERASIONAL	8.970.458	10.126.968	26.774.164	43.431.933
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(169)	28.737	(49.318)	(67.880)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	8.970.289	10.155.705	26.724.846	43.364.053
BEBAN PAJAK	(2.110.207)	(1.985.803)	(8.064.453)	(8.950.228)
LABA TAHUN BERJALAN	6.860.082	8.169.902	18.660.393	34.413.825
Pendapatan komprehensif lainnya:				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
- Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1.228.218	(915.295)	(2.034.087)	(1.291.782)
- Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(209.800)	228.824	367.922	322.945
- Surplus revaluasi aset tetap	(80.276)	-	-	3.316.985
- Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	5.662	14.036	(39.779)	(64.820)
- Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	(1.057)	-	868.461	-
- Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Rekapitalisasi Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	-	-	3.696.914
- Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.748.071)	(3.364.417)	4.633.561	-
- Pajak penghasilan terkait akun – akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	624.812	841.104	(698.692)	(895.470)
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan - setelah pajak	(2.180.512)	(3.195.748)	3.097.386	5.084.772
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.679.570	4.974.154	21.757.779	39.498.597
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
- Pemilik entitas induk	6.826.171	8.162.840	18.654.753	34.372.609
- Kepentingan non-pengendali	33.911	7.062	5.640	41.216
TOTAL	6.860.082	8.169.902	18.660.393	34.413.825
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
- Pemilik entitas induk	4.635.593	5.003.669	21.727.515	39.403.628
- Kepentingan non-pengendali	43.977	(29.515)	30.264	94.969

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
TOTAL	4.679.570	4.974.154	21.757.779	39.498.597
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)				
- Dasar	56	67	152	281
- Dilusian	55	66	151	281

*) Tidak diaudit

6.1.1 Total Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
<u>Rupiah</u>				
Kredit yang diberikan				
Mikro	14.360.773	14.022.515	50.706.613	57.606.380
Ritel	9.890.036	9.841.620	37.052.147	34.429.849
Korporasi	1.070.290	2.019.142	6.602.198	7.356.986
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	52.433	180.612	599.221	113.895
Obligasi	5.144	13.073	41.253	10.737
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	-	400	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	1.275.822	1.042.989	5.149.623	-
Obligasi	221.503	204.308	656.994	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	6.500	20.042	71.002	-
<i>Medium-Term Note</i>	5.422	10.067	29.365	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	2.306	2.306	-
Tersedia untuk dijual				
Obligasi Pemerintah	-	-	-	5.115.748
Obligasi	-	-	-	99.798
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	632.795
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	-	-	80.647
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	41.073
Reksadana	-	-	-	23.051
<i>Medium-Term Note</i>	-	-	-	47.508
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	962.812	521.438	3.101.370	-
Obligasi	207.292	45.328	180.222	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	7.072	11.314	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	-	9.610	-
<i>Medium-Term Note</i>	1.577	-	6.335	-
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	-	-	-	1.949.414
Obligasi	-	-	-	66.001
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	19.446
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	-	-	54
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	20.994	-
Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	75.694
Tersedia untuk dijual	-	-	-	-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	12.753	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain				
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	80.085	180.770	595.656	345.737
<i>Inter-bank call money</i>	997	17.423	40.923	322.000
Lain-lain	77.655	71.578	231.890	383.553
Giro pada Bank Indonesia	1.392	63	2.292	249
Lain-lain	313.051	919.393	2.326.172	1.641.919
	28.532.784	29.132.492	107.437.900	110.362.534
<u>Mata uang asing</u>				
Kredit yang diberikan				
Korporasi	469.434	560.124	2.387.848	4.685.632
Ritel	78.779	39.066	495.299	687.480

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	1.472	345	18.508	8.155
Obligasi	151	9.669	2.687	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	56
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	292.904	209.012	1.027.971	-
Obligasi	17.951	44.532	81.452	-
Sertifikat Bank Indonesia	6.593	27.952	112.445	-
Tersedia untuk dijual				
Obligasi Pemerintah	-	-	-	890.670
Obligasi	-	-	-	36.167
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	-	25.616
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	175.875	112.293	520.101	-
Obligasi	6.238	167	21.802	-
Dimiliki hingga jatuh tempo				
Obligasi Pemerintah	-	-	-	437.275
Obligasi	-	-	-	1.917
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain				
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	8.531	17	148.517	8.071
<i>Inter-bank call money</i>	16.692	56.173	77.028	171.026
Lain-lain	21.408	-	110.297	-
Giro dari Bank Indonesia	6	-	33	-
Lain-lain	6.104	189.701	142.199	1.065.130
	1.102.138	1.249.051	5.146.187	8.017.195
Total Pendapatan Bunga	29.634.922	30.381.543	112.584.087	118.379.729
Pendapatan syariah diperoleh dari:				
<i>Murabahah</i>	-	390.369	2.184.363	1.468.365
<i>Musyarakah</i>	-	299.955	1.316.952	901.987
Lain-lain	359	270.996	847.110	1.006.195
Total Pendapatan Syariah	359	961.320	4.348.425	3.376.547
TOTAL PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH	29.635.281	31.342.863	116.932.512	121.756.276

*) Tidak diaudit

Pendapatan Bunga & Syariah

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan membukukan Pendapatan Bunga Dan Syariah sebesar Rp29.635.281 juta, lebih rendah sebesar -5,45% atau mengalami penurunan Rp1.707.582 juta dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp31.342.863 juta.

Penurunan disebabkan oleh dua hal, yang pertama tidak lagi dikonsolidasikannya BRISyariah kedalam laporan keuangan Perseroan sejak dilakukannya merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sehingga menyebabkan penurunan pendapatan syariah sebesar 99,9% atau setara Rp961 Miliar. Penurunan Pendapatan Bunga dan Syariah juga disebabkan oleh kondisi pandemi yang menyebabkan penurunan pada permintaan kredit serta kenaikan kredit yang direstrukturisasi sebagai upaya Perseroan dalam mendukung dan penyelamatan bisnis debitur terdampak pandemi Covid-19 khususnya di segmen UMKM.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan membukukan Pendapatan Bunga Dan Syariah sebesar Rp116.932.512 juta, lebih rendah sebesar -4,12% atau mengalami penurunan Rp4.823.764 juta dibandingkan 31 Desember 2019 sebesar Rp121.756.276 juta.

Penurunan terbesar disumbang oleh pendapatan bunga kredit yang turun 7,18% menjadi Rp97,24 triliun setelah sebelumnya tercatat sebesar Rp104,77 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BRI dalam rangka penyelamatan UMKM terdampak pandemi Covid-19, serta adanya tren perlambatan pertumbuhan kredit akibat pandemi Covid-19. Sampai dengan akhir Desember 2020 BRI telah melakukan restrukturisasi kredit dengan outstanding sebesar Rp186,6 Triliun atau 21,19% (bank saja) kepada lebih dari 2,8 juta debitur dimana 95% komposisi merupakan debitur UMKM.

6.1.2 Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Rupiah				
Deposito berjangka	3.078.805	5.351.493	19.570.294	19.840.268
Tabungan	602.795	755.844	2.832.365	3.166.511
Giro	502.317	779.488	3.001.817	3.261.339
Surat berharga yang diterbitkan	405.754	458.932	1.920.006	1.927.915
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	82.882	300.580	676.803	900.351
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	172.397	153.782	413.391	739.577
Pinjaman yang diterima	7.922	6.972	194.695	219.196
Pinjaman subordinasi	11.589	10.768	47.184	-
Lain-lain	856.973	918.842	3.303.076	3.610.791
	5.721.434	8.736.701	31.959.631	33.665.948
Mata uang asing				
Deposito berjangka	223.555	603.064	2.113.824	2.197.462
Pinjaman yang diterima	143.975	256.992	661.356	1.220.259
Giro	115.276	91.260	479.900	185.485
Surat berharga yang diterbitkan	160.583	168.832	630.847	552.676
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	24.921	121.021	195.938	448.180
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.718	13.039	40.416	42.632
Tabungan	1.356	1.658	7.044	6.742
Lain-lain	49.283	38.409	101.815	352.454
	728.667	1.294.275	4.231.140	5.005.890
Total Beban Bunga	6.450.101	10.030.976	36.190.771	38.671.838
Beban syariah terdiri atas:				
Deposito <i>mudharabah</i>	-	292.357	1.289.073	1.197.310
Lain-lain	-	52.243	242.751	179.823
Total Beban Syariah	-	344.600	1.531.824	1.377.133
TOTAL BEBAN BUNGA DAN SYARIAH	6.450.101	10.375.576	37.722.595	40.048.971

*) Tidak diaudit

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan membukukan Beban Bunga Dan Syariah sebesar Rp6.450.101 juta, menurun Rp3.925.475 juta atau -37,83% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp10.375.576 juta.

Tren tersebut sejalan dengan penurunan BI 7 Days Reverse Repo sebesar 100bps sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Selain itu, penurunan Biaya Bunga dan Syariah juga disumbang oleh kenaikan komposisi CASA menjadi 58,91% atau naik 3,02bps dibanding Triwulan I 2020 sebesar 57,85% sebagai salah satu upaya Perseroan dalam melakukan efisiensi biaya di tengah pandemi, sehingga *Cost of Fund* (COF) secara yoy mampu turun dari 3,65% pada Triwulan I 2020 menjadi 2,26% pada Triwulan I 2021.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan membukukan Beban Bunga Dan Syariah sebesar Rp37.722.595 juta, menurun Rp2.326.376 juta atau -5,81% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.048.971 juta.

Tren tersebut sejalan dengan penurunan BI 7 Days Reverse Repo sebesar 125bps sejak 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Selain itu, penurunan Biaya Bunga dan Syariah juga disumbang oleh kenaikan komposisi *Current Account Saving Account ("CASA")* menjadi 58,91% atau naik 196bps dibanding 31 Desember 2019 sebesar 57,70% sebagai salah satu upaya Perseroan dalam melakukan efisiensi biaya di tengah pandemi, sehingga *Cost of Fund* (COF) secara yoy mampu turun dari 3,62% pada 31 Desember 2019 menjadi 3,22% pada 31 Desember 2020.

6.1.3 Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Provisi dan komisi lainnya	3.797.575	4.167.458	15.122.682	14.505.762
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.795.245	1.637.278	7.239.896	7.065.981
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah Neto	1.079.094	635.574	2.860.653	1.839.341
Keuntungan transaksi mata uang asing neto	366.871	82.860	1.257.984	154.157
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	-	-	342.351	80.980
Lain lain	1.218.285	1.478.758	2.640.273	4.792.909
Total	8.257.070	8.001.928	29.463.839	28.439.130

*) Tidak diaudit

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan membukukan Pendapatan Operasional Lainnya sebesar Rp8.257.070 juta, naik Rp255.142 juta atau 3,19% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp8.001.928 juta.

Kenaikan ini didorong oleh pendapatan yang bersumber dari transaksi treasury yang mampu tumbuh lebih dari 100% atau tepatnya sebesar 101,27% menjadi Rp1.445.965 juta dari sebelumnya sebesar Rp718.434 juta, dari total kenaikan tersebut sebesar 60,96% bersumber dari keuntungan penjualan efek-efek sejalan dengan optimalisasi pergerakan market.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan membukukan Pendapatan Operasional Lainnya sebesar Rp29.463.839 juta, naik Rp1.024.709 juta atau 3,60% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp28.439.130 juta.

Peningkatan terutama disebabkan meningkatnya *Fee Based Income* sebesar 4,25% dan pendapatan dari transaksi treasury sebesar 115,04%. Pertumbuhan *Fee Based Income* didominasi oleh jasa transaksi e-channel dan e-banking tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp5,71 triliun, tumbuh 16,25% dari tahun 2019 sebesar Rp4,91 triliun, kenaikan ini didorong oleh meningkatnya volume transaksi E-Channel khususnya BRIMO yang tumbuh 660,5% *year on year* serta hasil dari optimalisasi layanan Agen BRILink yang mampu mencatatkan perolehan *fee* sebesar Rp1,16 triliun tumbuh 47,0% *year on year* di tahun 2020.

6.1.4 Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*)	2020	2019
Tenaga kerja dan tunjangan Umum dan administrasi	7.663.337	7.061.704	26.319.791	24.243.276
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	3.963.953	3.631.666	17.269.844	15.366.752
Lain-lain	71.621	192.759	-	-
Lain-lain	1.419.822	1.921.838	6.341.724	5.355.597
Total	13.118.733	12.807.967	49.931.359	44.965.625

*) Tidak diaudit

Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Gaji, upah dan tunjangan	3.778.958	3.218.577	14.065.172	13.447.778
Bonus, insentif dan tantiem	1.505.936	1.749.242	4.274.212	6.200.458
Biaya kompensasi saham	321.491	401.098	2.279.789	118.456
Program kesehatan pasca kerja BPJS	37.410	7.430	906.326	30.966
Iuran Jamsostek	203.813	199.902	833.207	361.379
Cuti besar	237.569	150.458	305.765	552.180
Penghargaan tanda jasa	11.812	88.636	234.875	272.389

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pensiun imbalan pasti	602.261	93.118	365.455	432.692
Tunjangan kesehatan	59.688	112.283	393.390	869.557
Pensiun iuran pasti	88.782	81.859	352.766	326.235
Pendidikan dan pelatihan	31.894	93.721	365.787	724.583
Pemutusan hubungan kerja	407.731	64.577	177.916	350.909
Lain-lain	375.992	800.803	1.765.131	555.694
Total	7.663.337	7.061.704	26.319.791	24.243.276

*) Tidak diaudit

Beban Umum dan Administrasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Jasa <i>outsourcing</i>	817.490	847.704	3.709.819	3.274.117
Penyusutan aset tetap	665.631	426.565	2.274.986	1.733.629
<i>E-Channel</i>	457.155	159.355	1.842.475	1.442.004
Barang dan jasa pihak ketiga	300.526	81.876	1.664.179	1.055.932
Sewa	254.183	317.607	1.517.417	1.928.242
Perbaikan dan pemeliharaan	255.635	368.263	1.330.132	1.311.163
Transportasi	193.815	246.681	755.141	969.408
Listrik dan air	139.134	166.070	635.943	620.185
Percetakan dan benda pos	81.652	122.838	439.343	306.842
Peralatan kantor	86.542	89.601	372.601	319.923
Jasa profesional	71.506	72.394	387.818	291.150
Komunikasi	29.125	39.897	154.259	148.600
Instalasi komputer	11.691	17.294	74.721	41.042
Penelitian dan pengembangan produk	4.098	6.027	23.670	29.715
Lain-lain	595.770	669.494	2.087.340	1.894.800
Total	3.963.953	3.631.666	17.269.844	15.366.752

*) Tidak diaudit

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan membukukan Beban Operasional Lainnya sebesar Rp13.118.733 juta, naik Rp310.766 juta atau 2,43% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp12.807.867 juta.

Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan biaya tenaga kerja dan tunjangan menjadi Rp7.663.337 juta atau naik 8,52% atau senilai Rp601.633 juta dari sebelumnya sebesar Rp7.061.704. Kenaikan biaya tenaga kerja disebabkan oleh adanya *oneoff* pembukuan biaya iuran manfaat pasti sebesar Rp509 miliar sebagai kompensasi atas adanya kenaikan manfaat yang diberikan kepada peserta penerima. Di sisi lain, Perseroan mampu menurunkan kerugian yang belum direalisasikan dari transaksi treasuri dan efisiensi pada biaya lain masing-masing sebesar -62,69% dan -26,22% *year on year*.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan membukukan Beban Operasional Lainnya sebesar Rp49.931.359 juta, naik Rp4.965.734 juta atau 11,04% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp44.965.625 juta.

Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan biaya tenaga kerja dan tunjangan menjadi Rp26,32 triliun, atau naik 8,57% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp24,24 triliun. Peningkatan biaya tenaga kerja pada tahun 2020 karena adanya pemberian ESA yang bersumber dari *buyback* saham yang dilakukan pada tahun 2015-2016 sebagai salah satu komitmen Perseroan untuk meningkatkan *engagement* pekerja dengan perusahaan serta diharapkan mampu meningkatkan produktifitas kerja yang berujung pada tingkat profitabilitas perusahaan.

6.1.5 Laba Bersih

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp6.860.082 juta, turun Rp1.309.820 juta atau -16,03% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp8.169.902 juta.

Penurunan ini tidak terlepas dari kenaikan biaya cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan ataupun non keuangan yang naik sebesar 48,92% yoy atau sebesar Rp3.225.479 juta menjadi Rp9.818.564 juta dari sebelumnya Rp6.593.085 juta. Kenaikan ini sejalan dengan upaya perseroan untuk terus meningkatkan pencadangan atas aktiva produktif khususnya kredit dalam upaya mitigasi risiko atas kemungkinan pemburukan yang terjadi khususnya kredit yang berdampak pandemi Covid-19.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp18.660.393 juta, turun Rp15.753.432 juta atau -45,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.413.825 juta.

Penurunan ini tidak terlepas dari masih tertekannya pendapatan bunga dari Rp118,38 triliun di 2019 menjadi Rp112,58 triliun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 44,33% yoy atau sebesar Rp10.090.279 juta sebagai mitigasi atas kemungkinan pemburukan kualitas kredit di masa depan akibat dampak pandemi Covid-19.

6.1.6 Total Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan mencatatkan beban komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp2.180.512 juta, turun Rp1.015.236 juta atau -31,77% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp3.195.748 juta. Penurunan biaya ini dikarenakan terdapat kenaikan biaya komprehensif yang bersumber dari pengukuran kembali atas program manfaat pasti (PSAK 24) sebesar 234,19%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mencatatkan pendapatan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp3.097.386 juta, turun Rp1.987.386 juta atau -39,09% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.084.772 juta. Penurunan biaya ini dikarenakan terdapat kenaikan biaya komprehensif yang bersumber dari pengukuran kembali atas program manfaat pasti (PSAK 24) sebesar 57,46%.

6.1.7 Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 Perseroan membukukan Laba Komprehensif sebesar Rp4.679.570 juta, turun Rp294.584 juta atau -5,92% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp4.974.154 juta. Penurunan biaya ini dikarenakan terdapat kenaikan biaya komprehensif yang bersumber dari pengukuran kembali atas program manfaat pasti (PSAK 24) sebesar 234,19%.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp21.757.779 juta, turun Rp17.740.818 juta atau -44,92% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp39.498.597 juta. Selain karena penurunan laba bersih, penurunan ini disebabkan penurunan penghasilan komprehensif BRI dari Rp5,08 triliun di tahun 2019 menjadi Rp3,10 triliun di akhir 2020.

6.2 Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
Kas	18.682.911	32.161.564	30.219.214
Giro pada Bank Indonesia	36.409.115	51.530.969	71.416.449
Giro pada bank lain	13.205.459	9.154.378	10.237.736
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(59.437)	(93.843)	-
	13.146.022	9.060.535	10.237.736

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain	70.422.419	66.539.685	116.854.727
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(12.319)	(18.070)	-
	70.410.100	66.521.615	116.854.727
Efek-efek	296.936.755	327.615.655	195.840.931
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(392.338)	(348.941)	(758)
	296.544.417	327.266.714	195.840.173
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.979.627	27.573.004	34.317.499
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.295.784)	(1.326.190)	(132.241)
	26.683.843	26.246.814	34.185.258
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	-	1.130.306
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	22.176.411	46.818.568	22.582.244
Tagihan derivatif	542.727	1.576.659	210.396
Kredit yang diberikan	914.189.177	899.458.207	877.431.193
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(72.324.378)	(65.165.002)	(38.363.840)
	841.864.799	834.293.205	839.067.353
Piutang dan pembiayaan syariah	-	38.915.673	25.766.197
- Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(1.449.489)	(745.029)
	-	37.466.184	25.021.168
Piutang Sewa Pembiayaan	3.758.505	3.619.224	4.191.596
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(225.829)	(213.060)	(87.500)
	3.532.676	3.406.164	4.104.096
Tagihan akseptasi	5.400.017	6.817.436	9.346.063
- Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.094)	(546.260)	-
	5.158.923	6.271.176	9.346.063
Penyertaan saham	5.303.449	1.489.800	745.354
- Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(50)
	5.303.449	1.489.800	745.304
Aset tetap:			
- Biaya perolehan	46.643.444	46.837.964	44.075.680
- Akumulasi penyusutan	(14.751.483)	(14.652.804)	(12.643.051)
Nilai buku	31.891.961	32.185.160	31.432.629
Aset pajak tangguhan - neto	9.958.711	8.313.545	4.541.298
Aset lain-lain - neto	28.745.909	27.195.956	19.824.426
TOTAL ASET	1.411.051.974	1.511.804.628	1.416.758.840

6.2.1 Total Aset

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 total aset perseroan sebesar Rp1.411.051.974 juta, mengalami penurunan Rp100.752.654 juta atau -6,66% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.511.804.628 juta.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang dan pembiayaan Syariah (netto) -100% dari sebesar Rp37.466.184 juta menjadi Rp0 dikarenakan tidak lagi dikonsolidasikannya BRISyariah kedalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada 31 Maret 2021 sejalan dengan telah mergernya BRISyariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada Februari 2021, serta terdapat penurunan efek-efek menjadi Rp296.936.755 juta turun sebesar Rp30.678.900 juta atau -9,36% dari periode 31 Desember 2020 sebesar Rp327.615.655 juta.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 total aset perseroan sebesar Rp1.511.804.628 juta, mengalami kenaikan Rp95.045.788 juta atau 6,71% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.416.758.840 juta.

Kenaikan ini berasal dari Kredit yang Diberikan (termasuk Piutang Sewa Pembiayaan) Perseroan naik 3,81% menjadi Rp941,99 triliun, atau komposisinya menjadi 62,31% dari total aset.

6.2.2 Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 total kredit yang diberikan Perseroan sebesar Rp914.189.177 juta, mengalami penurunan Rp24.184.703 juta atau -2,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp938.373.880 juta.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang dan pembiayaan Syariah -100% dari sebesar Rp38.915.673 juta menjadi Rp0 di 31 Maret 2021 dikarenakan tidak lagi dikonsolidasikannya BRISyariah kedalam laporan keuangan BRI sejak dilakukannya merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun jika BRIS dikeluarkan pada kinerja 31 Desember 2020 maka kredit 31 Maret 2021 masih mencatatkan pertumbuhan 1,64% ytd.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 total kredit yang diberikan Perseroan sebesar Rp938.373.880 juta, mengalami kenaikan Rp35.176.490 juta atau 3,89% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp903.197.390 juta.

Peningkatan Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, serta Piutang Sewa Pembiayaan paling besar bersumber dari segmen mikro yang mampu tumbuh 14,17% menjadi Rp351,36 triliun. Komposisi Mikro (bank saja) menjadi 39,89% atau naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 35,80% hal ini juga turut mendorong kenaikan komposisi UMKM secara konsolidasi menjadi 82,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 79,00%.

6.2.3 Kas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rupiah	17.515.141	31.178.212		28.967.663
<u>Mata Uang Asing (Eqv Rupiah)</u>				
Dolar Amerika Serikat	442.850	443.966		536.692
Dolar Singapura	339.648	156.601		149.018
Riyal Arab Saudi	61.688	102.319		238.289
Dolar Taiwan	89.119	90.169		2.669
Ringgit Malaysia	70.825	33.962		57.858
Euro Eropa	61.564	48.893		93.588
Dolar Australia	48.728	39.015		75.044
Yen Jepang	12.410	21.929		21.558
Dirham Uni Emirat Arab	7.124	9.842		10.990
Dolar Hong kong	11.688	8.884		13.201
Baht Thailand	3.340	5.174		2.315
Pound Sterling Inggris	4.302	4.358		4.860
Dolar Brunei Darussalam	2.956	4.931		2.859
Kina Papua Nugini	587	561		6.590
Renminbi	5.048	3.166		13.438
Franc Swiss	2.907	3.250		3.392
Dolar Kanada	637	1.133		2.228
Dolar Selandia Baru	1.348	2.643		8.535
Peso Filipina	201	566		6.090
Dong Vietnam	259	1.357		1.682
Won Korea Selatan	410	508		618
Rupiah India	131	125		37
	1.167.770	983.352		1.251.551
Total	18.682.911	32.161.564		30.219.214

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan kas sebesar Rp18.682.911 juta, menurun Rp13.478.653 juta atau -41,9% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp32.161.564 juta. Fluktuatif penurunan kas terjadi seiring kebutuhan bisnis perseroan.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan kas sebesar Rp32.161.564 juta, meningkat Rp1.942.350 juta atau 6,43% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp32.161.564 juta. Peningkatan kas dilakukan untuk menjaga kebutuhan likuiditas Perseroan agar tetap memadai.

6.2.4 Giro pada Bank Lain dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan giro pada Bank Lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain sebesar Rp83.627.878 juta, meningkat Rp7.933.815 juta atau 10,48% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp75.694.063 juta. Peningkatan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh Perseroan.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan giro pada Bank Lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain sebesar Rp75.694.063 juta, menurun Rp51.398.400 juta atau -40,44% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp127.092.463 juta. Penurunan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi dana yang diperoleh Perseroan.

6.2.5 Efek-Efek, Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya, dan Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan total efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp347.092.793 juta, menurun sebesar Rp54.914.434 juta atau -13,66% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp402.007.227 juta. Penurunan tersebut dilakukan Perseroan seiring dengan yield enhancement aktiva produktif yang dikelola.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan total efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp402.007.227 juta, meningkat sebesar Rp149.266.553 juta atau 59,06% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp252.740.674 juta. Peningkatan tersebut dilakukan Perseroan dalam rangka *yield enhancement* aktiva produktif yang dikelola.

6.2.6 Aset Tetap - Neto

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan nilai aset tetap - neto sebesar Rp31.891.961 juta, menurun sebesar Rp293.199 juta atau -0,9% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp32.185.160 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pengurangan atas aset tetap PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) yang tidak lagi dikonsolidasi sejak merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan nilai aset tetap - neto sebesar Rp32.185.160 juta, meningkat sebesar Rp752.531 juta atau 2,4% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp31.432.629 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan biaya perolehan bangunan sebesar Rp1.149.313 juta atau 23,7% dibanding periode sebelumnya.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
LIABILITAS			
Liabilitas segera	22.802.245	11.845.910	7.549.312
Simpanan nasabah			
- Giro	174.329.968	185.151.229	168.826.135
- Giro wadiah	-	6.303.202	2.020.866
- Tabungan	443.867.205	460.453.588	405.355.483
- Tabungan wadiah	-	9.247.604	6.951.688
- Deposito berjangka	431.117.600	426.399.550	413.223.653
Total simpanan nasabah	1.049.314.773	1.087.555.173	996.377.825
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	20.074.302	23.785.996	17.969.829
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.556.514	40.478.672	49.902.938
Liabilitas derivatif	878.258	407.774	184.605
Liabilitas akseptasi	5.400.017	6.817.436	9.346.063
Utang pajak	3.680.900	1.400.638	185.443
Surat berharga yang diterbitkan	32.334.036	34.489.091	38.620.837
Pinjaman yang diterima	35.123.555	35.968.985	30.921.771
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	4.897.385	3.681.709	609.493
Liabilitas imbalan kerja	8.933.841	10.397.201	10.662.581
Liabilitas lain-lain	21.790.794	20.052.299	19.359.607
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.068	1.465.392	1.465.366
TOTAL LIABILITAS	1.216.287.688	1.278.346.276	1.183.155.670
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro mudharabah	-	1.623.563	4.080.803
Tabungan mudharabah	-	6.147.015	2.025.354
Deposito berjangka mudharabah	-	25.776.398	18.712.677
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	-	33.546.976	24.818.834

6.2.7 Total Liabilitas

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp1.216.287.688 juta, menurun Rp62.058.588 juta atau -4,85% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp1.278.346.276 juta.

Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan oleh menurunnya pos Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali menjadi Rp10.556.514 juta atau menurun -73,92% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp40.478.672 juta. Serta terdapat penurunan Simpanan Syariah (Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah) menjadi Rp0 atau turun sebesar Rp15.550.806 juta dari 31 Desember 2020 sebesar Rp15.550.806 juta penurunan ini akibat tidak lagi dikonsolidasikannya BRISyariah kedalam laporan keuangan Perseroan sejak resmi merger menjadi Bank Syariah Indonesia pada Februari 2021.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp1.278.346.276 juta, meningkat Rp95.190.606 juta atau 8,05% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp1.183.155.670 juta. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan oleh naiknya pertumbuhan simpanan nasabah menjadi Rp1.087.555.173 juta atau meningkat 9,15% dari tahun sebelumnya sebesar Rp996.377.825 juta.

6.2.8 Liabilitas Segera

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan liabilitas segera sebesar Rp22.802.245 juta, meningkat sebesar Rp10.956.335 juta atau 92,49% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp11.845.910 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan titipan pembayaran dividen menjadi sebesar Rp 12.125.589 dibandingkan periode sebelumnya nihil.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan liabilitas segera sebesar Rp11.845.910 juta, meningkat sebesar Rp4.296.598 juta atau 56,91% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp7.549.312 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan titipan *advance payment* menjadi sebesar Rp4.323.171 juta dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 2.390.341 juta. Peningkatan *advance payment* disebabkan kenaikan titipan pembayaran atas subsidi bunga nasabah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

6.2.9 Simpanan Nasabah (termasuk Dana Syirkah Temporer)

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021 Perseroan mencatatkan simpanan nasabah sebesar Rp1.049.314.773 juta, menurun Rp71.787.376 juta atau -6,51% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp1.121.102.149 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan oleh penurunan giro wadiah dan tabungan wadiah menjadi nihil dari semula Rp6.303.202 juta dan Rp9.247.604 juta. Hal ini dikarenakan tidak lagi dikonsolidasikannya BRISyariah kedalam laporan keuangan Perseroan sejak dilakukannya merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun jika BRIS dikeluarkan pada kinerja 31 Maret 2020 maka simpanan nasabah (termasuk Dana Syirkah Temporer) 31 Maret 2021 masih mencatatkan pertumbuhan 5,37% yoy.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan simpanan nasabah sebesar Rp1.121.102.149 juta, meningkat Rp99.905.490 juta atau 9,78% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp1.021.196.659 juta. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kenaikan Giro sebesar 9,67% menjadi Rp185.151.229, deposito berjangka sebesar 3,19% menjadi Rp426.399.550 juta, kenaikan tabungan sebesar 13,59% menjadi Rp460.453.588 juta dan kenaikan dana *syirkah* temporer sebesar 35,17% menjadi Rp33.546.976 juta.

6.2.10 Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatat Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya sebesar Rp20.074.302 juta, menurun Rp3.711.694 juta atau -15,60% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp23.785.996 juta. Penurunan disebabkan terutama oleh penurunan *inter-bank call money* menjadi nihil dari periode sebelumnya eqv Rp4.715.000 juta.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatat Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya sebesar Rp23.785.996 juta, meningkat Rp5.816.167 juta atau 32,37% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp17.969.829 juta. Peningkatan disebabkan terutama oleh kenaikan *inter-bank call money* dolar Amerika Serikat dan simpanan Bank lain pihak ketiga dalam rupiah, hal ini sejalan dengan kondisi likuiditas perbankan yang ample di tengah perlambatan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

6.2.11 Surat Berharga yang Diterbitkan

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, surat berharga diterbitkan perseroan sebesar Rp32.334.036 juta atau mengalami penurunan Rp2.155.055 juta atau -6,24% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp34.489.091 juta. Penurunan ini sejalan dengan intensi perseroan untuk tidak menambah pendanaan atau likuiditas dari Non-Dana Pihak Ketiga dengan fokus pada penghimpunan dana pihak ketiga khususnya yang berbiaya murah atau CASA.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, surat berharga diterbitkan perseroan sebesar Rp34.489.091 juta atau mengalami penurunan Rp4.131.746 juta atau -10,70% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp38.620.837 juta. Penurunan ini sejalan dengan intensi perseroan untuk tidak menambah pendanaan atau likuiditas dari Non-Dana Pihak Ketiga dengan fokus pada penghimpunan dana pihak ketiga khususnya yang berbiaya murah atau CASA.

Surat berharga yang diterbitkan per 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

(Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan I BRI				
Tahap I Tahun 2015 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.078 pada tanggal 31 Desember 2019	-	-	1.395.705	
Tahap II Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp53 dan Rp569 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	-	2.647.705	2.642.129	
Tahap III Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp21, Rp54 dan Rp181 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	681.885	681.740	681.409	
Obligasi Berkelanjutan II BRI				
Tahap I Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp2.195, Rp2.287 dan Rp2.661 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	2.944.531	2.944.204	2.945.123	
Tahap II Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp787, Rp1.206 dan Rp1.174 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	2.224.713	2.224.294	3.947.686	
Tahap III Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.310, Rp1.793 dan, Rp2.045 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan, 2019	4.147.497	4.146.745	5.127.498	
Tahap IV Tahun 2018 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.134, Rp1.611 dan Rp1.687 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	2.431.005	2.430.539	2.430.633	
Negotiable Certificate Deposits Tahun 2020 setelah dikurang biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp11.253 dan Rp22.984 pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020	838.747	827.016	-	
Obligasi Berkelanjutan III BRI				
Tahap I Tahun 2019 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp4.625, Rp5.421 dan Rp7.778 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	4.218.696	4.218.115	4.956.017	
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp297, Rp351 dan Rp789 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	218.164	218.051	478.833	
MTN I BRI Finance Tahun 2019 setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp345, Rp436 dan Rp1.040 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	158.676	158.497	208.511	
	17.863.914	20.496.906	24.813.544	
Dolar Amerika Serikat				
Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp25.391, Rp27.504 dan Rp36.290 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	7.237.109	6.997.936	6.904.960	
Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp29.487, Rp30.752 dan Rp38.917 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	7.233.013	6.994.249	6.902.333	
	14.470.122	13.992.185	13.807.293	
	32.334.036	34.489.091	38.620.837	

6.2.12 Pinjaman yang Diterima

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan pinjaman yang diterima sebesar Rp35.123.555 juta, menurun Rp845.430 juta atau -2,35% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.968.985 juta.

Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan pos pinjaman lainnya menjadi Rp11.743.398 juta dibanding tahun sebelumnya Rp13.402.921 juta, pinjaman didominasi oleh pinjaman berbasis refinancing LC, dimana pada saat pandemi terjadi penurunan volume transaksi ekspor impor yang diinisiasi oleh nasabah.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan pinjaman yang diterima sebesar Rp35.968.985 juta, meningkat Rp5.047.214 juta atau 16,32% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.921.771 juta. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pos pinjaman sindikasi club loan menjadi Rp20.908.211 juta dibanding tahun sebelumnya Rp7.822.864 juta.

Kenaikan ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pendanaan jangka panjang Perseroan.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham				
Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)	6.167.291	6.167.291	6.167.291	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)				
Tambahan modal disetor	3.981.135	3.411.813	2.900.994	
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.018.966	17.099.207	17.099.207	
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(49.087)	(54.749)	(14.970)	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (<i>securities</i>) setelah dikurangi pajak tangguhan	1.501.059	4.623.064	-	
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya	964.411	975.877	-	
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(452.254)	(1.469.726)	189.519	
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual -bersih		-	715.770	
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(1.644.317)	(1.649.076)	(2.106.014)	
Opsi Saham	79.486	72.894	22.409	
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.532.631	1.228.805	21.796	
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	1.758.580	-	-	
Saldo laba				
- Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	3.022.685	
- Belum ditentukan penggunaannya	157.742.954	163.949.482	178.304.746	
Total saldo laba	160.765.639	166.972.167	181.327.431	
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	191.623.540	197.377.567	206.323.433	
Kepentingan non-pengendali	3.140.746	2.533.809	2.460.903	
TOTAL EKUITAS	194.764.286	199.911.376	208.784.336	

Periode yang berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Maret 2021, Perseroan mencatatkan total ekuitas sebesar Rp194.764.286 juta, menurun Rp5.147.090 juta atau -2,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp199.911.376 juta.

Penurunan ekuitas disebabkan terutama oleh adanya penurunan saldo laba menjadi Rp160.765.639 juta dibandingkan periode sebelumnya Rp166.972.167 juta. Dimana pada kuartal I 2021 Perseroan melakukan pencadangan atas pembayaran dividen sebesar Rp12.125.589 juta.

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan total ekuitas sebesar Rp199.911.376 juta, menurun Rp8.872.960 juta atau 4,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp208.784.336 juta. Penurunan ekuitas selain dikarenakan adanya penurunan perolehan laba bersih sebesar -45,78% *year on year* (yoy) selain itu adanya penerapan PSAK 71 yang dilakukan Perseroan di awal tahun 2020, dimana dalam penerapan tersebut perseroan menggunakan komponen ekuitas – laba ditahan sebesar Rp14 triliun untuk kemudian dicatatkan dalam Cadangan Kerugian Penurunan Nilai di sisi Aset.

Pada tahun 2020, Perseroan telah melakukan *exercise* program saham Pekerja atau *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan total 231.111.000 lembar saham kepada 54.527 pekerja, yang terdiri dari ESA tahap 1 sebesar 4.396.700 lembar saham dan ESA Tahap 2 sebesar 226.714.300 lembar saham, untuk meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang pada pekerja sehingga diharapkan mampu secara konsisten mendorong peningkatan produktifitas dan pencapaian kinerja jangka panjang Perusahaan.

6.3 Analisa Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Arus Kas dari Kegiatan Operasi				
Pendapatan yang diterima				
Penerimaan bunga dan investasi	26.398.945	29.064.010	109.112.566	117.464.011
Pendapatan syariah	-	961.320	4.348.425	3.376.547
Pendapatan premi	1.695.569	1.516.078	6.208.716	5.373.757
Beban yang dibayar				
Beban bunga	(6.737.186)	(10.356.102)	(36.190.771)	(38.666.742)
Beban syariah	-	(344.600)	(1.531.824)	(1.377.133)
Beban klaim	(1.230.064)	(957.273)	(5.327.065)	(4.363.029)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	1.795.245	1.637.278	7.239.896	7.065.981
Pendapatan operasional lainnya	8.075.842	5.646.308	25.210.052	22.212.741
Beban operasional lainnya	(13.400.335)	(11.163.148)	(49.474.810)	(46.257.369)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(14.573)	26.171	(84.532)	(68.021)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(1.128.455)	(1.661.969)	(4.953.877)	(9.357.307)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	15.454.988	14.368.073	54.556.776	55.403.436
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain	(39.524)	934.149	264.550	(2.854.149)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	9.612.526	(5.209.656)	(11.940.401)	(12.637.154)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(406.623)	(4.443.287)	6.744.495	(6.172.212)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	24.642.157	2.433.828	(24.236.324)	(13.185.691)
Kredit yang diberikan	(14.730.970)	(26.268.235)	(35.685.632)	(74.427.400)
Piutang dan pembiayaan syariah	38.915.673	(3.219.072)	(13.149.476)	(6.025.669)
Piutang sewa pembiayaan	(139.281)	80.362	572.372	(803.779)
Aset lain-lain	(3.448.749)	(3.461.409)	(11.322.226)	6.655.602
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(1.169.254)	(129.876)	4.296.598	(913.645)
Simpanan:				
Giro	(10.821.261)	1.101.501	16.325.094	(9.271.846)
Giro <i>Wadiah</i>	(6.303.202)	1.009.490	4.282.336	(256.984)
Tabungan	(16.586.383)	(16.940.357)	55.098.105	25.436.778

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Tabungan <i>Wadiah</i>	(9.247.604)	86.255	2.295.916	1.349.877
Deposito berjangka	4.718.050	24.592.513	13.175.897	55.810.139
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(3.711.694)	(3.069.300)	5.816.167	8.838.671
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(29.922.158)	(30.341.515)	(9.424.266)	12.523.543
Liabilitas lain-lain	2.464.835	4.322.086	291.044	1.252.567
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer	(33.546.976)	(2.049.577)	8.728.142	3.859.957
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi	(34.265.450)	(46.204.027)	66.689.167	44.582.044
Arus Kas Dari Kegiatan Investasi				
Hasil penjualan aset tetap	14.404	2.566	35.214	141
Penyertaan saham	(180.467)	(129.116)	(280.175)	(228.110)
Penerimaan dividen	-	-	6.669	6.753
Perolehan aset tetap	(895.676)	(1.383.175)	(3.129.034)	(3.695.364)
Penurunan / (kenaikan) efek-efek dan Obligasi	-	-	-	-
Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	(1.270.825)
Penurunan/ (Kenaikan) efek-efek dan Obligasi	-	-	-	-
Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Biaya perolehan diamortisasi	17.314.822	(1.316.891)	(112.640.485)	-
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi	16.253.083	(2.826.616)	(116.007.811)	(5.187.405)
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan				
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman yang diterima	(927.142)	(10.135.171)	4.935.803	(9.592.989)
Pembagian laba untuk dividen	-	(20.623.565)	(20.623.565)	(16.175.565)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	-	-	1.998.840	12.102.950
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(2.823.500)	-	(6.292.850)	(4.419.500)
Penambahan modal saham	-	-	-	-
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Pendanaan	(3.750.642)	(30.758.736)	(19.981.772)	(18.085.104)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	(21.763.009)	(79.789.379)	(69.300.416)	21.309.532
	432.999	1.534.779	(352.878)	(160.251)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun/Periode	167.253.135	236.906.429	236.906.429	215.757.148
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun/Periode	145.923.125	158.651.829	167.253.135	236.906.429
Kas dan Setara Kas akhir tahun/periode terdiri dari:				
Kas	18.682.911	20.887.985	32.161.564	30.219.214
Giro Pada Bank Indonesia	36.409.115	59.718.025	51.530.969	71.416.449
Giro Pada Bank Lain	13.205.459	13.832.037	9.154.378	10.237.736
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	67.580.978	53.693.363	63.732.017	113.800.580
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	10.044.662	10.520.419	10.674.207	11.232.450
Total Kas dan Setara Kas	145.923.125	158.651.829	167.253.135	236.906.429

*)Tidak diaudit

Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 Dibandingkan Dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Total arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi di 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp34.265.450 juta, menurun 25,83% atau sebesar Rp11.938.577 juta jika dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp46.204.027 juta. Penurunan penggunaan arus kas dari kegiatan operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan kredit yang diberikan menjadi Rp14.730.970 juta dibanding periode yang sama sebelumnya Rp26.268.235 juta.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Pada periode 31 Maret 2021, arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan investasi adalah sebesar Rp16.253.083 juta, berbeda sebesar Rp19.079.699 juta jika dibandingkan dengan arus kas yang digunakan pada 31 Maret 2020 sebesar Rp2.826.616 juta. Perubahan ini disebabkan oleh penurunan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Biaya perolehan diamortisasi di 31 Maret 2021 sebesar Rp17.314.822 juta dari periode sebelumnya mengalami kenaikan Rp 1.316.891 juta.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan di 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.750.642 juta, menurun sebesar Rp27.008.094 juta atau sebesar 87,81% jika dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020 dimana arus kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sebesar Rp30.758.736 juta. Arus kas keluar pada 31 Maret 2021 tersebut menurun terutama karena pengeluaran kas untuk pembayaran pinjaman yang diterima menjadi Rp927.142 juta dibanding sebelumnya Rp10.135.171 juta dan pembagian laba untuk dividen menjadi nihil dari periode sebelumnya Rp20.623.565 juta.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Total arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi di tahun 2020 adalah sebesar Rp66.689.167 juta, meningkat 49,59% atau sebesar Rp22.107.126 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp44.582.044 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan arus kas dari kegiatan operasi liabilitas dari simpanan pada pos tabungan menjadi Rp55.098.105 juta dibanding tahun sebelumnya Rp25.436.778 juta.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Di tahun 2020, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi adalah sebesar Rp116.006.811 juta, meningkat sebesar 2.136,32% atau sebesar Rp110.819.406 juta jika dibandingkan dengan yang digunakan pada tahun 2019 sebesar Rp5.187.405 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Biaya perolehan diamortisasi di tahun 2020 sebesar Rp112.640.485 juta.

Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan di tahun 2020 adalah sebesar Rp19.981.772 juta, meningkat sebesar Rp1.896.668 juta atau sebesar 10,49% jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana arus kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sebesar Rp18.085.104 juta. Arus kas keluar pada tahun 2019 tersebut meningkat karena adanya pengeluaran kas untuk pendanaan terutama disebabkan oleh pembagian laba untuk dividen.

7 Likuiditas

Posisi *Loan to Deposit (LDR)* Perseroan per periode laporan adalah sebagai berikut:

- 31 Maret 2021 : 86,77%
- 31 Desember 2020 : 83,66%
- 31 Desember 2019 : 88,64%

Sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan manajemen, tingkat *LDR* yang optimal berada di kisaran 80% - 90% agar tercapai keseimbangan antara pemanfaatan dana masyarakat dan antisipasi risiko kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Sampai dengan 31 Maret 2021, *LDR* Perseroan relatif terjaga pada target internal Perseroan, antara 80% - 90% yaitu 86,77%. Pada akhir tahun 2020, tercatat rasio *LDR* adalah sebesar 83,66%, turun dari posisi sebesar 88,64% di akhir tahun 2019. Pergerakan *LDR* ini sejalan dengan kenaikan pertumbuhan kredit yang dimiliki oleh Perseroan.

8 Belanja Modal

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Maret 2020, 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tanah dan bangunan	663.534	883.894	2.193.965	4.580.102
Peralatan dan persediaan	43.013	63.202	260.200	215.046
Kendaraan	174.885	195.691	115.583	115.754
Komputer dan <i>software</i>	14.244	240.388	573.132	1.413.248
Total Belanja Modal	895.676	1.383.175	3.142.880	6.324.150

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang material.

Belanja modal selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.142.880 juta yang sebagian besar digunakan untuk pembelian atau sewa tanah dan bangunan demi meningkatkan bisnis Perseroan.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Tujuan dari investasi barang modal tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

Investasi dalam pengembangan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

9 Rasio Keuangan Utama (Bank Saja)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Permodalan				
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	19,40%	18,23%	20,61%	22,55%
Aktiva Produktif				
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	1,98%	1,84%	1,82%	1,74%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,97%	2,13%	1,81%	1,98%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	6,17%	5,09%	5,42%	3,36%
NPL bruto	3,12%	2,81%	2,94%	2,62%
NPL neto	0,86%	0,63%	0,80%	1,04%
Profibilitas				
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap total Aset (ROA) – <i>before tax</i>	2,65%	3,19%	1,98%	3,50%
Rasio Laba (rugi) tahun berjalan terhadap rata-rata Ekuitas tier 1 (ROE Tier 1) – <i>after tax</i>	15,47%	20,39%	11,05%	19,41%
Marjin bunga bersih (NIM)	7,00%	6,66%	6,00%	6,98%
<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	41,71%	41,50%	45,40%	40,03%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	76,83%	72,97%	81,22%	70,10%
Likuiditas				
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	86,77%	90,39%	83,66%	88,64%
Solvabilitas				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali)	6,24	6,44	6,39	5,67
Rasio Liabilitas terhadap Aset (kali)	0,86	0,85	0,85	0,84
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
- Utama Rupiah	3,03%	5,57%	3,19%	6,15%
- Valuta Asing	4,01%	4,00%	4,01%	8,07%
Posisi Devisa Neto	0,80%	2,05%	1,07%	1,87%

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Persentase pelanggaran BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*)Tidak diaudit

10 Informasi Segmen

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi 5 (lima) segmen usaha yang terdiri dari segmen mikro, ritel, korporasi, Perusahaan Anak, dan lainnya.

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Anak Perusahaan	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	12.157.755	6.360.600	195.565	4.080.108	856.657	23.650.685
Pendapatan operasional lainnya	2.860.893	2.466.675	607.249	2.283.453	38.800	8.257.070
Total pendapatan	15.018.648	8.827.275	802.814	6.363.561	895.457	31.907.755
Beban operasional lainnya	(6.955.395)	(3.789.914)	(382.274)	(1.437.541)	(553.609)	(13.118.733)
Beban CKPN	(2.893.543)	(1.427.920)	(5.394.612)	28.955	(131.444)	(9.818.564)
Total beban	(9.848.938)	(5.217.834)	(5.776.886)	(1.408.586)	(685.053)	(22.937.297)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(41.362)	39.436	(911)	1.289	1.379	(169)
Laba sebelum beban pajak	5.128.348	3.648.877	(4.974.983)	4.956.264	211.783	8.970.289
Beban pajak	(666.685)	(474.354)	-	(944.006)	(25.162)	(2.110.207)
Laba Periode berjalan	4.461.663	3.174.523	(4.974.983)	4.012.258	186.621	6.880.082
Aset segmen						
Kredit yang diberikan -bruto	360.045.487	357.712.977	178.758.285	-	21.432.933	917.947.682
Total aset	340.666.858	338.792.650	177.568.665	507.900.545	36.164.545	1.401.093.263
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	321.148.407	392.912.263	319.195.641	-	16.058.452	1.049.314.773
Total liabilitas	321.148.407	392.912.263	329.454.685	142.988.189	29.784.144	1.216.287.688

Berikut dijelaskan komposisi pendapatan dan laba usaha per segmen operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Segmen Mikro

Pendapatan segmen mikro berkontribusi terhadap total pendapatan sebesar 47,07% dan laba usaha Perseroan (neto) sebesar 65,04%.

Pendapatan Segmen Ritel

Pendapatan segmen ritel berkontribusi terhadap total pendapatan sebesar 27,66% dan laba usaha Perseroan (neto) sebesar 46,28%.

Pendapatan Segmen Korporasi

Pendapatan segmen korporasi berkontribusi terhadap total pendapatan sebesar 2,52% dan berkontribusi negatif terhadap laba usaha Perseroan (neto) sebesar 72,52%.

Pendapatan Segmen Lainnya

Pendapatan segmen lainnya berkontribusi terhadap total pendapatan sebesar 19,94% dan laba usaha Perseroan sebesar 58,49%.

Pendapatan Segmen Perusahaan Anak

Pendapatan segmen Perusahaan Anak berkontribusi terhadap total pendapatan sebesar 2,81% dan laba usaha Perseroan (neto) sebesar 2,72%.

11 Kepatuhan

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Permodalan				
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	19,40%	18,23%	20,61%	22,55%
Kepatuhan				
Giro Wajib Minimum (GWM)				
- Utama Rupiah	3,03%	5,57%	3,19%	6,15%
- Valuta Asing	4,01%	4,00%	4,01%	8,07%
Posisi Devisa Netto	0,80%	2,05%	1,07%	1,87%
Persentase pelanggaran BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK				
- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*)Tidak diaudit

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK (baik kepada pihak tidak terkait maupun kepada pihak berelasi) dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Perseroan diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) untuk Rupiah dan valuta asing (USD). Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 2020, rasio GWM Utama untuk Rupiah masing-masing sebesar 3,03% dan 5,57%, sedangkan untuk rasio GWM valuta asing masing-masing adalah sebesar 4,01% dan 4,00%. Sedangkan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, rasio GWM Utama untuk Rupiah masing-masing sebesar 3,19% dan 6,15%, sedangkan untuk rasio GWM valuta asing masing-masing adalah sebesar 4,01% dan 8,07%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, rasio Posisi Devisa Netto (PDN) Bank secara keseluruhan adalah setinggi-tingginya sebesar 20% dari modal. Pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021 dan 31 Maret 2020, rasio PDN Perseroan masing-masing adalah sebesar 0,80%, dan 2,05%. Sedangkan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, rasio PDN Perseroan masing-masing adalah sebesar 1,07%, dan 1,87%.

Per tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan memenuhi seluruh rasio wajib (*statutory ratio*) yang ditentukan oleh Bank Indonesia maupun oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, sebagian besar dari rasio-rasio keuangan penting yang tersajikan dalam tabel di atas, menunjukkan landasan atau fundamental keuangan Perseroan yang kokoh, kinerja Perseroan yang patut dibanggakan, dan fungsi intermediasi perbankan yang benar-benar dilakukan oleh Perseroan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.

12. Tingkat Kesehatan Bank

Perseroan telah mengimplementasikan penilaian dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*), cakupan penilaian tersebut meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Profil Risiko

Posisi Risiko Perseroan pada 31 Desember 2020 mendapatkan Peringkat 2 (*low to moderate*), dengan tingkat risiko *low* untuk risiko hukum dan reputasi ; *low to moderate* untuk risiko kredit, pasar, likuiditas, stratejik dan kepatuhan ; sedangkan risiko operasional berada pada peringkat *moderate*.

GCG

Good Corporate Governance Perseroan pada 31 Desember 2020 mendapatkan Peringkat 2 (baik) yang digambarkan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang ada di Perseroan.

Rentabilitas

Self Assessment atas Rentabilitas Perseroan pada 31 Desember 2020 mendapatkan **Peringkat 2** (memadai) dengan rincian:

No.	Faktor Penilaian Rentabilitas	31 Desember 2020
1.	Kinerja Menghasilkan Laba	2
2.	Indikator Pendukung Rentabilitas	1
3.	Sustainabilitas Rentabilitas	5
4.	Manajemen Rentabilitas	2
Peringkat Komposit		2

Permodalan

Self Assessment atas Permodalan Perseroan pada 31 Desember 2020 mendapatkan **Peringkat 1**, dengan rincian:

No.	Faktor Penilaian Permodalan	31 Desember 2020
1.	Kecukupan Modal Bank	1
2.	Pengelolaan Permodalan	1
Peringkat Komposit		1

13. Batasan Pengalihan Dana Perusahaan Anak kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

14. Komitmen Investasi Barang Modal

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dimiliki oleh Perseroan.

15. Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Salah satu risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko pelemahan mata uang Rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing. Risiko ini dapat mengakibatkan adanya kerugian ataupun keuntungan selisih kurs. Pada umumnya risiko ini dihadapi oleh Perseroan karena adanya kegiatan operasional di luar Indonesia serta Perseroan memiliki Obligasi berdenominasi USD, sementara pencatatan laporan keuangan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Perseroan berutang dalam mata uang asing untuk menjaga likuiditas Perseroan dalam mata uang asing. Besaran pengaruh tingkat suku bunga dan perubahannya tidak berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman atau membayar kewajiban hal ini tercermin dari rasio PDN yang selalu dijaga Perseroan.

Perseroan menetapkan limit PDN pada batas maksimum 20% (limit regulator) dan 15% (limit internal) dan telah ditetapkan oleh direksi melalui penetapan limit risiko, limit rentabilitas, dan limit permodalan untuk penyusunan tingkat kesehatan bank. PDN BRI pada 31 Maret 2021 berada pada 0,80% terhadap modal.

Perseroan melakukan *natural hedging* terhadap pinjaman dan mata uang asing yang dimiliki dengan cara menyalurkan kembali ke dalam bentuk mata uang asing.

Pada 31 Maret 2021, pengakuan bunga terutang Perseroan sebesar Rp1.139.768 juta.

16. Kejadian atau Transaksi yang tidak Normal dan Jarang Terjadi yang dapat Mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Profitabilitas Perseroan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

17. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal 31 Maret 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Maret 2021 total sebesar Rp1.187.331.330 juta, analisa pemetaan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) kontraktual pada tanggal 31 Maret 2021:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas						
Liabilitas segera	22.802.245	22.802.245	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
- Giro	174.329.968	174.329.968	-	-	-	-
- Tabungan	443.867.205	443.867.205	-	-	-	-
- Deposito Berjangka	431.117.600	249.340.279	104.829.951	67.431.432	9.515.938	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	20.074.302	19.755.302	319.000	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.556.514	3.182.970	1.534.459	2.356.370	3.482.715	-
Liabilitas derivatif	878.258	522.648	49.337	306.273	-	-
Liabilitas akseptasi	5.400.017	3.560	2.258.072	3.138.385	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	32.334.036	681.885	172.962	27.186.747	4.292.442	-
Pinjaman yang diterima	35.123.555	1.887.819	3.848.348	16.972.991	12.414.397	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.068	-	-	501.068	-	-
Liabilitas lain-lain*)	10.346.562	774.666	1.440.649	1.018.283	6.491.077	621.887
Subtotal	1.187.331.330	917.148.547	114.452.778	118.911.549	36.196.569	621.887

*)Terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana syirkah temporer

18. Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan dalam Rangka Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI TRANSAKSI KEUANGAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK AKAN TERJADI DI MASA YANG AKAN DATANG.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEJADIAN ATAU TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN, YANG TELAH DIAUDIT AKUNTAN, KHUSUSNYA LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN 2020.

VII. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko di bawah ini yang dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit

Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Untuk aktivitas pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit yang diberikan, Perseroan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontijensi.

Dampak risiko kredit terhadap kinerja Perseroan diantaranya: berakibat terhadap komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, berdampak terhadap kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan kerugian, dan berdampak terhadap sumber timbulnya penyediaan dana serta kecukupan modal untuk menutup risiko residual (*unexpected loss*).

Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan tingginya tingkat gagal bayar nasabah dan peningkatan kredit bermasalah yang diakibatkannya.

Setiap aktivitas peminjaman terkena risiko kredit yang timbul dari risiko gagal bayar oleh para peminjam, yang meliputi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atas pinjaman yang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak berikan kepada para peminjam. Peminjam dapat mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya karena berbagai faktor, termasuk faktor eksternal tertentu, yang mungkin tidak berada dalam kendali Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, seperti perkembangan negatif dalam perekonomian Indonesia dan global, perubahan terhadap suku bunga dan perubahan peraturan dan/atau pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung. Setiap tren negatif atau kesulitan keuangan yang mempengaruhi para peminjam dapat meningkatkan risiko gagal bayar mereka. Para peminjam juga dapat terkena dampak negatif dari kebangkrutan, kurangnya likuiditas, kurangnya bisnis dan kegagalan operasional. Jika para peminjam gagal membayar pinjaman secara tepat waktu atau gagal untuk membayar kembali kreditnya setelah restrukturisasi kreditnya maka kualitas aset portofolio pembiayaan dan piutang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat terpengaruh secara negatif. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mengelola risiko kredit secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti pembentukan atau penambahan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam hal, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melakukan pembentukan atau penambahan cadangan tersebut, maka hal tersebut dapat mempengaruhi laba atau pendapatan Perseroan secara konsolidasian di masa mendatang. Setiap kegagalan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk mengelola pertumbuhan portofolio pinjaman Perseroan atau kualitas kredit para peminjam Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan parameter risiko yang hati-hati atau kegagalan untuk memantau dan mengatur kecukupan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat berdampak secara negatif dan secara materiil terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Kredit bermasalah dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan tingkat kredit bermasalah baru, kinerja penagihan, jumlah dan sifat pinjaman tunai Perseroan, dan perkembangan negatif dalam perekonomian Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2021, 3,16% dari total pinjaman Perseroan (cadangan bruto untuk kerugian penurunan nilai) dan 0,89% dari total pinjaman (setelah dikurangi cadangan untuk kerugian penurunan nilai) adalah diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah.

Perseroan memiliki konsentrasi pinjaman yang tinggi kepada para nasabah UMKM.

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan 31 Maret 2021 pinjaman kepada UMKM melalui segmen mikro dan ritel masing-masing mewakili 76,95%, 79,00%, 82,13%, dan 80,60% dari masing-masing total pinjaman Perseroan dan piutang syariah dan pembiayaan.

Gagal bayar pada sebagian besar pinjaman ini akan membuat Perseroan mengalami peningkatan risiko kredit, dan peningkatan yang signifikan dalam rasio kredit bermasalah Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa persentase kredit bermasalah yang dapat Perseroan pulihkan akan konsisten dengan pengalaman Perseroan sebelumnya.

Selain itu, jika sebagian besar dari pinjaman ini menjadi bermasalah, maka kualitas aset Perseroan secara umum akan terpengaruh secara negatif, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan secara material dan secara negatif.

Nilai dari agunan yang digunakan untuk mendukung pinjaman yang Perseroan salurkan mungkin tidak memadai dan dapat menurun di masa mendatang.

Tidak ada jaminan bahwa pinjaman Perseroan diagunkan pada tingkat yang memadai. Agunan Perseroan mungkin dinilai terlalu tinggi dan tidak secara akurat mencerminkan nilai likuidasinya, yang merupakan jumlah maksimum yang mungkin dapat Perseroan pulihkan dari penjualan agunan, dikurangi biaya penjualan tersebut. Selain itu, beberapa penilaian sehubungan dengan agunan Perseroan mungkin telah kedaluwarsa atau mungkin tidak secara akurat mencerminkan nilai agunan Perseroan. Selain itu, karena hampir semua pinjaman Perseroan dijamin dengan properti real, inventaris atau agunan lain yang berlokasi di Indonesia, maka nilai aset ini tergantung pada kondisi politik, ekonomi dan sosial yang berlaku di Indonesia. Mengingat adanya ketidakpastian dalam nilai agunan ini, agar menjadi konservatif, Perseroan tidak mengurangi nilai agunan dari provisi yang disyaratkan untuk potensi kerugian pinjaman.

Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan nilai agunan ketika peminjam Perseroan melanggar kewajibannya, yang mana dapat menghadapi Perseroan atas potensi kerugian.

Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan kembali nilai agunan apa pun atau menegakkan jaminan apa pun, sebagian, karena kesulitan dalam menggunakan sistem hukum Indonesia untuk menegakkan hak-hak Perseroan. Untuk menyita agunan atau menegakkan jaminan, tidak ada solusi yang disepakati antara atau di antara pihak-pihak yang terlibat, Perseroan harus mengajukan permohonan ke pengadilan Indonesia. Permohonan seperti itu, ketika dibuat, harus tunduk pada persyaratan prosedural, administratif, dan kepaillitan yang relatif memberatkan. Keterlambatan yang diakibatkan dapat berlangsung selama beberapa tahun dan dapat mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan nilai pasar agunan, terutama yang agunannya berupa persediaan atau piutang. Selain itu, agunan tersebut tidak dapat diasuransikan dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memulihkan nilai agunan secara penuh sehubungan dengan proses penegakan tersebut. Di masa lalu, faktor-faktor ini telah menghadapi dan terus menghadapi Perseroan pada tanggung jawab hukum saat memiliki agunan tersebut. Hal ini secara signifikan mengurangi kemampuan Perseroan untuk merealisasikan nilai agunan Perseroan dan oleh karena itu mengurangi efektivitas dalam mengambil posisi aman atas pinjaman yang diberikannya. Selain itu, ketika Perseroan merestrukturisasi kredit bermasalah, Perseroan mungkin setuju dengan peminjam untuk melepaskan agunan setelah sebagian dari jumlah terutang yang jatuh tempo pada pinjaman dilunasi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat merealisasikan nilai penuh, atau nilai apa pun, dari agunan Perseroan dalam proses kepaillitan atau penyitaan atau lainnya.

Bank-bank di Indonesia umumnya menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara-negara yang lebih maju.

Bank-bank di Indonesia dihadapkan pada risiko kredit bahwa peminjam Indonesia mungkin tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu dan khususnya, atas kegagalan untuk membayar tersebut, bank-bank Indonesia mungkin tidak bersedia atau tidak dapat memberlakukan bunga jaminan atau jaminan apa pun yang mungkin mereka memiliki. Risiko kredit para peminjam Indonesia, dalam banyak kasus, secara signifikan lebih tinggi daripada peminjam di negara yang lebih maju karena ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan lingkungan peraturan, politik, hukum dan ekonomi Indonesia, utang luar negeri yang besar dari Pemerintah dan perusahaan relatif terhadap produk domestik bruto Indonesia dan volatilitas yang lebih besar dari suku bunga dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Setiap peristiwa politik atau ekonomi yang signifikan di Indonesia dapat mengakibatkan penurunan cepat terhadap kualitas kredit portofolio pinjaman Perseroan dan, sebagai akibatnya, persentase kredit bermasalah dan Pinjaman Berisiko yang lebih tinggi daripada yang dialami oleh bank-bank di negara-negara yang lebih maju pada umumnya. Peningkatan risiko kredit ini tidak hanya berdampak pada Perseroan tetapi juga berlaku untuk Perusahaan Anak yang bergerak di bidang perbankan dan keuangan.

Risiko kredit yang lebih tinggi berdampak pada kualitas portofolio pinjaman dan menghadapi bank-bank Indonesia, termasuk Perseroan, pada potensi kerugian yang lebih besar dan risiko yang lebih tinggi daripada bank-bank di negara-negara yang lebih maju. Selain itu, risiko kredit yang lebih tinggi dapat mempersulit atau membuat lebih mahal bagi Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan ekuitas. Kerugian dan biaya modal yang lebih tinggi tersebut yang timbul dari risiko kredit yang lebih tinggi ini dapat mempengaruhi secara materiil dan secara merugikan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil usaha.

Selain informasi dari OJK, bank -bank di Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon peminjam.

Bank-bank di Indonesia memiliki keterbatasan informasi independen mengenai riwayat kredit calon debitur di Indonesia, termasuk riwayat pelunasan. Keterbatasan akses ke informasi riwayat kredit adalah suatu risiko yang harus dipertimbangkan oleh bank-bank Indonesia seperti Perseroan sendiri ketika menyalurkan kredit, karena tidak ada lembaga pihak ketiga yang memantau riwayat kredit di Indonesia sebelum tahun 1990. Saat ini, informasi mengenai riwayat pembayaran kredit calon peminjam Indonesia hanya disediakan oleh OJK. Namun, saat ini tidak ada informasi yang tersedia dari sumber mana pun mengenai utang yang dikeluarkan oleh calon peminjam melalui bank atau sumber pembiayaan lain,

kecuali sistem layanan informasi keuangan dari OJK. Kurangnya informasi yang lengkap dan terperinci mengenai riwayat kredit dan status calon peminjam dan ketidakterediaan sistem OJK membuat Perseroan sulit untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam secara andal.

Ketentuan mengenai klasifikasi dan provisi untuk kredit bermasalah dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh OJK.

Dari waktu ke waktu, OJK merevisi peraturan klasifikasi aset, pencadangan kerugian dan restrukturisasi kreditnya untuk memudahkan penyajian perkiraan yang lebih akurat tentang kemungkinan debitur dapat memenuhi kewajibannya di masa depan untuk tujuan klasifikasi kredit, alih-alih hanya mengandalkan kinerja historis. Ke depan, OJK dapat mengkaji ulang kebijakan yang berlaku terkait dengan klasifikasi kredit. Tinjauan tersebut dapat mempengaruhi klasifikasi aset dan persyaratan provisi Perseroan. Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum mengharuskan bank-bank di Indonesia mengklasifikasikan kredit bermasalah ke dalam tiga kategori sesuai dengan risiko gagal bayarannya: kurang lancar, diragukan dan macet. Selain itu, bank-bank di Indonesia diwajibkan untuk mengklasifikasikan kredit bermasalah dalam dua kategori: lancar dan dalam perhatian khusus. Umumnya, klasifikasi tergantung pada kombinasi sejumlah faktor kuantitatif serta, pada tingkat yang lebih rendah, faktor kualitatif yang berkaitan dengan prospek bisnis peminjam dan afiliasinya, kinerja keuangan peminjam dan kemampuan peminjam untuk pelunasan. Pinjaman yang menunggak lebih dari 90 hari dianggap bermasalah.

Selain itu, Perseroan diharuskan untuk menilai klasifikasi pinjaman yang belum dilunasi dengan mempertimbangkan klasifikasi pinjaman yang dibuat oleh bank-bank lain di Indonesia untuk fasilitas yang telah diberikan kepada peminjam yang sama atau yang telah diperpanjang untuk membiayai proyek yang sama (di mana bank lain tersebut menyediakan sebagian besar pembiayaan kepada peminjam tersebut). Jika bank-bank lain di Indonesia mengklasifikasikan pinjaman dalam kategori yang lebih rendah dari Perseroan, maka Perseroan diharuskan untuk menyesuaikan klasifikasi Perseroan dan membuat cadangan kerugian pinjaman tambahan.

Untuk klasifikasi kredit, pedoman OJK terutama berfokus pada faktor kuantitatif, seperti jumlah bulan tunggakan pembayaran dan pada tingkat yang lebih rendah, pada faktor kualitatif seperti prospek usaha peminjam dan afiliasinya. Selain itu, OJK mengharuskan pinjaman yang mengalami penurunan nilai dicatat pada nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal dari pinjaman tersebut.

Kebijakan klasifikasi dan provisi pinjaman Perseroan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Perseroan. Meskipun kebijakan klasifikasi dan provisi pinjaman Perseroan mematuhi pedoman OJK saat ini, tidak ada jaminan bahwa cadangan Perseroan cukup untuk mencerminkan pemulihan aktual Perseroan di masa depan atas pinjaman ini atau bahwa Perseroan tidak perlu membuat cadangan tambahan yang signifikan untuk kemungkinan kerugian pinjaman di periode-periode mendatang.

Kinerja portofolio pinjaman Perseroan yang direstrukturisasi bergantung terhadap kondisi ekonomi yang memburuk secara umum termasuk kenaikan suku bunga dan pinjaman tersebut dapat menjadi tidak *perform* lagi.

Berdasarkan hukum Indonesia, bank-bank milik negara harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dapat menemukan kerugian dari restrukturisasi pinjaman dengan menyetujui pengurangan pokok pinjaman atau dari pemberian pinjaman dengan harga diskon kepada pihak ketiga yang dapat menimbulkan kerugian negara. Akibatnya, Perseroan hanya dapat merestrukturisasi pinjaman dengan menawarkan pengurangan bunga dan perpanjangan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran pokok. Perseroan harus memilih antara pendekatan restrukturisasi atau penyediaan untuk NPL tersebut secara penuh dan menghapusnya. Kemampuan Perseroan yang terbatas untuk merestrukturisasi NPL meningkatkan kemungkinan bahwa jika situasi peminjam tidak cukup membaik setelah restrukturisasi untuk memungkinkannya melakukan pembayaran yang diperlukan secara tepat waktu, pinjaman yang direstrukturisasi menjadi *non-performing* lagi. Dengan demikian, Perseroan menghadapi tingkat eksposur yang lebih besar terhadap kondisi ekonomi yang memburuk di Indonesia daripada banyak pesaing swasta lain. Selama periode tersebut, Perseroan mungkin mengalami tingkat NPL yang lebih tinggi dari portofolio pinjaman Perseroan yang direstrukturisasi, sehingga menghasilkan dampak negatif yang lebih besar pada portofolio pinjaman secara keseluruhan dibandingkan dengan beberapa pesaing. Perseroan tidak dapat meyakinkan pemegang saham bahwa portofolio pinjaman kami yang direstrukturisasi tidak akan memiliki dampak material yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Pinjaman yang direstrukturisasi dapat menjadi tidak *perform* jika debitur tersebut gagal untuk mematuhi persyaratan pinjaman yang direstrukturisasi tersebut.

Dalam restrukturisasi sejumlah pinjaman berisiko tinggi Perseroan, Perseroan dapat menyetujui untuk mengurangi pembayaran pokok dan/atau bunga menjadi kurang dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman untuk jangka waktu tertentu, dengan tunduk pada peningkatan jumlah pembayaran jika Perseroan kembali mengevaluasi kemampuan peminjam yang relevan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun penurunan suku bunga atas pinjaman berisiko tinggi kemungkinan dapat meningkatkan kinerja pengembalian pinjaman tersebut, jika debitur Perseroan tidak dapat melakukan

pembayaran yang disesuaikan untuk pinjaman yang direstrukturisasi, pinjaman yang direstrukturisasi tersebut dapat menjadi *non-performing*, sehingga memerlukan ketentuan tambahan, yang mungkin berdampak buruk pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

2. Risiko Usaha Yang Berkaitan dengan Perseroan

a. Risiko Terkait Pandemi Covid-19

Merebaknya penyakit menular yang parah di Indonesia atau di tempat lain mana pun dapat berdampak buruk pada ekonomi di seluruh dunia dan dapat berdampak secara merugikan terhadap hasil operasi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.

Pandemi global COVID-19 yang sedang berlangsung atau wabah penyakit menular lainnya, atau ketakutan akan suatu wabah, atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Indonesia atau di tempat lain mana pun dapat berdampak buruk terhadap ekonomi Indonesia dan global dan dapat berdampak secara merugikan bagi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Strain baru dari virus corona yang diidentifikasi pada akhir 2019 telah menyebar secara global, termasuk di Indonesia, dan telah mengakibatkan pihak berwenang menerapkan berbagai tindakan untuk menahan virus tersebut, termasuk pembatasan perjalanan (termasuk di dalam negeri di Indonesia), karantina, dan penguncian wilayah (*lockdown*). Langkah-langkah ini telah berdampak dan dapat membawa dampak lebih jauh terhadap bisnis dan hasil operasi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak. Ada banyak ketidakpastian tentang tindakan tersebut dan tindakan potensial di masa depan, dan pembatasan-pembatasan akses ke cabang dan kantor Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan properti lainnya atau pada tenaga kerja Perseroan. Karena dampak terus berlanjut, dampak dari gangguan terhadap strategi dan inisiatif bisnis Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah membawa dampak buruk dan dapat terus berdampak negatif terhadap hasil keuangan Perseroan, termasuk realisasi kerugian risiko kredit, pasar, atau operasional.

Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Presiden Indonesia menyatakan pandemi COVID-19 sebagai "Darurat Kesehatan Masyarakat" dan pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, telah dinyatakan sebagai sebuah "Bencana Nasional". Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai langkah perlindungan, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan COVID-19. Ruang lingkup pembatasan meliputi penutupan sekolah dan tempat kerja tertentu, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial budaya dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pemerintah juga memberlakukan pembatasan perjalanan sementara di daerah-daerah tertentu selama masa pembatasan sosial berskala besar. Di Jakarta, pemerintah daerah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 yang mengatur ketentuan teknis pembatasan sosial berskala besar, termasuk pengenaan denda atas pelanggaran pembatasan sosial berskala besar. Di Surabaya, pada tanggal 24 April 2020, Walikota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya untuk menerapkan berbagai langkah dalam upaya menekan penyebaran pandemi COVID-19. Baru-baru ini, dikarenakan gelombang kedua COVID-19 di Indonesia, pada tanggal 30 Agustus 2021, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi No. 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali yang menginstruksikan pemerintah daerah di wilayah Jawa dan Bali untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat level 4, level 3 dan level 2 di wilayah tersebut sampai dengan tanggal 6 September 2021. Pembatasan tersebut telah mengakibatkan efek buruk terhadap operasi bisnis Perseroan.

Perseroan dan/atau Perusahaan Anak terus memantau potensi efek dan dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19, yang merupakan situasi yang berkembang dengan pesat. Masih ada ketidakpastian mengenai dampak penuh dari pandemi COVID-19 terhadap Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, ekonomi global, dan pasar keuangan, termasuk terhadap hasil keuangan, modal regulasi dan rasio likuiditas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, serta kemampuan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan lainnya. Dampak akhir akan tergantung pada perkembangan masa depan yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diprediksi, termasuk ruang lingkup, tingkat keparahan, durasi dan kemungkinan gelombang berikutnya dari pandemi COVID-19, dan efektivitas tindakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, otoritas moneter dan otoritas pengatur dan pihak-pihak ketiga lainnya.

Terkait dengan Perseroan, jumlah debitur yang telah direstrukturisasi akibat dampak COVID-19 mencapai 2.657.761 debitur hingga kuartal I 2021. Meski trennya telah menunjukkan penurunan dari 2.975.612 debitur pada 30 September 2020, yang terutama didorong oleh mikro, konsumen dan debitur segmen kecil menjadi 2.657.571 pada kuartal pertama tahun 2021, Perseroan tetap berhati-hati karena ketidakpastian tetap ada dan memperkirakan sisi operasional juga akan terpengaruh oleh penundaan administratif karena Perseroan berusaha untuk menegosiasikan persyaratan restrukturisasi dan kondisi dengan debitur yang terpengaruh. Perseroan beranggapan bahwa akibat dari COVID-19 juga dapat berpengaruh terhadap Perusahaan Anak yang memiliki kegiatan usaha perbankan dan jasa keuangan.

Selain dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis Perseroan, hal itu juga dapat terus meningkatkan tekanan finansial pada klien Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada klien individu Perseroan serta pada kinerja keuangan klien UMKM, usaha kecil, komersial dan korporat Perseroan sehubungan dengan kendala operasional karena dampak *social distancing*, termasuk namun tidak terbatas pada penutupan yang berkelanjutan atau pengurangan jam operasional, kehilangan peluang bisnis dan/atau peningkatan biaya operasional, yang dapat mengakibatkan kerugian kredit yang lebih tinggi dari yang diharapkan bagi Perseroan.

Pandemi COVID-19 telah dan dapat terus mengakibatkan gangguan pada klien Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan pada cara Perseroan dan/atau Perusahaan Anak menjalankan bisnis Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, termasuk penutupan sementara cabang tertentu, peningkatan jumlah staf yang bekerja di luar lokasi, dan perubahan terhadap operasi Perseroan dan/atau Perusahaan Anak karena volume permintaan klien yang lebih tinggi, serta gangguan pada pemasok utama barang dan jasa Perseroan. Lebih lanjut, penyebaran pandemi COVID-19 telah menyebabkan Perseroan mengubah praktik bisnis dengan menerapkan langkah-langkah *social distancing* di lingkungan kerja, termasuk tindakan disinfektan yang sering dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Perseroan dapat mengambil tindakan lebih lanjut sebagaimana dianjurkan oleh Pemerintah atau yang Perseroan tentukan demi kepentingan terbaik karyawan dan pelanggan. Tidak ada kepastian bahwa tindakan tersebut akan cukup untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh virus, dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan operasi sehari-hari di properti Perseroan yang dapat terkena dampak negatif. Faktor-faktor ini telah dan dapat terus berdampak buruk pada operasi bisnis Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan kualitas serta kesinambungan layanan kepada para nasabah. Sampai saat ini, Perseroan telah mengambil tindakan proaktif melalui rencana kelangsungan bisnis Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan tim manajemen krisis Perseroan dan/atau Perusahaan Anak telah meningkatkan upaya mereka untuk menjaga kesejahteraan karyawan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan kemampuan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk melayani klien. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil dalam melakukan implementasi terhadap seluruh tindakan Perseroan tersebut.

Jika pandemi COVID-19 berkepanjangan, termasuk kemungkinan gelombang berikutnya, atau munculnya lebih lanjut penyakit-penyakit yang menimbulkan efek serupa, maka dampak buruk terhadap perekonomian dapat semakin dalam dan mengakibatkan volatilitas dan penurunan lebih lanjut di pasar keuangan. Selain itu, masih belum pasti bagaimana lingkungan makroekonomi, norma sosial dan bisnis akan terpengaruh setelah pandemi ini. Perkembangan tak terduga di pasar keuangan, lingkungan peraturan, atau perilaku dan kepercayaan konsumen dapat berdampak buruk pada hasil dan kondisi keuangan, operasi bisnis, dan reputasi Perseroan, untuk jangka waktu yang cukup lama.

b. Risiko Pasar

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan *variable* pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan. *Variable* pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

Dampak risiko pasar terhadap kinerja Perseroan yaitu terganggunya aktivitas treasuri serta investasi, kegiatan pembiayaan dan pendanaan serta kegiatan pembiayaan perdagangan, penurunan nilai portofolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan yang dikarenakan pergerakan *variable* harga pasar, kegagalan *counterparty* (nasabah) dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak/perjanjian dengan Perseroan dan potensi kerugian akibat fluktuasi harga saham. Selain itu, risiko pasar juga berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perseroan diantaranya potensi kerugian risiko suku bunga *banking book* terhadap total pendapatan bunga (perspektif NII berdampak terhadap NIM) dan potensi kerugian risiko suku bunga *banking book* terhadap total modal (perspektif modal ekonomis).

c. Risiko Likuiditas

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.

Dampak risiko likuiditas terhadap kinerja Perseroan diantaranya manajemen likuiditas adalah salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan, memperkecil dana yang menganggur dengan optimalisasi likuiditas yang ada sehingga dana menganggur akan mengurangi profitabilitas Perseroan dan mencapai cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral.

Tekanan likuiditas dapat berdampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan, meningkatkan biaya pinjaman, dan mengganggu operasi Perseroan.

Perseroan bergantung pada pasar modal dan kredit yang stabil, likuid dan berfungsi dengan baik untuk mendanai operasi Perseroan. Pada tahun 2007, pasar kredit di Amerika Serikat mulai mengalami kondisi dan volatilitas yang sulit yang pada gilirannya mempengaruhi pasar keuangan dunia. Pada tahun 2008, masalah likuiditas dan kredit serta volatilitas di pasar kredit dan keuangan global meningkat secara signifikan dengan kebangkrutan atau akuisisi dari, dan bantuan pemerintah kepada, beberapa lembaga keuangan utama AS dan Eropa. Perkembangan ini mengakibatkan berkurangnya likuiditas dan meningkatnya volatilitas di Amerika Serikat dan pasar kredit dan keuangan global, termasuk di Indonesia. Meskipun krisis

keuangan dan kredit global ini secara umum tidak mempengaruhi bisnis dan posisi keuangan Perseroan dengan tingkat keparahan yang sama dengan yang mempengaruhi bank-bank dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan negara-negara tertentu lainnya, krisis keuangan global mempengaruhi sektor-sektor tertentu dari ekonomi Indonesia, seperti para eksportir dan perusahaan sumber daya alam, dan stabilitas mata uang dan pasar keuangan Indonesia. Setiap berulangnya kembali atau dampak lanjutan dari krisis keuangan dan kredit dapat mempengaruhi Indonesia lebih parah, misalnya dengan penurunan permintaan produk ekspor di negara-negara yang terkena dampak krisis kredit atau negara-negara pengeksport ke negara-negara yang terkena dampak krisis, yang dapat menimbulkan kesulitan bagi para peminjam Perseroan untuk membiayai kembali atau membayar kembali pinjaman kepada Perseroan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas kredit portofolio pinjaman Perseroan dan dapat meningkatkan tingkat kredit bermasalah Perseroan.

Selain itu, peringkat kredit Perseroan dapat dipengaruhi secara material oleh sentiment negatif di pasar keuangan. Setiap penurunan peringkat Perseroan kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman Perseroan dan membatasi akses Perseroan ke modal pasar. Penurunan peringkat Perseroan juga dapat mempengaruhi biaya Perseroan untuk meningkatkan modal atau membatasi akses Perseroan ke sumber modal. Karena lembaga pemeringkat terus mengevaluasi industri jasa keuangan, ada kemungkinan bahwa pemeringkatan lembaga akan meningkatkan tingkat pengawasan yang mereka terapkan pada lembaga keuangan, meningkatkan frekuensi dan lingkup tinjauan kredit mereka, meminta informasi tambahan dari perusahaan yang mereka nilai, dan berpotensi menyesuaikan persyaratan mereka digunakan dalam model lembaga pemeringkat untuk pemeliharaan tingkat peringkat tertentu. Hasil dari tinjauan semacam itu dapat memberikan dampak penurunan peringkat Perseroan. Setiap penurunan peringkat bisa menyebabkan kerugian bisnis dan operasi Perseroan.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan Perseroan dipenuhi melalui sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito dan tabungan. Namun, banyak dari aset-aset Perseroan (seperti banyak dari pinjaman-pinjaman Perseroan) memiliki jatuh tempo jangka panjang, yang menciptakan potensi ketidaksesuaian pendanaan. Perseroan secara historis dapat melakukan *roll over* sebagian besar simpanan Perseroan pada saat jatuh tempo tetapi tidak ada jaminan bahwa ini akan berlanjut di masa depan. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami masalah likuiditas di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mempertahankan likuiditas yang cukup untuk menutupi penarikan nasabah di masa depan, terutama jika terjadi *bank run* atau krisis ekonomi di masa depan. Jika sejumlah besar deposan Perseroan menarik simpanan mereka setiap saat atau tidak melakukan *roll over* dana yang disimpan pada saat jatuh tempo, posisi likuiditas Perseroan akan terpengaruh secara merugikan dan, yang paling ekstrem, Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran Perseroan ketika jatuh tempo.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat secara merugikan mempengaruhi pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai operasi dan pertumbuhan.

Saat ini, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat “Baa2” oleh Moody's (yang dinyatakan pada bulan September 2020 meningkat dari “Baa3” pada 13 April 2018), “BBB” oleh Fitch Ratings Ltd. (yang dinyatakan pada 3 September 2018) dan “BBB-” oleh S&P (yang dinyatakan pada 22 April 2021). Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan peringkat utang negara yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional ini kepada Indonesia setelah krisis keuangan Asia tahun 1997.

Meskipun tren terbaru dalam peringkat utang negara Indonesia telah positif, tidak ada jaminan bahwa Moody's, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat kredit internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia. Penurunan peringkat tersebut dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia, pada kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan dan pada suku bunga dan persyaratan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia.

d. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Dampak risiko operasional terhadap kinerja Perseroan diantaranya kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung serta tindakan *fraud* dan kejadian eksternal.

Perubahan terhadap standar akuntansi dapat berdampak signifikan terhadap hasil keuangan Perseroan.

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasi Perseroan berdasarkan PSAK yang berlaku. Perubahan terhadap PSAK atau interpretasinya dapat menyebabkan hasil dan posisi keuangan yang dilaporkan di masa depan berbeda dari ekspektasi saat ini, atau hasil historis berbeda dari yang dilaporkan sebelumnya karena penerapan standar akuntansi secara retrospektif. Perubahan tersebut juga dapat mempengaruhi permodalan dan rasio regulasi Perseroan. Misalnya, PSAK 71,

“Instrumen Keuangan”, setara dengan IFRS 9 “Instrumen Keuangan”, yang mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis Perseroan, metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang mengakibatkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan serta akuntansi untuk lindung nilai yang mencerminkan manajemen risiko entitas yang lebih baik, mulai berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 2020. Penerapan PSAK Indonesia ini menghasilkan peningkatan cadangan kerugian kredit yang diakui.

Perseroan telah mengadopsi persyaratan PSAK 73. Sewa mulai 1 Januari 2020 secara retrospektif dengan dampak kumulatif sesuai dengan PSAK 73. Berdasarkan opsi penerapan tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyajikan kembali dampak yang timbul akibat diterapkannya PSAK 73. Sewa yang diterapkan sebelum tanggal penerapan diungkapkan sebesar kumulatif dari sisa sewa per tanggal penerapan.

PSAK 73 memperkenalkan model tunggal pengakuan sewa di neraca untuk akuntansi penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa dalam menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas barang yang bernilai rendah.

Perseroan mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan dan mempunyai nilai pendasar aset sewa lebih dari Rp75.000.000 (Rupiah penuh). Selain dari hal tersebut sewa diakui sebagai biaya pada periode pelaporan. Sebagai akibatnya, hasil keuangan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif atas penerapan standar akuntansi baru.

Hasil operasi Perseroan tidak dapat mengindikasikan kinerja Perseroan di masa depan.

Hasil Perseroan di masa depan bergantung pada banyak faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menerapkan strategi bisnis Perseroan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi global, dan portofolio pinjaman Perseroan serta fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, di antara faktor-faktor lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan tetap menguntungkan atau tidak akan mengalami kerugian operasional di masa depan, yang mungkin bersifat signifikan.

Sektor perbankan Indonesia telah menghadapi kesulitan keuangan dan operasional yang signifikan di masa lalu, dan tidak ada jaminan bahwa perbankan Indonesia tidak akan menghadapi kesulitan keuangan dan operasional di masa depan.

Krisis keuangan Asia tahun 1997 menyebabkan kesulitan keuangan dan operasional yang signifikan bagi sektor perbankan Indonesia. Kesulitan-kesulitan ini termasuk volatilitas suku bunga, kendala likuiditas, margin bunga rendah atau negatif, pertumbuhan simpanan rendah, penurunan kualitas aset dan kredit, penurunan nilai agunan, kredit bermasalah dalam jumlah besar, pertumbuhan pinjaman rendah atau negatif dan *under-capitalization* potensial maupun aktual. Hal ini juga mengakibatkan depresiasi nilai Rupiah dalam jumlah besar dan menipisnya cadangan mata uang asing Indonesia serta ketergantungan pada pemberi pinjaman multilateral dan kelompok kreditur untuk mencegah gagal bayar utang negara.

Pada tahun 1998, Pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) untuk merestrukturisasi sistem perbankan. Pada tahun 1999, Pemerintah melalui Bank Indonesia dan BPPN melakukan reformasi yang signifikan, antara lain menutup, melikuidasi, menjual saham atau menggabungkan beberapa bank. Gangguan lebih lanjut di sektor keuangan Indonesia, atau kondisi ekonomi secara umum di Indonesia, dapat menyebabkan sektor perbankan Indonesia pada umumnya, dan Perseroan pada khususnya, mengalami salah satu atau semua tantangan di atas termasuk peningkatan kredit bermasalah dalam jumlah besar, masalah pemenuhan persyaratan kecukupan modal, masalah likuiditas dan tantangan-tantangan lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah, yang bertindak melalui Bank Indonesia atau lainnya, tidak akan mengambil tindakan tambahan sehubungan dengan bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, yang meliputi akuisisi atau merger paksa, penutupan bank, kenaikan suku bunga, peningkatan persyaratan modal peraturan atau kendali bursa.

Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah masih memiliki defisit fiskal yang signifikan serta tingkat utang negara yang tinggi. Selain itu, cadangan mata uang asingnya rendah, Rupiah terus bergejolak, dan kekurangan penerimaan pajak di Indonesia telah mengakibatkan Pemerintah hanya memiliki *buffer* fiskal yang rendah. Inflasi juga tetap terkendali, dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 1,68% pada bulan Desember 2020 dan 1,37% pada bulan Maret 2021, menurut Bank Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang merugikan sebelumnya di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik lainnya tidak akan terjadi di masa depan. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lainnya, dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap volatilitas, pelambatan, atau pertumbuhan negatif tersebut dapat berdampak secara negatif dan secara materiil terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Basis simpanan/deposit Perseroan dapat terkontraksi, yang menyebabkan potensi peningkatan biaya pendanaan dan penurunan daya saing terhadap *peers* sejenis.

Perseroan memiliki basis simpanan nasabah terbesar di antara bank-bank di Indonesia dan merupakan sumber utama pendanaan Perseroan dengan total simpanan dari nasabah sebesar Rp1.049.314.773 juta per 31 Maret 2021. Di masa lalu, sistem perbankan Indonesia telah mengalami *bank runs* atau penarikan simultan oleh deposan karena berbagai alasan termasuk kurangnya kepercayaan pada sistem perbankan secara umum atau bank tertentu. Tidak ada jaminan bahwa penarikan simultan seperti itu tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa Perseroan akan dapat menanggapi secara memadai. Lebih lanjut, berdasarkan pengalaman Perseroan, sebagian besar deposito berjangka diperpanjang pada saat jatuh tempo tetapi tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa hal ini akan terus berlanjut. Penarikan secara simultan oleh deposan dan/atau kegagalan deposan untuk memperpanjang deposito berjangka yang jatuh tempo dapat berdampak material dan merugikan posisi likuiditas Perseroan dan Perseroan dapat diminta untuk mencari sumber pendanaan jangka pendek atau jangka panjang yang lebih mahal untuk membiayai operasinya. Se jauh Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup dengan persyaratan yang dapat diterima, kondisi keuangan dan hasil operasinya dapat terpengaruh secara negatif dan biaya pendanaannya dapat meningkat dan berdampak buruk pada kemampuan kami untuk bersaing.

Perseroan tunduk pada risiko dengan pihak lain.

Selayaknya lembaga keuangan kebanyakan, Perseroan bertindak sebagai perantara, terutama di pasar valuta asing dan derivatif domestik dan internasional. Perseroan memiliki transaksi mata uang asing dan *foreign exchange/interest rate swap* dengan sejumlah bank domestik dan internasional, lembaga keuangan dan entitas lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan tunduk pada risiko kredit yang terjadi dengan sejumlah pihak lain yang berbeda. Meskipun Perseroan meyakini bahwa kualitas kredit secara keseluruhan dari pihak lain memadai, tidak ada jaminan bahwa pihak-pihak dengan eksposur yang signifikan tidak akan menghadapi kesulitan dalam membayar sejumlah kontrak derivatif pada saat jatuh tempo, yang dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada pemeliharaan dan peningkatan keandalan, ketersediaan, dan keamanan sistem teknologi informasi Perseroan.

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada kemampuan sistem teknologi informasi (“TI”) Perseroan untuk secara akurat memproses sejumlah transaksi besar secara tepat waktu di berbagai pasar dan produk. Perseroan telah berinvestasi dalam sistem TI untuk meningkatkan keandalan, ketersediaan, dan keamanan infrastruktur untuk memungkinkan unit fungsi bisnis dan segmen operasinya memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah dan variasi layanan yang ditawarkan kepada pelanggan, Perseroan menghadapi peningkatan eksposur risiko melalui sistem TI. Perseroan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, yang didukung dengan alat untuk mengelola risiko perusahaan dan mendeteksi potensi penipuan. Perseroan juga memiliki unit risiko khusus yang bekerja bahu-membahu dengan unit bisnis (terutama unit TI) dalam operasinya sehari-hari. Untuk mencegah risiko gangguan dalam ketersediaan sistem, Perseroan memelihara data cadangan untuk sistem dapat memproses data utama Perseroan dan telah mendirikan pusat pemulihan bencana di lokasi terpisah dengan *server database* secara *mirroring* untuk menjalankan fungsi utama Perseroan jika terjadi bencana atau kegagalan sistem utama. Perseroan juga berusaha untuk melindungi sistem komputer dan infrastruktur jaringan dari pembobolan fisik serta pelanggaran keamanan dan penipuan atau masalah lainnya, yang dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan. Namun, Perseroan mungkin tidak dapat secara memadai melindungi operasi bisnis Perseroan dari eksposur risiko di atas yang pada gilirannya dapat memiliki dampak material yang merugikan pada bisnis Perseroan.

Bisnis Perseroan bergantung pada *brand* yang kuat, dan setiap kegagalan untuk mempertahankan dan meningkatkan merek Perseroan dapat merusak kemampuan Perseroan untuk mengembangkan bisnis, terutama di pasar baru di mana Perseroan memiliki pengenalan merek yang terbatas.

Perseroan telah mengembangkan merek yang kuat yang diyakini telah berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan bisnis Perseroan. Mempertahankan dan meningkatkan merek “Bank BRI” dan merek Perseroan yang lain sangat penting untuk mengembangkan bisnis Perseroan, terutama di pasar baru di mana Perseroan memiliki pengenalan merek yang terbatas. Jika Perseroan tidak berhasil membangun dan mempertahankan merek yang kuat, bisnis Perseroan bisa dirugikan secara material. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas merek Perseroan mungkin mengharuskan Perseroan untuk melakukan investasi besar di bidang-bidang seperti pemasaran, hubungan masyarakat, dan pelatihan karyawan. Perseroan secara aktif terlibat dalam iklan, surat promosi dan komunikasi email yang ditargetkan, dan terlibat secara teratur dalam kegiatan hubungan masyarakat dan sponsor. Investasi ini mungkin besar dan mungkin gagal untuk mencakup jangkauan optimal media periklanan tradisional, *online*, dan sosial untuk mencapai eksposur dan manfaat maksimal bagi merek. Jika Perseroan gagal mempertahankan atau, di pasar yang lebih baru, membangun, reputasi positif terkait merek Perseroan, Perseroan mungkin tidak dapat menarik atau mempertahankan pelanggan serta agen dan mitra distribusi, dan, sebagai akibatnya, bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasi dapat terpengaruh secara negatif.

e. Risiko Hukum

Merupakan risiko yang menyebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat syahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Dampak risiko hukum terhadap kinerja Perseroan diantaranya kelemahan perikatan dan dampak terhadap tuntutan hukum.

f. Risiko Stratejik

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Dampak risiko stratejik terhadap kinerja Perseroan diantaranya kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, berdampak terhadap strategi bisnis lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, posisi bisnis lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan serta pencapaian rencana bisnis lembaga jasa keuangan.

Industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif.

Sektor perbankan Indonesia sangat kompetitif. Pesaing utama Perseroan adalah bank domestik utama yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai perusahaan jasa keuangan, seperti perusahaan-perusahaan *fintech*, perusahaan-perusahaan pembiayaan, yang menyediakan pembiayaan untuk perdagangan, pinjaman konsumen dan pinjaman multiguna, serta entitas-entitas yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan pembiayaan pengembangan industri dan pinjaman dan jasa ekspor dan impor.

Perseroan juga mungkin menghadapi persaingan yang meningkat di satu atau semua lini produk Perseroan dari lembaga keuangan yang menawarkan layanan dan produk perbankan komersial yang lebih beragam daripada Perseroan dan yang memiliki batas pinjaman yang lebih besar, sumber daya keuangan yang lebih besar, dan neraca yang lebih kuat daripada Perseroan. Peningkatan persaingan dapat disebabkan oleh:

- (i) bank-bank dalam negeri mengadakan aliansi strategis dengan bank-bank asing dengan sumber daya keuangan dan manajemen yang signifikan;
- (ii) perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang mengkhususkan diri pada produk yang Perseroan tawarkan secara langsung atau melalui anak perusahaan atau aliansi strategis Perseroan, seperti pembiayaan otomotif, penjualan asuransi, leasing dan pinjaman pembangunan pedesaan;
- (i) pesatnya perkembangan industri *financial technology* dan perubahan preferensi nasabah yang mengakibatkan peningkatan jumlah nasabah yang lebih memilih produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan *financial technology* daripada perbankan tradisional.
- (ii) konsolidasi berkelanjutan, baik dengan maupun tanpa bantuan Pemerintah dan perubahan kebijakan, di sektor perbankan domestik dan internasional; dan
- (iii) pertumbuhan bank swasta domestik yang lebih kecil yang mampu merespons lebih cepat terhadap perubahan pasar.

Selain itu, strategi perbankan konsumen Perseroan akan menghadapkan Perseroan pada persaingan dari bank-bank Indonesia dan asing yang mungkin memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak di segmen pasar tersebut dibandingkan dengan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu bersaing secara efektif dan persaingan yang meningkat dapat mempersulit Perseroan untuk meningkatkan ukuran portofolio pinjaman dan basis simpanan Perseroan, serta menyebabkan persaingan harga yang meningkat, yang dapat berdampak terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Meningkatnya persaingan di industri perbankan Indonesia dapat menyulitkan Perseroan untuk mempertahankan tingkat kinerja operasi saat ini di masa depan.

Margin Bunga Bersih atau *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan (secara mandiri) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019 dan 2020 dan 31 Maret 2021 masing-masing adalah 7,45%, 6,98%, 6,60% dan 7,00%. Selain itu, Perseroan telah mampu meningkatkan portofolio pinjaman dan basis simpanan Perseroan secara substansial dalam beberapa tahun terakhir dengan mempertahankan margin bunga bersih yang stabil. Sementara kinerja tersebut sebagian merupakan hasil dari jaringan layanan cabang Perseroan yang kuat dengan 8.885 unit operasi yang terdiri dari cabang, sub-cabang dan unit BRI di seluruh Indonesia per 31 Maret 2021 dan pengetahuan mendalam tentang komunitas yang Perseroan layani, hal ini juga dapat menjadi bukti, dan sebagian disebabkan oleh, tingkat persaingan yang relatif rendah di industri perbankan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Meningkatnya persaingan, khususnya di

segmen konsumen, dapat berasal dari bank-bank Indonesia dan asing, perusahaan-perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi dan *multifinance*, aktivitas pasar modal Indonesia yang lebih gencar, jenis-jenis investasi dan tabungan alternatif serta lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan pembiayaan pembangunan industri dan pinjaman dan jasa ekspor-impor. Beberapa dari pesaing ini mungkin memiliki, atau mungkin mengembangkan, basis pendanaan dan skala bisnis yang dalam beberapa hal melebihi milik Perseroan. Mereka juga mungkin memiliki biaya operasi yang lebih efisien dan dapat mendorong suku bunga pinjaman atau deposito ke tingkat di mana operasi Perseroan akan menjadi kurang menguntungkan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi persaingan dari para pesaing baru dan yang sudah ada dengan keahlian di bidang teknologi keuangan, yang terus memainkan peran yang semakin penting di sektor keuangan. Bahkan jika operasi Perseroan tetap kompetitif atau meningkat dibandingkan dengan para peserta lain di industri perbankan, peningkatan umum dalam tingkat persaingan dapat menyebabkan margin bunga bersih turun ke tingkat yang lebih konsisten dengan yang terlihat di negara-negara lain. Setiap dari faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mungkin belum dapat menerapkan strategi bisnis Perseroan sesuai jadwal atau sesuai anggaran atau gagal sama sekali.

Perseroan mungkin belum dapat sepenuhnya menerapkan strategi bisnis Perseroan sesuai jadwal atau sesuai anggaran atau gagal sama sekali. Strategi Perseroan tunduk pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi dan persaingan yang signifikan, yang banyak di antaranya berada di luar kendali Perseroan dan dapat menunda atau meningkatkan biaya implementasi. Peristiwa-peristiwa potensial tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, perubahan yang pesat dalam preferensi nasabah, perselisihan perburuhan, peningkatan sistem, perubahan biaya atau persyaratan yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, keterlambatan dalam mendapatkan persetujuan pemerintah yang diperlukan, penurunan ekonomi, dan perubahan terhadap rencana untuk penambahan fasilitas yang diperlukan oleh perubahan kondisi pasar.

Gangguan terhadap rencana strategis Perseroan dapat mengakibatkan hilangnya atau tertundanya penerimaan pendapatan, peningkatan biaya pembiayaan, atau kegagalan untuk memenuhi proyeksi laba dan pendapatan, yang mana setiap hal tersebut dapat berdampak pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan mungkin belum dapat merealisasikan manfaat yang diharapkan dari rencana pengambilalihan termasuk Penggabungan Bisnis Ultra Mikro

Pemerintah telah mengumumkan niatnya untuk membentuk *holding* ultra mikro yaitu Perseroan, Pegadaian, dan PNM. *Holding* ini diharapkan dapat menciptakan manfaat bagi semua pemangku kepentingan melalui inisiatif strategi yang terkoordinasi. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan transaksi yang diusulkan, Perseroan akan berfungsi sebagai perusahaan induk, sedangkan Pegadaian dan PNM akan menjadi anggota dari perusahaan induk. Pembentukan grup induk ultra mikro ini akan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cara inbreng saham milik Negara RI di (i) Pegadaian, dan (ii) PNM, sebagai setoran modal Negara RI berdasarkan rencana PMHMETD I Perseroan.

Keberhasilan pengambilalihan ini atau, tergantung keadaannya, penggabungan bisnis, sebagian akan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mewujudkan peluang pertumbuhan yang diantisipasi dan sinergi dari integrasi bisnis dari entitas-entitas ini dengan Perseroan. Proses alignment dan integrasi mungkin memerlukan waktu, biaya, dan usaha yang besar. Jika perhatian manajemen Perseroan dialihkan atau ada kesulitan yang terkait dengan mengintegrasikan bisnis ini atau Perseroan dikenakan biaya lebih tinggi dari biaya yang diperhitungkan sehubungan dengan, akuisisi atau investasi Perseroan, hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh. Setiap kegagalan untuk merealisasikan manfaat yang diantisipasi tepat waktu, atau gagal sama sekali, dapat berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

g. Risiko Reputasi

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan.

Dampak risiko reputasi terhadap kinerja Perseroan diantaranya pengaruh reputasi dari pemegang saham Perseroan dan perusahaan terkait (Perusahaan Anak), pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Perseroan, frekuensi, materialitas dan *eksposure* pemberitaan negatif terhadap Perseroan dan dampak terhadap frekuensi dan materialitas terhadap nasabah.

Pembobolan keamanan yang signifikan dalam sistem komputer dan infrastruktur jaringan milik Perseroan atau pihak ketiga, penipuan, kegagalan sistem, dan kejadian negative lainnya dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan.

Penjahat dunia maya, peretas, orang dalam, dan agresor yang disponsori dari negari tertentu termasuk di antara mereka yang mungkin menargetkan sistem komputer di lembaga keuangan. Sistem komputer dan infrastruktur jaringan Perseroan mungkin rentan terhadap pelanggaran meskipun Perseroan menggunakan sistem keamanan, *firewall*, dan enkripsi kata sandi yang dirancang untuk meminimalkan risiko pelanggaran keamanan.

Sebagai contoh, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, BRI Life, mengumumkan pada 27 Juli 2021 bahwa mereka sedang menyelidiki klaim bahwa *detail* pribadi lebih dari dua juta pelanggannya telah diiklankan untuk dijual oleh peretas tak dikenal. Dilaporkan juga ditemukan barang bukti yang menunjukkan beberapa komputer milik pegawai Perseroan dan BRI Life telah disusupi. Investigasi dilakukan oleh konsultan independen dan berdasarkan temuan awal investigasi, BRI Life mengumumkan pada 28 Juli 2021 bahwa insiden keamanan siber terjadi di salah satu aplikasi *web-facing* BRI Life Syariah, yang merupakan *server* yang berdiri sendiri yang terpisah dari *server* konvensional BRI Life sehingga tidak diperlukan tindakan lateral, dan insiden dapat diisolasi. Jumlah nasabah syariah yang terkena dampak tidak lebih dari 25.000 nasabah. Data pemegang polis yang relevan tidak dapat dikompromikan dan BRI Life secara proaktif menginformasikan kepada pemegang polis tentang kejadian ini dan menyediakan banyak saluran bagi mereka untuk mencari informasi lebih lanjut. Baik Perseroan maupun BRI Life tidak pernah menerima pemberitahuan tentang proses apapun dari nasabahnya atau mengalami kehilangan nasabah atau dampak negatif lainnya sebagai akibat dari insiden keamanan siber di atas. BRI Life juga proaktif berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal Polri, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Keberhasilan bisnis Perseroan akan bergantung, sebagian, pada kemampuan Perseroan untuk menanggapi kemajuan teknologi baru dan standar serta praktik industri perbankan yang sedang berkembang secara hemat biaya dan tepat waktu. Pengembangan dan penerapan teknologi tersebut memiliki risiko teknis dan bisnis yang signifikan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil menerapkan teknologi baru atau menyesuaikan proses sistem transaksi Perseroan dengan kebutuhan pelanggan atau standar industri yang sedang berkembang.

Perseroan dihadapkan pada kemungkinan tindakan penipuan oleh karyawan Perseroan dan pihak ketiga.

Publisitas yang timbul dari pengungkapan penipuan di bank-bank lain di Asia telah mempengaruhi reputasi, kepercayaan nasabah dan harga saham bank. Perseroan mengalami beberapa penipuan operasional oleh karyawan Perseroan dan pihak ketiga yang terkait dengan e-channel dan e-banking, yang membuat Perseroan secara sukarela memberikan penggantian kepada para korban penipuan tersebut sebesar kurang lebih 0,37% dari jumlah beban operasional Perseroan per tanggal 31 Maret 2021. Meskipun jumlah tersebut tidak signifikan, langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan keamanan secara umum, termasuk melalui peningkatan pengawasan di fasilitas-fasilitas e-channel dan e-banking Perseroan, kejadian seperti itu dapat berdampak buruk terhadap reputasi Perseroan dan kepercayaan nasabah Perseroan terhadap langkah-langkah keamanan Perseroan. Akibatnya, aktivitas penipuan dapat berdampak terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Jika Perseroan kehilangan jaringan sumber daya manusia tertentu atau jika Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan personel yang memenuhi syarat, maka bisnis dan operasi Perseroan mungkin terganggu.

Bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personel yang berkualifikasi tinggi, termasuk para petugas pinjaman untuk jaringan Perseroan yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Perseroan bersaing untuk mendapatkan para personel tersebut dengan bank dan institusi lain, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam merekrut atau mempertahankan personel yang memenuhi syarat tersebut. Secara khusus, Perseroan bergantung pada manajemen senior Perseroan untuk keahlian mereka di industri perbankan. Hengkangnya manajemen senior atau ketidakmampuan untuk mempekerjakan atau mempertahankan manajer dapat berdampak terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan Perseroan apabila tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

Dampak risiko kepatuhan terhadap kinerja Perseroan diantaranya frekuensi pelanggaran atau *track record* kepatuhan dan sanksi yang diberikan baik denda maupun sanksi lainnya.

Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, Perseroan perlu meningkatkan modal tambahan, dan kemampuan Perseroan untuk melakukannya dapat terbatas.

Peraturan OJK mewajibkan total CAR minimal sebesar sekurang-kurangnya (i) 8,0% dari aset tertimbang menurut risiko (yang dikenal sebagai "Aset Tertimbang Menurut Risiko" atau "ATMR") untuk bank dengan profil risiko 1, (ii) 9,0 sampai dengan kurang dari 10,0% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko 2, (iii) 10,0 sampai dengan kurang dari 11,0% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko 3 dan (iv) sekurang-kurangnya 11,0 sampai dengan 14,0% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko 4 atau 5. Berdasarkan peraturan OJK, profil risiko yang diberikan kepada bank-bank tertentu bergantung pada penilaian risiko bawaan dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasionalnya, dengan penilaian yang dilakukan oleh setiap bank melalui mekanisme Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* ("ICAAP"), terlepas dari proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh OJK. Saat ini Perseroan termasuk dalam profil risiko 2.

Pada tanggal 31 Maret 2021, total CAR Tier 1 dan CAR Perseroan, secara mandiri, masing-masing adalah 18,39% dan 19,40%, dengan total persyaratan CAR minimum sebesar 6,0% mengacu kepada POJK No.11/POJK.03/2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum serta amendemen di POJK No.48/POJK.03/2020. Meskipun saat ini Perseroan telah memenuhi persyaratan kecukupan modal dari OJK, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan terus dapat memenuhi persyaratan tersebut. Jika CAR Perseroan turun di bawah 8,0%, berdasarkan peraturan OJK, maka Perseroan akan ditempatkan di bawah “pengawasan khusus” oleh OJK dan dapat, antara lain, dilarang melakukan pembayaran bunga atau pokok sehubungan dengan obligasi subordinasi yang beredar. Selanjutnya, Perseroan berharap standar kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK, serta pertumbuhan aset, akan meningkatkan jumlah regulasi modal yang dibutuhkan oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan. OJK juga dapat meningkatkan persyaratan CAR minimum di masa mendatang agar persyaratan CAR minimum Indonesia sejalan dengan standar internasional.

Tabel berikut menyajikan ringkasan permodalan minimum (*regulatory capital*) Perseroan per tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 31 Maret 2021.

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
	Rp juta	Rp juta	Rp juta	
Modal Tier I	167.633.367	174.297.803	187.012.209	
Modal Pelengkap	9.195.150	9.039.734	8.974.441	
Total permodalan minimum	176.828.517	183.337.537	195.986.650	

Perseroan telah menyelesaikan penerapan *Capital Accord* dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Bank for International Settlements* di Basel, Swiss (“**Basel II**”), sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, untuk memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum yang ditetapkan oleh OJK. Perseroan sedang dalam proses membawa praktik manajemen risiko Perseroan sesuai dengan *Capital Accord* dari *Basel Committee on Banking Supervision* yang disepakati pada tahun 2010-2011 (“**Basel III**”). Basel III yang diterapkan secara bertahap di Indonesia dan akan berlaku penuh mulai Januari 2022, berbeda dengan Basel II dalam beberapa hal, yang meliputi peningkatan persyaratan CAR minimum secara keseluruhan, perubahan komposisi modal regulasi, pengenalan *buffer* konservasi modal dan *buffer countercyclical* dan penguatan persyaratan manajemen likuiditas. Implementasi Basel III secara penuh akan meningkatkan kebutuhan permodalan Perseroan agar sesuai dengan tingkat penyerapan kerugian tambahan yang Perseroan perlukan, termasuk dengan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *buffer* konservasi modal sebesar 2,5% dan biaya tambahan modal *Domestic Systemically Important Bank* (“**D-SIB**”) sebesar 2,5% (tingkat “**Bucket 4**”). Di bawah Basel III, bank diberi skor untuk mengukur kepentingan sistemik dan potensi kerugian sosial dalam hal terjadi gagal bayar, dan diberi skor bucket (1-5) berdasarkan skor itu. Bucket yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepentingan sistemik yang lebih tinggi, dan dengan demikian biaya tambahan modal D-SIB yang berlaku yang lebih tinggi. Sebagai bank Bucket 4, berlaku *buffer* konservasi modal sebesar 2,5% dan biaya tambahan modal D-SIB sebesar 2,5% bagi Perseroan. Namun, sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Terhadap Dampak Coronavirus Disease 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 (“**Peraturan OJK No. 11/2020**”) terkait “Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”, *buffer* konservasi modal sebesar 2,50% untuk bank Bucket 4 untuk sementara ditiadakan hingga 31 Maret 2022.

Kegagalan Perseroan untuk mematuhi persyaratan kecukupan modal minimum, berdasarkan peraturan saat ini atau di kemudian hari, akan berdampak secara materiil dan merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Jika ini terjadi, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa modal tambahan yang diperlukan akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima, atau tidak tersedia sama sekali.

Perseroan menghadapi risiko kepatuhan dari berbagai otoritas pengatur dan pengawas.

Pada 27 Oktober 2011, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (“**UU OJK**”). OJK mengambil alih pengawasan pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan multiguna dan lembaga keuangan lainnya sejak 31 Desember 2012 dan mengambil alih pengawasan bank, mulai 31 Desember 2013 dari Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**BAPEPAM-LK**”) dan Bank Indonesia sesuai dengan konteksnya.

Menurut UU OJK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia terkait dengan aspek-aspek tertentu, yaitu kelembagaan, kesehatan dan kehati-hatian bank-bank Indonesia. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank di Indonesia. Meskipun beberapa aspek perbankan telah berada di bawah arahan dan pengawasan OJK, Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan secara umum dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter dan mengatur sistem pembayaran. Adanya hak OJK untuk mengatur dan mengawasi aspek-aspek tertentu dalam industri perbankan tidak serta merta mengurangi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia terkait dengan aspek-aspek lain yang tidak diatur atau diawasi oleh OJK.

Selain peraturan OJK, Perseroan juga tunduk pada hukum perbankan, hukum perseroan dan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia, persyaratan bahwa Perseroan diberikan lisensi untuk melakukan operasi perbankan dan jasa keuangan Perseroan, hukum dan peraturan perbankan dari yurisdiksi lain di mana Perseroan memiliki cabang atau anak perusahaan dan peraturan BEI.

Jika Perseroan tidak dapat mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku untuknya, termasuk yurisdiksi asing, Perseroan dapat dikenakan hukuman, denda, kehilangan izin peraturan yang Perseroan perlukan, dan kerugian terhadap reputasi bisnis Perseroan, yang dapat memiliki dampak merugikan yang bersifat materiil terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, perubahan peraturan dan regulasi serta tindakan Bank Indonesia atau OJK di masa mendatang juga dapat berdampak signifikan terhadap industri Perseroan.

Kerangka peraturan dan hukum yang mengatur Perseroan berbeda dalam hal-hal tertentu yang bersifat materiil dari kerangka peraturan dan hukum yang berlaku di Amerika Serikat dan negara-negara lain dan dapat terus berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan pasar komersial dan keuangan Indonesia. Setiap perubahan terhadap undang-undang, peraturan atau kebijakan peraturan, termasuk perubahan dalam interpretasi atau penerapan undang-undang, peraturan dan kebijakan peraturan tersebut, dapat membatasi kegiatan bisnis Perseroan, berdampak buruk terhadap produk dan layanan yang Perseroan tawarkan, nilai aset Perseroan atau bisnis Perseroan secara umum, dan menyebabkan Perseroan mengeluarkan biaya tinggi dan mencurahkan banyak waktu untuk memastikan kepatuhan. Perubahan tersebut antara lain dapat mencakup perubahan sehubungan dengan persyaratan modal, persyaratan solvabilitas, rasio *leverage* dan likuiditas, manajemen risiko, arus modal lintas batas, kewajiban pinjaman lokal, kompensasi manajemen, perlindungan konsumen dan manajemen risiko. Perubahan terhadap undang-undang, peraturan dan kebijakan peraturan, atau interpretasi atau penerapan daripadanya akan mengarah pada pengawasan dan pemeriksaan regulasi yang lebih ketat dan peningkatan biaya kepatuhan.

Tren global dalam peraturan perbankan dapat mempengaruhi bisnis Perseroan.

Seperti bank regional besar lainnya, Perseroan tunduk pada regulasi ekstensif oleh regulator dan bursa di masing-masing pasar utama tempat Perseroan menjalankan bisnis atau di mana rekanan Perseroan berada. Undang-undang dan peraturan ini secara signifikan mempengaruhi cara Perseroan menjalankan bisnis dan dapat membatasi ruang lingkup bisnis Perseroan yang ada dan membatasi kemampuan Perseroan untuk memperluas penawaran produk dan mengejar investasi tertentu.

Menanggapi krisis keuangan, pembuat undang-undang dan regulator di seluruh dunia telah mengadopsi, terus mengusulkan dan sedang dalam proses mengadopsi, menyelesaikan dan menerapkan berbagai reformasi pasar keuangan yang menghasilkan perubahan besar pada cara global kita operasi diatur dan dilakukan.

Secara khusus, sebagai akibat dari reformasi ini, Perseroan sedang, atau akan, tunduk pada (antara lain) regulasi dan pengawasan yang direvisi dan diperluas secara signifikan, pengawasan yang lebih intensif terhadap bisnis Perseroan dan setiap rencana untuk ekspansi bisnis tersebut, pembatasan kegiatan baru, rezim risiko sistemik yang memberlakukan persyaratan modal dan likuiditas yang tinggi dan standar kehati-hatian yang ditingkatkan lainnya, rezim resolusi baru dan persyaratan perencanaan resolusi, pembatasan baru pada kegiatan dan investasi yang diberlakukan oleh Bagian 619 dari Undang-Undang Dodd-Frank yang diadopsi pada tahun 2017 (ketentuan hukum tersebut bersama-sama dengan peraturan pelaksanaan tersebut, "Volcker Rule"), dan peraturan turunan baru yang komprehensif. Sementara bagian-bagian tertentu dari reformasi ini efektif, yang lain masih tunduk pada pembuatan peraturan akhir atau periode transisi. Banyak dari perubahan yang diperlukan oleh reformasi ini dapat secara material mempengaruhi profitabilitas bisnis Perseroan dan nilai aset yang dimiliki, membuat Perseroan menanggung biaya tambahan, memerlukan perubahan pada praktik bisnis atau memaksanya untuk menghentikan bisnis, berdampak buruk pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dan membeli kembali sahamnya sendiri, atau mengharuskannya untuk menambah modal, termasuk dengan cara yang dapat merugikan pemegang saham atau kreditur Perseroan. Selain itu, persyaratan peraturan yang diusulkan oleh pembuat kebijakan dan regulator luar negeri mungkin tidak konsisten atau bertentangan dengan peraturan yang Perseroan patuhi di Amerika Serikat dan, jika diadopsi, dapat berdampak buruk bagi Perseroan. Meskipun masih ada ketidakpastian tentang dampak penuh dari perubahan ini, Perseroan sedang dan akan terus tunduk pada kerangka peraturan yang lebih kompleks, dan akan dikenakan biaya untuk mematuhi persyaratan baru serta untuk memantau kepatuhan di masa mendatang. Misalnya, ketentuan Volcker Rule dari Dodd-Frank Act akan berdampak pada Perseroan, termasuk berpotensi membatasi berbagai aspek bisnis Perseroan.

i. Risiko Transaksi Intra Group

Merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dampak risiko transaksi Intra Group terhadap kinerja Perseroan diantaranya komposisi transaksi *intragroup* dalam konglomerasi keuangan dan dokumentasi dan kewajiban transaksi.

Kewajiban pembayaran Perseroan di Indonesia yang didenominasi dalam mata uang asing dapat dikenakan sanksi.

Pada tanggal 28 Juni 2011, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Mata Uang, yang segera berlaku. Undang-undang Mata Uang tersebut mensyaratkan peraturan pelaksanaan harus diterbitkan dalam waktu satu tahun sejak tanggal diundangkan. Pasal 21(1) UU Mata Uang mewajibkan penggunaan Rupiah (sebagai mata uang lokal) di wilayah Indonesia untuk transaksi-transaksi berikut:

- (a) transaksi pembayaran;
- (b) pelunasan kewajiban secara tunai; dan
- (c) transaksi keuangan lainnya (misalnya, pengiriman uang dari nasabah ke bank).

Namun, Pasal 21(2) UU Mata Uang memberikan pengecualian untuk:

- (a) transaksi-transaksi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN;
- (b) penerimaan atau pemberian hibah luar negeri;
- (c) transaksi komersial internasional;
- (d) simpanan bank dalam mata uang asing; dan
- (e) transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 23(2) UU Mata Uang memuat tambahan pengecualian dari kewajiban penggunaan Rupiah apabila pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam mata uang asing telah disepakati secara tertulis.

Pasal 23 UU Mata Uang melarang setiap pihak untuk menolak menerima Rupiah sebagai pembayaran atau untuk memenuhi kewajibannya yang harus dipenuhi dalam Rupiah, dan untuk transaksi-transaksi keuangan lainnya di Indonesia kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah yang dibayarkan. Pelanggaran terhadap UU Mata Uang dapat mengakibatkan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp200 juta, dan apabila pelanggaran dilakukan oleh perusahaan, maka sanksi berupa denda ditambah sepertiga. Selain itu, sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha juga dapat dikenakan kepada perusahaan.

Perseroan memiliki kewajiban pembayaran dalam mata uang asing berdasarkan perjanjian tertentu. Jika diwajibkan oleh Undang-Undang Mata Uang untuk melakukan pembayaran tersebut dalam Rupiah, Perseroan mungkin melanggar kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan kontrak ini. Terdapat ketidakpastian mengenai pemberlakuan dan dampaknya, termasuk penerapan Pasal 21 dan 23 karena Pasal 21 melarang penyelesaian dalam mata uang selain Rupiah, sedangkan Pasal 23 memberikan pengecualian yang sangat luas terhadap larangan penolakan Rupiah. Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, pada Desember 2011, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menerbitkan Interpretasi Kemenkeu, yaitu booklet pedoman tentang bagaimana aturan berlaku untuk transaksi tunai (uang logam dan uang kertas) tetapi tidak termasuk pembayaran yang melibatkan transaksi uang non-fisik (cek dan *letter of credit*) dan pembayaran elektronik ("**Interpretasi Kemenkeu**"). Interpretasi Kemenkeu juga menjelaskan bahwa kewajiban untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran atas transaksi, sebagai pelunasan suatu kewajiban atau untuk setiap transaksi keuangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang dapat dihindari dengan pengaturan kontraktual yang sudah ada atau sudah ditandatangani baik sebelum atau sesudah berlakunya Hukum Mata Uang. Namun, perlu dicatat bahwa Interpretasi Kemenkeu bukanlah undang-undang dan dapat ditentang. Selanjutnya, fungsi pengawasan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. UU Mata Uang tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena inkonsistensi dalam penerapan kewajiban penggunaan Rupiah, tidak ada jaminan bahwa Undang-Undang Mata Uang tidak akan berdampak terhadap kewajiban kontraktual Perseroan, yang didenominasi dalam dolar AS di Indonesia.

Perseroan bergantung, sampai batas tertentu, pada transaksi-transaksi pihak berelasi.

Perseroan melakukan sejumlah transaksi pihak berelasi dari waktu ke waktu, termasuk transaksi pinjaman maupun transaksi pembiayaan. Pihak-pihak ini meliputi pihak-pihak yang berada di bawah kendali yang sama dengan Perseroan berdasarkan kepemilikan Pemerintah. Untuk rincian lebih lanjut mengenai transaksi-transaksi ini, lihat catatan 45 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang dimasukkan dalam dokumen ini. Perseroan tidak mengendalikannya pihak-pihak berelasi ini dan setiap cedera janji yang dilakukan oleh pihak-pihak ini berdasarkan perjanjian mereka dengan Perseroan dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian ini. Setiap tidak dilaksanakannya oleh pihak-pihak berelasi atau kegagalan untuk memperbaharui perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak berelasi ini dapat berdampak terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

j. Risiko Asuransi

Merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Dampak risiko asuransi terhadap kinerja Perseroan diantaranya risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha dan bauran produk risiko dan jenis manfaat.

3. Risiko Umum

Industri bank di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif.

Selain dengan bank lainnya, Perseroan juga harus menghadapi kompetisi dengan perusahaan jasa finansial lainnya, seperti misalnya perusahaan pembiayaan (*multifinance*), perusahaan sekuritas yang menawarkan reksadana dan instrumen pasar modal, seperti obligasi dan saham yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum.

a. Risiko Kondisi Ekonomi Makro

Risiko ekonomi makro merupakan risiko terkait dengan perubahan faktor-faktor makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat inflasi dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan. Jika perubahan pada risiko ekonomi makro tidak dapat dikelola oleh perusahaan maka akan berdampak pada kinerja Perseroan seperti perubahan kondisi likuiditas Perseroan, peningkatan NPL serta dampak finansial lainnya.

Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.

Perubahan ekonomi Indonesia, regional dan global dapat mempengaruhi kinerja. Dua peristiwa penting di masa lalu yang mempengaruhi perekonomian Indonesia adalah krisis keuangan Asia tahun 1997 dan krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008. Krisis keuangan Asia tahun 1997 di Indonesia ditandai antara lain oleh depresiasi mata uang, penurunan yang signifikan dalam produk domestik bruto riil, suku bunga tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa, yang menyebabkan fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dan lebih lambat antara sesudahnya. Walaupun krisis ekonomi global tahun 2008 yang bersumber dari krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat tidak berdampak separah tahun 1997 terhadap perekonomian Indonesia, namun tetap memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Perkembangan keuangan yang merugikan yang diakibatkan antara lain ditandai dengan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan penurunan permintaan terhadap komoditas-komoditas tertentu.

Lebih lanjut, sementara ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, pasar keuangan global juga mengalami volatilitas sebagai akibat dari ekspektasi terkait dengan kebijakan moneter dan suku bunga Amerika Serikat, kekhawatiran atas krisis utang dan program dukungan keuangan di Zona Euro, dan kekhawatiran atas kesehatan ekonomi China, dan proteksionisme ekonomi. Perkembangan-perkembangan ini berdampak buruk baik bagi ekonomi maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN") lainnya. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan pasar berkembang secara global, telah terkena dampak negatif dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar negara maju.

Di Asia dan pasar negara berkembang lainnya, beberapa negara memperkirakan peningkatan tekanan inflasi sebagai akibat dari kebijakan moneter liberal atau arus masuk dana asing yang berlebihan, atau keduanya. Kondisi ekonomi yang buruk dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas bisnis, berkurangnya pendapatan yang tersedia bagi konsumen untuk dibelanjakan dan berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan akan layanan komunikasi, termasuk layanan Perseroan, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan terulang lagi ketidakstabilan ekonomi di masa depan, atau jika hal itu terjadi, tidak akan berdampak pada kinerja bisnis Perseroan.

Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan mata uang asingnya rendah, Rupiah terus bergejolak dan memiliki likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita akibat tingginya tingkat kredit bermasalah. Meskipun Pemerintah telah mengambil banyak langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek-aspek lain dari perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini tidak akan memburuk, yang dapat berdampak

buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Secara khusus, perekonomian Indonesia terus terganggu oleh pandemi COVID-19 yang sedang melanda; mengingat implikasi pandemi COVID-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk menilai sifat dan tingkat dampak penuh dari wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menyebabkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak secara materiil dan secara merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan kualitas portofolio pinjaman Perseroan atau tidak dapat mengelola pertumbuhan tersebut secara efektif, maka kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan akan terdampak secara negatif.

Menyalurkan pinjaman adalah bagian penting dari bisnis Perseroan sebagai perantara keuangan, dan hasil operasi Perseroan terkena dampak negatif dari provisi dan/atau kerugian terkait kredit bermasalah. Keberlanjutan pertumbuhan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola risiko kredit secara efektif dan menjaga kualitas portofolio pinjaman Perseroan. Meskipun Perseroan secara aktif mengelola dan memantau portofolio pinjaman Perseroan dan terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem tersebut bebas dari kekurangan apa pun atau bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem tersebut akan secara memadai mengurangi risiko kredit Perseroan karena Perseroan berusaha untuk melanjutkan pertumbuhan Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Perseroan akan mengalokasikan cukup provisi Perseroan untuk kredit bermasalah Perseroan. Kegagalan kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan peningkatan terhadap tingkat kredit bermasalah dan berdampak buruk pada kualitas portofolio pinjaman Perseroan, yang juga dapat semakin memburuk karena berbagai alasan lain, termasuk perlambatan atau pembalikan tingkat pertumbuhan di Indonesia dan faktor-faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan. Jika penurunan tersebut terjadi, maka hal itu dapat berdampak secara materiil terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat secara merugikan mempengaruhi pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai operasi dan pertumbuhan.

Saat ini, utang jangka panjang negara Indonesia dalam mata uang asing diberi peringkat "Baa2" oleh Moody's (yang dinyatakan pada bulan September 2020 meningkat dari "Baa3" pada 13 April 2018), "BBB" oleh Fitch Ratings Ltd. (yang dinyatakan pada 22 Maret 2021) dan "BBB-" oleh S&P (yang dinyatakan pada 22 April 2021). Peringkat ini mencerminkan penilaian atas kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan peringkat utang negara yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional ini kepada Indonesia setelah krisis keuangan Asia tahun 1997.

Meskipun tren terbaru dalam peringkat utang negara Indonesia telah positif, tidak ada jaminan bahwa Moody's, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat kredit internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia. Penurunan peringkat tersebut dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia, pada kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan dan pada suku bunga dan persyaratan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perseroan terkena risiko suku bunga dan mungkin tidak dapat mempertahankan margin yang menguntungkan.

Perseroan menyadari bahwa pendapatan dari margin antara bunga yang diperoleh atas aset Perseroan dan bunga yang dibayarkan atas kewajiban Perseroan. Karena beberapa aset penghasil bunga dan liabilitas berbunga Perseroan dinilai ulang pada waktu yang berbeda, maka Perseroan rentan terhadap fluktuasi suku bunga pasar. Dalam lingkungan suku bunga yang menurun, ini akan cenderung meningkatkan spread suku bunga Perseroan. Namun, dalam lingkungan tingkat suku bunga yang meningkat, meskipun Perseroan akan berusaha untuk menentukan harga kembali aset Perseroan sesering atau lebih sering daripada kewajiban Perseroan, Perseroan terbatas baik dalam kemampuan Perseroan untuk melakukannya dan terbatas dalam kemampuan Perseroan untuk mengurangi risiko ini karena obligasi Pemerintah dan utang negara lainnya yang Perseroan miliki, yang terdiri dari 18,13% dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021, baik yang memiliki suku bunga tetap maupun suku bunga variabel yang hanya berubah harga setiap tiga bulan. Selama obligasi Pemerintah merupakan bagian yang besar dari aset Perseroan, Perseroan tidak akan dapat sepenuhnya mengurangi risiko ini.

Bank Indonesia benchmark 7-days (reverse) repo rate telah dinaikkan enam kali sejak 2020, yang menyebabkan total peningkatan sebesar 150 basis poin menjadi 3,50% dari 5,00% pada tahun 2021. Tidak ada jaminan bahwa suku bunga tidak akan berubah di kemudian hari.

Tingkat inflasi yang tinggi dan tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Tingkat suku bunga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Secara historis, Indonesia pernah mengalami periode inflasi yang tinggi. Tingkat inflasi resmi yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik, yang juga dikenal sebagai BPS-Statistik Indonesia, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020 dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021 masing-masing adalah 3,13%, 2,72%, 1,68% dan 1,37%. Inflasi dapat secara signifikan meningkatkan biaya Perseroan, termasuk biaya dana, kompensasi karyawan, dan biaya *overhead* lainnya. Selain itu, sampai Perseroan melakukan penyesuaian yang tepat, inflasi menyebabkan nilai riil pendapatan bunga kotor Perseroan menurun, yang akan berdampak negatif secara materiil terhadap margin bunga bersih, struktur biaya, arus kas, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan. Selain itu, tingkat inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, iklim usaha dan kepercayaan konsumen. Akibatnya, tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia dapat memberikan dampak terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

c. Risiko Nilai Tukar

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, kecurangan hati-hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing akan berdampak bagi Perseroan.

Fluktuasi pada nilai Rupiah dapat berdampak secara materiil dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Secara historis, Rupiah telah mengalami depresiasi dan volatilitas yang signifikan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Depresiasi atau volatilitas Rupiah atau perubahan dalam kebijakan nilai tukar Pemerintah dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang jauh lebih tinggi, likuiditas, kelangkaan, gagal bayar utang pemerintah dan korporasi, kontrol modal atau nilai tukar dan pemotongan bantuan keuangan lebih lanjut oleh lembaga multilateral. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman dan kenaikan harga impor. Konsekuensi-konsekuensi ini dapat memiliki dampak merugikan yang bersifat materiil terhadap perekonomian Indonesia dan kondisi keuangan serta hasil usaha Perseroan dan kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban dalam mata uang asing.

Rupiah pada umumnya dapat dipertukarkan dan dipindahtangankan secara bebas. Namun, dalam upaya mempertahankan stabilitas Rupiah dan mencegah warga negara asing menggunakan Rupiah untuk tujuan spekulasi, Bank Indonesia telah mengimplementasi peraturan-peraturan tentang pembelian valuta asing membatasi pergerakan Rupiah dari bank-bank di dalam Indonesia kepada (a) bank-bank luar negeri, (b) cabang-cabang atau kantor-kantor luar negeri dari bank-bank Indonesia atau (c) setiap penanaman modal dalam Rupiah oleh pihak asing atau warga negara Indonesia yang berkedudukan atau menetap secara permanen di luar Indonesia, tanpa alasan perdagangan atau investasi yang mendasarinya, sehingga membatasi perdagangan luar negeri ke sumber likuiditas yang telah ada. Meskipun Bank Indonesia memberlakukan peraturan pada tahun 2016 yang memungkinkan bank-bank di Indonesia untuk mentransfer Rupiah kepada non-penduduk sepanjang kriteria tertentu terpenuhi, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valuta asing dalam melanjutkan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan devisanya untuk membeli Rupiah dari waktu ke waktu. Selain itu, Bank Indonesia berwenang meminta informasi dan data mengenai kegiatan-kegiatan devisa dari semua orang dan badan hukum yang berkedudukan atau yang berencana bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya satu tahun. Peraturan Bank Indonesia juga mewajibkan bank-bank dan perusahaan-perusahaan penduduk untuk melaporkan semua data kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan mata uang asing mereka. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia saat ini tidak akan diubah, bahwa tambahan depresiasi Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar AS, tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai Rupiah, atau bahwa salah satu dari tindakan ini, jika dilakukan, akan berhasil. Perseroan tetap rentan terhadap risiko-risiko atas subjek pengenaan atau modifikasi pengendalian nilai tukar di masa depan oleh Bank Indonesia. Risiko-risiko tersebut biasanya tergantung pada berbagai peristiwa ekonomi dan politik di mana Perseroan tidak memiliki kendali apapun.

Selain itu, Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing. Per tanggal 31 Maret 2021, Perseroan (secara mandiri) memiliki simpanan dalam mata uang dolar AS dan valuta asing lainnya (termasuk simpanan dari bank-bank lain) sebesar Rp166.517.534 juta dan pinjaman dana sebesar Rp33.239.987 juta. Rasio posisi devisa bersih mata uang asing Perseroan

(yang dihitung secara mandiri sebagai rasio jumlah nilai absolut dari (i) selisih antara aset dalam mata uang asing dan kewajiban pada laporan posisi keuangan Perseroan, dan (ii) selisih antara aset dan kewajiban dalam valuta asing yang merupakan komitmen dan kontinjensi, dibagi dengan jumlah modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap) adalah 0,80% per tanggal 31 Maret 2021, yang tidak melebihi batas 20,0% yang ditetapkan oleh ketentuan Bank Indonesia. Jika Rupiah terapresiasi secara signifikan setiap saat ketika Perseroan memiliki posisi devisa bersih yang signifikan, maka apresiasi tersebut dapat menyebabkan Perseroan menderita kerugian, mengurangi CAR Perseroan dan mengharuskan Perseroan untuk mencari tambahan modal atau melanggar peraturan kecukupan modal OJK. Tidak ada jaminan bahwa modal tambahan yang diperlukan akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima atau tidak tersedia sama sekali.

Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan aktivitas yang melanggar hukum atau tidak patut lainnya secara penuh atau secara tepat waktu, yang dapat membuat Perseroan terkena kewajiban tambahan dan membahayakan bisnis dan reputasi Perseroan.

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang, anti terorisme yang berlaku dan peraturan lainnya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini mengharuskan Perseroan, antara lain, untuk mengadopsi dan menegakan keberlakuan kebijakan dan prosedur anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme dan melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan dan besar kepada otoritas regulator yang berlaku di yurisdiksi yang berbeda. Perseroan mungkin dikenakan biaya kepatuhan dan pemantauan yang substansial jika aturan dan peraturan lebih lanjut diundangkan, atau jika peraturan yang telah ada ditegakkan keberlakuannya secara lebih ketat. Di sisi lain, jika persyaratan saat ini sudah tidak terlalu ketat, deponan Perseroan dan pihak lawan dapat kehilangan kepercayaan dalam sistem perbankan Indonesia yang dapat mempengaruhi secara merugikan bisnis dan basis simpanan Perseroan. Meskipun Perseroan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan jaringan perbankan Perseroan untuk aktivitas pencucian uang atau oleh teroris, kebijakan dan prosedur tersebut mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan risiko yang terlibat. Jika jaringan perbankan Perseroan digunakan oleh pihak lain yang mungkin terlibat dalam aktivitas pencucian uang dan melanggar hukum atau aktivitas yang tidak pantas lainnya, hal itu dapat membuat Perseroan terkena risiko peraturan, hukum, dan reputasi.

d. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko kebijakan pemerintah adalah risiko yang disebabkan karena adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Risiko ini menyangkut perubahan mengenai aturan perbankan secara umum ataupun terkait perseroan terbatas secara keseluruhan. Adapun risiko ini tidak bisa dikontrol namun dapat dimitigasi dengan cara mengidentifikasi perubahan kebijakan pemerintah, mengadopsi perubahan tersebut ke kebijakan internal dan memonitoring hasil dari perubahan kebijakan tersebut untuk dijadikan acuan perbaikan di masa yang akan datang.

Pemerintah tetap dan kemungkinan akan tetap menjadi pemegang saham pengendali Perseroan.

Pemerintah memiliki 56,75% kepemilikan saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Juli 2021 dan kemungkinan akan terus memegang kendali atas Perseroan dalam jangka pendek dan menengah.

Pemerintah secara historis telah mempengaruhi, dan hingga batas tertentu kemungkinan besar akan terus mempengaruhi, strategi dan operasi Perseroan. Pemerintah juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, melalui pencalonan anggota dewan atau lainnya, entitas-entitas terkait Pemerintah lainnya, yang mana beberapa di antaranya adalah pesaing Perseroan, dan untuk mengarahkan peluang kepada para pesaing Perseroan atau mendukung kepentingan mereka di atas kepentingan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan menjalankan kendali dan pengaruhnya untuk keuntungan komersial Perseroan atau pemegang saham minoritas Perseroan. Misalnya, Perseroan dapat ditekan untuk melakukan transaksi atau memberikan pinjaman selain untuk alasan komersial semata, termasuk memberikan pinjaman yang dianggap melayani kepentingan nasional. Lebih lanjut, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan menjadi independen dari pemegang saham Pemerintah Perseroan, atau bahkan jika Perseroan menjadi independen, bahwa Perseroan akan dapat menjalankan independensi tersebut secara efektif dalam membuat keputusan mengenai bisnis dan prospek Perseroan. Jika Perseroan diharuskan untuk bertindak demi kepentingan Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda dari kepentingan Perseroan, kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif dan memperluas bisnis Perseroan dapat menjadi terbatas, dan pada gilirannya berdampak buruk pada kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasi Perseroan.

Pemerintah bisa menurunkan tingkat suku bunga dan subsidi untuk pinjaman KUR atau perusahaan asuransi yang dimiliki Pemerintah gagal untuk menutupi asuransi pinjaman KUR

Perseroan menawarkan pinjaman bersubsidi pemerintah, yang dikenal sebagai KUR, yang didukung oleh penjaminan asuransi pinjaman dari Pemerintah melalui Jamkrindo & Askkrindo, sebuah perusahaan asuransi milik negara. Perseroan membayar premi asuransi, dan penjaminan perusahaan asuransi KUR menanggung sampai dengan 70,0% dari jumlah pokok pinjaman. Per tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total kurang lebih 8 juta peminjam KUR dengan total pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp165,78 triliun (yang setara dengan 18,49% dari total pinjaman Perseroan yang belum di lunasi).

Jika Pemerintah menurunkan atau menghapus subsidi pinjaman KUR atau Jamkrindo dan Askrindo gagal menanggung asuransi pinjaman KUR, maka hal itu akan berdampak pada profitabilitas pinjaman tersebut dan pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Aktivisme dan undang-undang ketenagakerjaan, dan/atau kegagalan untuk mempertahankan hubungan kerja yang memuaskan, dapat berdampak buruk bagi Perseroan, nasabah Perseroan, dan perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan lemahnya kondisi ekonomi, di masa lalu telah menyebabkan, dan di masa depan mungkin akan menyebabkan, keresahan dan aktivisme buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (“UU Serikat Pekerja”). Undang-undang Serikat Pekerja mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang antara lain meningkatkan jumlah pesangon, jasa dan pembayaran kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan membutuhkan implementasi lebih lanjut peraturan-peraturan yang secara substansial dapat mempengaruhi peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa perusahaan dengan 50 karyawan atau lebih harus membentuk forum bipartit yang terdiri dari pengusaha dan karyawan, dan keikutsertaan dari lebih dari 50,0% karyawan perusahaan dalam merundingkan perjanjian kerja bersama dan menciptakan prosedur yang lebih permisif terhadap pelaksanaan pemogokan buruh. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak atas pembayaran, antara lain, cuti tahunan yang belum diklaim, biaya relokasi (jika ada), uang pesangon dan biaya-biaya lainnya. Menyusul pemberlakuan UU Ketenagakerjaan, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan beberapa ketentuan UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk ketentuan tertentu, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan hak pemberi kerja untuk memutuskan hubungan kerja bagi pekerja yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan tertentu dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), sebagaimana yang diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP No. 35”), memasukkan beberapa amandemen terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan berdasarkan alasan “efisiensi” karena kerugian, di mana UU Ketenagakerjaan sebelumnya mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan pemberi kerja karena kerugian yang dialami selama lebih dari dua tahun. Amandemen lain terhadap UU Ketenagakerjaan adalah bahwa hanya akan ada satu formula pembayaran pesangon yang akan berlaku untuk semua alasan pemutusan hubungan kerja, sedangkan sebelumnya, formula pembayaran pesangon biasa adalah tergantung pada alasan pemutusan hubungan kerja. Ada juga pengurangan total jumlah pesangon yang harus dibayar berdasarkan formula pembayaran pesangon yang baru untuk alasan tertentu untuk pemutusan hubungan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada, penolakan pemberi kerja untuk terus meneruskan memperkerjakan karena penggabungan atau pemisahan unit/divisi (*de merger*), cacat fisik karyawan karena kecelakaan kerja, dan karyawan mencapai usia pensiun. Selain dari formula pembayaran pesangon yang baru, seorang karyawan akan memenuhi syarat untuk pembayaran maksimal enam bulan berdasarkan Skema Tunjangan Pengangguran dari Pemerintah Indonesia (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Ada beberapa protes terhadap UU Cipta Kerja dan kerusuhan buruh dapat berlanjut karena peraturan pelaksanaan akan dikeluarkan. Baru-baru ini, sejumlah pekerja kontrak yang dipimpin oleh serikat pekerja melakukan demonstrasi menentang sistem kontrak kerja yang baru; di mana sebelum berlakunya PP No. 35 masa berlaku perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun, setelah berlakunya PP No. 35 masa berlaku perjanjian kerja waktu tertentu paling lama adalah lima tahun.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan atau nasabah Perseroan dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga sekuritas Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat berdampak secara materiil dan secara merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Setiap inflasi upah nasional atau regional akan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan biaya operasional Perseroan dan dengan demikian menurunkan margin keuntungan Perseroan. UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan taraf hidup yang layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus tentang cara menentukan besaran kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksi. Selama sepuluh tahun terakhir, upah minimum di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Misalnya, sesuai dengan peraturan daerah yang diundangkan di Jakarta, upah minimum meningkat dari Rp3,6 juta per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp3,9 juta pada

tahun 2019, menjadi Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020 dan menjadi Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021. Selain secara langsung meningkatkan upah untuk karyawan tingkat bawah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung memberikan tekanan ke atas pada upah karyawan tingkat yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, setiap kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya tenaga kerja Perseroan dan memiliki dampak terhadap arus kas, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

4. Risiko Terkait Investasi Saham

Tingkat fluktuasi harga di pasar modal Indonesia juga cenderung tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi apakah pasar perdagangan untuk saham Perseroan dapat berkembang atau apakah pasar tersebut akan likuid.

Kondisi di pasar modal Indonesia atau di tempat lain dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Perseroan

Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan Saham HMETD di BEI. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan mungkin lebih fluktuatif (*volatile*), dan juga memiliki standar pelaporan yang berbeda dari pasar di negara-negara maju. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih fluktuatif daripada di pasar lain. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk Saham Perseroan akan berkembang, dan jika pasar seperti itu berkembang, Perseroan tidak dapat memprediksi likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau bahwa harga perdagangan Saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Pelaksanaan. Dalam hal demikian terjadi sebelum tanggal terakhir penerimaan Pelaksanaan HMETD, pemegang saham yang melaksanakan HMETD-nya dalam PMHMETD I akan mengalami kerugian langsung sebagai akibatnya. Lebih lanjut, setelah pelaksanaan HMETD, pemegang saham tidak dapat menjual Saham Baru dengan harga yang sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan saham tersebut. Jika pasar perdagangan aktif tidak dikembangkan atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Sementara Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan pendahuluan dari BEI untuk mencatatkan Saham HMETD untuk ditawarkan di BEI dan sementara Saham Perseroan saat ini dicatatkan dan ditawarkan di BEI, kecuali atas 1% dari jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan di Bursa Efek sesuai PP No. 29/1999, namun pencatatan dan penawaran tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk Saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar berkembang, likuiditas pasar itu untuk Saham Perseroan. Meskipun saat ini Perseroan bermaksud bahwa Saham Perseroan akan tetap dicatatkan di BEI, tidak ada jaminan kelanjutan pencatatan Saham Perseroan.

Harga Pelaksanaan PMHMETD I ini ditentukan oleh Perseroan dan mungkin bukan merupakan indikasi harga di mana Saham HMETD akan diperdagangkan setelah selesainya PMHMETD. Pemegang saham mungkin tidak dapat menjual kembali Saham HMETD dengan harga yang menarik bagi pemegang saham.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan. Mengingat hal tersebut di atas, tidak ada jaminan bahwa pemegang Saham Perseroan akan dapat menjual saham tersebut di harga, dalam jumlah atau pada waktu di mana pemegang tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau sama sekali.

Sekalipun permohonan pencatatan Perseroan sehubungan dengan Saham HMETD disetujui, Saham HMETD tidak akan dicatatkan di BEI segera setelah berakhirnya jangka waktu penjatahan PMHMETD. Selama periode itu, para pembeli akan mengalami pergerakan nilai Saham Perseroan tanpa kemampuan untuk menjual Saham HMETD yang dibeli melalui BEI.

Kondisi pasar dan ekonomi dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara luas.

Pergerakan di pasar efek dalam negeri dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar valuta dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan Saham Perseroan. Saham Perseroan dan dividen, jika ada, akan ditawarkan dan diumumkan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi dalam nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lainnya akan mempengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham atas penjualan Saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen. Selain itu, aturan devisa dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah Indonesia ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pemotongan pajak Indonesia.

Harga Saham Perseroan setelah PMHMETD I dapat berfluktuasi secara luas, tergantung pada banyak faktor, termasuk antara lain:

- perbedaan antara hasil keuangan dan operasional yang aktual dari Perseroan dan yang diharapkan oleh pembeli dan analis;
- penambahan atau keberangkatan personel penting;
- keterlibatan dalam proses pengadilan;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aliansi strategis atau *Joint Ventures*;

- akuisisi oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi analis mengenai Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar secara umum di Indonesia;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas asing (khususnya Asia) dan perusahaan-perusahaan di pasar negara berkembang;
- kapitalisasi pasar tidak menjadi indikasi penilaian bisnis Perseroan;
- peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan di efek-efek tertentu, pembatasan pergerakan harga dan persyaratan margin;
- masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat berlanjut atau berulang, termasuk penutupan bursa, cidera janji dan pemogokan pialang, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI;
- kedalaman dan likuiditas pasar Saham termasuk likuiditas Saham relatif terhadap pasar lainnya pada saat PMHMETD I;
- aktivitas perdagangan "short squeeze" yang sebenarnya atau yang dimaksudkan;
- fluktuasi harga pasar saham; dan
- penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham HMETD.

Setelah PMHMETD I, Pemerintah akan memiliki minimal 56,75% dari Saham yang beredar. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki dan akan terus memiliki, kekuasaan untuk menjalankan pengaruh atas kebijakan dan urusan bisnis Perseroan.

Pemerintah mungkin memiliki kepentingan bisnis lain di luar operasi Perseroan dan dapat mengambil tindakan, yang mungkin atau tidak melibatkan Perseroan, yang lebih memilih atau menguntungkan Pemerintah atau perusahaan-perusahaan lain atas Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan, dan berharap untuk terus mengadakan, transaksi-transaksi dengan entitas-entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan/atau afiliasinya secara wajar dan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Meskipun demikian, apabila terdapat transaksi benturan kepentingan yang Perseroan lakukan di kemudian hari dengan pihak-pihak berelasi setelah PMHMETD I, yang mana atas transaksi tersebut harus disetujui sesuai dengan aturan OJK, Perseroan mengupayakan bahwa jumlah berapa pun yang Perseroan akan bayarkan dalam transaksi tersebut akan mencerminkan harga yang sebanding apabila transaksi tersebut dilakukan oleh pihak ketiga.

Terdapat kondisi dimana investor jika PMHMETD I diperlukan maka investor akan melanjutkan dan menyelesaikan transaksi meskipun terjadi perubahan material yang merugikan di kondisi moneter internasional atau nasional, keuangan, politik atau ekonomi atau peristiwa lain yang bersifat keadaan memaksa (*force majeure*) atau perubahan material yang merugikan dalam hal-hal yang termasuk dalam bisnis atau kondisi keuangan Perseroan.

Jika suatu perubahan material yang merugikan dalam kondisi moneter internasional atau nasional, keuangan, politik atau ekonomi atau peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) lainnya akan terjadi, atau perubahan material yang merugikan dalam hal-hal yang termasuk bisnis atau kondisi keuangan Perseroan akan timbul, setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan sebelum penyelesaian PMHMETD I dan pencatatan Saham HMETD, Perseroan dapat meminta izin kepada OJK untuk membatalkan PMHMETD I. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan meminta pembatalan tersebut atau OJK akan mengabulkan pembatalan tersebut, dan OJK dapat meminta pelaksanaan PMHMETD I tersebut dan diselesaikan sesuai dengan peraturan Indonesia. Dalam situasi ini, para investor yang telah dialokasikan Saham HMETD mungkin diharuskan untuk menyelesaikan akuisisi mereka atas Saham HMETD bahkan jika peristiwa-peristiwa tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual saham setelah PMHMETD I atau menyebabkan harga perdagangan saham setelah PMHMETD I berada pada harga yang jauh di bawah Harga Pelaksanaan.

Kegagalan untuk mematuhi pengungkapan dan pengendalian internal dan persyaratan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko lainnya dan praktik terkait, yang sesuai untuk perusahaan publik dapat membahayakan operasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pelaporan berkala Perseroan.

Perseroan adalah sebuah perusahaan publik yang tunduk pada persyaratan pelaporan BEI, bursa saham dimana Saham Perseroan akan dicatatkan, dan OJK. Aturan dan peraturan BEI dan OJK mengharuskan, antara lain, bahwa Perseroan mempertahankan pengendalian dan prosedur pengungkapan yang efektif dan pengendalian internal yang relevan atas pelaporan keuangan untuk memberikan informasi materi keuangan berkala dan materi lainnya kepada OJK, BEI, dan para investor Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat mematuhi persyaratan peraturan ini, atau jika Perseroan tidak dapat mempertahankan pengendalian internal yang tepat dan efektif, dan dengan cara lain menerapkan manajemen risiko lain yang relevan dan praktik terkait, Perseroan mungkin dikenakan biaya tambahan, kondisi bisnis dan keuangan serta hasil operasi Perseroan dapat dirugikan, dan Perseroan mungkin tercegas untuk memenuhi kewajiban pelaporan Perseroan. Perseroan di masa lalu telah mengidentifikasi area perbaikan untuk pengendalian sistem internal Perseroan dan proses

pengambilan tindakan kolektif, termasuk yang berkaitan dengan pencatatan transaksi yang manual, proses verifikasi dan pemantauan serta analisis kewajiban debitor. Namun, Perseroan tidak dapat menyakinkan investor bahwa sistem dimiliki Perseroan akan dapat mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola eksposur semua risiko tersebut. Pengungkapan yang tidak efektif dan pengendalian internal dan manajemen risiko serta praktik terkait dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor Perseroan kehilangan kepercayaan pada informasi keuangan Perseroan yang dilaporkan, yang mungkin berdampak negatif pada harga perdagangan Saham Perseroan. Selain itu, para investor yang bergantung pada informasi yang salah dapat membuat keputusan investasi yang tidak diinformasikan, dan Perseroan dapat dikenakan sanksi atau penyelidikan oleh BEI, OJK atau otoritas pengatur lainnya.

Penjualan Saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasarnya.

Penjualan di masa depan atas sejumlah besar Saham Perseroan di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat mempengaruhi secara merugikan harga pasar yang berlaku dari Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek terkait ekuitas. Penjualan di masa depan atas blok besar Saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan Saham baru di masa depan oleh Perseroan, atau persepsi bahwa penjualan semacam itu dapat terjadi, dapat menyebabkan harga Saham Perseroan turun dan mempersulit Perseroan untuk menghimpun modal.

Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen.

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta pengeluaran modal Perseroan, komitmen kontraktual dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan bisnis Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat mengadakan perjanjian-perjanjian pembiayaan di masa depan yang dapat membatasi lebih lanjut kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen.

Salah satu dari faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Oleh karena itu pengembalian apapun kepada para pemegang saham mungkin terbatas pada kenaikan, jika ada, dari harga saham Perseroan, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, Perseroan belum dapat memastikan bahwa Perseroan akan dapat membayar dividen atau bahwa Direksi Perseroan akan merekomendasikan atau pemegang saham Perseroan akan menyetujui pembayaran dividen dengan dipengaruhi faktor-faktor di atas.

Transaksi Perseroan dengan afiliasi Perseroan dapat tunduk pada peraturan OJK tentang transaksi pihak terafiliasi dan benturan kepentingan.

Dalam rangka melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, POJK No. 42/2020 mengatur bagaimana perusahaan publik dapat melakukan transaksi dengan afiliasinya. Terdapat dua jenis transaksi pihak berelasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu transaksi pihak terafiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi pihak terafiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan antara sebuah perusahaan (atau sebuah perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh sebuah perusahaan publik) dan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik langsung atau tidak langsung, paling sedikit 20% dari hak suara seluruh saham dengan hak suara) atau pengendali perusahaan publik. Transaksi pihak terafiliasi (baik dalam satu transaksi maupun dalam serangkaian transaksi untuk tujuan atau kegiatan tertentu) tidak mensyaratkan persetujuan terlebih dahulu oleh pemegang saham independen perusahaan, kecuali apabila (i) nilai transaksi pihak terafiliasi melebihi ambang batas suatu "transaksi material" dalam pengertian Aturan Transaksi Material yang mewajibkan persetujuan RUPS, (ii) transaksi pihak terafiliasi dapat berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis perusahaan (misalnya, transaksi secara pro forma akan menyebabkan perusahaan publik mengalami penurunan pendapatannya sebesar 80% atau lebih atau mengalami rugi bersih sepanjang tahun buku dalam suatu pro forma) dan/atau (iii) OJK menganggap bahwa transaksi pihak terafiliasi mensyaratkan persetujuan. Tunduk pada pengecualian tertentu, perusahaan harus mengungkapkan secara terbuka kepada publik dan melaporkan kepada OJK informasi atas transaksi tersebut, yang wajib menyertakan ringkasan laporan penilai independen. Namun, setiap transaksi (termasuk transaksi pihak terafiliasi) mungkin memuat benturan kepentingan. "Benturan kepentingan" didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan publik dan kepentingan pribadi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendalinya yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis bagi perusahaan publik tersebut. Jika transaksi dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan, maka, dengan tunduk pada pengecualian tertentu dan persyaratan prosedural lainnya, transaksi tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh keputusan para pemegang saham independen yang tidak terlibat dalam benturan kepentingan dan yang tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham utama yang mungkin memiliki benturan kepentingan. OJK memiliki kekuasaan untuk menegakkan POJK No. 42/2020 ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk meminta penegakan atau membawa tindakan penegakan.

Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan afiliasi Perseroan. Jika transaksi ini tunduk pada POJK No. 42/2020 di kemudian hari, Perseroan akan berkewajiban untuk mengumumkannya pengungkapan, atau mendapatkan persetujuan

dari pemegang saham independen Perseroan. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat membebani Perseroan dalam hal waktu dan biaya serta dapat menyebabkan Perseroan tidak melakukan transaksi tertentu yang mungkin Perseroan anggap demi kepentingan terbaik bagi Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham yang tidak tertarik akan diperoleh jika diminta.

Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan penolakan otomatis BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00168/BEI/11-2018, Keputusan BEI No. Kep-00025/BEI/03-2020, Keputusan BEI No. Kep-00108/BEI/12-2020 dan terakhir diubah dengan Keputusan BEI No. Kep-00061/BEI/07-2021 ("**Peraturan BEI No. II-A**"), Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta ("**JATS**"), sistem perdagangan efek BEI, secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli atas efek jenis ekuitas pada saat penawaran jual dan/atau permintaan beli harga ekuitas bersifat efek melebihi batas yang ditetapkan oleh BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A, JATS secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli untuk efek bersifat ekuitas jika: (i) harga penawaran jual atau harga permintaan beli kurang dari Rp50; (ii) harga penawaran jual atau harga permintaan beli adalah (a) lebih dari 35% di atas atau 7% di bawah harga sebelumnya, harga teoritis untuk aksi korporasi tertentu, atau harga penawaran umum perdana (sebagaimana mungkin berlaku, "**Harga Referensi**") untuk saham dalam kisaran harga Rp50 sampai dengan Rp200, (b) lebih dari 25% ke atas atau 7% di bawah Harga Referensi untuk saham dalam kisaran harga Rp200 sampai dengan Rp5.000, atau (c) lebih dari 20% di atas atau 7% di bawah Harga Referensi untuk saham dengan harga di atas Rp5.000; atau (iii) volume penawaran jual atau permintaan beli lebih dari 50.000 lot (satu lot adalah 100 lembar saham) atau 5% dari jumlah seluruh saham suatu perusahaan yang tercatat di BEI (mana yang lebih kecil). Pembatasan-pembatasan di atas hanya berlaku untuk pasar reguler dan pasar tunai dan tidak berlaku di pasar negosiasi BEI.

Dengan memperhatikan kondisi pasar, dengan tunduk pada persetujuan OJK, BEI dapat mengubah unit-unit perdagangan saat ini, pecahan harga, batas harga terendah, dan ketentuan penolakan otomatis yang dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan berlaku efektif paling cepat tiga hari kerja setelah pengumuman. Dengan demikian, jika aturan penolakan otomatis diterapkan, para investor mungkin tidak dapat mentransaksikan Sahamnya di Bank.

Hukum Indonesia dapat beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lain sehubungan dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan yang berkelanjutan dari BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan terus diatur oleh hukum Indonesia.

Tata cara dan periode pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan pemegang saham Perseroan untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum tersebut, mungkin berbeda dengan tata cara dan periode pemberitahuan dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, menurut Hukum Indonesia, para pemegang saham yang terdapat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari pasar segera sebelum hari, atau tanggal pencatatan, di mana pemberitahuan rapat umum diterbitkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut mungkin telah melepas saham mereka setelah tanggal pencatatan tersebut dan sebelum rapat umum pemegang saham. Selain itu, para investor yang mungkin telah memperoleh Saham mereka setelah tanggal pencatatan (dan sebelum hari rapat umum) tidak akan berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum. Untuk rincian lebih lanjut mengenai prosedur untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan berdasarkan hukum Indonesia. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin tunduk tata cara dan hak-hak sehubungan dengan rapat umum pemegang saham Perseroan yang berbeda dari tata cara dan hak-hak sehubungan dengan rapat umum yang mereka mungkin terbiasa di yurisdiksi lain.

Para Pembeli dapat tunduk pada pembatasan hak pemegang saham minoritas.

Urusan perusahaan Perseroan diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan, undang-undang yang mengatur perusahaan yang didirikan di Indonesia, peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi lain secara signifikan termasuk independensi Direksi, Dewan Komisaris dan komite audit, dan standar pelaporan internal dan eksternal. Hak-hak para pemegang saham Perseroan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menurut hukum Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku untuk sebuah perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

Kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum Indonesia dari pemegang saham mayoritas, komisaris dan direksi sehubungan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara lain. Akibatnya, pemegang saham minoritas

mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia saat ini sejauh di negara-negara lain. Asas-asas hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti keabsahan tata cara perusahaan, kewajiban hukum dari pengurus, komisaris, direktur dan pemegang saham pengendali Perseroan, dan hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh UUPT dan peraturan-peraturan yang menyertainya, peraturan OJK (termasuk peraturan BAPEPAM-LK), peraturan BEI dan Anggaran Dasar Perseroan. Asas-asas hukum seperti itu berbeda dari asas-asas hukum yang akan berlaku jika Perseroan didirikan di suatu yurisdiksi selain Indonesia. Secara khusus, konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum dari pengurus adalah belum teruji di pengadilan Indonesia. Tindakan turunan yang dibawa sehubungan dengan kegiatan direksi dan komisaris hampir tidak pernah diajukan atas nama perusahaan atau pernah diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak 1995 dan tidak terbukti dalam praktek. Bahkan jika tindakan tersebut dapat ditindaklanjuti menurut hukum Indonesia, tidak adanya preseden peradilan dapat membuat penuntutan proses perdata tersebut jauh lebih sulit. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau upaya dari pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS atau mata uang lainnya akan mempengaruhi mata uang asing yang setara dengan nilai Saham Perseroan dan dividen apa pun.

Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lainnya akan mempengaruhi mata uang asing yang setara dengan harga Rupiah dari Saham Perseroan di BEI. Fluktuasi seperti itu juga akan mempengaruhi jumlah yang akan diterima oleh pemegang Saham Perseroan dalam mata uang asing setelah konversi dari (i) setiap dividen tunai atau pembagian lain yang Perseroan bayarkan dalam Rupiah atas Saham Perseroan dan (ii) setiap hasil yang dibayarkan dalam Rupiah dari setiap penjualan Saham Perseroan di pasar perdagangan sekunder. Nilai tukar antara Rupiah dan mata uang tertentu lainnya telah berfluktuasi secara signifikan di masa lalu. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi terhadap dolar AS dan/atau mata uang lainnya. Setiap depresiasi seperti itu akan berdampak buruk pada investasi investor sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Hak-hak investor untuk melakukan penyertaan dalam penawaran hak di kemudian hari oleh Perseroan dapat dibatasi, yang akan menyebabkan dilusi kepemilikan saham investor.

Pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan mereka jika Perseroan mengeluarkan Saham atau efek bersifat ekuitas tambahan di kemudian hari. Apabila dana dihimpun melalui pengeluaran Saham baru atau ekuitas lainnya atau efek terkait ekuitas selain secara pro-rata kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan pemegang saham tersebut dapat terdilusi. Apalagi Saham atau efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan di kemudian hari mungkin memiliki hak-hak, preferensi, atau hak istimewa yang lebih tinggi daripada hak-hak, preferensi, atau hak istimewa dari Saham pemegang saham yang ada.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 yang mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019, perusahaan terbuka wajib menawarkan kepada pemegang sahamnya yang terdaftar pada tanggal pencatatan hak memesan efek terlebih dahulu untuk mengambil bagian dan membayar sejumlah saham yang proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan yang ada sebelum pengeluaran saham baru, dengan tunduk pada pengecualian-pengecualian yang diatur dalam peraturan. Misalnya, dalam hal "kesulitan keuangan" dalam arti aturan, pengeluaran hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikesampingkan. Perseroan juga dapat mengeluarkan saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham yang harus diperoleh dari pemegang saham independen Perseroan dan pemegang saham yang tidak terafiliasi.

Sejauh Perseroan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau mengambil bagian saham baru atau dengan cara lain mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, pemegang saham mungkin tidak dapat menjalankan hak-hak atas saham tersebut kecuali apabila undang-undang efek di yurisdiksi pemegang saham dipatuhi. Contohnya, pemegang dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat menjalankan hak-hak atas saham tersebut kecuali apabila pernyataan pendaftaran berdasarkan undang-undang efek yang relevan dari yurisdiksi tersebut berlaku efektif sehubungan dengan saham baru atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan undang-undang tersebut tersedia.

Setiap kali Perseroan melakukan hak-hak atau penawaran saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan non-Indonesia, serta faktor-faktor lain yang Perseroan anggap tepat. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi undang-undang efek di beberapa yurisdiksi dan jika Perseroan melakukannya, dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran atau tidak ada persyaratan pengajuan tersedia, maka pemegang saham Perseroan di yurisdiksi tersebut tidak akan dapat melakukan penyertaan dalam hak-hak atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan sahamnya. Akibatnya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemegang saham dapat mempertahankan porsi kepemilikan secara

proporsional pada Perseroan. Karena penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu di Indonesia umumnya memungkinkan para partisipan untuk membeli saham dengan diskon besar sampai harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk melakukan penyertaan dapat menyebabkan kerugian ekonomi material saham bagi pemegang saham Perseroan.

Pemegang saham di luar negeri dapat terkena risiko nilai tukar.

Saham dan setiap dividen yang akan dibayarkan sehubungan dengan PMHMETD I akan, dalam mata uang Rupiah. Investasi dalam Saham oleh investor yang mata uang utamanya bukan Rupiah menimbulkan risiko nilai tukar mata uang asing bagi investor. Setiap depresiasi Rupiah sehubungan dengan mata uang asing tersebut akan mengurangi nilai penyertaan saham atau dividen dalam mata uang asing.

Informasi perusahaan yang tersedia di pasar efek Indonesia mungkin lebih sedikit daripada pasar efek di yurisdiksi lain.

Mungkin ada perbedaan antara tingkat regulasi dan pengawasan pasar efek Indonesia serta kegiatan pembeli, pialang dan partisipan lain dengan tingkat regulasi dan pengawasan pasar efek Indonesia serta kegiatan pembeli, pialang dan partisipan lain dari yurisdiksi lainnya. OJK dan bursa efek bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar efek Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, perdagangan orang dalam dan hal-hal lain. Namun, mungkin ada informasi yang tersedia untuk umum tentang perusahaan-perusahaan Indonesia yang lebih sedikit daripada yang tersedia secara berkala oleh perusahaan-perusahaan publik di negara yang lebih maju.

Hukum Indonesia memuat ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK 04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK No. 9/2018”), jika terdapat perubahan pengendalian perusahaan publik Indonesia, pihak pengendali yang baru harus melakukan penawaran tender atas sisa saham (saham masyarakat, tidak termasuk saham dari pemegang saham pengendali lainnya, jika ada), dengan tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu. Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/2018, pengambilalihan perusahaan publik didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau secara tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan publik tersebut. Pihak pengendali dari perusahaan terbuka didefinisikan sebagai orang yang:

- memiliki lebih dari 50% dari total modal disetor perusahaan terbuka; atau
- memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan (dengan cara apapun yang memungkinkan) pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Setelah pengambilalihan perusahaan publik, peraturan mewajibkan pihak pengendali yang baru untuk meluncurkan penawaran tender wajib untuk seluruh sisa saham (kecuali untuk saham pemegang saham utama, antara lain). Jika akuisisi adalah untuk 80% saham atau kurang tetapi pihak pengendali yang baru memegang lebih dari 80% dari total modal disetor perusahaan terbuka karena penawaran tender wajib, pihak pengendali yang baru wajib melepas (*refloat*) kepemilikan sahamnya kepada masyarakat dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib sampai dengan ia memegang paling banyak kepemilikan sebesar 80% untuk memastikan bahwa masyarakat terus memegang setidaknya 20% saham. Jika, sebagai hasil pengambilalihan, pihak pengendali yang baru memiliki lebih dari 80% dari total modal disetor sebuah perusahaan terbuka, pihak pengendali harus terus melaksanakan penawaran tender wajib, meskipun masih ada kewajiban untuk melepaskan seluruh saham yang diperoleh dari penawaran tender wajib tersebut dalam waktu dua tahun setelah selesainya penawaran tender wajib tersebut.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mensyaratkan setiap akuisisi saham yang mungkin melibatkan atau mengancam perubahan pengendalian yang juga akan diperluas kepada semua pemegang saham dengan syarat-syarat yang sama, ketentuan ini dapat mencegah atau menghalangi transaksi tersebut terjadi sama sekali.

Risiko-risiko yang berkaitan dengan dokumen ini

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan keakuratan atau komparabilitas fakta, prakiraan dan statistik yang terkandung dalam dokumen ini sehubungan dengan Indonesia, ekonominya atau industri perbankan Indonesia dan global.

Fakta, prakiraan dan statistik dalam dokumen ini yang berkaitan dengan Indonesia, perekonomian Indonesia dan industri perbankan Indonesia dan global, termasuk informasi pangsa pasar Perseroan, didapatkan dari berbagai sumber pemerintah yang secara umum diyakini dapat diandalkan. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan materi tersebut. Selain itu, fakta, prakiraan, dan statistik ini belum diverifikasi secara independen oleh Perseroan dan mungkin tidak konsisten dengan informasi yang tersedia dari sumber-sumber lain dan mungkin tidak lengkap atau terkini.

Perseroan telah berhati-hati dalam mereproduksi atau mengekstrak informasi dari sumber-sumber tersebut. Namun, karena metodologi yang berpotensi cacat, perbedaan dalam praktik pasar dan masalah lainnya, maka fakta, prakiraan, dan statistik lainnya ini mungkin tidak akurat atau mungkin tidak dapat dibandingkan dari periode ke periode atau dengan fakta, prakiraan, atau statistik ekonomi lain.

Risiko-risiko yang berkaitan dengan pernyataan berwawasan ke depan.

Perseroan telah menyertakan pernyataan tertentu dalam dokumen ini yang merupakan "pernyataan berwawasan ke depan". Silakan merujuk ke bagian berjudul "*Pernyataan Berwawasan ke Depan*" untuk rincian lebih lanjut. Hasil aktual mungkin berbeda secara materiil dari yang disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut karena risiko atau ketidakpastian tertentu yang terkait dengan harapan Perseroan sehubungan dengan, namun tidak terbatas pada, kemampuan Perseroan untuk berhasil menerapkan strategi Perseroan, kemampuan Perseroan untuk mengintegrasikan merger atau akuisisi baru-baru ini atau merger atau akuisisi yang akan datang ke dalam operasi Perseroan, tingkat aset bermasalah dan aset yang direstrukturisasi di masa depan, pertumbuhan dan ekspansi Perseroan, kecukupan cadangan kerugian kredit dan investasi Perseroan, perubahan teknologi, pendapatan investasi, kemampuan Perseroan untuk memasarkan produk baru, proyeksi arus kas, hasil dari setiap proses hukum atau peraturan di mana Perseroan merupakan atau menjadi pihak di dalamnya, dampak masa depan dari standar akuntansi baru, kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, kemampuan Perseroan untuk memperpanjang sumber pendanaan jangka pendek Perseroan, paparan Perseroan terhadap risiko-risiko operasional, pasar, kredit, suku bunga dan mata uang dan penerimaan pasar dan permintaan untuk layanan perbankan internet. Oleh karena itu, ketergantungan yang tidak semestinya tidak boleh diberikan terhadap pernyataan berwawasan ke depan tersebut.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yang tercantum dalam Prospektus ini, atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2021 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, (KAP PSS) dengan opini audit tanpa modifikasian dengan paragraf penjelasan hal-hal lain tentang informasi keuangan entitas induk dan tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana PMHMETD I sampai dengan tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

IX. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Pada awalnya Perseroan didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofdeen* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang Berkebangsaan Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Perseroan.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa Perseroan adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Perseroan sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu, melalui PERPU No. 41 Tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (dahulu BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, Bank Indonesia dikembalikan fungsinya sebagai Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968, tugas-tugas pokok Perseroan sebagai Bank Umum ditetapkan kembali.

Sejak disahkan berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968 tanggal 18 Desember 1968, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 status Perseroan berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan 100% sahamnya masih dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Perubahan bentuk hukum Perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tersebut dituangkan dalam Akta Pendirian No. 133 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham (dahulu Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan dalam buku *register* pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992 pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3A, dengan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	999.999	999.999.000.000	99,99
Drs. Oskar Surjaatmadja, Msc	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 ("**Akta No. 3/2021**").

Sehubungan dengan PMHMETD I, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PMHMETD I pada tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 61/2021, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham melalui mekanisme PMHMETD I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada OJK;
 - c. Menentukan tanggal DPS yang berhak atas HMETD;
 - d. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan HMETD;
 - e. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - f. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan HMETD ;
 - g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh BEI, kecuali atas 1% saham yang tidak dicatatkan pada BEI;
 - j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan HMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
 - b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.

Perseroan memiliki perizinan operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum BRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956 sebagaimana dimuat dalam Surat No. 5/117/DPwB2/PwB24 tanggal 15 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Bank 2 mengenai pemberian izin sebagai Bank Devisa;
- c. Surat Bank Indonesia No. 11/427/DASP tanggal 3 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, di mana Bank Indonesia telah menyetujui Perseroan sebagai penerbit kartu ATM dan kartu Debet sekaligus sebagai *acquirer* atas penerbitan Kartu ATM dan Kartu Debet tersebut;
- d. Surat Bank Indonesia No. 20/259/DKSP/Srt/B tanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia telah memberikan perpanjangan kepada Perseroan atas izin sebagai penerbit uang elektronik, dengan demikian Izin Penerbit Uang Elektronik Perseroan berlaku sampai dengan 4 Mei 2023.
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-9/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian di Pasar Modal, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal;
- f. Surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*), yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Bank I, di mana Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan *Trust*;
- g. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, di mana Perseroan telah terdaftar sebagai Wali Amanat.

Perseroan telah melakukan beberapa kali pencatatan saham dengan kronologis sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal Pencatatan	Tambahan/ Pengurangan Saham	Modal Disetor Saham (Rp Juta)	Lembar Saham Yang Beredar
Penawaran Umum Saham Perdana	2003	11.764.705.000	5.882.353	11.764.705.000
Exercise MSOP 85.385.500	2004	85.385.500	5.925.045	11.850.090.500
Exercise MSOP 185.610.000	2005	185.610.000	6.017.850	12.035.700.500
Exercise MSOP 250.721.000	2006	250.721.000	6.143.211	12.286.421.500
Exercise MSOP 31.379.000	2007	31.379.000	6.158.900	12.317.800.500
Exercise MSOP 7.499.000	2008	7.499.000	6.162.650	12.325.299.500
Exercise MSOP 4.553.000	2009	4.553.000	6.164.926	12.329.852.500
Exercise MSOP 4.728.500	2010	4.728.500	6.167.291	12.334.581.000
Stock Split 1:2 tanggal 11 Januari 2011	2011	12.334.581.000	6.167.291	24.669.162.000
	2015	-	6.167.291	24.669.162.000
Stock Buy-Back 221.718.000 lembar saham	2016	-	6.167.291	24.669.162.000
Stock Split 1:5 tanggal 10 November 2017	2017	98.676.648.000	6.167.291	123.345.810.000
Exercise ESOP 143.415.500	2019	-	6.167.291	123.345.810.000
Exercise ESA 231.111.000	2020	-	6.167.291	123.345.810.000
Stock Buy-Back 16.400.000 lembar saham	2020	-	6.167.291	123.345.810.000
Exercise ESA 2.181.000	2021	-	6.167.291	123.345.810.000

Perseroan tidak akan melakukan konversi saham treasuri sampai dengan tanggal *recording date* PMHMETD I.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan 3 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran tidak mengalami perubahan. Perubahan struktur permodalan Perseroan pada bulan Oktober 2017 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari semula Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima) dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0139372.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 November 2017.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021) dan Laporan Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih posisi 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar					
- Saham Seri A Dwiwarna			1	50	
- Saham Biasa Atas Nama Seri B			299.999.999.999	14.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar			300.000.000.000	15.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Negara Republik Indonesia					
- Saham Seri A Dwiwarna			1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B			69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat					
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing di bawah 5%)*			53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel			176.654.190.000	8.832.709.500.000	

* termasuk saham treasuri sebesar 748.282.500 saham

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dalam Perseroan.

Berdasarkan Laporan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku BAE Perseroan, per tanggal 31 Juli 2021, terdapat kepemilikan saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:

- Sunarso, 1.008.000 (0,0008%) (Direktur Utama)
- Catur Budi Harto, 329.200 (0,0002%) (Wakil Direktur Utama)
- Indra Utoyo, 1.726.400 (0,0014%) (Direktur Digital dan Teknologi Informasi)
- Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari, 97.500 saham (0,0008%) (Direktur Keuangan)
- Amam Sukriyanto, 129.500 (0,0001%) (Direktur Bisnis Kecil dan Menengah)
- Handayani, 1.564.500 (0,0012%) (Direktur Konsumer)
- Ahmad Solichin Lutfiyanto, 1.819.400 (0,0014%) (Direktur Kepatuhan)
- Supari, 1.248.400 saham (0,001%) (Direktur Bisnis Mikro)
- Agus Noorsanto, 373.000 (0,0003%) (Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN)
- Agus Sudiarto, 294.600 (0,0002%) (Direktur Manajemen Risiko)
- Agus Winardono, 129.100 (0,0001%) (Direktur *Human Capital*)
- Arga Mahanana Nugraha, 57.300 (0%) (Direktur Jaringan dan Layanan)
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto, 469.100 (0,0004%) (Komisaris)
- Hadiyanto, 625.800 (0,0005%) (Komisaris).

3. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan No. 24 tanggal 23 April 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-026495 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0076626.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ari Kuncoro*
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Zulnihar Usman
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono

**Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah mengumumkan perihal pengunduran diri ini pada situs web BEI pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tanggal 22 Juli 2021.*

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Jaringan dan Layanan	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur <i>Human Capital</i>	: Agus Winardono

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 dan telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK. Selain itu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. B.183-DIR/SKP/CSM/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal Laporan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Departemen Pengawasan Bank 1 OJK.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama, 48 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2020. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, gelar Master of Business Administration di Erasmus University, Rotterdam Belanda pada tahun 2001.

- 2020 – sekarang : Komisaris Utama Perseroan
- 2019 – sekarang : Wakil Menteri BUMN II
- 2019 – 2020 : Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 2016 – 2019 : Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 2015 – 2016 : Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Rabin Indrajad Hattari
Komisaris, 46 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020. Meraih gelar *Bachelor of Arts*, Ekonomi dan Matematika dari University of Georgia pada tahun 1996, gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2001 dan gelar Ph.D. di bidang Ekonomi dari George Mason University pada tahun 2008.

- 2020 – sekarang : Komisaris Perseroan
- 2020 – sekarang : Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN
- 2020 – 2021 : *Staf Khusus V Kementerian BUMN*
- 2010 – 2020 : *Senior Economist, Regional Cooperation and Integration Division, Sustainable Development and Climate Change Department Asian Development Bank*



Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris, 48 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017. Meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996, gelar *Master of Arts* di bidang Ilmu Politik dari Ohio University, Amerika Serikat pada tahun 2003 dan gelar Ph.D. Filsafat di bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Northern Illinois University pada tahun 2010.

- 2017 – sekarang : Komisaris Perseroan
- 2016 – sekarang : Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan
- 2016 – 2017 : Komisaris PT Permodalan Nasional Madani
- 2015 – 2019 : Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)



Hadiyanto
Komisaris, 58 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018. Meraih gelar Sarjana di bidang hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 1986, gelar *Master of Laws* dari Harvard University Law School pada tahun 1993, dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012.

2018 – sekarang	:	Komisaris Perseroan
2012 – 2018	:	Komisaris PT Telkom Indonesia
2011 – 2015	:	Dewan Pengawas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
2010 – 2011	:	Dewan Pengawas PPK Gelora Bung Karno
2009 – 2015	:	Dewan Direktur Indonesia LPEI (Indonesia Eximbank)



R. Widyo Pramono
Komisaris Independen, 63 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2020. Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 1984, gelar Magister Manajemen dari STIE IPWI, Jakarta pada tahun 2001, gelar Magister bidang Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007, dan gelar Doktor bidang Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2012.

2020 – sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2017 – 2020	:	Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2015 – 2017	:	Jaksa Agung Muda Pengawasan
2013 – 2015	:	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
2012 – 2013	:	Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Tindak Pidana Umum



Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen, 50 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017. Meraih gelar Sarjana di bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1993, gelar Sarjana di bidang Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1994, gelar Master di bidang Keuangan dan *International and Development Economic* dari *French Prime Minister, Institute International d'Administration Publique (IIAP)-Ecole National d'Administration (ENA)* dan *Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne* Paris pada tahun 2000 dan 2002, dan gelar Ph.D. di bidang Ekonomi dari *Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne* Paris pada tahun 2005.

2017 – sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2016 – 2017	:	Komite Pelayanan dan Kepesertaan serta Komite Kinerja Organisasi dan SDM BPJS Ketenagakerjaan
2016 – 2017	:	Tim <i>Task Force</i> / Satgas Desa Kementerian Desa Transmigrasi dan Desa Tertinggal
2015 – 2017	:	Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
2014 – 2015	:	Tim <i>Task Force</i> / Satgas Desa Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral



Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen, 54 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020. Meraih gelar Sarjana di bidang Hukum dari Universitas Pancasila pada tahun 1990 dan gelar Magister di bidang Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 serta alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia-40 di tahun 2007.

2020 – sekarang	:	Komisaris Independen
2016 – sekarang	:	Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Cairo
2014 – 2019	:	Anggota DPR - RI
2000 – 2004	:	Anggota DPR - RI
1992 – sekarang	:	Pendiri dan Pimpinan Kantor Rialatifa & Partners



Zulnahr Usman
Komisaris Independen, 58 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020. Meraih gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti pada tahun 1989.

2020 – sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2019 – 2020	:	Presiden Direktur dan CEO PT Trans Borneo Gas
2015 – 2020	:	Wakil Ketua Umum KADIN bidang Infrastruktur dan Energi Terbarukan
2016 – 2019	:	Ketua Pokja Energi dan Sumber Daya Mineral Komite Ekonomi dan Industri Nasional RI
2014 – 2015	:	Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Infrastruktur
2013 – 2015	:	Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Pertambangan Daerah (ASPPERDA)
2012 – 2014	:	Ketua Komite Tetap Infrastruktur Energi dan Migas - Bidang Infrastruktur KADIN



Hendrikus Ivo
Komisaris Independen, 63 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1982 dan Magister Manajemen dari STIE IPWI, Jakarta pada tahun 2000.

2019 – sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2018 – 2019	:	Advisor Senior Ketua Dewan Komisiner, Otoritas Jasa Keuangan
2017 – 2018	:	Deputi Komisiner Penyidikan, Organisasi dan SDM Otoritas Jasa Keuangan
2016 – 2017	:	Deputi Komisiner Penyidikan & APU PPT, Otoritas Jasa Keuangan
2015 – 2016	:	Kepala Departemen Hukum, Otoritas Jasa Keuangan
2014 – 2015	:	Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan
2014 – 2014	:	Kepala Kantor Regional 6 Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Otoritas Jasa Keuangan
2013 – 2014	:	Kepala Pengawasan Perbankan Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Bank Indonesia

Direksi



Soenarso

Direktur Utama, 57 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1988 dan Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia pada tahun 2002.

2019 – sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2019	:	Wakil Direktur Utama Perseroan
2017 – 2019	:	Direktur Utama PT Pegadaian
2015 – 2017	:	Wakil Direktur Utama Perseroan
2010 – 2015	:	Direktur <i>Commercial and Business Banking</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Catur Budi Harto

Wakil Direktur Utama, 57 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Agronomi dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1986 dan Magister Manajemen dari Universitas Prasetya Mulya pada tahun 2002.

2019 – sekarang	:	Wakil Direktur Utama Perseroan
2017 – 2019	:	Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2016 – 2017	:	Direktur Jaringan dan <i>Commercial Funding</i> Layanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2015 – 2016	:	<i>Senior Executive Vice President</i> , Direktorat Jaringan dan Layanan Perseroan.



Viviana Dyah Ayu Retno K.

Direktur Keuangan, 42 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Peternakan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2001 dan gelar Master of Business Administration dari Simon Business School – University of Rochester, Amerika Serikat pada tahun 2010.

2021 – sekarang	:	Direktur Keuangan Perseroan
2019 - 2021	:	<i>Executive Vice President</i> Divisi <i>Subsidiary Management</i> Perseroan
2018 - 2019	:	<i>Vice President Subsidiary Management Desk</i> Perseroan
2017 – 2018	:	<i>Assistant Vice President Equity Management</i> Perseroan



Agus Noorsanto

Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN, 56 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran pada tahun 1988 dan Magister Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1999.

2019 – sekarang	:	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN Perseroan
2017 – 2019	:	Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2017 – 2017	:	<i>Senior Executive Vice President</i> , Bidang Operasional Perseroan
2016 – 2017	:	<i>Senior Executive Vice President</i> , Direktorat Jaringan & Layanan Perseroan
2016	:	<i>Senior Executive Vice President</i> , Bidang UKM & Konsumer Perseroan



Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah, 53 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Teknis Industri, Universitas Brawijaya pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari Universitas Adelaide pada tahun 2006.

2021 – sekarang	:	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Perseroan
2020 - 2021	:	<i>SEVP Fixed Assets Management & Procurement</i> Perseroan
2020	:	<i>Executive Vice President</i> Divisi <i>Corporate Secretary</i> Perseroan
2018 – 2020	:	Kepala Divisi Bisnis Internasional Perseroan
2016 – 2018	:	<i>General Manager</i> Kantor Cabang New York Perseroan



Indra Utoyo
Direktur Digital dan Teknologi Informasi, 59 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung, Bandung di tahun 1985, gelar *Magister Communication and Signal Processing*, Imperial College, University of London, UK di tahun 1994, dan *Doctor Strategic Management*, Universitas Indonesia, Jakarta di tahun 2019.

2017 – sekarang	:	Direktur Digital dan Teknologi Informasi Perseroan
2016 – 2017	:	Komisaris Utama, PT Metra Digital Innovation
2016 – 2017	:	Direktur <i>Digital & Strategic Portfolio</i> Telkom Group
2016 – 2017	:	CEO CFU <i>Digital Service</i> Telkom Group
2012 – 2016	:	Direktur <i>Innovation & Strategic Portfolio</i> PT Telkom (Persero) Tbk.
2007 – 2012	:	Direktur <i>IT Solution & Supply</i> PT Telkom (Persero) Tbk.



Supari
Direktur Bisnis Mikro, 54 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Brawijaya pada tahun 1989 dan Magister Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005.

2019 – sekarang	:	Direktur Bisnis Mikro Perseroan
2018 – 2019	:	Direktur Ritel dan Menengah Perseroan
2016 – 2018	:	<i>Senior Executive Vice President</i> BRI



Arga Mahanana Nugraha
Direktur Jaringan dan Layanan, 40 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2003 dan gelar Magister Science dari Carnegie Mellon University pada tahun 2010.

2021 – sekarang	:	Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan
2020 - 2021	:	<i>Executive Vice President</i> BRILink Network Division Perseroan
2018 - 2020	:	<i>Vice President</i> Divisi <i>E-Banking & Retail Payment</i> Perseroan
2016 – 2018	:	<i>Assistant Vice President</i> <i>Cash Management Transaction Banking Division</i> Perseroan



Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko, 56 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko sejak tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia pada tahun 1988 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2004.

2019 – Sekarang : Direktur Manajemen Risiko Perseroan
 2017 – 2019 : SEVP *Special Asset Management*
 2014 – 2017 : Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri
 2010 – 2014 : *Group Head Special Asset Management* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Handayani
Direktur Konsumer, 55 tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Meraih gelar Sarjana di bidang Ilmu Kedokteran Gigi dari Universitas Airlangga pada tahun 1988 dan gelar Magister di bidang Manajemen dari Universitas Padjajaran pada tahun 2001.

2017 – sekarang : Direktur Konsumer Perseroan
 2016 – 2017 : Direktur *Consumer Banking* PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
 2014 – 2015 : Direktur Komersial PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk
 2013 – 2014 : Direktur *Marketing & Alternate Distribution* PT Axa Mandiri Financial Services



Agus Winardono
Direktur Human Capital, 55 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur *Human Capital* sejak tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Krisna Dwipayana pada tahun 1988 dan gelar Magister Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM pada tahun 2003.

2021 – sekarang : Direktur *Human Capital* Perseroan
 2020 - 2021 : Direktur Utama PT. Prima Karya Sarana Sejahtera
 2020 : Kepala Audit Intern Wilayah Jakarta 2 Perseroan
 2019 – 2020 : Kepala Audit Intern Wilayah Bandar Lampung Perseroan
 2018 – 2019 : Inspektur Kantor Inspeksi Wilayah Padang Perseroan
 2016 – 2018 : *Executive Vice President* PT Bringin Karya Sejahtera



Ahmad Solichin Luftiyanto
Direktur Kepatuhan, 51 Tahun

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Jember pada tahun 1990 dan Magister Manajemen Pemasaran/*Information Systems* dari Universitas Gadjah Mada & *Agder College University*, Norwegia pada tahun 1999.

2021 – Sekarang : Direktur Kepatuhan Perseroan
 2019 – 2021 : Direktur Jaringan dan Layanan Perseroan
 2018 – 2019 : Direktur Kepatuhan Perseroan
 2017 – 2018 : Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan *Human Capital* Perseroan
 2016 – 2017 : Kepala Divisi *Transaction Banking* Perseroan

4. Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance (“GCG”)

Mekanisme GCG mengambil peran penting dalam pelaksanaan strategi *Blue Print* Transformasi Perseroan, dimana aktivitas strategis terkait operasional dan aksi korporasi membutuhkan penelaahan menyeluruh, pengambilan keputusan yang cepat dan efektif serta mekanisme pengawasan pelaksanaan yang tepat termasuk penerapan manajemen risiko. Digitalisasi tidak hanya diaplikasikan dalam bentuk produk kepada pelanggan maupun kerjasama dengan pihak ketiga, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan GCG oleh organ-organ Perseroan khususnya di sisi proses pengambilan keputusan dan budaya kerja sehari-hari.

Sebagai perusahaan yang berbasis pelanggan, Perseroan senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan yang saat ini bergerak cepat ke arah tren digital. Kondisi ini disigapi Perseroan dengan pelaksanaan *Blue Print* Transformasi Digital Perseroan melalui pembangunan teknologi informasi yang andal dan data *analytics* untuk mendukung terciptanya layanan digital melalui jaringan yang cepat dan berkualitas.

Perseroan juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan melalui kinerja yang signifikan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional.
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mewujudkan terciptanya *good corporate citizen*.

Penerapan GCG yang tercermin melalui *governance outcome* sampai dengan Prospektus ini diterbitkan mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal melalui beberapa penghargaan diantaranya sebagai berikut:

1. Predikat “Most Trusted Company” dalam Corporate Governance Perception Index yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG);
2. Top 3 PLCs Indonesia dalam pemeringkatan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF);
3. The Best GRC Overall For Corporate & Performance 2020 oleh Business News.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perbankan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Undang-Undang BUMN
4. UUPT
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
6. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.
7. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
10. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. POJK No. 55/ 2016
12. Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
13. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.
14. Peraturan dari regulator lainnya terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

BRI juga mengadopsi standar terbaik serta pedoman dan best practice terkini dalam meningkatkan kualitas mutu penerapan GCG antara lain:

1. Prinsip-prinsip GCG oleh Organization for Economic Cooperation and Development.
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* oleh Basel Committee on Banking Supervision

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:



1. Transparansi

1. Perseroan mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Perseroan mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi Perseroan, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan Perseroan.
3. Prinsip keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban informasi rahasia Perseroan dan Nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada shareholders dan stakeholders.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
3. Perseroan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan stakeholders lainnya sesuai ketentuan berlaku.
4. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.
5. Perseroan memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
6. Perseroan memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Perseroan.
7. Perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

3. Tanggung Jawab

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Perseroan.
2. Perseroan memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam
3. Perseroan bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Independensi

1. Perseroan menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
2. Perseroan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

1. Perseroan memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada *stakeholders* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.
2. Perseroan memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta adanya akses keterbukaan informasi.

Perseroan juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk:

1. Mendukung Visi dan Misi Perseroan.
2. Mendukung pencapaian tujuan Perseroan melalui peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan kepada *shareholders* dan *stakeholders* bahwa pengurusan dan pengawasan Perseroan dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Perseroan.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja Perseroan.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien.
8. Mengoptimalkan hubungan *risk return* yang konsisten dengan strategis Perseroan.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Perseroan didasari prinsip-prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Perseroan yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.
11. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Penerapan GCG Perseroan untuk tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan GCG Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi diikuti oleh Seluruh Pekerja BRI Selindo dalam Forum Peningkatan Kinerja
2. Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 telah dilaksanakan 40 (empat puluh) hari kalender sebelum tanggal RUPS sesuai Rekomendasi *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014 dimana paling lambat Pemanggilan RUPS Tahunan dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS Tahunan.
3. Pada Pemanggilan RUPS telah disampaikan rincian penjelasan masing-masing mata acara RUPS sesuai Rekomendasi *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan POJK No. 32/POJK.04/2014.
4. Publikasi Anti Gratifikasi pada harian *Investor Daily*, *Bisnis Indonesia* dan *Media Indonesia* pada bulan Mei 2020 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri serta pada bulan Desember 2020 dalam rangka Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
5. Pelaksanaan pendidikan pekerja dengan materi GCG, *Anti Fraud*, Pengendalian Gratifikasi, APU PPT serta Budaya Kepatuhan kepada seluruh Pekerja Perseroan melalui *in-class*, sosialisasi maupun *e-learning*.
6. Penyampaian Laporan Tahunan 2020 dilakukan sebelum akhir bulan ke empat setelah tahun buku berakhir, telah sesuai dengan POJK No.29/POJK.04/2016.
7. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG Tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan POJK No.55/2016 dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017.
8. Pelaksanaan *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Penyampaian Laporan fungsi Pelaksanaan *Corporate Secretary* kepada Direksi yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 35 /2014
10. Predikat "*Most Trusted Company*" dengan skor 93.25 dalam *Corporate Governance Perception Index* yang diselenggarakan oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)
11. *Top 3 PLCs Indonesia* dengan skor 110.20 dalam pemeringkatan *Asean Corporate Governance Score- card* (ACGS) oleh Asean Capital Market Forum (ACMF)
12. Top 3 Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

BRI memiliki struktur tata kelola, diantaranya:

1. Anggaran Dasar BRI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021.

2. Surat Keputusan Direksi BRI No: KB.2-DIR/KPD/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Kebijakan Arsitektur & Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur.
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/ DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal Kode Etik BRI.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris
5. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: B.299-DIR/SKP/04/2020 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 11-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:12-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:13-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:14-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No: 02-KOM/02/2020 dan Nokep .01-DIR/KPT/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan Nokep: S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Keuangan.
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09 KOM/BRI/11/2017 dan Nokep: S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Kebijakan Tata Kelola Remunerasi BRI.
13. Surat Edaran Direksi BRI No: SE.32-DIR/KEP/07/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Whistleblowing System
14. Surat Edaran Direksi BRI No:SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyusutan dan Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
15. Surat Edaran Direksi BRI No: SE.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Strategi Anti Fraud BRI.
16. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 perihal Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG, maka pada tahun 2021 BRI telah menyusun rencana kerja yang secara umum mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Corporate Governance Guideline BRI
2. Pengkinian arsitektur tata kelola kebijakan
3. Pengkinian dan review kebijakan & prosedur
4. Penguatan data Governance BRI
5. Penguatan Teknologi Informasi dan Sekuriti Teknologi Informasi
6. Penguatan Implementasi Corporate Value dan BUMN Value

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris secara kolegal melakukan pengawasan terhadap fungsi pengelolaan Perseroan. Peran Dewan Komisaris mencakup aktivitas memberikan nasehat dan arahan kepada Direksi atas penerapan kebijakan-kebijakan Perseroan dalam melaksanakan aktivitas usaha sesuai strategi dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan.

Komisaris Utama:

1. Memimpin pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring atas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya yang meliputi:

1. Pengawasan pasif, yaitu melalui telaah atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Manajemen, surat-surat yang diterima dari OJK, Bank Indonesia dan lembaga lain serta informasi lain yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya.
2. Pengawasan aktif, yaitu melalui forum rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Komite Komisaris bersama Direktur dan pejabat terkait, rapat dengan auditor eksternal dan pihak ketiga lainnya, serta melalui kunjungan kerja ke Unit Kerja.

Strategi dan Kebijakan

Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk:

- Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS.
- Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan, serta memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diminta.

Manajemen risiko

Melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko dengan menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Umum Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Perseroan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Kepatuhan

Memberitahukan kepada regulator mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan, yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/ atau oleh Direktur Kepatuhan kepada regulator serta melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

- a. Melaksanakan keputusan RUPS.
- b. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
- c. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
- d. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Perseroan dan di perusahaan lain, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi.
- e. membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan Keuangan, sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- f. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
- g. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal.
- h. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

- a. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktik yang umum berlaku bagi perusahaan.
- b. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
- c. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

- a. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Perseroan.
- b. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
- c. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Perseroan, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Ruang Lingkup Pekerjaan Masing-Masing Direksi

Direktur Utama

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan. sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Keuangan

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Keuangan;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Kepatuhan

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Kepatuhan;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Manajemen Risiko

Menjalankan tugas dan wewenang dalam :

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Manajemen Risiko;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Direktur Digital dan Teknologi Informasi

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Digital dan Teknologi Informasi;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Human Capital

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat *Human Capital*;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Bisnis Mikro

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Bisnis Mikro;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Konsumer

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Konsumer;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Bisnis Kecil dan Menengah;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN

Menjalankan tugas dan wewenang dalam :

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Hubungan Kelembagaan dan BUMN;

- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direktur Jaringan dan Layanan

Menjalankan tugas dan wewenang dalam:

- mengarahkan strategi dan rencana kerja Perseroan;
- memimpin seluruh Divisi dan Desk yang berada dibawah kewenangan Direktorat Jaringan dan Layanan;
- mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjamin usaha dan kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Komite Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp8.817 juta, Rp127.218 juta dan Rp133.190 juta untuk Dewan Komisaris dan Rp8.538 juta, Rp370.839 juta dan Rp380.255 juta untuk Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, *business size*, dan hasil survei remunerasi dalam industri perbankan. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.

Perseroan tidak memberikan kontrak terkait tunjangan pasca kerja untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun mengikutsertakan anggota Dewan Komisaris ke dalam program Asuransi Purna Jabatan sejak anggota Dewan yang bersangkutan dinyatakan lulus uji *fit and proper test* oleh OJK.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam website serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, di antaranya:

1. POJK No. 35/2014.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/ MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perseroan

Nama : Aestika Oryza Gunarto
Alamat : Gedung BRI I, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Nomor Telepon : (021) 251-0244
Nomor Faksimili : (021) 250-0065
Alamat E-mail : humas@corp.bri.co.id

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan surat Keputusan Direksi No. Keputusan 524-DIR/HCB/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris Surat No. SR.30-KOM/08/2020 tanggal 5 Agustus 2021 perihal persetujuan pengangkatan EVP Corporate Secretary Division BRI. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Gelar Magister Management dari Universitas Pajajaran Bandung.

Sebelum menjabat sebagai sekretaris Perseroan, beliau telah menjabat berbagai posisi antara lain:

2019 – 2020 : Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis, Kantor Wilayah Semarang
2019 – 2019 : Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis, Kantor Wilayah Makassar
2016 – 2019 : Wakil Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Biro Direksi
2015 – 2016 : Pj. Kepala Biro Direksi, Biro Direksi Kantor Pusat
2014 – 2015 : Pemimpin Cabang Jakarta Jatinegara

Divisi Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyempurnaan strategi *Corporate Secretary*; penyusunan, implementasi dan evaluasi strategi komunikasi Perseroan, penyusunan, implementasi dan evaluasi program *event/ pameran* dan pemberian *sponsorship* Perseroan; pengelolaan hubungan masyarakat/*media relation*; *pengelolaan Corporate Social Responsibility* dan bina lingkungan; serta pengelolaan fungsi kesekretariat Perusahaan, protokoler, dan pelayanan intern Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam rangka mewujudkan target kinerja dan *corporate image* Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan dengan perincian tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Penyusunan implementasi dan evaluasi strategi & kegiatan kehumasan, seperti namun tidak terbatas pada mengkomunikasikan informasi kepada pihak yang berkepentingan secara langsung atau melalui media cetak maupun elektronik, mengelola isu-isu yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap Perseroan dan program/event/pameran, pemberian sponsorship sebagai salah satu perwujudan dalam rangka meningkatkan corporate image Perseroan.
- b. Penyusunan, implementasi dan evaluasi strategi dan kegiatan CSR dan Bina Lingkungan dalam rangka kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sosial masyarakat dan meningkatkan corporate image Perseroan.
- c. Penyelenggaraan RUPS / RUPSLB, Rapat Direksi Komisaris dan Rapat Direksi, forum internal dan eksternal.
- d. Penyusunan, analisis dan evaluasi kebijakan terkait pemberian layanan hak-hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP serta aktivitas kesekretariatan untuk memastikan terpenuhi hak dan fasilitas Komisaris, Direksi dan SEVP tersebut serta penyelenggaraan kesekretariatan Perseroan.
- e. Penatakerjaan dan pengadministrasian aktivitas kesekretariatan, administrasi dan dokumentasi Perseroan (Peraturan Pemerintah, Peraturan Pasar Modal dan Peraturan lainnya yang terkait Anggaran Dasar Perseroan)
- f. Pelaksanaan dan evaluasi protokoler seluruh aktivitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
- g. Sebagai *spoke person* Perseroan.

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Januari 2020 : Excellence Performance Leadership, Semarang.
- Juni 2020 : BRILiaN Shine “Agile Leadership For The New Normal”, *e-learning*.
- Juli – September 2020 : Pembekalan ujian sertifikasi CWM (level 1-7), *e-learning*.
- Juli – Oktober 2020 : Ujian sertifikasi CWM (level 1-7), *e-learning*.

Komite Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit Perseroan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 195-DIR/HCB/04/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. R.21-KOM/03/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	Hendrikus Ivo (Komisaris Independen) Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Ari Kuncoro (Komisaris Independen)* <i>*Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah mengumumkan perihal pengunduran diri ini pada situs web BEI pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tanggal 22 Juli 2021.</i>
Anggota	Rofikoh Rokhim (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	R. Widyo Pramono (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Zulnahr Usman (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Audit dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.

Anggota (Pihak Independen)	<p>Pamuji Gesang Raharjo</p> <p>Lahir di Jakarta, 10 April 1968. Menjabat anggota Komite Audit sejak 2016. Sebelumnya berkarir sebagai anggota komite pemantauan manajemen risiko. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta pada tahun 1996, Magister dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dan <i>Doctor in Business & Management</i> dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2014.</p>
Anggota (Pihak Independen)	<p>Sunuaji Noor Widiyanto</p> <p>Lahir di Yogyakarta, 1 Januari 1960. Menjabat anggota Komite Audit sejak 2016. Sebelumnya berkarir di Perseroan, pernah menjabat sebagai Inspektur di Kantor Inspeksi Perseroan Yogyakarta (2014 – 2016) dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat Perseroan (2012 – 2014). Yang bersangkutan pernah juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BRI Nasional selama 2 (dua) periode (2006 – 2012). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1996).</p>
Anggota (Pihak Independen)	<p>Irwanto</p> <p>Lahir di Padang, 30 Maret 1962. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 2021. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Andalas (1988) dan gelar Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000). Yang bersangkutan juga pernah berkarir dengan berbagai posisi khususnya dibidang pengaturan dan pengawasan bank serta sistem pembayaran di Bank Indonesia sejak tahun 1994, adapun posisi terakhir adalah sebagai Peneliti Eksekutif pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Sebelum bergabung dengan Perseroan tahun 2021, yang bersangkutan pernah memiliki pengalaman menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada bank asing.</p>
Anggota (Pihak Independen)	<p>Sahat Pardede</p> <p>Lahir di Balige, 24 Agustus 1963. Menjabat anggota Komite Audit sejak 2020. Sebelumnya berkarir sebagai SKK Migas Supervisory Commission (2013), Member of the Audit Committee (2018), Public Accounting Firm Ghazali, Sahat and Partners (2001), Financial Expert of PT Telekomunikasi Indonesia (2004) dan Member of the Risk and Compliance Committee of Bank BNI (2006). Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari State College of Accountancy (1989) dan gelar MBA dari Saint Mary's University.</p>

Penetapan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2016 dan POJK No. 55/2015.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit baik internal maupun eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap (a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern, (b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku, (c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan (d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, kantor akuntan publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hasil pengawasan BPK RI;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain antara lain laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Menelaah pengaduan, baik yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya;
6. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait (a) Laporan Perseroan kepada OJK tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern, (b) pengangkatan dan pemberhentian Satuan Kerja Audit Intern.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
10. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Penetapan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. B.120-KOM/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020, dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 546-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua	R. Widyo Pramono (Komisaris Independen) Riwayat hidup Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Sekretaris	Rofikoh Rokhim (Komisaris Independen) Riwayat hidup Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Kartika Wirjoatmodjo (Komisaris Utama) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Ari Kuncoro (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)* <i>*Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah mengumumkan perihal pengunduran diri ini pada situs web BEI pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tanggal 22 Juli 2021.</i>
Anggota	Nicolaus Teguh Budi Hardjanto (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Hadiyanto (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Hendrikus Ivo (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Rabin Indrajad Hattari (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Zulnihar Usman (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	E. R. A. Taufiq, Kepala Divisi Human Capital Business Partner Kantor Pusat Perseroan – pejabat ex-officio Lahir di Bandung, 13 Mei 1967, memperoleh gelar Sarjana Hukum gelar dari Universitas Parahyangan. Selama bekerja di Perseroan, dia menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Karir Manusia dalam Divisi Kebijakan & Pengembangan Modal, Wakil Kepala Divisi Karir & Budaya, Kebijakan & Pengembangan Sumber Daya Manusia Divisi, dan Wakil Presiden Eksekutif Sumber Daya Manusia Divisi Mitra Bisnis.

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2016 dan POJK No. 34/2014.

Panduan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat keputusan Dewan Komisaris No: B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.
2. Fungsi Remunerasi
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. R.21-KOM/03/2021 tanggal 9 Maret 2021, dan selanjutnya diangkat oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 194-DIR/HCB/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Ari Kuncoro (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)* <i>*Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah mengumumkan perihal pengunduran diri ini pada situs web BEI pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tanggal 22 Juli 2021.</i>
Anggota	Kartika Wirjoatmodjo (Komisaris Utama) Riwayat hidup Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Nicolaus Teguh Budi Harjanto (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Rabin Indrajad Hattari (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Rofikoh Rokhim (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.

Anggota	Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Hadiyanto (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota (Pihak Independen)	Bintoro Nurcahyo Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan sejak Januari 2020. Sebelumnya bekerja di Perseroan dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President Divisi Portofolio Enterprise dan Manajemen Risiko. Memperoleh gelar Bachelor of Economics in Accounting dari UGM (1988) dan MBA Banking & Finance dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University USA (1998).
Anggota (Pihak Independen)	Sigid Sudahno Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan sejak Januari 2020. Sebelumnya bekerja di Perseroan dengan jabatan terakhir sebagai Vice President of Enterprise dan Divisi Portofolio Manajemen Risiko. Meraih gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari UGM (1988) dan Magister Manajemen dari University of Padjajaran (2000).

Penetapan dan pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 55/2016. Panduan Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko telah disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat keputusan Dewan Komisaris No: B.12-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengawasan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan;
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan;
4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/ atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan;
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan *Strategi Anti Fraud* Perseroan;
7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan;
8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang terkait penggunaan Teknologi Informasi paling kurang setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan;
9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank;
10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris;
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 56/2015 dan No.1/POJK.03/2019, sesuai Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan No. 05-KOM/BRI/05/2019 dan Nokep S.348-DIR/SAI/05/2019 tanggal 31 Mei 2019.

Unit Audit Internal, sebagaimana di dalam Perseroan disebut Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") telah dibentuk sesuai dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum yaitu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Struktur Organisasi SKAI mengacu pada Struktur Organisasi BRI sesuai Nokep: S.06-DIR/CDS/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan dijabarkan melalui SK Direksi BRI sebagai berikut :

1. SK Direksi BRI Nokep: 222-DIR/HCS/05/2021 tanggal 6 Mei 2021.
2. SK Direksi BRI Nokep: 223-DIR/HCS/05/2021 tanggal 6 Mei 2021.
3. SK Direksi BRI Nokep: 224-DIR/HCS/05/2021 tanggal 6 Mei 2021.
4. SK Direksi BRI Nokep: 512-DIR/CDS/07/2018 tanggal 6 Juli 2018.

Kepala SKAI saat ini adalah Hari Siaga Amijarso yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: 431-DIR/KHC/07/2019 tanggal 2 Juli 2019. Atas pengangkatan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut adalah riwayat singkat Hari Siaga Amijarso:

Lahir di Surabaya, 9 Oktober 1965. Lulusan Universitas Brawijaya tahun 1989.

Pengalaman Profesional:

- SEVP SKAI (Juli 2019- saat ini)
- Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1 (Juli 2018 - 1 Juli 2019)
- Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta (2015-2017)
- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2015-2017)
- Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan (Agustus 2012- Oktober 2015)

Sejak 2 Juli 2019 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Senior Executive Vice President Satuan Kerja Audit Intern

Training:

Aktif mengikuti berbagai pelatihan dan seminar diantaranya Pendidikan dan Uji Sertifikasi QIA di Jakarta (2019), Management (BSMR) di London (2017), Uji Sertifikasi CFra di Jakarta (2020).

Tugas dan tanggung jawab SKAI paling sedikit meliputi :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit di semua level Unit Kerja BRI secara independen, objektif dan profesional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugas.
6. Menjadi *Liason Officer* bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi audit.

Lebih lanjut, tanggung jawab Kepala SKAI diatur dalam Piagam Audit Intern BRI yang mengacu pada POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan salah satu komite yang membantu Dewan Komisaris serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan. Komite Tata Kelola Terintegrasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan No. 06-KOM/BRI/07/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Ari Kuncoro (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)* <i>*Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah mengumumkan perihal pengunduran diri ini pada situs web BEI pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tanggal 22 Juli 2021.</i>
Anggota	Kartika Wirjoatmodjo (Komisaris Utama) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Nicolaus Teguh Budi Harjanto (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Rofikoh Rokhim (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Hendrikus Ivo (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Hadiyanto (Komisaris) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Zulnahr Usman (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota	Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen) Riwayat hidup Anggota Komite Tata Kelola Integrasi dapat dilihat pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Bab IX.3.
Anggota (Pihak Independen)	Suindiyo Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan sejak Desember 2015. Sebelumnya bekerja di Perseroan dalam berbagai posisi termasuk Executive Vice President untuk Audit, Wakil Presiden untuk Restrukturisasi dan Pemulihan Pinjaman, Wakil Presiden untuk Administrasi Perkreditan dan Wakil Presiden Pusdiklat. Beliau sebelumnya juga menjabat sebagai Komisaris Lembaga Keuangan Bukan Bank. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jember (1985) dan Magister Administrasi Bisnis Keuangan dari Institut Politeknik Virginia dan Universitas Negeri (1994).
Anggota (Pihak Independen)	Bintoro Nurcahyo Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan sejak Januari 2020. Sebelumnya bekerja di Perseroan dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President Divisi Portofolio Enterprise dan Manajemen Risiko. Memperoleh gelar Bachelor of Economics in Accounting dari UGM (1988) dan MBA Banking & Finance dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University USA (1998).
Anggota	Sumantri Suwarno (Komisaris Independen BRI Multi Finance) Pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (2002). Riwayat jabatan terakhir sebagai Komisaris PT Sirius Surya Sentosa dan Komisaris PT IPC TPK.
Anggota	Imam Sundoro (Komisaris Independen Bringin Sejahtera Artamakmur) Pendidikan Sarjana Ekonomi UPN Veteran (1989). Riwayat jabatan terakhir Inspektur BRI Yogyakarta (2018), Inspektur BRI Jayapura (2017) dan Wakil Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 3 (2016).
Anggota	Sumihar Manulang (Komisaris Independen Danareksa Sekuritas) Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada (1983), dan Magister International Business Temple University (1993). Riwayat Jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan BRI Multifinance Indonesia, Inspektur BRI Jakarta 2, Kepala Divisi Hukum BRI, dan Inspektur BRI Padang.

Anggota	Eko Wahyu Andriastono *
Anggota	Syukhandari *
Anggota	Hadi Susanto *
Anggota	Eko Suwardi**
Anggota	M. Gunawan Yasni**
Anggota	Anna Maria Tjiadarma*

*Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota-anggota tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Perseroan masih dalam proses untuk pergantian anggota tersebut.

** PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") tidak lagi menjadi anggota Konglomerasi Keuangan BRI sehingga tidak ada lagi perwakilan dari BSI

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu.
- Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi Perseroan terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi Perseroan.
- Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perseroan.

Komite dibawah Direksi

Komite Produk

Komite Produk adalah komite di Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan produk dan jasa existing, penghentian produk dan jasa existing, memutus produk dan jasa *bundling* di atas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk & jasa.

Tanggung Jawab:

Komite Produk memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan putusan atas usulan sebagai berikut:

- Perencanaan produk dan/atau aktivitas, diantaranya sebagai berikut: (a) ide perencanaan produk dan/atau aktivitas, (b) penentuan *product owner*, (c) pengesahan dalam penentuan produk dan/atau aktivitas baru.
- Pengembangan produk dan/atau aktivitas.
- Perubahan counter rate pinjaman, penetapan Suku Bunga Khusus (SBK).
- Penghentian produk dan/atau aktivitas (termasuk penghentian fitur).

Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tata Kelola Data

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional teknologi informasi.

Tanggung Jawab:

- Memberikan rekomendasi rencana strategik teknologi informasi jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan di dalam IT SP BRI.
- Merumuskan kebijakan, standar, prosedur teknologi informasi yang utama.
- Memastikan kesesuaian antara proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan IT SP BRI.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan proyek-proyek teknologi informasi agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*).
- Melakukan evaluasi kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen untuk operasional dan bisnis bank.
- Memantau efektivitas pengelolaan risiko atas investasi di bidang teknologi informasi agar investasi yang ditanamkan mampu berkontribusi optimal terhadap peneapaian tujuan bisnis BRI.
- Memantau performa sistem teknologi informasi dan memberikan rekomendasi upaya peningkatannya.
- Memberi rekomendasi upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna teknologi informasi dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, tepat waktu.
- Memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kecukupan atas alokasi resources yang dimiliki BRI.

Komite Tata Kelola Data

Komite Tata Kelola Data adalah suatu forum yang memberikan arahan terkait data governance, serta memberikan putusan terkait dengan leading issue pada data yang tidak dapat diselesaikan di level *Data Owners* dan *Data Stewards* maupun di level *Data Management Office*.

Tanggung Jawab:

- Memastikan kebutuhan data seluruh *stakeholders* Perseroan dapat dipenuhi.
- Memastikan proteksi terhadap data sebagai aset strategik Perusahaan.
- Mengarahkan pelaksanaan kebijakan & standar data untuk menegakkan kerangka kerja proses data *governance* yang baik, dan kualitas data secara *enterprise*.
- Memastikan aspek privasi dan kerahasiaan data nasabah dan Perseroan terlindungi.
- Memastikan tidak adanya akses data yang ilegal, manipulasi data serta penggunaan data dan informasi yang tidak sesuai.
- Memastikan data agar dapat digunakan secara efektif serta mendatangkan *value* bagi Perseroan.
- Mengarahkan dan memutuskan solusi dari masalah-masalah yang dieskalasi ke Komite Tata Kelola Data.

Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Komite yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan pelaksanaan dan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

Tanggung Jawab:

- Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, obyektif, akuntabel dan seksama.
- Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian persetujuan pengadaan.
- Mengevaluasi, memberi masukan atas usul pengadaan yang diajukan.
- Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya dalam hal diselenggarakan melalui rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
- Memberikan putusan pengadaan, melalui :
 - Risalah Rapat Direksi, atau
 - Risalah Rapat Komite Pengadaan Barang dan Jasa, atau
 - Nota Dinas Sirkuler.

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan Perseroan dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Tanggung Jawab:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) OJK.
- Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penuh kesinambungan serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
- Melakukan *review* berkala Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Perseroan minimal 3 tahun sekali.
- Melakukan evaluasi terhadap:
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana.
 - Kebenaran menjalankan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit, dari kredit yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Perseroan dan Debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
 - Kecukupan penyisihan cadangan kerugian karena penurunan nilai kredit (CKPN) dan cadangan penghapusbukuan.
 - Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar Kredit Dalam Perhatian Khusus.
- Melakukan kajian menilai efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
- Menyampaikan laporan berkala minimal 1 tahun sekali dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan/tindakan kepada Komisararis mengenai:
 - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
 - Hasil evaluasi hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab di atas.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

Komite Human Capital

Merupakan Komite yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang *Human Capital*.

Tanggung Jawab:

Bidang kebijakan *Human Capital*:

- Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas *human capital* Perseroan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* Perseroan.
- Menetapkan kebijakan strategis di bidang *human capital*.
- Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.

Bidang *Human Capital Planning*:

- Menetapkan perencanaan jumlah formasi jabatan dan strategi pemenuhan formasi jabatan.

Bidang *Talent*:

- Penetapan mutasi (promosi, rotasi, demosi) Pekerja, termasuk penetapan kepengurusan Perusahaan anak dan Terafiliasi.
- Penetapan *Talent Cluster*, termasuk identifikasi dan penetapan *top talent (Brilian Society Member)* level Board of Directors-1 (BOD-1) sampai dengan BOD-4.
- Penetapan *Succession Plan* untuk seluruh jabatan.
- Penetapan *Talent Pool* berdasarkan bidang keahlian pekerja.
- Melakukan *Talent Review*.

Bidang *Performance Management*:

- Menetapkan KPI Direktorat, Unit Kerja 1 Level di bawah Direksi (termasuk Kantor Wilayah) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRI Unit.
- Mengevaluasi tantangan kinerja Unit Kerja 1 Level di bawah Direksi (termasuk Kantor Wilayah) dan Kantor Cabang.
- Mengevaluasi Orientasi Leader Pemimpin Unit Kerja 1 Level di bawah Direksi (termasuk Kantor Wilayah), *Department Head* Kantor Pusat, *Regional Head* di Kantor Wilayah dan Pemimpin Cabang.

Bidang Etik:

- Memutus kasus pelanggaran disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa dan/atau forum pembahasan kasus pelanggaran (Forum PKP).

Bidang Evaluasi Jabatan:

- Mereview, merekomendasi dan menetapkan golongan jabatan.

Komite Capital and Investment

Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Tanggung Jawab:

- Melakukan *review* atas langkah korporasi yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
- Menetapkan dan merekomendasikan langkah korporasi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.
- Menetapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak, termasuk *key performance indicator* dan rencana dividen Perusahaan Anak.
- Melakukan *review* kinerja dan menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja bersama Direksi Perusahaan Anak.
- Mengevaluasi dan merekomendasikan langkah korporasi Perusahaan Anak Perseroan untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui rapat Direksi maupun secara sirkuler.
- Menetapkan putusan apabila terjadi *deadlock* inisiatif sinergi Perusahaan Anak Perseroan yang bersifat strategis.

Komite Asset and Liability

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

Tanggung Jawab:

- Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan serta menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset and liability* yang optimum dengan memperhatikan *potential risk*, *optimum yield generation* dan *cost efficiency*.

- Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), *fund transfer price* (FIP) dan *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian *net interest income* (NII).
- Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga khusus simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
- Menentukan kebijakan *net open position* (NOP).
- Memonitor bahwa pengelolaan asset and liability di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.

Komite Risk Management and Environmental, Social, Governance

Risk Management Committee (RMC) adalah komite yang bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko.

Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi adalah komite yang bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko secara terintegrasi.

Environmental, Social, Governance (ESG) adalah Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan, penerapan, dan monitoring strategi, kebijakan, dan program/inisiatif ESG.

Tanggung Jawab RMC:

- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
- Merekomendasikan penetapan limit dan perubahannya.
- Menyampaikan laporan Profil Risiko dan hasil pemantauan risiko serta apabila diperlukan rekomendasi perubahan.

Tanggung Jawab RMC Terintegrasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan atas penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.
- Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempumaan kepada Direksi Perseroan dan Direksi Perusahaan Anak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi, laporan Profil Risiko individual Perusahaan Anak serta hasil pemantauan risiko kepada Direksi Perseroan.
- Menyampaikan analisa permodalan Terintegrasi serta rencana penyertaan modal kepada anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.
- Menyampaikan simulasi stress testing Terintegrasi dan/atau individual serta contingency plan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal kepada Direksi Perseroan.

Tanggung Jawab ESG:

- Melakukan review dan evaluasi terkait implementasi kebijakan atau tata kelola (*governance*) parameter inisiatif ESG yang telah disusun oleh Unit Kerja terkait yang kemudian diusulkan oleh Tim Penunjang Komite;
- Menetapkan dan merekomendasikan eksisting program kerja untuk dikategorikan sebagai inisiatif ESG sesuai dengan parameter yang ada kepada ESG *Committee* maupun persetujuan sirkuler;
- Melakukan review dan evaluasi terkait implementasi program kerja yang masuk ke dalam parameter inisiatif ESG serta pelaporan data dan informasi terkait ESG;
- Melakukan review atas laporan ESG Rating, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG di Perseroan;
- Merekomendasikan isu material yang didapat dari hasil review atas laporan ESG Rating, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG Perseroan;
- Menetapkan rencana tindak lanjut atas hasil *review* dan evaluasi untuk kemudian dapat diusulkan menjadi program kerja baru yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait;
- Memberikan informasi terkini kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai seluruh isu yang terus berkembang terkait ESG, termasuk peraturan perundang-undangan, inisiatif global, praktek bisnis, serta informasi penting lain terkait ESG;

Komite Kredit

Merupakan Komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Tanggung Jawab:

- Memberikan persetujuan atau penolakan kredit (baru, tambahan, penurunan dan atau perpanjangan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, penyelesaian/ penyelesaian kredit, ekstrakomtabel, termasuk memutus Aktiva yang Diambil Alih (AYDA), hapus buku serta hapus tagih kredit) sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi.
- Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas atau diluar asas-asas perkreditan yang sehat.
- Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite kredit.

5. Sumber Daya Manusia

Human Capital Perseroan, dalam hal ini Pekerja dan seluruh insan Perseroan, merupakan aset utama Perseroan untuk bersama-sama mewujudkan visi Perseroan menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion* di tahun 2025.

Perseroan berkomitmen untuk selalu mengembangkan *human capital* agar senantiasa menjadi tulang punggung usaha yang kompeten dan berintegritas. Untuk itu selaras dengan dinamika era digital saat ini, Perseroan senantiasa melakukan transformasi baik dari sisi bisnis maupun pengelolaan *human capital*. Peningkatan kompetensi Pekerja baik *hard competency* maupun *soft competency* merupakan prioritas utama yang dilakukan Perseroan dalam mempersiapkan *Brilian Leader*.

Secara garis besar, untuk mewujudkan perjalanan digitalisasi Perseroan, seluruh layanan kepada Pekerja telah diberikan melalui media berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat. Wujud komitmen Perseroan dalam mengembangkan *human capital* ini telah dibuktikan dengan diraihnya sertifikasi ISO 9001:2015. Hal ini memastikan bahwa sistem pengelolaan data, komunikasi, serta pembayaran kompensasi dan benefit *human capital* telah berjalan sesuai dengan manajemen mutu yang baik.

Profil SDM

Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Karyawan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pekerja Tetap	61.424	62.388	61.496
Pekerja Kontrak	24.024	25.696	29.852
<i>Trainee</i>	191	100	272
<i>Outsourcing</i>	31.953	32.913	33.982
Jumlah	117.592	121.097	125.602

Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Jenjang Jabatan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<i>Senior Executive Vice President</i>	5	5	4
<i>Executive Vice President</i>	101	105	109
<i>Vice President</i>	208	189	177
<i>Assistant Vice President</i>	413	386	345
<i>Senior Manager</i>	815	841	788
<i>Manager</i>	1.736	1.629	1.532
<i>Assistant Manager</i>	5.001	5.125	5.277
<i>Officer</i>	13.033	13.169	12.574
<i>Assistant</i>	64.327	66.735	70.814
Jumlah	85.639	88.184	91.620

Jumlah Pekerja Berdasarkan Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Strata 3	9	13	17	
Strata 2	1.528	1.527	1.317	
Strata 1	71.317	74.201	77.767	
Diploma	11.061	10.909	10.564	
SLTA / Setingkat atau di bawahnya	1.724	1.534	1.955	
Jumlah	85.639	88.184	91.620	

Jumlah Pekerja Berdasarkan Usia

Jenjang Usia	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Di bawah 25 tahun	2.637	3.280	5.931	
25 – 30 tahun	28.190	30.325	36.617	
31 – 35 tahun	30.755	30.451	26.116	
36 – 40 tahun	10.299	10.247	9.449	
41 – 45 tahun	5.638	5.496	4.619	
46 – 50 tahun	3.545	3.718	4.129	
Di atas 50 tahun	4.575	4.667	4.759	
Jumlah	85.639	88.184	91.620	

Jumlah Pekerja Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
PT (Peserta pens.)	61.424	62.388	61.253	
Kontrak <i>Teller/CS</i> – Pekerja Kontrak	24.024	25.696	30.095	
<i>Trainee</i>	191	100	272	
Jumlah	85.639	88.184	91.620	

Jumlah Pekerja Menurut Lokasi

Lokasi	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Audit Intern	709	725	2.174	
Kantor Anak Perusahaan	100	141	85	
Kantor Bank Syariah	10	777	82	
Kantor Cabang Khusus	167	169	172	
Kantor Cabang Luar Negeri	38	36	39	
Kantor Pusat	3.367	3.241	3.270	
Kantor Wilayah Banda Aceh	130	1.077	1.830	
Kantor Wilayah Bandung	8.389	8.581	9.037	
Kantor Wilayah Banjarmasin	4.331	4.401	4.470	
Kantor Wilayah Denpasar	4.813	4.851	4.871	
Kantor Wilayah Jakarta 1	2.857	2.881	2.884	
Kantor Wilayah Jakarta 2	4.173	4.223	4.357	
Kantor Wilayah Jakarta 3	4.199	4.269	4.450	
Kantor Wilayah Jayapura	1.585	1.614	1.641	
Kantor Wilayah Lampung	2.710	2.731	2.790	
Kantor Wilayah Makassar	5.249	5.327	5.404	

Lokasi	31 Maret	31 Desember	
Kantor Wilayah Malang	7.291	7.364	7.596
Kantor Wilayah Manado	3.214	3.283	3.333
Kantor Wilayah Medan	4.601	4.471	4.545
Kantor Wilayah Padang	2.216	2.241	2.272
Kantor Wilayah Palembang	3.429	3.470	3.531
Kantor Wilayah Pekanbaru	2.865	2.907	2.999
Kantor Wilayah Semarang	6.375	6.452	6.595
Kantor Wilayah Surabaya	4.992	5.040	5.120
Kantor Wilayah Yogyakarta	7.829	7.912	8.073
Jumlah	85.639	88.184	91.620

Jumlah Pekerja Berdasarkan Gender

Gender	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Wanita	36.277	37.354	39.323
Pria	49.362	50.830	52.297
Jumlah	85.639	88.184	91.620

Serikat Pekerja

Terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja di perusahaan dengan nama Serikat Pekerja Bank BRI (SP BRI) yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Serikat Pekerja Perseroan telah terdaftar pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan nomor bukti pencatatan: 357/I/P/V/2005 tanggal 17 Mei 2005.

Beberapa hal yang dilakukan Perseroan guna menjaga keharmonisan hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja di antaranya diwujudkan dengan:

1. Pada tahun 2019 telah dilakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan bersama Serikat Pekerja dan telah disepakati sebagai PKB periode 2019-2021. Dokumen PKB tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan Forum Kerja Sama Bipartit sebagai sarana mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Perusahaan terbaru, selain itu forum juga sebagai sarana menampung segala aspirasi/usulan dari Pekerja, dan juga sebagai sarana koordinasi antara manajemen Perusahaan dengan Pekerja sehingga perselisihan atau permasalahan yang mungkin timbul di Unit Kerja dapat dideteksi lebih dini.
3. Pelaksanaan pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan Manajemen Tingkat Pusat.
4. Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan *level of engagement* Pekerja terhadap Perusahaan dan melakukan bentuk komunikasi lain seperti dalam kegiatan ibadah, sosial, olah raga, seni, dan kegiatan lain yang melibatkan Pekerja.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal secara menyeluruh telah diimplementasikan melalui:

- a) Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO
Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian internal sesuai dengan COSO IC *framework* (*Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information & Communication and Monitoring*).
- b) *Internal Environment*
Dalam melakukan pengawasan, manajemen Perseroan membentuk budaya pengendalian meliputi:
 1. Pembentukan struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan sumber daya manusia mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
 3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* dan Kode Etik Perseroan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja.
 4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.
- c) *Objective Setting*
Perseroan telah menerapkan *objective setting* melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) pada setiap unit kerja yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. KPI disosialisasikan kepada pekerja dan direview secara berkala untuk mencapai target dan sasaran Perseroan.

- d) *Event Indication*
 Perseroan telah menerapkan *Risk Control Self Assessment (RCSA)* dalam identifikasi kejadian dan risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penerapan RCSA dilakukan oleh seluruh unit kerja Perseroan dalam penetapan profil risiko unit kerja tersebut atas kejadian dan risiko yang dihadapi untuk dilakukan evaluasi.
- e) *Risk Assessment*
 Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, Perseroan melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko.
- f) *Risk Response*
 Manajemen melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko Perseroan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan Perseroan.
- g) *Control Activities*
 Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di Perseroan. Aktivitas pengendalian dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja Perseroan di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Perseroan. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
- Penerapan fungsi MCS (*maker, checker, signer*) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
 - Penerapan *segregation of duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
 - Penerapan *three line of defense* untuk aktivitas pertahanan berlapis.
- h) *Information and Communication*
 Perseroan telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.
- i) *Monitoring*
 Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektifitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. *Monitoring* system pengendalian intern Perseroan dilakukan melalui *Three Line of Defenses*.

Pelatihan dan Pengembangan

Dalam rangka peningkatan kualitas *human capital* Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja unggul, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah melakukan pembaruan kebijakan Pendidikan Sertifikasi bagi Pekerja.

Dalam kebijakan ini Pekerja didorong untuk lebih mudah mengambil sertifikasi di bidang pekerjaannya masing-masing, sehingga keahlian atau kompetensi Pekerja di bidang tersebut telah memenuhi standar industri atau diakui oleh lembaga/institusi bidang keahlian tersebut.

Pada 31 Maret 2021, Perseroan telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Program Pendidikan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<i>Development</i>	705	8.018	13.350
<i>Enhancement</i>	13.393	160.571	115.961
FPK/FGD	5.783	68.087	122.889
Sosialisasi	5.624	33.916	112.096
Jumlah	25.505	270.592	354.296
E-learning	667.895	5.003.522	3.866.907

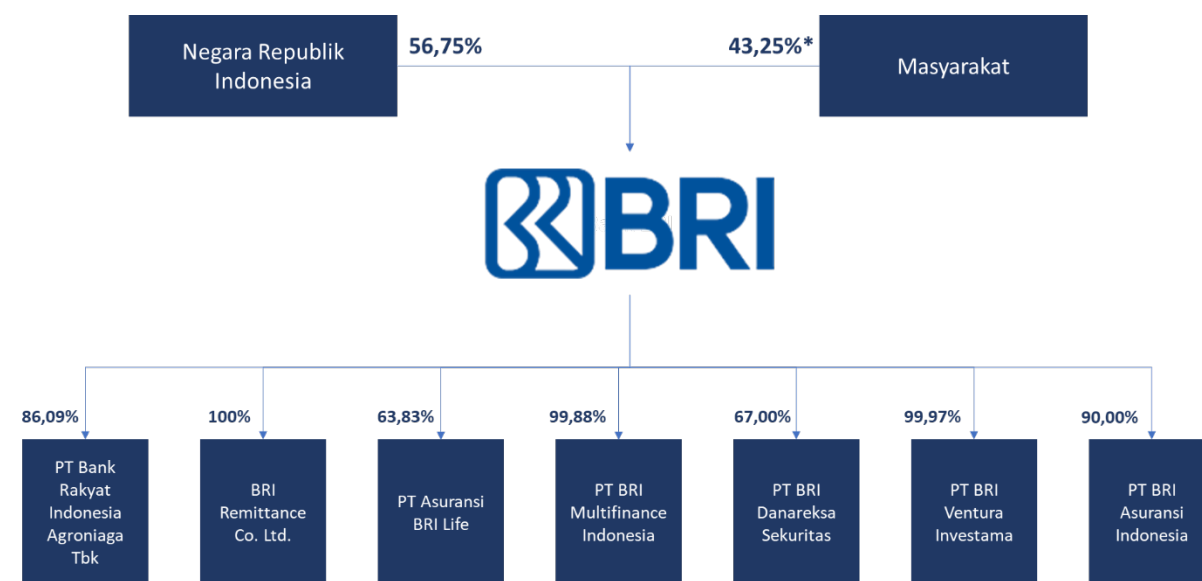
Biaya pendidikan dan pengembangan *human capital* Perseroan sampai 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp342,079 miliar. Perseroan berhasil melakukan efisiensi biaya pendidikan sebesar 50,9% dengan biaya per pekerja sebesar Rp65.000 per peserta melalui implementasi teknologi (*e learning*).

Adapun program-program pengembangan HC meliputi:

- BRILian Banking Officer Program (BBOP)
- BRILian Future Leader Program (BFLP)
- BRILian Next Leader Program (BLNP)
- BRILian Leader Development Program (BLDP)
- BRILian Specialist Development Program (BSDP)
- BRILian Global Leader Program (BGLP)
- BRILian Society Elite Program (BSEP)
- BRILian Bright Scholarship Program (BBSP)
- BRILian Leader Retirement Program (BLRP)

6. Struktur Kepemilikan Perseroan

Struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

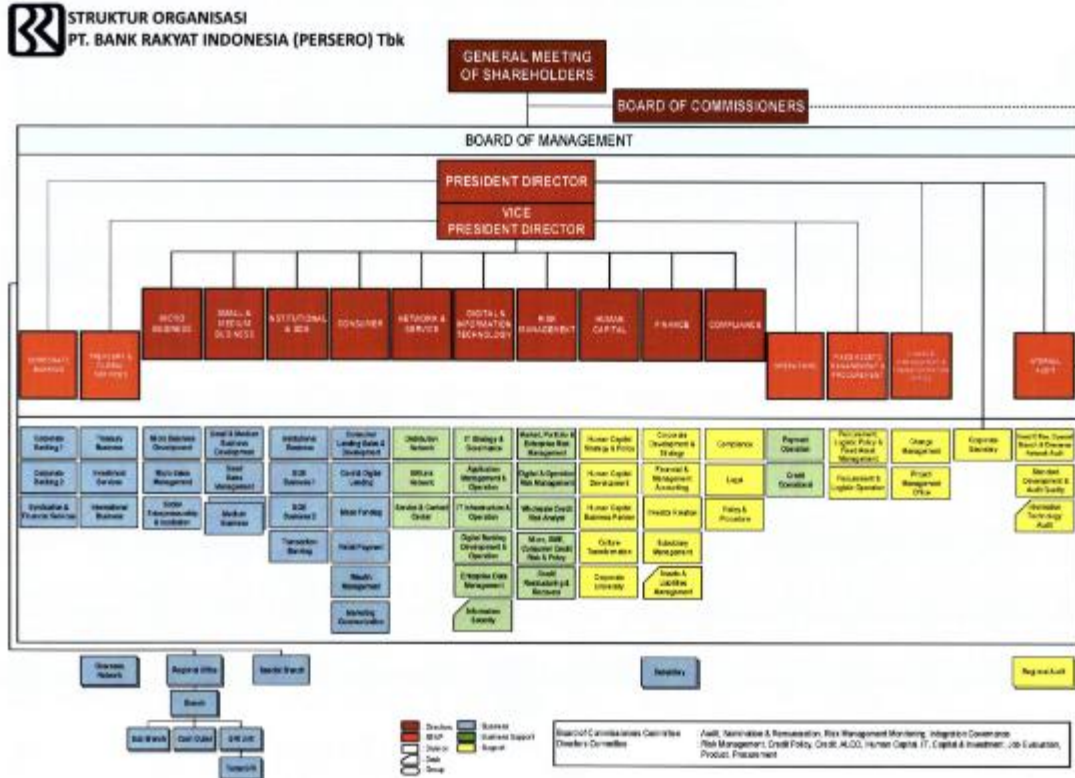


*Termasuk saham treasury

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia.

7. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



8. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Perusahaan Anak

Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak (>50%)

Nama	Perseroan	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk						
		BRI Agroniaga	BRI Remittance Co. Ltd.	PT Asuransi BRI Life	PT BRI Multifinance Indonesia	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Ventura Investama	PT BRI Asuransi Indonesia
Kartika Wirjoatmodjo	KU	-	-	-	-	-	-	-
Ari Kuncoro*	WKU/KI	-	-	-	-	-	-	-
Hendrikus Ivo	KI	-	-	-	-	-	-	-
Zulnahr Usman	KI	-	-	-	-	-	-	-
R. Widyo Pramono	KI	-	-	-	-	-	-	-
Rofikoh Rokhim	KI	-	-	-	-	-	-	-
Dwi Ria Latifa	KI	-	-	-	-	-	-	-
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	K	-	-	-	-	-	-	-
Hadiyanto	K	-	-	-	-	-	-	-
Rabin Indrajad Hattari	K	-	-	-	-	-	-	-
Sunarso	DU	-	-	-	-	-	-	-
Catur Budi Harto	WDU	-	-	-	-	-	-	-
Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	D	-	-	-	-	-	-	-
Agus Noorsanto	D	-	-	-	-	-	-	-
Amam Sukriyanto	D	-	-	-	-	-	-	-
Indra Utoyo	D	-	-	-	-	-	-	-
Supari	D	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Perseroan	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	BRI Remittance Co. Ltd.	PT Asuransi BRI Life	PT BRI Multifinance Indonesia	PT BRI Danareksa Sekuritas	PT BRI Ventura Investama	PT BRI Asuransi Indonesia
Ahmad Solichin	D	-	-	-	-	-	-	-
Lutfiyanto								
Arga Mahanana Nugraha	D	-	-	-	-	-	-	-
Agus Sudiarto	D	-	-	-	-	-	-	-
Handayani	D	-	-	-	-	-	-	-
Agus Winardono	D	-	-	-	-	-	-	-

**Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Ari Kuncoro dari jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021. Perseroan telah mengumumkan perihal pengunduran diri ini pada situs web BEI pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai dengan surat Perseroan No. B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tanggal 22 Juli 2021.*

KU : Komisaris Utama
 WKU : Wakil Komisaris Utama
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 WDU : Wakil Direktur Utama
 D : Direktur

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing Perusahaan Anak.

9. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 7 (tujuh) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham, yaitu:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	86,09%	2011	Beroperasi
2.	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi
3.	PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa	63,83%	2015	Beroperasi
4.	PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan	99,88%	2016	Beroperasi
5.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	67,00%	2018	Beroperasi
6.	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
7.	PT BRI Asuransi Indonesia	Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak yang Dimiliki Langsung / Dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan (kepemilikan di atas 50%)

1. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("BRI Agro")

Pendirian dan Anggaran Dasar

BRI Agro didirikan berdasarkan Akta No. 27 tanggal 27 September 1989 dibuat dihadapan Raden Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10019.HT.01.01-TH.89 tanggal 28 Oktober 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2485/1989 tanggal 3 November 1989 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tanggal 1 Desember 1989, Tambahan No. 3303 ("Akta Pendirian BRI Agro").

Akta Pendirian BRI Agro tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar BRI Agro telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0427946 tanggal 13 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kemenkumham berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0122517.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021 (“Akta No. 07/2021”). Berdasarkan Akta No. 07/2021, para pemegang saham BRI Agro telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar BRI Agro sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal BRI Agro Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk Program *Management & Employee Stock Options Plan* sebanyak 249.376.451 lembar saham, sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor BRI Agro berubah menjadi 21.592.666.681 lembar saham.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BRI Agro, BRI Agro mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang Bank Umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRI Agro dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang;
 - c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasikan oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dan kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Agro, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
 - m. melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang;
 - n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau Perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, Perusahaan Efek, Asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan atau instansi yang berwenang;
 - o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau kegagalan pembiayaan lain, dengan syarat menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi yang berwenang;
 - p. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. melakukan jasa keuangan *commercial banking* dan *investment banking* lainnya.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008630.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048613.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 April 2017, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 35105 ("Akta No. 33/2017") *juncto* Akta No. 07/2021 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BRI Agro, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI Agro adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		(%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	18.589.384.692	1.858.938.469.200	86,09
2. Masyarakat	3.003.281.989	300.328.198.900	13,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.592.666.681	2.159.266.668.100	100,00
Saham Dalam Portepel	38.407.333.319	3.840.733.331.900	

Perizinan yang dimiliki

1. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/264/DPIP tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Agroniaga Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
2. Surat Keputusan No. 8/41/KEP.GBI/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia tentang Penunjukkan PT Bank Agroniaga Tbk sebagai Bank Umum Devisa.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1374/KMK.013/1989 tanggal 11 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sehubungan dengan pemberian izin bank umum.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Agro berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 14 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0249379 tanggal 19 April 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0072872.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Budi Satria
Komisaris Independen	: Eko B. Supriyanto
Komisaris Independen	: Rina Saadah
Komisaris Independen	: Rama Notowidigdo
Komisaris	: Achmad F.C. Barir.

Direksi

Direktur Utama	: Kaspar Situmorang
Direktur	: Bimo Wikan Hantoro
Direktur	: Sigit Murtiyoso
Direktur	: Ernawan
Direktur	: Arif Wicaksono

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI Agro yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI Agro untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020 oleh Muhammad Kurniawan, CPA Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu: wajar dalam semua hal yang material) dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), ditandatangani tanggal 5 April 2021 oleh Christophorus Alvin Kossim Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu: wajar dalam semua hal yang material). Serta laporan keuangan unaudited tanggal 31 Maret 2021

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	24.975.067	28.015.492		27.067.923
Total Liabilitas	20.665.407	23.727.802		22.586.219
Ekuitas	4.309.660	4.287.690		4.481.704

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset Rp 28.015.492 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 947.569 juta atau setara 3,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pos Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 783.757 juta atau setara 107% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami penurunan sebesar Rp3.040.425 juta atau setara 10,85% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pos Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp 1.901.650 juta atau setara 62% dibandingkan per 31 Desember 2020.

BRI Agro memberikan kontribusi total aset kepada Perseroan secara konsolidasian pada 31 Maret 2021 sebesar 1,77%.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	26.932	537.921	1.931.525	2.054.838
Laba Operasional	29.892	21.174	57.650	71.492
Pendapatan Non - Operasional Neto	180	1.224	6.422	2.706
Laba Tahun Berjalan	17.839	16.704	31.261	51.061

Pada 31 Desember 2020, total laba tahun berjalan Rp 31.261 juta mengalami penurunan sebesar Rp 19.800 juta atau setara 38,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga selama tahun 2020 sebesar Rp123.312 juta atau setara 6 % dibandingkan periode sebelumnya.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan Rp 17.839 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 1.135 juta atau setara 6,79% dibandingkan dengan 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga sebesar Rp 106.987 juta atau setara 30% periode sebelumnya.

BRI AGRO memberikan kontribusi pendapatan bunga untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 0,91% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

2. BRI Remittance Co. Ltd.

Pendirian

BRI Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong didirikan tanggal 7 April tahun 2005 di Hong Kong dengan modal yang disetor sebesar HKD1.600.000,00. Pada tanggal 16 Desember 2011 dilakukan penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dan BRIngin Remittance Co. Ltd. yang kemudian disahkan oleh Inland Revenue Department Hong Kong, sehingga terhitung sejak tanggal tersebut BRI menjadi Pemegang Saham Pengendali BRC dengan kepemilikan saham 100%.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya Certificate of Change of Name No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Kegiatan Usaha

BRI Remittance Company Ltd adalah badan usaha yang diijinkan melaksanakan bisnis dalam kriteria *money service (money service operator)* secara khusus yaitu bidang bisnis remitansi (pengiriman uang) dari Hong Kong ke Indonesia. BRI Remittance saat ini melayani kebutuhan transaksi keuangan (menabung dan pengiriman uang) lebih dari 60.000 nasabah

Bank Rakyat Indonesia yang umumnya bekerja sebagai *domestic worker* dan berdomisili di Hong Kong. Sampai dengan saat ini BRI Remittance memiliki 4 kantor Cabang yang tersebar di berbagai wilayah potensial domisili Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong.

Permodalan

Struktur permodalan BRC pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah:

Uraian	Nilai Nominal HKD 1,00 per saham		(%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (HKD)	
Modal Dasar	1.600.000	1.600.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.600.000	1.600.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.000	1.600.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan pengurus BRC adalah sebagai berikut:

Executive Director : Dimas Hendra Saputra
Non-Executive Director : Muhammad Adly Yusrizal

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI Remittance yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI Remittance untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Anthony KAM & Associates *ltd Certified Public Accountants* dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 15 Mei 2020 oleh Kam Hau Choi Anthony Practising Certificate Number P02558, dengan opini *true and fair view* dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Anthony KAM & Associates *ltd Certified Public Accountants*, ditandatangani tanggal 23 Februari 2021 oleh Kam Hau Choi Anthony practising Certificate Number P02558 berdasarkan standar auditing *Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRSs)* yang ditetapkan oleh *Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA)* dengan opini *true and fair view*. Serta laporan keuangan unaudited posisi tanggal 31 Maret 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam HKD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Total Aset	6.541.605	4.680.213	3.965.161
Total Liabilitas	2.127.397	726.565	244.517
Ekuitas	4.414.208	3.720.648	3.720.644

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset HKD4.680.213 mengalami kenaikan sebesar HKD715.052 atau setara 18,03% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pos *cash and cash equivalents and cash flows information* pada 31 Desember 2020 sebesar HKD 646.309 atau setara 19% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar HKD1.861.392 atau setara 39,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan *non-current asset* sebesar HKD 1.163.912 atau setara 110% dibandingkan per 31 Desember 2020.

BRI Remittance memberikan kontribusi total aset kepada Perseroan secara konsolidasian pada 31 Maret 2021 sebesar 0,0009%.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam HKD, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	409.981	1.197.904	4.728.516	4.370.759
Laba Operasional	23.287	24.194	382.516	239.899
Pendapatan Non - Operasional Neto	(4.307)	-	39.419	(27.681)
Laba Tahun Berjalan	17.879	14.736	343.097	212.218

Pada 31 Desember 2020, total laba tahun berjalan HKD343,097 mengalami kenaikan sebesar HKD130,879 atau setara 61,67% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kenaikan *revenue* selama tahun 2020 sebesar HKD 357.757 atau setara 8% dibandingkan periode sebelumnya.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan HKD17.879 mengalami kenaikan sebesar HKD3.143 atau setara 21,33% dibandingkan dengan 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh pada Jan - Mar 2020 terdapat pencadangan untuk staff benefit, pengembangan dan maintenance IT, serta penyesuaian kebijakan akuntansi HKFRS 16 terkait leasing, serta terdapat penurunan transaksi remittance diawal pandemi covid 19 di Hong Kong, sehingga menyebabkan laba Jan - Mar 2020 hanya sebesar HKD 14.736.

3. PT Asuransi BRI Life ("BRI Life")

Pendirian dan Anggaran Dasar

BRI Life sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta No. 116 tanggal 28 Oktober 1987 dan diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 102 tanggal 16 Juni 1988, keduanya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.6645.HT.01.01.TH.88 tanggal 2 Agustus 1988, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1464/1990 dan No. 1465/1990 tanggal 12 Juli 1990, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 71 tanggal 4 September 1990, Tambahan No. 3188.

Sejak pendirian, anggaran dasar BRI Life telah mengalami perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir BRI Life adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. 58 tanggal 11 Mei 2021, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0325327 tanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada Kemenkumham berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0092109.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021 ("**Akta No. 58/2021**").

Berdasarkan Akta No. 58/2021, para pemegang saham BRI Life telah menyetujui untuk mengubah pasal sehubungan dengan (i) tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi dan (ii) tahun buku dan laporan tahunan sehingga mengubah Pasal 11 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 9 anggaran dasar BRI Life.

Anggaran dasar BRI Life beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar BRI Life**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life, BRI Life mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Melakukan usaha di bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRI Life dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Asuransi Jiwa Konvensional.
 - Mencakup usaha jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan;
 - Asuransi Jiwa Syariah.
 - Mencakup usaha jasa penanggulangan risiko dengan prinsip syariah yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. 7 tanggal 2 Maret 2021, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0134468 tanggal 2 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039234.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 (“**Akta No. 7/2021**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. 8 tanggal 2 Maret 2021, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0013073.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0134867 tanggal 2 Maret 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039355.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021 (“**Akta No. 8/2021**”) dan Daftar Pemegang Saham BRI Life per tanggal 2 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI Life adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100.000,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.002.022	200.202.200.000	63,83
Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia	197.978	19.797.800.000	6,31
FWD Financial Services Pte. Ltd.	936.458	93.645.800.000	29,86
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.136.458	313.645.800.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	863.542	86.354.200.000	

Perizinan yang dimiliki

1. Surat Keputusan No. KEP-181/KM.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Asuransi Jiwa Kepada BRI Life.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tentang Pemberian Ijin Pembukaan Kantor Cabang Dengan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tanggal 21 Januari 2003.
3. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-140/NB.11/2017 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Menjadi PT Asuransi BRI Life.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life No. 10 tanggal 28 Agustus 2020, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0376496 tanggal 31 Agustus 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0142583.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 (“**Akta No. 10/2020**”) dan Akta No. 58/2021 yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0325328 tanggal 24 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0092109.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Mei 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Life, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Syafri Rozi
Komisaris Independen	: Eko Wahyu Andriastono
Komisaris Independen	: Premita Fifi Widhiawati
Komisaris Independen	: Ubaidillah Nugraha*
Komisaris	: Jonathan Hekster*

Direksi

Direktur Utama	: Iwan Pasila
Direktur Kepatuhan & Legal	: Dany Cahya Rukmana
Direktur Keuangan	: Khairi Setiawan
Direktur Pemasaran	: Anik Hidayati
Direktur Operasional	: Yosie William Iroth*

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Mohamad Hidayat
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Agus Haryadi
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Siti Haniatunnisa

*) Diangkat dalam Surat Keputusan Pemegang Saham No. R.211-DIR/HCB/04/2021 tanggal 14 April 2021 dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI Life yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI Life untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 24 Februari 2020 oleh Muhammad Kurniawan, CPA Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu: wajar dalam semua hal yang material) dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), ditandatangani tanggal 23 Maret 2021 oleh Christophorus Alvin Kossim Registrasi Akuntan Publik No.AP.1681, dengan opini wajar tanpa modifikasi (dahulu: wajar dalam semua hal yang material). Serta laporan keuangan unaudited posisi tanggal 31 Maret 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	16.980.504	13.044.264		11.084.971
Total Liabilitas	10.329.675	10.081.934		8.407.279
Ekuitas	6.650.829	2.794.003		2.563.929

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset sebesar Rp13.044.264 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.959.293 juta atau setara 17,68% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan produk Unit Link dan Asuransi Kumpulan (Danakarya, Purna Jabatan, dan Askes) yang berdampak pada kenaikan portofolio Reksadana dan Obligasi pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.710.401 juta atau setara 20,5% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp3.893.240 juta atau setara 30,18% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh suntikan modal FWD sebesar Rp3.850.000 juta atau setara 1.650% dibandingkan per 31 Desember 2020. BRI Life memberikan kontribusi total aset kepada Perseroan secara konsolidasian pada 31 Maret 2021 sebesar 1,20%.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	1.644.662	1.441.294	5.889.762	5.198.349
Laba Operasional	67.172	(242.892)	53.150	336.198
Pendapatan Non - Operasional Neto	(10.694)	(472.179)	490.089	472.699
Laba Tahun Berjalan	65.416	(218.839)	62.390	323.267

Pada 31 Desember 2020, total laba tahun berjalan Rp62.390 juta mengalami penurunan sebesar Rp260.877 juta atau setara 80,70% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan klaim tidak diimbangi dengan kenaikan premi dan hasil investasi selama tahun 2020 yang turun sebesar Rp34.464 juta atau setara -1,24% dibandingkan tahun 2019.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan Rp65.415 juta mengalami kenaikan sebesar Rp284.253 juta dari semula - Rp218.838 juta di 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh sudah mulai pulihnya iklim investasi, dimana sumbangan terbesar diperoleh dari hasil kupon obligasi serta keuntungan penjualan reksadana sebesar Rp441.467 juta atau setara 114% dibandingkan periode sebelumnya. BRI Life memberikan kontribusi pendapatan premi untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 5,19% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

4. PT BRI Multifinance Indonesia (“BRI Finance”)

Pendirian dan Anggaran Dasar

BRI Finance didirikan dengan nama “PT Sari Usaha Leasing” berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 2 Agustus 1983 dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan dengan Akta Perubahan No. 156 tanggal 22 November 1983 dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, S.H., nama PT Sari Usaha Leasing diubah menjadi “PT Sanwa BRI Leasing” berkedudukan di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.7596-HT.01.01.TH’83 tanggal 25 November 1983, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 4265/1983 dan No. 4266/1983 tanggal 30 November 1983, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 23 Desember 1983, Tambahan No. 1079 (“**Akta Pendirian BRI Finance**”).

Akta Pendirian BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar BRI terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 November 2020, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.01.03-0406497 tanggal 11 November 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0188874.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 (“Akta No. 01/2020”). Berdasarkan Akta No. 01/2020, para pemegang saham BRI Finance telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar BRI Finance.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BRI Finance, maksud dan tujuan BRI Finance adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan BRI Finance adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, BRI Finance dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan investasi yang dilakukan dengan cara:
 - i) Sewa pembiayaan;
 - ii) Jual dan sewa-balik;
 - iii) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - iv) Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - v) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - vi) Pembiayaan proyek;
 - vii) Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
 - viii) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK.
 - b. Pembiayaan modal kerja yang dilakukan dengan cara:
 - i) Jual dan sewa-balik;
 - ii) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - iii) Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
 - iv) Fasilitas modal usaha; dan/atau
 - v) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
 - c. Pembiayaan multiguna yang dilakukan dengan cara:
 - i) Sewa pembiayaan;
 - ii) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - iii) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
 - d. kegiatan pembiayaan lain yang disetujui oleh OJK;
 - e. Sewa Operasi (*operating lease*); dan
 - f. Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 31 tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dihadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0061721.AH.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0323609 tanggal 30 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0155136.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 Agustus 2019 *juncto* Akta No. 01/2020 dan Daftar Pemegang Saham BRI Finance per tanggal 12 November 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI Finance adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	449.450	449.450.000.000	99,88
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	550	550.000.000	0,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	450.000	450.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	550.000	550.000.000.000	

Perizinan yang dimiliki

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-045/KM.10/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KM.013/1991 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Sanwa-BRI Finance Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2002.
2. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Dengan Perubahan Nama PT BTMU-BRI Finance Menjadi PT BRI Multifinance Indonesia.
3. Surat OJK No. S-1369/NB.111/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Laporan Perubahan Alamat Kantor PT BRI Multifinance Indonesia, memuat pemberitahuan bahwa laporan perubahan kedudukan kantor pusat BRI Finance dari semula di Gedung Lippo Kuningan Lantai 11 dan GF, Jl. H. R. Rasuna Said Kav.B12, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 menjadi di Gedung Lippo Kuningan 11, 10 dan GF, Jl. H. R. Rasuna Said Kav.B12, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, telah dicatat di dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 7 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 06/2021**”), yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0009994 tanggal 8 Januari 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0003134.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 8 Januari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Finance adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Komang Sudiarsa
Komisaris Independen	: Sumantri Suwarno
Komisaris	: Ngalim Sawego

Direksi

Direktur Utama	: Azizatun Azhimah
Direktur Operasional	: Willy Halim Sugiardi
Direktur Bisnis	: Primartono Gunawan
Direktur Manajemen Risiko	: Ari Prayuwana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI Finance yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI Finance untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY) dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 11 Mei 2020 oleh Danil Setiadi Handaja, registrasi akuntan publik No. AP.1008 dengan opini wajar tanpa modifikasian (wajar dalam semua hal yang material) dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY), ditandatangani tanggal 6 April 2021 oleh Christophorus Alvin Kossim registrasi akuntan publik No. AP. 1681, dengan opini wajar tanpa modifikasian (wajar dalam semua hal yang material). Serta laporan keuangan unaudited posisi tanggal 31 Maret 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember
	2021	2020	2019
Total Aset	4.133.079	4.048.308	4.653.281
Total Liabilitas	3.012.006	2.961.961	3.705.935
Ekuitas	1.101.073	1.086.347	947.345

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset Rp4.048 miliar mengalami penurunan sebesar Rp604.973 juta atau setara 13,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan investasi pada 31 Desember 2020 sebesar Rp725.814 juta atau setara 25% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Sedangkan jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp64.771 juta atau setara 1,60% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset sewa pembiayaan sebesar Rp93.680 juta atau setara 42% dibandingkan per 31 Desember 2020. BRI Finance memberikan kontribusi total aset kepada Perseroan secara konsolidasian pada 31 Maret 2021 sebesar 0,29%.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	127.124	140.089	493.282	475.933
Laba Operasional	9.587	15.714	11.688	43.383
Pendapatan Non - Operasional Neto	9.658	-	9.511	11.864
Laba Tahun Berjalan	5.454	11.602	4.785	28.108

Pada 31 Desember 2020, total laba tahun berjalan Rp4.785 juta mengalami penurunan sebesar Rp23.323 juta atau setara 82,98% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum & administrasi selama tahun 2020 sebesar Rp41.003 juta atau setara 64% dibandingkan pendapatan manajer investasi selama tahun 2019.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan Rp5.454 juta mengalami penurunan sebesar Rp6.148 juta atau setara 52,99% dibandingkan Pada 31 Maret 2021, total laba komprehensif mengalami penurunan sebesar Rp6.145 juta atau setara 53% dibandingkan dengan 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh Peningkatan beban cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) selama tahun 2021 sebesar Rp4.552 juta atau setara 46% dibandingkan beban CKPN pada periode sebelumnya. BRI Finance memberikan kontribusi pendapatan bunga untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 0,41% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

5. PT BRI Danareksa Sekuritas ("BRI Danareksa")

Pendirian dan Anggaran Dasar

BRI Danareksa, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Perubahan No. 107 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat dihadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7284.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 673/A.PT/Wapan/1992/PNJS dan No. 674/A.PT/Wapan/1992/PNJS tanggal 12 September 1992, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 86 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan No. 5392/1992.

Sejak pendirian, anggaran dasar BRI Danareksa telah mengalami perubahan. Perubahan anggaran dasar terakhir BRI Danareksa adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0069706.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170657.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Oktober 2020, yang telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana dibuktikan berdasarkan surat BRI Danareksa No. S-29/156/X/CSE tanggal 15 Oktober 2020 yang mana telah disetujui oleh OJK berdasarkan Surat OJK No. S-121-/PM.212/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 ("**Akta No. 27/2020**"). Berdasarkan Akta No. 27/2020, para pemegang saham BRI Danareksa telah menyetujui perubahan nama BRI Danareksa dari semula PT Danareksa Sekuritas menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas dengan demikian mengubah Pasal 1 anggaran dasar BRI Danareksa.

Anggaran dasar BRI Danareksa beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar BRI Danareksa**".

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran BRI Danareksa, maksud dan tujuan BRI Danareksa adalah melakukan usaha sebagai Perusahaan Efek berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRI Danareksa dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) (66121) dapat menjalankan kegiatan utama yaitu:
 - 1) penjaminan emisi Efek; dan
 - 2) kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan penawaran umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau restrukturisasi; dan
- b. Kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (*Broker Dealer*) (66122) dapat menjalankan kegiatan utama yaitu:
 - 1) transaksi Efek untuk kepentingan sendiri (64190) dan Pihak lain; dan/atau
 - 2) pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain.
- c. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, BRI Danareksa dapat menjalankan kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam melakukan kegiatan tersebut wajib dipastikan bahwa kegiatan dimaksud dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang timbul.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 91 tanggal 12 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0106433.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9870 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 52 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0279737 tanggal 26 Desember 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0176451.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 dan Daftar Pemegang Saham BRI Danareksa per tanggal 30 April 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI Danareksa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	335.000.000	335.000.000.000	67,00
2. PT Danareksa (Persero)	165.000.000	165.000.000.000	33,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	500.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500.000.000	1.500.000.000.000	

Perizinan yang dimiliki

1. Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT Danareksa Sekuritas dan berlaku sejak tanggal ditetapkan serta masih tetap berlaku bagi BRI Danareksa sebagaimana Surat OJK No. S-1210/PM.212/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
2. Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Penjamin Emisi Efek kepada PT Danareksa Sekuritas dan berlaku sejak tanggal ditetapkan serta masih tetap berlaku bagi BRI Danareksa sebagaimana Surat OJK No. S-1210/PM.212/2020 tanggal 26 Oktober 2020.
3. Surat Keputusan OJK No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal Persetujuan Kegiatan Lain Perusahaan Efek sebagai Penatalaksana (*Arranger*) MTN, NCD Hybrid Product seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, GMTN, *Global Bond* dan Penasehat Keuangan (*Financial Advisory*).

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 104 tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0115693 tanggal 23 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah Menkumham berdasarkan Daftar Perseroan No. AHU-0034088.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Danareksa, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rico Rizal Budidarmo
 Komisaris Independen : Sumihar Manullang
 Komisaris : Soehandjono

Direksi

Direktur Utama : Friderica Widyasari Dewi
 Direktur : Santi Suryandari
 Direktur : Boumediene S. Halomoan
 Direktur : Moh. Adib, Ir.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI Danareksa Sekuritas yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI Danareksa Sekuritas untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 5 Mei 2020 oleh Muhammad Kurniawan registrasi akuntan public No.AP.0240 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar dalam semua hal yang material) dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), ditandatangani tanggal 6 April 2021 oleh Yasir registrasi akuntan publik No. AP.0703, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar dalam semua hal yang material). Serta laporan keuangan unaudited posisi tanggal 31 Maret 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	1.286.827	702.013		808.951
Total Liabilitas	1.089.410	506.341		376.650
Ekuitas	197.417	195.672		432.301

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset Rp702.013 juta mengalami penurunan sebesar Rp106.938 juta atau setara 13,22% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pos piutang dari lembaga kliring dan penjaminan sebesar Rp52.414 juta atau setara 67 % bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp584.814 juta atau setara 83,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan Piutang Usaha BRIDS sebesar Rp449.630 juta atau setara 123% dibandingkan per 31 Desember 2020. BRI Danareksa memberikan kontribusi total asset kepada Perseroan secara konsolidasian pada 31 Maret 2021 sebesar 0,09%.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	50.688	56.160	239.996	201.960
Laba Operasional	209	(5.400)	(143.697)	(106.336)
Pendapatan Non - Operasional Neto	1.575	-	(26.812)	(8.289)
Laba Tahun Berjalan	1.783	(5.400)	(238.041)	(92.997)

Pada 31 Desember 2020, total rugi tahun berjalan sebesar Rp 238.041 juta mengalami penurunan sebesar Rp145.044 juta atau setara 155,97% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan 31 Desember 2019 sebesar Rp92.997 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan total beban usaha selama tahun 2020 sebesar Rp75.397 juta atau setara 24% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan Rp1.783 juta mengalami kenaikan sebesar Rp7.183 juta atau setara 133,02% dibandingkan dengan 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan beban usaha selama tahun 2021 sebesar Rp12.920 juta atau setara -22% dibandingkan per 31 Maret 2020. BRI Danareksa memberikan kontribusi pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 0,16% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

6. PT BRI Ventura Investama (“BRI Ventura”)

Pendirian dan Anggaran Dasar

BRI Ventura, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama “PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura”, berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 22 Januari 1998 dibuat dihadapan Albert Wilson Riwokore, S.H., Notaris di Kupang, yang telah mendapat pengesahan Menkumham (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-693.HT.01.01.TH.98 tanggal 10 Februari 1998, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kupang di bawah No. 011/BH.24.12/XI/1998 tanggal 19 November 1998, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 3 tanggal 8 Januari 1999, Tambahan No. 236.

Perubahan anggaran dasar terakhir BRI Ventura adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 19 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0128050 tanggal 6 Maret 2020, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046046.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 6 Maret 2020, yang telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima OJK No. 058319 tanggal 12 Maret 2020 (“**Akta No. 19/2020**”). Berdasarkan Akta No. 19/2020, para pemegang saham BRI Ventura telah menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar BRI Ventura yaitu Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BRI Ventura, BRI Ventura mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan usaha Modal Ventura.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRI Ventura dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. penyertaan saham (*equity participation*);
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
 - c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha;
 - d. pembiayaan usaha produktif;
 - e. pengelolaan dana ventura;
 - f. kegiatan jasa berbasis *fee*;
 - g. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 160 tanggal 31 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0380156 tanggal 31 Desember 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0253130.AH.01.Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019, yang telah dilaporkan kepada OJK sebagaimana dibuktikan berdasarkan surat dari OJK sehubungan Laporan Perubahan Pemegang Saham dan Penambahan Modal Disetor PT BRI Ventura Investama No. S-1387/NB.111/2020 tertanggal 2 April 2020 (“**Akta No. 160/2019**”) dan Daftar Pemegang Saham BRI Ventura per tanggal 31 Desember 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI Ventura adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	1.515.874	1.515.874.000.000	99,97
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	388	388.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.516.262	1.516.262.000.000	100%
Jumlah Saham Dalam Portepel	483.738	483.738.000.000	

Perizinan yang dimiliki

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 75/KMK.017/1998 tanggal 19 Februari 1998 tentang Pemberian Izin Modal Ventura Kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-189/NB.11/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Modal Ventura Sehubungan Perubahan Nama PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura Menjadi PT BRI Ventura Investama dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 7 Juli 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0294850 tanggal 17 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0115608.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 ("Akta No. 3/2020") dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 22 Oktober 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0402552 tanggal 27 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0181596.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 ("Akta No. 24/2020"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI Ventura adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hadi Susanto
 Komisaris Independen : Arip Tirta
 Komisaris Independen : Agoosh Yoosran

Direksi

Direktur Utama : Nicko Widjaja
 Direktur : Yosephine Ajeng Sekar Putih
 Direktur : William Gozali

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRI Ventura yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI Ventura untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 29 Januari 2020 oleh Jimmy Pangestu, S.E. dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar dalam semua hal yang material) dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY), ditandatangani tanggal 19 Maret 2021 oleh Christophorus Alvin Kossim registrasi akuntan publik No. AP.1681, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar dalam semua hal yang material). Serta laporan keuangan unaudited posisi tanggal 31 Maret 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	1.824.118	1.819.803		1.514.486
Total Liabilitas	5.071	6.106		998
Ekuitas	1.819.048	1.813.697		1.513.488

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset Rp 1.819.803 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 305.317 juta atau setara 20,16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada 31 Desember 2020, sebesar Rp 888.385 juta atau setara 320% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.315 juta atau setara 0,24% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs (akibat perpindahan aset komitmen investasi ke penyertaan saham) sebesar 4.187 juta atau setara 2.37% dibandingkan per 31 Desember 2020. BRI Ventura memberikan kontribusi total asset kepada Perseroan secara konsolidasian pada 31 Maret 2021 sebesar 0,13%.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	12.000	92	269.511	776
Laba Operasional	6.643	(4.419)	246.345	(11.470)
Pendapatan Non - Operasional Neto	(1.294)	28.964	53.857	22.476
Laba Tahun Berjalan	5.348	24.545	300.198	11.002

Pada 31 Desember 2020, total laba tahun berjalan sebesar Rp300.198 juta mengalami kenaikan sebesar Rp289.196 juta atau setara 2.628,58% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapat operasional dari investasi selama tahun 2020 sebesar Rp267.270 juta dari semula nihil di periode sebelumnya.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan sebesar Rp5.348 juta mengalami penurunan sebesar Rp19,197 juta atau setara 78,21% dibandingkan dengan 31 Maret 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh Pendapatan selisih kurs dan non operasional lainnya selama per 31 Maret 2021 sebesar Rp10.188 juta atau turun sebesar 70,09% dibandingkan Rp34.069 juta periode sebelumnya.

BRI Ventura memberikan kontribusi pendapatan sebesar 0,052% kepada Perseroan pada 31 Maret 2021.

7. PT BRI Asuransi Indonesia (sebelumnya didirikan dengan nama PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur atau "BRINS")

Pendirian dan Anggaran Dasar

BRINS didirikan berdasarkan Akta No. 121 tanggal 17 April 1989 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4160 TH.01.01.TH.89 tanggal 3 Mei 1989, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 911/1989 tanggal 11 Mei 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1989, Tambahan No. 1299 ("Akta Pendirian BRINS").

Akta Pendirian BRINS telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar BRINS terakhir adalah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Tri Wahyuwidayati, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 10 Februari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0027354.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Februari 2020 ("Akta No. 03/2020"). Berdasarkan Akta No. 03/2020, para pemegang saham BRINS telah setuju untuk melakukan perubahan nama dari semula PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BRINS, BRINS mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRINS dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu menjalankan usaha asuransi kerugian, membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, asuransi kerugian syariah, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

Permodalan

Struktur permodalan BRINS adalah sebagaimana yang dimuat dalam (i) Akta No. 118 tanggal 30 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0001640.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 20 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0006602 tanggal 20 Januari 2016 *juncto* (ii) Akta No. 01 tanggal 9 Oktober 2019 dibuat dihadapan Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0344187 tanggal 10 Oktober 2019 dan Daftar Pemegang Saham BRINS per tanggal 26 September 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10.000.000,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	50.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	28.035	280.350.000.000	90,00
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	3.115	31.150.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	31.150	311.500.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	18.850	188.500.000.000	

Perizinan yang dimiliki

1. Surat Keputusan No. Kep-128/KM.13/1989 tanggal 26 Agustus 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Asuransi Kerugian Kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur.
2. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-105/NB.11.2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Dengan Perubahan Nama PT Asuransi Bringin Sejahtera Menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 03/2020 *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 10 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Tri Wahyuwidayati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta No. 10/2021**"), susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BRINS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Darnawi
Komisaris Independen	: Soegeng Hernowo*
Komisaris Independen	: Iman Sundoro

Direksi

Direktur Utama	: H.M. Fankar Umran
Direktur Bisnis	: Rahmat Budi Legowo P.*
Direktur Operasional	: Sony Harsono Widyo S.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Heri Supriyadi*
Direktur Teknik	: Ade Zulfikar

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Nilmayeti Yusri
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Abdul Ghoni*

* Efektif setelah mendapat persetujuan *fit and proper test* dari OJK.

Masing-masing Akta No. 03/2020 dan Akta No. 10/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan (i) No. AHU-AH.01.03-0076933 tanggal 10 Februari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0027354.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 10 Februari 2020 dan (ii) No. AHU-AH.01.03-0287571 tanggal 4 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082444.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting BRINS yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan BRINS untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan laporan laba-rugi komprehensif dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 11 Maret 2020 oleh Muhammad Kurniawan registrasi akuntan publik No. AP.0240, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar dalam semua hal yang material) dan laporan Keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dalam laporannya yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2021 oleh Christophorus Alvin Kossim, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (Wajar dalam semua hal yang material. Serta laporan keuangan unaudited posisi tanggal 31 Maret 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Total Aset	3.301.834	3.036.351		2.662.331
Total Liabilitas	2.161.361	2.000.575		1.801.028
Ekuitas	1.140.473	1.015.649		847.063

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset Rp3.036.351 juta mengalami kenaikan sebesar Rp374.020 juta atau setara 14,05% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan kenaikan investasi sebesar Rp171.257 juta pada 31 Desember 2020 atau setara 14,21% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019.

Jumlah aset posisi 31 Maret 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp265.483 juta atau setara 8,74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi sebesar Rp198.013 juta atau setara 12,58% dibandingkan per 31 Desember 2020.

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	205.655	182.241	1.618.608	1.932.384
Laba Operasional	97.427	84.335	301.262	237.334
Pendapatan Non - Operasional Neto	933	143	(14.145)	8.129
Laba Tahun Berjalan	73.606	60.921	204.394	180.676

Pada 31 Desember 2020, total laba tahun berjalan sebesar Rp204.394 juta mengalami kenaikan sebesar Rp23.718 juta atau setara 13.13% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan hasil *underwriting* selama tahun 2020 sebesar Rp82.082 juta atau setara 15,38% dibandingkan pendapatan manajer investasi selama tahun 2019.

Pada 31 Maret 2021, total laba tahun berjalan Rp73.606 juta mengalami kenaikan sebesar Rp12.685 juta atau setara 20,82% dibandingkan dengan 31 Maret 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan hasil *underwriting* selama tahun 2020 sebesar Rp3.155 juta atau setara 2% periode sebelumnya. BRINS memberikan kontribusi pendapatan premi untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 1,03% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

10. Keterangan Tentang Transaksi dengan Pihak-Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Berikut ini adalah tabel transaksi dengan Pihak Terafiliasi beserta jenis hubungan pada tanggal 31 Maret 2021:

Pihak Terafiliasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak terafiliasi
Karyawan Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Simpanan nasabah
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Asuransi atas aset tetap
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi, Garansi yang diterbitkan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan akseptasi
PT PP Urban	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, Tagihan Akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor

Pihak Terafiliasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak terafiliasi
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Rekayasa Industri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Bio Farma (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Adhi Persada Beton	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Petrosida Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Utama Karya (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang sewa pembiayaan
PT Utama Karya Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang sewa pembiayaan
PT Hakaaston	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang sewa pembiayaan
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi
PT Wijaya Karya Industri Energ	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Pembangkitan Jawa-Bali	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Telekomunikasi Seluler	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan

Perjanjian Operasional Dengan Pihak Terafiliasi

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Pengadaan Managed Service Offsite Data Center (ODC), Data Center (DC) GTI Ragunan dan Tabanan Tahap I No. B.15.K-PBJ/PIT/11/2019 dan No. K.TEL.02-0850/HK.810/DES-00/2019 tanggal 7 Februari 2019	Perseroan; dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (" Telkom ").	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan managed service offsite data center (ODC), data center (DC), GTI Ragunan dan Tabanan Tahap I dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Telkom (" Pekerjaan ") yaitu melaksanakan managed service offsite data center (ODC), data center (DC), GTI Ragunan dan Tabanan Tahap I, sesuai dengan <i>Terms of Reference</i> (TOR) Perseroan	Jangka waktu sewa <i>collocation</i> selama 5 tahun sejak Berita Acara Instalasi Pertama. Sedangkan <i>managed services/maintenance cold storage</i> selama 5 tahun sejak instalasi/penyelesaian pekerjaan. Berita Acara Instalasi Pertama telah dilakukan pada 3 Juni 2019.
2.	Perjanjian antara Perseroan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink Untuk Integrasi BRISAT Fase 3 (Zona 1, Zona 2, dan Zona 3) No. B.86.K-PBJ/PIT/07/2020 tanggal 8 Juli 2020	Perseroan; dan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (" Telkom ").	Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISat Fase 3 (zona 1, Zona 2 dan Zona 3). Bahwa, Perseroan telah menunjuk Telkom untuk pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISat Fase 3 (zona 1, Zona 2 dan Zona 3).	Jangka waktu Managed Service selama 5 tahun sejak Berita Acara Online
3.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya Untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5) No. B.22.K-PBJ/PIT/02/2019 tanggal 8 Februari 2019	Perseroan; dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (" INTI ").	Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya Untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5). Bahwa Perseroan telah menunjuk INTI untuk pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona	Jangka waktu Managed Service selama 5 tahun sejak Berita Acara Online. Berita Acara Online Batch 1 telah dilakukan pada Februari 2019.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			5). Ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut " Pekerjaan ") yang wajib dilakukan oleh INTI adalah melaksanakan pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5) dengan jadwal implementasi sesuai dengan lampiran pada perjanjian.	
4.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, tentang Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pembangunan Menara BRI Medan No. 079.K-PLO/PSR/LEG/01/2021 tanggal 20 Januari 2021	Perseroan; dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (" ADHI ").	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan jasa kontraktor pelaksana pembangunan Menara BRI Medan. Adapun ruang lingkup pekerjaan berdasarkan perjanjian ini adalah sebagai berikut: (a) pekerjaan persiapan, (b) pekerjaan struktur, (c) pekerjaan arsitektur, (d) pekerjaan mekanikal dan elektrikal, (e) pekerjaan <i>site development</i> , dan j(f) pekerjaan pemeliharaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berlaku 420 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan (SPL). Dan jangka waktu pekerjaan pemeliharaan berlaku 360 hari sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I).

Perjanjian Pembiayaan Dengan Pihak Terafiliasi

BRI Life

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan BRI Finance

Pada 2 Juli 2020, BRI Life sebagai penerima pembiayaan ("**Penerima Pembiayaan**") telah menandatangani 10 perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk 10 kendaraan bermotor dengan BRI Finance sebagai pemberi pembiayaan ("**Pemberi Pembiayaan**"). Perjanjian-perjanjian tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2025. Tujuan dari pembiayaan multiguna atas kendaraan bermotor tersebut adalah untuk pengadaan atau pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan operasional Kepala Divisi Debitur kepada Penerima Pembiayaan. Perjanjian pembiayaan ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp5.798.947.786. Dalam laporan keuangan tidak terdapat outstanding nilai pinjaman karena tereliminasi.

BRI Finance

1. Perjanjian Kredit antara BRI Finance dan Perseroan

BRI Finance telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman jangka pendek dengan Perseroan pada tanggal 13 Februari 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah diperpanjang pada tanggal 29 Maret 2021, yang bersifat *revolving* dan *uncommitted* dengan fasilitas dalam masing-masing mata uang: (i) Rupiah sebesar 500.000.000.000 dan valuta asing sebesar USD 95.000.000

sebagaimana telah diubah pada tanggal 30 Desember 2019 yang akan digunakan untuk keperluan fasilitas *multipurposes* jangka pendek BRI Finance (“**Perjanjian Fasilitas Jangka Pendek**”). Jangka waktu ketersediaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman jangka pendek tersebut terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021. Suku bunga akan ditetapkan oleh divisi treasury Perseroan pada saat penarikan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Jangka Pendek, BRI Finance diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan apabila (antara lain): (i) melakukan perubahan susunan pengurus BRI Finance, (ii) melakukan perubahan anggaran dasar, (iii) melakukan perubahan atau penambahan modal saham, (iv) melakukan tindakan merger atau akuisisi, dan (v) apabila melakukan pembagian dividen, BRI Finance wajib melaporkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 hari setelah melakukan pembagian dividen dengan tetap memelihara *Gearing Ratio* setelah pembagian dividen tersebut dibawah 9 kali (on B/S). Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Fasilitas Jangka Pendek tersebut, tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, BRI Finance dilarang untuk (antara lain): (i) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas Jangka Pendek dan (ii) melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham apabila *Gearing Ratio* diatas 9 kali (on B/S).

BRI Finance juga telah memperoleh fasilitas standby LC (SBLC) dan forex line dari Perseroan masing-masing pada tanggal 10 Mei 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 30 Desember 2019 dan telah diperpanjang pada tanggal 29 Maret 2021 (untuk fasilitas standby LC (SBLC, “**Perjanjian Fasilitas SBLC**”)) dan pada tanggal 30 Desember 2019 dan diperpanjang pada tanggal 23 Maret 2021 (untuk fasilitas forex line, “**Perjanjian Fasilitas FX**”). Masing-masing fasilitas standby LC (SBLC) dan fasilitas forex line memiliki limit sebesar USD 5.000.000 dan keduanya berlaku terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp703.200.000.000 untuk pinjaman rupiah dan USD 1.130.000 atau setara dengan Rp16.466.360.000,- untuk pinjaman valuta asing.

Sehubungan dengan jangka waktu pinjaman berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Jangka Pendek, (ii) Perjanjian Fasilitas SBLC, dan (iii) Perjanjian Fasilitas FX, yang seluruhnya telah berakhir pada tanggal 29 Mei 2021, para pihak dalam perjanjian sedang dalam proses perpanjangan dan masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam masing-masing (i) Perjanjian Fasilitas Jangka Pendek, (ii) Perjanjian Fasilitas SBLC, dan (iii) Perjanjian Fasilitas FX sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

11. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

11.1 Perjanjian Pembiayaan

Perseroan

1. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 15 September 2016, sebagaimana terakhir kali diubah pada 14 November 2016 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“**BNI**”) sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 4.600.000.000.000,00 yang terdiri atas 5 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp616.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017, (ii) obligasi seri B sebesar Rp964.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019, (iii) obligasi seri C sebesar Rp193.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021, (iv) obligasi seri D sebesar Rp477.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023, dan (v) obligasi seri E sebesar Rp2.350.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun untuk obligasi seri A, 8,00% per tahun untuk obligasi seri B, 8,20% per tahun untuk obligasi seri C, 8,65% per tahun untuk obligasi seri D, 8,65% per tahun, dan 8,90% per tahun untuk obligasi seri D. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*. Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, Perseroan dilarang untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang

secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dan Seri B dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.020.000.000.000.

2. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 22 Maret 2017 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 5.100.000.000.000,00 yang terdiri atas 4 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp1.131.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 12 April 2018, (ii) obligasi seri B sebesar Rp1.743.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020, (iii) obligasi seri C sebesar Rp925.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022, dan (iv) obligasi seri D sebesar Rp1.300.500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun untuk obligasi seri A, 8,10% per tahun untuk obligasi seri B, 8,30% per tahun untuk obligasi seri C, dan 8,80% per tahun untuk obligasi seri D 8,65% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, Perseroan dilarang untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dan Seri B dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.020.000.000.000.

3. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 4 Agustus 2017 dengan BNI sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 5.150.000.000.000,00 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp980.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp1.652.500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp2.517.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun untuk obligasi seri A, 8,00% per tahun untuk obligasi seri B, dan 8,25% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, Perseroan dilarang untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.169.500.000.000.

4. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 1 Februari 2018 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 2.442.000.000.000,00 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp1.837.500.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023, dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp605.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun untuk obligasi seri A, dan 6,90% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, Perseroan dilarang untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.442.000.000.000.

5. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 26 Mei 2018, sebagaimana diubah terakhir kali pada 28 Mei 2018, dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000, yang jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat Modal Pelengkap (Tier-2) tanpa dipotong dengan biaya-biaya Emisi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung peningkatan aset produktif.

Berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, Perseroan dilarang untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menghindari keragu-raguan, para pihak setuju bahwa yang dimaksud material dalam ketentuan di atas adalah lebih dari 25% ekuitas Perseroan.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp500.000.000.000.

6. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwalianamanatan tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”) sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp737.850.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp2.089.350.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp2.172.800.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun untuk obligasi seri A, 7,60% per tahun untuk obligasi seri B, dan 7,85% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, Perseroan dilarang untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan telah melunasi Obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.262.150.000.000.

7. Perjanjian Fasilitas dengan Kreditur Sindikasi dengan Citicorp International Limited sebagai Agen

Pada tanggal 9 Juli 2020, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas USD1.000.000.000 dengan Bank of China (Hong Kong) Limited, BNP Paribas (acting through its Singapore branch), China Development Bank, China Development Bank Hong Kong Branch, Citibank, N.A., Indonesia Branch, CTBC Bank Co., Ltd., PT Bank Mizuho Indonesia, MUFG Bank, Ltd., Singapore Branch, Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, United Overseas Bank Limited sebagai para kreditur (“**Para Kreditur Awal**”), dimana Citicorp International Limited bertindak sebagai Agen. Adapun berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah memperoleh (i) Fasilitas A dengan jumlah komitmen total sebesar USD 500.000.000, yang akan jatuh tempo 359 hari kerja setelah tanggal pemakaian pertama fasilitas, yaitu 30 Juli 2021, dengan bunga sebesar 0,55% per tahun (“**Fasilitas A**”), (ii) Fasilitas B dengan jumlah komitmen total sebesar USD200.000.000, yang akan jatuh tempo 24 bulan setelah tanggal pemakaian pertama fasilitas, dengan bunga sebesar 0,95% per tahun (“**Fasilitas B**”), (iii) Fasilitas C dengan jumlah komitmen total sebesar USD 300.000.000, yang akan jatuh tempo 60 bulan setelah tanggal pemakaian pertama fasilitas, dengan bunga sebesar 1,45% per tahun (“**Fasilitas C**”). Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C hanya dapat digunakan untuk tujuan korporasi umum (*general corporate*). Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat larangan bagi Perseroan untuk (i) memperoleh, baik melalui pendirian atau lainnya, saham apa pun atau sekuritas yang dikeluarkan oleh setiap orang mana pun, atau kepentingan apa pun di dalamnya atau dalam modal siapa pun, atau membuat kontribusi modal apa pun kepada siapa pun, (ii) memperoleh bisnis atau kelangsungan usaha apa pun, atau keseluruhan atau secara substansial seluruh bisnis dari aset, properti, atau bisnis orang mana pun atau aset apa pun yang merupakan suatu divisi atau unit operasi bisnis siapa pun, (iii) mengadakan usaha patungan, konsorsium, kemitraan atau pengaturan serupa dengan siapa pun, (iv) mengadakan amalgamasi, *demerger*, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan.

Setiap transaksi yang dilakukan di atas hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Agen yang bertindak atas nama semua Kreditur (pemberitahuan tersebut harus diberikan setelah Perseroan setuju untuk berkomitmen atau menyelesaikan transaksi tersebut) dan hanya akan diizinkan dengan syarat: (i) dalam keadaan solven; (ii) tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan dokumen pembiayaan; (iii) tidak ada Peristiwa Wanprestasi yang berlanjut atau akan terjadi sebagai akibat dari transaksi tersebut; (iv) tidak ada perubahan substansial atas sifat umum usaha Debitur dari yang dilakukan pada tanggal Perjanjian ini; (v) Perseroan tetap menjadi badan hukum yang masih ada setelah transaksi tersebut; dan (v) tidak ada Perubahan Pengendali yang muncul sebagai akibatnya.

Bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya inbreng saham Pegadaian dan inbreng saham PNM oleh Negara RI sebagai bentuk penyeteroran modal dalam rangka pelaksanaan HMETD oleh Negara RI, dan sehubungan dengan adanya kewajiban berdasarkan perjanjian ini untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Agen dalam hal Perseroan memperoleh, baik melalui pendirian atau lainnya, saham apa pun atau sekuritas yang dikeluarkan oleh setiap orang mana pun, atau kepentingan apa pun di dalamnya atau dalam modal siapa pun, atau membuat kontribusi modal apa pun kepada siapa pun, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Citicorp International Limited (dalam kapasitasnya sebagai Agen) pada tanggal 25 Juni 2021.

Perseroan telah melunasi Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas dengan Kreditur Sindikasi dengan Citicorp International Limited sebagai Agen pada tanggal 27 Juli 2021.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD1.000.000.000 atau setara dengan Rp14.525.000.000.000.

8. Perjanjian Fasilitas dengan Kreditur Sindikasi dengan MUFG Bank, Ltd sebagai Agen

Pada tanggal 19 Desember 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas USD700.000.000 dengan Cathay United Bank, Citibank, N.A., Hong Kong Branch, Citibank, N.A., Indonesia Branch, Commerzbank Aktiengesellschaft Luxembourg Branch, CTBC Bank Co., Ltd., DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch, MUFG Bank, Ltd., Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, United Overseas Bank Limited and Wells Fargo Bank, National Association, London Branch sebagai para kreditur ("**Para Kreditur Awal**"), dimana MUFG Bank, Ltd. bertindak sebagai Agen. Adapun berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah memperoleh (i) Fasilitas A dengan jumlah komitmen total sebesar USD 200.000.000, yang akan jatuh tempo 359 hari kerja setelah tanggal perjanjian ini, dengan bunga sebesar 0,40% per tahun ("**Fasilitas A**"), (ii) Fasilitas B dengan jumlah komitmen total sebesar USD235.000.000, yang akan jatuh tempo 36 bulan setelah tanggal perjanjian ini, dengan bunga sebesar 0,74% per tahun ("**Fasilitas B**"), (iii) Fasilitas C dengan jumlah komitmen total sebesar USD 265.000.000, yang akan jatuh tempo 48 bulan setelah tanggal perjanjian ini, dengan bunga sebesar 0,84% per tahun ("**Fasilitas C**"). Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C hanya dapat digunakan untuk tujuan korporasi umum (*general corporate*) termasuk, untuk menghindari keraguan, pembayaran ongkos, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan fasilitas. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat larangan bagi Perseroan untuk (i) memperoleh, baik melalui pendirian atau lainnya, saham apa pun atau sekuritas yang dikeluarkan oleh setiap orang mana pun, atau kepentingan apa pun di dalamnya atau dalam modal siapa pun, atau membuat kontribusi modal apa pun kepada siapa pun, (ii) memperoleh bisnis atau kelangsungan usaha apa pun, atau keseluruhan atau secara substansial seluruh bisnis dari aset, properti, atau bisnis orang mana pun atau aset apa pun yang merupakan suatu divisi atau unit operasi bisnis siapa pun, (iii) mengadakan usaha patungan, konsorsium, kemitraan atau pengaturan serupa dengan siapa pun, (iv) mengadakan amalgamasi, *demerger*, penggabungan atau rekonstruksi perusahaan.

Setiap transaksi yang dilakukan diatas hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Agen yang bertindak atas nama semua Kreditur (pemberitahuan tersebut harus diberikan setelah Perseroan setuju untuk berkomitmen atau menyelesaikan transaksi tersebut) dan hanya akan diizinkan dengan syarat: (i) dalam keadaan solven; (ii) tidak memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan dokumen pembiayaan; (iii) tidak ada Peristiwa Wanprestasi yang berlanjut atau akan terjadi sebagai akibat dari transaksi tersebut; (iv) tidak ada perubahan substansial atas sifat umum usaha Debitur dari yang dilakukan pada tanggal Perjanjian ini; (v) Perseroan tetap menjadi badan hukum yang masih ada setelah transaksi tersebut; dan (v) tidak ada Perubahan Pengendali yang muncul sebagai akibatnya.

Bahwa sehubungan dengan akan dilakukannya inbreng saham Pegadaian dan inbreng saham PNM oleh Negara RI sebagai bentuk penyeteroran modal dalam rangka pelaksanaan HMETD oleh Negara RI, dan sehubungan dengan adanya kewajiban berdasarkan perjanjian ini untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Agen dalam hal Perseroan memperoleh, baik melalui pendirian atau lainnya, saham apa pun atau sekuritas yang dikeluarkan oleh setiap orang mana pun, atau kepentingan apa pun di dalamnya atau dalam modal siapa pun, atau membuat kontribusi modal apa pun kepada siapa pun, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada MUFG Bank Ltd (dalam kapasitasnya sebagai Agen) pada tanggal 25 Juni 2021.

Perseroan telah melunasi Fasilitas A dari Perjanjian Fasilitas dengan Kreditur Sindikasi dengan MUFG Bank, Ltd sebagai Agen pada tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD500.000.000 atau setara dengan Rp7.262.500.000.000.

9. Perjanjian Fasilitas COFACE dengan BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas USD67.985.910.000 dengan BNP Paribas yang bertindak sebagai Penerima Mandat Pengatur Utama, Agen Fasilitas, Agen Jaminan serta Kreditur Tahapan Perancis Awal dan Kreditur Tahapan Jerman Awal. Adapun berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah memperoleh fasilitas (i) Tahapan Perancis dengan jumlah komitmen total sebesar USD 51.132.262, yang akan jatuh tempo 96 bulan setelah tanggal yang jatuh 6 bulan setelah tanggal penerimaan dalam orbit dan tanggal yang jatuh 15 bulan setelah tanggal peluncuran yang dijadwalkan ("**Tanggal Pelunasan Pertama**"), dengan bunga sebesar 2,68% per tahun (CIRR) ("**Fasilitas Tahapan Perancis**"), (ii) Tahapan Jerman dengan jumlah komitmen total sebesar USD10.853.548, yang akan jatuh tempo 96 bulan setelah Tanggal Pelunasan Pertama, dengan bunga sebesar 0,75% per tahun ditambah LIBOR ("**Fasilitas Tahapan Jerman**"). Tujuan penggunaan dana dari Fasilitas Tahapan Perancis dan Fasilitas Tahapan Jerman adalah untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan peluncuran satelit (termasuk pembayaran atas premi asuransi terkait dengan peluncuran tersebut). Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat larangan bagi Perseroan untuk (i) melakukan penggabungan atau melakukan konsolidasi dengan entitas lain, (ii) menciptakan atau mengizinkan keberadaan jaminan apapun atas salah satu dari asetnya, (iii) mengambalalih suatu perusahaan, usaha, aset atau kesanggupan atau pelaksanaan suatu usaha patungan, apabila pengambilalihan atau usaha patungan tersebut memiliki atau secara wajar mungkin memiliki suatu dampak merugikan material (hal ini harus dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen Fasilitas). Selain itu, berdasarkan perjanjian ini, Perseroan wajib segera memberitahukan kepada Agen Fasilitas mengenai setiap perubahan kepemilikan sahamnya yang seluruhnya sejak tanggal perjanjian ini lebih dari 5% dari modal saham total Perseroan yang diterbitkan dan dijatahkan.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD 31.926.832 atau setara dengan Rp463.737.234.800.

10. Penerbitan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan Jumlah Pokok USD500.000.000 3,950 persen Jatuh Tempo Tahun 2024

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan dan the Bank of New York Mellon, London Branch (sebagai wali amanat (*trustee*)), telah menandatangani *Akta Trust* sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 500.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 3,950%, yang diterbitkan oleh Perseroan ("**Surat Utang**"), yang jatuh tempo pada 28 Maret 2024. Surat Utang ini tidak dijamin dengan kebendaan dalam bentuk apapun.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD 500.000.000 atau setara dengan Rp7.262.500.000.000.

11. Penerbitan Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan Jumlah Pokok USD500.000.000 4,625 persen Jatuh Tempo Tahun 2023

Pada tanggal 20 Juli 2018, Perseroan dan the Bank of New York Mellon, London Branch (sebagai wali amanat (*trustee*)), telah menandatangani *Akta Trust* sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 500.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,625%, yang diterbitkan oleh Perseroan ("**Surat Utang**"), yang jatuh tempo pada 20 Juli 2023. Surat Utang ini tidak dijamin dengan kebendaan dalam bentuk apapun.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD 500.000.000 atau setara dengan Rp7.262.500.000.000.

Perusahaan Anak

BRI Danareksa

1. Perjanjian Fasilitas Perbankan Antara BRI Danareksa dan PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")

a. Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0915/N/FI tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/0638/AMD/NBFI1 tertanggal 3 Desember 2020.

Pada 7 Juni 2018, BRI Danareksa sebagai debitur ("**Debitur**") telah menandatangani perjanjian fasilitas bank garansi sejumlah Rp125.000.000.000 dengan Bank Permata sebagai kreditur ("**Kreditur**") sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 3 Desember 2020, yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2021, dengan biaya komisi sebesar 1% per tahun per penerbitan minimum Rp1.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk kebutuhan bisnis *underwriting* obligasi dan *Financial Advisory* sebagai *Bid Bond* dan *Performance Bond*. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat kewajiban bagi Debitur untuk meminta persetujuan tertulis dari Kreditur untuk (i) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN), (ii) melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lain, (iii) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur, kecuali untuk perusahaan terbuka.

Pada tanggal 12 Juli 2021, Debitur telah menyampaikan surat permohonan kepada Kreditur mengenai pencabutan atas klausula larangan pembayaran dividen atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur ("**Surat Permohonan**"). Kreditur telah memberikan tanggapan melalui surat elektronik pada tanggal 12 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Kreditur menyetujui permohonan pencabutan ketentuan atas klausula larangan pembayaran dividen atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur. Namun Debitur tetap memiliki kewajiban pemberitahuan kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 hari kalender dalam hal pembayaran dividen atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Debitur.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp0.

b. Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/20/0062/N/NBFI1 tanggal 6 Februari 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/20/0639/AMD/NBFI1 tertanggal 3 Desember 2020.

Pada 6 Februari 2020, BRI Danareksa sebagai debitur ("**Debitur**") telah menandatangani perjanjian kredit fasilitas money market sejumlah Rp100.000.000.000 dengan Bank Permata sebagai kreditur ("**Kreditur**") sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 3 Desember 2020 yang dapat digunakan bersama-sama dengan fasilitas Bank Garansi. Perjanjian fasilitas money

market akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2021, dengan biaya bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh Kreditur. Fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, Debitur wajib melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 hari untuk (i) melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lain, (ii) melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar BRI Danareksa baik yang wajib untuk dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, termasuk perubahan pemegang saham, (iii) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp0.

2. Perjanjian Intraday Obligasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada 22 Januari 2014, BRI Danareksa sebagai nasabah (“Nasabah”) telah menandatangani perjanjian intraday obligasi sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 20 November 2020 dengan limit sebesar Rp 660.000.000.000 dengan CIMB sebagai bank (“Bank”). Perjanjian intraday obligasi akan berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dengan kewajiban pembayaran kembali pada hari yang sama melalui RTGS pada saat *settlement* selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Nasabah wajib membayar biaya komisi sebesar 2% per tahun dihitung dari jumlah intraday yang sekurang-sekurangnya Rp150.000. Tujuan dari perjanjian intraday obligasi tersebut digunakan untuk bridging penyelesaian obligasi pemerintah dan perusahaan baik di pasar primer maupun pasar sekunder. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, Nasabah wajib melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah (i) mengubah susunan pemegang saham Nasabah, (ii) melakukan perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan, (iii) mengubah susunan pengurus Nasabah, dan (iii) mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Nasabah.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp0.

3. Perjanjian Fasilitas Global Line dengan PT Bank MNC Internasional Tbk (“MNC”)

Pada 28 Mei 2019, BRI Danareksa sebagai debitur (“Debitur”) telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas *Money Market Line* dan/atau Bank Garansi dan/atau *Intraday* sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 24 Juni 2021 dengan plafon fasilitas sebesar Rp 200.000.000.000 dengan ketentuan maksimal penggunaan fasilitas *Money Market Line* dan *Intraday* bersama-sama sebesar Rp45.000.000.000 dengan MNC sebagai kreditur (“Kreditur”). Perjanjian fasilitas akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2022. Tujuan dari masing-masing jenis fasilitas berbeda-beda, yaitu untuk (i) fasilitas *money market line* digunakan untuk pendanaan jangka pendek, (ii) fasilitas bank garansi digunakan untuk jaminan Kreditur yang akan diterbitkan kepada OJK untuk menjamin proses *underwriting*, sedangkan (iii) fasilitas intraday digunakan untuk pendanaan intra hari. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, Debitur wajib melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur dalam hal (i) terdapat perubahan susunan pengurus dan pemegang sahamnya, (ii) terdapat penyertaan modal, pengambilalihan saham atau melakukan investasi di dalam perusahaan lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan anak atau perusahaan afiliasinya, (iii) memberikan informasi kepada Kreditur apabila membubarkan atau melikuidasi, melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan penggabungan usaha, konsolidasi atau reorganisasi perusahaan yang mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham, (iv) perubahan pada anggaran dasar terbatas pada maksud dan tujuan Debitur, dan (v) mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha Debitur.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp0.

4. Perjanjian Fasilitas Kredit dengan PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)

Pada 31 Agustus 2017, BRI Danareksa sebagai debitur (“**Debitur**”) telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas kredit dengan UOB sebagai kreditur (“**Kreditur**”) berupa Fasilitas Bank Garansi (“**Fasilitas BG**”) bersifat *uncommitted* dengan plafon pokok fasilitas sebesar Rp 60.000.000.000 dengan sublimit berupa Fasilitas Revolving Credit Facility (“**Fasilitas RCF**”) yang bersifat *uncommitted* yang diberikan dalam mata uang rupiah, hingga jumlah pokok sebesar Rp 60.000.000.000 (dengan ketentuan jumlah outstanding Fasilitas BG dan Fasilitas RCF, secara bersama-sama dari waktu ke waktu tidak boleh melebihi Rp 60.000.000.000) sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 4 Februari 2021. Perjanjian fasilitas akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2022. Tujuan dari masing-masing jenis fasilitas berbeda-beda, yaitu untuk (i) Fasilitas BG digunakan untuk menjamin trading limit pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) serta untuk kegiatan underwriting terkait, dan (ii) Fasilitas RCF digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja BRI Danareksa dengan kegiatan usaha BRI Danareksa. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Berdasarkan perjanjian ini, Debitur wajib melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur dalam hal (i) perubahan kepemilikan saham Debitur, selambat-lambatnya 30 hari setelah perubahan tersebut. Apabila Debitur secara tidak langsung tidak lagi dimiliki oleh mayoritas pemerintah, Kreditur akan melakukan peninjauan kembali atas kelanjutan dari Fasilitas Kredit, (ii) melakukan penggabungan dan/atau peleburan, pengambilalihan atau akuisisi dan menjual aset, (iii) melakukan perubahan susunan pengurus dan wajib menyerahkan salinan akta-akta mengenai setiap pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 1 minggu setelah perubahan, dan (iv) melakukan perubahan anggaran dasar antara lain mengubah permodalan dan menyampaikan kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya perubahan, dan (iv) melakukan pembagian atau pembayaran dividen.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp0.

BRI Life

1. Perjanjian Pembiayaan Investasi Berdasarkan Sewa Guna Usaha dengan PT Bringin Srikandi Finance

Pada 5 September 2016 dan 3 September 2018, BRI Life sebagai penerima pembiayaan (“**Penerima Pembiayaan**”) setelah menandatangani perjanjian pembiayaan penyediaan barang modal yang disewakan secara sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut pada saat berakhirnya perjanjian ini dengan PT Bringin Srikandi Finance sebagai pemberi pembiayaan (“**Pemberi Pembiayaan**”). Perjanjian pembiayaan investasi masing-masing tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 48 bulan sejak tanggal ditandatanganinya STNK atas barang modal dan pada tanggal 3 September 2022. Perjanjian pembiayaan investasi ini tidak dijamin dengan jaminan apapun.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp7.043.618.182.

BRI Agro

1. Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi I BRI Agro Tahun 2017

BRI Agro telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 17 April 2017, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 5 Juli 2017, dengan BNI sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000,00 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp261.000.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp239.000.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun untuk obligasi seri A, dan 8,50% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh BRI Agro untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BNI, BRI Agro dilarang untuk melakukan (i) penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut (kecuali penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan atau dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan), (ii) memberikan pinjaman kepada pihak manapun (kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan atau pinjaman atas transaksi normal), (iii) mengadakan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya BRI Agro, atau

yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama BRI Agro, (iv) mengubah bidang usaha BRI Agro, dan (v) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor BRI Agro.

BRI Agro telah melunasi Obligasi Seri A dari Obligasi I BRI Agro Tahun 2017.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp239.000.000.000.

2. Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("SMF")

BRI Agro telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas pinjaman tanggal 14 Desember 2020 dengan SMF sehubungan dengan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera. Perjanjian tersebut akan jatuh tempo paling lama 20 tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman, yang mana pencairan fasilitas pinjaman hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Tingkat bunga pinjaman adalah tingkat bunga tetap sebesar 4,45% per tahun. Fasilitas pinjaman ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

Berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman ini, tanpa persetujuan tertulis dari SMF, BRI Agro tidak diperkenankan (i) mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit BRI Agro sendiri, (ii) mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini, (iii) mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BRI Agro kepada pihak lain, (iv) menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai tujuan penggunaan fasilitas pinjaman, dan (v) melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera dengan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp17.175.906.241.

BRI Finance

1. Perjanjian Kredit Antara BRI Finance dan PT Bank Victoria International Tbk ("Bank Victoria")

BRI Finance telah menandatangani perjanjian kredit dengan memakai jaminan dengan Bank Victoria pada tanggal 2 Agustus 2019, berupa fasilitas Demand Loan (DL) – Revolving (Uncommitted) dengan mekanisme transaksi Money Market Line sampai jumlah setinggi-tingginya Rp250.000.000.000 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 5 Agustus 2021. Perjanjian kredit akan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2022, dengan biaya bunga berdasarkan suku bunga yang berlaku. Fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembayaran (*account receivables*).

Berdasarkan perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Victoria, BRI Finance dilarang untuk (i) merubah bidang/jenis usaha dan merubah anggaran dasar tentang maksud dan tujuan, kecuali dikarenakan mengikuti peraturan OJK, (ii) merubah bentuk hukum atau status hukum BRI Finance, dan (iii) melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham. Lebih lanjut, BRI Finance juga wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank Victoria selambat-lambatnya 30 hari setelah dilaksanakannya: (i) menerbitkan surat berharga, (ii) perubahan susunan pengurus, dan/atau (ii) perubahan anggaran dasar selain tentang maksud dan tujuan dan kegiatan usaha dan sesuai dengan aturan OJK.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp250.000.000.000.

2. Perjanjian Kredit Antara BRI Finance dan PT Bank BTPN Tbk ("Bank BTPN")

BRI Finance telah menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit revolving dengan total sebesar USD 40.000.000 dengan Bank BTPN pada tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana diubah berdasarkan Skedul No. 015 atas perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak pada tanggal 1 Februari 2021. Fasilitas kredit revolving digunakan BRI Finance untuk tujuan modal kerja. Jangka waktu ketersediaan adalah sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Tanggal jatuh tempo fasilitas kredit revolving adalah 6 bulan setelah tanggal penarikan (*draw down date*) fasilitas kredit revolving. Suku bunga atas fasilitas kredit revolving adalah masing-masing: (i) 0,8% per tahun ditambah *Cost of Fund* untuk penarikan dengan suku bunga Rupiah untuk tenor kurang dari 3 bulan dan (ii) 1,5% per tahun ditambah JIBOR yang berlaku untuk penarikan dalam suku bunga Rupiah untuk tenor 3 bulan dan ke atas. Dalam hal penarikan dilakukan dalam suku bunga USD, maka suku bunga yang berlaku adalah 0,8% per tahun ditambah *Cost of Fund*.

Berdasarkan perjanjian kredit, BRI Finance wajib untuk, antara lain (i) memberikan pemberitahuan (berserta dengan dokumen pendukungnya) kepada Bank BTPN segera setelah tersedia dan dalam hal apapun dalam 15 hari kalender setelah perubahan anggaran dasarnya atau perubahan anggota direksi dan dewan komisaris atau perubahan pemegang saham atau struktur perusahaannya, (ii) memastikan perbandingan utang terhadap ekuitas dipertahankan tidak lebih dari 8,5 banding 1,0 dan net NPL paling tinggi sebesar 5%, dan (iii) memastikan kepemilikan saham Perseroan secara langsung atau tidak langsung dipertahankan paling sedikit 51% dari modal ditempatkan dan disetor BRI Finance.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD 10.030.000 atau setara dengan Rp146.157.160.000

3. Perjanjian Fasilitas USD 50.000.000 BRI Finance

Pada tanggal 14 November 2019, BRI Finance telah menandatangani suatu perjanjian fasilitas dengan (i) CTBC Bank Co. Ltd. ("**CTBC Bank**") (ii) PT Bank CTBC Indonesia ("**CTBC Indonesia**"), (iii) Taishin International Bank Co., Ltd. ("**Taishin Bank**"), CTBC Bank Co., Ltd., Singapore selaku ("**Agen**") dan PT Bank Central Asia Tbk selaku agen jaminan. Lebih lanjut, pada tanggal 21 April 2020, perjanjian fasilitas tersebut telah diubah menjadi suatu perjanjian sindikasi ("**Perjanjian Fasilitas**") yang kemudian juga untuk menambahkan kreditur baru yakni, dan The Export-Import Bank of the Republic of China selaku kreditur ("**Bank of China**") (ii) CTBC Bank, (ii) CTBC Indonesia, (iii) Taishin Bank, dan (iv) Bank of China, secara bersama-sama disebut sebagai "**Kreditur**". Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Kreditur menyediakan BRI Finance suatu fasilitas pinjaman berjangka sesuai dengan masing-masing komitmen, dengan jumlah keseluruhan sebesar USD50.000.000, yang seluruhnya harus digunakan untuk tujuan umum perusahaan ("**Fasilitas**"). Jangka waktu ketersediaan Fasilitas adalah tanggal yang jatuh 9 bulan setelah tanggal 14 November 2019, atau sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020, sedangkan jatuh tempo atas fasilitas pinjaman berjangka adalah tanggal yang jatuh tempo pada 36 bulan dari tanggal penggunaan pertama. Tingkat suku bunga pada masing-masing pinjaman untuk masing-masing periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari margin sebesar 0,92% per tahun dan LIBOR. Fasilitas dijamin dengan suatu jaminan fidusia atas piutang dari BRI Finance kepada Kreditur melalui agen jaminan.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, BRI Finance wajib untuk, antara lain: (i) memastikan total utangnya tidak lebih dari 8,5 kali (atau tingkat yang lebih kecil sebagaimana ditentukan oleh OJK) terhadap Kekayaan Bersih Berwujudnya dan nilai dari Pembiayaan Tidak Lancarnya tidak lebih dari 5% dari agregat piutangnya, (ii) segera memberitahukan Agen setelah menyadari peristiwa Perubahan Kendali (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas) timbul. Lebih lanjut Perjanjian Fasilitas juga mengatur larangan-larangan, antara lain, yakni BRI Finance tidak akan (i) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan salah satu dari asetnya dengan ketentuan di mana mereka atau dapat disewakan atau diperoleh kembali olehnya; (ii) mengadakan suatu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi (apakah terkait atau tidak) dan apakah sukarela atau terpaksa dan baik pada waktu yang sama atau dalam suatu periode untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau sebaliknya menghapus aset apapun; (iii) mengadakan suatu amalgamasi, demerger, penggabungan, konsolidasi atau rekonstruksi perusahaan apapun; (iv) memberikan suatu pinjaman, memberikan suatu kredit atau memberikan bantuan keuangan lainnya untuk manfaat dari suatu pihak; (v) tidak ada perubahan yang substansial yang dilakukan terhadap sifat umum usaha dari BRI Finance; (vi) mengambil seluruh atau sebagian suatu bisnis, aset atau kesanggupan (atau, dalam keadaan apapun, hak kepemilikan dalam salah satu dari mereka); (vii) mendirikan atau membeli suatu perusahaan; (viii) berinvestasi pada usaha yang bukan usaha utamanya; (ix) menebus, membeli, mengembalikan, mengurangi atau melakukan pelunasan apa pun sehubungan dengan modal sahamnya atau melakukan pembagian aset atau modal kepada para pemegang sahamnya atau menandatangani perjanjian apa pun untuk melakukan hal tersebut atau melakukan suatu pelunasan sehubungan dengan pinjaman atau utang lainnya yang terutang kepada para pemegang sahamnya; (x) menerbitkan saham atau memberikan suatu pihak atas hak (baik bersyarat atau tidak) untuk membeli penerbitan atau penempatan suatu saham dalam modal BRI Finance (termasuk opsi atau hak memesan terlebih dahulu atau konversi) atau menandatangani suatu perjanjian atau menentukan untuk melakukan hal-hal yang disebutkan sebelumnya, sepanjang saham yang diterbitkan BRI Finance tersebut tidak mengakibatkan Perubahan Kendali (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas); dan (xi) meminta, mengizinkan atau membuat suatu perubahan terhadap dokumen konstitusinya yang dapat mengakibatkan Dampak Kerugian Yang Merugikan Secara Material (sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas), kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Agen terhadap dokumen konstitusi BRI Finance yang dapat memberikan efek pengurangan modal dasar BRI Finance atau perubahan tersebut dilakukan untuk mematuhi peraturan OJK yang berlaku.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD19.666.667 atau setara dengan Rp286.582.666.914.

4. Perjanjian-Perjanjian Kredit Antara BRI Finance dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada tanggal 9 Oktober 2018, BRI Finance telah menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit jangka pendek dengan limit sebesar Rp500.000.000.000 dengan Bank Mandiri yang bersifat revolving, uncommitted dan advised sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 1 Juli 2021 (“**Perjanjian Fasilitas KJP**”). Tujuan dari fasilitas kredit tersebut adalah sehubungan dengan pembiayaan kebutuhan modal kerja atau gap/deficit cash flow jangka pendek BRI Finance. Fasilitas kredit ditetapkan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022. Suku bunga atas pinjaman fasilitas kredit ditetapkan oleh Bank Mandiri pada saat penarikan.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp450.000.000.

Lebih lanjut, pada tanggal 10 Juli 2019 BRI Finance juga telah menerima fasilitas kredit modal kerja dengan limit sebesar Rp750.000.000.000 dengan Bank Mandiri yang bersifat revolving selama masa penarikan dan tiap batch penarikan dan menjadi non-revolving apabila jangka waktu penarikan telah berakhir atau Bank Mandiri telah memberikan tambahan (limit baru) fasilitas kredit modal kerja kepada BRI Finance (“**Perjanjian Fasilitas KMK**”). Fasilitas kredit modal kerja ditetapkan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian (10 Juli 2019) atau sampai dengan tanggal 10 Juli 2024. Suku bunga atas pinjaman fasilitas kredit ditetapkan oleh Bank Mandiri pada saat penarikan.

Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2021 BRI Finance juga menerima tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri sesuai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/290/KMK/2021 No. 1 dengan limit sebesar Rp 250.000.000.000 yang bersifat revolving selama masa penarikan dan tiap batch penarikan dan menjadi non-revolving apabila jangka waktu penarikan telah berakhir dimana tujuan ini untuk pembiayaan kendaraan bermotor sesuai dengan kegiatan usaha BRI Finance. Fasilitas kredit modal kerja ditetapkan selama 60 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian (23 November 2020) atau sampai dengan tanggal 22 November 2025, dengan ketentuan bahwa jangka waktu penarikan terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 dan jangka waktu angsuran maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.901.606.201.

Berdasarkan masing-masing Perjanjian Fasilitas KJP dan Perjanjian Fasilitas KMK, BRI Finance wajib untuk, antara lain untuk, (i) memelihara gearing ratio maksimal sebesar 10 kali, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam hal (a) perubahan anggaran dasar BRI Finance termasuk di dalamnya pemegang saham mayoritas (diatas 50% dari jumlah kepemilikan saham), pengurus BRI Finance, permodalan, dan nilai saham, (b) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha BRI Finance yang normal dan transaksi yang wajar, (c) mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan pihak lain, kecuali dalam rangka pendanaan untuk mendukung kegiatan usaha BRI Finance yang wajar, (d) melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham mayoritas (diatas 50% dari jumlah kepemilikan saham), kecuali yang berkaitan dengan transaksi perbankan yang normal, dan (d) melakukan merger atau akuisisi.

5. Perjanjian Kredit Antara BRI Finance dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”)

Pada tanggal 30 Oktober 2018, BRI Finance telah menerima fasilitas kredit modal kerja dengan limit sebesar Rp300.000.000.000 dengan Bank BNI yang bersifat *revolving* dan *uncommitted* (“**Fasilitas KMK**”) sebagaimana telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 8 Oktober 2020. Fasilitas kredit modal kerja ditetapkan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Fasilitas kredit diberikan kepada BRI Finance dengan tujuan untuk pembiayaan piutang kepada *end user*, baik untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau roda 2 maupun pembelian lainnya (seperti alat berat, truck, mesin dan lain-lain). Suku bunga efektif yang bersifat *fixed rate* atas pinjaman fasilitas kredit ditetapkan yakni, 8% untuk jangka waktu 1 tahun dan 8,5% untuk jangka waktu 2, 3, atau 4 tahun. Fasilitas KMK dijamin dengan agunan berupa piutang pembiayaan.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit modal kerja dan selama Fasilitas KMK belum dilunasi, BRI Finance tidak diperkenankan untuk (i) mempergunakan Fasilitas KMK diluar peruntukannya, (ii) menyerahkan piutang beserta jaminannya yang telah dijamin kepada Bank BNI kepada pihak lain, (iii) melakukan perubahan bidang usaha yang dapat menimbulkan akibat material dan/atau sanksi OJK, dan (iv) tanpa pemberitahuan tertulis kepada Bank BNI, BRI Finance tidak diperkenankan untuk membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham. Lebih lanjut, tanpa persetujuan tertulis dari Bank BNI, BRI Finance tidak diperkenankan untuk, antara lain (i) memindahtangankan dan/atau menjual saham BRI Finance kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*), (ii) menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan Fasilitas KMK, (iii) menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang sedang dijamin kepada Bank BNI kepada pihak lain, (iv) mengikatkan diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain, (v) melakukan likuidasi, atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan, (vi) melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain, (vii) mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, dan (viii) menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notarii. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit modal kerja, BRI Finance diwajibkan untuk mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, yakni (i) *current ratio* minimal 1 kali, (ii) *debt equity to ratio* maksimal 10 kali, (iii) menjaga kualitas piutang fasilitas kredit dengan umur tunggakan > 90 hari (*Non Performing Loan gross*) maksimal sebesar 5%, dan (iv) menjaga rasio piutang pembiayaan lancar dibandingkan dengan total hutang Bank BNI minimal 1 kali.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp16.111.111.111.

6. Perjanjian Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) I BRI Finance Tahun 2019

Pada tanggal 11 Desember 2019, BRI Finance (selaku penerbit) telah menandatangani perjanjian penerbitan *medium term notes* (MTN) 1 BRI Finance Tahun 2019 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku ("**Agen Pemantau**") dan PT Danareksa Sekuritas selaku *arranger* ("**Perjanjian MTN**") sehubungan dengan penerbitan *medium term notes* dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 ("**MTN**") dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan, yakni pada tanggal 13 Desember 2019 atau berlaku sampai dengan 13 Desember 2022. Tingkat bunga MTN adalah sebesar 9,25% per tahun yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender yang lewat dengan perhitungan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari.

Berdasarkan Perjanjian MTN, sebelum dilunasinya jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab BRI Finance selaku peneerbit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Pemantau, BRI Finance tidak akan (i) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dan (ii) melakukan penggabungan dan/atau pemisahan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, yang secara material akan mempunyai akibat yang negative terhadap kewajiban BRI Finance terhadap MTN. Berdasarkan Perjanjian MTN, BRI Finance juga berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansial sebagai berikut: (i) memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 90 kali dan paling tinggi 10 kali, (ii) memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, (iii) memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan, (iv) memiliki rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap aset paling rendah 40%, (v) memiliki rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk paling sedikit 10%, (vi) memiliki rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah 50%, (vii) mempertahankan rasio saldo piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah setelah dikurang cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk untuk piutang pembiayaan dengan kualitas lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan paling tinggi sebesar 5%, (viii) memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000.000.000. Lebih lanjut, BRI Finance juga diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar BRI Finance yang telah disetujui oleh Menkumham dan/atau laporan tentang perubahan anggaran dasar kepada Menkumham kepada Agen Pemantau.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp300.000.000.000.

7. Perjanjian Kredit Antara BRI Finance dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank CIMB”)

Pada tanggal 27 Januari 2021, BRI Finance telah menerima fasilitas pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp300.000.000 yang bersifat *committed* dan *revolving* (berulang) dari Bank CIMB (“Perjanjian KMK”). Suku bunga atas fasilitas pinjaman modal kerja tersebut ditetapkan dengan indikatif sebesar 8% per tahun, yang akan disesuaikan berdasarkan bunga yang berlaku pada saat penarikan. Jangka waktu dan jatuh tempo fasilitas kredit modal kerja adalah 48 bulan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025, sedangkan jangka waktu penarikan adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022. Fasilitas pinjaman modal kerja dijamin dengan piutang lancar dari total saldo pinjaman yang diterima BRI Finance sebesar 10% dan *promissory notes* yang diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan minimum 100% dari *outstanding* fasilitas kredit modal kerja sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp300.000.000.000.

Berdasarkan Perjanjian KMK, BRI Finance wajib untuk, antara lain: (i) menjaga kepemilikan dari Perseroan di BRI Finance tidak kurang dari 51% baik secara langsung maupun tidak langsung atas saham yang telah ditempatkan dan disetor, (ii) menjaga *non-performing financing* (umur piutang lebih dari 90 hari maksimal 5% dari total seluruh piutang pembiayaan), (iii) menjaga dan memelihara *debt to equity ratio* maksimal 7.0x kali, (iv) memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank CIMB selambat-lambatnya 7 hari kerja setelahnya, dalam hal BRI Finance: (a) mengubah susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham atau pihak yang setara lainnya, dengan ketentuan, dalam hal Perseroan menjadi tidak lagi memiliki saham di BRI Finance sekurang-kurangnya 51% baik secara langsung maupun tidak langsung atas saham yang telah ditempatkan dan disetor, maka perubahan susunan pemegang saham tersebut, wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB atau (b) mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya sepanjang ketentuan keuangan terpenuhi.

Berdasarkan Perjanjian KMK, sebelum seluruh kewajiban BRI Finance telah terpenuhi/dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB, BRI Finance tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan sebagai berikut, antara lain: (i) menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik BRI Finance baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, (ii) mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan BRI Finance kepada pihak lain, (iii) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha BRI Finance, (iv) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, (v) membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam BRI Finance.

Nilai pinjaman terutang per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp0.

11.2 Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Pengadaan Jasa Managed Service CRM RBB Tahun 2019 dan Replacement Beserta Perangkat Pendukungnya No. B.248.K-PBJ/PIT/11/2019 dan No. B.35/DIR/PERJ/11/2019 tanggal 27 November 2019.	Perseroan; dan PT Bringin Inti Teknologi.	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan jasa managed service CRM RBB tahun 2019 dan replacement beserta perangkat pendukungnya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.	5 tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Jangka waktu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah dilakukan pada November 2019, Desember 2019, Januari 2020, Maret 2020 dan April 2020 untuk masing-masing pekerjaan sebagaimana relevan.
2.	Perjanjian Pengadaan Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat) Untuk Operasional Unit Kerja Mikro BRI No. B.81.K-PBJ/PBN/11/2019 tanggal 4 November 2019.	Perseroan; dan PT Surya Sudeco.	Bahwa Perseroan memerlukan sewa sejumlah 687 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza 1.3 G M/T untuk keperluan Unit Kerja Mikro BRI,	48 bulan sejak tanggal perjanjian. Berakhir pada Januari 2024 dan Mei 2024 sesuai dengan pengiriman masing-masing unit kendaraan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			dan selanjutnya Para Pihak sepakat dan setuju mengadakan perjanjian pengadaan Toyota Avanza 1.3 G M/T untuk keperluan Unit Kerja Mikro BRI.	
3.	Perjanjian Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya Untuk Integrasi Fase 2B (Zona 2, 3 dan 4) No. B.20.K-PBJ/PIT/02/2019 dan No. B.004A/P-DIR/II/2019 tanggal 8 Februari 2019..	Perseroan; dan PT Satkomindo Mediyasa ("Satkomindo").	Bahwa dalam rangka Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2b, Perseroan telah melaksanakan pemilihan dan telah menunjuk Satkomindo sebagai pelaksana managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2b (Zona 2, 3, dan 4). Adapun ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang wajib dilakukan oleh Satkomindo adalah melaksanakan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk integrasi Fase 2b Zona 2, Zona 3 dan Zona 4.	jangka waktu <i>managed service</i> adalah 60 bulan sejak Berita Acara Online. Berita Acara Online telah dilakukan pada Februari dan Maret 2019.
4.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Info Solusindo Data Utama tentang Penyediaan Backup dan Recovery Solution di DC dan DRC No. B.28.K-PBJ/PIT/02/2020 tanggal 27 Februari 2020.	Perseroan; dan PT Info Solusindo Data Utama ("IDU").	Bahwa Perseroan telah menunjuk IDU sebagai pelaksana pengadaan <i>backup</i> dan <i>recovery solution</i> di DC dan DRC. IDU telah menyatakan bersedia dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Perseroan dengan sebaik-baiknya. Adapun salah satu ruang lingkup pekerjaan adalah pengadaan <i>Backup</i> dan <i>Recovery Solution</i> berupa <i>software</i> dan <i>hardware</i> di DC GTI dan DRC Tabanan.	Jangka waktu pekerjaan (i) <i>Engineer on Site</i> dimulai H+1 setelah <i>Live</i> sampai dengan 3 tahun dan untuk <i>Maintenance (local support dan online support)</i> selama 3 tahun sejak Berita Acara Go Live. Berita Acara Go Live telah dilakukan pada 4 Juni 2020.
5.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya	Perseroan; dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI").	Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya Untuk	Jangka waktu Managed Service selama 5 tahun sejak Berita Acara Online. Berita Acara Online Batch 1 telah dilakukan pada Februari 2019.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	<p>Untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5) No. B.22.K-PBJ/PIT/02/2019 tanggal 8 Februari 2019.</p>		<p>Integrasi Fase 2B (Zona 5). Bahwa Perseroan telah menunjuk INTI untuk pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5).</p> <p>Ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut "Pekerjaan") yang wajib dilakukan oleh INTI adalah melaksanakan pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 2B (Zona 5) dengan jadwal implementasi sesuai dengan lampiran pada perjanjian.</p>	
6.	<p>Perjanjian antara Perseroan dengan PT Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2020 (Zona 2) No. 069.K-PLO/PSR/LEG/11/2020 tanggal 3 November 2020.</p>	<p>Perseroan; dan PT Datindo Infonet Prima ("DIP").</p>	<p>Bahwa Perseroan telah menunjuk DIP untuk pengadaan managed service CRM RBB Tahun 2020 (Zona 2).</p> <p>Ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut "Pekerjaan") yang wajib dilakukan oleh DIP adalah melaksanakan managed service CRM RBB Tahun 2020 sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah disepakati.</p>	<p>Jangka waktu Managed Service selama 5 tahun sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.</p> <p>Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah dilakukan pada Maret 2020, April 2020 dan Mei 2020.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
7.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Tangara Mitrakom tentang Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink Untuk Integrasi BRISAT Fase 3 (Zona 5) No. B.88.K-PBJ/PIT/07/2020 tanggal 8 Juli 2020.	Perseroan; dan PT Tangara Mitrakom ("TM").	<p>Bahwa Perseroan telah menunjuk TM sebagai pelaksana pengadaan managed service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISAT Fase 3 (Zona 5).</p> <p>Ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut "Pekerjaan") yang wajib dilakukan oleh TM adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Migrasi Satlink untuk Zona 5 (Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan jumlah dan komposisi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian; Managed Service VSAT Remote Terminal mencakup Managed Service untuk Antena VSAT Remote Fullset; Standar SLA jaringan komunikasi tetap mengikuti ketentuan Perseroan. 	<p>Jangka waktu Managed Service selama 5 tahun sejak Berita Acara Online.</p> <p>Berita Acara Online telah dilakukan pada Mei 2021 dan Agustus 2021.</p>
8.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Bringin Inti Teknologi, tentang Pengadaan <i>Managed Service CRM RBB Tahun 2020</i> (Zona 1 dan Zona 3) No. 098.K-PLO/PSR/LEG/11/2020 dan No. B.26/DIR/PERJ/12/2020 tanggal 13 November 2020, sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 241.K-PLO/PSR/LEG/02/2021 dan No. B.9/DIR/PERJ/02/2021 tanggal 19 Februari 2021.	Perseroan; dan PT Bringin Inti Teknologi ("BRIT").	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian tentang pengadaan <i>managed service CRM RBB Tahun 2020</i> (zona 1 dan zona 3) sesuai dengan <i>term of reference</i> (TOR) pengadaan <i>manage service CRM RBB Tahun 2020</i> (zona 1 dan zona 3) berikut tambahan dan perbaikannya, berita acara <i>aanwijzing</i> , berita acara pemasukan dan pembukaan proposal penawaran,	<p>Jangka waktu <i>managed service</i> adalah selama 5 tahun per lokasi CRM <i>live</i> sejak tanggal berita acara serah terima pekerjaan.</p> <p>Berita acara serah terima pekerjaan telah dilakukan pada 15 Februari 2021 dan 1 April 2021.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			berita acara klarifikasi/negosiasi dan berita acara lainnya yang telah disepakati.	
9.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Satkomindo Mediyasa, tentang Perpanjangan Sewa Jaringan Komunikasi MPLS Provider PT Satkomindo Mediyasa No. 059.K-PLO/PSR/LEG/01/2021 dan No. B.002B.P-DIR/I/2021 tanggal 15 Januari 2021.	Perseroan; dan PT Satkomindo Mediyasa (" Satkomindo ").	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perpanjangan sewa jaringan komunikasi MPLS provider Satkomindo sesuai dengan SPK sebelumnya. Standar SLA jaringan komunikasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pihak Perseroan (dalam hal ini ketentuan yang dikeluarkan oleh INF Division).	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.
10.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Satkomindo Mediyasa, tentang Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal untuk Migrasi 4.733 EX Fase 1 PT Satkomindo Mediyasa ke Hub Jupiter (Fase 4) No. 456.K-PLO/PSR/LEG/03/2021 dan No. B.008A.PA-DIR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.	Perseroan; dan PT Satkomindo Mediyasa (" Satkomindo ").	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian pengadaan <i>managed service</i> VSAT remote terminal untuk migrasi 4.733 ex fase 1 PT Satkomindo Mediyasa ke hub Jupiter (fase 4).	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan untuk instalasi dan implementasi berlaku selama 12 bulan sejak tanggal SPK yaitu tanggal 26 Maret 2021 dan Managed service selama 60 bulan sejak tanggal online per masing-masing titik/lokasi yang terdapat dalam Berita Acara <i>Online</i> (BAOL).
11.	Perjanjian antara Perseroan dengan PT Datindo Infonet Prima, tentang Pengadaan Maaged Service CRM RBB Tahun 2020 (Zona 2) No. 069. K-PLO/PSR/LEG/11/2020 dan No. 013B/DIP/PKS/XI/2020 tanggal 3 November 2020.	Perseroan; dan PT Datindo Infonet Prima (" DIP ").	Bahwa Para Pihak setuju untuk mengadakan perjanjian pengadaan managed service CRM RBB Tahun 2020 (zona 2) sesuai dengan term of reference pengadaan manage service CRM RBB tahun 2020 (zona 2) berikut tambahan dan perbaikannya.	Jangka waktu selama 5 tahun per lokasi CRM live sejak tanggal berita acara serah terima pekerjaan. Berita acara serah terima pekerjaan telah dilakukan pada 1 April 2021.
BRINS				
1.	Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan Aplikasi CARE GENERAL INSURANCE SYSTEM SOLUSTION (CGISS) No. -DIR/TSI/08/2017 tanggal 30 Juli 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum IV Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan Aplikasi CARE GENERAL INSURANCE SYSTEM SOLUSTION (CGISS) No. PKS.29-	BRINS; dan PT CARE Technologies.	PT CARE setuju untuk melaksanakan Jasa Pemeliharaan dan Pelatihan Aplikasi CARE GENERAL INSURANCE SYSTEM SOLUSTION (CGISS) dengan lingkup di 1 lokasi, yaitu kantor pusat BRINS untuk modul utama dan modul pendukung.	Berlaku untuk jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	DIR/LOG/06/2020 tanggal 21 Juni 2021.			
2.	Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya No. 01364-SDM/BRINS/II/2020 tanggal 1 September 2020.	BRINS; dan PT Prima Karya Sarana Sejahtera ("PKSS").	BRINS telah menunjuk PKSS untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan jasa tenaga alih daya yang akan ditempatkan di lokasi BRINS untuk jabatan-jabatan tertentu, antara lain (i) petugas administrasi, (ii) satuan keamanan, (iii) sekretaris, dan (iv) pelayanan transportasi.	Berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.
3.	Perjanjian Kerjasama tentang Layanan <i>Managed Interconnection Service, Rack Colocation</i> Gedung IDC-3D dan <i>Virtual Private Server Hosting</i> (VPS Hosting) No. PKS.013A/PKS-06/2020 tanggal 15 Juni 2020.	BRINS; dan CV. Xtra Prosolusindo ("Xtra").	BRINS telah menunjuk Xtra untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan <i>managed interconnection service</i> , yakni (i) <i>network peering</i> , (ii) <i>Host-to-Host interconnection</i> dengan pihak ketiga, dan (iii) <i>API interconnection</i> .	Berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2021. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
4.	Perjanjian Kerja Sama tentang Rekanan Perusahaan Asuransi No. 041-DIR/BNS2/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Rekanan Perusahaan Asuransi No. OPK/3/497 tanggal 25 Mei 2021.	BRINS; dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI").	BRINS telah ditunjuk oleh Bank BNI sebagai rekanannya untuk melakukan penutupan asuransi kepada Bank BNI atas berbagai risiko, yaitu (antara lain), (i) risiko kerugian atas agunan kredit, (ii) risiko atas fasilitas kredit, dan (iii) risiko kerugian atas aset Bank BNI.	Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
5.	Perjanjian Kerja Sama tentang Asuransi Kredit Umum Produktif Dalam Rangka Optimalisasi Aset No. PKS. 035-DIR/BISNIS 2/10/2019.	BRINS; dan PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin").	Para pihak sepakat untuk bekerja sama dengan tujuan untuk asuransi kredit produktif dalam rangka mengoptimalkan aset kredit UMKM dan pembagian risiko kerugian kredit yang disalurkan oleh penerima asuransi kredit dari Bank Bukopin.	Berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021.
6.	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Keperantaraan Untuk Asuransi Kredit Umum Produktif Dalam Rangka Optimalisasi Aset di Bank Bukopin No. PKS.036-DIR/BISNIS 2/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019.	BRINS; Bank Bukopin; dan PT Bina Dana Sejahtera ("BDS").	Bank Bukopin menyerahkan kepada BDS untuk melaksanakan jasa keperantaraan program asuransi kredit umum produktif dalam rangka optimalisasi aset, dimana BDS mewakili Bank Bukopin untuk	Berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2021.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			melakukan proses permohonan klaim kepada BRINS.	
7.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penutupan Asuransi No. 641-DIR/BNS2/12/2020 tanggal 7 Desember 2020.	BRINS; dan PT Bio Farma (Persero) (" Bio Farma ").	BRINS setuju untuk ditunjuk oleh Bio Farma sebagai penyedia asuransi untuk melaksanakan pengadaan jasa asuransi sesuai kebutuhan Bio Farma.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan berakhirnya masa pertanggungan terakhir berdasarkan masing-masing polis asuransi dengan Bio Farma. Jangka waktu pertanggungan masing-masing polis dengan Bio Farma adalah sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
8.	Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Asuransi Kebakaran Dalam Rangka Produk Bank No. PKS.23-DIR/BNS2/07/2020 tanggal 30 Juli 2020.	BRINS; dan PT Bank DKI (" Bank DKI ").	Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama pemasaran produk asuransi kebakaran dengan menggunakan model bisnis referensi dalam rangka produk.	Berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022.
9.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pengiriman Barang/Dokumen No. 170/PK/TLB-ABS/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020.	BRINS; dan PT Tricor Lintas Benua (" TLB ").	TLB menyetujui untuk melaksanakan penjemputan titipan dari alamat BRINS, serta melakukan pengiriman dan pengantaran titipan ke alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan BRINS.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021.
10.	Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pengiriman Surat/Dokumen dan Paket No. B914A/SUC/DIR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.	BRINS; dan PT Sinar Usaha Cemerlang (" SUC ").	SUC menyetujui untuk melaksanakan penjemputan titipan dari alamat BRINS, serta melakukan pengiriman dan pengantaran titipan ke alamat tujuan sesuai dengan jenis layanan yang diinginkan BRINS.	Berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021.
11.	Perjanjian Sehubungan Dengan Pemanfaatan Aplikasi tanggal 20 Februari 2020.	BRINS; dan PT People Intelligence Indonesia (" PII ").	BRINS setuju untuk memanfaatkan dan menggunakan aplikasi yang dimiliki PII untuk digunakan oleh karyawan BRINS.	Berlaku sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021 atau BRINS sudah tidak berhak memanfaatkan aplikasi. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
BRI Danareksa				
1.	Perjanjian Berlangganan Jasa CBN No. 0434/CA/LGL-CSO/GM/LOC/IX/19 tanggal	BRI Danareksa; dan PT Cyberindo	BRI Danareksa menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan	Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya berita acara oleh Para Pihak,

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	13 September 2019.	Aditama (“Pihak Kedua”).	layanan berupa pesat koneksi dan fasilitas layanan dan BRI Danareksa menyediakan peralatan, perlengkapan, serta perizinan yang diperlukan agar dapat menggunakan dan menikmati layanan yang disediakan.	dan seterusnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 bulan, kecuali diakhiri lebih awal.
2.	Perjanjian Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem PABX No. PJ-29/0134/II/LGL dan No. 004/WMS-MC/II/2020 tanggal 16 Februari 2020.	BRI Danareksa; dan PT Wahana Mandiri Sydratama (“Pihak Kedua”).	BRI Danareksa menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan serta peningkatan sistem PABX.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
3.	Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Integrated Budget System (IBS) No. PJ-27/103/II/LGL tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Pemeliharaan Integrated Budget System (IBS) No. PJ-048B/LGL/05/2021 dan No. 006/ADM-MAINT/IMS-BRIDS/0521 tanggal 5 Mei 2021.	BRI Danareksa; dan PT Inovasi Mitra Sejati (“Pihak Kedua”).	BRI Danareksa menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan jasa berupa pemeriksaan dan perbaikan kesalahan yang dapat diverifikasi, kegagalan, tidak berfungsinya, ketidakcocokkan, atau kerusakan yang terjadi dalam aplikasi software yang dilisensikan yang mengakibatkan tidak dapat berjalannya fungsi utama aplikasi software sesuai standar program.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022.
4.	Perjanjian Pemeliharaan Aplikasi Smartaml No. PJ-41/05B/LG-DS dan No. 02/TDA-DNR/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Keempat Perjanjian Pemeliharaan No. PJ.016E/LGL/03/2021 dan No. 1055/TDA-DAN/V/2021 tanggal 23 Maret 2021.	BRI Danareksa; dan PT Tri Daya Asira (“Pihak Kedua”).	BRI Danareksa menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan aplikasi smartAML agar selalu dalam kondisi baik, sesuai dengan spesifikasi dan terbatas dari permasalahan teknis aplikasi.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
BRI Life				
1.	Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi BRI Life dan PT Asuransi Jiwa Taspen No. B.741/DIR/AJK/08/2020 dan No. Perj-024A/TL/072020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Ko-Asuransi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit bagi Debitur Kredit Pemilikan Rumah PT Bank	BRI Life; dan PT Asuransi Jiwa Taspen (“Pihak Kedua”).	BRI Life dan Pihak Kedua bekerja sama dalam untuk menutup pertanggungans asuransi bagi debitur kredit pemilikan rumah BRI dalam rangka penyebaran risiko dengan membagi risiko antara keduanya.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.			
2.	Perjanjian Kerjasama antara PT Praisindo Teknologi dan PT Asuransi BRI Life No. 174.B/PTP-CAR/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan Amandemen No. 0232.B/PTP-CAR/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Jasa Profesional.	BRI Life; dan PT Praisindo Teknologi (“Pihak Kedua”).	Pihak Kedua memberikan lisensi kepada BRI Life sehingga BRI Life mendapat hak untuk menggunakan perangkat lunak Pihak Kedua berdasarkan perjanjian lisensi.	Perjanjian berlaku dan akan tetap berlaku, kecuali jika diakhiri lebih dini oleh salah satu pihak. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
3.	Perjanjian Kerjasama antara BRI Life dan PT Indomarco prismatama No. 6911/DIR/AKU/X/2015 dan No. 099/CLG-MKT/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penerimaan Pembayaran Premi Asuransi Individu di Gerai Indomaret.	BRI Life; dan PT Indomarco Prismatama (“Pihak Kedua”).	BRI Life dan Pihak Kedua bekerja sama dalam penerimaan pembayaran premi asuransi individu melalui gerai Indomaret/Ceriamart.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
4.	Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BRI Life No. 4426/DIR/AKU/VI/2015 dan No. B.1502/KKD/IPM/06/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Kerjasama Pemasangan EDC.	BRI Life; dan Perseroan (“Pihak Kedua”).	BRI Life dan Pihak Kedua bekerja sama dalam pemasangan <i>electronic data captured</i> (“EDC”).	Berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
5.	Perjanjian Kerjasama antara PT Web Architect Technology dan PT Asuransi BRI Life No. 703/DIR/SKP/HMS/VIII/2020 dan No. 703012 tentang Redevelop Website tanggal 10 Agustus 2020.	BRI Life; dan PT Web Architect Technology (“Pihak Kedua”).	BRI Life dan Pihak Kedua bekerja sama untuk jenis pekerjaan redevelop website dimana pihak kedua membuat desain, membangun, dan mengembangkan website Pihak Pertama yang berada di brilife.co.id .	Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir saat terpenuhinya seluruh kewajiban Para Pihak atau dihentikan lebih awal. Para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian ini.
BRI Ventura				
1.	Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura BRI Ventura Investama Saham A Lokasi Sembrani Nusantara No. 12 tanggal 2 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.	BRI Ventura; dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Pihak Kedua”).	BRI Ventura dan Pihak Kedua setuju untuk membuat kontrak investasi bersama yang di dalamnya memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan dan ventura berbentuk kontrak investasi bersama.	Berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2030.
2.	Perjanjian Kerjasama No. B.381/BVI/DIR/09/2020 dan No. B.140-DIR/PKSS/092020 tanggal 11 September 2020 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum	BRI Ventura; dan PT BRI Prima Karya Sarana Sejahtera (“Pihak Kedua”).	BRI Ventura dan Pihak Kedua bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tenaga alih daya.	Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengadaan Tenaga Ahli Daya No. b.140-a.DIR/PKSS/09/2020 tanggal 11 September 2020.			
BRI Agro				
1.	Perjanjian Kerjasama No. BRIAgro/PKS-59/KRH/09/2019 – No. 30/09/2019 tanggal 30 September 2019.	BRI Agro; dan PT Megawastu Solusindo (“MS”).	BRI Agro dengan ini menunjuk MS dan MS dengan ini menerima penunjukkan dari BRIAgro untuk melaksanakan Pengadaan Aplikasi Sistem <i>Treasury</i> OSTs BRI Agro.	13 September 2019 – 13 September 2022.
2.	Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pinjaman melalui <i>Platform</i> Restock No. 002/PKS-BRIAGRO/LEG/CTI/X/2020 – No. BRI AGRO/PKS-51/DGB/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020.	BRIAgro; dan PT Cerita Teknologi Indonesia.	Para Pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam penyaluran fasilitas pinjaman melalui <i>platform</i> Restock.	14 Oktober 2020 sampai dengan 14 Oktober 2022.
3.	Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat No. 14/PKS/Pg/2020 – No. BRIAGRO/PKS-49/DBK/12/2020 tanggal 18 Desember 2020.	BRI Agro; dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.	Para Pihak setuju bahwa perjanjian ini sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan kerja sama Para Pihak dalam kerja sama operasional penyaluran dan pengembalian dana FLPP.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2021.

Tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan pemegang saham publik dan rencana PMHMETD I.

12. Perkara Yang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta PMHMETD I.

13. Asuransi

Kebijakan Perseroan adalah untuk secara memadai mengasuransikan semua properti Perseroan terhadap risiko kebakaran dan risiko biasa lainnya. Per 31 Desember/Maret 2020/2021, Perseroan mengasuransikan bangunan-bangunan Perseroan (tidak termasuk tanah), kendaraan dan peralatan terhadap kehilangan atau kerusakan fisik. Perseroan juga mempertahankan asuransi untuk risiko operasional seperti kehilangan uang tunai atau surat berharga karena kehilangan atau pencurian. Perseroan tidak membawa asuransi gangguan bisnis yang menanggung hilangnya pendapatan jika operasi Perseroan terpengaruh oleh kejadian tak terduga. Perseroan juga tidak membawa asuransi tanggung jawab pihak ketiga untuk properti Perseroan. Perseroan menyakini bahwa tingkat pertanggungan asuransi Perseroan sesuai dengan praktik industri dan nilai asuransi dapat menutupi seluruh kerugian.

14. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan

Perseroan adalah salah satu bank umum tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Didukung oleh pengalaman lebih dari 125 tahun dan kapabilitas yang kuat dalam layanan perbankan, khususnya dalam melayani UMKM, saat ini Perseroan adalah bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pinjaman dan simpanan (dihitung secara *standalone*) per 31 Maret 2021. Pada tahun 2003, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan saham Perseroan di BEI. Setelah melantai di BEI, Negara RI tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan. Pada tanggal 31 Juli 2021 memiliki saham sebesar 56,75%, dengan masyarakat memiliki saham sebesar 43,25% termasuk saham treasury. Per 30 Juni 2021, kapitalisasi pasar Perseroan adalah Rp485,9 triliun.

Pada era digitalisasi perbankan saat ini, Perseroan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanannya. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut inovasi produk dan layanan perbankan yang terintegrasi dengan sistem digital. Kemampuan beradaptasi dari sisi teknologi ini tidak hanya didorong oleh perilaku nasabah yang berubah, tetapi juga kompetisi layanan keuangan yang kini diwarnai oleh pemain-pemain baru jasa keuangan yang bertumpu pada teknologi, yaitu perusahaan *financial technology* atau *fin-tech*. Untuk dapat terus memberikan layanan terbaik dan menyeluruh bagi nasabah, Perseroan telah menetapkan tiga kerangka strategi digital yaitu *Core Digitization*, *Digital Ecosystem* dan *New Digital Proposition*.

Strategi *Core Digitization* diimplementasikan Perseroan melalui digitalisasi proses bisnis bank dengan tujuan meningkatkan produktifitas dan menangkap potensi bisnis yang lebih besar. Hal ini diwujudkan antara lain melalui BRISPOT dan Agen BRILink. BRISPOT merupakan sebuah aplikasi berbasis digital dengan konsep *one stop service* yang memungkinkan *Loan Officer* untuk melakukan proses kredit secara *end-to-end*, dimanapun dan kapanpun. BRISPOT terbukti dapat mempercepat *turn-around-time* proses pelayanan pinjaman sehingga produktifitas *Loan Officer* meningkat. BRISPOT juga telah dilengkapi dengan aspek mitigasi risiko terbaik di kelasnya.

Sementara itu, BRILink merupakan layanan *branchless banking* untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sebagai perwujudan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dan LKD (Layanan Keuangan Digital). Perseroan bekerja sama dengan nasabah sebagai Agen BRILink dalam melakukan pelayanan finansial kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Pada 31 Maret 2021 jumlah Agen BRILINK mencapai 447.385 agen dengan volume transaksi sebesar Rp251 Triliun atau tumbuh 34,0% *year on year* dan mampu menghasilkan *Fee Based Income* sebesar Rp299,6 Miliar atau tumbuh 25,2% *year on year*. Ke depannya BRILink akan terus dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak nasabah di seluruh pelosok Indonesia serta dalam rangka mendorong inklusi dan literasi keuangan.

Selanjutnya, Strategi *Digital Ecosystem* diimplementasikan dengan membangun ekosistem yang mampu menawarkan produk dan layanan diluar bisnis inti Perseroan dengan tujuan menangkap potensi likuiditas, peluang bisnis dan sumber pertumbuhan baru. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan *digital platform* untuk bisnis nasabah, *new business model* maupun *partnership* dengan Fintech. Inisiatif yang telah dikembangkan Perseroan antara lain Indonesia Mall, BRIBill, BRIMola, BRISat, Junio Smart dan API (*Application Programming Interface*).

Kerangka strategi ketiga adalah *New Digital Proposition* yang diimplementasikan melalui inovasi produk dan layanan digital yang sama sekali baru dan mampu memberikan kontribusi profit bagi BRI di masa depan, dengan tujuan menjangkau segmen yang belum terjangkau (*tapped the untapped*) dan menjadikan Perseroan bagian dari kehidupan nasabah. Inisiatif yang telah dikembangkan Perseroan antara lain dengan meluncurkan PINANG yang merupakan platform pinjaman digital dan pengembangan *Big Data* dan *Analytic*.

Selain itu, Perseroan juga terus mengembangkan cakupan usahanya untuk mengoptimalkan *economic of scale* yang dimiliki, antara lain dengan meningkatkan sinergi dengan Perusahaan Anak dalam rangka mendukung visi Perseroan untuk menjadi "*Integrated Financial Solution*". Sejak 31 Maret 2021 Perseroan memiliki 7 Perusahaan Anak, dengan cakupan bisnis yang beragam, mulai dari bank konvensional yang berfokus pada digital, asuransi jiwa, asuransi umum, remitansi, *multifinance*, perusahaan sekuritas dan *venture capital*. Untuk menjawab perkembangan pasar dan keragaman kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan keuangan, Perseroan mempunyai target untuk menjadi "*Integrated Financial Service Group*", yaitu satu grup perusahaan yang menyediakan berbagai layanan atau jasa keuangan kepada nasabahnya.

Seluruh inisiatif Perseroan tersebut didukung oleh jaringan kerja yang terluas dan tersebar di seluruh Indonesia yaitu 8.885 kantor konvensional (tanpa *payment point*) yang terhubung secara *on-line basis* dan lebih dari 220.000 *e-channel*. Selain unit operasi konvensional seperti kantor cabang, ATM, CDM, EDC dan agen BRILink, kami menawarkan *e-banking* yang memberikan pelanggan akses atas layanan kami melalui internet, telepon dan SMS banking. Perseroan memiliki lebih dari 120 juta rekening nasabah per 31 Maret 2021, yang memberikan sumber yang penting atas dana murah. Perseroan juga memiliki teknologi terdepan diantaranya BRISat, satelit yang dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Perseroan. Perseroan memanfaatkan BRISat sebagai *backbone* jaringan untuk membentuk *financial ecosystem* yang menyatukan seluruh penjuru negeri melalui unit-unit kerja Perseroan yang terus bertumbuh. Melalui BRISat, Perseroan mampu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, "*reach the unreachable*". Seluruh keunggulan Perseroan tersebut kini didukung kinerja yang kuat, sehingga diyakini akan semakin meningkatkan kemampuan Perseroan untuk terus tumbuh dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Dalam rangka peningkatan inovasi dan akselerasi pengembangan bisnis untuk dapat menangkap peluang serta mengikuti perkembangan yang terkini, Perseroan setiap tahunnya telah mengalokasikan anggaran terkait Penelitian dan Pengembangan. Untuk tahun 2021 dan 2020, Perseroan menyediakan alokasi anggaran Penelitian dan Pengembangan masing-masing sebesar Rp34.291 juta dan Rp32.363 juta dengan realisasi penggunaan sampai dengan Maret 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp8.278 juta (atau sebesar 24,14% dari total anggaran tahun 2021) dan Rp23.227 juta (atau sebesar 71,77% dari total anggaran tahun 2020).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan utama, penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru, aset tetap yang penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan, termasuk penggunaan atau pemanfaatannya saat ini dan ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

14.1 Jaringan Kerja dan Layanan

Jaringan distribusi Perseroan yang tersebar di wilayah Indonesia merupakan dasar bisnis dan kekuatan utama bagi Perseroan. Jaringan distribusi ini meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, BRI Unit, Teras BRI, Teras BRI Keliling dan Jaringan *e-channel*. Jaringan Distribusi yang luas ditujukan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan aksesibilitas bagi nasabah Perseroan.

Perseroan memiliki Kantor Inspeksi untuk menjalankan fungsi audit internal baik di seluruh unit kerja. Perseroan secara berkesinambungan mengevaluasi aktivitas bisnis di masing-masing unit kerja untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan fokus di bidang-bidang usaha yang produktif. Perseroan mengelola jaringan unit kerjanya di bawah pembinaan dan penerapan kontrol yang efektif oleh Kantor Wilayah yang saat ini berdiri di 19 kota besar yang tersebar di Indonesia.

Pengembangan dan penambahan jaringan kerja baik konvensional maupun *e-channel* merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran Perseroan dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Pengembangan infrastruktur ini dilakukan melalui konsep ekstensifikasi dan intensifikasi. Strategi ekstensifikasi dilakukan melalui pembukaan unit kerja di daerah-daerah baru, strategi intensifikasi dilakukan melalui optimalisasi potensi bisnis di daerah yang telah dilayani.

Peningkatan akses layanan bagi nasabah yang bertujuan untuk membentuk *financial ecosystem* yang mampu menjangkau seluruh penjuru negeri, Perseroan melalui jaringan kerja *e-channel* lebih difokuskan kepada penambahan jaringan ATM, EDC serta Agen BRILink yang juga dapat mendorong peningkatan efisiensi operasional.

Unit Kerja	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Kantor Pusat	1	1		1
Kantor Wilayah	19	19		19
Kantor Audit Wilayah	18	19		19
Kantor Cabang	461	461		461
Kantor Cabang Khusus	1	1		1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan Luar Negeri	5	5		5
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri	593	608		608
Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri	3	3		3
Kantor Kas	542	547		952
Teras dan Teras Keliling	1.997	2.056		2.182
BRI Unit	5.241	5.382		5.382
Teras Kapal	4	4		3
Jumlah Unit Kerja Operasional	8.885	9.106		9.637

E-Channel	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
ATM	16.558	16.880		19.184
EDC	198.219	198.785		204.386
CRM	5.707	5.809		3.809
E-Buzz	56	57		57
Total	220.540	221.531		227.436

Agen BRILink	31 Maret		31 Desember	
	2021		2020	2019
Total	447.385		504.233	422.160

Pulau	31 Maret 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Unit Kerja	Agen	Unit Kerja	Agen	Unit Kerja	Agen
Sumatera	1.725	113.393	1.896	109.091	2.075	89.922
Jawa – selain DKI Jakarta	4.321	223.620	4.397	261.235	4.543	218.628
DKI Jakarta	559	10.367	562	12.123	568	9.991
Kalimantan	642	23.971	645	33.165	699	26.589
Sulawesi	822	45.560	824	50.261	887	43.652
Bali	235	6.646	236	11.271	250	10.224
Nusa Tenggara	296	14.309	296	17.493	327	14.967
Maluku	90	5.008	90	5.485	105	4.649
Papua	151	4.511	152	4.108	178	3.537
Luar negeri	8	-	8	-	5	-
Jumlah	8.885	447.385	9.106	504.233	9.637	422.160

Perseroan melayani masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui agen BRILink tanpa cabang, yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati layanan perbankan tanpa kehadiran cabang fisik konvensional. Per 31 Desember 2019, 2020 dan 31 Maret 2021, Perseroan memiliki masing-masing 422.160, 504.233 dan 447.385 agen BRILink yang membantu masyarakat di seluruh nusantara dalam melakukan transaksi-transaksi perbankan.

ATM berlokasi di kota-kota besar dan daerah pedesaan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, Unit BRI, pusat perbelanjaan, universitas dan tempat umum lainnya.

Portofolio Pinjaman dan Piutang serta Pembiayaan Syariah

Per 31 Desember 2019, 2020 dan 31 Maret 2021 Perseroan memiliki total pinjaman dan piutang serta pembiayaan syariah bruto masing-masing sebesar Rp903,2 triliun, Rp938,4 triliun, dan Rp914,2 triliun.

Tabel berikut menyajikan portofolio pinjaman Perseroan berdasarkan segmen operasi pada tanggal-tanggal yang ditunjukkan.

(dalam juta Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
	2021		2020	2019
Segmen Mikro	360.045.487		351.356.224	307.721.763
Segmen Ritel	375.387.405		379.116.837	378.618.967
Segmen Korporasi	178.756.285		168.985.146	191.090.463
Piutang dan Pembiayaan Syariah	-		38.915.673	25.766.197
Total	914.189.177		938.373.880	903.197.390

Basis Simpanan Nasabah (Termasuk Dana Syirkah Temporer)

Perseroan memiliki total simpanan dari nasabah sebesar Rp1.049,3 triliun per 31 Maret 2021. Basis simpanan nasabah Perseroan didominasi dari simpanan berbiaya murah dilihat dari komposisi CASA per 31 Maret 2021 sebesar 58,91% atau sebesar Rp618,2 triliun.

Tabel berikut, berdasarkan jenis simpanan, menunjukkan simpanan nasabah Perseroan pada tanggal-tanggal yang ditunjukkan.

(dalam juta Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Giro	174.329.968	185.151.229	168.826.135	
Giro Wadiah	-	6.303.202	2.020.866	
Tabungan	443.867.205	460.453.588	405.355.483	
Tabungan Wadiah	-	9.247.604	6.951.688	
Deposito Berjangka	431.117.600	426.399.550	413.223.653	
Dana Syirkah Temporer	-	33.546.976	24.818.834	
Total	1.049.314.773	1.121.102.149	1.021.196.659	

Ikhtisar Segmen Operasi

Bisnis inti Perseroan terdiri dari lima segmen berdasarkan produk untuk melayani berbagai kebutuhan dari berbagai kategori debitur dan deposan Perseroan. Kelima segmen tersebut adalah (i) segmen mikro, melayani debitur kredit mikro dan menawarkan dan mengelola pinjaman program tertentu yang disponsori Pemerintah, (ii) segmen ritel, melayani konsumen dan juga usaha kecil dan menengah ("UKM"), (iii) segmen korporasi, melayani bisnis yang lebih besar dan BUMN, (iv) segmen lainnya, yang menawarkan *trade finance*, transaksi remitansi dan layanan treasury dan pasar modal, antara lain layanan, dan (v) segmen anak perusahaan Perseroan dengan cakupan bisnis yang beragam, mulai dari bank konvensional yang berfokus pada digital, asuransi jiwa, asuransi umum, remitansi, *multifinance*, perusahaan sekuritas dan *venture capital*.

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan, beban, dan aset tertentu untuk lima segmen operasi Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

Tanggal 31 Maret 2021 dan untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Anak Perusahaan	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	12.157.755	6.360.600	195.565	4.080.108	856.657	23.650.685
Pendapatan operasional lainnya	2.860.893	2.466.675	607.249	2.283.453	38.800	8.257.070
Total pendapatan	15.018.648	8.827.275	802.814	6.363.561	895.457	31.907.755
Beban operasional lainnya	(6.955.395)	(3.789.914)	(382.274)	(1.437.541)	(553.609)	(13.118.733)
Beban CKPN	(2.893.543)	(1.427.920)	(5.394.612)	28.955	(131.444)	(9.818.564)
Total beban	(9.848.938)	(5.217.834)	(5.776.886)	(1.408.586)	(685.053)	(22.937.297)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(41.362)	39.436	(911)	1.289	1.379	(169)
Laba sebelum beban pajak	5.128.348	3.648.877	(4.974.983)	4.956.264	211.783	8.970.289
Beban pajak	(666.685)	(474.354)	-	(944.006)	(25.162)	(2.110.207)
Laba Periode berjalan	4.461.663	3.174.523	(4.974.983)	4.012.258	186.621	6.880.082
Aset segmen						
Kredit yang diberikan -bruto	360.045.487	357.712.977	178.758.285	-	21.432.933	917.947.682
Total aset	340.666.858	338.792.650	177.568.665	507.900.545	36.164.545	1.401.093.263
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	321.148.407	392.912.263	319.195.641	-	16.058.452	1.049.314.773
Total liabilitas	321.148.407	392.912.263	329.454.685	142.988.189	29.784.144	1.216.287.688

LAYANAN

Perseroan terus berupaya untuk menambah, mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan kerjanya hingga ke pelosok negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses layanan perbankan bagi masyarakat. Pengembangan jaringan kerja dilakukan dengan lebih fokus pada pengembangan agen brilink serta e-channel (ATM, EDC, CDM, dan E-Buzz) dengan tujuan memperluas jangkauan layanan perbankan yang disertai dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi dan efektivitas operasional.

14.2 Keunggulan Bersaing

Sejarah panjang Perseroan dan posisi pasar yang kuat di Indonesia memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan *peers* sejenis. Perseroan percaya bahwa keunggulan kompetitif berikut telah menjadikan Perseroan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan serta mempermudah Perseroan untuk mencapai visi menjadi “Grup Perbankan Paling Berharga di Indonesia”. Selain itu, keunggulan kompetitif Perseroan memosisikan Perseroan untuk memanfaatkan peluang di sektor UMKM dan ultra-mikro seiring pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi COVID-19. Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing utama sebagai berikut:

a) Posisi yang kuat dalam pasar pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Perseroan telah beroperasi selama lebih dari 125 tahun dan Perseroan adalah bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pinjaman dan simpanan per 31 Maret 2021. Per 31 Maret 2021, pangsa pasar Perseroan dalam hal total aset, total pinjaman dan total dana pihak ketiga masing-masing mencapai 14,8%, 16,3%, dan 15,2%. Perseroan juga memiliki lebih dari 120 juta nasabah simpanan dan lebih dari 13 juta nasabah pinjaman per 31 Maret 2021, tersebar di seluruh Indonesia dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

Komitmen Perseroan untuk melayani segmen UMKM, khususnya segmen mikro, juga telah menjadikan Perseroan untuk menjadi bank terbesar di Indonesia di segmen mikro dengan pangsa pasar lebih dari 60%, melayani 12,4 juta peminjam per 31 Maret 2021, dengan ikatan yang cukup kuat serta jangka panjang. Keunggulan kompetitif ini memberikan peluang untuk melakukan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Perseroan menilai bahwa penetrasi layanan keuangan di Indonesia saat ini masih rendah. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki populasi *unbanked* terbesar di Asia Tenggara dengan sekitar 92 juta orang *unbanked*, yang mewakili sekitar 51,0% dari total populasi Indonesia. Rasio kredit terhadap PDB sektor swasta Indonesia 2019 adalah salah satu yang terendah di Asia Tenggara sebesar 32,5%, dibandingkan dengan 47,9% untuk Filipina, 111,4% untuk Thailand, 130,8% untuk Malaysia, 81,5% untuk Singapura dan 137,9% untuk Vietnam. Perseroan berkeyakinan bahwa posisi kuat Perseroan di pasar pembiayaan UMKM di Indonesia memberikan peluang pasar yang menguntungkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

b) Jaringan kerja yang luas, didukung oleh kapabilitas teknologi dan digital yang terdepan (*Hybrid Bank*).

Perseroan memiliki model bisnis bank *hybrid* yang menggabungkan kekuatan jaringan unit operasional bank terluas, dan kemampuan sumber daya manusia yang andal di seluruh Indonesia dengan teknologi canggih dan kemampuan digital.

Per 31 Maret 2021, Perseroan memiliki 8.885 unit kerja konvensional (tidak termasuk *temporary cash outlet*), lebih dari 440.000 agen BRILink *branchless banking*, dan lebih dari 220.000 *e-channel* yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga didukung oleh 37.000 *financial advisor* yang siap melayani dan memberdayakan nasabah khususnya di segmen UMKM.

Perseroan juga terus meningkatkan kemampuan digital untuk menyesuaikan preferensi pelanggan yang berubah dalam ekonomi yang semakin digital. Perseroan berkeyakinan untuk meningkatkan kemampuan digital internal untuk membantu berkontribusi pada pemulihan Perseroan dari dampak ekonomi atas pandemi COVID-19.

Kedepannya, berdasarkan identifikasi karakteristik utama dari nasabah ultra-mikro, seperti: (i) kenyamanan dengan teknologi *smartphone* (walaupun penetrasi *smartphone* masih rendah), (ii) pengetahuan produk keuangan yang terbatas, (iii) uang tunai masih menjadi metode transaksi yang dipilih secara dominan, (iv) lebih menyukai lembaga keuangan yang “tertanam secara lokal” dan mampu “mendapatkan kepercayaan mereka”, (v) mayoritas tanpa pendapatan yang stabil dan tidak nyaman dengan produk pinjaman tradisional, dan (vi) lebih memilih keuangan melalui agen dibandingkan dengan layanan keuangan digital, Perseroan berkeyakinan bahwa model bisnis bank *hybrid* akan menjadi solusi *most customer-centric* untuk menjangkau pelanggan ultra-mikro sebagai sumber pertumbuhan baru Perseroan.

c) Produk dan Jasa Keuangan yang lengkap dalam memberikan *Integrated Financial Services* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari *background* yang berbeda

Perseroan menawarkan rangkaian lengkap produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dari berbagai latar belakang, termasuk:

- Produk Kredit untuk segmen Ultra Mikro (KUR Super Mikro), segmen Mikro (Kupedes, KUR Mikro), segmen Konsumer (KPR, Kredit Berbasis Gaji, Kartu Kredit), serta pembiayaan modal kerja dan investasi pada Usaha Kecil, Menengah, dan segmen Korporasi.
- Produk Simpanan berupa Giro, Tabungan dan Deposito untuk Usaha Mikro dan Ritel.
- Layanan Transaksi Keuangan seperti *Trade Finance* dan *Supply Chain, Cash Management System, Treasury* dan layanan pendukung pasar modal.

Perseroan juga berkomitmen untuk melayani masyarakat melalui produk dan layanan keuangan terintegrasi yang ditawarkan oleh Perusahaan Anak Perseroan, termasuk produk dan layanan asuransi jiwa (yang ditawarkan oleh BRI Life), asuransi umum (yang ditawarkan oleh BRI Insurance), produk dan layanan investasi yang ditawarkan oleh (BRIDS), *multifinance* (ditawarkan oleh BRI Finance), dan layanan *remittance* (ditawarkan oleh BRI Remittance).

d) Manajemen Risiko yang Kuat dan *Good Corporate Governance*

Kemampuan Perseroan didukung oleh manajemen risiko yang kuat dan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Saat ini Perseroan berkomitmen untuk memiliki unit kerja dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya untuk memantau sepuluh risiko yang berbeda namun saling terkait, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi, risiko asuransi dan risiko antar group serta memastikan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan terintegrasi dengan manajemen risiko. Perseroan telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) sesuai dengan ketentuan. Perseroan juga memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dilaksanakan dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Perseroan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Untuk memastikan bahwa manajemen risiko dan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, Perseroan menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi Perseroan yang didukung oleh pengawasan oleh fungsi kepatuhan terintegrasi dan fungsi Internal Audit terintegrasi.

e) Salah satu *pioneer* dalam implementasi ESG

Perseroan meyakini bahwa Perseroan adalah *pioneer* dalam menjalankan prinsip-prinsip perbankan berkelanjutan dan inisiatif ESG di Indonesia yang memastikan bisnis berkelanjutan. Perseroan telah membentuk Komite ESG untuk memperkuat komitmen terhadap implementasi ESG. Perseroan juga berkomitmen penuh untuk mendukung *Sustainable Development Goals* dan telah menerapkan *Sustainable Finance Framework* dalam kegiatan perbankan, dengan fokus pada empat aspek:

1. Aset

Perseroan memiliki portofolio bisnis berkelanjutan terbesar dibandingkan bank lain di Indonesia dan telah menerapkan standar pelaporan ESG internasional seperti GRI, SASB, dan TCFD. Komposisi pinjaman Perseroan dalam operasi bisnis yang berkelanjutan mencapai Rp562 triliun (63,9% dari total komposisi pinjaman) pada tahun 2020, meningkat 14,1% YoY dari Rp493 triliun (57,3% dari total komposisi pinjaman) pada tahun 2019. Perseroan akan terus meningkatkan pembiayaannya ke pembiayaan berkelanjutan untuk proyek-proyek seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengendalian & pencegahan pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, transportasi ramah lingkungan dan bangunan hijau. Perseroan juga memasukkan kebijakan manajemen risiko kredit untuk prosedur perintah pembayaran pelanggan dan akan terus memperluas kebijakan pinjaman tersebut ke sektoral lainnya.

2. Instrumen Pembiayaan

Perseroan adalah bank Asia Tenggara pertama yang menerbitkan *sustainability bonds*. Perseroan juga berkomitmen untuk bertanggung jawab secara sosial pada produk yang ditawarkan, sebagai ilustrasi dengan mengadopsi Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme untuk semua produk simpanan Perseroan.

3. Operasi

Perseroan telah mengimplementasikan *paperless operation* dengan *digital office* BRI dan BRISPOT sebagai aplikasi *mobile loan*. Selain itu, Perseroan telah menerapkan *Green IT Infrastructure*, serta kebijakan *Reuse, Reduce* dan *Recycle*.

4. Sumber Daya Manusia

Perseroan telah memiliki strategi sumber daya manusia yang bertanggung jawab sosial dengan kebijakan keberagaman dan kesetaraan dan BRISMART (Sistem *E-Learning* ramah lingkungan).

Semua upaya tersebut tidak luput dari perhatian karena Perseroan telah menjadi salah satu konstituen ESG *Leader Index* Indonesia dan peringkat tertinggi di antara bank-bank lain. Strategi korporasi Perseroan untuk penerapan keuangan berkelanjutan juga telah diakui secara internasional dan nasional dengan memperoleh ESG Score yang baik dari lembaga pemeringkat dan beberapa penghargaan seperti *Best Issuer for Sustainable Finance* dan *Best Sustainability Bond* dari The Asset dan ESG Award 2020.

f) Brand recognition dan brand loyalty yang kuat

Perseroan meyakini bahwa nama "Bank BRI" adalah salah satu merek terkemuka di Indonesia. Perseroan juga telah menerima pengakuan atas kinerja Perseroan di tahun 2020 dari lembaga nasional, regional dan internasional, dengan lebih dari 70 penghargaan bergengsi yang diterima. Perseroan termasuk pada Top 1.000 Bank Dunia, peringkat 1 di Indonesia menurut The Banker, *Best of The Best Companies 2020*, *1st Indonesia's Largest Public Companies* dari Forbes Indonesia, *The Best Retail Banking in Indonesia* dari The Asian Banker, dan *Best MSME Supporting Bank* (kategori BUKU 3 dan 4) dari Bank Indonesia.

14.3 Strategi Usaha

Kondisi perbankan Indonesia di masa depan akan didefinisikan ulang dengan perubahan tren dalam perkembangan demografis, perubahan perilaku pelanggan, peningkatan fokus ESG secara signifikan, perubahan peraturan, tren suku bunga rendah yang berkelanjutan, kemajuan data dan teknologi, dan pergeseran struktur industri sebagai akibat munculnya penyedia layanan keuangan digital. Perseroan berkeinginan untuk dapat berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan yang memberikan nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan mengakomodir dua kepentingan utama tersebut, Perseroan merumuskan rencana jangka panjang untuk periode 2021-2025 bertajuk BRIVolution 2.0 dengan harapan menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*" dengan memperhatikan parameter sebagai berikut:

1. Grup Perbankan Paling Berharga di Asia Tenggara, ditunjukkan dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 75 juta.
2. *Champion of Financial Inclusion*, ditunjukkan dengan komposisi kredit mikro yang mencapai minimal 45% pada tahun 2025 dan berkontribusi terhadap pencapaian target inklusi keuangan Pemerintah pada tahun 2024 sebesar 90% melalui perluasan layanan perbankan kepada populasi *unbanked*.

BRIVolution 2.0 dimaksudkan untuk melanjutkan semangat transformasi BRIVolution 1.0 yang telah berlangsung sejak tahun 2018 dan hal ini dilakukan dengan memperkuat dan mempertajam beberapa aspek operasional bisnis Perseroan. BRIVolution 2.0 merupakan representasi dari semangat Perseroan untuk menciptakan bisnis yang lebih berkualitas, kuat, dan berkelanjutan.

BRIVolution 2.0 akan diimplementasikan dalam tiga fase yang saling terkait sebagai berikut:

• **Fase 1 : Strengthening The Core for Growth (2021 – 2022)**

Pada fase ini, Perseroan mempersiapkan strategi untuk memperkuat bisnis inti di semua aspek yang diarahkan untuk pertumbuhan di masa depan. Penguatan fundamental tersebut tidak hanya akan diterapkan untuk pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari sisi kapabilitas lainnya seperti IT, jaringan distribusi, *human capital* dan budaya, manajemen risiko dan operasional Perusahaan Anak. Tahun 2021-2022 akan menjadi fase awal perjalanan. Dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19 secara ekonomi dan sosial, Perseroan berencana untuk fokus memperkuat ketahanan menghadapi dampak pandemi COVID-19 melalui beberapa strategi:

1. Pertumbuhan Selektif - dengan melakukan ekspansi bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus Pemerintah, serta menjajaki mesin pertumbuhan baru termasuk bisnis ultra mikro, antara lain melalui eksplorasi ekosistem bisnis baru dan eksplorasi potensi bisnis digital.
2. Menjaga Kualitas Aset - dengan menjaga kualitas aset bisnis, termasuk meningkatkan kualitas *business enabler*, antara lain melalui penguatan manajemen risiko *fraud* dengan memanfaatkan *machine learning* untuk menghasilkan *analytic scoring*, maupun peningkatan kualitas bisnis korporasi, baik penguatan *Early Warning System* pada bisnis dan operasional.
3. Meningkatkan Efisiensi - berupa pengendalian *cost of fund* dan biaya operasional melalui digitalisasi dan rekayasa ulang proses bisnis, termasuk inisiatif sistem pengelolaan *pipeline* dan perencanaan penjualan bisnis.

• **Fase 2 : Scale Up & Scope Up (2023 – 2024)**

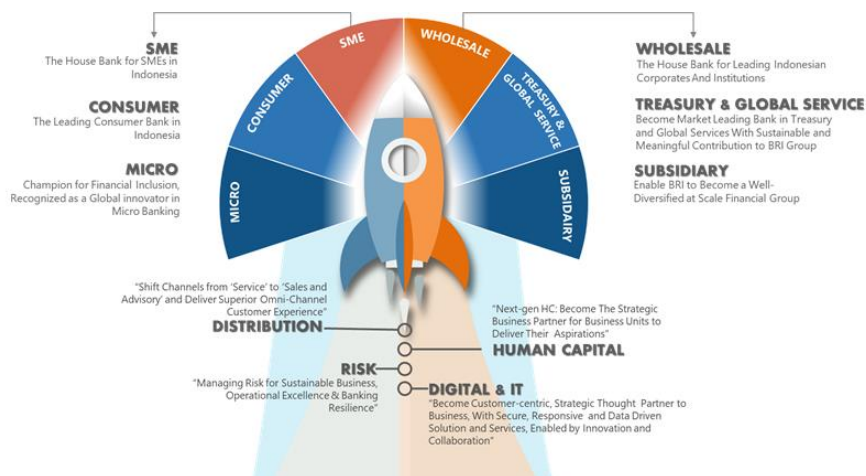
Pada fase ini, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak fokus pada peningkatan dan perluasan cakupan mesin pertumbuhan baru, termasuk menawarkan produk dan layanan di luar model perbankan tradisional. Pada tahun 2023, Perusahaan Anak Perseroan diproyeksikan untuk memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap profitabilitas Perseroan. Pada tahun 2024, Perseroan akan berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam transaksi perbankan, yang

dikembangkan dari DNA digital yang ditanamkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar Perseroan mampu menekan *cost of fund* dengan mencapai komposisi CASA sekitar 64% pada tahun tersebut.

• **Fase 3 : Mempertahankan Posisi Top Tier di Asia Tenggara (2025 dan seterusnya)**

Pada fase ini Perseroan memproyeksikan telah mencapai aspirasinya dengan menjadi grup perbankan paling bernilai di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion*. Pada fase ini, Perseroan telah tumbuh dalam ukuran dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar dan kuat serta terus mempertahankan keberlanjutan bisnisnya di tahun-tahun mendatang. Untuk mencapai aspirasi kapitalisasi pasar sebesar US\$75 miliar dan berkontribusi pada Indonesia dengan mencapai 90% inklusi keuangan pada tahun 2024, hal ini akan menjadi *milestone* penting bagi Perseroan untuk terus maju dan terus menciptakan nilai ekonomi dan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

BRIVolution 2.0 akan diwujudkan dengan inisiatif dari enam segmen bisnis yaitu *Micro Business, Consumer Business, SME Business, Wholesale Business, Treasury & Global Services* dan *Subsidiary*, serta didukung oleh empat fungsi yaitu *Human Capital, Risk, Distribution* dan *Digital & IT*. Masing-masing segmen dan fungsi bisnis memiliki aspirasinya masing-masing seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Inisiatif BRIVolution 2.0 yang disampaikan oleh setiap segmen dan fungsi bisnis terutama akan berfokus pada enam aspek ("6C") sebagai berikut:

- **Create a new growth engine**, misalnya, Kombinasi Bisnis Ultra Mikro, ekosistem mikro *hyperlocal*, ekosistem UKM B2B, implementasi *bespoke tech value chain*;
- Mempercepat pertumbuhan **CASA**, misalnya melalui pengurangan gesekan pada manajemen dengan pengenalan fitur AI, mengubah bisnis akuisisi pedagang;
- Meningkatkan **cross-sell** untuk meningkatkan pendapatan *fee*, misalnya peningkatan bisnis *wealth, cross sell* Perusahaan Anak;
- **Contain credit cost**, misalnya melalui arsitektur risiko kredit UKM generasi berikutnya, arsitektur kredit grosir ujung-ke-ujung yang diperbarui;
- Meningkatkan **customer experience** melalui model operasi cabang yang dibangun ulang; dan
- Menyesuaikan **culture and capabilities**, melalui cara kerja yang lebih lincah, meningkatkan kapabilitas digital/analitik/pemasaran digital, dan transformasi budaya.

DIGITAL STRATEGIC FRAMEWORK

Di era digitalisasi perbankan saat ini, Perseroan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut inovasi produk dan layanan perbankan yang terintegrasi dengan sistem digital. Tuntutan untuk beradaptasi secara teknologi tidak hanya didorong oleh perubahan perilaku nasabah tetapi juga persaingan di bidang jasa keuangan yang kini diramaikan oleh pemain-pemain baru di bidang jasa keuangan yang mengandalkan teknologi yaitu *financial technology* atau perusahaan fintech. Sejak 2016, Perseroan telah mengupayakan transformasi digital dan budaya dari bisnis Perseroan yang disebut "BRIVolution 1.0". Hal Ini dimaksudkan untuk mendigitalkan proses bisnis agar lebih efisien serta mengidentifikasi model bisnis baru dengan tujuan menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Pada tahun 2020, Perseroan memperbarui BRIVolution 1.0 menjadi BRIVolution 2.0 untuk memperkuat inti bisnis dan mempercepat pertumbuhan baru. Untuk terus memberikan layanan yang komprehensif kepada nasabah, Perseroan, sehubungan dengan BRIVolution 2.0, telah menetapkan kerangka kerja strategis digital yang melibatkan tiga pilar: "Digitizing the Core", "Digital Ecosystem" dan "New Digital Proposition".

Digitizing the Core

Strategi Perseroan “*Digitizing the Core*” dilaksanakan melalui digitalisasi proses bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan menciptakan layanan pelanggan yang andal melalui rekayasa ulang proses bisnis untuk menangkap potensi bisnis yang lebih besar. Tujuan tersebut diharapkan dapat diwujudkan antara lain melalui BRISPOT (Aplikasi Pinjaman Digital), BRIMO (*Mobile Internet Banking*) dan agen BRILink. BRISPOT adalah aplikasi berbasis digital dengan konsep *one stop service* yang memungkinkan petugas pinjaman memproses aplikasi pinjaman dari awal hingga akhir, dimanapun dan kapanpun. BRISPOT terbukti mampu mempercepat perputaran waktu proses pelayanan pinjaman, sehingga meningkatkan produktivitas petugas pinjaman.

BRIMO adalah *platform mobile internet banking* yang menggabungkan beberapa fungsi layanan perbankan dalam satu platform. Hal ini memberikan kemudahan konsumen dalam bertransaksi perbankan yang aman dan diproses secara *real-time online*. Per 31 Maret 2021, transaksi BRIMO mencapai 409,3 juta transaksi dengan volume Rp142,9 triliun.

BRILink merupakan layanan *branchless banking* yang membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Melalui agen BRILink, Perseroan dapat memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, seperti pengiriman uang, setoran dan tarik tunai, pembayaran tagihan listrik, air dan utilitas, pembayaran pinjaman dan transaksi perbankan lainnya. Per 31 Maret 2021, jumlah agen BRILink telah mencapai 447.385 dengan volume transaksi 200 juta transaksi yang mewakili pertumbuhan 28,5% *year-on-year*, menghasilkan pendapatan *fee-based* sebesar Rp299,6 miliar mewakili pertumbuhan 25,2% *year-on-year*. Pada tahun 2020, agen BRILink melayani 54.600 desa atau lebih dari 70% jumlah desa di Indonesia. Kedepannya, Perseroan bermaksud untuk mengoptimalkan produktivitas para agen dan memperkuat perannya dalam melayani nasabah khususnya di segmen mikro di luar produk perbankan.

Digital Ecosystem

Perseroan telah mengadopsi strategi “*Digital Ecosystem*” untuk membangun ekosistem yang mampu menawarkan produk dan layanan di luar bisnis inti dengan tujuan menangkap potensi likuiditas, peluang bisnis, dan sumber pertumbuhan baru. Strategi ini diharapkan dapat diwujudkan melalui pengembangan *platform* digital untuk bisnis pelanggan, model bisnis baru dan kemitraan dengan perusahaan *fintech*. Inisiatif yang Perseroan kembangkan antara lain membangun *platform* ekosistem digital yang menawarkan produk dan layanan dengan model bisnis baru seperti www.pasar.id, *platform online* untuk pedagang pasar tradisional sebelumnya untuk *platform* di pasar *online*, BRISmart Billing, Junio Smart untuk pendidikan, Sistem Pemesanan Gas LPG BRImola 3 kg dan Solusi Ekosistem Transaksi Mikro. Selain itu, Perseroan telah menjalin beberapa kemitraan dengan *platform peer-to-peer lending* seperti Investree dan Amarnya, *platform e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia, serta *platform ride-hailing* seperti Gojek dan Grab. Bentuk kemitraan lain juga dilakukan melalui Perusahaan Anak modal ventura Perseroan, BRI Ventures, yang akan menjadi mesin dari *BRI Group Digital Strategy* melalui kemitraan dan investasi langsung ke perusahaan inovasi.

New Digital Proposition

Kerangka strategis ketiga Perseroan adalah “*New Digital Proposition*” di mana inovasi produk dan layanan digital yang benar-benar baru serta dapat berkontribusi pada keuntungan Perseroan di masa depan. Perseroan bermaksud memanfaatkan segmen bisnis tertentu yang belum dimanfaatkan untuk lebih berintegrasi ke dalam kehidupan pelanggan melalui pengembangan *super app* dan meningkatkan peran Perusahaan Anak Perseroan. Inisiatif yang dikembangkan antara lain meluncurkan PINANG, *platform* pinjaman digital yang mempercepat proses pengajuan pinjaman hingga pencairan hingga kurang dari sepuluh menit, sehingga memberikan kenyamanan ekstra kepada nasabah. Perseroan juga telah meluncurkan fasilitas pinjaman *online* bernama CERIA, sebuah platform pinjaman digital berbasis aplikasi. Pada tahun 2020, Perseroan memperkenalkan BRIBRAIN, sebuah kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk merekam, memproses, dan mengkonsolidasikan data dan informasi dari berbagai sumber. Perseroan menggunakan BRIBRAIN dalam proses pengembangan aplikasi Perseroan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Perusahaan Anak Perseroan juga akan memainkan peran penting dalam menghadirkan proposisi digital baru. Pada tahun 2019, BRI Agro meluncurkan PINANG, platform pinjaman digital yang mempercepat aplikasi pinjaman hingga proses pencairan menjadi kurang dari sepuluh menit, sehingga memberikan kenyamanan ekstra kepada pelanggan. Ke depan, BRI Agro akan fokus untuk membuat lebih banyak aplikasi perbankan digital, untuk memperkuat kapabilitas digital grup Perseroan.

Bisnis Model Ultra Mikro

Prinsip utama dari model bisnis dari *holding* ultra mikro adalah penyederhanaan proses bisnis yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis dari masing-masing kelompok usaha, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal terutama pada segmen ultra mikro.

Model bisnis *holding* ultra mikro akan dibagi menjadi enam komponen utama, yaitu:

1. Akuisisi

Terdapat beberapa inisiatif yang akan dilakukan sebagai bagian dari akuisisi, diantaranya:

 - a) Pembaharuan dan peningkatan plafon dari nasabah eksisting didalam ekosistem ultra mikro, melalui aktivitas *cross-selling* dan mekanisme graduasi dari nasabah pinjaman kelompok ke pinjaman perseorangan.
 - b) Mengembangkan *integrated sales platform* (ISP) yang didukung oleh data dan analitik.
 - c) Meluncurkan kampanye *agent-led acquisition* dimana agen diberdayakan untuk menjadi *lead generator* dalam ekosistem ultra mikro.

2. Distribusi

Per 31 Maret 2021, *holding* ultra mikro memiliki sekitar 17.000 jaringan unit kerja dan didukung oleh lebih dari 430.000 Agen BRILink yang tersebar di wilayah Indonesia. Dengan kolaborasi di bidang distribusi dalam bentuk *co-loaction* maka tidak hanya jangkauan layanan keuangan Holding ultra mikro semakin bertambah, namun juga dapat memberikan manfaat efisiensi. Pegadaian dapat membentuk loket/konter Pegadaian di cabang BRI untuk mulai melayani pinjaman gadai dan agunan yang diberikan dapat disimpan di kantor cabang Pegadaian terdekat. Selain itu, pekerja PNM dapat menggunakan workspace yang telah diberikan oleh BRI di kantor cabang untuk mulai mengunjungi daerah sekitar cabang tersebut untuk ekspansi bisnis.

3. *Underwriting & Collection*

Arsitektur *underwriting* akan terbagi menjadi 5 bagian berdasarkan tipe nasabah dan produk, yakni simplifikasi untuk nasabah eksisting, arsitektur untuk pinjaman perseorang, arsitektur untuk produk gadai, arsitektur untuk pinjaman kelompok, arsitektur untuk pembiayaan berbasis transaksi. Proses pencairan akan dilakukan dengan menggunakan rekening tabungan BRI atau secara tunai dengan memanfaatkan jaringan yang ada di dalam ekosistem ultra mikro. Proses pembayaran akan melalui keseluruhan jaringan yang ada di ekosistem, yakni jaringan BRI, Pegadaian, PNM dan mitra. Proses penagihan akan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan ekosistem ultra mikro dengan didukung *Early Warning System* (EWS) sebagai sistem pendukung manajemen resiko. Proses *underwriting* dan *collection* akan dilandaskan pada kemampuan analitik sehingga proses akuisisi dan proses graduasi nasabah dapat dilakukan dengan optimal.

4. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah akan dilakukan dengan tiga langkah utama, yaitu (1) pendekatan personal dengan nasabah (perorangan atau kelompok), (2) *cross-selling* yaitu mempromosikan produk lain yang tersedia kepada nasabah, dan (3) graduasi baik dari pembiayaan kelompok ke pembiayaan perseorangan, maupun migrasi dari segmen ultra mikro ke segmen mikro. Kriteria yang digunakan untuk menilai apakah seorang nasabah layak untuk naik kelas adalah rekam jejak pinjaman, jumlah frekuensi pinjaman, dan pendapatan bisnis.

5. Kemitraan

Holding ultra mikro akan menjalin kerjasama dengan mitra potensial untuk membangun ekosistem ultra mikro. Beberapa aspek yang dapat dikerjasamakan yaitu:

 - a) Akuisisi yang menargetkan nasabah atau pelanggan milik mitra dengan memanfaatkan jaringan mitra untuk produk pinjaman dan produk lainnya
 - b) Alternatif data milik mitra untuk proses *underwriting* nasabah ultra mikro,
 - c) Meningkatkan kenyamanan proses pencairan dan *collection* dengan memanfaatkan jaringan yang luas, platform digital, dan touch points

6. Pendanaan

Holding Ultra Mikro akan mengeksplorasi dua sumber pendanaan baru yaitu: (1) dana berbiaya murah CASA (*current account saving account*) dimana nasabah Pegadaian dan PNM akan diberikan produk simpanan dalam bentuk *Basic Savings Account* (BSA) atau Simpedes; dan (2) obligasi ESG (*environmental, social, and governance*) dengan potensi tingkat kupon yang lebih efisien.

14.4 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 9 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046350.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021, Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang;
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Produk dan Jasa	
Produk Simpanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan BRI BritAma - Tabungan BRI Junio & Junio Rencana - Tabungan BRI Simpedes - Tabunganku - SimPel (Simpanan Pelajar) - Tabungan Haji - Deposito (Rupiah dan Valas) - Giro (Rupiah dan Valas)

Produk dan Jasa	
Produk Pinjaman	<ul style="list-style-type: none"> - Kredit Mikro: <ul style="list-style-type: none"> • Kupedes • KUR Mikro - Kredit Konsumer: <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) • Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) • Kartu Kredit - Kredit Ritel Komersial: <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Agunan Kas • Kredit Investasi (KI) • Kredit Modal Kerja (KMJ) • KMK Ekspor • KMK Konstruksi • KMK Konstruksi BO-I • Kredit Waralaba • Kredit SPBU • Kredit Resi Gudang • Kredit Kepemilikan Gudang • KMK Talangan SPBU • Kredit <i>Pre-Financing</i> • Kredit <i>Post-Financing</i> • Kredit Distributor - Kredit Program: <ul style="list-style-type: none"> • Resi Gudang (Subsidi & Komersial) • KUR Ritel BRI • KUR TKI BRI • KUR Tanaman Keras - Kredit Menengah/Korporasi: <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja (KMK) • Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E) • Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I) • Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K) • Kredit Investasi (KI) • Kredit Sindikasi - BRIGuna
Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cash Management System</i> - Jasa Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> • SIM (Surat Izin Mengemudi) Online • MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II) • E-Tax (<i>Electronic Tax</i>) • <i>Hospital Online</i> • SPP – Online Mahasiswa • <i>Visa on Arrival (VoA)</i> • Layanan terkait Nasabah Instansi Kerja Sama (NIK) • Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) • Kartu Identitas Multifungsi (KIM) • KTA Elektronik • E-Samsat • E-Tilang (Tilang Online) • PDAM Online • BPJS-TK <i>Service Point Office</i> - Jasa Bisnis Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Bank Garansi • Bank Kliring • <i>Billing Payment</i> • Penerimaan Setoran • Transaksi Online • Transaksi LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) - E-Banking

Produk dan Jasa	
	<ul style="list-style-type: none"> • ATM BRI • <i>Mobile Banking</i> BRI • <i>Phone Banking</i> BRI • <i>Internet Banking</i> BRI • CRM BRI • EDC BRI • BRIZZI (<i>Electronic Money</i> BRI) <p>-Jasa Layanan Bisnis Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Impor • Penerbitan <i>Letter of Credit</i> (LC) • Fasilitas Kredit Impor • <i>Pre-Impor Financing</i> (Penangguhan Jaminan Impor) • <i>Post-Impor Financing</i> (KMKI & <i>Trust Receipt</i>) • Layanan Ekspor • <i>Advising</i> LC • <i>LC Confirmation</i> • Jasa Penagihan Ekspor • <i>Outward Documentary Collection</i> • <i>Pre-Shipment Financing</i> (KME) • <i>Post-Shipment Financing</i> • Negosiasi Wesel Ekspor • Diskonto Wesel Ekspor Berjangka • Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka • <i>Refinancing</i> LC • <i>Risk Participation</i> • <i>Banker Acceptance</i> • <i>USD Local Settlement</i> • <i>Guarantee</i> (<i>Standby</i> LC) • Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) • <i>Bill Purchase Financing</i> • <i>Money Changer</i> <p>- BRIfast Remittance</p> <p>- Jasa Layanan <i>Treasury</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi Valuta Asing/<i>Foreign Exchange</i> • Transaksi <i>Swap</i> • Transaksi <i>Forward</i> • Jasa Wali Amanat • Jasa Agen Penjual Efek • Jasa Kustodian • Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI) <p>- BRI Prioritas</p>

Perseroan membagi segmen pasarnya ke dalam 4 (empat) segmen utama, yakni Bisnis Mikro, Bisnis Ritel, Bisnis Korporasi dan Bisnis Perusahaan Anak sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya.

Pembahasan berikut menggambarkan masing-masing segmen bisnis Perseroan, berdasarkan data bank saja.

BISNIS MIKRO

Melalui Bisnis Mikro, Perseroan mendukung pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia serta membantu mensukseskan program pemerintah dalam Literasi dan Inklusi Keuangan serta pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Melihat potensi pembiayaan mikro yang masih besar tersebut, Perseroan memposisikan Bisnis Mikro sebagai bisnis utama Bank. Sesuai dengan visi Perseroan yaitu untuk menjadi *The Most Valuable Bank in South East Asia*. Perseroan telah melangkah ke perbaikan secara terus menerus pada proses bisnis internal untuk semakin meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan *reengineering* proses bisnis pinjaman melalui implementasi BRISPOT di segmen bisnis mikro.

BRISPOT Mikro telah dijalankan secara terencana dengan metode yang lincah dan mengedepankan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dimulai dari *fase strategic assessment, design clinic, prototyping, continuous iteration*, uji coba sampai akhirnya dilaksanakan *roll out* secara nasional yang perkembangannya senantiasa dipantau oleh *Steering Committee*.

Bisnis mikro tetap menjadi bisnis utama Perseroan karena kompetensi Perseroan dalam melayani bisnis ini sudah teruji dalam beberapa siklus ekonomi. Selain itu, Perseroan juga melihat bahwa pembiayaan Usaha Mikro di Indonesia masih memiliki ruang pengembangan potensi yang sangat luas.

Perseroan menawarkan pinjaman mikro dalam bentuk BRIGuna Mikro, Kupedes, Kupedes Rakyat, KUR Super Mikro dan KUR Mikro.

Kinerja Bisnis Mikro 31 Maret 2021

Melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang sesuai, Bisnis Mikro mencatat pencapaian kinerja yang positif sampai dengan 31 Maret 2021.

Kinerja Pinjaman Mikro

Outstanding pinjaman Mikro Perseroan sampai dengan 31 Maret 2021 mencapai Rp360,0 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 12,1 juta orang atau tumbuh 2,5% dibanding 31 Desember 2020 yang tercatat Rp351,36 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 11,87 juta. Pertumbuhan pinjaman yang positif diiringi dengan kualitas aset yang terjaga. Tingkat kredit bermasalah (*Non-Performing Loan* atau NPL) Bisnis Mikro stabil pada level yang rendah, sebesar $\pm 1\%$ selama 3 tahun berturut-turut. Kinerja ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam melaksanakan fungsi intermediasi dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.

(dalam miliar Rupiah)

Kredit	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
BRIGuna Mikro	78.460	79.944	83.248
Kupedes Komersial	135.669	141.246	148.954
Kupedes Rakyat	3.013	3.407	6.180
KUR (KUR Mikro dan KUR Super Mikro)	142.903	126.745	69.340
Total	360.045	351.342	307.722

Kinerja Simpanan Mikro

Sementara untuk Simpanan Mikro melalui Tabungan Simpedes sebagai produk utamanya, Perseroan mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp321,1 triliun di 31 Maret 2021, meningkat 12,8% dari 31 Maret 2020 sebesar Rp228,7 triliun. Sedangkan perolehan dana murah (CASA) mikro tercatat sebesar 86,7% dari total DPK. Dari sisi kinerja operasional, jaringan layanan Mikro Perseroan pada 31 Maret 2021 tercatat sebanyak 5.241 BRI Unit, 1.865 Teras BRI/Teras Kantor yang dioperasikan, tersebar di seluruh Indonesia; 136 Teras *Mobile*/ Teras Keliling, 4 Teras Kapal untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat di kawasan pesisir, serta 447.385 Agen BRILink. Berikut jaringan layanan Mikro Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan:

Outlet	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
BRI Unit	5.241	5.382	5.382
Teras BRI	1.865	1.867	2.049
Teras Keliling	132	132	133
Teras Kapal	4	4	4
Total	7.242	7.385	7.568
Agen BRILink	447.385	504.233	422.160

Strategi Pengembangan Bisnis Mikro Tahun 2021

Target Bisnis Mikro Perseroan untuk tahun 2021 adalah memperkuat dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai *market leader* di bisnis mikro di Indonesia. Perseroan menyadari kompetisi di bisnis mikro semakin ketat dimana persaingan tidak saja dilakukan dengan perbankan lainnya, namun juga dengan *fintech company* berupa *peer to peer lending* yang berbasis teknologi. Perseroan optimis untuk mencapai target jangka panjang Perseroan berupa komposisi kredit mikro sebesar minimal 45% dari total kredit. Hal ini didukung oleh pengalaman Perseroan selama puluhan tahun dalam melayani segmen mikro, ribuan unit kerja Perseroan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, proses bisnis yang semakin baik didukung dengan kapabilitas digital yang handal serta sumber daya manusia yang mumpuni dari generasi ke

generasi. Oleh karenanya, inisiatif Bisnis Mikro Perseroan di tahun 2021 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi Mantri;
2. Rejuvenasi produk *asset liability*;
3. Pengembangan produk dan layanan baru untuk segmen baru (ultra mikro);
4. *Enhancement* BRISPOT (*Fitur collection, Credit Scoring*);
5. Membangun *customer-based* masa depan melalui optimalisasi fungsi *social entrepreneurship* dan inkubasi;
6. Penguatan *management information system* (MIS); dan
7. Menjalankan strategi inisiatif “*Road to Micro-Business Sustainable Growth*” yang terbagi menjadi 4 (empat) inisiatif sebagai berikut:
 - a. Inisiatif Produk
 - b. Inisiatif Proses Bisnis
 - c. Inisiatif SDM Mikro
 - d. Inisiatif Pemberdayaan
8. Membangun permodelan berbasis *data analytics* untuk efisiensi bisnis proses dan mitigasi risiko

Agen BRILink

Agen BRILink merupakan layanan *branchless banking* Perseroan untuk melayani masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan sebagai perwujudan inisiatif Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) dari Otoritas Jasa Keuangan dan LKD (Layanan Keuangan Digital) dari Bank Indonesia, serta menjaga kedaulatan Rupiah. Agen BRILink yang diluncurkan Perseroan pada tahun 2014 terus dikembangkan sesuai kebutuhan nasabah dan turut mendukung berbagai program pemerintah.

Kinerja BRILink 31 Maret 2020

Sampai dengan 31 Maret 2021, Agen BRILink terus menunjukkan pertumbuhan yang positif baik dari sisi transaksi, perolehan dana, jumlah agen, maupun volume transaksi. Pencapaian jumlah agen itu telah mampu tumbuh sebesar 4,3% dari 428.794 Agen di 31 Maret 2020 menjadi 447.385 Agen di 31 Maret 2021. Hal ini menunjukkan respons masyarakat yang berminat untuk menjadi Agen BRILink sangat besar, sejalan dengan manfaat yang akan diperoleh para agen tersebut.

Transaksi finansial Agen BRILink tumbuh 28,4%, dari 156 juta transaksi di 31 Maret 2020 menjadi 200 juta transaksi pada 31 Maret 2021. Peningkatan transaksi finansial ini mencerminkan kehadiran layanan Agen BRILink berdampak positif ditengah masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan transaksi finansialnya serta meningkatkan inklusi keuangan.

Dari kinerja Agen BRILink, Perseroan memperoleh *fee-based income* sebesar Rp299,6 miliar di 31 Maret 2021, tumbuh 25,2% dari periode yang sama di tahun 2020 yang sebesar Rp239,2 miliar. Peningkatan ini berdampak positif terhadap pendapatan Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, Agen BRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp14,1 triliun, tumbuh 80% dari angka tahun 2020 sebesar Rp7,8 triliun. Sementara itu, Agen BRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp251 triliun hingga 31 Maret 2021.

Berikut rincian perkembangan bisnis jasa layanan BRILink hingga saat Prospektus ini diterbitkan:

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Agen BRILink	447.385	504.233	422.160
Transaksi Finansial (Rp Juta)	200,4	843,2	672,6
<i>Fee Based Income</i> (Rp Miliar)	299,6	1.160,1	788,7
CASA (Rp Triliun)	14,1	13,3	8,4
Volume Transaksi (Juta)	251	728	521

Strategi Pengembangan BRILink Tahun 2021

Di tahun 2021, Perseroan akan terus melanjutkan strategi perluasan Agen BRILink dengan tidak mengesampingkan fokus terhadap kualitas Agen BRILink. Perluasan ini sebagian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi BRIsat sehingga dapat menjangkau daerah yang belum didukung layanan *provider* telekomunikasi. Selain itu, Perseroan melakukan standarisasi perangkat Agen berbasis Android yang diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan transaksi yang dilakukan Agen BRILink, melengkapi layanan Agen berbasis EDC Konvensional dan BRILink Mobile. Dengan kemudahan dalam pembukaan rekening simpanan dan *referral* pinjaman pada aplikasi BRILink Mobile, Agen BRILink sebagai solusi ekosistem finansial mikro dapat melakukan transaksi pembelian dan pembayaran yang lengkap bagi masyarakat mikro. Peningkatan kualitas

agen menjadi pondasi dalam mendukung pencapaian target BRILink di 2021 ini. Selanjutnya, Agen BRILink juga akan terus meningkatkan kualitas layanan dengan menambah fitur produk dan memaksimalkan kolaborasi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (*startups*) yang memiliki layanan dan produk bernilai jual serta dibutuhkan masyarakat seiring dengan penetrasi bisnis digital.

Bisnis Program

Perseroan secara konsisten mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan dan memperbaiki perekonomian, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan dan layanan usaha mikro kecil dan menengah. Perseroan merupakan salah satu Bank penyalur program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan manfaat antara lain mempercepat pengembangan usaha sektor riil, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pembiayaan sesuai dengan program Nawacita.

Produk dan Jasa Bisnis Program

Perseroan selalu berupaya dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung berbagai kalangan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memberikan pelayanan melalui produk dan jasa, dimana produk bisnis program ini dilayani pada segmen mikro dan kecil, sebagai berikut:

Produk Bisnis Program meliputi:

1. **KUR Mikro**
KUR Mikro bertujuan untuk memberdayakan usaha mikro yang bergerak di sektor produktif (nonperdagangan) maupun non produktif (perdagangan). Skema pinjaman KUR Mikro terdiri dari modal kerja dan kredit investasi dengan penjaminan kredit yang disediakan untuk pengembangan usaha mikro. Target nasabah meliputi pemilik bisnis perseorangan dengan maksimum plafond kredit sebesar Rp50 juta. Pinjaman ini disubsidi pemerintah dan dijamin oleh asuransi kerugian kredit dari perusahaan asuransi BUMN.
2. **KUR Kecil**
KUR Kecil memberikan layanan sama dengan KUR Mikro namun untuk pengusaha dengan skala usaha yang lebih besar, dengan maksimum plafond sebesar Rp500 juta.
3. **KUR Tenaga Kerja Indonesia (“TKI”)**
KUR TKI merupakan program bantuan pemerintah untuk TKI yang memiliki usaha sampingan di lokasi domisili asal TKI tersebut. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup TKI serta menyediakan lapangan kerja sebagai persiapan menjelang masa tidak produktif bekerja di luar negeri.
4. **Kredit Pangan**
Kredit Pangan bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan dan kemaritiman serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia, Perseroan memberikan produk Kredit Pangan untuk mengakomodir pengembangan bisnis dalam kebutuhan pangan di lapangan serta untuk penguatan sektor produksi.
5. **Kredit Resi Gudang**
Kredit Resi Gudang merupakan program pinjaman untuk membantu petani yang memiliki persediaan yang dapat dijaminkan dalam jangka pendek.
6. **Pinjaman Kemitraan**
Pinjaman Kemitraan merupakan pinjaman dengan suku bunga lunak yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat unbanked yang memiliki usaha produktif dan potensi pengembangan. Pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan diberikan kepada mitra binaan penerima pinjaman kemitraan.
7. **Kartu Tani**
Kartu Tani merupakan Kartu Debit multifungsi dengan design khusus yang diberikan kepada petani penerima untuk melakukan transaksi penebusan pupuk subsidi serta transaksi keuangan lainnya. Kartu tani dapat membaca data petani dengan mengakses data base kuota yang ada di sistem Kartu Tani BRI melalui mesin EDC di Kios Pupuk Lengkap.

Kinerja Bisnis Program 31 Maret 2021

Perseroan senantiasa mendukung program pemerintah terutama dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya *outstanding* pinjaman Bisnis Program menjadi sebesar Rp170,7 triliun pada 31 Maret 2021, meningkat 11,6% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp153,0 triliun.

Strategi Pengembangan Bisnis Program Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan efektivitas bisnis program di tahun 2021, terdapat beberapa strategi dan pengembangan, antara lain:

1. Akselerasi KUR Kecil

Penetapan sebaran alokasi, model bisnis dan integrasi monitoring penyaluran KUR dengan program pemberdayaan UMKM.

2. BRISPOT KUR Kecil

Utilisasi BRISPOT KUR Kecil tahun 2021 untuk mengakselerasi proses prakarsa dan putusan.

3. Klaster

Pemetaan potensi UMKM yang dapat dibentuk menjadi Klaster Usaha sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis mikro yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif dalam klaster usaha yaitu meningkatkan inklusi keuangan dan market share BRI pada pelaku Klaster Usaha dan pemberdayaan kepada pelaku.

4. BRIncubator

BRIncubator merupakan program percepatan peningkatan kualitas literasi kepada UMKM melalui program pemberdayaan yang lebih terintegrasi. UMKM yang telah lolos dan mengikuti program BRIncubator akan mendapat kesempatan untuk mengenal pangsa pasar yang lebih luas dengan didukung oleh peningkatan kapabilitas dan kapasitas UMKM.

5. Potensi *Customer Base*

Menjadikan inisiatif pelaksanaan program Pemerintah/Kementerian/Lembaga (Bantuan Sosial Kemensos, Bantuan Produktif Usaha Mikro Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kartu Tani, Kartu Nelayan, KUSUKA, BUMDes, dan Rumah BUMN) sebagai potensi *customer base* segmen mikro masa depan.

6. Dashboard Monitoring

Pengembangan dashboard monitoring ukuran keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dan pemberdayaan UMKM yang dapat diakses melalui BRISIM.

7. Link UMKM

Link UMKM adalah digitalisasi pemberdayaan UMKM yang sedang dikembangkan oleh Perseroan, terlebih dalam masa new normal, diharapkan ke depan menjadi *Super Apps* bagi seluruh UMKM, baik untuk UMKM nasabah maupun bukan nasabah BRI. *Super Apps* ini mengintegrasikan fungsi-fungsi seluruh Apps UMKM BRI sebelumnya, seperti UMKM Smart, Dashboard Klaster, Wirausaha BRILian, Assessment Skoring UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN, Indonesia Mall dan Dashboard KUR.

BISNIS KECIL

Kinerja Bisnis Pinjaman Kecil dan Menengah sampai dengan 31 Maret 2021

Bisnis Kecil

Pada 31 Maret 2021, Kredit Kecil mencapai Rp193,3 triliun, sedikit mengalami penurunan Rp3,9 triliun atau -2,0% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp197,2 triliun.

Bisnis Menengah

Pada 31 Maret 2021 Kredit Menengah mencapai Rp19,9 triliun, mengalami penurunan Rp97,6 miliar atau -0,5% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp20,0 triliun.

(dalam miliar Rupiah)

Kredit	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kredit Kecil	193.326	197.229	198.656
Kredit Menengah	19.892	19.989	21.546
Total	213.218	217.219	220.202

Perseroan melalui Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah antara lain:

1. Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit produktif untuk pembiayaan operasional usaha dalam rangka proses produksi atau tambahan modal kerja. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya jangka waktu dan pengembalian kredit sesuai dengan karakter bisnis debitur; dan *New Account Sweep*.

2. Kredit Investasi

Fasilitas kredit produktif dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, atau penggantian biaya perolehan (*refinancing*) barang modal. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan seperti jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan arus kas debitur.

3. Kredit Mitra/Supply Chain Financing

- KMK *Pre-Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek kepada Perusahaan Inti rekanan Perseroan.
- KMK *Post Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai pengambilalihan piutang atas tagihan penyelesaian proyek kepada Perusahaan Inti rekanan Perseroan.
- KMK Distributor (*Distributor Financing*) adalah fasilitas kredit modal kerja kepada distributor/ agen, khusus untuk pembayaran pembelian produk kepada Perusahaan Inti rekanan Perseroan.
- Kredit Investasi Mitra adalah fasilitas kredit investasi dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, termasuk *refinancing* aktiva tetap dalam rangka mendukung operasional bisnis mitra Perusahaan Inti rekanan Perseroan.

Produk-produk tersebut memiliki sejumlah keunggulan antara lain:

- Suku bunga dan biaya kredit menarik.
- Relaksasi agunan dan Sharing Dana Sendiri.
- Operasionalisasi secara digital melalui Modul *Supply Chain* pada *Cash Management System* Perseroan.

4. Kredit Dinamis

Kredit Dinamis adalah Kredit Modal Kerja maupun Kredit Investasi dengan fitur berupa insentif suku bunga kredit yang berubah dinamis secara otomatis setiap bulan, berdasarkan penyaluran transaksi keuangan dan *performance* Giro BRI debitur pada bulan sebelumnya. Keunggulannya memiliki suku bunga kredit yang lebih menarik dibanding kredit konvensional dan *New Account Sweep*.

5. Kredit Ritel Dengan Pola Angsuran Tetap

Merupakan fasilitas kredit produktif untuk tujuan modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi debitur segmen ritel dengan sistem pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga dengan jumlah tetap. Keunggulan produk dengan pola angsuran tetap antara lain:

- Jangka waktu kredit hingga 5 tahun.
- Maksimal angsuran adalah 80% dari RPC.

6. Bank Garansi Online

Bank Garansi (BG) *online* adalah fitur pengajuan Bank Garansi serta monitoring Bank Garansi Perseroan secara *online* dan digital pada *Cash Management System* Perseroan. Produk ini memiliki keunggulan, yaitu:

- Pengajuan Bank Garansi secara *online* dan digital melalui CMS Perseroan, tanpa perlu datang langsung ke unit kerja Perseroan.
- *Bouwheer* dapat melakukan konfirmasi dan monitoring keabsahan dan jatuh tempo Bank Garansi melalui CMS Perseroan tanpa perlu konfirmasi manual ke unit kerja Perseroan.

7. KMK Accepted Invoice BPJS Kesehatan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada fasilitas kesehatan untuk pengambilalihan tagihan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan *invoice* yang telah disetujui.

Keunggulannya sebagai berikut:

- Pembiayaan sebesar 100% dari nilai Invoice.
- Tanpa agunan tambahan.

8. Invoice Financing melalui Platform Investree (Fintech Peer To Peer Lending)

Perseroan melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology* (fintech) antara lain dalam penyaluran *invoice financing* dengan skema kerjasama yang dilakukan melalui *platform online*. di <https://www.investree.id>.

Produk ini memiliki keunggulan di antaranya:

- Prosedur pelayanan kredit secara digital dan cepat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- Biaya kredit relatif murah
- Tanpa agunan tambahan

Strategi Pengembangan Bisnis Pinjaman Kecil Ritel dan Menengah Tahun 2021

Pada tahun 2021, pertumbuhan Bisnis Pinjaman Kecil dan Menengah akan didukung dengan strategi bisnis yang berbasis digital guna bertumbuh lebih dinamis. Adapun strategi Bisnis Pinjaman Kecil dan Menengah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi Platform *Digital Loan Invoice Financing*.
- Pengembangan sistem notifikasi *point to point* pada Aplikasi BRISpot Ritel untuk menjaga kualitas pinjaman.
- Pengembangan aplikasi *Sales Planning System* dalam bisnis proses kredit menengah.
- Menjalankan aktivitas program pemasaran Bisnis Pinjaman Ritel & Menengah disesuaikan dengan kondisi persaingan bisnis.
- Optimalisasi *value chain business* khususnya dengan nasabah Korporasi potensial.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pemasar melalui program pendidikan dan pelatihan.
- Melakukan kerjasama *partnership* dengan perusahaan *peer to peer lending*.
- *Clustering* komoditas pertanian.
- Produk/*scheme initiatives/customized* percepatan pemberian kredit untuk debitur dengan invoices Perseroan.

Bisnis Pinjaman Konsumer, Simpanan Ritel, dan Jasa Perbankan Ritel

Bisnis Pinjaman Konsumer

Ringkasan Kinerja Bisnis Pinjaman Konsumer 31 Maret 2021

Pada 31 Maret 2021 *Outstanding* (OS) Pinjaman Konsumer sebesar Rp145.1 triliun atau tumbuh 1,0% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp143.7 triliun. Kenaikan pinjaman konsumer didorong oleh kenaikan pinjaman KPR sebesar Rp36,6 triliun atau tumbuh 2,47% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp35,7 triliun.

Pertumbuhan pinjaman KPR didorong oleh produk KPR Subsidi dimana sampai dengan Maret 2021 Perseroan telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 2.794 Debitur dengan plafond mencapai sebesar Rp409,2 Miliar sehingga total OS KPR Subsidi sebesar Rp1.8 Triliun atau naik 141,9% dibandingkan 31 Maret 2020.

(dalam miliar Rupiah)

Pinjaman	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kredit BRIGuna	102.008	101.337	101.319
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)	36.616	35.733	32.316
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	2.439	3.002	4.140
Kartu Kredit dan Lainnya	3.995	3.608	2.724
Total	145.057	143.680	140.499

Bisnis Pinjaman Konsumer Perseroan menyediakan produk yang memudahkan nasabah individu memiliki rumah, kendaraan, dan berbagai kebutuhan akan barang konsumsi lainnya. Pinjaman Konsumer Perseroan menawarkan suku bunga yang kompetitif dan proses yang cepat. Produk-produk Pinjaman Konsumer Perseroan adalah sebagai berikut:

1. BRIGuna

Merupakan kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen nasabah berpenghasilan tetap. BRIGuna tersedia dalam empat pilihan, yaitu BRIGuna Karya, BRIGuna Purna, BRIGuna Umum, dan BRIGuna Talangan. Briguna Karya adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan atau KTA dari Perseroan yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji). Briguna Karya dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai keperluan nasabah, mulai dari keperluan produktif hingga non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah, pengobatan, pernikahan, dan lain-lain. Briguna Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (uang pensiun). Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain. Briguna Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya: pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain.

Briguna Pendidikan merupakan Briguna khusus untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sudah memiliki upah atau penghasilan tetap.

2. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

KPR merupakan kredit konsumtif perumahan baik untuk pembelian baru/bekas, ambil alih, pembangunan serta renovasi dengan obyek berupa rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan). Terdapat beberapa jenis KPR yang disesuaikan dengan karakteristik nasabah, yaitu:

- a. KPR Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI adalah KPR Reguler BRI Non Subsidi yang telah disesuaikan untuk memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada ASN, TNI, dan POLRI.
- b. KPR Subsidi (KPRS) dan KPR Guru & Tenaga Kependidikan, merupakan program pemberian fasilitas KPP dan KPR Sejahtera (FLPP) dari Perseroan kepada kalangan guru dan tenaga kependidikan. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan di antaranya bebas administrasi dan biaya provisi serta suku bunga yang kompetitif.
- c. KPRS ASRI, merupakan program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk di dalamnya ASN, TNI dan POLRI dengan batasan gaji pokok maksimal Rp4 juta. Produk KPRS ASRI mempunyai sejumlah keunggulan antara lain suku bunga kompetitif, bebas administrasi dan biaya provisi, uang muka minimal sesuai ketentuan *Loan to Value* (LTV), dan tenor maksimal 20 tahun atau mencapai usia pensiun.
- d. KPRS atau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan Program pembiayaan rumah bersubsidi yang ditujukan kepada MBR dengan batasan gaji pokok maksimal sebesar Rp4 juta.
- e. Program-program KPR *seasonal* seperti KPR HOKI, KPR Lebaran, KPR Merdeka dan KPR HUT.

3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

KKB merupakan kredit dalam rangka pembiayaan kendaraan roda dua, roda dua premium dan roda empat yang dilakukan melalui pola langsung maupun pola kerjasama.

4. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan kredit tanpa agunan berbasis kartu yang memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi di *merchant-merchant* yang bekerja sama

Strategi Pengembangan Bisnis Pinjaman Konsumer Tahun 2021

Secara keseluruhan, Perseroan berencana menerapkan sejumlah strategi untuk pengembangan Bisnis Pinjaman Konsumer pada tahun 2021. Strategi tersebut antara lain:

BRIGuna dan KPR (Konsumer)

- Optimalisasi bisnis proses berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas tenaga pemasar.
- Optimalisasi nasabah *payroll* BRI.
- Perluasan pangsa pasar baru di luar ASN, TNI, dan POLRI untuk memasarkan Briguna dan KPR.
- Melakukan transformasi sistem *collection* Briguna dan KPR.

- Intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pada PKS *Developer* untuk KPR melalui BRISpot Konsumer dan *Instansi atau perusahaan untuk Briguna*.
- Optimalisasi *Leads Management KPR dan BRIGuna* pada BRISpot.
- Melanjutkan program *seasonal* dan taktikal dengan meningkatkan *customer experience* untuk Briguna dan KPR.
- Kerjasama dengan jasa layanan *Fronting*

Kartu Kredit

- Optimalisasi *leads management database*.
- Optimalisasi akuisisi *database merchant/ partner* kerjasama.
- Akuisisi *database indicative income* dengan *digital signature*.
- Kartu Kredit Pemerintah untuk Satuan Kerja LN dan APBD.
- *Corporate card* untuk *distributor financing*.
- *Cobranding Traveloka Pay Later* dan program *Affinity Card (Goes To University)*.
- Akuisisi *merchant* dan nasabah untuk *digital lending Ceria*.

Bisnis Simpanan Ritel

BRI memiliki produk Simpanan Ritel yang beragam untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabah. Pada tanggal 31 Maret 2021, produk Simpanan Ritel antara lain:

a. Tabungan BRI BritAma

Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dimana penyetoran dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang semakin memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selain itu, Tabungan ini memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri yang diberikan secara gratis kepada nasabah. Sejalan dalam kebutuhan nasabah yang semakin beragam.

b. BritAma Bisnis

Produk tabungan Perseroan yang diutamakan untuk berbisnis dengan memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis nasabah.

c. BritAma Edisi Khusus Anak Muda

Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

d. Tabungan BritAma Kerjasama

Produk Tabungan yang dipasarkan melalui kerjasama antara BRI dengan Pihak ketiga berupa perusahaan/instansi/kelompok induk yang dituangkan dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerjasama).

e. BritAma Rencana

Tabungan investasi dalam mata uang rupiah dengan setoran tetap bulanan dengan jangka waktu tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.

f. BritAma Valas

Tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 10 jenis *currency* meliputi USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, JPY, SAR dan GBP.

g. Tabungan BRI Junio

Produk Tabungan BRI Junio dikhususkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung dan memperkenalkan produk dan layanan perbankan sejak dini. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas e-Banking, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), serta Kartu Debit desain khusus yang menarik. Para orang tua tidak perlu khawatir dengan adanya berbagai fasilitas transaksi, karena transaksi anak dapat tetap dimonitor melalui SMS Notifikasi yang dikirim ke nomor *handphone* orang tua.

h. Tabungan BRI SiMuda

Tabungan BRI SiMuda merupakan tabungan yang ditujukan kepada perorangan khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda pada kelompok usia 18-30 tahun. Produk ini dilengkapi dengan fitur asuransi dan/atau produk investasi. Tabungan BRI SiMuda dilengkapi dengan dua fitur yaitu SiMuda RumahKu yang digunakan untuk menabung DP KPR Rumah dan SiMuda InvestasiKu yang dapat digunakan oleh nasabah untuk berinvestasi Reksadana. Produk Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas asuransi premi gratis pada tahun pertama.

i. Tabungan Haji

Produk Tabungan Haji ditujukan untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci. Nasabah dapat melakukan setoran Tabungan Haji di seluruh Unit Kerja Perseroan. Tabungan ini dilengkapi dengan perlindungan asuransi jiwa gratis yang dapat memberikan kenyamanan kepada nasabah.

j. Giro BRI

Produk Giro BRI memiliki fitur *Mass Debet*, *AccountSweep* hingga fasilitas *Salary crediting* yang memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji kepada pekerja secara efektif dan efisien. Giro BRI menyediakan beragam pilihan mata uang di antaranya IDR, USD, SGD, AUD, CNY, JPY, EUR, GBP, SAR, NOK, AED dan HKD. Untuk kemudahan transaksi, selain Cek dan Giro Bilyet, BRI memberikan fasilitas kartu Debit, IBBiZ (*Internet Banking Bisnis*) atau CMS (*Cash Management System*) yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kinerja Bisnis Jasa Simpanan Ritel sampai dengan 31 Maret 2021

Pada 31 Maret 2021, Simpanan Ritel mencapai Rp387,9 Triliun dengan komposisi CASA sebesar 59,2% dimana terjadi kenaikan komposisi sebesar 70bps dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar 58,5%.

(dalam triliun Rupiah)

Simpanan	31 Maret 2021	31 Desember	
		2020	2019
Giro	65,9	69,9	64,7
Tabungan	163,6	170,0	154,7
Deposito	158,3	170,5	155,2
Total	387,9	410,5	374,5
CASA	229,6	240,0	219,4
CASA (%)	59,2	58,5	58,6

Strategi Pengembangan Bisnis Simpanan Ritel Tahun 2021

Perseroan terus melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan perolehan dana dengan berfokus pada CASA. Hal ini sejalan dengan tujuan utama bisnis simpanan ritel di tahun 2021 yaitu menjadi CASA leader melalui produk BritAma. Untuk memperluas penjualan DPK pada masa pandemi Covid-19, strategi yang dijalankan adalah dengan mendorong akuisisi rekening melalui Digitalisasi dan meningkatkan *value* per customer melalui Monetisasi & *Enhancement* kapabilitas tenaga pemasar Perseroan.

Untuk mencapai strategi tersebut, Perseroan melakukan beberapa inovasi pada *business process*, *development product* dan organisasi demi mendukung pencapaian bisnis yang meliputi:

1. Re-engineering *Bussiness Process* dengan melakukan pengembangan akuisisi yang dilakukan melalui platform digital.
 - a. Digital Saving BRI

Dalam menjangkau DPK di Era New Normal ini, BRI telah melakukan strategi akuisisi nasabah dengan memberikan pelayanan pembukaan rekening secara full Digital melalui Platform BRI Buka Rekening. Dalam *platform* tersebut nasabah dimungkinkan untuk melakukan pembukaan rekening dengan Teknologi *Face Recognition* dan *Digital Signature* sehingga nasabah tidak perlu datang ke Unit kerja BRI, tidak perlu bertatap muka dengan petugas bank di Unit Kerja BRI untuk melakukan pembukaan rekening. Adapun target rekening sebesar 1 juta penambahan rekening digital, dengan total 4 juta rekening baru di 2020.
 - b. Monetisasi melalui Transaksi & *Platform Digital*

Dengan membuka rekening melalui BRI Buka Rekening, nasabah tidak hanya mendapatkan rekening Tabungan Digital, namun juga otomatis teregistrasi sebagai user Internet Banking BRI (BRImo), sehingga rekening yang terbentuk dapat langsung digunakan untuk bertransaksi secara Digital tanpa harus datang ke Unit Kerja BRI.
 - c. Mengembangkan platform digital sebagai solusi bagi ekosistem bisnis dan transaksi, sebagai *driver* pertumbuhan CASA baru.
 - d. Open Ecosystem

Model digital *partnership* yang menghubungkan BRI dengan fintech dan ekosistem digital.

2. *Enhancement* tenaga pemasar agar siap menjalankan proses bisnis secara digital melalui BRISPOT Konsumer yang digunakan sebagai media perencanaan, *monitoring*, dan penjualan yang dilengkapi dengan *Data Analytics* menggunakan *Big Data*. Sehingga Tenaga Pemasar Perseroan dapat menjadi *Digital Ambassador* dan *Financial Advisor* bagi produk dan layanan Perseroan.
3. Mencapai *CASA Leadership* di semua segmen dengan melakukan akuisisi *payroll* pada nasabah inti kerjasama serta *program loyalty* bagi nasabah *affluent* dan *mass* melalui BRI Poin.
4. Rejuvenasi Produk Simpanan dan jasa untuk meningkatkan *Fee Based Income*.
5. Solusi terintegrasi melalui kegiatan *cross selling product* Perseroan.

Bisnis Jasa Perbankan Ritel

Perseroan telah menyediakan beragam produk Jasa Perbankan Ritel yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Pada tahun 2021, produk yang ditawarkan Bisnis Jasa Perbankan Ritel antara lain:

- Internet Banking BRI
- Mobile Banking BRI
- BRIZZI
- BRImo
- Produk Investasi
- Digital Ecosystem Platform
 - BRI Smartbilling
 - Junio Smart Management System
 - BRIMOLA

Kinerja Bisnis Jasa Perbankan Ritel sampai dengan 31 Maret 2021

Kartu Debit dan Uang Elektronik	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kartu BRIZZI (juta)	19,6	19,3	16,8
Volume BRIZZI (Rp triliun)	2,9	8,8	12,6
Kartu Debit BRI (juta)	65,8	63,6	55,6

Transaksi E-Commerce	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Transaksi <i>e-commerce</i> (juta)	49,0	162,6	97,6
Volume <i>e-commerce</i> (Rp triliun)	48,1	101,1	55,2

E-Banking	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pengguna <i>Mobile Banking</i> (juta)	29,4	29,0	26,3
Transaksi <i>Mobile Banking</i> (juta)	94,4	384,5	370,5
Pengguna <i>Internet Banking</i> (juta)	28,1	25,9	19,5
Transaksi <i>Internet Banking</i> (juta)	1.153,4	2.715,4	1169,4

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Asset Under Management (AUM) (Rp triliun)	132,0	131,77	115,17
Produk Simpanan (DPK) (Rp triliun)	108,2	111,31	101,68
Jumlah Nasabah	80.843	78.613	70.364

	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
<i>Fee Based Income E-Banking & E-Channel</i> (Rp Miliar)	1.509,0	5.771,7	4.912,8
<i>Fee Based Income Wealth Management</i> (Rp miliar)	137,4	368,6	340,4

Strategi Pengembangan Bisnis Jasa Perbankan Ritel Tahun 2021

Beberapa strategi yang akan dilakukan di tahun 2021 sekaligus mendukung tema BRI tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan *service excellence* terutama pada peningkatan reliabilitas dan koneksi jaringan sistem dengan pengelolaan database yang lebih baik.

2. Fokus peningkatan pengguna kartu debit dan fitur SMS notifikasi, serta sekaligus bundling dengan peningkatan jumlah pengguna BRImo sebagai super-apps.
3. Fokus akuisisi *merchant* sesuai target sebelumnya (*Millenial, Women, and Netizen*).
4. Perluasan kerjasama dengan *merchants e-commerce*.
5. Ekosistem transaksi melalui produk-produk Digital Platform Perseroan.
6. Perluasan akseptasi BRIZZI.

BISNIS KORPORASI

Bisnis Korporasi merupakan segmen bisnis Perseroan yang fokus melayani kebutuhan nasabah-nasabah institusi/perusahaan besar baik Korporasi Badan Usaha Milik Negara maupun korporasi non BUMN. Dengan dukungan jaringan kerja yang sangat luas baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri, Perseroan selalu berupaya memberikan solusi layanan perbankan terpadu yang unggul.

a. Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Perseroan memiliki tanggung jawab lebih dalam mendukung program-program pemerintah dalam upaya pembangunan perekonomian negara tanpa mengesampingkan profitabilitas serta prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dengan mempertimbangkan potensi bisnis yang ada serta *risk weighted asset* yang rendah, Perseroan fokus membidik perusahaan BUMN terkemuka, baik Induk maupun Anak BUMN dengan tetap memperhatikan arah pengembangan perusahaan yaitu sebagai *driver of growth for microbanking, transaction banking, support subsidiary* dan *implementation to the digital banking*.

Kinerja Bisnis Korporasi BUMN sampai dengan 31 Maret 2021

Pada 31 Maret 2021, Kredit Korporasi kepada BUMN mencapai Rp77,7 triliun, meningkat Rp2,9 triliun atau 3,9% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp74,7 triliun.

Strategi Pengembangan Bisnis Korporasi BUMN Tahun 2021

Di tahun 2021 pengembangan bisnis korporasi akan difokuskan pada penyaluran kredit yang berkualitas, perbaikan kualitas kredit dan optimalisasi profitabilitas bisnis.

Strategi Terkait Pengembangan Bisnis Korporasi BUMN di tahun 2021, yaitu:

1. Fokus pada perbaikan kualitas kredit dan peningkatan profitabilitas bisnis.
2. Melakukan ekspansi terutama fokus pada intensifikasi *existing* debitur.
3. Meningkatkan *share of wallet* nasabah melalui penyediaan *integrated banking solution* kepada nasabah melalui pengembangan *transaction banking* sebagai sumber *fee based income*.
4. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kompetensi SDM yang handal untuk dapat menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan tetap melakukan manajemen profitabilitas atas setiap *account*.
5. Pengembangan *value chain* untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis segmen Ritel dan Menengah.

b. Bisnis Korporasi Non-BUMN (*Private Corporate*)

Bisnis Korporasi Non BUMN Perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu segmen yang mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan *competitive position* Perseroan. Setiap pemberian kredit kepada Korporasi Non BUMN harus memiliki peluang *value chain business* dan *cross-selling* sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan Bisnis Ritel, Kecil dan Menengah, serta Bisnis Konsumer Perseroan.

Segmen Bisnis Korporasi Non BUMN Perseroan terdiri dari sub-segmen agribisnis dan korporasi. Sasaran utama pengembangan kredit agribisnis adalah pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada UMKM. Selain itu fokus utama pembiayaan ke sektor agribisnis diutamakan kepada calon nasabah yang memiliki industri dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*) sehingga nasabah memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Sementara untuk sektor non-agribisnis, penyaluran kredit cukup bervariasi ke beberapa sektor, antara lain energi, transportasi dan industri pengolahan.

Kinerja Bisnis Korporasi Non-BUMN Tahun 2021

Pada 31 Maret 2021, *Outstanding* kredit Bisnis Korporasi BUMN mencapai Rp100,5 triliun, atau meningkat 7,3% dari 31 Desember 2020 yang sebesar Rp93,7 triliun.

Strategi Pengembangan Bisnis Korporasi Non-BUMN Tahun 2021

Pertumbuhan Bisnis Korporasi Non BUMN akan dijaga pada level yang moderat dengan fokus kepada perbaikan kualitas kredit dan peningkatan profitabilitas bisnis.

• Peningkatan kualitas kredit

Upaya peningkatan kualitas kredit akan terus dilakukan antara lain dengan menyusun *exit strategy* bagi debitur yang bermasalah, penyempurnaan sistem manajemen risiko dalam proses penyaluran kredit serta peningkatan kompetensi SDM.

• Peningkatan Profitabilitas Bisnis

Peningkatan profitabilitas bisnis akan difokuskan dengan terus meningkatkan transaksi bisnis nasabah melalui Perseroan dengan mengembangkan sistem layanan yang terintegrasi. Selain itu, Perseroan juga mengimplementasikan manajemen profitabilitas pada setiap nasabah.

c. **Bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non-Bank**

Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank ini memiliki dua lini utama yaitu bisnis jasa sindikasi dan pemberian limit fasilitas terutama *uncommitted line* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam negeri. Bisnis pembiayaan sindikasi ditujukan untuk nasabah korporasi yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan lebih dari satu kreditur. Sindikasi Perseroan telah berpengalaman dalam menangani kredit sindikasi dari berbagai sektor bisnis seperti infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, oil & gas, perdagangan/hotel/restoran, perkebunan, pertambangan dan properti yang meliputi jasa *arranger*, *facility agent*, *escrow agent*, dan *security agent*.

Sementara itu, Bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank meliputi *security line*, *foreign exchange line*, *trade finance line*, fasilitas pinjaman jangka pendek, fasilitas *intraday*, Bank Garansi dan penjaminan untuk berbagai kebutuhan khususnya untuk IKNB yang menjadi target penyaluran kredit Perseroan meliputi perusahaan pembiayaan (*multifinance*), asuransi, sekuritas, Lembaga keuangan khusus dan lembaga keuangan nonbank lain.

Kinerja Bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non-Bank 31 Maret 2021

Sampai dengan 31 Maret 2021, Bisnis Sindikasi & Jasa Keuangan Non-Bank telah menghasilkan *fee based income* sebesar Rp41,4 miliar, turun Rp23,5 miliar atau 12,1% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp64,9 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan transaksi sindikasi akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

Strategi Pengembangan Bisnis Sindikasi dan Jasa Keuangan Non-Bank Tahun 2021

Di tahun 2021, strategi penguatan Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non-Bank akan dilakukan melalui kerjasama dan sinergi bersama baik itu dengan sesama bank BUMN, bank swasta nasional, bank asing, Perusahaan Anak Perseroan, maupun bank anggota Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Peningkatan kerjasama ini difokuskan untuk memacu pertumbuhan FBI. Sementara untuk pengembangan Bisnis IKNB, Perseroan akan meningkatkan limit dan utilisasi limit fasilitas *existing*, dan perusahaan-perusahaan sekuritas serta asuransi potensial. Selain itu, melalui optimalisasi rantai nilai atas nasabah IKNB Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan implementasi digitalisasi yang dapat mempersingkat proses bisnis.

d. **Bisnis Dana Institusi & Transactional Banking**

Bisnis Dana Institusi meliputi pengelolaan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan melalui kementerian atau lembaga pemerintah dan juga dana dari pemerintah daerah serta swasta. Selain itu, Perseroan juga menyediakan platform *digital payment* untuk mengakuisisi dana-dana Kementerian atau lembaga yang memiliki porsi besar dalam APBN melalui penyediaan platform *transaction banking* atau *Cash Management System* (CMS) yang merupakan solusi layanan keuangan nasabah perbankan berbasis digital yang dilengkapi dengan berbagai fitur.

Kinerja Bisnis Dana Institusi sampai dengan 31 Maret 2021

Pada 31 Maret 2021, Dana Institusi mencapai Rp108,5 triliun atau meningkat 3,3% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp105,0 triliun.

Sampai dengan 31 Maret 2021, *Fee Based Income terkait Transaction Banking* (jasa trade finance dan jasa CMS) mencapai Rp351,5 miliar, menurun sebesar Rp47,6 miliar atau -11,9% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp399,1 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan *fee* khususnya yang berasal dari transaksi ekspor-impor yang belum pulih sepenuhnya akibat dampak COVID-19.

Strategi Pengembangan Bisnis Dana Institusi Tahun 2021

Bisnis Dana Institusi

Kompetisi perolehan Dana Pihak Ketiga Institusi semakin ketat dari tahun ke tahun. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan sejumlah strategi tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan komposisi CASA melalui *closed payment system* berbasis *digital banking*. Fitur produk perbankan dan Anak Perusahaan juga diselaraskan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga, serta pengelolaan penyaluran APBN Kementerian hingga satuan kerja (satker) daerah.
- Bisnis Institusi akan berfokus pada peningkatan utilisasi dan optimalisasi penggunaan *Dashboard Value Chain* dan *Account Planning*. Sebab hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas segmen korporasi dan membentuk bisnis value chain yang baru.
- Perseroan akan meningkatkan pengembangan platform kerjasama dengan beberapa institusi agar dapat mendukung profitabilitas perusahaan dari sisi *Fee Based Income* ("FBI").
- Bisnis Institusi Perseroan akan menerapkan beberapa program kerja antara lain Smart Sim, Aplikasi Digital-Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Kartu Pintar NPWP dengan Platform Kartin1 (Kartin One), Pengembangan sistem pembayaran SPP online untuk Universitas kelolaan Bisnis Institusi, Pengembangan sistem pembayaran PNBPN online, Pengembangan Aplikasi Pembayaran Pensiun (Digitalisasi), Pengembangan Aplikasi KTA/e-KTA, dan Pengembangan Aplikasi Penyaluran Gaji (Digitalisasi).

Bisnis Transaction Banking

Melalui inovasi produk yang beragam dan strategi bisnis yang sesuai, Bisnis TRB mencatat pencapaian kinerja yang positif sepanjang Tahun 2020, terutama dalam hal pencapaian FBI. Untuk melanjutkan tren positif tersebut, diperlukan strategi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa strategi yang akan dilakukan di Tahun 2021, sekaligus mendukung tema Perseroan Tahun 2021 yaitu *Integrated Financial Solutions*, adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi nasabah segmen korporasi melalui *platform CMS end to end* (BRICaMS).
- Fokus peningkatan FBI transaction banking dengan meningkatkan utilitas fitur *cash management*.
- Meningkatkan transaksi nasabah dalam satu ekosistem bisnis melalui platform *Corporate Billing Management* (CBM).
- Memperkuat dan memperluas kapasitas *Transaction Relationship Manager* menjadi *Transaction Product Specialist*.
- Akuisisi *new customer* potensial dari bisnis *trade finance* nasabah korporasi dan memperkuat *trade finance product*.

e. Bisnis Internasional

Bisnis Internasional Perseroan terdiri dari jasa di bidang bank koresponden, remitansi, dan *bank notes*. Secara operasional, lini bisnis tersebut dikoordinasi oleh Divisi Bisnis Internasional di tingkat Kantor Pusat, di tingkat Kantor Wilayah dan didukung oleh Unit Kerja Operasional, termasuk unit kerja luar negeri Perseroan di New York, Cayman Islands, Singapura, Hong Kong dan Timor-Leste. Selain itu, Perseroan juga memiliki *Remittance Representative* untuk meningkatkan layanan bisnis remitansi di Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Kinerja Bisnis Internasional sampai dengan 31 Maret 2021

Kinerja Keuangan

Ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19, Bisnis Internasional Perseroan masih mampu mencatatkan pendapatan yang positif, sebesar Rp71,91 Miliar pada posisi 31 Maret 2021. Pendapatan tersebut memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar -40,49%, namun tanda-tanda pemulihan mulai terlihat dari naiknya beberapa volume transaksi sebagai berikut :

Volume transaksi *Money Changer* meningkat menjadi Rp 9,79 triliun pada 31 Maret 2021 atau sebesar 71,18% dari Rp 5,72 triliun pada 31 Maret 2020. Peningkatan volume transaksi didukung oleh peralihan strategi pemasaran dari segmen ritel ke segmen *wholesale*, dimana segmen ritel sangat bergantung kepada Bandara Ngurah Rai dan Bandara Soekarno Hatta yang tutup akibat pandemi COVID-19.

Volume transaksi Remitansi meningkat menjadi Rp 347 triliun pada 31 Maret 2021 atau sebesar 8% dari Rp 321 triliun pada 31 Maret 2020. Peningkatan transaksi terjadi karena seluruh segmen bisnis remitansi mengalami kenaikan diantaranya segmen *Incoming* Kerjasama yang naik sebesar 4% *year on year* dan segmen *Incoming* Non Kerjasama sebesar 16% *year on year*.

Volume transaksi bisnis *Correspondent Banking* mengalami kenaikan menjadi USD 149 Juta pada 31 Maret 2021 atau sebesar 16,73% dari USD128 Juta pada 31 Maret 2020. Peningkatan signifikan terjadi pada transaksi bisnis Bank Koresponden yaitu transaksi *Local Guarantee (Under Counter Guarantee)* dengan kenaikan sebesar 100,14% *year on year*

Strategi Bisnis Internasional Tahun 2021

Pada tahun 2021, Bisnis Internasional Perseroan fokus untuk menjadi *Top Three Cross Border Payment Solution provider*. Oleh karena itu strategi yang disusun Perseroan untuk Bisnis Internasional pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bidang *Correspondent Banking*

1. Melakukan kajian ekspansi bisnis ke beberapa negara Asia lainnya guna memperluas jaringan bisnis internasional sehingga menghasilkan *value* yang lebih bagi perusahaan.
2. Otomatisasi transaksi *correspondent banking* menggunakan aplikasi TIPlus dan CORBAS.

Bidang Remitansi

Memperluas kerjasama pengiriman dana dengan mitra *Counterpart*, Bank lokal, Bank Syariah, maupun BPD.

Bidang *Money Changer*

1. Perseroan menjadi *market leader* dalam transaksi penjualan *Banknotes SAR* (Saudi Arabian Real).
2. Pengembangan layanan Bisnis *Money Changer*.
3. Memperluas kerjasama *business to business* dengan mitra *wholesale money changer*, Bank lokal, Bank Syariah, BPD, maupun *Tour Travel* dan KBIH, serta menambah gerai *money changer* di bandara internasional dan *tourism site* lainnya.

f. Bisnis Treasury

Bisnis *Treasury* meliputi bisnis dengan *counterparty* mencakup transaksi valuta asing, *money market*, dan derivatif. Penguatan Bisnis *Treasury* dilaksanakan oleh Divisi Bisnis *Treasury* yang memiliki 19 jaringan regional (Bisnis Internasional & *Treasury* Kantor wilayah Perseroan) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kinerja Bisnis Treasury sampai dengan 31 Maret 2021

Pada 31 Maret 2021, pencapaian *capital gain* Bisnis *Treasury* adalah sebesar Rp 1,03 triliun atau meningkat 120% dari posisi 31 Maret tahun 2020 sebesar Rp 470 Miliar.

Sampai dengan 31 Maret 2021, pendapatan *spot & derivative* mencapai Rp 358 Miliar atau meningkat 429% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp 68 miliar.

Strategi Bisnis Treasury Tahun 2021

Bisnis *Treasury* masih akan berfokus pada keseimbangan portofolio guna mendukung kinerja Bank di tahun mendatang. Untuk itu, strategi yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Menerapkan *active portfolio management* dengan mengoptimalkan eksekusi likuiditas *switching low yield asset to high yield asset* dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
- Memperkuat struktur pendanaan yang kuat dengan melakukan diversifikasi *funding* non DPK. Aktivitas ini guna mendukung pertumbuhan kredit Perseroan dan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- Pendalaman pasar keuangan dengan menambah *counterparts* baru, memperbesar *customer base*, dan sinergi dengan seluruh perusahaan grup Perseroan.
- Optimalisasi *flow* transaksi *Treasury* melalui upaya intensifikasi *anchor client*, baik BUMN, non BUMN, maupun institusi pemerintah.
- Dalam memenuhi kebutuhan nasabah *Treasury* akan melakukan peningkatan transaksi dan Pengembangan beberapa produk antara lain Produk *Hedging Syariah* atas nilai tukar, *Forward Rate Agreement*, dan *Bonds Option*.
- Berperan sebagai *Market Maker* dengan tetap aktif melakukan kuotasi harga yang kompetitif dan *up to date* sehingga berdampak pada peningkatan transaksi *Treasury*.

g. Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

Kinerja Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal sampai dengan 31 Maret 2021

Sampai dengan 31 Maret 2021, pendapatan fee atas transaksi *Investment Services* mencapai Rp72,0 Miliar atau meningkat 17,0% dibandingkan dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp61,5 miliar.

Kenaikan tersebut terbesar disumbang oleh *fee* agen penjualan reksadana pada posisi 31 Maret 2021 sebesar Rp9,5 Miliar atau mampu tumbuh 188,9% *year on year* dan *Fee* Pengelolaan DPLK pada posisi 31 Maret 2021 sebesar Rp26,2 Miliar atau mampu tumbuh 30,2% *year on year*.

Layanan Jasa Penunjang Pasar Modal Perseroan antara lain Jasa Wali Amanat, Kustodian, *Trust*, Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI), baik untuk nasabah korporasi maupun nasabah ritel. Berikut penjelasan dari setiap jasa yang disediakan:

Trust

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset keuangan untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa Trust di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013. Ruang lingkup layanan Jasa Trust BRI meliputi:

- Layanan Jasa Agen Pembayar
- Layanan Jasa Agen Peminjaman
- Layanan Jasa Agen Investasi
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan.

BRI saat ini telah memberikan pelayanan Jasa *Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan Jasa *Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (*non Trust*) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, Jasa *Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1996. Ijin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi Investment Services yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pemantau

Bank Administrator Rekening Dana Nasabah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh KSEI sebagai Bank administrator RDN dan Bank Pembayar. BRI sebagai Bank Administrator RDN memberikan jasa kepada Perusahaan Efek untuk membuka rekening dana bagi nasabahnya untuk bertransaksi di pasar modal. Saat ini Perseroan telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan sekuritas dalam memberikan jasa Bank RDN dengan menggunakan system *Host to Host* maupun menggunakan *application programming interface* (BRIAPI).

Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki layanan jasa Bank Kustodian sejak tahun 1996 berdasarkan SK dari BAPEPAM nomor KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996 untuk memenuhi kebutuhan nasabah terkait jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait Efek yang dimiliki.

Dalam hal layanannya, Bank Kustodian BRI merupakan bank kustodian pertama di Indonesia yang mengelola Efek Beragun Aset (EBA) pada tahun 2009 dan menjadi market leader sampai saat ini. Pada tahun 2012 Bank Kustodian BRI menjadi direct member Euroclear sehingga dapat melayani pengelolaan transaksi Global Securities. Pada tahun 2018 Bank Kustodian BRI memperoleh sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI untuk layanan Bank Kustodian berbasis syariah.

Selain itu Bank Kustodian BRI melayani pengelolaan berbagai jenis Efek, antara lain:

- *General Safekeeping*
- Reksadana / *Mutual Fund*
- Kontrak Pengelolaan Dana / *Discretionary Fund*
- Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP)
- Pengelolaan transaksi *Global Securities*

Tapera

Pada tahun 2020, BRI ditunjuk sebagai Bank Kustodian tunggal dalam pengelolaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Keterlibatan BRI pada program Tapera turut menjadi bentuk salah satu dukungan dalam menyukseskan program Pemerintah. Sebagaimana Undang Undang No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Tapera merupakan program Pemerintah dalam menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP TAPERA) untuk disalurkan sebagai sumber pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta sebagai dana tambahan saat usia pensiun.

DPLK BRI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI adalah DPLK yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. Pilihan paket investasi yang ditawarkan DPLK BRI cukup beragam. Terdapat 5 pilihan paket investasi yang dapat dipilih oleh peserta, antara lain:

- BRIFINE Pasar Uang
- BRIFINE Pendapatan Tetap
- BRIFINE Saham
- BRIFINE Pasar Uang Syariah
- BRIFINE Berimbang Syariah.

DPLK BRI menawarkan 3 program pengelolaan dana, antara lain:

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
2. Program Pengelolaan Dana Pesangon (PPDP)
3. Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK)

DPLK BRI tidak hanya melayani nasabah korporasi, tetapi juga menawarkan PIIP kepada nasabah individual.

14.5 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan terorisme memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk perbankan. Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi. Peningkatan risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Adapun ketentuan domestik mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PP TPPT) serta POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah berdasarkan POJK No. 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Pokok-pokok pengaturan dalam kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT antara lain meliputi:

- a. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
- b. Identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;
- c. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
- d. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- e. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- f. Pengkinian dan pemantauan;

- g. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- h. Pelaporan kepada PPAK;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. Transfer dana.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka perbankan diwajibkan untuk menerapkan prinsip *prudential banking*, antara lain dalam hal penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD). CDD merupakan proses melakukan kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil calon nasabah, nasabah dan *Walk In Customer* (WIC).

Peraturan ini mewajibkan bahwa sebelum memulai hubungan usaha, bank wajib meminta informasi minimum dari calon nasabah dan *Walk In Customer* (WIC), yaitu: (i) identitas dengan didukung dokumen-dokumen yang relevan, (ii) maksud dan tujuan melakukan hubungan usaha dengan bank, (iii) informasi lain yang dapat membantu bank untuk lebih mengenali profil calon nasabah, nasabah, WIC, *Beneficial Owner* (BO), dan (iv) identitas dari setiap pihak ketiga untuk siapa atau atas nama siapa pihak ketiga tersebut bertindak.

Penyempurnaan atas penerapan CDD selalu dilakukan baik dari sisi kebijakan maupun prosedur operasionalnya agar aplikasinya sesuai dengan ketentuan *Financial Action Task Force* (FATF) dan regulasi domestik.

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di Perseroan, Pengelola APU PPT melakukan sosialisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengadakan *webinar* kepada seluruh Staf Kepatuhan, perwakilan Auditor Kantor Inspeksi Perseroan di seluruh Indonesia, perwakilan jajaran operasional Kantor Cabang Perseroan dan Divisi terkait dengan menghadirkan pembicara dari pihak eksternal seperti OJK, BI, PPAK, KPK, POLRI, DJP dan institusi terkait lainnya.
2. Pelaksanaan *Sharing Session* secara daring kepada jajaran Risk Manajemen and Compliance terkait kendala yang dihadapi dilapangan untuk di bahas solusinya bersama pembicara ahli dari Divisi terkait.
3. Mengikutsertakan pekerja dalam kegiatan *public course*/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal terkait materi teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
4. Pelaksanaan *Self Learning* kepada seluruh pekerja dengan materi tentang Anti pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
 - 1) Memastikan Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
 - 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, seperti penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau *Walk In Customer* (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - 3) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - 4) Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan serta pengembangan sistem pendukung Program APU dan PPT;
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT;
 - 6) Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT;
 - 7) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
 - 8) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - 9) Memberikan persetujuan dan/atau pendelegasian persetujuan kepada pejabat Divisi Kepatuhan KP Perseroan atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR), kewajiban laporan Program APU dan PPT lainnya, dan pemberian informasi data nasabah terkait program APU dan PPT kepada regulator;
 - 10) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala. Adapun pegawai dimaksud adalah pegawai yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti *frontliner*, petugas pemasaran, pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT.
 - b. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - 1) Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi;

- 2) Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT; dan
 - 3) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Frekuensi pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko Perseroan
2. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT
 - a Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terkait dengan Nasabah, negara/area geografis, produk, jasa dan transaksi, serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
 - b Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau Uji Lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk In Customer* (WIC);
 - c Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
 - d Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
 - e Pengkinian dan pemantauan;
 - f Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
 - g Pelaporan kepada PPATK.
 3. Pengendalian Intern
 - a Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
 - b Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU dan PPT; dan
 - c Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.
 4. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Aplikasi Pendukung Penerapan Program APU dan PPT

 - a Sistem APU dan PPT yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Daridan ke Luar Negeri (TKL);
 - b Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT);
 - c Aplikasi mutasi rekening yang menyediakan informasi lawan transaksi;
 - d Aplikasi pencatatan profil dan transaksi *Walk In Customer* (WIC);
 - e Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) dan *Cash Transaction Report* (CTR) WIC online;
 - f Aplikasi pencarian data keuangan nasabah terintegrasi.
 5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka pencegahan penggunaan Perseroan sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Perseroan wajib melakukan: Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

Pelatihan

- a. Pelatihan dapat dilakukan secara elektronik (*online base*) maupun melalui pertemuan tatap muka.
- b. Pelatihan secara elektronik (*online base*) dapat menggunakan media *e-learning* baik yang disediakan oleh otoritas berwenang seperti PPATK atau yang disediakan oleh Perseroan dengan materi tertentu pada setiap tahun.

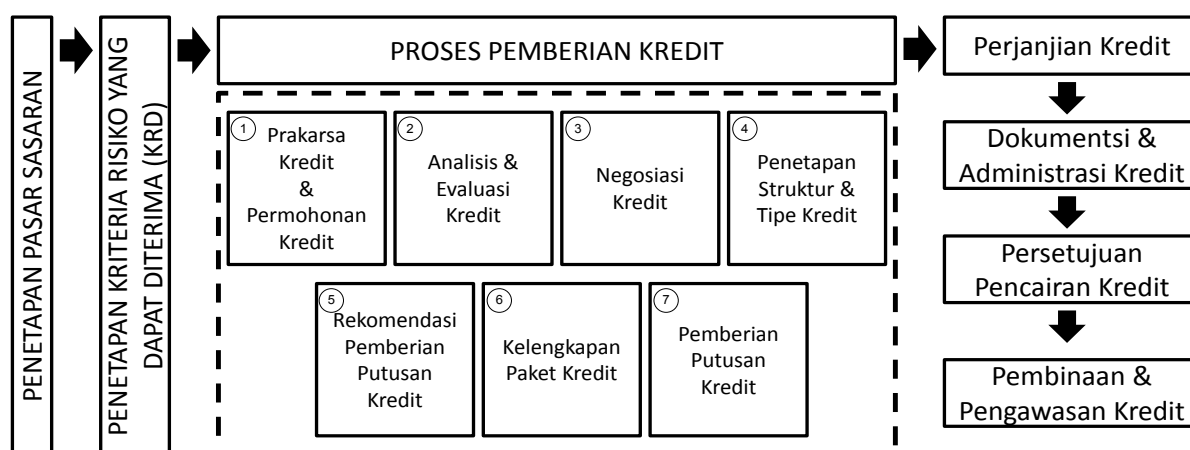
Skema Pemberian Kredit

Setiap tahapan proses pemberian kredit, harus senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan.

- a. Kebijakan pokok perkreditan mengatur tata cara pemberian kredit yang sehat, di antaranya :
 - Pemisahan fungsi dalam proses pemberian kredit yaitu *relationship management* (RM) dan *credit risk management* (CRM)
 - Penerapan *four eyes principle* yaitu kewenangan proses pemberian kredit yang harus dilakukan oleh minimal 2 (dua) pejabat kredit
 - Penerapan *Risk Rating System*
 - Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah
 - Pengaturan maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait, pihak tidak terkait dan kelompok peminjam (Grup) sesuai POJK yang berlaku
- b. Proses pemberian kredit harus meliputi tahapan sebagai berikut:
 1. Penetapan Pasar Sasaran (PS) atau *Loan Portfolio Guidelines* untuk mengarahkan pertumbuhan portfolio kredit pada industri yang prospektif dengan tingkat risiko yang dapat diterima serta melakukan diversifikasi portfolio secara optimal
 2. Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) berupa daftar kriteria yang harus dipenuhi apabila debitur /calon debitur dianggap layak dimasukkan sebagai *targeted customer*

3. Proses Pemberian Putusan Kredit :
 - a. Prakarsa Kredit dan Permohonan Kredit.
 - b. Analisis dan Evaluasi Kredit.
 - c. Negosiasi Kredit.
 - d. Penetapan Struktur dan Tipe Kredit.
 - e. Rekomendasi Pemberian Putusan Kredit.
 - f. Kelengkapan Paket Kredit.
 - g. Pemberian Putusan Kredit.
4. Perjanjian Kredit
5. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
6. Persetujuan Pencairan Kredit
7. Pembinaan dan Pengawasan Kredit

TAHAPAN UMUM PERKREDITAN



Sumber: Kebijakan Umum Perkreditan Perseroan diolah

14.6 Pemasaran

Perseroan menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi (*Integrated Marketing Communication*) dengan menggunakan media yang efektif & efisien untuk mencapai *awareness* yang optimal serta *positioning* yang tepat, dan relevan untuk masing-masing *target market audience* di tiap segmen sehingga dapat meningkatkan *brand value* bagi Perseroan. Dalam mengkomunikasikan seluruh aktivitas komunikasi, Perseroan memaksimalkan media komunikasi seperti *above the line*, *below the line*, media OOH serta didukung media *digital* melalui *Social Media* Perseroan. Adapun *social media asset* yang dimiliki oleh Perseroan yaitu Instagram (@bankbri_id), Twitter (@promo_BRI, @BANKBRI_ID, @KontakBRI) dan Facebook (Bank BRI) dan Youtube (Bank BRI). Beragam aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan dalam setahun terakhir untuk Nasabah Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Relaunching produk *Mobile Banking* yaitu BRImo
2. Pesta Rakyat Simpedes di 100 kota di seluruh Indonesia
3. Event/Aktivasi Produk BRI seperti *music events*, *food events*, *travel events*, *sport events*, *fashion events* dan *E-Commerce*

Beragam program pemasaran dan promosi produk yang dilakukan berdasarkan kesesuaian segmentasi dan preferensi Nasabah. Aktivitas komunikasi pemasaran Sektor Bisnis Konsumer, Sektor Retail dan Sektor *Wholesale* (Mikro, Komersial & Korporasi) dikelola oleh Divisi *Marketing Communication* (MCM) yang bertanggung jawab terhadap aktifitas komunikasi pemasaran produk-produk Perseroan dan bertugas untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *activation* dari produk, jasa, dan layanan serta program yang dimiliki oleh Perseroan baik kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) maupun calon nasabah (meningkatkan *purchase intention*).

Strategi Pemasaran 2021

Sejalan dengan tema strategi Perseroan di tahun 2021 yaitu *strengthen resilience*, strategi pemasaran Perseroan di tahun 2021 ini akan lebih difokuskan kepada ekspansi bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, terutama pada sektor yang mempunyai dampak minimal akibat krisis pandemi Covid-19. Perseroan juga akan fokus dalam ekspansi di sumber pertumbuhan baru terutama di segmen ultra mikro, sehingga kualitas aset perseroan akan terjaga dan pada akhirnya dapat berdampak positif pada profitabilitas Perseroan.

Penyediaan layanan keuangan juga dilakukan secara terintegrasi (*end to end financial solution*) disesuaikan dengan kebutuhan dan *life journey* nasabah, penyediaan pengalaman bertransaksi finansial yang *seamless across all channel* serta peningkatan kapabilitas mengelola kebutuhan nasabah. Melalui strategi tersebut maka diharapkan dapat terjadi peningkatan *customer experience* di seluruh *channel* Perseroan baik digital maupun unit kerja operasional serta peningkatan *cross selling* produk dan layanan BRI beserta perusahaan anak dengan memanfaatkan jaringan kerja grup BRI, *data analytics* dan *digital marketing*.

Bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan *core business* Perseroan yang harus dipertahankan dan diperkuat. Rencana ekspansi di segmen ultra mikro sesuai dengan arah transformasi perusahaan menjadi "*go smaller, go shorter, go faster*" yang diharapkan dapat mempersempit proses pertumbuhan *core business* Perseroan. Perseroan semakin berkembang dengan didukung oleh kekuatan Perseroan yang memiliki Unit Kerja yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia dengan *human capital* yang handal, *market share* terbesar, pertumbuhan KUR yang tinggi, produk, jasa & layanan yang unggul, loyalitas nasabah yang kuat serta jumlah Agen BRILink yang besar & tersebar.

Adapun untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Menciptakan *end to end financial solution* yang dapat memberikan *experience* bagi nasabah dengan dibangunnya *Super Apps* sehingga nantinya nasabah dapat mengakses semua produk Perseroan yang dibutuhkan dalam satu aplikasi.
2. *Business process re-engineering* melalui program kerja *road to digitalization, big data insight* dan *enhancement BRISpot*.
3. Peningkatan *market share* simpanan dan pinjaman melalui program kerja optimalisasi (*referral* dan edukasi finansial), melalui teknologi aplikasi digital, peningkatan produktivitas Agen BRILink, kerjasama dengan fintech serta kegiatan literasi & inklusi kepada masyarakat *unbankable*.
4. Peningkatan CASA melalui program kerja *pipeline management system*, program akuisisi dan pemasaran khusus di kantong dana serta menerapkan *cash pick up* bagi pedagang pasar melalui Agen BRILink maupun Kerjasama dengan pihak ketiga melalui aplikasi sehingga akan lebih memudahkan nasabah.

14.7 Manajemen Risiko

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat Perseroan harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko. Dalam pengelolaan Manajemen Risiko, Perseroan menerapkan *Enterprise Risk Management (ERM)* dengan pendekatan *Two-Prong* yang menekankan pengelolaan risiko pada operasional sehari-hari serta pengelolaan risiko dengan memastikan Perseroan memiliki modal yang cukup untuk *unexpected loss* dengan dukungan penerapan/*tools best practices*, untuk mengelola berbagai jenis risiko minimum sesuai POJK.

Untuk bertumbuh menjadi bank terdepan, Perseroan mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan teknologi digital dan jaringan yang handal melalui satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri. Perseroan menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan Perseroan bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana dicabut sebagian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan tanggal 16 Oktober 2020.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Surat Keputusan No : KB. 03-DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk-based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

1. Kebijakan Manajemen Risiko BRI adalah kebijakan yang bersifat umum (high-level) yang berfungsi mendukung proses manajemen risiko BRI, secara individual maupun terintegrasi (SK Direksi Perseroan Nomor: KB.03- DIR/MPE/12/2020)

tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko:

- a. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.
- c. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar.
- d. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.

Sistem Manajemen Risiko

Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko terintegrasi Perseroan dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- Pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris membentuk Komite Pengawas Manajemen Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pengawasan Manajemen Risiko. Tugas komite antara lain:
 1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko.
 2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan.
 3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pengawas Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada tahun 2020 yaitu pada tanggal:

- a. 21 Januari 2020 (Profil Risiko TW IV 2019)
 - b. 11 Februari 2020 (TKB SM II 2019)
 - c. 5 Mei 2020 (Profil Risiko TW I 2020)
 - d. 28 Juli 2020 (Profil Risiko TW II 2020)
 - e. 11 Agustus 2020 (TKB SM I 2020)
 - f. 3 November 2020 (Profil Risiko TW III 2020).
- Pengawasan Direksi
 1. *Risk Management Committee* dilaksanakan berkala secara triwulanan dan telah dilaksanakan selama periode 2020-2021 meliputi:
 - a. RMC I tanggal 18 Maret 2020
 - b. RMC II tanggal 11 Juni 2020
 - c. RMC III tanggal 13 Agustus 2020
 - d. RMC IV tanggal 4 November 2020
 - e. RMCT I tanggal 6 Mei 2020
 - f. RMCT II tanggal 29 Desember 2020
 - g. RMC I tanggal 10 Februari 2021
 - h. RMC II tanggal 29 April 2021
 - i. RMCT I tanggal 4 Maret 2021
 2. Forum ALCO terkait dengan pembahasan ekonomi makro serta kondisi dan pencapaian *asset & liability* yang dilakukan minimal 1 bulan sekali selama periode tahun 2020-2021
Tahun 2020:
 - a. ALCO I tanggal 20 Januari 2020
 - b. ALCO II tanggal 21 Februari 2020
 - c. ALCO III tanggal 20 Maret 2020
 - d. ALCO IV tanggal 16 April 2020
 - e. ALCO V tanggal 15 Mei 2020
 - f. ALCO VI tanggal 18 Juni 2020
 - g. ALCO VII tanggal 16 Juli 2020
 - h. ALCO VIII tanggal 13 Agustus 2020
 - i. ALCO IX tanggal 16 September 2020
 - j. ALCO X tanggal 14 Oktober 2020
 - k. ALCO XI tanggal 12 November 2020
 - l. ALCO XII tanggal 10 Desember 2020

Tahun 2021

- a. ALCO I tanggal 22 Januari 2021
- b. ALCO II tanggal 18 Februari 2021
- c. ALCO III tanggal 10 Maret 2021
- d. ALCO IV tanggal 13 April 2021
- e. ALCO V tanggal 7 Mei 2021
- f. ALCO VI tanggal 10 Juni 2021
- g. ALCO VII tanggal 13 Juli 2021

3. *Business Performance Review* (BPR) merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Perseroan secara nasional, kinerja seluruh unit kerja bisnis (Kantor Wilayah dan KCK serta seluruh Divisi Bisnis Kantor Pusat) serta program-program kerja strategis lainnya yang dilakukan secara bulanan dalam rangka pencapaian kinerja yang melibatkan Direksi, SEVP, Pemimpin Wilayah, Kepala Audit Intern Wilayah, Kepala Divisi dan Kepala Desk. Pelaksanaan BPR selama tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan BPR 2020

- a. BPR I : 18 Maret 2020
- b. BPR II : 15 April 2020
- c. BPR III : 13 Mei 2020
- d. BPR IV : 16 Juni 2020
- e. BPR V : 15 Juli 2020
- f. BPR VI : 14 Agustus 2020
- g. BPR VII : 15 September 2020
- h. BPR VIII : 15 Oktober 2020
- i. BPR IX : 11 November 2020
- j. BPR X : 8 Desember 2020

Pelaksanaan BPR 2021

- a. BPR I : 20 Januari 2021
- b. BPR II : 16 Februari 2021
- c. BPR III : 16 Maret 2021
- d. BPR IV : 14 April 2021
- e. BPR V : 11 Mei 2021
- f. BPR VI : 18 Juni 2021

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit telah tersedia dan sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan yang ditetapkan dalam Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pilar 3: Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

1. Pelaporan Manajemen Risiko
Pelaporan Manajemen Risiko kepada pihak-pihak tertentu sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Frekuensi penyampaian laporan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga mampu memberikan informasi yang memadai bagi pengambil keputusan.
 - b. Laporan memuat informasi mengenai total eksposur risiko, pemantauan terhadap risiko yang bersifat material, penetapan limit, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pencapaian kinerja bisnis serta implementasi manajemen risiko.
2. Manajemen Data Risiko
Manajemen data risiko merupakan pengelolaan data risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat ketersediaan, akurasi serta ketepatan waktu penyaluran informasi/laporan manajemen risiko serta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan manajemen risiko.

Sistem Informasi diantaranya meliputi : BRINETs, Cognos, BRISIM, Dashboard *Loan Portfolio Guideline* (LPG), BRIOPRA Dashboard Profil Risiko Likuiditas, *Dashboard* Profil Risiko Pasar dan Dashboard Profil Risiko Per Kantor Wilayah dan lain-lain. BRI *Operational Risk Assessor* (BRIOPRA), *Early Warning Indicator*, *Dashboard* Profil Risiko Likuiditas, *Dashboard* Profil Risiko Pasar dan *Dashboard* Profil Risiko Per Kantor Wilayah dan lain-lain.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Perseroan diterapkan dengan menggunakan konsep *Three Line of Defense*.

Pengendalian atas Faktor Risiko Perseroan

a. Risiko Kredit

Pengendalian risiko kredit dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Proses putusan kredit di atas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris.
 - b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
 - c. Pelaksanaan forum *Risk Management Committee* (RMC) triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan Pengelolaan risiko Perseroan, khususnya risiko kredit.
 - d. Pelaporan profil risiko triwulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Ketentuan pasar sasaran dan kriteria risiko yang diterima
 - b. Penentuan limit risiko, *risk appetite* dan *risk tolerance*
 - c. Ketentuan PDWK berjenjang.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko
 - a. Identifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh aktivitas-aktivitas usaha terutama aktiva produktif. Identifikasi risiko dilakukan pada komposisi portfolio aset dan tingkat, eksposur kredit, kualitas aset dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana dan faktor eksternal terutama makro ekonomi yang dapat meningkatkan risiko kredit.
 - b. Pengukuran risiko kredit dilakukan untuk menilai dan menganalisis eksposur risiko kredit serta mengidentifikasi setiap sensitivitas atau konsentrasi khusus pada portfolio kredit BRI. Dalam mengukur risiko kredit Perseroan menerapkan *one obligor concept* dalam analisa konsentrasi atau komposisi portfolio aset, mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkat internal, mengukur profil risiko kredit dan melakukan stress test untuk mengidentifikasi kejadian dan atau faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam menimbulkan kerugian.
 - c. Pemantauan risiko kredit mencakup monitoring keadaan/kondisi keuangan debitur, menjamin kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau transaksi berisiko kredit, menilai kecukupan jaminan relative terhadap kewajiban debitur, mengelompokkan kredit bermasalah secara periodik dan menangani dengan tepat kredit bermasalah. Pemantauan eksposur risiko dilakukan melalui proses *monitoring* portfolio kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja monitoring risiko kredit di kantor pusat. *Monitoring* portfolio dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan untuk limit risiko kredit antara lain: NPL, komposisi *Loan at Risk*, *Credit Cost*.
 - d. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui:
 - 1) Penetapan toleransi dan limit risiko kredit
 - 2) Pembatasan/limit konsentrasi kredit yang mencakup eksposur kepada nasabah, eksposur kepada pihak terkait, eksposur berdasarkan sektor ekonomi atau area geografis tertentu, eksposur berdasarkan segmentasi bisnis, eksposur kepada suatu negara
 - 3) Pencadangan kerugian yang dilakukan sesuai standar akuntansi yang berlaku
 - 4) Penanganan kredit bermasalah yang pengelolaannya dipindahkan dari jajaran RM kepada jajaran CRM.
4. Pengelolaan permodalan untuk risiko kredit dilakukan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko kredit (*unexpected loss*). dengan perhitungan modal yang dibutuhkan untuk menutupi *unexpected loss* dari risiko kredit. Perseroan menerapkan pendekatan standar dalam pengukuran ATMR risiko kredit sesuai ketentuan regulator.
5. Sistem pengendalian internal yang memastikan bahwa :
 - a. *Four Eyes Principles*: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
 - b. Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen menengah dan korporasi.
 - c. Penggunaan aplikasi *Loan Approval System* (LAS) yang meliputi identifikasi risiko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.
 - d. Penentuan CKPN berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
 - e. Integrasi antara pelampauan limit risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual.

b. Risiko Pasar

Pengendalian risiko pasar dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
 - b. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan Pengelolaan risiko pasar.
 - c. Pelaporan profil risiko bulanan dari unit kerja manajemen Risiko kepada Direksi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
Kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam *Treasury Policy* serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (KUMR dan P3MRP). Limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut, antara lain limit *open position* untuk *trading*, limit transaksi *dealer*, limit *cut loss* dan *stop loss*, limit *uncommitted credit line*, *counterparty* limit, serta limit *Value at Risk* (VaR).
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko
 - a. Identifikasi
 - 1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan Perseroan yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing Perseroan dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
 - 2) Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu:
 - i. Risiko Spesifik (*Specific Risk*) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi *long* atau posisi *short*. Dengan demikian proses saling hapus (*offset*) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
 - ii. Risiko Umum (*General Market Risk*) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi *long* atau posisi *short* dalam efek atau instrument yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
 - 3) Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga (*clean price*) ditambah dengan *present value* dari pendapatan bunga yang akan diterima (*accrued interest*). Perhitungan *present value* atas *accrued interest* dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi Perseroan baik *Trading Book* dan *Banking Book* dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan Risiko Suku Bunga (misalnya untuk instrumen *cross-currency swaps*). Dalam hal tersebut, maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.
Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:
 - 1) Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
 - 2) Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (*price movement*) secara aktual dan atau potensial.
 - 3) Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profit*).
 - 4) Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain *Bond Forward*, *Bond Option*, *Interest Rate Swap*, *Cross Currency Swaps*, *Foreign Exchange Forward*, *Interest Rate Options*, dan *Forward Rate Agreements*/FRAs.
 - 5) Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposits*) dan surat-surat berharga yang dijual oleh Perseroan dengan syarat dibeli kembali (*Repo/Securities Lending*).
 - 6) Posisi valuta asing Perseroan dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko nilai tukar.
 - b. Pengukuran
 - 1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan Perseroan yang diklasifikasikan sebagai *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing Perseroan dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
 - 2) Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) antara lain menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran *standardized* dan pengukuran *internal model* (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil *maturity* surat berharga.
 - 3) Valuasi portofolio *trading book* dan *banking book* dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (*mark to market*). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (*mark to market*) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).
 - c. Pemantauan dan pengendalian
Dalam menjalankan manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum *Asset & Liability Committee* (ALCO) serta laporan eksposur risiko pasar dalam Profil Risiko pasar.
4. Sistem pengendalian internal
 - a. Pemisahan fungsi *front*, *middle* dan *back office*. Fungsi manajemen risiko pasar Perseroan terdiri dari unit kerja *front office* (Divisi *Treasury*), *middle office* (Divisi MPE) dan *back office* (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.

- 1) Jajaran *front office* berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
 - 2) Jajaran *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark-to-market* (MTM).
 - 3) Jajaran *back office* melakukan *settlement* transaksi *treasury* dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b. Sistem pengendalian risiko pasar yang terintegrasi dengan fungsi *front office*.
 - c. Perseroan telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. Melalui aplikasi ini Perseroan dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, Perseroan juga melakukan *monitoring* limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi *dealer*, limit *open position*, Limit *Uncommitted Credit Line* (UCL), *cut loss* limit, dan *stop loss* limit. *Monitoring* dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/*trading*.
 - d. Integrasi antara pelampauan limit risiko pasar dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis.

c. Risiko Likuiditas

Pengendalian risiko likuiditas dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Pelaksanaan Rapat *ad-homini* ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau Perseroan sedang cukup ketat.
 - b. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
 - c. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko Perseroan.
 - d. Pelaporan profil risiko bulanan dari unit kerja manajemen risiko kepada Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Penentuan limit minimum LCR (*risk appetite statement*).
 - b. Penentuan limit minimum NSFR.
 - c. Limit likuiditas lainnya yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, dan limit risiko likuiditas antara lain tertuang dalam Kebijakan Manajemen Aset dan Liabilitas, serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko (KUMR), dan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (P3MRP).
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko
 - a. Identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko melalui *dashboard* profil likuiditas harian.
 - b. Pengendalian risiko melalui Protokol *Liquidity Contingency Plan*.
4. Sistem pengendalian internal
 - a. Sistem *monitoring* posisi likuiditas harian.
 - b. Integrasi antara pelampauan limit risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.

d. Risiko Operasional

Pengendalian risiko operasional dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
 - b. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko Perseroan dan pelaksanaan *Operational Risk Management Committee* (ORMC) yang diselenggarakan bilamana diperlukan (bersifat insidental) membahas *risk issue* berdasarkan penilaian isu risiko operasional dan risiko lainnya serta kejadian-kejadian kerugian terkini berikut efektifitas kontrol dari proses bisnis dan operasional.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
 - a. Limit *approval* untuk transaksi yang diberikan berjenjang.
 - b. Parameter dan limit profil risiko operasional dan lainnya.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko
 - a. Identifikasi risiko operasional dilakukan melalui perangkat RCSA yang meliputi 7 aktivitas fungsional bank yaitu: kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.
 - b. Pengukuran risiko operasional dilakukan menggunakan metodologi *Basic Indicator Approach* (BIA). Saat ini secara bertahap, Perseroan sedang mempersiapkan perhitungan dengan metode *Standardized Approach* (SA), yang kemudian akan dilanjutkan dengan metode *Advanced Measurement Approach* (AMA).

- c. Pemantauan profil risiko dilakukan melalui perangkat Indikator Risiko Utama (IRU), berdasarkan hasil *assessment* profil risiko dan data kerugian operasional yang dikelola melalui perangkat Manajemen Insiden (MI).
 - d. Pengendalian risiko melalui:
 - 1) Prosedur asesmen produk dan aktivitas baru untuk setiap produk maupun layanan baru, dimana setiap produk tersebut harus melalui *review* oleh unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan serta unit kerja hukum (jika diperlukan) sebelum didaftarkan ke *regulator*.
 - 2) Protokol *Business Continuity Management* untuk kejadian yang bersifat katastrofik. Dalam hal ini, Perseroan memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Struktur TMK dibentuk di seluruh unit kerja Perseroan yaitu TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah dan TMK Kantor Cabang. Aspek strategik yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik Perseroan.
4. Sistem pengendalian internal
- a. Pemisahan fungsi *Maker-Checker-Signer* dalam aktivitas operasional perbankan, dimana *approval* sebagian besar proses operasional telah *embedded* dalam *system Core Banking, Asset Management* maupun HR MIS.
 - b. Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu.
 - c. Implementasi SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi Perseroan dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Serta adanya sistem AML (*Anti Money Laundering*) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan (CTR dan STR).
 - d. Integrasi antara pelampauan limit risiko operasional, hukum, strategik dan kepatuhan dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis maupun individual.

e. Risiko Hukum

Pengendalian risiko hukum dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
Pembahasan mengenai kasus hukum yang material, pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, Rapat KPMR, dan Rapat Komite Audit.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
 - a. Pedoman hukum disusun oleh Legal Division Kantor Pusat dan disosialisasikan ke seluruh Unit Kerja Operasional.
 - b. Pembagian kewenangan pendampingan kasus hukum di lingkungan Legal Division Kantor Pusat dan *Legal Officer* di Kantor Wilayah.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Setiap proses transaksi maupun produk dan aktivitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Legal Division.
 - b. *Monitoring* Risiko Hukum terhadap seluruh unit kerja operasional di Indonesia dilakukan oleh *Legal Officer* di Kantor Wilayah melalui mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
 - c. *Legal Officer* di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di unit kerja operasional.
4. Sistem pengendalian internal
Legal Division secara aktif mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di unit kerja operasional.
Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:
 - a. Legal Division sebagai koordinator risiko hukum di Perseroan melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
 - b. Legal Division memberikan *advis/opini* hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/*agreement* antara Perseroan dengan pihak lain untuk melindungi kepentingan hukum Perseroan sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat Perseroan yang berwenang.
 - c. Setiap transaksi perbankan di Perseroan yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.
 - d. Legal Division bekerja sama dengan *legal officer* (LO) di Kantor Wilayah memantau risiko hukum di seluruh unit kerja Perseroan dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
 - e. Legal Division menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
 - f. Pembinaan staf pada unit kerja operasional (UKO) di kantor wilayah dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.

- g. *Legal officer* (LO) di kantor wilayah memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Legal Division.
- h. Legal Division memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
- i. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Legal Division mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
- j. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Perseroan dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi Perseroan, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui: penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
- k. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Legal Division berkoordinasi dengan Divisi DOR terkait dengan pelaporan profil risiko hukum Perseroan setiap bulan kepada Direksi melalui *dashboard* profil risiko.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran risiko hukum, Legal Division telah mengeluarkan kompilasi *resume* ketentuan. Kompilasi tersebut memuat *resume* ketentuan/panduan yang dikeluarkan oleh Legal Division yang meliputi: Aktivitas Perkreditan dan Agunan, Aktivitas Operasional, Legal Manual dan Buku Saku Hukum. Kompilasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh unit kerja operasional untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan demi melindungi Perseroan dari risiko hukum.

f. Risiko Stratejik

Pengendalian risiko stratejik dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
Pembahasan mengenai perencanaan strategi, *monitoring* pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulanan.
Materi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum rapat Direksi. Selain itu, rapat komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
 - Penyelenggaraan *joint planning session* pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing unit kerja divisi di kantor pusat.
 - Penyelenggaraan *workshop* penyalarsan (*Alignment*) rencana program kerja strategis antar unit kerja kantor pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.
 - Penerapan *performance management* Perseroan dengan pendekatan *balanced scorecard*, melalui penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.
 - *Monitoring Strategic Initiatives* Perseroan oleh unit kerja *Project Management Office*.
 - Di level kantor wilayah, Perseroan memiliki bagian operasional, jaringan, layanan dan *performance management* yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.
 - *Monitoring* dan *review* pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP secara berkala.
4. Sistem pengendalian internal
Apabila terdapat realisasi program kerja suatu unit kerja masih *behind schedule* akibat keterkaitan dengan unit kerja lain, akan dilakukan penyalarsan/akselerasi program kerja ke unit kerja yang dimintakan dukungan.

g. Risiko Reputasi

Pengendalian risiko reputasi dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi dan serta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan. Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Divisi SKP dengan melihat jumlah pemberitaan negatif terhadap Perseroan, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, *call center* dan peringkat Perseroan.

- b. Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (*vulnerabilities*) risiko reputasi yang dihadapi Perseroan. Setelah proses identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit parameter dalam Laporan Profil Risiko Reputasi.
 - c. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Divisi SKP yaitu dengan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negatif di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
 - d. Pemantauan risiko reputasi di kantor wilayah dilakukan oleh bagian OJL seksi layanan masing-masing kantor wilayah yaitu dengan melakukan *monitoring* secara berkala terhadap kualitas layanan di kantor cabang, kantor cabang pembantu dan BRI Unit binaan masing-masing setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
 - e. Pengendalian risiko reputasi Perseroan antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan pelayanan dan pengelolaan informasi, serta Divisi SKP melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan divisi Layanan dan unit kerja terkait untuk menyelesaikan pemberitaan negatif dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.
4. Sistem pengendalian internal
- Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dilakukan secara berkala terhadap kualitas penerapan manajemen risiko reputasi.

h. Risiko Kepatuhan

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan, antara lain:
 - a. Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).
 - b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap rencana kebijakan dan/atau keputusan Perseroan oleh Direktur Kepatuhan dan Jajaran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan.
 - c. Penerapan budaya kepatuhan di unit kerja.
 - d. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
 - e. Kebijakan tentang Benturan Kepentingan.
 - f. Kebijakan tentang Kode Etik.
 - g. Kebijakan tentang Program Pengendalian Gratifikasi.
 - h. Kebijakan tentang *Whistleblowing System*.
 - i. Divisi Kepatuhan sebagai koordinator risiko kepatuhan melakukan Pengujian Kepatuhan terhadap seluruh rencana kebijakan internal Perseroan yang akan ditetapkan oleh Direksi. Divisi Kepatuhan juga melakukan Analisa Dampak atas peraturan/ketentuan regulator yang berdampak terhadap bisnis/operasional Perseroan.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Melakukan identifikasi risiko kepatuhan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah berdasarkan kompilasi dari UKO kepada divisi kepatuhan.
 - b. Proses manajemen risiko kepatuhan didukung dengan sistem informasi yang memadai antara lain:
 - 1) Aplikasi AML (*Anti Money Laundering*) digunakan untuk memonitor transaksi yang mencurigakan.
 - 2) Aplikasi otomasi pengujian kepatuhan digunakan untuk melakukan proses pengujian dan *monitoring progress* pengujian.
 - 3) Aplikasi GCG Online digunakan untuk pelaporan terhadap Komitmen, Gratifikasi, Kode Etik, Benturan Kepentingan dan *Annual Disclosure* oleh unit kerja.
 - c. Penetapan unit kerja khusus baik di kantor wilayah maupun di kantor pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT.
 - d. Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari fungsi manajemen risiko yang mengkoordinir pelaksanaan manajemen risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.
 - e. Sumber daya manusia yang ditunjuk untuk mengelola risiko kepatuhan memiliki kompetensi yang memadai dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan level jabatan.
4. Sistem pengendalian internal
Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan. Divisi kepatuhan secara aktif mensosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional Perseroan.

i. Risiko Transaksi Intra Group

Pengendalian risiko transaksi intra group dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 - a. Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk konglomerasi keuangan Perseroan.
 - b. Direksi Perseroan membentuk *Risk Management Committee* terintegrasi dan telah mengadakan forum RMC terintegrasi untuk membahas risiko Intra Group dan kebijakan risiko Intra Group dalam konglomerasi keuangan Perseroan.
 - c. Dewan Komisaris entitas utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - 2) Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
 - d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Perusahaan Anak secara berkala untuk membahas profil risiko Intra-Group.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Terdapat kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

 - a. Surat Keputusan No : KB. 03-DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Identifikasi risiko *Intra-Group* secara terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi konglomerasi keuangan Perseroan.
 - b. Pengukuran risiko inheren *Intra-Group* dan kualitas penerapan manajemen risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
 - c. Pemantauan dan pengendalian risiko melalui forum pembahasan profil risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas isu risiko *Intra-Group* dan rencana tindak lanjutnya.
 - d. Proses manajemen risiko transaksi *Intra-Group* memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi *Intra-Group* telah ditunjuk *Subsidiaries Management Division* sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap Perusahaan Anak.
4. Sistem pengendalian internal
 - a. Efektivitas budaya sadar risiko *Intra-Group* pada konglomerasi keuangan Perseroan.
 - b. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas penerapan manajemen risiko *Intra-Group* oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

j. Risiko Asuransi

Pengendalian risiko asuransi dilakukan Perseroan melalui 4 (empat) pilar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
 - a. Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk konglomerasi keuangan Perseroan.
 - b. Direksi Perseroan membentuk *Risk Management Committee* Terintegrasi dan mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas risiko asuransi dan kebijakan risiko asuransi dalam konglomerasi keuangan Perseroan.
 - c. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - 2) Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
 - d. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Perusahaan Anak secara berkala untuk membahas profil risiko asuransi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:

 - a. Surat Keputusan No : KB. 03-DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - b. Surat Edaran No 39 - DIR/EMP/07/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk-based Bank Rating*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen risiko.
 - a. Identifikasi risiko asuransi secara terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi konglomerasi keuangan Perseroan.
 - b. Pengukuran risiko inheren asuransi dan kualitas penerapan manajemen risiko asuransi melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
 - c. Pemantauan dan pengendalian risiko melalui forum pembahasan profil risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas isu risiko asuransi dan rencana tindak lanjutnya.
4. Sistem pengendalian internal
 - a. Efektivitas budaya sadar risiko asuransi pada konglomerasi keuangan Perseroan. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) pada kualitas penerapan manajemen risiko asuransi oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

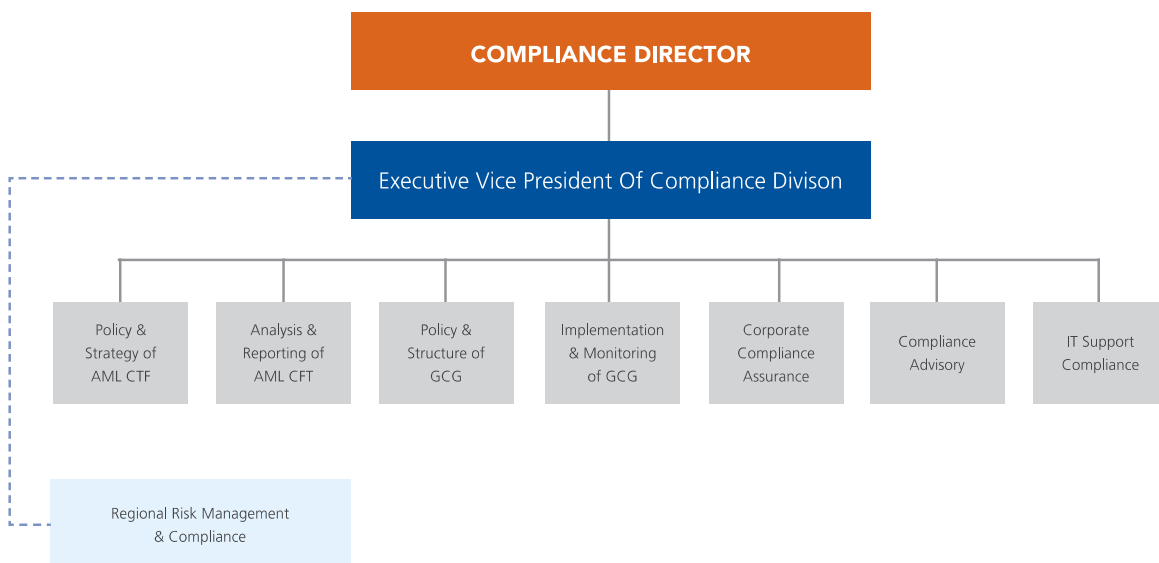
14.8 Kepatuhan

Dalam rangka memitigasi risiko dengan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) serta mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di bank secara keseluruhan, Perseroan telah melaksanakan fungsi Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Fungsi Kepatuhan di Perseroan dilaksanakan oleh jajaran kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan, *Compliance Division*, *Branch Risk & Compliance* serta *Unit Risk & Compliance* yang berada di bawah supervisi Bagian *Risk Management & Compliance* Kantor Wilayah dan fungsi kepatuhan Unit Kerja Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi Divisi Kepatuhan. Jajaran kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha Perseroan.

Struktur Organisasi Kepatuhan Perseroan

STRUKTUR ORGANISASI KEPATUHAN BRI



Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk sistem ketentuan dan pedoman internal Perseroan;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;
6. Melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah.
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
 - a. Bisnis dan operasional.
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
 - c. Treasury.
 - d. Keuangan dan Akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang & jasa.
 - f. Teknologi dan informasi.
 - g. Audit intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha Perseroan. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak profesional dan objektif.

Tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan Perseroan diantaranya:

1. Menyusun langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan *review* (kaji ulang) dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
 - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.

Dalam rangka memastikan berjalannya fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, Perseroan telah memiliki pedoman pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Perseroan yang tertuang dalam Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*). Ruang lingkup Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) antara lain:

1. Fungsi Kepatuhan Bank dan Ketentuan umum mengenai Jajaran Kepatuhan, diantaranya Independensi Jajaran Kepatuhan, Kewenangan Jajaran Kepatuhan dan Kedudukan Jajaran Kepatuhan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan.
3. Pelaporan Fungsi Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2020, pekerja di jajaran satuan kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti program pendidikan guna pengembangan kompetensi, antara lain:

1. Pelaksanaan *training, short course, seminar* dan/atau *workshop* dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.

2. Pelaksanaan *virtual training* kepada jajaran fungsi kepatuhan Kanwil.
3. Pelaksanaan sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP).

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan 2020

1. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
BRI telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk ruang lingkup Pengadaan Barang & Jasa di Kantor Pusat BRI.
2. Penilaian Efektifitas Budaya Kepatuhan
Direktorat Kepatuhan telah memiliki parameter pengukuran efektifitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.
3. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kompleksitas produk, layanan jasa keuangan dan pola pemasaran (*multichannel marketing*) serta teknologi perbankan, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*. Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Penyempurnaan Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).
 - b. Penyempurnaan Kebijakan Penerapan Program APU PPT untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
 - c. Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran *Regional Risk Management & Compliance* dan *Branch Risk & Compliance*.
4. Peningkatan Awareness
Direktorat Kepatuhan melakukan awareness terhadap implementasi budaya kepatuhan, implementasi program APU PPT melalui program BRI E-College (BRI Electronic Compliance Skill and Knowledge) dan e-learning.
5. Digitalisasi Proses Bisnis
Melakukan penyederhanaan proses bisnis untuk mendukung efisiensi dan perkembangan bisnis melalui pengembangan sistem yang antara lain meliputi:
 - a. Pengembangan Data Base *Anti Money Laundering & Counter Financing Terrorism (AML & CFT)* Terintegrasi.
 - b. Pengembangan sistem pelaporan Go AML.

Pengelolaan risiko kepatuhan meliputi:

1. Review dan pengkinian kebijakan internal bank dalam rangka sinkronisasi dengan ketentuan regulator yang berlaku.
2. Identifikasi risiko kepatuhan terhadap kebijakan dan putusan Direksi tidak menyimpang dari peraturan OJK/regulator/perundang-undangan yang berlaku melalui pengujian prinsip kehati-hatian.
3. Pengukuran dan pemantauan risiko berdasarkan data Manajemen Insiden atas terjadinya pelanggaran ketentuan.
4. Monitoring dan tindak lanjut kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada pihak regulator dan/atau pengawas lainnya yang berwenang.

14.9 Prospek Usaha

Perbaikan proses bisnis internal Perseroan diharapkan akan menunjang ekspansi bisnis Perseroan.

- **Bisnis Mikro**
Untuk memastikan pertumbuhan bisnis di segmen Mikro, Perseroan melakukan akselerasi bisnis di segmen ultra mikro Bersama Pegadaian dan PNM. Dengan ekosistem ini maka proses naik kelas dari nasabah ultra mikro menjadi nasabah Mikro dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Perseroan terus mengelola produk KUR agar dapat menjadi pipeline kredit Mikro komersial, yaitu Kupedes. Optimisme tersebut ditunjang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah terkait pengembangan sektor usaha Mikro. Hal ini merupakan peluang bagi Perseroan untuk menjaga pertumbuhan kredit Mikro yang memiliki keunggulan dan terbukti menjadi pemimpin pasar pinjaman Mikro melalui Kupedes dan KUR.
- **Bisnis Konsumer**
Potensi di segmen Konsumer akan dimaksimalkan dengan produk unggulan Briguna, yaitu pinjaman untuk segmen pekerja berpenghasilan tetap KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) serta KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) melalui optimasi *cross-sell* dengan peningkatan kerjasama melalui BRI Finance untuk menjangkau khususnya segmen Korporasi dan BUMN.

- **Dana Murah**
Peningkatan penyaluran kredit terutama di segmen Konsumer dan Mikro tersebut diharapkan akan diimbangi dengan kemampuan Perseroan dalam menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui strategi pemasaran yang efektif untuk produk unggulan Simpedes dan Britama. Dengan meningkatnya porsi APBN untuk subsidi non energi dan pos transfer dana ke daerah, diharapkan akan menyumbang pada pertumbuhan Simpanan seperti yang terlihat pada tahun sebelumnya.
- **Operasional Bisnis**
Dengan inisiatif *business process re-engineering*, Perseroan akan terus melakukan upaya-upaya efisiensi dengan melakukan digitasi proses bisnis. Sehingga untuk mempertahankan kualitas layanan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang terus meningkat, Perseroan akan mendorong pertumbuhan bisnis agen BRILink, optimalisasi BRISpot, memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan membangun Big Data dan menyelaraskan proses bisnis pada berbagai sistem prakarsa dan putusan kredit.
- **Kualitas Aset**
Untuk kualitas kredit, Perseroan masih akan melakukan strategi untuk menjaga tingkat rasio NPL (*Non-Performing Loan*), antara lain dengan memaksimalkan penyelesaian kredit melalui intensifikasi kerjasama dengan kejaksaan untuk pelaksanaan eksekusi agunan.

14.10 Persaingan Usaha

Perseroan saat ini menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam seluruh kegiatan bisnisnya dari bank-bank lokal dan juga dari bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Selain menghadapi persaingan dengan bank-bank lain, Perseroan juga menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna usaha dan anjak piutang, dan perusahaan modal ventura, serta perusahaan-perusahaan lainnya yang memberikan pendanaan bagi pengembangan industri, ekspor/impor dan jasa.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Perseroan menerapkan strategi-strategi yang mendukung pertumbuhan perusahaan secara organik maupun non-organik, diantaranya adalah pengembangan produk/fitur produk baru, perluasan jaringan kerja (termasuk jaringan *e-channel*), peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pertumbuhan bisnis, optimalisasi pemanfaatan IT baik dalam proses bisnis internal maupun untuk sistem operasional unit kerja, serta implementasi aksi korporasi dalam bentuk akuisisi atas bank atau lembaga keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan.

Perseroan terus berupaya meningkatkan posisinya dalam peta persaingan perbankan nasional. Dengan strategi yang bersinergi dan koordinasi antar unit kerja, Perseroan mencetak kinerja yang cukup baik. Dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank lain, salah satu strategi yang dijalankan yaitu Perseroan gencar melakukan ekspansi, baik di sisi pinjaman maupun simpanan. Untuk itu, Perseroan secara agresif namun selektif melakukan *mapping* dan penetrasi bisnis terhadap sektor-sektor usaha prospektif yang belum secara optimal digarap oleh Perseroan.

Berikut adalah posisi Perseroan diantara pesaing-pesaing berdasarkan beberapa indikator keuangan masing-masing bank sebagai entitas induk per tanggal 31 Maret 2021:

(dalam triliunan Rupiah)

No.	Nama Bank (Entitas Induk)	Aset	Liabilitas	Ekuitas	Pendapatan	
					Bunga - neto	Laba Bersih
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.374	1.186	188	22,8	6,7
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.253	1.086	167	12,9	5,0
3.	PT Bank Central Asia Tbk	1.071	901	170	13,2	4,3
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	840	729	111	9,4	2,3
5.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	270	230	40	3,2	0,9
6.	PT Bank Permata Tbk	203	168	35	2,0	0,5
7.	PT Bank Pan Indonesia Tbk	191	150	41	2,0	0,6

14.11 Sertifikasi dan Penghargaan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. ISO 9001:2015
 - Unit Kerja Akuntansi dan Manajemen Keuangan (Divisi AMK) memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Januari 2021 dengan ruang lingkup "*Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control*,

and Corporate Financial & Tax Compliance” dari Lembaga Sertifikasi PT SGS Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Divisi AMK selalu melakukan peningkatan kualitas penyusunan dan pengawasan Kebijakan Akuntansi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* Perseroan dalam rangka menjamin kewajaran Laporan Keuangan.

- Unit Kerja *Asset & Liabilities Management* berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 6 Mei 2018 sampai dengan 6 Mei 2021 dengan ruang lingkup *Preparation of Data for Financial Statement dan Provision of External Report* (Laporan Bulanan Bank Umum). Hal tersebut merupakan bukti bahwa Perseroan selalu melakukan peningkatan kualitas dalam penyediaan data untuk laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh Perseroan dapat semakin baik.
 - Unit Kerja *Payment Operation* Perseroan berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku sejak 12 Desember 2020 sampai dengan 11 Desember 2023 dengan 12 (dua belas) ruang lingkup meliputi: “*Provision of Payment System including RTGS & Clearing, Remittance & Collection, Settlement Treasury & E Banking, Cash Operation, ATM Cash Operation, Card Perso, ATM/CRM Cash Reconciliation 1, ATM/CRM Cash Reconciliation 2, Payment System Reconciliation, Trade Processing Center Jakarta, Trade Processing Center Surabaya and Quality Assurance.*” dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd’s Register Indonesia. Melalui sertifikasi ini diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas proses transaksi di Perseroan sehingga menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan.
 - Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi PT Lloyd’s Register Indonesia yang berlaku sejak 13 Januari 2018 sampai dengan 9 Desember 2020 terkait dengan “*Provision of Inventory, Purchase Payment and Archiving Service*”. Sertifikasi ini juga telah diakui secara nasional dan internasional oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan United Kingdom Accreditation Services (UKAS) *Management System*.
 - Unit Kerja Bisnis Internasional berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi Lloyd’s Register Indonesia yang berlaku sejak 8 November 2018 sampai dengan 11 Desember 2020 dengan sertifikasi ini *management System Standard* Divisi Bisnis Internasional diakui dalam hal “*Provision of Trade Processing Centre Service Including Supporting Function of Policy and Development & Monitoring Trade Finance*”. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Perseroan selalu melakukan peningkatan kualitas operasional sehingga menjadi perantara perdagangan yang terpercaya.
 - Unit Kerja Operasional *Human Capital* Perseroan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dari Lembaga Sertifikasi SGS Indonesia yang berlaku sejak 19 September 2018 sampai dengan 9 November 2021. Hal ini menunjukkan bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada Pekerja. Sertifikat ISO ini diberikan untuk sistem manajemen mutu di bidang pengelolaan data, komunikasi, dan pembayaran kompensasi dan *benefit Human Capital* dengan layanan berbasis teknologi yang cepat, tepat dan akurat.
2. ISO 27001:2013
- Unit Kerja *Digital Center of Excellence* juga telah memperoleh sertifikat ISO 27001:2013 yang berlaku sejak 14 Desember 2018 sampai dengan 13 Desember 2021 dari Lembaga BSI dengan ruang lingkup *the management of information security in provision of big data dan analytics*. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Perseroan untuk mengembangkan teknologi *big data* yang akan mendukung strategi pengembangan bisnis Perseroan ke depan.

Dari awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, Perseroan telah meraih 238 penghargaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Penghargaan	Lembaga
1	Forbes Global 2000: World Largest Company In Indonesia #1 2021 Ranking in Worldwide #362	Forbes
2	The Banker Top 1000 World Banks 2020 Ranking #112	The Banker
3	Brand Finance: Banking 500 2021 Ranking #89	Brand Finance
4	The Asian Banker "The Largest Bank Rankings Asia Pacific" 2020 Ranking #99	The Asian Banker
5	The Best Retail banks 2021 Ranking #35	The Asian Banker
6	Best of The Best Communications	BCOMSS 2020
7	Gold Winner Social Media and Corporate Campaign	BCOMSS 2020
8	Infobank 4th Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2021: BRImo peringkat 1	Infobank
9	Infobank 4th Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2021: ATM BRI peringkat 2	Infobank
10	Top Brand Award 2021: BritAma peringkat 2	TOP Brand
11	Top Brand Award 2021: Simpedes peringkat 3	TOP Brand
12	Top Brand Award 2021: BritAma Rencana peringkat 1	TOP Brand
13	Top Brand Award 2021: Simpedes Impian Peringkat 3	TOP Brand
14	Top Brand Award 2021: Tabungan BRI Junio peringkat 1	TOP Brand
15	Top Brand Award 2021: Deposito BRI peringkat 2	TOP Brand
16	Top Brand Award 2021: BRImo peringkat 2	TOP Brand
17	Top Brand Award 2021: Internet Banking BRI peringkat 2	TOP Brand
18	Syndicated Financial Institution Deal of the Year	Asia Pacific Loan Market

No	Penghargaan	Lembaga
		Associaton (APLMA)
19	Celent Model Bank 2021: Model Bank Financial Inclusion 2021	Celent Model Bank 2021
20	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021: Produk Tabungan	Tras n Co
21	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021: Kartu Kredit	Tras n Co
22	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021: Kartu Prepaid	Tras n Co
23	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021: Produk Deposito	Tras n Co
24	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021: Mobile Banking	Tras n Co
25	Indonesia WOW Brand 2021: Call Center peringkat 1	MarkPlus
26	Indonesia WOW Brand 2021: Internet Banking peringkat 2	MarkPlus
27	Indonesia WOW Brand 2021: ATM peringkat 2	MarkPlus
28	Indonesia WOW Brand 2021: Mortgage peringkat 2	MarkPlus
29	Indonesia WOW Brand 2021: Saving Account peringkat 2	MarkPlus
30	Indonesia WOW Brand 2021: E-money peringkat 3	MarkPlus
31	Indonesia WOW Brand 2021: Mobile Banking peringkat 3	MarkPlus
32	Indonesia WOW Brand 2021: Digital Saving peringkat 3	MarkPlus
33	Indonesia WOW Brand 2021: Digital Lounge peringkat 3	MarkPlus
34	Branding Campaign Award: BrilianPreneur UMKM Export nominasi Gold	MarkPlus
35	Branding Campaign Award: BRI mo nominasi Gold	MarkPlus
36	Penurunan Emisi Korporasi Sektor Emiten Perbankan Kategori Green	Beritasatu
37	Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN Perbankan Kategori Green	Beritasatu
38	The Most Innovative Conventional Bank for The Ultra Micro Digital Risk Management Framework	Warta Ekonomi
39	The Best IT Development & Innovation	DIGITECH Award 2021
40	The Best IT Leadership in Banking Industries	DIGITECH Award 2021
41	The Best Chief Information Officer	DIGITECH Award 2021
42	Merdeka Award 2021: Program Kepedulian Sosial Bantu Dampak Covid-19	Merdeka.com
43	iNews Maker Awards 2021: The Best CEO	iNews TV
44	iNews Maker Awards 2021: Best of The Best Innovation Company	iNews TV
45	10th Anugerah BUMN 2021: Sunarso sebagai The Best CEO perusahaan Tbk	BUMN Track
46	10th Anugerah BUMN 2021: Sunarso sebagai CEO Strategic Orientation Perusahaan (Tbk)	BUMN Track
47	10th Anugerah BUMN 2021: The Best Corporate (Tbk)	BUMN Track
48	10th Anugerah BUMN 2021: Terbaik 1 Tata Kelola Perusahaan (GCG)	BUMN Track
49	10th Anugerah BUMN 2021: Terbaik 1 Transformasi Bisnis & Organisasi	BUMN Track
50	Liputan6.com Award: KPR BRI sebagai brand penyedia solusi di tengah pandemi	Liputan6.com
51	Corporate Branding PR Award 2021: Bank Buku 4	Iconomics
52	BISRA 2021: Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program	Bisnis Indonesia
53	Bintang 5 Top CSR 2021	TOP CSR 2021
54	Top Leader on CSR Commitment	TOP CSR 2021
55	Emisi Korporasi Terbaik 2021	Beritasatu (Majalah Investor)
56	GATRA Innovation Awards: Inovasi Digital Layanan Kredit dan Pendampingan UMKM	GATRA
57	Best Fintech for Digital CX: Ceria	The Digital Banker
58	Best Use of Data and Analytics for CX: BRI Brain	The Digital Banker
59	3G Best of The Best Award (Microfinance) 2021	Global Good Governance Awards 2021
60	3G Corporate Governance Disclosure Award 2021	Global Good Governance Awards 2022
61	Infobank 10th Digital Brand Awards: BRI Platinum Trophy peringkat 1	Infobank
62	Infobank 10th Digital Brand Awards: KKB BRI Golden Trophy peringkat 1	Infobank
63	Infobank 10th Digital Brand Awards: BRIZZI Golden Trophy peringkat 1	Infobank
64	Infobank 10th Digital Brand Awards: Deposito BRI Best Overall peringkat 2	Infobank
65	Infobank 10th Digital Brand Awards: KPR BRI Best Overall peringkat 3	Infobank
66	Infobank 10th Digital Brand Awards: Tabungan BRItama peringkat 3	Infobank
67	BUMN Marketeers Awards 2021: Best of the Best Company	Markplus.inc
68	BUMN Marketeers Awards 2021: The Most Promising Company in Strategic Marketing	Markplus.inc

No	Penghargaan	Lembaga
69	Private Banking Awards 2021: Best Domestic Private Bank	Asiamoney Award
70	Private Banking Awards 2021: Best for Wealth Transfer/Succession Planning	Asiamoney Award
71	Private Banking Awards 2021: Best for HNW	Asiamoney Award
72	SBBI Award 2021: Merek Terbaik Di Solo (Tabungan Anak)	Solopos
73	SBBI Award 2021: Merek Terbaik Di Solo (Kartu Bayar Digital)	Solopos
74	Banking Service Excellence Award 2021: Overall E-banking Peringkat 2	Infobank
75	Banking Service Excellence Award 2021: Overall Contact Center Peringkat 2	Infobank
76	Banking Service Excellence Award 2021: Overall Digital Channel Peringkat 3	Infobank
77	Banking Service Excellence Award 2021: Best Overall Performance Peringkat 5	Infobank

14.12 Teknologi Informasi

Peralihan fokus bisnis Perseroan pada layanan digital semakin menguatkan fungsi strategis teknologi informasi dan operasional serta perannya secara langsung dalam pelaksanaan inisiatif bisnis Perseroan. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) menjawab kebutuhan usaha dalam dua segi, yakni pelayanan nasabah dan operasional organisasi. Sistem TI yang berkualitas memungkinkan terciptanya interaksi cepat dan nyaman antara nasabah dengan Perseroan, yaitu melalui produk-produk terbaik Bank. Sementara, dari segi operasional, sistem TI mendorong efisiensi dan produktivitas kerja dan biaya. Menyadari nilai penting ini, Perseroan memastikan bahwa sistem TI Perseroan senantiasa sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu dengan melaksanakan penyempurnaan dan pengkinian sistem secara berkala.

Menggunakan teknologi terdepan, Perseroan menempatkan diri sebagai pemain terunggul di industri dengan menyediakan konektivitas terbaik dengan jangkauan luas ke seluruh Indonesia. Untuk itu, Perseroan terus melakukan Pengembangan sistem TI secara sistematis agar TI dapat berkontribusi optimal pada pencapaian kinerja usaha sekaligus mewujudkan Indonesia digital dan memajukan taraf hidup masyarakat secara luas.

Kebijakan teknologi informasi Perseroan didasarkan pada visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi Perseroan, *Roadmap* Pengembangan ke depan serta pedoman dalam *IT Governance*.

Menjawab tantangan, perubahan pasar dan tren digitalisasi yang terjadi dalam industri finansial dan nonfinansial, seperti disrupsi rantai nilai perbankan, tren makro ekonomi yang menantang, perubahan regulasi, serta perubahan preferensi nasabah dan pertumbuhan segmen baru, Perseroan mencanangkan IT Strategy Plan 2018-2022, yang disiapkan guna menciptakan peluang dalam mencapai komitmen digitalisasi.

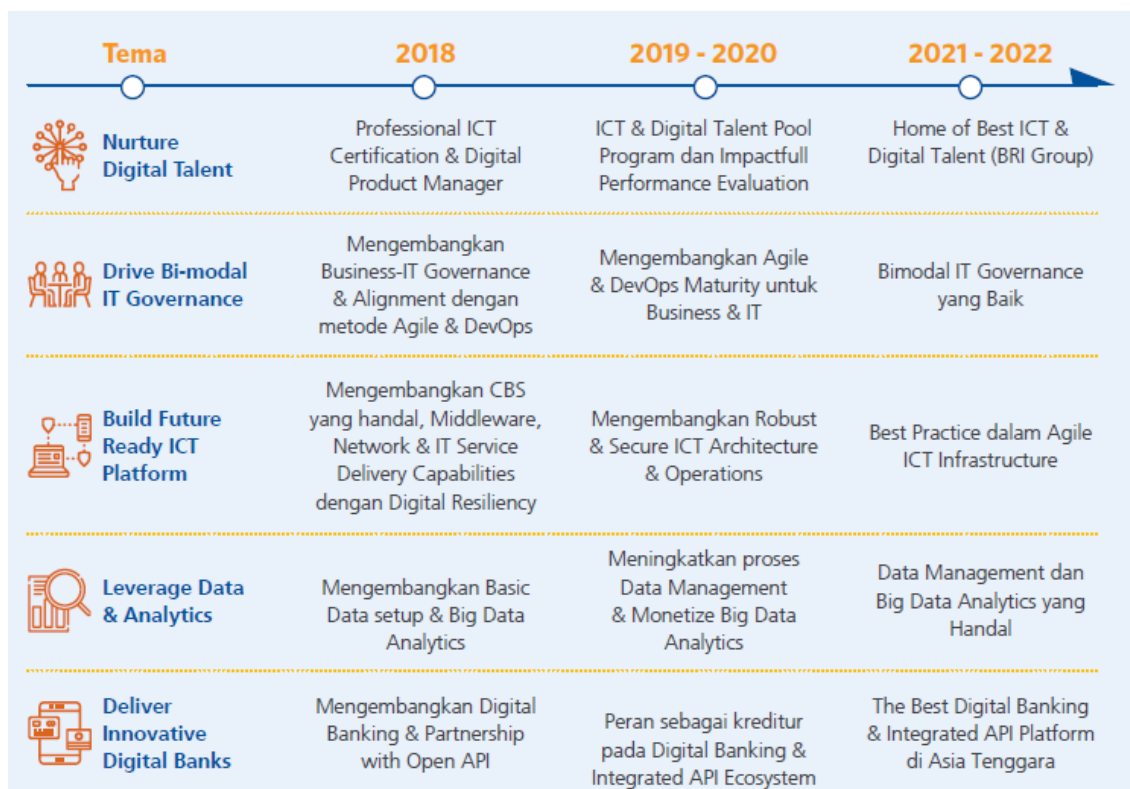
Visi TI Perseroan adalah menjadi penyedia teknologi yang berfokus pada nasabah (*customer centric*) dengan solusi dan layanan yang andal, aman, dan responsif melalui inovasi dan kolaborasi.

Misi TI Perseroan adalah:

1. Mengembangkan talenta digital terbaik dan membangun budaya kerja inovatif.
2. Menerapkan tata kelola TI secara Bi-modal untuk kolaborasi yang lebih cepat dan andal dengan lini bisnis.
3. Membangun *platform* ICT yang bersifat *future ready*, yaitu andal, aman, dan responsif.
4. Mengoptimalkan tata kelola *data & analytics* dalam rangka menyajikan sumber informasi tunggal (*single source of truth*) terkait dengan data nasabah dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat.
5. Menciptakan digital bank yang inovatif yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric solutions and services*).

Dalam merealisasikan visi dan misi TI Perseroan Periode Tahun 2018-2022, arahan *Roadmap* strategis TI (*IT Strategic Directions*) telah ditetapkan dengan disusun berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional yaitu:

1. *Nurture Digital Talent*
2. *Drive Bimodal IT Governance*
3. *Build Future Ready ICT Platform*
4. *Leverage Data & Analytics*
5. *Deliver Innovative Digital Banks*



Perseroan menerapkan kebijakan TI untuk memastikan pengelolaan TI dilakukan dengan berpedoman pada prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang mendukung pengelolaan risiko TI dan tetap memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Tata kelola TI Perseroan mencakup standar yang memberikan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien sehingga mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI.

Proses pengelolaan TI di Perseroan dibagi menjadi dua domain yaitu pengendalian strategis dan pengendalian operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BMUN Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN dan POJK No. 38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Kerjasama Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini mendorong semakin banyaknya para pelaku startup dan *fintech* di Indonesia baik di segmen *financial* maupun *non-financial* yang menghadirkan layanan berbasis *platform digital* kepada perusahaan maupun *end customer*. Potensi pasar Indonesia yang cukup besar ditandai dengan jumlah populasi keempat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia melalui investasi permodalan di *start up* dan *fintech*.

Selain *digital payment* dan *lending* yang telah lebih dulu berkembang di Indonesia, saat ini berkembang *start up* yang mengkhususkan layanannya di beberapa segmen spesifik diantaranya *supply chain non financing*, *invoicing system*, dan *education services*.

Perkembangan di pasar tersebut telah mendorong perbankan untuk terus melakukan perbaikan layanan kepada nasabahnya. Dunia perbankan saat ini memasuki era digital sebagai salah satu pendukung revolusi 4.0, dimana "*Internet of Things (IOT)*" menjadi *crucial touch point* bagi perbankan dalam memberikan servis kepada nasabahnya. Kemajuan teknologi telah mendorong perbankan untuk melangkah ke layanan yang lebih komprehensif bagi nasabahnya melalui penyediaan *platform digital* sebagai *user interface* antara bank dan nasabahnya. Hal tersebut telah mendorong Perseroan sebagai bank di Indonesia yang memiliki basis nasabah terbesar dan terluas untuk terus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan terus berupaya untuk menjangkau layanan keuangan bagi para masyarakat luas melalui 3 kerangka strategi, diantaranya: *digitize core*, *build digital ecosystem*, dan *embed in our customer's life*.

Pencapaian Perseroan di Tahun 2020

1. *Core Digitization*

Implementasi dari BRI *Core Digitization* adalah BRISPOT, BRIMO, Agen BRILink. BRI *Core Digitization* memberikan pengalaman digital ke dalam layanan Perseroan kepada nasabah melalui contoh implementasi:

- Optimalisasi channels BRI
- Digitalisasi Terintegrasi
- Standarisasi sistem dan Simplifikasi

2. *Digital Ecosystem*

Implementasi dari digital ecosystem adalah BRI API, PasarId, BRIMOLA, Junio Smart. *Digital Ecosystem* merupakan kegiatan membangun ekosistem untuk menawarkan produk dan layanan jasa diluar bisnis inti Perseroan:

- Platform digital untuk industri
- Menciptakan Ekosistem untuk menawarkan produk dan layanan yang semakin komprehensif
- Membangun bisnis model baru

3. *New Digital Proposition*

Implementasi BRIBRAIN, *Digital Lending* (CERIA, Traveloka Paylater), Tabungan Digital (BRI *Digital Saving*). Perseroan menciptakan inovasi produk dan layanan digital secara independen dengan mengoptimalkan jaringan kerja dan infrastruktur Perseroan.

- Menciptakan *artificial intelligence* untuk mendukung penciptaan manajemen risiko yang makin baik (*Credit Scoring, Merchant Score, Costumer Profilling Store, Fraud Score*)
- Meningkatkan kapasitas digital produk Perseroan.
- *Enabling cross function system with subsidiaries.*
- Kerjasama dengan perusahaan *fintech*

15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan melalui penerapan *Sustainable Finance* (Keuangan Berkelanjutan) dengan berbasis tiga pilar utama, yaitu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST)/ *Environmental, Social, Governance* (ESG) serta pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam rangka mewujudkan penerapan keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan, serta sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen global dan regulasi nasional yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, BRI melaksanakan berbagai kegiatan yang berlandaskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun dalam melaksanakan berbagai kegiatan keuangan berkelanjutan, Persero telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi yang menjadi pedoman penerapan dan pelaksanaan strategi keberlanjutan oleh seluruh Jajaran di internal BRI antara lain:

1. Surat Keputusan No. Kep: 17 – Dir/DMR/04/2017 Tentang Strategi Implementasi Keberlanjutan (Sustainability) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Surat Keputusan No. Kep: S.05 – Dir/EMP/07/2018 Tentang Kebijakan Keberlanjutan (Sustainability) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Strategi Implementasi Keberlanjutan Perseroan yang diatur dalam kebijakan tersebut di atas, yaitu dengan mengintegrasikan aspek ESG ke dalam kegiatan perbankan, baik di sisi *Asset, Liabilities*, maupun *Operations & Human Capital*. Dari sisi *Asset*, Perseroan fokus menyalurkan kredit kepada aktivitas bisnis yang berkelanjutan, antara lain proyek energi terbarukan (*renewable energies*), transportasi ramah lingkungan, kegiatan UMKM, dan lain sebagainya. Per Maret 2021, BRI memiliki komposisi kredit pada aktivitas bisnis yang berkelanjutan mencapai Rp579,7 triliun atau 64,7% dari total kredit. Selain hal tersebut, Perseroan juga menerapkan proses *Pre-Screening* nasabah dengan memasukkan unsur risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, yaitu antara lain dengan mensyaratkan nasabah kelapa sawit untuk memiliki sertifikat *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan/atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Dari sisi *Liabilities*, pada tahun 2019, Perseroan menjadi bank pertama di ASEAN yang menerbitkan *Sustainability Bond*, dimana seluruh dana yang diperoleh digunakan untuk kegiatan yang berwawasan sosial dan lingkungan. Kemudian dari sisi operasional Persero, inisiatif digital yang dilakukan Perseroan khususnya melalui business process reengineering melalui BRISPOT (*Digital Loan App*), BRIMO (*Mobile Internet Banking*), BRISTARS (*Digital Office*), dan BRISMART (*Digital E-learning*

System) mampu mendukung pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon (pengurangan mobilitas atau perjalanan dinas). Perseroan juga secara aktif menyelenggarakan program-program untuk meningkatkan *awareness* pekerja dan nasabah dalam prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan.

Selain itu, sebagai *Indonesia First Mover on Sustainable Banking*, Perseroan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan inisiatif terkait ESG antara lain:

1. Program *Capacity Building*

Selama tahun 2020 telah dilaksanakan berbagai program *capacity building* dalam bentuk *sharing session*, webinar, maupun pelatihan/training kepada pekerja dan Nasabah BRI, untuk meningkatkan *awareness* serta mengajak pekerja dan nasabah untuk berperan dalam penerapan keuangan berkelanjutan Perseroan.

2. Kampanye Pengurangan Plastik

Pada tahun 2020 dalam rangka pengurangan limbah, melalui konsumsi air minum kemasan plastik, Perseroan melakukan kampanye penggunaan tumbler sebagai tempat air minum yang dapat digunakan berulang. Kampanye tersebut dilakukan melalui media sosial BRI kepada seluruh karyawan.

3. *Community Empowerment*

Pada tahun 2020 dilaksanakan program sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada para pengusaha di Rumah Kreatif BUMN yang bertujuan untuk pemahaman terkait ekonomi dan *green business*.

4. *Mapping* Portofolio Debitur Yang Memiliki Sertifikasi Lingkungan

Pada tahun 2020 dilaksanakan pemetaan terhadap debitur yang telah memiliki sertifikasi lingkungan berupa RSPO, ISPO, Proper, Amdal, dll.

5. Kerjasama Dengan *Merchant* Ramah Lingkungan

Pada tahun 2020 dilaksanakan kerjasama melalui penjualan produk/ barang ramah lingkungan kepada merchant yang memiliki platform digital.

6. Kebijakan *Green Sector*

Pada tahun 2020 BRI telah meluncurkan kebijakan terbaru yang mengatur tentang mapping / klasifikasi produk pinjaman yang termasuk dalam *green* portofolio.

7. Audit Terhadap *Sustainable Product*

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan audit terhadap produk dan jasa BRI yang termasuk dalam kategori *sustainable product*.

8. *Sustainable Finance Award*.

Pada tahun 2020 dilaksanakan pemberian award terhadap unit kerja Kantor Pusat BRI yang memiliki *awareness* dalam menciptakan kepedulian dan implementasi terhadap *sustainable finance*.

9. Penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (*Carbon Footprint*) yang diimplementasikan sejak akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021.

Untuk mengukur dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan, di tahun 2021, Perseroan telah melakukan penghitungan emisi Gas Rumah Kaca dari kegiatan operasional Perseroan, yang meliputi penggunaan kendaraan dinas, penggunaan energi listrik, dan kegiatan perjalanan dinas yang menggunakan kereta api maupun pesawat terbang.

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan merupakan perwujudan dari komitmen Perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perseroan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan maupun masyarakat sekitar. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, wujud kepedulian Perseroan dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam melaksanakan program kepedulian masyarakat, Perseroan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020, tanggal 07 April 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015, tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021, tanggal 08 April 2021, Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- e. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor S.02-KOM/BRI/02/2020 dan S.01-DIR/KPT/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk beserta perubahannya

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Dan Kemasyarakatan

Tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disebut dengan Program BRI Peduli. Tanggung jawab sosial ini merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Program BRI Peduli merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021, tanggal 08 April 2021, Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program TJSL disalurkan dalam bentuk bantuan dan atau kegiatan yang berorientasi pada pilar Program TJSL yaitu Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola dimana keseluruhannya merupakan perwujudan dari konsep *Triple Bottom Line* yaitu konsep 3P (People, Planet, Profit). *People* dalam konsep ini dapat diartikan sebagai kepedulian BRI kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, *Planet* merupakan kepedulian BRI kepada lingkungan hidup, dan *Profit* dapat diartikan sebagai keuntungan finansial dan/atau non finansial yang diharapkan didapat oleh penerima bantuan yang nantinya diharapkan dapat berdampak pada bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, kegiatan BRI Peduli disalurkan dalam 7 (tujuh) sektor bantuan BRI Peduli yaitu:

- 1 Bantuan Bencana Alam dan Non-Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah dikomunikasikan sebagai INDONESIA PEDULI
- 2 Bantuan Pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan dikomunikasikan sebagai INDONESIA CERDAS
- 3 Bantuan peningkatan kesehatan dikomunikasikan sebagai INDONESIA SEHAT
- 4 Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum dikomunikasikan sebagai INDONESIA MEMBANGUN
- 5 Bantuan sarana ibadah dikomunikasikan sebagai INDONESIA TAKWA
- 6 Bantuan pelestarian alam dikomunikasikan sebagai INDONESIA LESTARI
- 7 Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan dikomunikasikan sebagai INDONESIA SEJAHTERA

16. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI yang terdiri dari Merek dan Hak Cipta sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Merek:

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
1	BANK BRI	9	22 Agustus 2011	IDM000409909	22 Agustus 2011
		16		IDM000387246	
		35		IDM000413550	
		36		IDM000413543	
2	LOGO BANK BRI	9	13 November 2011	IDM000332475	13 November 2011
		16	01 Oktober 2011	IDM000332474	01 Oktober 2011
		35	13 November 2011	IDM000332477	13 November 2011
		36		IDM000332476	
3	BRI UNIT	16	22 Agustus 2011	IDM000387242	22 Agustus 2011
		35		IDM000413548	
		36		IDM000413538	
4	TERAS BRI	16	22 Agustus 2011	IDM000387243	22 Agustus 2011
		35		IDM000413552	
		36		IDM000413547	
5	SKK BRI	16	21 Oktober 2011	IDM000396673	21 Oktober 2011
		35		IDM000411876	
		36		IDM000418467	
6	WEEKEND BANKING	16	21 Oktober 2011	IDM000396670	21 Oktober 2011
		35		IDM000418468	
		36			
7	BRI PRIORITAS	16	22 Agustus 2011	IDM000387244	22 Agustus 2011

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
		35		IDM000413551	
		36	30 November 2017	J002017063750	30 November 2017
8	BRIZZI	9	22 Agustus 2011	IDM000413549	22 Agustus 2011
		16			
		35			
		35			
9	SMS BANKING BRI	9	22 Agustus 2011	IDM000409908	22 Agustus 2011
		16		IDM000387235	
		35		IDM000467259	
10	SIMPEDES	16	13 Desember 2011	IDM000334911	13 Desember 2011
		35		IDM000334909	
		36		IDM000334910	
11	SIMPEDES BRI	16	03 Juni 2013	IDM000007465	03 Juni 2013
		36		IDM000007464	
12	BRITAMA	9	28 Januari 2012	IDM000335560	28 Januari 2012
		16		IDM000335559	
		35		IDM000335558	
		36		IDM000335557	
13	MOCASH BRI	9	21 Oktober 2011	IDM000414070	21 Oktober 2011
		16		IDM000396675	
		35		IDM000411879	
		36		IDM000412241	
14	BRITAMA RENCANA	16	21 Oktober 2011	IDM000396831	21 Oktober 2011
		35		IDM000396831	
		36		IDM000418469	
15	DEPOSITO BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416872	31 Oktober 2011
		36		IDM000416301	
16	GIRO BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416283	31 Oktober 2011
		36			
17	TABUNGAN HAJI BRI	36	31 Oktober 2011	IDM000416303	31 Oktober 2011
		35		IDM000416874	
18	KARTU DEBIT BRI	36	31 Oktober 2011	IDM000416292	31 Oktober 2011
19	MOBILE BANKING BRI	9	31 Oktober 2011	IDM000416096	31 Oktober 2011
		36		IDM000416290	
20	MINI ATM BRI	9	31 Oktober 2011	IDM000416099	31 Oktober 2011
		36		IDM000416880	
21	INTERNET BANKING BRI	9	31 Oktober 2011	IDM000416103	31 Oktober 2011
		36		IDM000416306	
22	ATM BRI	9	31 Oktober 2011	IDM000416097	31 Oktober 2011
		36		IDM000416299	
23	E BANKING BRI	9	31 Oktober 2011	IDM000416095	31 Oktober 2011
		35		IDM000416878	
		36		IDM000416307	
24	GIRO INVESTOR BRI	16	28 Juli 2016	D002016035078	28 Juli 2016
		35			
		36			
25	PASAR RAMADHAN SIMPEDES	16	15 Agustus 2016	D002016037942	15 Agustus 2016
		35			
		36			
26	KUR RITEL BRI	16	15 Agustus 2016	D002016037940	15 Agustus 2016
		35			
		36			
27	KUR MIKRO BRI	16	15 Agustus 2016	D002016037935	15 Agustus 2016
		35			
		36			
28	KUR BRI	16	15 Agustus 2016	D002016037934	15 Agustus 2016
		35			
		36			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
29	TABUNGAN BRI SIMPEDES	16	13 Januari 2017	IDM000614627	13 Januari 2017
		35			
		36			
30	GIRO BRI	16	13 Januari 2017	IDM000614626	13 Januari 2017
		35			
		36			
31	KUPEDES	16	13 Desember 2011	IDM000334912	13 Desember 2011
		35		IDM000334914	
		36		IDM000334913	
32	KKB BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416285	31 Oktober 2011
		36		IDM000416295	
33	KMG BRI	35	28 Oktober 2011	IDM000416289	28 Oktober 2011
		36		IDM000416297	
34	KPR BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416284	31 Oktober 2011
		36		IDM000416300	
35	KARTU KREDIT BRI	36	31 Oktober 2011	IDM000416304	31 Oktober 2011
36	KREDIT UMKM BRI	36	31 Oktober 2011	IDM000416302	31 Oktober 2011
37	KUPEDES BRI	16	13 Desember 2011	IDM000396834	13 Desember 2011
		35		IDM000416879	
		36		IDM000416293	
38	KREDIT BRIGUNA BRI	16	28 Juli 2016	D002016035080	28 Juli 2016
		35			
		36			
39	CALL BRI 14017	36	27 Juli 2014	IDM000066554	27 Juli 2014
40	BRILIAN	9	22 Maret 2015	IDM000098310	22 Maret 2015
		16		IDM000098308	
		36		IDM000098309	
41	BRIFAST REMITTANCE	16	21 Oktober 2011	IDM000396672	21 Oktober 2011
		35		IDM000412240	
		36		IDM000418478	
42	BRI PLATINUM	9	21 Oktober 2011	IDM000413756	21 Oktober 2011
		16		IDM000396677	
		35		IDM000417302	
		36		IDM000412239	
43	SPEND2WIN	16	21 Oktober 2011	IDM000396669	21 Oktober 2011
		35		IDM000418477	
44	BRI PEDULI PASAR RAKYAT	16	21 Oktober 2011	IDM000396674	21 Oktober 2011
		35		IDM000418479	
45	BRING	16	21 Oktober 2011	IDM000396676	21 Oktober 2011
		35		IDM000412242	
46	E-BUZZ BRI	35	22 Agustus 2011	IDM000467261	22 Agustus 2011
47	BRI TRADE FINANCE & SERVICE	35	31 Oktober 2011	IDM000416876	31 Oktober 2011
		36		IDM000416291	
48	LAYANAN RAMADHAN BRI	35	31 Oktober 2011	J002011043844	31 Oktober 2011
49	BRI VISION	9	31 Oktober 2011	IDM000416098	31 Oktober 2011
		35		IDM000416868	
50	HUMAN CAPITAL BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416873	31 Oktober 2011
51	MITRA BINAAN BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416867	31 Oktober 2011
52	LAYANAN BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416286	31 Oktober 2011
53	BRI TASTY ZONE	35	31 Oktober 2011	IDM000416875	31 Oktober 2011
54	SDB BRI	36	31 Oktober 2011	IDM000416296	31 Oktober 2011
55	INVESTASI	16	15 November 2016	D002016056188	15 November 2016

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
	RENCANA Pensiun BRI	35			
		36			
56	ZONA BIRU BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416282	31 Oktober 2011
57	GALA EXPO BRI	35	31 Oktober 2011	IDM000416877	31 Oktober 2011
58	BRIVA	16	28 Juli 2016	D002016035081	28 Juli 2016
		35			
		36			
59	AGEN BRILINK	16	28 Juli 2016	D002016035079	28 Juli 2016
		35			
		36			
60	PESTA POIN SIMPEDES	16	15 Agustus 2016	D002016037937	15 Agustus 2016
		35			
		36			
61	PANEN HADIAH SIMPEDES	16	15 Agustus 2016	D002016037936	15 Agustus 2016
		35			
		36			
62	ASURANSI MIKRO KKM	16	31 Agustus 2016	D002016041037	31 Agustus 2016
		35			
		36			
63	LAYANAN RAMADHAN BRI	16	13 Januari 2017	D002017001930	13 Januari 2017
		35			
		36			
64	HADIAH LANGSUNG SIMPEDES	16	13 Januari 2017	D002017001927	13 Januari 2017
		35			
		36			
65	PESTA POIN SIMPEDES	16	13 Januari 2017	D002017001926	13 Januari 2017
		35			
		36			
66	AGEN SINDIKASI BRI	16	15 November 2016	D002016056187	15 November 2016
		35			
		36			
67	WALI AMANAT BRI	16	15 November 2016	D002016056137	15 November 2016
		35			
		36			
68	KUSTODIAN BRI	16	15 November 2016	D002016056135	15 November 2016
		35			
		36			
69	BRI TRUST & CORPORATE SERVICES	16	15 November 2016	D002016056135	15 November 2016
		35			
		36			
70	BRIsat	16	20 September 2017	D002017046803	20 September 2017
		35			
		36			
71	BRI CORPORATE UNIVERSITY	41	22 September 2016	J002016045053	22 September 2016
		16		D002016045069	
		35		J002016045066	
		36		J002016045059	
		16			
		35			
		36			
		16			
35					
74	BritAma Valas	9	1 Maret 2017	IDM000627490	1 Maret 2017
		16			
		35			
		36			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
75	BritAma Bisnis	9	1 Maret 2017	IDM000625996	1 Maret 2017
		16			
		35			
		36			
76	E-Banking BRI	9	20 September 2017	D002017046817	20 September 2017
		16			
		35			
		36			
77	E-Pay BRI	9	20 September 2017	D002017046804	20 September 2017
		16			
		35			
		36			
78	Mocash	9	26 Oktober 2017	D002017055221	26 Oktober 2017
		16			
		35			
		36			
79	BRI Mobile	9	20 September 2017	D002017046825	20 September 2017
		16			
		35			
		36			
80	Tbank	9	20 September 2017	D002017046802	20 September 2017
		16			
		35			
		36			
81	Briguna Mobile	9	26 Oktober 2017	D002017055202	26 Oktober 2017
		16			
		35			
		36			
82	BRILink Mobile	36	7 November 2017	J002017057966	7 November 2017
83	BRI Credit Card Access	36	7 November 2017	J002017057959	7 November 2017
84	BRISHOP ONLINE	35	7 November 2017	J002017057970	7 November 2017
		36			
85	BRI Pay By QR	9	26 Oktober 2017	D00207055201	26 Oktober 2017
		16			
		35			
		36			
86	Internet Banking Bisnis	9	26 Oktober 2017	D002017055203	26 Oktober 2017
		16			
		35			
		36			
87	eWALLET BRI	9	26 Oktober 2017	D002017055211	26 Oktober 2017
		16			
		35			
		36			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
88	KUR TKI BRI	36	7 November 2017	J002017057931	7 November 2017
89	KREDIT PANGAN BRI	36	7 November 2017	J002017057943	7 November 2017
90	KKPE BRI	36	7 November 2017	J002017057933	7 November 2017
91	SKK BRI	16	6 September 2017	D002017042680	6 September 2017
		35			
		36			
92	BRI Lounge	36	7 November 2017	J002017057938	7 November 2017
93	BRI Transfer Lounge	36	7 November 2017	J002017057937	7 November 2017
94	Priority Lounge	16	26 Oktober 2017	D002017055206	26 Oktober 2017
		35			
		36			
95	BRI e-Banking Lounge	36	7 November 2017	J00201705740	7 November 2017
96	Teras BRI Keliling	16	1 Maret 2017	IDM000627484	1 Maret 2017
		35			
		36			
97	Teras BRI Kapal	16	1 Maret 2017	IDM000625995	1 Maret 2017
		35			
		36			
98	Galeri e-Banking	36	7 November 2017	J002017057946	7 November 2017
99	Teras Digital BRI	16	6 September 2017	J002017042628	6 September 2017
		35			
		36			
100	BRI Digital	16	6 September 2017	J002017042692	6 September 2017
		35			
		36			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
		16			
		35			
		36			
102	e-recruitmentBRI	36	7 November 2017	J002017057948	7 November 2017
103	BRI SQ 1	36	7 November 2017	J002017057955	7 November 2017
104	e-Form BRI	36	7 November 2017	J002017057935	7 November 2017
105	Contact BRI	16	26 Oktober 2017	D02017055217	26 Oktober 2017
		35			
		36			
106	BRI Cash Pick Up	36	7 November 2017	J002017057953	7 November 2017
107	CMS BRI	16	30 November 2017	D002017063758	30 November 2017
		35			
		36			
108	BRI Trade Finance Online	36	7 November 2017	J002017057950	7 November 2017
109	BRI Money Changer	36	30 November 2017	J002017063752	30 November 2017
110	BRI Money Changer Machine	36	30 November 2017	J002017063754	30 November 2017
111	BRI Trade Finance Online	36	30 November 2017	J002017063756	30 November 2017
112	BRIe-fx	36	30 November 2017	J002017063757	30 November 2017

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
113	Dobel Untung BritAma	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055205	26 Oktober 2017
114	Zona Asyik Kartu BRI	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055198	26 Oktober 2017
115	BritAmaX	16 35 36	30 November 2017	D002017063751	30 November 2017
116	Teras Usaha BRI	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055200	26 Oktober 2017
117	BRI Peduli Pasar Rakyat	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055208	26 Oktober 2017
118	BRI Peduli	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055207	26 Oktober 2017
119	Teras Edukasi BRI Perbankan	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055204	26 Oktober 2017
120	Untung Ber-eBanking BRI	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055220	26 Oktober 2017
121	BRI Sunday Fest	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055225	26 Oktober 2017
122	BRI Point	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055226	26 Oktober 2017
123	e-Pasar BRI	16 35 36	6 September 2017	J002017042630	6 September 2017
124	Zero on 25	35 36	30 November 2017	J002017063753	30 November 2017
125	UMKM Digital Evolution	36	30 November 2017	J002017063755	30 November 2017
126	BRIPOIN	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055209	26 Oktober 2017
127	BRI POIN KEREN TERUS	16 35 36	26 Oktober 2017	D002017055214	26 Oktober 2017
128	BRITAMA VALAS RENCANA	16 35 36	26 November 2018	D002018061283	26 November 2018
129	BRI Easy Card	16 35 36	26 November 2018	D002018061285	26 November 2018

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
130	Debit BRI	16	26 November 2018	D002018061287	26 November 2018
		35			
		36			
131	BRI SPOT	16	26 November 2018	D002018061290	26 November 2018
		35			
		36			
132	Parade UMKM BRI (Kreatif, Digital, Wirausaha)	16	26 November 2018	D002018061281	26 November 2018
		35			
		36			
133	BRI API	16	26 November 2018	D002018061279	26 November 2018
		35			
		36			
134	BRI Credit Card Mobile	16	26 November 2018	D002018061278	26 November 2018
		35			
		36			
135	Untung Beliung Britama	16	26 November 2018	D002018061277	26 November 2018
		35			
		36			
136	BRI Innovation Center (Bring The Future)	16	21 November 2018	D002018060474	21 November 2018
		35			
		36			
137	Wirausaha Brilian	16	21 November 2018	D002018060478	21 November 2018
		35			
		36			
138	BRI Touch	16	21 November 2018	D002018060482	21 November 2018
		35			
		36			
139	KUR KECIL BRI	16	21 November 2018	D002018060481	21 November 2018
		35			
		36			
140	BRI Solutions	16	21 November 2018	D002018060475	21 November 2018
		35			
		36			
141	BRI Green Banking	16	21 November 2018	D002018060472	21 November 2018
		35			
		36			
142	Info Lelang BRI	16	21 November 2018	D002018060476	21 November 2018
		35			
		36			
143	Debit Online BRI	16	21 November 2018	D002018060484	21 November 2018
		35			
		36			
144	Sabrina	16	26 Maret 2018	D002018014636	26 Maret 2018
		35			
		36			
145	Indonesia Mall	16	15 Oktober 2018	D002018052361	15 Oktober 2018
		35			
		36			
146	Logo BRI Mobile Apps	16	18 Maret 2019	D002019013649	18 Maret 2019
		35			
		36			
147	Junio Smart	16	18 Maret 2019	D002019013647	18 Maret 2019
		35			
		36			
148	BRI World Access	16	18 April 2019	D002019020290	18 April 2019
		35			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
		36			
149	Forgotten Kingdom (The Legend Of Junio Islands)	16	18 April 2019	D002019020306	18 April 2019
		35			
		36			
		36			
150	Halal Mall	16	7 Mei 2019	D002019023411	7 Mei 2019
		35			
		36			
151	Bank BRI + Logo	16	18 April 2019	D002019020310	18 April 2019
		35	31 Desember 2019	DID2019081448	31 Desember 2019
		9			
		36			
152	BRIFine	16	18 April 2019	D002019020302	18 April 2019
		35			
		36			
153	EDC BRI	16	18 April 2019	D002019020295	18 April 2019
		35			
		36			
154	BRION	16	18 Maret 2019	D002019013652	18 Maret 2019
		35			
		36			
155	Ceria	16	18 Maret 2019	D002019013651	18 Maret 2019
		35			
		36			
156	Semarak Simpedes Eksis	16	18 Maret 2019	D002019013650	18 Maret 2019
		35			
		36			
157	BRISTORE	16,35,36	28 November 2019	DID2019072990	28 November 2019
158	BRI Smart Billing	16,35,36	5 Desember 2019	DID2019075021	5 Desember 2019
159	Brispot	16,35,36	5 Desember 2019	DID2019074867	5 Desember 2019
160	Teman Simpedes	16,35,36	28 Januari 2019	D002019004707	28 Januari 2019
161	Mudik Bersama Simpedes & Kupedes BRI	16,35,36	29 November 2019	DID2019073329	29 November 2019
162	Tabungan BRI Junio	16,35,36	29 November 2019	DID2019073589	29 November 2019
163	"TERRASSE"	16,35,36	31 Desember 2019	DID2019081476	31 Desember 2019
164	BRI Private	16,35,36	6 Desember 2019	DID2019075408	6 Desember 2019
165	BRI Prioritas	16, 35, 36	29 November 2019	DID2019073344	29 November 2019
166	Panen Hadiah Simpedes	16,35,36	2 Januari 2020	DID2020000075	2 Januari 2020
167	Pesta Rakyat Simpedes	16,35,36	2 Januari 2020	DID2020000057	2 Januari 2020
168	BRI Ventures	16	18 Maret 2019	D00201920289	18 Maret 2019
		35			
		36			
169	UMKM BRI	16	28 Agustus 2020	DID2020049077	28 Agustus 2020
		35			
		36			
170	Tabungan BRI Simpedes	16	28 Agustus 2020	DID2020049055	28 Agustus 2020
		35			
		36			
171	Stroberi Tagihan	16	28 Agustus 2020	DID2020049098	28 Agustus 2020
		35			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
		36			
172	Stroberi Order	16	28 Agustus 2020	DID2020049092	28 Agustus 2020
		35			
		36			
173	pasar.id	16	28 Agustus 2020	DID2020049053	28 Agustus 2020
		35			
		36			
174	Stroberi Kasir	16	28 Agustus 2020	DID2020049096	28 Agustus 2020
		35			
		36			
175	BRITAMA FSTVL	16	28 Agustus 2020	DID2020049074	28 Agustus 2020
		35			
		36			
176	Simpedes Hadiah Langsung	16	28 Agustus 2020	DID2020049065	28 Agustus 2020
		35			
		36			
177	Tabungan BRI Simpedes	16	28 Agustus 2020	DID2020049055	28 Agustus 2020
		35			
		36			
178	BRISPOT KONSUMER	16	28 Agustus 2020	DID2020049102	28 Agustus 2020
		35			
		36			
179	BRIWORK	16	28 Agustus 2020	DID2020049075	28 Agustus 2020
		35			
		36			
180	BRISPOT MIKRO & RITEL	16	28 Agustus 2020	DID2020049103	28 Agustus 2020
		35			
		36			
181	BRI BUKA REKENING	16	28 Agustus 2020	DID2020049069	28 Agustus 2020
		35			
		36			
182	BRI Ecopay	35	2 Maret 2021	DID2021019958	2 Maret 2021
		36			
183	UMKM Smart	16	2 Maret 2021	DID2021019961	2 Maret 2021
		35			
		36			
184	Tabungan BRI Simpedes Serba Bisa	16	2 Maret 2021	DID2021019965	2 Maret 2021
		35			
		36			
185	Klasterku Hidupku	16	2 Maret 2021	DID2021019970	2 Maret 2021
		35			
		36			
186	Desa BRILian	16	2 Maret 2021	DID2021019974	2 Maret 2021
		35			
		36			
187	Link UMKM	16	2 Maret 2021	DID2021019977	2 Maret 2021
		35			
		36			
188	BRILink Xpress	16	2 Maret 2021	DID2021019981	2 Maret 2021
		35			
		36			
189	BRI paylater	16	2 Maret 2021	DID2021024684	2 Maret 2021
		35			
		36			
190	BRIGuna	16	2 Maret 2021	DID2021024688	2 Maret 2021
		35			
		36			

No	Etiket Merek	Kategori Kelas Barang/Jasa	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Berlaku Selama 10 Tahun Sejak Tanggal:
191	BRI Bisa	16	2 Maret 2021	DID2021024697	2 Maret 2021
		35			
		36			
192	Bisa: Peduli	16	2 Maret 2021	DID2021024699	2 Maret 2021
		35			
		36			
193	Bisa: Lestari	16	2 Maret 2021	DID2021024704	2 Maret 2021
		35			
		36			
194	Bisa: Inovasi	16	2 Maret 2021	DID2021024708	2 Maret 2021
		35			
		36			
195	Bisa: Dedikasi	16	2 Maret 2021	DID2021024711	2 Maret 2021
		35			
		36			
196	BRIncubator	16	8 Januari 2021	DID2021001850	8 Januari 2021
		35			
		36			
197	BRI + Logogram	9	11 Desember 2020	DID2020079952	11 Desember 2020
		16			
		35			
		36			
198	BRI Melayani Dengan Setulus Hati	9	11 Desember 2020	DID2020079953	11 Desember 2020
		16			
		35			
		36			
199	BRI Melayani Dengan Setulus Hati + Logogram	9	11 Desember 2020	DID2020079954	11 Desember 2020
		16			
		25			
		36			
200	BRI + Logogram	9	11 Desember 2020	DID2020079956	11 Desember 2020
		16			
		25			
		36			
201	BRI Melayani Dengan Setulus Hati	9	11 Desember 2020	DID2020079957	11 Desember 2020
		16			
		25			
		36			
202	BRI + Logogram	9	11 Desember 2020	DID2020079958	11 Desember 2020
		16			
		25			
		36			
203	BRI Melayani Dengan Setulus Hati + Logogram	9	11 Desember 2020	DID2020079959	11 Desember 2020
		16			
		25			
		36			
204	Desa BRllian = suatu penamaan	9	8 Desember 2020	DID2020078031	8 Desember 2020
		16			
		25			
		36			
205	BRI + Logogram	9	30 November 2020	DID2020079960	30 November 2020
		16			
		25			
		36			
206	INTAN (INDONESIA TANI)	35	20 April 2021	JID2021027816	20 April 2021
		36			
		44			

Hak Cipta:

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Pendaftaran/ No. Pencatatan	Pemegang Hak Cipta	Tanggal Pengumuman Pertama Kali	Berlaku Selama 50 Tahun Sejak Tanggal:
1.	"Teman Simpedes"	Booklet	000137715	Perseroan	17-12-2018	17-12-2018
2.	"MASKOT DAN MOTO BUDAYA KERJA PT. BRI (PERSERO)"	Seni Lukis	022921	Perseroan	20-09-2001	20-09-2001
3.	"Modul Pelatihan - MODUL 1 MANAJEMEN"	Buku	036055	Perseroan	24-09-2004	24-09-2004
4.	"Modul Pelatihan - MODUL 2 PERKREDITAN"	Buku	036052	Perseroan	24-09-2006	24-09-2006
5.	"Modul Pelatihan - MODUL 3 SIMPANAN"	Buku	036054	Perseroan	24-09-2004	24-09-2004
6.	"Modul Pelatihan - MODUL 4 ASPEK HUKUM"	Buku	036051	Perseroan	24-09-2006	24-09-2006
7.	"Modul Pelatihan - MODUL 5 PENGELOLAAN KAS"	Buku	036053	Perseroan	24-09-2004	24-09-2004
8.	"Modul Pelatihan - MODUL 6 ADMINISTRASI PEMBUKUAN"	Buku	036049	Perseroan	24-09-2004	24-09-2004
9.	"Modul Pelatihan - MODUL 7 PENGAWASAN"	Buku	036050	Perseroan	24-09-2004	24-09-2004
10.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS AGRIBISNIS KAKAO"	Buku	044388	Perseroan	05-08-2007	05-08-2007
11.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS JASA PELAYANAN KESEHATAN"	Buku	048540	Perseroan	05-08-2007	05-08-2007
12.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS JASA PERHOTELAN"	Buku	044390	Perseroan	05-08-2007	05-08-2007
13.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS PENGEMBANGKONSTRUKSI"	Buku	044386	Perseroan	05-08-2007	05-08-2007
14.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS PUSAT PERBELANJAAN"	Buku	044389	Perseroan	05-08-2007	05-08-2007
15.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS SPBU"	Buku	044387	Perseroan	05-08-2007	05-08-2007
16.	"MODUL TRAINING PROFIL BISNIS WARALABA (FRANCHISE)"	Buku	048539	Perseroan	13-07-2007	13-07-2007
17.	"Jingle Simpedes"	Lagu	000138414	Perseroan	01-10-2017	01-10-2017
18.	"Aplikasi Skoring UMKM Naik Kelas"	Aplikasi	000168108	Perseroan	04-12-2019	04-12-2019

17. Riset dan Pengembangan

Demi perkembangan perusahaan ke depan, Perseroan senantiasa melakukan kegiatan riset dan pengembangan baik di lingkup *corporate* maupun produk dan jasa. Dalam organisasi Perseroan terdapat fungsi *Corporate Research & Economic* sebagai bagian inheren di masing-masing Unit Kerja Pemilik Produk/*Activity* dan Kantor Wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kajian *macro economic analysis*, potensi bisnis wilayah, *industry & peers competition*, *demography analysis*, efisiensi proses bisnis, pengembangan produk & layanan (*customer behavior*, *product prototyping*, *product evaluation*), kajian *brand health tracking*, *marketing research* serta fungsi sebagai Sekretaris Komite Produk. Kegiatan riset yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga (konsultan, universitas, BUMN, maupun lembaga pemerintah). Pelaksanaan riset di Perseroan bertujuan untuk memberikan *value added* kepada seluruh *stakeholders* dan menjaga daya saing grup BRI agar tetap menghasilkan kinerja ekzellen yang tumbuh secara *sustainable*.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini memperlihatkan total ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (KAP PSS) dengan opini wajar tanpa modifikasian serta periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang telah direviu oleh KAP PSS, auditor independen, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 22 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1681) dan Danil Setiadi Handaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1008).

Pada tanggal 31 Maret 2021, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp194.764.286 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 Maret 2021
EKUITAS	
Modal saham	6.167.291
Tambahan modal disetor	3.981.135
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.018.966
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(49.087)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.501.059
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	964.411
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual -bersih	-
(Kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(452.254)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(1.644.317)
Opsi Saham	79.486
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.532.631
Dampak transaksi pengendalian non pengendali	1.758.580
Saldo laba	
- Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685
- Belum ditentukan penggunaannya	157.742.954
Total saldo laba	160.765.639
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	191.623.540
Kepentingan non-pengendali	3.140.746
TOTAL EKUITAS	194.764.286

Setelah tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Perseroan melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya sebesar 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 31 Maret 2021, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp3.400,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah PMHMETD I
Modal saham - nilai nominal per saham Rp50 (rupiah penuh) per lembar saham	6.167.291	1.410.660	7.577.951
Modal dasar – 300.000.000.000 lembar			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2021	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 jika PMHMETD I terjadi pada tanggal tersebut dengan harga pelaksanaan Rp3.400,- per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 setelah PMHMETD I
saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 123.345.810.000 lembar saham			
Tambahan modal disetor - bersih	3.981.135	95.837.606	99.818.741
Tambahan modal disetor	-	95.924.851	95.924.851
Beban emisi PMHMETD I	-	(87.245)	(87.245)
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.018.966		17.018.966
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(49.087)		(49.087)
Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasikan atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.501.059		1.501.059
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	964.411		964.411
(Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(452.254)		(452.254)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(1.644.317)		(1.644.317)
Opsi saham	79.486		79.486
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.532.631		1.532.631
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	1.758.580		1.758.580
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685		3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	157.742.954		157.742.954
Total saldo laba	160.765.639		160.765.639
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	191.623.540	97.248.266	288,871,806
Kepentingan non-pengendali	3.140.746		
TOTAL EKUITAS	194.764.286	97.248.266	292.012.552

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Seri B dari Saham Lama, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan dan (2) Perseroan memiliki saldo laba yang positif.

Berdasarkan UUPT dan anggaran dasar Perseroan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non WNI akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk pemegang saham non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya, dapat dilihat pada Bab XII mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

Dalam memutuskan pemberian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, Perseroan memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis kedepan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan *sustainability* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun kedepan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Perseroan kepada pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Secara historis, Perseroan membagikan dividen dengan kisaran 20% - 75% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan pemberian dividen ini akan tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Sejak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan November 2003, Perseroan telah melakukan pembagian dividen sebanyak 18 kali, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Dividen (Rp Miliar)	Rasio Pembayaran Dividen (%)	Dividen Per Saham*	Tanggal Pembayaran
2004	990	75	8,42	23 Juli 2004
2005	1.816	50	15,29	5 Juli 2005
2006	1.904	50	15,62	10 Juli 2006
2007	2.129	50	17,30	2 Juli 2007
2008	2.419	50	19,63	7 Juli 2008
2009	2.085	35	16,92	3 Juli 2009
2010	2.192	30	13,21	15 Juli 2010
2011	2.294	20	14,01	15 Juni 2011
2012	3.017	20	24,46	15 Mei 2012
2013	5.556	30	45,05	15 April 2013
2014	6.348	30	51,47	14 Mei 2014
2015	7.272	30	58,96	22 April 2015
2016	7.619	40	62,33	22 April 2016
2017	10.478	40	82,72	13 April 2017
2018	13.048	45	106,75	4 April 2018
2019	16.176	50	132,17	13 Juni 2019
2020	20.264	60	168,11	18 Maret 2020
2021	12.125	65	98,90	28 April 2021

* Seluruh angka dividen telah disesuaikan dengan *stock split* 1:2 pada Januari 2011 dan 1:5 pada November 2017

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (EY)**

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp: (021) 5289 5000
Fax: (021) 52894100

Nama Partner : Christophorus Alvin Kossim
No. STTD : STTD.AP-31/PM.223/2020
Keanggotaan Asosiasi : AP.1681
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 734 P-PLO/IGP/PTS/04/2021 tanggal 22 April 2021.

Tugas Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, Level 36, 37, dan 38
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No. STTD : STTD.KH-130/PM.2/2018 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200101
Pedoman Kerja : Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B.748 P-PLO/IGT/PTS/04/2021 tanggal 22 April 2021.

Tugas Pokok:

Melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Kantor Notaris Fathiah Helmi S.H.**
Graha Irama
Jl. H. R. Rasuna Said No.6, RT.6/RW.4,
Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710
Tel: (021) 52907304

No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B.745 P-PLO/IGP/PTS/04/2021 tanggal 22 April 2021.

Tugas pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

Biro Administrasi Efek (BAE) : **PT Datindo Entrycom**
Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120
(021) 3508077

No. STTD : Kep 16/PM/1991
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B.810 P-PLO/IGP/PTS/05/2021 tanggal 04 Mei 2021.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham.

Kantor Jasa Penilai Publik : **KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan**
Rasuna Office Park Unit WO 01-02
Komplek Perkantoran Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said, Kuningan
(021) 83708026

Nama Partner : Ocky Rinaldi
No. STTD : STTD.PPB-05/PM.2/2018
Tanggal STTD : 4 Juni 2018
Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia ("SPI") dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI")

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B.746 P-PLO/IGP/PTS/04/2021 tanggal 22 April 2021.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi pada UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Datindo Entrycom sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD I:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Lama berhak atas 230.128.553 (dua ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400,- (tiga ribu empat ratus Rupiah). Seluruh pemegang saham berhak atas HMETD sesuai dengan porsi kepemilikannya. Untuk menghindari keragu-ruguan, pemegang saham Perseroan yang memiliki saham kurang dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham tetap mendapatkan HMETD yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham Perseroan dibagi dengan rasio HMETD tersebut.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19), proses dan mekanisme pemesanan tidak dilaksanakan melalui pertemuan langsung. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengiriman.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 September 2021 pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pencatatan pemegang saham dalam DPS Perseroan yaitu sebelum tanggal 9 September 2021.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 September 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak di masukan ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 10 September 2021 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta HMETD nya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- ii. Satu hari Bursa setelah *recording date* BAE menerima instruksi deposit HMETD dari KSEI ke rekening-rekening KSEI dan rekening Perseroan untuk sisa dari hasil perhitungan pembulatan ke bawah HMETD yang dilakukan KSEI sesuai dengan persetujuan tertulis dari Direksi Perseroan.
- iii. Pada hari yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan tersebut dan KSEI akan langsung mendebet *account/subaccount* tersebut dan memasukan dananya ke rekening KSEI di Bank yang digunakannya.
- iv. Pada hari bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- v. Pada hari yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya;
 - b. BAE akan melakukan rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan Perseroan dengan data atau daftar pelaksanaan HMETD yang diberikan oleh KSEI;
 - c. BAE akan memberikan laporan kepada Perseroan atas hasil pelaksanaan HMETD.
- vi. Selambat-lambatnya 2 hari bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-Best dan setelah KSEI melakukan pendistribusian saham KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi kepada Perseroan/Biro Administrasi Efek.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
2. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - a. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - b. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - d. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
 - ii. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
 - iii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good fund*) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

3. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir pelaksanaan HMETD yaitu tanggal 22 September 2021.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian-nya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2021 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 27 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- B. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

5. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Jakarta KCK
No. Rekening: 0206-01-011086-30-4
Atas Nama: PT. BANK RAKYAT INDONESIA QQ CDS DIVISION
Nama Pendek: PT. BANK RAKYAT INDO

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 24 September 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

7. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD antara lain:

- A. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- B. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- C. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

8. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 29 September 2021 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 29 September 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli pemesan atau tanda bukti jati diri asli lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Bukti Pemesanan Pembelian Saham serta menyerahkan fotokopi KTP tersebut. Pemesanan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bilamana pemesan berhalangan mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa serta menunjukkan KTP asli pemberi dan penerima kuasa tersebut. Apabila pengembalian uang pemesanan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer, Perseroan akan memindahkan uang tersebut ke rekening atas nama pemesan langsung sehingga pemesan tidak akan dikenakan biaya bank atau biaya pemindahbukuan/transfer tersebut.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

9. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 15 September 2021 hingga 24 September 2021. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- A. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- B. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;

- C. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- D. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

10. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Jika masih terdapat sisa saham setelah dilakukan alokasi terhadap pemesanan tambahan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yaitu tanggal 10 September 2021. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 10 September 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No.28, RT.14/RW.1,
Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta 10120
(021) 3508077

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 9 September 2021 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI I
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Tel: (62-21) 251-0244
Faks: (62-21) 250-0065
E-mail: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id

Investor Relation

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210
Tel: (62-21) 575-2019, (62-21) 575-2010
E-mail: ir@bri.co.id
Website: www.ir-bri.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN – PEKEMBANGAN TERKINI

Laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang tidak diaudit pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK, disajikan dalam Rupiah dan termasuk dalam dokumen ini, telah ditelaah oleh PSS (anggota Ernst & Young Global Limited), Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan Standar Perikatan Reviu 2410, "Tinjauan Informasi Keuangan Interim yang Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik" ("SRE 2410"), ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana dinyatakan dalam laporan tinjauan mereka yang disertakan di tempat lain dalam dokumen ini. Tinjauan atas informasi keuangan interim yang dilakukan sesuai dengan SRE 2410 yang ditetapkan oleh IAPI secara substansial lebih kecil cakupannya daripada audit yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam laporan tinjauan IAPI yang muncul di bagian lain dokumen ini, PSS (anggota Ernst & Young Global Limited), Kantor Akuntan Publik, tidak mengaudit dan tidak menyatakan pendapat apa pun atas informasi keuangan konsolidasi interim Perseroan yang tidak diaudit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yang disertakan di bagian lain dokumen ini.

Hasil Usaha

	Untuk 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni	
	2020	2021
	(Rp jutaan)	
Pendapatan Bunga dan Syariah – bersih	36.502.449	47.142.996
Pendapatan premi bersih	583.488	585.215
Pendapatan operasional lainnya	13.736.478	16.641.381
Penyisihan bersih kerugian atas aset keuangan, komitmen dan kontinjensi, dan aset non-keuangan	(9.891.738)	(21.791.972)
Beban operasional lainnya	(25.417.610)	(26.207.927)
Pendapatan Operasional	15.513.067	16.369.693
Pendapatan non-operasional, bersih	26.376	9.834
Beban pajak	(5.338.401)	(3.839.691)
Laba periode berjalan	10.201.042	12.539.836

Berikut adalah pembahasan dan analisis aspek-aspek utama dari hasil usaha Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Pendapatan Bunga dan Syariah – bersih

Dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan mencatatkan pendapatan bunga dan syariah – bersih sebesar Rp47.142.996 juta, meningkat Rp10.640.547 juta atau 29,15% dibandingkan pendapatan bunga dan syariah-bersih untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar Rp36.502.449 juta. Peningkatan ini didorong oleh pendapatan bunga pada 30 Juni 2021 sebesar Rp59.873.940 juta atau naik sebesar Rp3.295.638 juta atau 5,82% dibandingkan posisi 30 Juni 2020 sebesar Rp56.578.302 juta. Peningkatan pendapatan bunga ini didorong oleh penyaluran kredit ke segmen UMKM khususnya mikro terutama disumbangkan oleh produk KUR, dimana dalam kondisi pandemi, KUR menjadi salah satu alternatif penyaluran kredit dengan suku bunga bersaing dan dengan risiko yang terukur.

Peningkatan pendapatan bunga dan syariah-bersih juga didorong oleh penurunan beban bunga dan syariah. Pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatat beban bunga dan syariah sebesar Rp12.730.944 juta, turun sebesar Rp7.344.909 juta atau 36,59% dibandingkan beban bunga untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp20.075.853 juta. Tren tersebut sejalan dengan penurunan BI 7 Days Reverse Repo dimana Perseroan melakukan review terhadap suku bunga yang berlaku, selain itu penurunan biaya bunga dan syariah juga dikontribusikan oleh peningkatan komposisi CASA menjadi 59,56% atau naik 375 bps dibandingkan posisi 30 Juni 2020 sebesar 55,81%. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam melakukan efisiensi biaya di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Pendapatan Premi Bersih

Pendapatan premi bersih Perseroan meningkat 0,3% menjadi Rp585.215 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp583.488 juta pada enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 terutama karena peningkatan pendapatan premi sebesar 11,9%.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya meningkat 21,1% menjadi Rp16.641.381 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp13.736.478 juta pada enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama didorong oleh transaksi-transaksi *treasury*, sebagai keuntungan substansial terkait dengan membaiknya situasi ekonomi yang disebabkan oleh provisi dan komisi meningkat sebesar Rp710.386 juta, penjualan surat-surat berharga dan obligasi rekapitalisasi pemerintah meningkat sebesar Rp851.332 juta, keuntungan selisih kurs meningkat sebesar Rp625.911 juta dan pemulihan aset yang dihapusbukukan meningkat sebesar Rp1.362.389 juta.

Penyisihan bersih kerugian atas aset keuangan, komitmen dan kontinjensi, dan aset non-keuangan

Penyisihan bersih Perseroan untuk kemungkinan kerugian atas aset keuangan, komitmen dan kontinjensi, dan aset non-keuangan meningkat 54,6% menjadi Rp21.791.972 juta dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari sebelumnya Rp9.891.738 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana hal ini disebabkan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan serta penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi Perseroan meningkat secara substansial. Hal ini didorong oleh ketidakpastian ekonomi dari pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan provisi.

Beban Operasional Lainnya

Perseroan mencatatkan beban operasional lainnya meningkat sebesar 3,1% menjadi Rp26.207.927 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp25.417.610 juta pada enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar 2,0% beban gaji dan kenaikan 1,7% biaya umum dan administrasi.

Laba Operasional

Sebagai akibat hal tersebut di atas, untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatat laba operasional sebesar Rp16.369.693 juta, meningkat sebesar Rp856.626 juta atau 5,52% dibandingkan dengan laba operasional untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp15.513.067 juta.

Beban Pajak

Dalam enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021, Perseroan mencatat beban pajak penghasilan sebesar Rp3.839.691 juta, menurun sebesar 28,1% dari sebelumnya Rp5.338.407 juta yang tercatat dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Tarif pajak efektif Perseroan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 23,44%, turun dari 34,35% untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020 karena penurunan penghasilan kena pajak.

Pendapatan Periode Berjalan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, pendapatan periode berjalan Perseroan meningkat 22,9% menjadi Rp12.539.836 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari Rp10.021.042 juta dalam enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

**LAMPIRAN – LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM TANGGAL 30
JUNI 2021**

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
 Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279
 Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBRI
 Telex: 65293, 65456, 65459, 65461

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
 TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
 DAN UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN
 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sunarso
 Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Alamat Domisili : Jl. At Taqwa II No. 4 Jati Pulo, Palmerah, Jakarta barat
 Nomor Telepon : 021 - 575 1761
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
 Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Alamat Domisili : Jl. Bumi Serpong Damai Blok L. 10/3 Serpong, Tangerang Selatan
 Nomor Telepon : 021 - 575 1751
 Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Agustus 2021
 Atas nama dan mewakili Direksi

Sunarso
 Direktur Utama

Viviana Dyah Ayu R.K.
 Direktur Keuangan

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Laporan No. 00510/2.1032/JL.0/07/1681-2/1/VIII/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Pendahuluan

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 Juni 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR 2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim (lanjutan)

Laporan No. 00510/2.1032/JL.0/07/1681-2/1/VIII/2021 (lanjutan)

Hal-hal lain

Reviu kami atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 30 Juni 2021, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan interim BRI (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur reviu yang diterapkan dalam reviu atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa Informasi Keuangan Entitas Induk tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus Indonesia dan dokumen penawaran internasional sehubungan dengan rencana penawaran efek ekuitas BRI dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu masing-masing untuk: (a) di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan (b) di luar Indonesia di mana efek ekuitas akan ditawarkan kepada: (i) pemegang saham BRI yang berada di Amerika Serikat atau merupakan *US Person* (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Regulation S* dari *United States Securities Act of 1933* ("*Securities Act*")) dan merupakan *Qualified Institutional Buyer* (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Rule 144A* dari *Securities Act*), dan (ii) *non-US Person* (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Regulation S* dari *Securities Act*) dan berlokasi di luar Amerika Serikat, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

30 Agustus 2021

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
ASET			
Kas	2a,2c,3	17.803.670	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	38.839.485	51.530.969
Giro pada Bank lain	2a,2c,2d, 2e,2f,5,44	15.427.232	9.154.378
Cadangan kerugian penurunan nilai		(94.098)	(93.843)
		15.333.134	9.060.535
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	2a,2c,2d, 2e,2g,6,44	95.740.914	66.539.685
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.312)	(18.070)
		95.731.602	66.521.615
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h,7,44	301.994.624	327.615.655
Cadangan kerugian penurunan nilai		(856.335)	(348.941)
		301.138.289	327.266.714
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	2c,2d,2e, 2i,8,44	27.084.231	27.573.004
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.290.798)	(1.326.190)
		25.793.433	26.246.814
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2u, 9	17.169.560	46.818.568
Tagihan Derivatif	2c,2aj,10	620.356	1.576.659
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,11,44	929.402.463	899.458.207
Cadangan kerugian penurunan nilai		(78.132.193)	(65.165.002)
		851.270.270	834.293.205

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
ASET (lanjutan)			
Piutang dan Pembiayaan Syariah	2c,2d,2e, 2k,12,44	-	38.915.673
Cadangan kerugian penurunan nilai		-	(1.449.489)
		<u>-</u>	<u>37.466.184</u>
Piutang Sewa Pembiayaan	2c,2d,2e,2l, 13,44	4.169.230	3.619.224
Cadangan kerugian penurunan nilai		(216.247)	(213.060)
		<u>3.952.983</u>	<u>3.406.164</u>
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e, 2m,14,44	5.722.616	6.817.436
Cadangan kerugian penurunan nilai		(200.250)	(546.260)
		<u>5.522.366</u>	<u>6.271.176</u>
Penyertaan Saham	2c,2d,2e, 2n,15,44	5.551.041	1.489.800
Aset Tetap	2d,2o,2p, 16		
Biaya perolehan		48.348.442	46.837.964
Akumulasi penyusutan		(15.257.613)	(14.652.804)
Nilai buku - neto		<u>33.090.829</u>	<u>32.185.160</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	2ak,38c	11.002.837	8.313.545
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 2q,17	28.087.208	27.195.956
TOTAL ASET		<u>1.450.907.063</u>	<u>1.511.804.628</u>

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2s,18	10.229.737	11.845.910
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,44		
Giro	19	191.391.820	185.151.229
Giro <i>Wadiah</i>		-	6.303.202
Tabungan	20	461.701.911	460.453.588
Tabungan <i>Wadiah</i>		-	9.247.604
Deposito Berjangka	21	443.350.935	426.399.550
Total Simpanan Nasabah		1.096.444.666	1.087.555.173
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2d,2t,22,44	13.854.757	23.785.996
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u,7,23,44	12.269.752	40.478.672
Liabilitas Derivatif	2c,2aj,10	634.275	407.774
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m,14,44	5.722.616	6.817.436
Utang Pajak	2ak,38a	4.033.880	1.400.638
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,24	30.763.154	34.489.091
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w,25,44	35.300.463	35.968.985
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e,2an,26,44	6.467.190	3.681.709
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2ae,27,42,44	11.885.881	10.821.083
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2z,28,45b	22.596.392	19.628.417
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,29	500.986	1.465.392
TOTAL LIABILITAS		1.250.703.749	1.278.346.276
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro <i>Mudharabah</i>		-	1.623.563
Tabungan <i>Mudharabah</i>		-	6.147.015
Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>	2d, 2t	-	25.776.398
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		-	33.546.976

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
LIABILITAS, DANA SYIRKAH			
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham			
Modal dasar - 300.000.000.000			
Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)	1,31a	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor	31b	3.981.135	3.411.813
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	2o,16	17.018.344	17.099.207
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ah,31c	(71.191)	(54.749)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2h	2.315.993	4.623.064
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	972.127	975.877
(Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2ae	(1.658.652)	(1.469.726)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	1d	(1.644.317)	(1.649.076)
Opsi saham	2af, 30	85.252	72.894
Cadangan kompensasi atas saham bonus	31f	1.648.811	1.228.805
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	31g	1.758.580	-
Saldo laba	31d,31e		
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		163.389.424	163.949.482
Total Saldo Laba		166.412.109	166.972.167
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		196.985.482	197.377.567
Kepentingan non-pengendali		3.217.832	2.533.809
TOTAL EKUITAS		200.203.314	199.911.376
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		1.450.907.063	1.511.804.628

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Syariah	32		
Pendapatan bunga	2z	59.873.100	54.519.565
Pendapatan syariah	2k,2ab	840	2.058.737
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		59.873.940	56.578.302
Beban Bunga dan Syariah	33		
Beban bunga	2z	(12.730.944)	(19.396.361)
Beban syariah	2ab	-	(679.492)
Total Beban Bunga dan Syariah		(12.730.944)	(20.075.853)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		47.142.996	36.502.449
Pendapatan premi	2ac	3.106.159	2.774.713
Beban klaim	2ac	(2.520.944)	(2.191.225)
Pendapatan premi - neto		585.215	583.488
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2aa	8.167.958	7.457.572
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		4.244.896	2.882.507
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2h,7	1.912.219	1.060.887
Keuntungan transaksi mata uang asing neto	2ah,2ai	857.581	231.670
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	83.468	-
Lain-lain		1.375.259	2.103.842
Total Pendapatan Operasional Lainnya		16.641.381	13.736.478
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,34	(18.841.906)	(9.419.772)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2an,26d	(2.788.172)	(424.121)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(161.894)	(47.845)
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2ae,35,42,44	(14.200.294)	(13.925.133)
Umum dan administrasi	2o,36	(8.213.002)	(8.079.199)
Lain-lain		(3.794.631)	(3.413.278)
Total Beban Operasional lainnya		(26.207.927)	(25.417.610)
LABA OPERASIONAL		16.369.693	15.513.067
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	37	9.834	26.376
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		16.379.527	15.539.443
BEBAN PAJAK	2ak,38b	(3.839.691)	(5.338.401)
LABA PERIODE BERJALAN		12.539.836	10.201.042

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
(lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
Penghasilan komprehensif lainnya:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti		(225.137)	(177.410)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		37.417	60.956
Surplus revaluasi aset tetap	16	(80.276)	-
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj	(16.442)	(16.636)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	(2.767.556)	319.296
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	5.662	116.687
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		458.120	(63.932)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan - Setelah Pajak		(2.588.212)	238.961
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		9.951.624	10.440.003
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		12.472.627	10.178.335
Kepentingan non-pengendali		67.209	22.707
TOTAL		12.539.836	10.201.042
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		9.875.575	10.428.206
Kepentingan non-pengendali		76.049	11.797
TOTAL		9.951.624	10.440.003
LABA PERIODE BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	2ah,49		
Dasar		102	83
Dilusian		101	83

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - selain pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - selain pajak tangguhan	Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus revaluasi aset tetap - selain pajak terkait	Opsis saham	Saldo Laba		Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
									Telaah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	6.167.291	2.900.994	(14.970)	715.770	189.519	21.796	17.099.207	22.409	3.022.685	178.304.746	2.460.903	208.784.336
Dampak penyesuaian atas peraturan PSAK No. 71	-	-	-	111.385	-	-	-	-	-	(12.386.452)	(52.327)	(12.327.394)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	6.167.291	2.900.994	(14.970)	827.155	189.519	21.796	17.099.207	22.409	3.022.685	165.918.294	2.408.576	198.456.942
Saldo pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak disesuaikan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.178.335	22.707	10.201.042
Labas periode berjalan	-	-	(16.636)	383.506	(116.999)	-	-	-	-	-	(10.910)	238.961
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(16.636)	383.506	(116.999)	-	-	-	-	10.178.335	11.797	10.440.003
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(16.636)	383.506	(116.999)	-	-	-	-	10.178.335	11.797	10.440.003
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.623.565)	(3.527)	(20.627.092)
Saham bonus	-	510.819	-	-	-	585.855	-	-	-	-	-	1.600.959
Opsis saham	-	-	-	-	-	-	-	12.086	-	-	(338)	11.748
Saham treasuri	-	-	-	-	-	(47.347)	-	-	-	(47.347)	-	(47.347)
Saldo pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit)	6.167.291	3.411.813	(31.606)	1.210.661	72.520	607.651	17.099.207	34.495	3.022.685	185.473.064	2.416.508	187.835.213

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Cadangan plus atau minus atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena perubahan lajur keuangan dalam mata uang asing	Keuntungan yang direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	Kerugian pengukuran kembali program imbalan pensiun setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus Realisasi aset tetap - setelah pajak terkait	Opsis saham	Dampak transaksi dengan kepentingan nonpengendali	Saldo Laba		Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Tambah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	6.167.291	3.411.813	975.877	(54.749)	4.823.064	(1.468.726)	(1.649.076)	1.228.805	17.099.207	72.894	-	3.022.685	163.949.482	2.533.809	199.911.376
Labanya periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.472.627	67.209	12.539.836
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(3.750)	(16.442)	(2.307.071)	(188.926)	-	-	(80.893)	-	-	-	-	8.840	(2.598.212)
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(3.750)	(16.442)	(2.307.071)	(188.926)	-	-	(80.893)	-	-	-	12.472.627	76.049	9.951.624
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.125.589)	-	(12.125.589)
Saham bonus	-	4.112	-	-	4.759	-	420.006	-	-	-	-	-	-	-	428.877
Opsis saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.989	-	-	-	45	15.014
Selisih nilai transaksi restrukturisasi atas entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.758.590	-	-	-	1.758.590
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	-	565.210	-	-	-	-	-	-	-	(2.611)	-	(907.096)	-	(1.452.624)	(1.797.321)
Perubahan Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.060.753	2.060.753
Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit)	6.167.291	3.981.135	972.127	(71.191)	2.315.993	(1.658.652)	(1.644.317)	1.648.811	17.018.344	85.252	1.758.590	3.022.685	163.389.424	3.217.832	200.203.314

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Pendapatan yang diterima		
Penerimaan bunga dan investasi	57.294.560	53.202.032
Pendapatan syariah	-	2.058.737
Pendapatan premi	3.106.159	2.774.713
Beban yang dibayar		
Beban bunga	(13.004.455)	(19.633.023)
Beban syariah	-	(679.492)
Beban klaim	(2.520.944)	(2.191.225)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	4.244.896	2.882.507
Pendapatan operasional lainnya	13.755.401	11.232.874
Beban operasional lainnya	(24.265.060)	(24.598.893)
(Beban) pendapatan non operasional - neto	(13.151)	20.151
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(3.400.692)	(905.545)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	35.196.714	24.162.836
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
Penurunan (kenaikan) aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	494.954	4.000.437
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	7.165.244	(4.760.007)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	488.773	5.083.797
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	29.649.008	(33.290.509)
Kredit yang diberikan	(29.944.256)	(19.468.631)
Piutang dan pembiayaan syariah	38.915.673	(10.301.097)
Piutang sewa pembiayaan	(550.006)	470.117
Aset lain-lain	(6.248.219)	(2.823.051)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	(1.616.173)	10.580
Simpanan:		
Giro	6.240.591	5.503.573
Giro <i>Wadiah</i>	(6.303.202)	3.727.839
Tabungan	1.248.323	(3.419.433)
Tabungan <i>Wadiah</i>	(9.247.604)	760.336
Deposito berjangka	16.951.385	42.002.928
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(9.931.239)	(6.806.840)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(28.208.920)	(38.954.300)
Liabilitas lain-lain	2.472.009	(5.206.346)
(Penurunan) kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer	(33.546.976)	2.728.628
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Operasi	13.226.079	(36.579.143)

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
		2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil Penjualan aset tetap		22.985	6.225
Penyertaan saham		(296.586)	(372.827)
Penerimaan dividen	15	10	5.530
Perolehan aset tetap	16	(2.711.774)	(1.215.181)
Penurunan/(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi		5.474.508	(25.237.962)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Kegiatan Investasi		2.489.143	(26.814.215)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pembayaran pinjaman yang diterima		(1.061.745)	(8.090.430)
Pembagian laba untuk dividen		(12.125.589)	(20.623.565)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	24	-	1.998.840
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	24	(4.374.500)	(1.743.500)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan		(17.561.834)	(28.458.655)
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(1.846.612)	(91.852.013)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		100.822	511.580
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		167.253.135	236.906.429
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		165.507.345	145.565.996
Kas dan Setara Kas akhir periode terdiri dari:			
Kas	2a		
	3	17.803.670	19.472.615
Giro pada Bank Indonesia	4	38.839.485	42.709.277
Giro pada bank lain	5	15.427.232	12.730.715
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	93.436.958	62.884.622
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	-	7.768.767
Total Kas dan Setara Kas		165.507.345	145.565.996

Catatan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 3 tanggal 9 Maret 2021, mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Perubahan anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000.

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (*Stock Split*)

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering (IPO)*) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 31b).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana dan Pemecahan Saham (*Stock Split*) (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp50 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

BRI melalui surat No. R.224-DIR/DIS/09/2015 tanggal 25 September 2015 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp5.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-101/PB.31/2015 tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000 melalui surat No. B.695-DIR/SKP/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Pembelian kembali tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, antara tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016. Sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 221.718.000 lembar saham sebelum *stock split*. Ketika *buyback* tahun 2016 harga perolehan rata-rata persahamnya Rp10.944 dengan dana yang digunakan Rp2.418.947.067.500 (nilai penuh). Sehingga setelah *stock split* (1:5) saham yang telah dibeli kembali dicatat sebanyak 1.108.590.000 lembar dengan harga perolehan rata-rata persahamnya Rp2.182.

Pada tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2019, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 143.415.500 lembar dengan harga perolehan sebesar Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp312.933.098.043 (nilai penuh), harga *grant* ESA 1 sebesar Rp3.630 (nilai penuh) atau setara Rp520.598.265.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga *grant* dicatat dalam Agio sebesar Rp207.665.166.957 (nilai penuh).

Pada tanggal 25-28 Februari 2020, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 231.111.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp504.284.970.744 (nilai penuh), dimana implementasi ini terdiri dari program ESA 1 sebanyak 4.396.700 lembar saham dengan harga *grant* sebesar Rp3.630 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp15.960.021.000 (nilai penuh) dan program ESA 2 sebanyak 226.714.300 lembar dengan harga *grant* Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp999.810.063.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga *grant* dicatat dalam agio sebesar Rp511.485.113.256 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

BRI melalui surat No. R.154-DIR/ALM/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp3.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S.47/PB.31/2020 tanggal 12 Maret 2020. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000 melalui surat No. B.427-DIR/SKP/03/2020 tanggal 13 Maret 2020. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34 per lembar saham. Atas transaksi ini total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI sebanyak 750.463.500 lembar saham.

Pada tanggal 5 Februari 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 84.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp184.597.481 (nilai penuh), harga *grant* ESA 2 sebesar Rp3.240 (nilai penuh) atau setara Rp274.104.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga *grant* dicatat dalam agio sebesar Rp89.506.518 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Maret 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebesar 2.096.400 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp4.574.351.773 (nilai penuh), dimana implementasi ini terdiri dari ESA 1 sebanyak 831.000 lembar saham dengan harga *grant* Rp3.630 per lembar saham atau setara Rp3.016.530.000 (nilai penuh) dan ESA 2 sebanyak 1.265.400 lembar saham dengan harga *grant* Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp5.580.414.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga *grant* dicatat dalam agio sebesar Rp4.022.592.226 (nilai penuh). Per tanggal 31 Maret 2021, total saham treasuri BRI sebanyak 748.282.500 lembar saham.

e. Struktur dan Manajemen

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kantor Wilayah	19	19
Kantor Audit Intern Pusat	1	1
Kantor Audit Intern Wilayah	18	19
Kantor Cabang Dalam Negeri	461	461
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	5	5
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri	593	608
Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri	3	3
Kantor Kas	534	547
BRI Unit	5.241	5.382
Teras dan Teras Keliling	1.950	1.999
Teras Kapal	4	4

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, BRI memiliki 3 (tiga) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura dan Timor-Leste, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di New York dan Hong Kong.

Pada tanggal 30 Juni 2021 BRI memiliki 7 (tujuh) entitas anak yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama dan PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur). Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 BRI memiliki 8 (delapan) entitas anak yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama dan PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur).

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan kepala audit intern wilayah, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang. Total karyawan BRI dan entitas anak masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	61.582	61.531
Entitas Anak	3.803	5.497
	<u>65.385</u>	<u>67.028</u>

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 30 Juni 2021 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 24 tanggal 23 April 2021, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Februari 2020, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Komisaris Utama/Komisaris	Kartika Wirjoatmodjo	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/	:	:
Komisaris Independen	Ari Kuncoro**)	Ari Kuncoro
Komisaris Independen	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	Zulnahr Usman	Zulnahr Usman
Komisaris Independen	Dwi Ria Latifa	Dwi Ria Latifa ⁾
Komisaris Independen	R. Widyo Pramono	R. Widyo Pramono
Komisaris	Nicolaus Teguh Budi	Nicolaus Teguh Budi
	Harjanto	Harjanto
Komisaris	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris	Rabin Indrajad	Rabin Indrajad
	Hattari	Hattari

*) Disetujui dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Komisaris Independen yang berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021.

***) Telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI per tanggal 21 Juli 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi BRI pada tanggal 30 Juni 2021 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 24 tanggal 23 April 2021, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Februari 2020, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Direktur Utama :	Sunarso	Sunarso
Wakil Direktur Utama :	Catur Budi Harto	Catur Budi Harto
Direktur :	Handayani	Haru Koesmahargyo
Direktur :	Amam Sukriyanto	Priyastomo
Direktur :	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur :	Arga M. Nugraha	Handayani
Direktur :	Supari	Supari
Direktur :	Ahmad Solichin	Ahmad Solichin
	Lutfiyanto	Lutfiyanto
Direktur :	Agus Sudiarto	Agus Sudiarto
Direktur :	Agus Noorsanto	Agus Noorsanto
Direktur :	Viviana Dyah	Herdy Rosadi
	Ayu R. K.	Harman
Direktur :	Agus Winardono	Wisto Prihadi ^{*)}

^{*)} Dikuatkan pemberhentiannya yang berlaku terhitung mulai tanggal 11 November 2020 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank pada tanggal 21 Januari 2021.

Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 30 Juni 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 195-DIR/HCB/04/2021 tanggal 26 April 2021 dan Surat Dewan Komisaris No. R. 21-KOM/03/2021 tanggal 9 Maret 2021, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 548-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Dewan Komisaris No. B.120-KOM/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Ketua :	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Anggota :	Ari Kuncoro ^{*)}	Ari Kuncoro
Anggota :	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Anggota :	R. Widyo Pramono	R. Widyo Pramono
Anggota :	Pamuji Gesang	Pamuji Gesang
	Raharjo	Raharjo
Anggota :	Sunuaji Noor	Sunuaji Noor
	Widiyanto	Widiyanto
Anggota :	Sahat Pardede	Sahat Pardede
Anggota :	Irwanto	Handayani Wibowo

^{*)} Telah mengajukan pengunduran diri tanggal 21 Juli 2021.

Sekretaris Perusahaan BRI pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Aestika Oryza Gunarto, sesuai dengan Surat No. R.453-DIR/HCB/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Hari Siaga Amijarso, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. R. 401-DIR/KHC/07/2019 tanggal 15 Juli 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS)

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta ("BJA") untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSB"). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktakan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.
2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.
3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRIsyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRIS antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp7,5 triliun terdiri atas 15 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dan perubahan nama dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018. Akta tersebut juga mencantumkan persetujuan pemegang saham antara lain:

1. Rencana Bank untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
2. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahannya, dan POJK No. 33/POJK.04/2014.
3. Pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan, dengan jumlah maksimal 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk. atas penawaran umum perdana saham sesuai dengan surat terakhir yang disampaikan ke OJK No. S.B.147-PDR/04-2018 tanggal 24 April 2018, OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Penawaran umum perdana saham BRIS (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (Rupiah penuh) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI pada tanggal 9 Mei 2018. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan, maka sebanyak 97.161.135 lembar saham BRIS yang dimiliki oleh BRI tidak dicatatkan di Bursa, sehingga total saham BRIS yang dicatatkan di Bursa adalah 9.618.952.363 lembar saham. Setelah IPO BRIS, berdasarkan surat No. DE/V/18-2545 tanggal 24 Mei 2018 dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan BRI atas saham BRIS adalah sebesar 73,00%.

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan ketentuan masa jabatan Pengurus Perseroan dan beberapa penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Struktur kepemilikan saham BRIS pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari BRI sebesar 71,64%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 8,25% dan masyarakat (publik) sebesar 20,11%.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.938.459 atau 3,83% dari total aset konsolidasian.

Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.347.121 atau 3,53% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS, dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Tbk ("BSI") efektif sebagai bank hasil *merger* sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan OJK Perbankan melalui Surat Keputusan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk dan perubahan izin usaha.

Sejak tanggal efektif penggabungan, struktur kepemilikan saham terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,95%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,91%, BRI sebesar 17,29%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 1,83%, PT BNI Life Insurance sebesar 0,01%, PT Mandiri Sekuritas sebesar 0,00% dan masyarakat (publik) sebesar 5,01%.

Sejak tanggal 1 Februari 2021 BRI telah kehilangan pengendalian atas BRIS yang mengakibatkan BRI harus menghentikan pengakuannya terhadap aset bersih BRIS pada nilai tercatatnya sebesar Rp909.707 dan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali terdahulu kepada BRIS ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali) senilai Rp1.452.824. Setelah itu BRI mengakui investasi pada BSI sesuai dengan rasio penggabungan dimana selisih antara net aset BRIS dengan investasi BSI dicatat sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp565.210 (Catatan 31b).

Setelah pengukuran awal nilai investasi BSI kemudian ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi BSI sesuai PSAK No. 15 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk ("Bank Agro") untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham Bank Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap Bank Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 per lembar (Rupiah penuh) dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 (akhir dari konversi waran), jumlah waran yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 612.937.654 lembar, sehingga meningkatkan modal saham Bank sebesar Rp61.294.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-113/D.04/2018 memberitahu mengenai Efektifnya PUT VIII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.889.085.049 lembar saham.

Hasil dari PUT VIII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,10%, Dapenbun 5,00% dan publik 7,90%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

Pada Akta RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 51 tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana diatur dalam POJK NO. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka *Program Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP), sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nominal Rp100 (Rupiah penuh), - per lembar saham sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 249.376.451 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) (lanjutan)

Hasil dari MESOP tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 April s.d 18 Mei 2021 menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tanggal 12 Juli 2021 dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 86,09% dan publik 13,91%. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0122517.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 13 Juli 2021.

Anggaran Dasar BRI Agro telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 27 April 2021, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0078302.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 28 April 2021.

Total aset BRI Agro pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp25.463.936 dan Rp27.966.393 atau 1,76% dan 1,85% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp879.117 dan Rp998.325 atau 1,39% dan 1,68% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Agro adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan. BRI Agro berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Kantor pusat BRI Agro berlokasi di Gedung BRI Agro, Jl. Warung Jati Barat No.139, Jakarta, dan memiliki 18 kantor cabang dan 20 kantor cabang pembantu.

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp12.521 dan Rp8.481 atau 0,0009% dan 0,0006% dari total aset konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance) (lanjutan)

Sesuai dengan ijin usaha resmi dari Regulator Hong Kong sebagai *Money Service Operator* (MSO), ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan layanan remitansi untuk pekerja migran Indonesia serta lingkup layanan operasional lain terkait dengan rekening BRI yang dimiliki oleh nasabah BRI yang berdomisili di Hong Kong sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh otoritas Hong Kong.

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Shop 3 G/F, 24-36 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki 5 (lima) kantor cabang yang tersebar di wilayah Causeway Bay, Mongkok, Yuen Long dan Tsuen Wan.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BRI Life") untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.627.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013073.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021, diatur mengenai perubahan nomenklatur, susunan Pengurus, dan perubahan Anggaran Dasar yang salah satunya terkait dengan adanya peningkatan modal dan perubahan struktur kepemilikan BRI Life melalui penerbitan sebanyak 936.458 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham baru untuk diambil bagian oleh FWD Financial Services Pte. Ltd.. Sebagai akibat dari Penerbitan Saham Baru tersebut, maka terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Financial Services Pte. Ltd 29,86%. Adapun Perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021.

Anggaran Dasar BRI Life telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 58 tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan ketentuan Pasal 11 Ayat 5 dan Pasal 18 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseoran, perubahan nomenklatur dan perubahan susunan Pengurus. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. AHU-AH.01.03-0325327 tanggal 24 Mei 2021.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah melakukan usaha di bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Life pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp17.426.295 dan Rp13.122.095 atau 1,20% dan 0,87% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan premi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp3.037.704 dan Rp2.817.570 atau 4,82% dan 4,75% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 6 kantor CCC (*Customer Care Center*) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 21 kantor CC (*Customer Care*).

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini diselesaikan pada tanggal 30 September 2016, berdasarkan akta No. 75 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Lain-lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) (lanjutan)

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BRI Multifinance Indonesia No. 237 tanggal 23 April 2019, yang dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023113.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 April 2019, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0223685 tanggal 29 April 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2019, Tambahan Berita Negara No. 35668/2019, antara lain berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan BRI Finance dari semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan tindak lanjut atas arahan dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 November 2020, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0188874.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0406497 tanggal 11 November 2020, antara lain mengatur tentang perubahan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor BRI Finance.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.536.874 dan Rp4.055.885 atau 0,31% dan 0,27% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp264.876 dan Rp239.311 atau 0,42% dan 0,40% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Gedung Lippo Kuningan, lantai GF, 10 dan 11, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan dan memiliki 12 cabang dan 14 kantor pemasaran.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) (lanjutan)

Pada tanggal 29 Juni 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura ("Sarana NTT Ventura") dengan PT Bahana Artha Ventura ("BAV") dalam rangka pengambilalihan seluruh kepemilikan saham BAV dalam Sarana NTT Ventura menjadi milik BRI sebanyak 97,61%, dengan harga pembelian sebesar Rp3.090, dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing dari Dewan Komisaris BRI selaku wakil dari pemegang saham lewat suratnya No. R. 67-KOM/09/2018 tanggal 26 September 2018 serta persetujuan dari OJK melalui surat No. S-112/PB.31/2018 tanggal 25 September 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana BRI memiliki 97,61% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Ventura Investama (dahulu Sarana NTT Ventura).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H., M.Kn, Notaris di Kupang, telah dilakukan perubahan nama dari PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura menjadi PT BRI Ventura Investama ("BRI Ventures"), beserta perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di kota Kupang menjadi di kota Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030398.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-189/NB.11/2019 tanggal 1 April 2019, sehubungan dengan perubahan nama tersebut, BRI Ventures telah memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan modal ventura atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir terkait dengan perubahan Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Februari 2020. Keputusan ini telah dicatat dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 12 Februari 2020 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0128050 tanggal 6 Maret 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Ventures adalah menyelenggarakan usaha modal ventura termasuk mengelola dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK serta kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha dan atau debitor yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Total aset BRI Ventures pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.822.034 dan Rp1.822.744 atau 0,13% dan 0,12% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRI Ventures berlokasi di District 8 Office SCBD, Prosperity Tower Lantai 16 Unit F, Jalan Jenderal Sudirman No 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (dahulu PT Danareksa Sekuritas)

Pada tanggal 27 September 2018, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 67%, dengan harga pembelian sebesar Rp446.888, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1496/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Saham No. 53 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 67% dari total saham Danareksa Sekuritas dan sebesar 33% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

Anggaran Dasar BRIDS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn, No. 1 tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., Notaris di Jakarta, terkait dengan perubahan nama PT Danareksa Sekuritas menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069706.AH.01.02.TAHUN 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRIDS adalah sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek serta kegiatan usaha penunjang lainnya yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

Sebagai bagian dari perijinan yang telah dimiliki, Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (*Arranger*) *Medium Term Notes* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, *Global Medium Term Notes* (GMTN), *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (*Financial Advisory*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (dahulu PT Danareksa Sekuritas) (lanjutan)

Total aset BRIDS pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.820.356 dan Rp1.095.479 atau 0,13% dan 0,07% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRIDS berlokasi di Gedung BRI II Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta dan memiliki 10 cabang, 13 Gerai dan 3 kemitraan.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Pada tanggal 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJBSB") dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur ("BRI Insurance") menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1.041.000.000.000 (Rupiah penuh) dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 tanggal 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham BRI Insurance dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Anggaran Dasar BRI Insurance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Tri Wahyuwidayati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan dilakukannya perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi PT BRI Asuransi Indonesia ("BRI Insurance"). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Insurance adalah melaksanakan kegiatan usaha asuransi kerugian, membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, asuransi kerugian non konvensional, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

Perusahaan memperoleh izin usaha di bidang asuransi kerugian pada tanggal 26 Agustus 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.-128/KM.13/1989. Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-105/NB.11/2020 tanggal 6 Maret 2020, BRI Insurance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang asuransi umum atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang selanjutnya berubah nama menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

BRI Insurance mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-006/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Insurance pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.456.651 dan Rp3.048.872 atau 0,24% dan 0,20% dari total aset konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (lanjutan)

Total pendapatan premi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp453.620 dan Rp317.912 atau 0,76% dan 0,54% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Insurance berlokasi di Graha BRI Insurance, Jl. Mampang Prapatan Raya No.18, Jakarta Selatan dan memiliki 22 kantor cabang, 2 kantor cabang syariah, 8 kantor perwakilan *marketing*, 2 kantor perwakilan *marketing* syariah, 45 *marketing channel* dan 12 *marketing office* syariah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan".

Sejak 1 Februari 2021 BRI telah menghentikan pengakuan atas aset dan liabilitas BRIS, sedangkan sebelum 1 Februari 2021, BRIS (entitas anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No.107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi *Sukuk*", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian interim.

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian interim, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam grup kecuali entitas anak dan kantor cabang tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Dolar Hongkong. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasiannya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:

- a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
- b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas. Berdasarkan PSAK No. 38 tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung dalam sepengendalian.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, obligasi rekapitalisasi pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain serta pinjaman dan surat berharga subordinasi.

(i) Klasifikasi

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, BRI dan entitas anak menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual instrument terkait. Berikut klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen utang, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan/kerugian diakui pada laba rugi pada saat pelepasan;
- Aset keuangan, dalam hal ini Instrumen ekuitas, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan/kerugian tidak diakui pada laba rugi pada saat pelepasan; atau
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI dan entitas anak mengklasifikasi dan mengukur instrumen derivatif dan portofolio *trading* pada aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Saat pengakuan awal BRI dan entitas anak dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

Pada saat pengakuan awal, BRI dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- a. Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
- b. Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- c. Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, BRI dan entitas anak mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BRI dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
- Kontrak jaminan keuangan;
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar; atau
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajarnya dan perubahan atas nilai wajar tersebut dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya dan perubahan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- 1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- 2) BRI dan entitas anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan antara (a) BRI dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI dan entitas anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI dan entitas anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI dan entitas anak yang berkelanjutan atas aset tersebut.

BRI dan entitas anak melepaskan aset keuangan, seperti kredit yang diberikan, ketika syarat dan kondisi telah direnegosiasi hingga secara substansial, kredit yang diberikan tersebut menjadi baru, dengan perbedaan akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari pelepasan, jika kerugian penurunan nilai belum dicatat. Kredit yang diberikan tersebut akan diklasifikasikan sebagai *Stage 1* untuk penilaian *Expected Credit Losses* (ECL), kecuali kredit yang diberikan tersebut dianggap aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*).

Jika modifikasi tidak akan menghasilkan arus kas yang secara substansi berbeda, maka modifikasi tidak akan berujung pada pelepasan aset. Berdasarkan perbedaan arus kas yang didiskonto pada *Effective Interest Rate* (EIR) awal, Bank akan mencatat keuntungan atau kerugian akibat modifikasi, sampai dengan jumlah kerugian penurunan nilai yang belum diakui.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan entitas anak dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukuan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Akumulasi keuntungan/kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan BRI dan entitas anak untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan lainnya atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI dan entitas anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI dan entitas anak untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar (Catatan 40).

(x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110, entitas anak BRIS menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

- 1) Secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
- 2) Suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;
- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- 6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

BRI dan entitas anak mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

BRI dan entitas anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- a. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- b. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

BRI dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim pada periode berjalan.

Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu nilai wajar. Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK No. 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi; atau
- Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3* dan POCI, sebagai berikut:

- *Stage 1*: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam *Stage 1* termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari *Stage 2*.
- *Stage 2*: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali BRI dan entitas anak merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini, akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. *Stage 2* juga mencakup fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari *Stage 3*.
- *Stage 3*: mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. BRI dan entitas anak mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.
- POCI Aset POCI adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian risiko kredit pada saat pengakuan awal. Aset tersebut dicatat pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, dan pendapatan bunga akan diakui selanjutnya berdasarkan metode suku bunga efektif yang disesuaikan. Cadangan ECL hanya dicatat atau dilepaskan jika ada perubahan selanjutnya pada kerugian kredit ekspektasian.

Terdapat kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan aset keuangan tercakup dalam *stage* tertentu yang telah diformalkan di dalam Surat Edaran Bank.

Perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan dan pernah mengalami gagal bayar ataupun restrukturisasi. Selain itu, perhitungan penurunan nilai akan dilakukan secara kolektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*) (lanjutan)

Penurunan nilai individual

Metode perhitungan penurunan nilai secara individual akan mempertimbangkan 3 (tiga) skenario kemungkinan pengembalian, yaitu: (i) skenario dasar (*Base*), (ii) skenario buruk (*Bad*), dan (iii) skenario terburuk (*Worst*). Pembuatan skenario dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flow* (DCF) dan mempertimbangkan *confidence level* yang menggambarkan kondisi industri dan perusahaan terkait. Nantinya ECL yang dihasilkan oleh masing-masing skenario akan dirata-ratakan secara tertimbang terhadap bobot skenario yang telah diatur.

Penurunan nilai kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

BRI dan entitas anak menggunakan model (i) *Skalar Bayesian*, (ii) *Credit Index* dan (iii) *Vasicek* maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap debitur.

BRI dan entitas anak menggunakan metode (i) *Historical*, (ii) *Diminish Balance* dan (iii) *Value to Loan* dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat di-recover oleh Bank terhadap debitur *default*. LGD biasa dihitung dengan *1-Recovery Rate*. *Recovery rate* dihitung mempertimbangkan *Time Value of Money* dari pengembalian dari kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *Time Value of Money* dari *Recovery* adalah EIR awal.

EAD merupakan estimasi nilai buku pada saat terjadi gagal bayar, dengan mempertimbangkan arus kas instrumen keuangan terkait, serta kemungkinan penarikan tambahan dari limit kredit sampai dengan tanggal gagal bayar. EAD juga mempertimbangkan jadwal pembayaran dan amortisasi serta perubahan dalam utilisasi saldo yang belum ditarik menjelang terjadinya kegagalan bayar. Pemodelan EAD akan dilakukan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan terkait, yang dibagi ke dalam beberapa kategori: (i) kredit angsuran (ii) kredit *revolving*, (iii) *trade finance* (iv) *treasury*.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK 71 mewajibkan Bank untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario *forward-looking* yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan Bank harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal, baik/*good*, dan buruk/*bad*). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (*secured*), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi BRI dan entitas anak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*) (lanjutan)

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Bank menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Bank dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI dan entitas anak menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility*, *Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (*inter-bank call money*), deposito berjangka, dan *banker's acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes*, *U.S. Treasury Bonds*, *U.S Treasury Bills*, *Singapore Government Securities*, *Negotiable Certificate of Deposits*, *Monetary Authority of Singapore (MAS) bills*, dan surat berharga komersial lainnya serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.

Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- 2) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- 3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminan oleh bank lainnya sedangkan wesel tagih merupakan tagihan ataupun dokumen penagihan dalam bentuk wesel/*bill of exchange* kepada pihak tertagih/*drawee* atas dasar diskonto ataupun suatu pembiayaan tertentu. Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI dan entitas anak.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Piutang dan pembiayaan syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara BRIS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

l. Piutang sewa pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Piutang sewa pembiayaan diakui sebesar investasi bersih yang merupakan nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Piutang sewa pembiayaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

l. Piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang sewa pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan suku bunga efektif.

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit (L/C)* yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi sedangkan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

n. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 71.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5
Satelit	15
<i>Main System</i>	5
<i>Non Main System</i>	3

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan kedalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 16).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap”, dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun “Aset Tetap” yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap”. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

BRI dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait, dengan 2 pengecualian yaitu aset pendasar bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

Pada tanggal insepri suatu kontrak, BRI dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BRI dan entitas anak menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
 - a. BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
 - b. BRI dan entitas anak mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Pada tanggal insepisi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BRI dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- a. Pembayaran lunas dimuka.
- b. Pembayaran angsuran tetap.
- c. Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counter part*.

BRI dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga inkremental sewa mengacu pada *cost corporate bond* Bank dan tingkat suku bunga pinjaman entitas anak.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. BRI dan entitas anak akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan diperlukan penurunan atas nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka BRI dan entitas anak akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

BRI dan entitas anak mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI dan entitas anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai sarana perintah pembayaran yang telah disepakati. Giro *mudharabah* dicatat sebesar liabilitas BRIS.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya (lanjutan)

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan entitas anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh BRI, BRI Agro dan BRI Finance adalah Obligasi, *Negotiable Certificate Deposit* (NCD) dan *Medium Term Notes* (MTN). Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR), sedangkan BRIS (entitas anak) pengukuran biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

y. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ab. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari transaksi *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode margin efektif. Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, BRI mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ac. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (*approved claim*). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (*withdrawal*) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi

Liabilitas kontrak asuransi

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

b. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred but not reported (IBNR)*).

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungan asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Reasuransi

BRI Life dan BRI Insurance mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life dan BRI Insurance atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life dan BRI Insurance mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life dan BRI Insurance tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life dan BRI Insurance mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi, dan reasuransi (lanjutan)

Reasuransi (lanjutan)

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Merupakan iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain manfaat dana tambahan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan peraturan yang berlaku.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iv) Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.
- (v) Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.
- (vi) Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

af. Opsi saham

Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (*cliff-vesting scheme*) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes*.

ag. Laba per lembar saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk BRI dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Laba per lembar saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

ah. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1 Dolar Amerika Serikat	14.500,00	14.050,00
1 Pound Sterling Inggris	20.056,41	19.012,46
1 Yen Jepang	131,17	135,97
1 Euro Eropa	17.256,45	17.234,43
1 Dolar Hong Kong	1.867,37	1.812,30
1 Riyal Arab Saudi	3.866,50	3.744,50
1 Dolar Singapura	10.787,49	10.606,18
1 Ringgit Malaysia	3.493,14	3.481,17
1 Dolar Australia	10.899,65	10.752,47
1 Renminbi	2.245,04	2.150,26
1 Baht Thailand	452,70	468,10
1 Franc Swiss	15.727,54	15.900,87
1 Dolar Kanada	11.695,91	10.980,86
1 Dolar Brunei Darussalam	10.785,88	10.213,36
1 Kroner Denmark	2.320,67	2.316,42
1 Won Korea Selatan	12,86	12,94
1 Dolar Selandia Baru	10.141,30	10.087,90
1 Kina Papua Nugini	4.132,54	3.951,60
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.947,57	3.825,06
1 Kroner Swedia	1.704,22	1.713,65
1 Kroner Norwegia	1.694,66	1.635,74
1 Rupee India	194,91	191,65
1 Peso Filipina	297,10	292,47
1 Rupee Pakistan	1,99	1,99
1 Dolar Taiwan	520,17	499,77
1 Dong Vietnam	0,63	0,61

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ai. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 3 (tiga) Kantor Cabang di Cayman Islands, Singapura dan Timor-Leste, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun entitas anak, kantor cabang dan perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

aj. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari kontrak utama non derivatif yang merupakan aset keuangan/liabilitas keuangan, BRI dan entitas anak mengklasifikasikan aset/liabilitas keuangan secara keseluruhan berdasarkan model bisnis dan jangka waktu kontraktualnya sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2c.

ak. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika BRI dan entitas anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

al. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

al. Informasi segmen (lanjutan)

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura dan Timor-Leste.

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Kontinjensi (lanjutan)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang sewa pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbarui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas terkait.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (*policies in force*). Pertimbangan manajemen BRI diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

BRI mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

an. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif, namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

ao. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2021, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- a. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 *Business Combinations: Definition of Business* merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *US Financial Accounting Standards Board (FASB)*. Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.
- b. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK No 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2. Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.
- c. PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. PSAK ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi wakaf dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi.

Penerapan PSAK di atas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		16.447.386		31.178.212
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	51.763.725	750.574	31.599.011	443.966
Dolar Singapura	18.257.830	196.956	14.765.055	156.601
Ringgit Malaysia	34.201.714	119.471	9.755.822	33.962
Riyal Arab Saudi	20.166.415	77.973	27.325.087	102.319
Euro Eropa	3.650.788	63.000	2.836.914	48.893
Dolar Taiwan	108.061.840	56.211	180.423.440	90.169
Dolar Australia	2.993.660	32.630	3.628.475	39.015
Dirham Uni Emirat Arab	4.143.216	16.356	2.573.096	9.842
Yen Jepang	88.393.156	11.595	161.285.585	21.929
Dolar Hong kong	5.379.427	10.045	4.902.304	8.884
Franc Swiss	309.319	4.865	204.369	3.250
Baht Thailand	8.041.825	3.640	11.053.645	5.174
Pound Sterling Inggris	170.856	3.427	229.201	4.358
Renminbi	1.497.313	3.361	1.472.480	3.166
Dolar Brunei Darussalam	257.480	2.777	482.763	4.931
Dolar Selandia Baru	150.723	1.528	262.053	2.643
Kina Papua Nugini	159.540	659	142.050	561
Dolar Kanada	54.460	637	103.155	1.133
Peso Filipina	712.180	212	1.936.110	566
Won Korea Selatan	14.903.207	192	39.247.287	508
Ruppee India	703.117	137	649.827	125
Dong Vietnam	59.882.164	38	2.227.982.164	1.357
		1.356.284		983.352
Total		17.803.670		32.161.564

Saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp4.798.113 dan ASD560.420 (angka penuh) pada tanggal 30 Juni 2021 serta Rp6.041.368 dan ASD819.580 (angka penuh) pada tanggal 31 Desember 2020.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		30.048.207		43.139.976
Dolar Amerika Serikat	606.295.031	8.791.278	597.223.683	8.390.993
Total		38.839.485		51.530.969

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar RpNihil dan Rp1.084.299.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, GWM dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang telah diubah menjadi PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah enam kali melalui PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung melalui PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah tiga kali dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 dan PBI No. 22/17/PBI/2020 yang dijelaskan melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang sebagaimana telah diubah dengan PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan PADG No. 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas masing-masing ditentukan sebesar sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah		
- GWM Primer	3,00%	3,00%
(i) GWM secara harian*)	0,00	0,00
(ii) GWM secara rata-rata	3,00	3,00
- PLM (d/h GWM Sekunder)	6,00	6,00
Mata uang asing	4,00%	4,00%
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,00	2,00

*) Bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada PADG No. 22/04/PADG/2020 dan PADG No. 22/35/PADG/2020 pasal dua ayat tiga sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. PLM adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank.

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio* (LFR) berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Giro RIM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Giro RIM dikenakan jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia yang sebesar 14%.

Rasio GWM BRI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah		
- GWM Primer*)	3,06%	3,19%
(i) GWM secara harian*)	0,00	0,00
(ii) GWM secara rata-rata	3,06	3,19
- PLM (d/h GWM Sekunder)	14,59	16,51

*) Setelah dikurangi insentif sesuai PADG No. 22/04/PADG.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Mata uang asing</u>	4,33%	4,01%
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,33	2,01

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio-rasio tersebut di atas.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		135.164		250.733
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	672.676.565	9.753.810	355.121.110	4.989.452
Dolar Singapura	170.130.108	1.835.277	84.695.915	898.300
Euro Eropa	65.062.836	1.122.754	50.845.490	876.293
Yen Jepang	5.736.344.307	752.436	4.218.275.442	573.559
Renminbi	282.462.524	634.138	166.762.336	358.582
Dolar Hong Kong	232.612.878	434.373	107.852.226	195.460
Dolar Australia	21.955.343	239.306	29.495.659	317.151
Pound Sterling Inggris	6.669.874	133.774	10.960.757	208.391
Franc Swiss	5.894.505	92.706	5.366.022	85.324
Riyal Arab Saudi	16.330.324	63.141	17.272.344	64.676
Dolar Selandia Baru	3.465.828	35.148	3.117.449	31.449
Dirham Uni Emirat Arab	7.038.353	27.784	27.548.333	105.374
Dolar Kanada	726.403	8.496	590.529	6.485
Kroner Swedia	3.924.111	6.688	48.791.612	83.612
Kroner Norwegia	2.620.585	4.441	2.877.408	4.707
Ringgit Malaysia	537.278	1.877	176.978	616
Baht Thailand	1.008.568	457	1.010.568	473
		15.146.606		8.799.904
		15.281.770		9.050.637
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		102.803		47.969
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.962.514	28.456	800.378	11.245
Dolar Hong Kong	7.605.835	14.203	24.569.597	44.527
		42.659		55.772
		145.462		103.741
Total		15.427.232		9.154.378
Cadangan kerugian penurunan nilai		(94.098)		(93.843)
Total - Bersih		15.333.134		9.060.535

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank MNC Internasional Tbk	51.649	16.090
PT Bank Central Asia Tbk	21.658	150.182
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	20.643	20.743
Standard Chartered Bank	20.280	1.023
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.559	1.814
Lainnya	15.375	60.881
	<u>135.164</u>	<u>250.733</u>
<u>Mata uang asing</u>		
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	6.312.529	2.925.377
Standard Chartered Bank	2.771.250	1.764.602
Bank of America	1.453.254	576.623
The Bank of New York Mellon	531.989	190.116
Citibank N.A.	511.593	429.023
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	508.656	178.269
Bank of China, Ltd	491.601	338.481
Lainnya	2.565.734	2.397.413
	<u>15.146.606</u>	<u>8.799.904</u>
	<u>15.281.770</u>	<u>9.050.637</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	56.532	30.112
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33.084	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.813	11.585
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.374	5.936
PT Bank Syariah Mandiri	-	329
PT Bank BNI Syariah	-	7
	<u>102.803</u>	<u>47.969</u>
<u>Mata uang asing</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28.364	7.730
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.295	48.042
	<u>42.659</u>	<u>55.772</u>
	<u>145.462</u>	<u>103.741</u>
Total	15.427.232	9.154.378
Cadangan kerugian penurunan nilai	(94.098)	(93.843)
Bersih	<u>15.333.134</u>	<u>9.060.535</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah	0,14%	0,18%
Mata uang asing	0,11	0,10

e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif.

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Nilai tercatat awal	9.154.378	-	-	9.154.378
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	6.272.854	-	-	6.272.854
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	15.427.232	-	-	15.427.232

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Nilai tercatat awal	10.237.736	-	-	10.237.736
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.083.358)	-	-	(1.083.358)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	9.154.378	-	-	9.154.378

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan. (lanjutan)

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	93.843	-	-	93.843
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	255	-	-	255
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	94.098	-	-	94.098
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	24
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	24	-	-	24
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	93.819	-	-	93.819
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	93.843	-	-	93.843

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 tidak terdapat giro pada bank lain yang dibatasi penggunaannya. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 giro pada bank lain mengalami penurunan nilai secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

- a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<i>Pihak ketiga</i>				
<i>Rupiah</i>				
Bank Indonesia				
<i>Term Deposit</i>		18.797.338		5.697.835
<i>Deposit Facility</i>		15.479.638		683.682
<i>Deposit Facility Syariah</i>		-		500.000
		34.276.976		6.881.517
<i>Inter-bank call money</i>				
PT BPD Jawa Tengah		-		300.000
PT Bank Riau Kepri		-		150.000
PT BPD Maluku dan Maluku Utara		-		125.000
PT BPD Sumatera Selatan		-		100.000
PT BPD Sulawesi Tenggara		-		50.000
		-		725.000
<i>Deposito Berjangka</i>				
PT BPD Jawa Timur Tbk		83.500		-
PT Bank DKI		61.800		15.500
PT Maybank Indonesia Tbk		61.500		61.500
PT Bank CIMB Niaga Tbk		46.000		15.000
PT Bank OCBC NISP Tbk		45.000		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		45.000		-
PT Bank Pan Indonesia Tbk		45.000		-
PT Bank Permata Tbk		40.000		40.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		35.000		35.000
PT Bank Nationalnobu Tbk		29.200		-
PT Bank Bukopin Tbk		28.500		3.500
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo		9.500		-
PT BPD Aceh Syariah		2.000		500
PT Bank BJB Syariah		2.000		500
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		1.500		300
PT BPD Sumatera Barat		1.200		2.700
PT Bank Bukopin Syariah Tbk		1.100		1.100
PT BPR Bringin Dana Sejahtera		1.000		-
PT Bank BTPN Syariah Tbk		500		-
PT Bank Central Asia Syariah		500		-
PT BPR Bina Dana Swadaya		-		1.000
PT BPD Sulawesi Tengah		-		1.300
PT BPD Kalimantan Barat		-		3.000
PT Bank Riau Kepri		-		7.000
		539.800		187.900
		34.816.776		7.794.417

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank Indonesia				
<i>Term Deposit</i>	3.199.934.056	46.399.044	3.494.833.594	49.102.411
<u>Inter-bank call money</u>				
The Bank of New York Mellon Corporation	249.400.000	3.616.300	186.700.000	2.623.135
Citibank, N.A	223.830.000	3.245.535	112.100.000	1.575.005
Federal Reserve Bank	155.482.785	2.254.500	181.955.872	2.556.480
Wells Fargo Bank, N.A	142.200.000	2.061.900	52.900.000	743.245
TD Bank, N.A	14.906.138	216.139	4.954.759	69.614
PT Bank BNP Paribas Indonesia	7.543.662	109.383	4.043.737	56.815
JP Morgan Chase Bank, N.A	4.190.000	60.755	4.190.000	58.870
United Overseas Bank Singapura	604.519	8.766		-
PT Bank Maybank Singapura	360.300	5.224		-
		11.578.502		7.683.164
<u>Deposito berjangka</u>				
PT Bank HSBC Indonesia	29.000.000	420.500		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	5.300.000	76.850	2.900.000	40.745
U.S. Bankcorp	1.651.088	23.941	4.226.636	59.384
TD Bank, N.A.	534.915	7.756	488.943	6.870
		529.047		106.999
<u>Penempatan lainnya</u>				
<i>(Banker's Acceptance)</i>				
PT Bank Woori Saudara				
Indonesia 1906 Tbk	20.000.000	290.000	20.000.000	281.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		-	4.350.000	61.118
		290.000		342.118
<u>Dolar Singapura</u>				
<u>Inter-bank call money</u>				
UOB Singapore		-	799.174	8.476
		-		8.476
		58.796.593		57.243.168
		93.613.369		65.037.585
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
<u>Inter-bank call money</u>				
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		70.000		-
		70.000		-
<u>Deposit on Call</u>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		-		3.000
		-		3.000
<u>Deposito berjangka</u>				
PT Bank Tabungan				
Negara (Persero) Tbk		388.100		271.750
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		313.855		-
PT Bank Negara Indonesia				
(Persero) Tbk		122.300		113.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		67.490		42.100
PT Bank BNI Syariah		-		6.500
PT Bank Syariah Mandiri		-		12.000
		891.745		445.350
		961.745		448.350

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.000.000	1.160.000	75.000.000	1.053.750
		1.160.000		1.053.750
<u>Deposito berjangka</u>				
<u>PT Bank Tabungan</u>				
Negara (Persero) Tbk	400.000	5.800		-
		5.800		-
		2.127.545		1.502.100
Total		95.740.914		66.539.685
Cadangan kerugian penurunan nilai		(9.312)		(18.070)
Bersih		95.731.602		66.521.615

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	34.744.776	7.789.417
> 1 bulan - 3 bulan	72.000	5.000
	34.816.776	7.794.417
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	51.196.669	48.533.997
> 1 bulan - 3 bulan	7.309.924	8.428.171
> 3 bulan - 1 tahun	290.000	281.000
	58.796.593	57.243.168
	93.613.369	65.037.585

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	961.245	448.350
> 1 bulan - 3 bulan	500	-
	<u>961.745</u>	<u>448.350</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	78.300	843.000
> 3 bulan - 1 tahun	1.087.500	210.750
	<u>1.165.800</u>	<u>1.053.750</u>
	<u>2.127.545</u>	<u>1.502.100</u>
Total	95.740.914	66.539.685
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.312)	(18.070)
Bersih	<u>95.731.602</u>	<u>66.521.615</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	2,84%	3,21%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	3,57	3,46
<u>Mata Uang Asing</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	0,07%	0,08%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	0,57	0,72

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

- e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif.

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga</u>				
<u>Keuangan Lain</u>				
Nilai tercatat awal	66.539.685	-	-	66.539.685
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	95.740.914	-	-	95.740.914
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(66.539.685)	-	-	(66.539.685)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	95.740.914	-	-	95.740.914
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga</u>				
<u>Keuangan Lain</u>				
Nilai tercatat awal	116.854.727	-	-	116.854.727
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	66.539.685	-	-	66.539.685
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(116.854.727)	-	-	(116.854.727)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	66.539.685	-	-	66.539.685

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

- e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif (lanjutan).

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

30 Juni 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	18.070	-	-	18.070
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	9.312	-	-	9.312
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.070)	-	-	(18.070)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	9.312	-	-	9.312
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	668
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	668	-	-	668
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	18.070	-	-	18.070
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(668)	-	-	(668)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	18.070	-	-	18.070

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2020, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain yang dibatasi penggunaannya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

- e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain secara individual dengan menggunakan bukti objektif (lanjutan).

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya mengalami penurunan nilai secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

7. EFEK-EFEK

- a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Reksadana		3.298.150		3.279.238
Obligasi Subordinasi		49.069		48.313
Obligasi		18.702		18.511
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		-		49.419
Lainnya		84.174		86.443
		3.450.095		3.481.924
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Reksadana	178.924.536	2.594.406	332.234.586	4.667.896
<i>U.S. Treasury Bond</i>		-	1.054.531	14.816
Lainnya	4.098.138	59.423	4.229.395	59.423
		2.653.829		4.742.135
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>		-	1.000.000	10.606
		-		10.606
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		12.562.732		18.358.072
Reksadana		1.250.188		336.835
Obligasi		99.711		300.911
Surat Berharga Komersial		48.308		-
Obligasi Subordinasi		2.043		-
Lainnya		173.432		163.721
		14.136.414		19.159.539
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	15.867.649	230.081	11.108.388	156.073
Obligasi	1.510.091	21.896	4.915.950	69.069
		251.977		225.142
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	490.255	8.460	2.708.198	46.674
		8.460		46.674
		20.500.775		27.666.020

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi		3.468.516		3.032.475
Reksadana		1.226.200		473.676
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		249.316		582.047
Obligasi Subordinasi		167.176		196.344
Lainnya		112.617		153.767
		5.223.825		4.438.309
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Sertifikat Bank Indonesia	742.341.372	10.763.950	759.730.066	10.674.207
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	55.186.624	800.206	55.409.192	778.499
Obligasi	17.535.910	254.271	13.478.482	189.373
<i>U.S. Treasury Bills</i>		-	14.999.734	210.746
		11.818.427		11.852.825
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills</i>	76.977.507	830.394	76.980.563	816.470
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	42.047.100	453.583	37.928.360	402.275
		1.283.977		1.218.745
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		85.364.053		109.882.540
Obligasi		9.638.344		10.343.017
<i>Medium-Term Note</i>		202.084		341.167
Obligasi Subordinasi		26.558		-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		-		98.415
Lainnya		113.443		141.189
		95.344.482		120.806.328
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	3.689.432.922	53.496.777	3.440.535.854	48.339.529
Obligasi	216.904.739	3.145.119	140.936.158	1.980.153
		56.641.896		50.319.682
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	52.374.829	903.804	52.804.334	910.053
		903.804		910.053
<u>Yen Jepang</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.300.005.605	170.522		-
		170.522		-
		171.386.933		189.545.942

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Biaya perolehan diamortisasi				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi		296.683		409.984
Obligasi Subordinasi		34.575		35.065
Medium-Term Note		-		50.000
Lainnya		10.916		5.698
		<u>342.174</u>		<u>500.747</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Lainnya	492.712.148	7.144.326	193.461.866	2.718.139
		<u>7.144.326</u>		<u>2.718.139</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		73.205.588		78.609.483
Obligasi		1.141.143		1.363.436
Medium-Term Note		11.000		236.000
Obligasi Subordinasi		7.000		-
		<u>74.364.731</u>		<u>80.208.919</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	1.892.467.374	27.440.777	1.854.581.018	26.056.863
Obligasi	26.386.738	382.608	34.487.241	484.546
		<u>27.823.385</u>		<u>26.541.409</u>
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	25.051.523	432.300	25.209.935	434.479
		<u>432.300</u>		<u>434.479</u>
		<u>110.106.916</u>		<u>110.403.693</u>
Total		301.994.624		327.615.655
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(856.335)		(348.941)
Bersih		<u>301.138.289</u>		<u>327.266.714</u>

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International Tbk diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

Atas hal tersebut di atas, pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 manajemen BRI Life telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp758.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	8.729.461	7.930.990
> 1 bulan - 3 bulan	6.135	5.698
> 3 bulan - 1 tahun	151.651	312.536
> 1 tahun	128.847	171.756
	<u>9.016.094</u>	<u>8.420.980</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	16.492.476	19.043.814
> 1 bulan - 3 bulan	2.522.145	444.151
> 3 bulan - 1 tahun	3.885.938	1.054.485
	<u>22.900.559</u>	<u>20.542.450</u>
	<u>31.916.653</u>	<u>28.963.430</u>
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	116.344.796	139.965.867
> 1 bulan - 3 bulan	80.000	322.090
> 3 bulan - 1 tahun	2.533.723	9.556.408
> 1 tahun	64.887.108	70.330.421
	<u>183.845.627</u>	<u>220.174.786</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	58.078.486	51.501.551
> 1 bulan - 3 bulan	-	168.648
> 3 bulan - 1 tahun	2.198.493	1.400.796
> 1 tahun	25.955.365	25.406.444
	<u>86.232.344</u>	<u>78.477.439</u>
	<u>270.077.971</u>	<u>298.652.225</u>
 Total	<u>301.994.624</u>	<u>327.615.655</u>
 Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	 (856.335)	 (348.941)
Bersih	<u>301.138.289</u>	<u>327.266.714</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds*, *U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Surat Perbendaharaan Negara	7.652.459	11.586.330
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	2.409.199	2.187.408
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.935.748	2.996.361
Obligasi Pemerintah Sukuk	419.695	1.274.953
Obligasi Republik Indonesia	145.631	313.020
	12.562.732	18.358.072
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah Sukuk	185.888	77.648
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	44.193	78.425
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	8.460	46.674
<i>Singapore Government Securities</i> (SIGB)	-	10.606
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	-	14.816
	238.541	228.169
	12.801.273	18.586.241
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	58.531.931	71.274.544
Obligasi Pemerintah Sukuk	24.177.199	33.314.783
Obligasi Republik Indonesia	2.654.923	1.891.155
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	-	1.782.623
Surat Perbendaharaan Negara	-	1.619.435
	85.364.053	109.882.540

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds*, *U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
(lanjutan)		
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	29.093.577	28.602.080
Obligasi Pemerintah Sukuk	24.403.200	19.737.449
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	903.804	910.053
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	800.206	778.499
<i>Singapore Government Securities</i> (SIGB)	453.583	402.275
Obligasi Pemerintah Yen Jepang	170.522	-
<i>U.S. Treasury Bills</i>	-	210.746
	55.824.892	50.641.102
	141.188.945	160.523.642
Biaya perolehan diamortisasi		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	60.333.384	53.497.079
Obligasi Pemerintah Sukuk	12.310.022	25.007.050
Surat Perbendaharaan Negara	400.000	34.371
Obligasi Republik Indonesia	162.182	70.983
	73.205.588	78.609.483
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	15.073.551	14.264.437
Obligasi Pemerintah Sukuk	12.367.226	11.792.426
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	432.300	434.479
	27.873.077	26.491.342
	101.078.665	105.100.825
Total	255.068.883	284.210.708

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Rupiah	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
FR0035	12,90	15 Juni 2022
FR0037	12,00	15 September 2026
FR0039	11,75	15 Agustus 2023
FR0040	11,00	15 September 2025
FR0042	10,25	15 Juli 2027
FR0043	10,25	15 Juli 2022
FR0044	10,00	15 September 2024
FR0045	9,75	15 Mei 2037
FR0046	9,50	15 Juli 2023
FR0047	10,00	15 Februari 2028
FR0050	10,50	15 Juli 2038
FR0052	10,50	15 Agustus 2030
FR0053	8,25	15 Juli 2021
FR0054	9,50	15 Juli 2031
FR0056	8,38	15 September 2026
FR0057	9,50	15 Mei 2041
FR0058	8,25	15 Juni 2032
FR0059	7,00	15 Mei 2027
FR0061	7,00	15 Mei 2022
FR0062	6,38	15 April 2042
FR0063	5,63	15 Mei 2023
FR0064	6,13	15 Mei 2028
FR0065	6,63	15 Mei 2033
FR0067	8,75	15 Februari 2044
FR0068	8,38	15 Maret 2034
FR0070	8,38	15 Maret 2024
FR0071	9,00	15 Maret 2029
FR0072	8,25	15 Mei 2036
FR0073	8,75	15 Mei 2031
FR0074	7,50	15 Agustus 2032
FR0075	7,50	15 Mei 2038
FR0076	7,38	15 Mei 2048
FR0077	8,13	15 Mei 2024
FR0078	8,25	15 Mei 2029
FR0079	8,38	15 April 2039
FR0080	7,50	15 Juni 2035
FR0081	6,50	15 Juni 2025
FR0082	7,00	15 September 2030

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i> (lanjutan)		
FR0083	7,50	15 April 2040
FR0084	7,25	15 Februari 2026
FR0085	7,75	15 April 2031
FR0086	5,50	15 April 2026
FR0087	6,50	15 Februari 2031
FR0088	6,25	15 Juni 2036
FR0089	6,88	15 Agustus 2051
Obligasi Pemerintah Sukuk		
IFR0006	10,25	15 Maret 2030
IFR0007	10,25	15 Januari 2025
IFR0010	10,00	15 Februari 2036
PBS002	5,45	15 Januari 2022
PBS003	6,00	15 Januari 2027
PBS004	6,10	15 Februari 2037
PBS005	6,75	15 April 2043
PBS007	9,00	15 September 2040
PBS011	8,75	15 Agustus 2023
PBS012	8,88	15 November 2031
PBS015	8,00	15 Juli 2047
PBS017	6,13	15 Oktober 2025
PBS019	8,25	15 September 2023
PBS021	8,50	15 November 2026
PBS022	8,63	15 April 2034
PBS023	8,13	15 Mei 2023
PBS025	8,38	15 Mei 2033
PBS026	6,63	15 Oktober 2024
PBS027	6,50	15 Mei 2023
PBS028	7,75	15 Oktober 2046
PBS029	6,38	15 Maret 2034
PBS030	5,88	15 Juli 2028
SR011	8,05	10 Maret 2022
SR012	6,30	10 Maret 2023
SR013	6,05	10 September 2023
SR014	5,47	10 Maret 2024
Obligasi Republik Indonesia		
ORI015	8,25	15 Oktober 2021
ORI016	6,80	15 Oktober 2022
ORI017	6,40	15 Juli 2023
ORI018	5,70	15 Oktober 2023
ORI019	5,57	15 Februari 2024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

<u>Mata uang asing</u>	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat		
RI0122	3,70	8 Januari 2022
RI0123	2,95	11 Januari 2023
RI0124	5,88	15 Januari 2024
RI0125	4,13	15 Januari 2025
RI0126	4,75	8 Januari 2026
RI0127	4,35	8 Januari 2027
RI0128	3,50	11 Januari 2028
RI0138	7,75	17 Januari 2038
RI0142	5,25	17 Januari 2042
RI0144	6,75	15 Januari 2044
RI0145	5,13	15 Januari 2045
RI0146	5,95	8 Januari 2046
RI0147	5,25	8 Januari 2047
RI0148	4,35	11 Januari 2048
RI0224	4,45	11 Februari 2024
RI0229	4,75	11 Februari 2029
RI0230	2,85	14 Februari 2030
RI0237	6,63	17 Februari 2037
RI0238	7,75	17 Januari 2038
RI0249	5,35	11 Februari 2049
RI0250	3,50	14 Februari 2050
RI0327	4,35	8 Maret 2027
RI0331	1,85	12 Maret 2031
RI0351	3,05	12 Maret 2051
RI0371	3,35	12 Maret 2071
RI0422	3,75	25 April 2022
RI0423	3,38	15 April 2023
RI0428	4,10	24 April 2028
RI0443	4,63	15 April 2043
RI0470	4,45	15 April 2070
RI0727	3,85	18 Juli 2027
RI0747	4,75	18 Juli 2047
RI0929	3,40	18 September 2029
RI1023	5,38	17 Oktober 2023
RI1030	3,85	15 Oktober 2030
RI1035	8,50	12 Oktober 2035
RI1049	3,70	30 Oktober 2049
RI1050	4,20	15 Oktober 2050
USDFR0002	4,05	24 Juni 2026

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
Obligasi Pemerintah Sukuk		
INDOIS 22	3,40	21 November 2022
INDOIS 22A	3,40	29 Maret 2022
INDOIS 23	3,75	1 Maret 2023
INDOIS 24	4,35	10 September 2024
INDOIS 24A	3,90	20 Agustus 2024
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 25A	2,30	23 Juni 2025
INDOIS 26	4,55	29 Maret 2026
INDOIS 26A	1,50	9 Juni 2026
INDOIS 27	4,15	29 Maret 2027
INDOIS 28	4,40	1 Maret 2028
INDOIS 29	4,45	20 Februari 2029
INDOIS 29A	3,40	18 September 2029
INDOIS 30	2,80	23 Juni 2030
INDOIS 31	2,55	9 Juni 2031
INDOIS 51	3,55	9 Juni 2051
Obligasi Pemerintah Euro Eropa		
RIEUR0227	0,90	14 Februari 2027
RIEUR0333	1,10	12 Maret 2033
RIEUR0623	2,63	14 Juni 2023
RIEUR0721	2,88	8 Juli 2021
RIEUR0724	2,15	18 Juli 2024
RIEUR0725	3,38	30 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Yen Jepang		
RIJPY0524	0,33	27 Mei 2024
RIJPY0526	0,57	27 Mei 2026
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	Beragam	Beragam
<i>U.S Treasury Bills</i>	Beragam	Beragam
Singapore Government Securities		
SIGB 0625	2,38	1 Juni 2025
SIGB 0626	2,13	1 Juni 2026
SIGB 1125	0,50	1 November 2025

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain" berkisar dari 93,52% sampai dengan 151,37% dan 94% sampai dengan 157,20% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Indosat Tbk	10.757	10.592
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.163	5.137
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.782	2.782
	18.702	18.511
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	69.541	100.656
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	19.996	22.626
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5.221	55.033
PT Timah (Persero) Tbk	4.953	4.955
PT Pupuk Indonesia (Persero)	-	55.123
PT Pegadaian (Persero)	-	25.046
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	20.696
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	16.776
	99.711	300.911
 <u>Mata Uang Asing</u>		
PT Pertamina (Persero)	21.896	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	54.020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	15.049
	21.896	69.069
	140.309	388.491
 <u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	699.314	433.518
PT Astra Sedaya Finance	643.581	441.156
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	602.713	600.216
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	254.363	195.552
PT Bank Pan Indonesia Tbk	189.561	129.998
PT Federal International Finance	183.639	150.976
PT BCA Finance	166.834	160.760
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	135.153	123.051
PT Bank Maybank Indonesia Finance	117.267	24.541
PT Indosat Tbk	111.696	62.107
Lainnya	364.395	710.600
	3.468.516	3.032.475

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Indonesia Infrastructure Finance	74.455	-
Bank of America	9.469	9.452
Citigroup, Inc.	8.254	8.173
JP Morgan Chase Bank, N.A	7.915	7.878
CVS Health Corp	6.950	4.327
The Royal Bank of Canada	6.032	5.954
Verizon Communications, Inc.	5.928	5.910
Stanley Black & Decker, Inc.	5.885	5.642
Bank Nova Scotia	5.644	5.330
Enterprise Products Operating, LLC	5.611	5.546
Lainnya	118.128	131.161
	<u>254.271</u>	<u>189.373</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.083.487	1.133.196
PT Pupuk Indonesia (Persero)	911.312	278.174
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	871.869	589.026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	829.625	800.687
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	822.877	1.392.283
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	797.020	872.833
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	778.174	1.044.633
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	679.088	713.650
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	519.267	553.208
PT Pegadaian (Persero)	501.651	502.217
Lainnya	1.843.974	2.463.110
	<u>9.638.344</u>	<u>10.343.017</u>
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Indonesia Asahan Aluminium	788.504	-
PT Pertamina (Persero)	708.293	717.857
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	450.016	334.488
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	407.203	319.186
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	371.940	315.232
PT Sarana Multi Infrastruktur	183.190	-
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	140.853	136.860
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	79.523	138.858
PT Hutama Karya (Persero)	15.597	17.672
	<u>3.145.119</u>	<u>1.980.153</u>
	<u>16.506.250</u>	<u>15.545.018</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Indosat Tbk	92.799	92.960
PT Indonesia Infrastructure Finance	70.000	70.000
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	66.023	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk	50.041	185.105
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000	10.000
PT Aneka Gas Industri Tbk	3.046	3.062
PT XL Axiata Indonesia Tbk	2.010	2.025
PT Bank UOB Indonesia	2.006	2.016
PT Great River International Tbk	758	758
PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance Tbk	-	5.030
Lainnya	-	39.028
	296.683	409.984
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	375.368	378.571
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	232.417	261.649
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	200.226	200.257
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	133.245	223.426
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	80.000	80.001
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35.000	35.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	30.330	30.489
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30.000	30.000
PT Bank Mandiri (Persero)	10.548	-
PT Industri Kereta Api	10.000	10.000
Lainnya	4.009	114.043
	1.141.143	1.363.436
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	211.258	204.778
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	57.932	56.058
PT Pertamina (Persero)	51.900	164.199
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	38.542	37.196
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	22.976	22.315
	382.608	484.546
	1.820.434	2.257.966
Total	18.466.993	18.191.475

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT AKR Corporindo Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri C	9,00	7 Juli 2024	idAA-
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk			
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri C	8,40	14 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	8,90	22 Maret 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,55	12 Desember 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	7,50	21 Maret 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri C	8,50	16 Agustus 2021	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri D	9,00	16 Agustus 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	9,50	23 Januari 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019 Seri B	8,60	16 April 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019 Seri C	9,15	16 April 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019 Seri B	7,80	4 Oktober 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019 Seri C	8,10	4 Oktober 2024	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 Seri B	7,90	7 Juli 2023	idAAA
PT Aneka Gas Industri			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	9,90	5 Desember 2022	A-(idn)
Sukuk <i>Ijarah</i> berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	9,90	5 Desember 2022	A-(idn)sy
Sukuk <i>Ijarah</i> berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019 Seri B	11,00	19 Maret 2022	A-(idn)sy
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019 Seri A	11,00	19 Maret 2022	A-(idn)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A	8,00	11 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri C	8,65	11 Juli 2027	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	7,15	15 Maret 2023	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	8,50	3 Juli 2022	idAAA
PT Bank Danamon Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 Seri B	8,55	24 Mei 2022	AAA(idn)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	7,65	2 November 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 Seri C	9,20	13 Februari 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2019 Seri B	7,70	23 Oktober 2022	idAAA
Seri C	7,95	23 Oktober 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2020 Seri B	7,00	27 Maret 2023	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	6,35	15 April 2024	idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,15	23 Agustus 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	7,75	2 November 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017 Seri C	8,80	20 September 2023	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019	7,80	19 Desember 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri B	7,55	19 Desember 2022	idAAA
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri B	7,90	21 Agustus 2022	idAAA
Tahap II Tahun 2019 Seri C	8,25	21 Agustus 2024	idAAA
Tahap III Tahun 2020 Seri B	7,00	27 Maret 2023	idAAA
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk			
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Seri A	7,55	26 November 2022	idAAA
Seri B	7,75	26 November 2024	idAAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	8,75	27 Oktober 2021	idAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	7,60	27 Februari 2023	idAA
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,15	6 Desember 2022	idAA-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019 Seri B	8,50	18 Oktober 2024	idAA-
PT BCA Finance			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C	7,80	5 November 2022	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Bank QNB Indonesia Tbk Berkelanjutan Tahap I Tahun 2019	9,50	5 Juli 2022	AAA(idn)
PT BFI Finance Indonesia Tbk Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 Seri B	10,50	22 Februari 2022	A+(idn)
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	9,10	12 Desember 2022	idAA-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri C	9,00	1 Maret 2025	idAA-
PT Federal International Finance Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 Seri B	8,75	25 September 2021	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Seri B	8,55	25 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 Seri B	7,25	7 Oktober 2023	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 Seri B	6,25	8 Juni 2024	idAAA
PT Indah Kiat Pulp & Paper Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 Seri B	10,00	11 Desember 2023	idA+
Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2021 Seri B	9,50	23 Maret 2024	idA+
PT Indomobil Finance Indonesia Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri C	8,15	15 Februari 2023	idA
PT Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2016 Seri B	8,70	19 Juli 2021	idAAA
Seri C	9,00	19 Juli 2023	idAAA
Tahap I Tahun 2019 Seri B	7,75	18 Desember 2022	idAAA
Tahap II Tahun 2020 Seri B	6,65	21 Oktober 2023	idAAA
PT Jakarta Lingkar Baratsatu Obligasi I Tahun 2018 Seri A	9,75	20 September 2021	idA+
PT Maybank Indonesia Finance Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7,90	15 November 2022	AA+(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Seri A	9,00	2 April 2022	AA+(idn)
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021	6,30	23 Juni 2024	AA+(idn)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Great River International Tbk I Tahun 2003	12,55	13 Oktober 2008	D
PT Indosat Tbk Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B	8,88	27 Juni 2022	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 Seri C	10,50	12 Desember 2021	idAAA(sy)
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20	8 Desember 2025	idAAA(sy)
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	11,20	8 Desember 2025	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri E	9,25	31 Mei 2027	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	8,65	9 November 2027	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,65	3 Mei 2023	idAAA
Seri E	8,70	3 Mei 2028	idAAA
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Sukuk <i>Mudharabah</i> I Tahun 2018 Seri A	10,00	10 Oktober 2021	idA(sy)
PT Medco Energi Internasional Tbk Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri C	11,30	14 Juni 2022	idA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 Seri B	9,15	29 Maret 2023	idA+
PT Medco Power Indonesia Sukuk <i>Wakalah</i> II Tahun 2019 Seri A	10,00	23 Mei 2022	idA(sy)
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,50	3 April 2023	idA+
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016	9,25	1 Juli 2021	AA+(idn)
PT Bank UOB Indonesia Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016 Seri C	8,25	25 November 2021	AAA(idn)
PT XL Axiata Tbk Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri A	9,10	16 Oktober 2021	AAA(idn)
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	9,10	16 Oktober 2021	AAA(idn)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Abbot Laboratories	1,40	30 Juni 2030	A2**)
Amazon.com, Inc.	3,15	22 Agustus 2027	A1**)
Amgen, Inc.	2,20	21 Februari 2027	Baa1**)
Anthem, Inc.			
Tahun 2025	2,38	15 Januari 2025	Baa2**)
Tahun 2027	3,65	1 Desember 2027	Baa2**)
Anheuser-Busch	3,50	1 Juni 2030	Baa1**)
Automatic Data Processing	1,25	1 September 2030	Aa3**)
Astrazeneca PLC	0,70	8 April 2026	A3**)
Apple, Inc.	3,20	11 Mei 2027	Aa1**)
AT&T, Inc.			
Tahun 2027	4,25	1 Maret 2027	Baa2**)
Tahun 2028	1,65	1 Februari 2028	Baa2**)
Tahun 2031	2,75	1 Juni 2031	Baa2**)
Bank of America			
Tahun 2026	1,32	19 Juni 2026	A2**)
Tahun 2026	3,50	19 April 2026	A2**)
Tahun 2031	2,50	13 Februari 2031	A2**)
Tahun 2031	1,92	24 Oktober 2031	A2**)
Bank of Montreal	2,55	6 November 2022	Aa2**)
Bank of New York Mellon	1,60	24 April 2025	A1**)
The Bank of Nova Scotia			
Tahun 2024	0,70	15 April 2024	A2**)
Tahun 2025	1,30	11 Juni 2025	A2**)
Tahun 2025	4,50	16 Desember 2025	Baa1**)
Truist Financial Corporation			
Tahun 2023	2,20	16 Maret 2023	A3**)
Tahun 2025	3,63	16 Desember 2025	A3**)
Berkshire Hathaway, Inc.			
Tahun 2023	2,75	15 Maret 2023	Aa2**)
Tahun 2030	1,85	12 Maret 2030	Aa2**)
B.P Capital	3,28	19 September 2027	A2**)
Bristol Myers Squibb	3,40	26 Juli 2029	A2**)
The Canadian Imperial Bank of Commerce			
Tahun 2024	3,10	2 April 2024	A2**)
Tahun 2025	2,25	28 Januari 2025	A2**)
Chevron Corporation	2,95	16 Mei 2026	Aa2**)
Citigroup, Inc.			
Tahun 2024	3,75	16 Juni 2024	A3**)
Tahun 2028	3,52	27 Oktober 2028	A3**)
Tahun 2031	2,67	29 Januari 2031	A3**)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat (lanjutan)</u>			
The Coca Cola Company	2,13	6 September 2029	A1**)
Comcast Corporation			
Tahun 2026	3,15	1 Maret 2026	A3**)
Tahun 2027	2,35	15 Januari 2027	A3**)
CVS Health Corporation			
Tahun 2023	3,70	9 Maret 2023	Baa2**)
Tahun 2027	3,63	1 April 2027	Baa2**)
Tahun 2030	1,75	21 Agustus 2030	Baa2**)
Duke Energy Corporation	2,45	1 Februari 2030	Aa3**)
Enbridge, Inc.	3,70	15 Juli 2027	Baa1**)
Enterprise Products Operating LLC			
Tahun 2023	3,35	15 Maret 2023	Baa1**)
Tahun 2028	4,15	16 Oktober 2028	Baa1**)
Equinor ASA	2,88	6 April 2025	Aa2**)
Exxon Corporation	3,04	1 Maret 2026	Aa2**)
General Motors Company	1,25	8 Januari 2026	Baa3**)
Goldman Sachs			
Tahun 2024	4,00	3 Maret 2024	A2**)
Tahun 2028	3,69	5 Juni 2028	A2**)
JP Morgan Chase Bank, N.A			
Tahun 2025	3,22	1 Maret 2025	A2**)
Tahun 2026	2,01	13 Maret 2026	A2**)
Tahun 2029	4,45	5 Desember 2029	A2**)
PT Indonesia Infrascturcture Finance	1,50	27 Januari 2026	BBB(idn)
Lowe's Cos Inc	4,00	15 April 2025	Baa1**)
Kinder Morgan, Inc.	4,15	1 Februari 2024	Baa2**)
Manulife Financial Corporation	4,15	4 Maret 2026	A***)
Merck & Co., Inc.	2,75	10 Februari 2025	A1**)
Microsoft Corporation	3,30	6 Februari 2027	Aaa**)
NextEra Energy, Inc	2,25	1 Juni 2030	Baa1**)
Norfolk Southern Corporation	2,90	15 Juni 2026	Baa1**)
Oracle Corporation	3,25	15 November 2027	Baa2**)
Pacific Corporation	2,70	15 September 2030	A1**)
PepsiCo, Inc.			
Tahun 2029	2,63	29 Juli 2029	A1**)
PNC Finansial Services Group, Inc.			
Tahun 2025	2,95	23 Februari 2025	A2**)
Tahun 2030	2,55	22 Januari 2030	A3**)
The Procter & Gamble Company	3,00	25 Maret 2030	Aa3**)
Prologis, Inc.	2,25	15 April 2030	A3**)
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	3,68	22 Februari 2027	A1**)
Rogers Communications, Inc.	4,10	1 Oktober 2023	Baa1**)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat (lanjutan)</u>			
The Royal Bank of Canada			
Tahun 2024	2,55	16 Juli 2024	A2**)
Tahun 2025	1,15	10 Juni 2025	A2**)
Tahun 2026	4,65	27 Januari 2026	Baa1**)
Shell International Finance BV	3,25	11 Mei 2025	Aa2**)
Stanley Black & Decker, Inc.			
Tahun 2024	3,70	23 Oktober 2024	A1**)
Tahun 2027	3,63	20 Januari 2027	A1**)
Tahun 2027	1,59	4 Mei 2027	A1**)
Tahun 2031	2,70	22 Januari 2031	A1**)
Transcanada Pipelines	4,25	15 Mei 2028	Baa1**)
United Bancorp, Inc	3,15	27 April 2027	A1**)
United Technologies Corporation	3,95	16 Agustus 2025	Baa1**)
Ventas, Inc.	3,00	15 Januari 2030	Baa1**)
Verizon Communications, Inc.			
Tahun 2025	3,38	15 Februari 2025	Baa1**)
Tahun 2028	4,33	21 September 2028	Baa1**)
Walmart, Inc.	3,05	8 Juli 2026	Aa2**)
Wells Fargo & Company			
Tahun 2026	2,16	11 Februari 2026	A2**)
Tahun 2029	4,15	24 Januari 2029	A2**)
Welltower, Inc.	3,10	15 Januari 2030	Baa1**)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT Adhi Karya (Persero) Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	9,25	22 Juni 2022	idA-
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019			
Seri B	9,75	25 Juni 2024	idA-
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahun 2011			
Seri B	9,05	14 Desember 2021	idA
PT Angkasa Pura I (Persero)			
Berkelanjutan I Tahun 2016			
Seri C	8,55	22 November 2026	idAA+
PT Angkasa Pura II (Persero)			
Berkelanjutan I Tahun 2016			
Seri C	9,00	30 Juni 2026	idAA+
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018			
Seri B	8,95	12 Desember 2023	idAA+
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016			
Seri A	7,95	30 September 2021	idAAA
Seri B	8,50	30 September 2023	idAAA
Seri C	8,65	30 September 2026	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
Rupiah (lanjutan)			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017			
Seri A	8,00	15 Juni 2022	idAAA
Seri B	8,50	15 Juni 2024	idAAA
Seri C	8,65	15 Juni 2027	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018			
Seri A	8,50	21 September 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020			
Seri A	7,75	12 Mei 2025	idAAA
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017			
	8,00	11 Juli 2022	idAAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013			
	7,90	27 Maret 2023	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015			
Seri C	10,00	8 Juli 2022	idAA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016			
Seri B	8,75	30 Agustus 2021	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017			
Seri B	8,50	13 Juli 2022	idAA+
Seri D	8,90	13 Juli 2027	idAA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019			
Seri B	8,75	28 Juni 2022	idAA+
Seri C	9,00	28 Juni 2024	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020			
Seri A	6,75	29 Agustus 2021	idAA+
Seri B	7,80	19 Agustus 2023	idAA+
PT Bank Mandiri Taspen			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019			
Seri A	7,90	26 November 2022	idAA
Seri B	8,20	26 November 2024	idAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021			
Seri A	6,50	28 April 2024	idAA
PT Utama Karya (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016			
	8,55	21 Desember 2026	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017			
	8,07	6 Juni 2027	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017			
Seri A	7,80	26 September 2022	idAAA
PT Indonesia Power			
EBA Danrek Indo Power PLN I Th 17			
Kelas A	8,02	19 September 2022	idAAA
PT Industri Kereta Api (Persero)			
<i>Mudharabah</i> I Tahun 2020			
	9,35	24 Februari 2023	idBBB+(sy)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Kereta Api Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan II Tahun 2017			
Seri A	7,75	21 November 2022	idAA+
Seri B	8,25	21 November 2024	idAA+
Berkelanjutan II Tahun 2019			
Seri A	7,75	13 Desember 2024	idAA+
Seri B	8,20	13 Desember 2026	idAA+
PT Mandiri Tunas Finance			
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019			
Seri A	9,40	8 Januari 2022	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019			
Seri A	8,90	26 Juli 2022	idAA+
Seri B	9,50	26 Juli 2024	idAA+
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016			
Seri C	8,20	22 November 2021	idAAA
Seri D	8,50	22 November 2023	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017			
Seri C	8,90	23 Februari 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017			
Seri B	7,90	15 Agustus 2022	idAAA
Seri C	8,25	15 Agustus 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018			
Seri B	6,70	14 Februari 2023	idAAA
Seri C	6,90	14 Februari 2025	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018			
Seri C	8,30	6 Juni 2025	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018			
Seri C	8,40	5 September 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018			
Seri D	9,75	8 November 2025	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019			
Seri B	8,40	23 April 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019			
Seri C	8,90	23 April 2024	idAAA
Seri D	9,25	23 April 2026	idAAA
Seri E	9,50	23 April 2029	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019			
Seri B	8,45	9 Juli 2022	idAAA
Seri C	8,70	9 Juli 2024	idAAA
Seri D	9,20	9 Juli 2026	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019			
Seri D	8,50	3 September 2026	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019			
Seri D	8,50	29 Oktober 2026	idAAA
Seri E	8,75	29 Oktober 2029	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (lanjutan)			
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019 Seri C	8,10	6 Desember 2026	idAAA
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Seri B	8,75	8 November 2021	idAAA(sy)
PT Pegadaian (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2011 Seri C	9,00	11 Oktober 2021	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,70	3 Oktober 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri C	7,10	16 Maret 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 Seri B	7,60	8 Juli 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2020 Seri B	6,45	22 September 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2021 Seri B	6,20	6 April 2024	idAAA
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	10,90	10 Juli 2022	idAAA
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	10,40	8 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25	5 Juli 2023	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	10 Desember 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,20	3 November 2027	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri D	8,70	3 November 2032	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,25	22 Februari 2028	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,75	22 Februari 2038	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019 Seri B	9,10	19 Februari 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019 Seri D	9,60	19 Februari 2029	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A	8,00	1 Agustus 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri C	8,70	1 Agustus 2029	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)			
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019			
Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA
Seri B	8,40	1 Oktober 2026	idAAA
Seri D	9,40	1 Oktober 2034	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020			
Seri A	7,20	18 Februari 2025	idAAA
Seri B	7,70	18 Februari 2027	idAAA
Seri C	8,00	18 Februari 2030	idAAA
Seri D	8,70	18 Februari 2035	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020			
Seri A	6,70	8 September 2025	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Tahap V Tahun 2010			
Seri B	10,40	8 Juli 2022	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B			
	9,60	10 Desember 2023	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A			
	7,70	11 Juli 2022	idAAA
Tahun 2017 Seri B			
	8,50	11 Juli 2027	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C			
	8,70	3 November 2032	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri A			
	6,50	22 Februari 2023	idAAA
Tahun 2018 Seri B			
	7,25	22 Februari 2028	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B			
	9,00	10 Oktober 2025	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2018 Seri A			
	7,90	1 Oktober 2024	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri B			
	8,50	1 Agustus 2026	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri C			
	8,75	18 Februari 2035	idAAA
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019			
Seri A	8,25	27 November 2022	idA
Seri B	8,50	27 November 2024	idA
PT Pembangunan Perumahan Properti (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019			
	11,15	22 Februari 2022	idBBB-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019			
	11,00	19 Juli 2022	idBBB-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017			
Seri B	9,25	12 Juli 2022	idA+
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018			
Seri B	8,50	13 April 2023	idA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019			
Seri A	9,50	28 Mei 2022	idA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019			
Seri A	8,40	28 November 2022	idA+
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)			
Berkelanjutan I Tahun 2020			
Seri A	9,95	1 September 2023	idA
Seri B	10,55	1 September 2025	idA
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017			
Seri B	8,60	12 Juli 2024	AAA(idn)
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017			
Seri B	7,90	9 November 2022	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020			
Seri A	7,00	3 September 2023	AAA(idn)
Seri B	7,70	3 September 2025	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021			
Seri A	5,60	10 Maret 2024	AAA(idn)
Seri B	6,20	10 Maret 2026	AAA(idn)
Seri C	7,20	10 Maret 2028	AAA(idn)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2016			
	8,60	27 September 2021	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018			
Seri C	6,95	20 Februari 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019			
Seri B	8,80	12 Februari 2022	idAAA
Seri C	9,25	12 Februari 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019			
Seri B	8,45	22 Maret 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2019			
Seri B	8,50	4 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019			
Seri A	7,80	28 Agustus 2022	idAAA
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020			
Seri B	7,50	18 Februari 2025	idAAA
Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2020			
Seri B	8,10	14 Juli 2025	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (lanjutan)			
EBA SP SMF BTN05 Kelas A Seri A1 Berkelanjutan V Tahap V tahun 2021	8,50	7 Mei 2032	idAAA
Seri A	4,75	20 Februari 2022	idAAA
Seri B	5,75	10 Februari 2024	idAAA
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap II tahun 2017			
Seri C	7,60	15 November 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019			
Seri B	8,50	25 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019			
Seri D	8,50	28 Agustus 2026	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019			
Seri B	7,75	30 Oktober 2022	idAAA
Seri C	7,95	30 Oktober 2024	idAAA
Seri D	8,30	30 Oktober 2026	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019			
Seri A	7,80	28 Agustus 2022	idAAA
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA
Sukuk <i>Mudharabah</i> I Tahap II Tahun 2019			
Seri A	8,50	28 Agustus 2026	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2020			
Seri B	7,60	21 Juli 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2020			
Seri A	6,30	11 Desember 2023	idAAA
Seri B	6,70	11 Desember 2025	idAAA
PT Semen Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	8,60	20 Juni 2022	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019			
Seri A	9,00	28 Mei 2024	idAA+
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015			
Seri A	9,93	23 Juni 2022	idAAA
Seri B	10,25	23 Juni 2025	idAAA
Seri D	11,00	23 Juni 2045	idAAA
PT Timah (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017			
Seri B	8,75	28 September 2022	idA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019			
Seri A	8,50	15 Agustus 2022	idA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	8,75	15 Agustus 2024	idA(sy)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Waskita Karya (Persero)			
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	6 Oktober 2022	idBBB
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A	9,00	16 Mei 2022	idBBB
Seri B	9,75	16 Mei 2024	idBBB
PT Waskita Karya Beton Precast (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I 2019	9,95	5 Juli 2022	idBBB-
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019	9,75	30 Oktober 2022	idBBB-
<u>Mata Uang Asing</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Tahun 2024	3,75	11 April 2024	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	13 Mei 2025	BBB-***)
Tahun 2026	2,00	19 April 2026	BBB-***)
PT Hutama Karya (Persero) Tbk			
Tahun 2030	3,75	11 Mei 2030	BBB-***)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)			
Tahun 2021	5,23	15 November 2021	BBB-***)
Tahun 2023	5,71	15 November 2023	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	15 Mei 2025	BBB-***)
Tahun 2030	5,45	15 Mei 2030	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)			
Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)			
Tahun 2023	4,50	2 Mei 2023	BBB-***)
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024	BBB-***)
PT Pertamina (Persero)			
Tahun 2022	4,88	3 Mei 2022	BBB***)
Tahun 2023	4,30	20 Mei 2023	BBB***)
Tahun 2029	3,65	30 Juli 2029	BBB***)
Tahun 2030	3,10	22 Januari 2030	BBB***)
Tahun 2031	2,30	9 Februari 2031	BBB***)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk			
Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024	BBB-***)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahun 2021	5,50	22 November 2021	BBB***)
Tahun 2027	4,13	15 Mei 2027	BBB***)
Tahun 2029	5,38	25 Januari 2029	BBB***)
Tahun 2030	3,38	5 Februari 2030	BBB***)
Tahun 2050	4,00	30 Juni 2050	BBB***)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Tahun 2026	2,05	11 Mei 2026	BBB***)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***)) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Schroder Investment Management Indonesia	2.035.302	2.128.820
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	673.976	452.225
PT Sucorinvest Asset Management	466.121	61.705
PT Ashmore Asset Management Indonesia	53.116	58.046
PT Mega Capital Investama	21.002	20.781
PT BNP Paribas Investment Partners	16.411	15.758
PT Panin Asset Management	13.888	42.502
PT Avrist Asset Management	10.178	10.184
PT Insight Investments Management	8.156	7.996
PT RHB Asset Management Indonesia	-	12.576
Lainnya	-	468.645
	3.298.150	3.279.238
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Ashmore Asset Management Indonesia	1.419.141	1.406.892
PT BNP Paribas Asset Management	732.250	714.162
PT Schroder Investment Management Indonesia	443.015	434.456
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	-	2.112.386
	2.594.406	4.667.896
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Danareksa Investment Management	706.963	170.890
PT Bahana TCW Investment Management	508.613	131.442
PT Mandiri Manajemen Investasi	34.612	34.503
	1.250.188	336.835
	7.142.744	8.283.969
<u>Nilai Wajar melalui Penghasilan</u>		
<u>Komprehensif Lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	750.000	-
PT Trimegah Asset Management	476.200	473.676
	1.226.200	473.676
Total	8.368.944	8.757.645

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/ nilai tercatat	
				30 Juni 2021	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Tahun 2020 Seri C	50.000	4,28	8 Apr 2021	-	49.419
				-	49.419
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.					
V Tahap II Tahun 2020 Seri C	200.000	5,26	22 Jul 2021	199.549	194.876
V Tahap I Tahun 2020 Seri D	150.000	5,70	18 Feb 2021	-	149.160
PT Bank Maybank Indonesia Tbk XII Tahun 2020 Seri C	50.000	5,12	13 Ags 2021	49.767	48.576
PT Bank Commonwealth VII Tahap I Tahun 2020	190.000	5,94	29 Jan 2021	-	189.435
				249.316	582.047
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2020 Seri D	100.000	5,80	7 Mei 2021	-	98.415
				-	98.415
				249.316	680.462
Total				249.316	729.881

d.5. Obligasi Subordinasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Nilai wajar melalui laba rugi		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	33.475	33.170
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	15.594	15.143
	49.069	48.313

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	2.043	-
	2.043	-
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Permata Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	35.744	36.685
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	40.659	40.183
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	30.045	30.855
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	24.348	24.312
PT Bank UOB Indonesia		
Seri I Tahun 2014	-	28.641
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	21.549	21.059
PT Bank KEB Hana Indonesia		
Seri I Tahun 2016	9.718	9.630
PT Bank Central Asia Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	5.113	4.979
	167.176	196.344
<u>Pihak berelasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	26.558	-
	26.558	-
<u>Biaya Perolehan Diamortisasi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		
Subordinasi I 2015	34.575	35.065
	34.575	35.065
<u>Pihak berelasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	7.000	-
	7.000	-
Total	286.421	279.722

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	7,75	5 Jul 2025	idAA	idAA
Seri B	8,00	5 Jul 2030	idAA	idAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	11,35	8 Jul 2021	AA(idn)	AA(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Jun 2023	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Permata Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	11,75	24 Okt 2021	idAA	idAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Mar 2024	idA+	idA+
PT Bank UOB Indonesia Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Okt 2024	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Subordinasi I 2015	12,25	18 Des 2022	idA	idA
<u>Pihak berelasi</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Syariah Indonesia Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	9,25	16 Nov 2023	A(idn)	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

d.6. *Medium-Term Note* (MTN)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat	
				30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui</u>					
<u> <u>penghasilan</u></u>					
<u> <u>komprensif lain</u></u>					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2018 Seri C	100.000	8,35 ^{*)}	4 Sep 2021	-	101.645
Perum Perumnas Tahap III Seri A Tahun 2018	60.000	10,75 ^{*)}	10 Des 2021	61.542	61.542
PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahap II Tahun 2018	36.000	7,75 ^{*)}	15 Mar 2021	-	36.380
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap X Tahun 2020	40.000	5,25 ^{*)}	5 Des 2021	40.255	40.351
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahap I Tahun 2018	100.000	10.50 ^{*)}	28 Des 2021	100.287	101.249
				202.084	341.167

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.6. *Medium-Term Note* (MTN) (lanjutan)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat	
				30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Seri VII Tahun 2018	50.000	10,25*)	20 Apr 2021	-	50.000
				-	50.000
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Pegadaian (Persero)	200.000	7,00*)	6 Mar 2021	-	200.000
PT Bio Farma (Persero)	25.000	8,75*)	24 Ags 2021	-	25.000
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)					
VIII Tahun 2019	10.000	11,00*)	26 Jun 2024	10.000	10.000
VIII Seri B	1.000	11,00*)	31 Okt 2024	1.000	1.000
				11.000	236.000
				11.000	286.000
Total				213.084	627.167

*) Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

e) Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah memadai.

f) Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah	7,01%	6,90%
Dolar Amerika Serikat	4,01	4,09
Euro Eropa	2,75	2,79
Dolar Singapura	1,38	1,33
Yen Jepang	0,51	-

g) BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laba Rugi" sebesar Rp83.468 dan RpNihil masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek sebesar Rp1.912.219 dan Rp1.060.887 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i) Efek-efek sejumlah nominal Rp13.066.500 dan Rp33.906.302 masing-masing pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23).
- j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Nilai tercatat awal	189.545.942	-	-	189.545.942
Pengalihan ke				
Stage 1				
Stage 2				
Stage 3				
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(12.250.396)	-	-	(12.250.396)
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	44.404.156	-	-	44.404.156
Penghapusbukuan	(51.073.168)	-	-	(51.073.168)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	760.399	-	-	760.399
Nilai tercatat akhir	171.386.933	-	-	171.386.933

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	110.402.935	-	758	110.403.693
Pengalihan ke				
Stage 1				
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3				
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	(8.573.715)	-	-	(8.573.715)
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	10.263.052	-	-	10.263.052
Penghapusbukuan	(2.730.482)	-	-	(2.730.482)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	744.368	-	-	744.368
Nilai tercatat akhir	110.106.158	-	758	110.106.916

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai</u>				
<u>wajar melalui penghasilan</u>				
<u>komprehensif lain</u>				
Nilai tercatat awal	124.153.732	-	-	124.153.732
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(5.315.721)	-	-	(5.315.721)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	115.615.007	-	-	115.615.007
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(46.132.091)	-	-	(46.132.091)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.225.015	-	-	1.225.015
Nilai tercatat akhir	189.545.942	-	-	189.545.942

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya</u>				
<u>perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	53.974.385	-	758	53.975.143
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	60.243.498	-	-	60.243.498
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.970.110)	-	-	(3.970.110)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	155.162	-	-	155.162
Nilai tercatat akhir	110.402.935	-	758	110.403.693

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	979.846	-	-	979.846
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	8.696	-	-	8.696
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	184.503	-	-	184.503
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(188.882)	-	-	(188.882)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.345	-	-	1.345
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir^{*)}	985.508	-	-	985.508

*) Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

	30 Juni 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	348.183	-	758	348.941
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	489.161	-	-	489.161
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.356	-	-	23.356
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.690)	-	-	(9.690)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	4.567	-	-	4.567
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	855.577	-	758	856.335

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	111.385
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	111.385	-	-	111.385
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	491.402	-	-	491.402
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	510.852	-	-	510.852
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(30.281)	-	-	(30.281)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(103.512)	-	-	(103.512)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir^{*)}	979.846	-	-	979.846

*) Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	758
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	43.093
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	43.093	-	758	43.851
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	99.772	-	-	99.772
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	103.696	-	-	103.696
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.888)	-	-	(1.888)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	103.510	-	-	103.510
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	348.183	-	758	348.941

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Wesel Tagih		6.015.405		6.211.397
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)		2.475.275		3.956.830
Wesel Ekspor		2.056.417		2.416.160
Tagihan Lainnya		210.374		412.784
		<u>10.757.471</u>		<u>12.997.171</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)				
Dolar Amerika Serikat	313.914	4.552	870.862	12.236
Euro Eropa	3.056	52	3.021	51
Renminbi		-	2.006.235	4.314
		<u>4.604</u>		<u>16.601</u>
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	385.904.276	5.595.612	357.954.093	5.029.255
Renminbi	52.727.803	118.376	255.016.373	548.350
		<u>5.713.988</u>		<u>5.577.605</u>
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	446.723.557	6.477.492	458.573.808	6.442.962
Renminbi	192.802.095	432.847	30.432.774	65.437
Euro Eropa	399.250	6.890	1.769.995	30.505
		<u>6.917.229</u>		<u>6.538.904</u>
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	37.630.910	545.648	40.228.362	565.208
Yen Jepang	49.374.530	6.476	90.011.140	12.238
Renminbi	1.762.450	3.957	1.750.000	3.763
Euro Eropa		-	1.914.500	32.995
Dolar Singapura		-	1.209.427	12.827
		<u>556.081</u>		<u>627.031</u>
		<u>13.191.902</u>		<u>12.760.141</u>
		<u>23.949.373</u>		<u>25.757.312</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Wesel Tagih		2.091.535		235.310
Wesel Ekspor		252.474		1.362
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)		120.418		313.852
Tagihan Lainnya		89.377		112.818
		<u>2.553.804</u>		<u>663.342</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
Weasel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	71.262	1.033	7.271.280	102.161
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	32.626.343	473.082	56.995.915	800.793
Euro Eropa	6.121.703	105.639	11.887.485	204.874
Pound Sterling Inggris	64.797	1.300	342.956	6.520
Dolar Singapura	-	-	3.424.607	36.322
Franc Swiss	-	-	105.664	1.680
		580.021		1.050.189
		581.054		1.152.350
		3.134.858		1.815.692
Total		27.084.231		27.573.004
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.290.798)		(1.326.190)
Bersih		25.793.433		26.246.814

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan "Lancar", kecuali senilai Rp69.919 dengan kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" dan Rp20.271 dengan kolektibilitas "Macet" tanggal 30 Juni 2021, serta Rp65.867 dengan kolektibilitas "Kurang Lancar" pada tanggal 31 Desember 2020.

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	5.211.624	6.257.818
> 1 bulan - 3 bulan	10.208.281	10.562.414
> 3 bulan - 1 tahun	8.529.468	8.937.080
	23.949.373	25.757.312
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
≤ 1 bulan	1.105.098	539.838
> 1 bulan - 3 bulan	1.202.951	630.024
> 3 bulan - 1 tahun	826.809	645.830
	3.134.858	1.815.692
Total	27.084.231	27.573.004
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.290.798)	(1.326.190)
Bersih	25.793.433	26.246.814

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Nilai tercatat awal	23.327.544	4.217.965	-	27.545.509
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	26.803.811	79.482	20.271	26.903.564
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(23.215.099)	(4.217.965)	-	(27.433.064)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	68.222	-	-	68.222
	26.984.478	79.482	20.271	27.084.231
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	27.495
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(27.495)
Nilai tercatat akhir	26.984.478	79.482	20.271	27.084.231

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Nilai tercatat awal	30.292.051	4.003.283	22.165	34.317.499
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(702)	523	-	(179)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.327.636	4.217.422	-	27.545.058
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(30.291.441)	(4.003.331)	(22.165)	(34.316.937)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	68	-	68
	23.327.544	4.217.965	-	27.545.509
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	-
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	27.495
Nilai tercatat akhir	23.327.544	4.217.965	-	27.573.004

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	1.066.011	260.179	-	1.326.190
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.831)	-	-	(1.831)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	796.088	477.356	19.691	1.293.135
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.064.180)	(260.179)	-	(1.324.359)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(2.337)	-	-	(2.337)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	793.751	477.356	19.691	1.290.798
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	132.241
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	2.628.902
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	427.853	2.311.525	21.765	2.761.143
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	110.510	26.997	-	137.507
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.066.011	233.182	-	1.299.193
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(534.934)	(2.311.525)	(21.765)	(2.868.224)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(3.429)	-	-	(3.429)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.066.011	260.179	-	1.326.190

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari:

30 Juni 2021					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
VR0058	3,50	30 Jun 2021	7 Jul 2021	4.980.044	4.980.044
FR0072	3,29	27 Mei 2021	26 Agu 2021	2.058.860	2.065.257
FR0056	3,50	25 Jun 2021	2 Jul 2021	1.122.523	1.123.087
VR0042	3,50	28 Jun 2021	5 Jul 2021	991.996	992.209
FR0081	3,50	24 Jun 2021	1 Jul 2021	844.024	844.533
FR0057	3,17	30 Jun 2021	29 Sep 2021	573.506	573.506
VR0062	3,50	30 Jun 2021	7 Jul 2021	542.318	542.372
FR0058	3,28	11 Jun 2021	9 Jul 2021	541.342	542.279
FR0072	3,30	9 Jun 2021	8 Sep 2021	519.243	520.242
FR0074	3,16	30 Jun 2021	28 Jul 2021	489.185	489.185
FR0080	3,23	21 Jun 2021	19 Jul 2021	484.685	485.076
FR0076	3,28	9 Jun 2021	7 Jul 2021	480.675	481.595
FR0080	3,15	30 Jun 2021	14 Jul 2021	481.362	481.362
FR0089	3,28	14 Jun 2021	12 Jul 2021	474.975	475.667
FR0065	3,23	21 Jun 2021	5 Jul 2021	464.181	464.555
VR0057	3,34	11 Jun 2021	10 Des 2021	463.199	464.016
FR0074	3,97	4 Sep 2020	3 Sep 2021	255.897	264.335
FR0088	3,24	23 Jun 2021	22 Sep 2021	227.619	227.762
VR0046	3,50	29 Jun 2021	6 Jul 2021	199.440	199.459
FR0068	3,25	18 Jun 2021	2 Jul 2021	194.806	195.017
FR0054	3,22	23 Jun 2021	21 Jul 2021	125.960	126.039
FR0088	3,20	25 Jun 2021	23 Jul 2021	78.835	78.870
FR0052	3,33	5 Mar 2021	3 Sep 2021	61.024	61.684
FR0052	3,31	5 Mar 2021	3 Sep 2021	61.024	61.681
FR0087	3,65	4 Des 2020	3 Sep 2021	49.827	50.878
FR0065	3,40	5 Mar 2021	4 Mar 2022	47.951	48.480
VR0057	3,37	5 Mar 2021	3 Des 2021	47.551	48.072
VR0057	3,35	5 Mar 2021	3 Des 2021	47.551	48.069
PT BPD Maluku dan Maluku Utara					
Obligasi Pemerintah					
FR0062	3,48	30 Jun 2021	7 Jul 2021	138.819	138.819
FR0086	3,52	30 Jun 2021	14 Jul 2021	47.762	47.762
FR0064	3,52	30 Jun 2021	14 Jul 2021	47.648	47.648
Total				17.143.832	17.169.560

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari (lanjutan):

31 Desember 2020					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0077	3,75	28 Des 2020	4 Jan 2021	25.505.387	25.513.358
VR0042	3,75	29 Des 2020	5 Jan 2021	14.302.191	14.305.171
VR0035	3,75	28 Des 2020	4 Jan 2021	1.337.042	1.337.600
VR0043	3,75	30 Des 2020	6 Jan 2021	1.328.726	1.329.002
FR0079	3,84	30 Sep 2020	4 Jan 2021	527.602	532.779
VR0039	3,75	29 Des 2020	5 Jan 2021	381.011	381.130
FR0078	3,96	4 Sep 2020	4 Jun 2021	265.915	269.366
FR0078	3,94	4 Sep 2020	4 Jun 2021	265.915	269.349
FR0046	5,15	17 Jan 2020	15 Jan 2021	248.200	260.591
FR0074	3,97	4 Sep 2020	3 Sep 2021	255.897	259.227
VR0036	3,90	4 Sep 2020	5 Mar 2021	237.986	241.028
VR0036	3,86	4 Sep 2020	5 Mar 2021	237.986	240.997
FR0083	4,59	12 Jun 2020	11 Jun 2021	234.431	240.469
FR0080	4,57	12 Jun 2020	12 Mar 2021	233.556	239.545
FR0068	3,57	16 Des 2020	17 Mar 2021	112.674	112.841
FR0078	3,55	7 Sep 2020	4 Jan 2021	109.125	109.384
FR0072	3,57	8 Sep 2020	9 Mar 2021	107.856	108.102
FR0072	3,83	4 Nov 2020	3 Feb 2021	106.840	107.488
FR0082	3,55	16 Des 2020	13 Jan 2021	100.963	101.113
FR0087	3,55	8 Des 2020	5 Jan 2021	99.919	100.146
VR0037	3,84	27 Okt 2020	26 Jan 2021	95.789	96.453
FR0052	3,55	4 Des 2020	4 Jan 2021	63.408	63.576
FR0071	3,55	2 Des 2020	4 Jan 2021	57.330	57.494
FR0068	3,55	14 Des 2019	11 Jan 2021	56.066	56.160
FR0058	3,57	2 Des 2020	3 Mar 2021	55.341	55.500
FR0080	3,84	11 Nov 2020	10 Feb 2021	52.311	52.590
FR0080	3,82	11 Nov 2020	10 Feb 2021	52.311	52.588
FR0087	3,65	4 Des 2020	3 Sep 2021	49.827	49.963
FR0076	3,60	25 Nov 2020	24 Feb 2021	48.481	48.656
FR0073	3,60	4 Des 2020	4 Jun 2021	36.919	37.019
FR0080	4,60	9 Apr 2020	7 Jun 2021	754	779
PT BPD Maluku dan Maluku Utara					
Obligasi Pemerintah					
FR0084	3,85	22 Des 2020	5 Jan 2021	48.859	48.906
FR0087	3,85	22 Des 2020	5 Jan 2021	140.063	140.198
Total				46.756.681	46.818.568

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

b) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang dibeli dengan janji</u>				
<u>dijual kembali</u>				
Nilai tercatat awal	46.818.568	-	-	46.818.568
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(511.794)	-	-	(511.794)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	59.374.829	-	-	59.374.829
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(88.512.043)	-	-	(88.512.043)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	17.169.560	-	-	17.169.560

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang dibeli dengan janji</u>				
<u>dijual kembali</u>				
Nilai tercatat awal	22.582.244	-	-	22.582.244
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	197.245.886	-	-	197.245.886
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(173.009.562)	-	-	(173.009.562)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	46.818.568	-	-	46.818.568

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

b) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	1
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	1	-	-	1
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1)	-	-	(1)
Penghapusbukuan				
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	-	-	-	-

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, karena Manajemen berkeyakinan bahwa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dapat ditagih.

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	30 Juni 2021	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
<i>Swap</i> mata uang asing	216.155	121.663
<i>Swap</i> suku bunga	141.899	165.053
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	124.504	303.180
<i>Swap</i> mata uang dan suku bunga	132.592	41.094
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	3.626	3.285
<i>Option</i> mata uang	1.580	-
Total	620.356	634.275

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut (lanjutan):

Transaksi	31 Desember 2020	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
<i>Swap</i> mata uang asing	1.177.679	195.687
<i>Swap</i> mata uang dan suku bunga	144.151	14.421
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	142.912	35.799
<i>Swap</i> suku bunga	110.358	158.856
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	1.559	1.160
<i>Option</i> mata uang	-	1.851
Total	1.576.659	407.774

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif:

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<i>Swap</i> mata uang dan suku bunga Rupiah	7.392.100	3.827.625
<i>Swap</i> suku bunga Dolar Amerika Serikat	894.072.074	731.572.074
<i>Option</i> mata uang Kontrak pembelian Dolar Amerika Serikat	7.000.000	-
Kontrak penjualan Dolar Amerika Serikat	21.052.078	41.707.102
<i>Spot</i> mata uang asing Kontrak pembelian Dolar Amerika Serikat	125.362.672	16.000.000
Euro Eropa	11.000.000	-
Dolar Australia	4.382.000	-
Kontrak penjualan Dolar Amerika Serikat	133.245.439	27.143.607
Euro Eropa	11.000.000	-
Dolar Australia	4.000.000	-
<i>Forward</i> mata uang asing Kontrak pembelian Dolar Amerika Serikat	185.995.731	232.569.444
Renminbi	3.600.000	2.800.000
Rupiah	190.289	-
Kontrak penjualan Dolar Amerika Serikat	2.658.221.321	843.687.353
Euro Eropa	638.400	62.964

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif (lanjutan):

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<i>Swap</i> mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	408.642.001	170.114.774
Dolar New Zealand	3.000.000	-
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	2.087.297.698	2.808.686.838
Euro Eropa	155.000.000	190.000.000
Pound Sterling Inggris	8.000.000	9.200.000
Dolar New Zealand	6.000.000	-

Para pihak yang melakukan kontrak derivatif dalam bentuk *swap* suku bunga ataupun *swap* mata uang dan suku bunga dengan BRI berkewajiban membayar bunga tetap (*fixed rate*) atau bunga mengambang (*floating rate*) antara lain LIBOR 3 (tiga) bulanan atau 6 (enam) bulanan ditambah dengan margin tertentu.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Kupedes	366.560.876	351.337.166
Modal kerja	169.076.400	160.260.667
Konsumsi	145.989.150	143.781.795
Investasi	56.865.594	60.447.524
Program	38.823.977	35.879.902
Sindikasi	445.568	485.119
	777.761.565	752.192.173
<u>Mata uang asing</u>		
Investasi	43.996.020	40.761.907
Modal kerja	28.932.683	30.017.025
Konsumsi	789.033	802.927
Sindikasi	1.019.152	924.464
	74.736.888	72.506.323
	852.498.453	824.698.496

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Investasi	35.336.549	37.083.948
Modal kerja	27.499.362	25.624.320
Sindikasi	3.687.261	3.953.066
Karyawan kunci	151.606	186.633
Konsumsi	-	3.317
	<u>66.674.778</u>	<u>66.851.284</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Modal kerja	8.184.754	5.765.444
Investasi	2.044.478	2.142.983
	<u>10.229.232</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>76.904.010</u>	<u>74.759.711</u>
<u>Total</u>	929.402.463	899.458.207
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(78.132.193)	(65.165.002)
Bersih	<u>851.270.270</u>	<u>834.293.205</u>

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Rupiah</u>		844.436.343		819.043.457
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	5.854.110.873	84.884.607	5.717.364.006	80.328.965
Dolar Singapura	6.101.263	65.817	6.516.568	69.116
Yen Jepang	90.872.966	11.920	90.909.084	12.360
Euro Eropa	218.825	3.776	250.010	4.309
		<u>84.966.120</u>		<u>80.414.750</u>
<u>Total</u>		929.402.463		899.458.207
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(78.132.193)		(65.165.002)
Bersih		<u>851.270.270</u>		<u>834.293.205</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	300.494.427	289.833.592
Pertanian	107.633.505	100.923.232
Perindustrian	51.083.462	47.500.427
Jasa dunia usaha	44.925.933	40.672.940
Konstruksi	17.404.121	18.740.830
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	11.104.700	11.060.454
Jasa pelayanan sosial	5.593.651	5.699.714
Listrik, gas dan air	4.312.699	4.459.079
Pertambangan	2.419.533	2.354.278
Lain-lain	232.789.534	230.947.627
	<u>777.761.565</u>	<u>752.192.173</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	24.830.043	26.184.147
Listrik, gas dan air	18.314.508	14.907.363
Pertanian	11.752.514	12.995.793
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.252.238	4.078.573
Pertambangan	4.732.682	4.861.825
Konstruksi	3.606.044	3.673.480
Jasa dunia usaha	3.443.834	3.707.144
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	794.177	887.115
Jasa pelayanan sosial	157.412	349.487
Lain-lain	853.436	861.396
	<u>74.736.888</u>	<u>72.506.323</u>
	<u>852.498.453</u>	<u>824.698.496</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Konstruksi	16.485.091	16.233.554
Listrik, gas dan air	14.974.383	16.128.026
Perdagangan, perhotelan dan restoran	8.288.675	6.014.905
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	7.117.875	7.677.961
Pertanian	7.001.077	6.725.037
Perindustrian	6.873.706	7.781.515
Jasa dunia usaha	4.816.082	5.263.900
Jasa pelayanan sosial	545.370	331.222
Pertambangan	420.913	505.214
Lain-lain	151.606	189.950
	<u>66.674.778</u>	<u>66.851.284</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	4.190.259	3.687.097
Jasa dunia usaha	3.283.514	1.998.026
Listrik, gas dan air	1.330.331	1.032.396
Jasa pelayanan sosial	714.147	1.112.644
Pertambangan	706.262	78.264
Konstruksi	4.719	-
	<u>10.229.232</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>76.904.010</u>	<u>74.759.711</u>
Total	929.402.463	899.458.207
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(78.132.193)	(65.165.002)
Bersih	851.270.270	834.293.205

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	23.314.726	15.675.083
> 1 bulan - 3 bulan	21.719.701	28.271.014
> 3 bulan - 1 tahun	144.359.887	137.370.976
> 1 tahun - 2 tahun	113.706.033	107.394.811
> 2 tahun - 5 tahun	264.927.311	249.061.795
> 5 tahun	209.733.907	214.418.494
	<u>777.761.565</u>	<u>752.192.173</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	6.493.978	3.288.919
> 1 bulan - 3 bulan	2.672.698	3.383.986
> 3 bulan - 1 tahun	10.450.560	15.369.159
> 1 tahun - 2 tahun	11.309.949	5.606.542
> 2 tahun - 5 tahun	16.488.359	20.579.596
> 5 tahun	27.321.344	24.278.121
	<u>74.736.888</u>	<u>72.506.323</u>
	<u>852.498.453</u>	<u>824.698.496</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	6.528.653	4.686.688
> 1 bulan - 3 bulan	2.222.204	8.769.472
> 3 bulan - 1 tahun	12.432.903	5.827.999
> 1 tahun - 2 tahun	1.720.201	3.266.801
> 2 tahun - 5 tahun	12.089.776	7.725.408
> 5 tahun	31.681.041	36.574.916
	<u>66.674.778</u>	<u>66.851.284</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	1.125.874	2.057
> 1 bulan - 3 bulan	200.549	413.920
> 3 bulan - 1 tahun	-	1.106.582
> 1 tahun - 2 tahun	273.563	287.818
> 2 tahun - 5 tahun	518.317	2.004.088
> 5 tahun	8.110.929	4.093.962
	<u>10.229.232</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>76.904.010</u>	<u>74.759.711</u>
Total	<u>929.402.463</u>	<u>899.458.207</u>
 Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	 (78.132.193)	 (65.165.002)
Bersih	<u>851.270.270</u>	<u>834.293.205</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Individual	66.960.939	61.073.398
Kolektif		
Lancar	811.427.378	807.915.251
Dalam perhatian khusus	34.368.026	18.934.167
Kurang lancar	2.441.794	1.234.299
Diragukan	4.387.886	1.697.336
Macet	9.816.440	8.603.756
	862.441.524	838.384.809
Total	929.402.463	899.458.207
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(35.781.650)	(29.101.946)
Kolektif	(42.350.543)	(36.063.056)
	(78.132.193)	(65.165.002)
Bersih	851.270.270	834.293.205

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Mikro	396.665.122	377.642.132
Ritel	343.932.155	337.141.342
Korporasi	37.164.288	37.408.699
	777.761.565	752.192.173
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	68.695.079	58.406.031
Ritel	6.041.809	14.100.292
	74.736.888	72.506.323
	852.498.453	824.698.496
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Korporasi	63.907.819	63.873.229
Ritel	2.766.959	2.978.055
	66.674.778	66.851.284

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	10.229.232	7.908.427
	10.229.232	7.908.427
	76.904.010	74.759.711
Total	929.402.463	899.458.207
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(78.132.193)	(65.165.002)
Bersih	851.270.270	834.293.205

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Bunga Kontrak		
Rupiah	10,31%	10,40%
Mata uang asing	3,83	3,80
Bunga Efektif		
Rupiah	12,30%	12,49%
Mata uang asing	4,13	3,97

- 2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 19, 20 dan 21).
- 3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.
- 4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pegawai dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.
- 5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit dengan sasaran usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp61.658.129 dan Rp61.909.777 pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 2% sampai dengan 64% dan 55% sampai dengan 77% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 1% sampai dengan 67% dan 1% sampai dengan 25% pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.
- 8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga berkisar 4,5% sampai dengan 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditanggungkan dan dicatat sebagai beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp4.103.106 dan Rp3.161.845 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (Catatan 17).
- 9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 44) adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	14.899.971	16.182.590
Perum BULOG	8.100.915	5.841.839
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	3.605.663	2.414.805
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.711.025	2.617.195
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.509.091	2.800.000
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.215.048	1.813.992
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.086.259	2.031.937
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.082.744	2.355.585
PT Pegadaian (Persero)	1.797.349	2.120.147
PT Trans Jabar Tol	1.775.555	1.848.697
Lain-lain	34.968.784	34.546.291
Total	76.752.404	74.573.078

- 10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.666.077 dan Rp42.644.077. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (BRI Entitas Induk dan BRI Agro) akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp179.535.279 dan Rp194.879.073 dengan skema perpanjangan jangka waktu.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.

12) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Pertanian	19.832.446	18.865.269
Perindustrian	15.296.052	13.816.620
Perdagangan, perhotelan dan restoran	12.501.019	14.453.523
Konstruksi	12.056.544	7.820.702
Jasa dunia usaha	8.206.303	3.506.565
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	5.713.457	3.817.321
Pertambangan	3.243.375	3.498.272
Listrik, gas dan air	2.986.307	2.944.416
Jasa pelayanan sosial	589.635	543.874
Lain-lain	3.181.921	3.342.227
Total	83.607.059	72.608.789
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(45.209.476)	(35.390.134)
Bersih	38.397.583	37.218.655

13) Rasio-rasio

- a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI (entitas induk) berdasarkan peraturan terkait adalah sebesar 3,27% dan 2,94% masing-masing pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Sedangkan rasio NPL neto BRI (entitas induk) adalah sebesar 0,93% dan 0,80% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.
- b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah sebesar 45,85% dan 53,00% masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

30 Juni 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Nilai tercatat awal	790.417.318	83.134.034	25.906.855	899.458.207
Pengalihan ke				
Stage 1	7.164.900	(6.705.348)	(459.552)	-
Stage 2	(34.236.113)	34.906.892	(670.779)	-
Stage 3	(5.446.131)	(5.586.562)	11.032.693	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(54.879.825)	(3.476.367)	(3.383.365)	(61.739.557)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	182.315.838	20.595.050	1.396.760	204.307.648
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(98.722.993)	(11.351.820)	(1.393.750)	(111.468.563)
Penghapusbukuan	(9.070)	(222.007)	(5.682.025)	(5.913.102)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukuan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.390.557	246.417	3.120.856	4.757.830
Nilai tercatat akhir	787.994.481	111.540.289	29.867.693	929.402.463

31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Nilai tercatat awal	781.901.970	73.887.478	21.641.745	877.431.193
Pengalihan ke				
Stage 1	19.772.305	(19.285.712)	(486.593)	-
Stage 2	(19.204.620)	19.893.341	(688.721)	-
Stage 3	(4.783.707)	(7.453.662)	12.237.369	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(86.023.131)	(2.945.176)	4.520.157	(84.448.150)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	306.406.952	34.396.541	4.753.687	345.557.180
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(205.812.504)	(13.292.957)	(4.310.299)	(223.415.760)
Penghapusbukuan	(340.783)	(2.093.639)	(11.809.437)	(14.243.859)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukuan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.499.164)	27.820	48.947	(1.422.397)
Nilai tercatat akhir	790.417.318	83.134.034	25.906.855	899.458.207

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Kredit yang Diberikan				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	23.794.662	22.739.624	18.630.716	65.165.002
Pengalihan ke				
Stage 1	1.534.350	(1.288.167)	(246.183)	-
Stage 2	(1.015.417)	1.332.915	(317.498)	-
Stage 3	(213.678)	(1.465.766)	1.679.444	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(3.330.647)	6.809.129	7.427.618	10.906.100
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.469.090	7.208.471	530.337	14.207.898
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.072.068)	(2.599.369)	(739.473)	(6.410.910)
Penghapusbukuan	(9.070)	(222.007)	(5.682.025)	(5.913.102)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	51.146	104.309	21.750	177.205
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	24.208.368	32.619.139	21.304.686	78.132.193
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
Kredit yang Diberikan				
Saldo awal tahun	-	-	-	38.363.840
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	12.124.615
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	15.575.981	17.480.159	17.432.315	50.488.455
Pengalihan ke				
Stage 1	2.064.161	(1.746.657)	(317.504)	-
Stage 2	(544.581)	981.973	(437.392)	-
Stage 3	(137.238)	(2.914.060)	3.051.298	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	207.434	5.762.912	10.531.033	16.501.379
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.856.322	8.262.293	3.499.225	22.617.840
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.821.785)	(3.005.945)	(3.332.820)	(10.160.550)
Penghapusbukuan	(340.783)	(2.093.639)	(11.809.437)	(14.243.859)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(64.849)	12.588	13.998	(38.263)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	23.794.662	22.739.624	18.630.716	65.165.002

Termasuk dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (entitas induk) adalah cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana sesuai penetapan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.444.839 dan Rp1.217.393 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (Catatan 2e).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Jumlah minimum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Catatan 2e) adalah sebesar Rp35.313.109 dan Rp31.802.386 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, tidak terdapat kredit yang diberikan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah memadai.

12. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

a) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>	
Lancar	32.543.250
Dalam Perhatian Khusus	1.379.217
Kurang Lancar	316.679
Diragukan	107.503
Macet	770.167
	35.116.816
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>	
Lancar	3.798.857
	3.798.857
 Total	38.915.673
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.489)
 Bersih	37.466.184

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>	
<u>Rupiah</u>	
≤ 1 bulan	545.014
> 1 bulan - 3 bulan	1.401.070
> 3 bulan - 1 tahun	3.519.932
> 1 tahun - 2 tahun	3.268.502
> 2 tahun - 5 tahun	12.086.284
> 5 tahun	14.296.014
	35.116.816

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>	
<u>Rupiah</u>	
≤ 1 bulan	1.183.543
> 1 bulan - 3 bulan	265.583
> 3 bulan - 1 tahun	54.178
> 1 tahun - 2 tahun	156.963
> 2 tahun - 5 tahun	94.278
> 5 tahun	2.044.312
	3.798.857
Total	38.915.673
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.489)
Bersih	37.466.184

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Jumlah piutang dan pembiayaan syariah yang telah direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp7.504.101.

Pendapatan piutang *murabahah* yang belum diakui pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.292.665.

Perubahan cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah:

	31 Desember 2020
Saldo awal	745.029
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	1.288.086
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	66.748
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(650.374)
Saldo akhir	1.449.489

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan pembiayaan syariah pada tanggal 31 Desember 2020 telah memadai.

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas piutang dan pembiayaan konsumen berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan properti lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat piutang dan pembiayaan syariah yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Efektif sejak tanggal 1 Februari 2021, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah (Catatan 1f)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
Piutang sewa pembiayaan-bruto	4.913.208	4.185.436
Nilai sisa yang terjamin	1.868.592	1.981.977
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(770.399)	(607.364)
Simpanan jaminan	(1.868.592)	(1.981.978)
	<u>4.142.809</u>	<u>3.578.071</u>
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
Piutang sewa pembiayaan-bruto	31.629	48.241
Nilai sisa yang terjamin	1.135	1.677
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(5.208)	(7.088)
Simpanan jaminan	(1.135)	(1.677)
	<u>26.421</u>	<u>41.153</u>
 Total	4.169.230	3.619.224
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(216.247)	(213.060)
Bersih	<u>3.952.983</u>	<u>3.406.164</u>

b) Piutang sewa pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	1.741.335	1.505.414
> 1 tahun - 2 tahun	992.013	884.059
> 2 tahun - 5 tahun	1.099.857	830.009
	<u>3.833.205</u>	<u>3.219.482</u>
 <u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 tahun	176.144	201.549
> 1 tahun - 2 tahun	92.574	109.166
> 2 tahun - 5 tahun	40.886	47.874
	<u>309.604</u>	<u>358.589</u>
	<u>4.142.809</u>	<u>3.578.071</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

b) Piutang sewa pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	9.222	23.927
> 1 tahun - 2 tahun	11.837	16.279
> 2 tahun - 5 tahun	5.362	947
	<u>26.421</u>	<u>41.153</u>
Total	4.169.230	3.619.224
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(216.247)	(213.060)
Bersih	<u>3.952.983</u>	<u>3.406.164</u>

c) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Piutang Sewa Pembiayaan</u>				
Nilai tercatat awal	3.321.403	109.595	188.226	3.619.224
Pengalihan ke				
Stage 1	27.746	(9.941)	(17.805)	-
Stage 2	(58.007)	58.816	(809)	-
Stage 3	(6.570)	(1.918)	8.488	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	86.634	(48.316)	14.651	52.969
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.416.918	1.827	-	1.418.745
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(853.184)	(36.199)	(36.199)	(925.582)
Penghapusbukuan	(34)	(386)	(12.971)	(13.391)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	15.438	-	1.827	17.265
Nilai tercatat akhir	<u>3.950.344</u>	<u>73.478</u>	<u>145.408</u>	<u>4.169.230</u>
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Sewa Pembiayaan</u>				
Nilai tercatat awal	4.026.491	59.873	105.232	4.191.596
Pengalihan ke				
Stage 1	38.913	(31.851)	(7.062)	-
Stage 2	(81.147)	108.466	(27.319)	-
Stage 3	(140.359)	(14.652)	155.011	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	992.010	15.842	13.873	1.021.725
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.487.748)	(27.229)	(38.130)	(1.553.107)
Penghapusbukuan	(4.249)	(854)	(14.098)	(19.201)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(22.508)	-	719	(21.789)
Nilai tercatat akhir	<u>3.321.403</u>	<u>109.595</u>	<u>188.226</u>	<u>3.619.224</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

c) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			Total
	Stage1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Piutang Sewa Pembiayaan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	44.721	36.152	132.187	213.060
Pengalihan ke				
Stage 1	14.838	(2.079)	(12.759)	-
Stage 2	(1.530)	2.005	(475)	-
Stage 3	(1.108)	(1.497)	2.605	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	39.799	(22.651)	20.865	38.013
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	17.645	466	-	18.111
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(27.788)	(552)	(8.965)	(37.305)
Penghapusbukuan	(34)	(385)	(12.971)	(13.390)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(2.322)	-	80	(2.242)
Cadangan atas kerugian kredit Ekspektasian akhir	84.221	11.459	120.567	216.247
31 Desember 2020				
	Stage1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Sewa Pembiayaan</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	87.500
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	22.529
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	2.755	19.639	87.635	110.029
Pengalihan ke				
Stage 1	32.099	(13.566)	(18.533)	-
Stage 2	(4.434)	20.596	(16.162)	-
Stage 3	(2.399)	(4.500)	6.899	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(10.559)	9.766	70.162	69.369
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	32.133	5.615	23.029	60.777
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.638)	(784)	(15.144)	(18.566)
Penghapusbukuan	(2.152)	(614)	(6.101)	(8.867)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(84)	-	402	318
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	44.721	36.152	132.187	213.060

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, tidak terdapat piutang sewa pembiayaan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		3.101.074		3.789.849
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	108.987.242	1.580.315	77.786.022	1.092.894
Euro Eropa	5.900.713	101.825	7.155.614	123.323
Yen Jepang	256.459.428	33.640	209.237.191	28.449
Renminbi	11.834.880	26.570	4.073.580	8.759
Pound Sterling Inggris	179.519	3.600	36.705	698
Dolar Singapura	27.174	293	36.236	384
		1.746.243		1.254.507
		4.847.317		5.044.356
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan SKBDN		784.965		1.548.475
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	6.226.216	90.280	14.634.549	205.615
Euro Eropa	3.102	54	13.168	227
Yen Jepang	-	-	138.000.000	18.763
		90.334		224.605
		875.299		1.773.080
Total		5.722.616		6.817.436
Cadangan kerugian penurunan nilai		(200.250)		(546.260)
Bersih		5.522.366		6.271.176

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai "Lancar", kecuali Rp500.603 dengan kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" pada 31 Desember 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	15.480	2.166
> 1 bulan - 3 bulan	1.538.497	2.319.770
> 3 bulan - 1 tahun	3.293.340	2.722.420
	<u>4.847.317</u>	<u>5.044.356</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
> 1 bulan - 3 bulan	400.833	850.673
> 3 bulan - 1 tahun	474.466	922.407
	<u>875.299</u>	<u>1.773.080</u>
Total	5.722.616	6.817.436
Cadangan kerugian penurunan nilai	(200.250)	(546.260)
Bersih	5.522.366	6.271.176

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Nilai tercatat awal	6.273.140	500.603	-	6.773.743
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	5.601.464	-	-	5.601.464
Aset Keuangan yang dihentikan Pengakuannya	(6.169.659)	(500.603)	-	(6.670.262)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	17.671	-	-	17.671
	<u>5.722.616</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.722.616</u>
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	43.693
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(43.693)
Nilai tercatat akhir	5.722.616	-	-	5.722.616

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
Tagihan Akseptasi				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	140.746
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	140.746	-	-	140.746
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	415	-	-	415
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau Dibeli	239.521	306.106	-	545.627
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(140.135)	-	-	(140.135)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(393)	-	-	(393)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	240.154	306.106	-	546.260

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah memadai.

15. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	30 Juni 2021			
		Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas					
Pihak berelasi (Catatan 44)					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	17,25	3.546.381	215.451	3.761.832
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	13.262	385.221
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	35,00	71.325	4.098	75.423
			3.989.665	232.811	4.222.476

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

30 Juni 2021

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Nilai Wajar					
<u>Pihak ketiga</u>					
Grab Holding	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,08			180.687
Investree Singapore Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	4,01			146.457
Fazz Financial Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	3,67			120.481
PT Bukalapak.com	Penyelenggara Teknologi Finansial	0,23			98.906
Funding Asia Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,63			78.560
Nium Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,29			48.255
Tani Nusantara Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	2,44			28.580
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,88			28.110
PT Majoo Teknologi Indonesia	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,71			16.993
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	8,01			7.970
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Keuangan	17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			221
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,80			135
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			1.871
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	13,22			565.564
					1.328.565
Total					5.551.041

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2020					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	8.239	380.198
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	35,00	71.325	3.071	74.396
			443.284	11.310	454.594
Metode Nilai Wajar					
<u>Pihak ketiga</u>					
Investree Singapore Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	4,01			146.457
Fazz Financial Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	3,67			120.480
Funding Asia Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,63			78.560
Nium Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,29			48.255
Tani Nusantara Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	2,44			28.580
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,88			28.110
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	8,01			7.970
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			221
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,80			135
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			5.418
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	13,22			565.245
					1.035.206
Total					1.489.800

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar".

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukannya cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham.

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba tahun atau periode berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total aset	247.299.611	-
Total liabilitas	223.957.694	-
PT Danareksa Investment Management		
Total aset	270.636	238.491
Total liabilitas	68.474	49.600
PT Bahana Artha Ventura		
Total aset	2.367.587	2.483.252
Total liabilitas	1.751.817	1.862.635
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total pendapatan	9.488.939	-
Total laba bersih	1.480.502	-
PT Danareksa Investment Management		
Total pendapatan	94.989	60.143
Total laba bersih	14.351	750
PT Bahana Artha Ventura		
Total pendapatan	87.052	88.127
Total laba bersih	2.935	919

Rincian penerimaan deviden adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni	
	2021	2020
<u>BRI</u>		
PT Danareksa Investment Management	-	5.530
	-	5.530
<u>Entitas Anak</u>		
PT BPR Cinta Manis Agroloka	6	-
PT BPR Bungamayang Agroloka	4	-
	10	-
Total	10	5.530

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

Keterangan	30 Juni 2021				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan ^{*)}	Reklasifikasi ^{**)}	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Hak atas tanah	21.376.029	151.586	225.586	4.232	21.306.261
Bangunan	6.124.347	489.922	340.573	152.651	6.426.347
Kendaraan bermotor	2.374.456	392.256	107.181	-	2.659.531
Komputer dan mesin ^{***)}	10.130.446	457.440	384.410	(144.965)	10.058.511
Perlengkapan kantor	2.180.414	123.673	147.544	-	2.156.543
Aset tetap museum	184	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	-	3.284.664
Aset dalam penyelesaian	1.367.424	1.096.897	234	(7.686)	2.456.401
	<u>46.837.964</u>	<u>2.711.774</u>	<u>1.205.528</u>	<u>4.232</u>	<u>48.348.442</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	2.513.840	353.191	116.247	-	2.750.784
Kendaraan bermotor	2.138.489	144.543	90.789	-	2.192.243
Komputer dan mesin	7.536.245	556.903	328.219	-	7.764.929
Perlengkapan kantor	1.679.560	92.783	116.845	-	1.655.498
Satelit	784.670	109.489	-	-	894.159
	<u>14.652.804</u>	<u>1.256.909</u>	<u>652.100</u>	<u>-</u>	<u>15.257.613</u>
Nilai buku - Bersih	<u>32.185.160</u>				<u>33.090.829</u>

Keterangan	31 Desember 2020				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi ^{*)}	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Hak atas tanah	21.123.087	285.463	33.418	897	21.376.029
Bangunan	4.951.375	1.149.313	62.602	86.261	6.124.347
Kendaraan bermotor	2.378.102	115.583	119.229	-	2.374.456
Komputer dan mesin	9.660.755	573.132	103.482	41	10.130.446
Perlengkapan kantor	1.980.108	260.200	59.853	(41)	2.180.414
Aset tetap museum	184	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	-	3.284.664
Aset dalam penyelesaian	697.405	759.189	2.909	(86.261)	1.367.424
	<u>44.075.680</u>	<u>3.142.880</u>	<u>381.493</u>	<u>897</u>	<u>46.837.964</u>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	2.041.008	499.491	26.659	-	2.513.840
Kendaraan bermotor	2.115.204	140.776	117.491	-	2.138.489
Komputer dan mesin	6.379.234	1.235.054	78.043	-	7.536.245
Perlengkapan kantor	1.541.912	180.688	43.040	-	1.679.560
Satelit	565.693	218.977	-	-	784.670
	<u>12.643.051</u>	<u>2.274.986</u>	<u>265.233</u>	<u>-</u>	<u>14.652.804</u>
Nilai buku - Bersih	<u>31.432.629</u>				<u>32.185.160</u>

*) Termasuk pengurangan atas aset tetap PT Bank BRI Syariah (BRIS)

***) Termasuk reklasifikasi tanah dari aset terbengkalai

****) Termasuk *software*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 pada tabel di atas termasuk juga nilai Aset Hak Guna (AHG) BRI dan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 30 Juni 2021
Biaya Perolehan Aset Hak Guna				
Bangunan	813.913	259.429	235.874	837.468
Kendaraan bermotor	71.558	260.663	27.694	304.527
Komputer dan mesin	2.195	-	221	1.974
Perlengkapan kantor	17.620	14.220	15.443	16.397
	905.286	534.312	279.232	1.160.366
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna				
Bangunan	204.735	209.663	83.043	331.355
Kendaraan bermotor	23.371	88.044	11.832	99.583
Komputer dan mesin	789	299	-	1.088
Perlengkapan kantor	7.435	2.944	3.239	7.140
	236.330	300.950	98.114	439.166
Nilai buku - Bersih	668.956			721.200
	Saldo awal 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2020
Biaya Perolehan Aset Hak Guna				
Hak guna tanah	32.123	1.295	33.418	-
Bangunan	407.761	432.621	26.469	813.913
Kendaraan bermotor	10.253	64.305	3.000	71.558
Komputer dan mesin	6.991	2.385	7.181	2.195
Perlengkapan kantor	15.252	19.221	16.853	17.620
	472.380	519.827	86.921	905.286
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna				
Bangunan	-	224.779	20.044	204.735
Kendaraan bermotor	-	25.174	1.803	23.371
Komputer dan mesin	-	979	190	789
Perlengkapan kantor	-	9.036	1.601	7.435
	-	259.968	23.638	236.330
Nilai buku - Bersih	472.380			668.956

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian:

	Periode Enam Bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021		
	Beban penyusutan Aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa	Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek
Hak guna tanah	-	-	231
Bangunan	209.663	1.830	221.399
Kendaraan bermotor	88.044	1.744	39.352
Komputer dan Mesin	299	35.069	36.219
Perlengkapan kantor	2.944	88	22.553
Total	300.950	38.731	319.754

	Periode Enam Bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020		
	Beban penyusutan Aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa	Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek
Hak guna tanah	8.850	6	486
Bangunan	176.497	1.559	94.054
Kendaraan bermotor	16.582	417	33.020
Komputer dan Mesin	3.665	39	9.281
Perlengkapan kantor	6.873	241	24.342
Total	212.467	2.262	161.183

Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki BRI adalah 2 (dua) tahun.

BRI memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah, dimana dikecualikan dari pengakuan sewa berdasarkan PSAK No. 73.

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebesar Rp1.256.909 dan Rp1.256.395 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) (Catatan 36).

BRI telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalisme, *force majeure* dan lain-lain kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance), PT Jasa Raharja, PT Jasaraharja Putera, PT Asuransi Jasa Tania Tbk, PT Asuransi Bintang dan PT Asuransi Raksa Pratikara dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp12.040.296 dan Rp14.361.967 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

BRI telah mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (Entitas Anak) dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar ASD160.000.000 (angka penuh) dan ASD176.000.000 (angka penuh), masing-masing polis asuransi tersebut berakhir pada tanggal 19 Juni 2022 dan 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI, adalah masing-masing sebesar Rp8.357.085 dan Rp8.622.771 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Pada tanggal 1 April 2016, BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran hak atas tanah menjadi model revaluasi dari sebelumnya menggunakan model biaya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" bagian 27 huruf e, dengan mempertimbangkan nilai buku tanah yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2016, maka pada tanggal 1 April 2019, BRI dan entitas anak telah melakukan penilaian kembali atas tanah hanya untuk memenuhi ketentuan Bapepam LK tersebut dan bukan untuk tujuan perpajakan.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

1. KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan, dengan laporan No. 00286/2.0160-00/PI/07/0218/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp8.285.841 ditandatangani oleh Nanang Rahayu.
2. KJPP Immanuel, Johnny & Rekan dengan laporan No. 00021T-W/PA/IMM-VI/2019 000101-104/0064-00/PI/07/0184/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp4.588.664 ditandatangani oleh Immanuel H. Sitompul.
3. KJPP Aksa Nelson & Rekan dengan laporan No. 00211/2.0026-00/PI/07/0179/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp1.630.648 ditandatangani oleh Aksa Nurdin.
4. KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dengan laporan No. 00233/2.0051-00/PI/07/0152/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp1.588.322 ditandatangani oleh Abdullah Fitriantoro.
5. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan dengan laporan No. 00056/2.0014-00/PI/07/0080/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp417.084 ditandatangani oleh Okky Danuza.
6. KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan dengan laporan No. 00078-81/2.0124.00/PI/07/0257/1V/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp3.825.260 ditandatangani oleh Setiawan.
7. KJPP Iwan Bachron & Rekan dengan laporan No. 000298/2.0047-05/PI/08/0500/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp101.851 ditandatangani oleh Bunga Budiarti.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali atas hak atas tanah sebesar Rp3.215.455 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.316.985, sedangkan penurunan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali sebesar Rp101.530, diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hierarki nilai wajar level 2. Pada tahun 2021, atas pelepasan aset PT Bank BRI Syariah (BRIS), penurunan nilai tercatat sebesar Rp80.276 disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing adalah sebesar Rp4.016.348 dan Rp3.864.762.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian, adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021		
	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian	Tanggal estimasi penyelesaian
Bangunan dalam penyelesaian:			
Menara BRI Gatot Subroto	845.821	80,22%	31 Desember 2021
Gedung TI Tabanan	57.950	95,00%	31 Oktober 2021
Menara BRI Medan	90.864	28,71%	3 Juli 2022
Gedung Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati	43.300	80,00%	31 Desember 2021
Lain-lain	785.030	Beragam	Beragam
	1.822.965		
Software dalam penyelesaian:			
BRINETS <i>Tactical Enhancement</i>	119.632	73,98%	30 September 2021
Aplikasi <i>Desktop</i> BRIBox	50.284	71,80%	29 September 2023
<i>System Integrator Face Foundation Service</i>	53.719	91,90%	30 September 2021
SAP <i>Face Foundation Service</i>	45.548	95,20%	30 September 2021
Lain-lain	364.253	Beragam	Beragam
	633.436		
Total	2.456.401		
	31 Desember 2020		
	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian	Tanggal estimasi penyelesaian
Menara BRI Gatot Subroto	581.807	56,82%	30 Juni 2021
Gedung TI Tabanan	57.950	95,00%	28 Februari 2021
Gedung Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati	43.300	80,00%	31 Maret 2021
Lain-lain	684.367	Beragam	Beragam
Total	1.367.424		

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selain yang disebutkan di atas dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

17. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR	5.026.947	3.870.918
Biaya dibayar di muka	4.233.954	3.255.686
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11f)	4.103.106	3.161.845
Piutang bunga:		
Efek-efek	2.366.978	2.581.705
Lain-lain	98.186	43.973

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset lain-lain terdiri atas (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	1.868.528	4.180.805
Aset reasuransi	1.511.074	1.383.245
Persekot intern	1.270.991	386.457
Persediaan kantor	256.892	272.336
Sewa kantor, gudang, dan ruang kelas	126.642	250.444
Piutang premi	106.235	71.467
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial Pemerintah	91.378	89.907
Tagihan pinalti pokok dan bunga kredit	74.936	59.993
Agunan yang diambil alih	66.924	67.211
Estimasi tagihan pajak	66.098	72.647
Uang muka pajak	-	22.720
Aset ljarah	-	1.094.012
Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan prinsip syariah	-	371.577
Lain-lain	4.528.795	4.921.468
	25.797.664	26.158.416
<u>Mata uang asing</u>		
Piutang Bunga:		
Efek-efek	1.036.154	939.757
Lainnya	71.842	54.437
Lain-lain	1.457.803	157.707
	2.565.799	1.151.901
Total	28.363.463	27.310.317
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(276.255)	(114.361)
Bersih	28.087.208	27.195.956

18. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	4.009.678	4.323.171
Titipan setoran pajak	408.596	581.816
Titipan ATM dan kartu kredit	404.866	649.981
Titipan asuransi	184.710	166.245
Titipan pinjaman kelolaan	62.520	63.836
Titipan kerjasama pihak ketiga	55.179	81.020
Titipan setoran kliring	40.308	29.952
Titipan pengiriman uang	22.264	22.009
Penampungan dana bantuan sosial	451	7.561
Lain-lain	4.423.877	5.055.436
	9.612.449	10.981.027

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Liabilitas segera terdiri atas (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Mata uang asing</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	215.996	164.517
Titipan setoran pajak	20.875	27.015
Titipan ATM dan kartu kredit	4.844	335
Lain-lain	375.573	673.016
	<u>617.288</u>	<u>864.883</u>
Total	<u>10.229.737</u>	<u>11.845.910</u>

19. GIRO

Giro terdiri atas:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		89.080.610		93.121.787
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.339.414.337	33.921.508	2.275.152.143	31.965.888
Dolar Singapura	113.935.616	1.229.079	173.906.682	1.844.486
Euro Eropa	8.287.889	143.020	7.972.675	137.405
Renminbi	60.609.610	136.071	77.911.961	167.531
Dolar Australia	1.913.180	20.853	2.003.355	21.541
Pound Sterling Inggris	780.716	15.658	268.771	5.110
Yen Jepang	84.854.855	11.130	58.215.378	7.915
Dolar Hong Kong	4.450.870	8.311	832.026	1.508
Dirham Uni Emirat Arab	715.595	2.825	1.675.059	6.407
Ringgit Malaysia	3.893	14	2.904	10
Riyal Arab Saudi	336	1		-
		<u>35.488.470</u>		<u>34.157.801</u>
		<u>124.569.080</u>		<u>127.279.588</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		35.001.293		32.451.555
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.187.042.344	31.712.114	1.797.654.233	25.257.042
Euro Eropa	4.405.751	76.028	5.156.992	88.878
Yen Jepang	251.962.756	33.050	545.478.053	74.166
Dolar Singapore	23.641	255		-
		<u>31.821.447</u>		<u>25.420.086</u>
		<u>66.822.740</u>		<u>57.871.641</u>
Total		<u>191.391.820</u>		<u>185.151.229</u>

Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah	1,96%	2,85%
Mata uang asing	0,77	0,96

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp1.127.934 dan Rp2.006.330 pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Pihak ketiga				
<u>Rupiah</u>				
Simpedes		284.243.851		285.960.307
Britama		162.666.350		159.291.579
Lain-lain		10.546.128		11.811.994
		<u>457.456.329</u>		<u>457.063.880</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	196.998.047	2.856.472	164.691.567	2.313.917
Yen Jepang	4.387.176.567	575.466	1.866.515.375	253.781
Dolar Singapura	26.257.488	283.252	7.239.262	76.781
Euro Eropa	1.770.024	30.544	2.106.284	36.301
Dolar Australia	1.601.858	17.460	1.085.297	11.670
Pound Sterling Inggris	558.102	11.194	703.622	13.378
Renminbi	1.837.087	4.124	10.340.053	22.234
Riyal Arab Saudi	230.600	892	333.869	1.250
Dolar Hong Kong	22.190	41	51.351	93
Dirham Uni Emirat Arab	7.560	30	7.475	29
		<u>3.779.475</u>		<u>2.729.434</u>
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat	1.114.897	16.166		-
		<u>16.166</u>		<u>-</u>
		<u>461.251.970</u>		<u>459.793.314</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Britama		400.309		310.246
Simpedes		9.259		12.281
Lain-lain		14.557		318.854
		<u>424.125</u>		<u>641.381</u>
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	1.764.833	25.582	1.342.362	18.860
Pound Sterling Inggris	11.188	224	1.193	23
Dolar Singapura	326	4	888	9
Renminbi	511	1	571	1
		<u>25.811</u>		<u>18.893</u>
Lain-lain				
Dolar Amerika Serikat	311	5		-
		<u>5</u>		<u>-</u>
		<u>449.941</u>		<u>660.274</u>
Total		<u>461.701.911</u>		<u>460.453.588</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TABUNGAN (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah	0,51%	0,69%
Mata uang asing	0,20	0,31

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp120.889 dan Rp126.223 pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

21. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		290.694.861		291.983.683
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	3.503.250.565	50.797.133	3.869.574.677	54.367.525
Renminbi	265.836.035	596.811	265.834.697	571.612
Dolar Australia	26.982.207	294.097	28.948.083	311.263
Dolar Singapura	24.524.432	264.557	146.201.170	1.550.636
Euro Eropa	12.159.448	209.829	12.488.168	215.226
Pound Sterling Inggris	102.502	2.056	1.314.370	24.989
Yen Jepang	2.000.000	262	22.694.000	3.086
Riyal Arab Saudi	5.003	19	5.001	19
		52.164.764		57.044.356
		342.859.625		349.028.039
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		67.464.295		42.349.414
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.274.172.801	32.975.506	2.484.394.914	34.905.750
Euro Eropa	2.881.000	49.716	6.649.000	114.592
Dolar Singapura	166.170	1.793	165.508	1.755
		33.027.015		35.022.097
		100.491.310		77.371.511
Total		443.350.935		426.399.550

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	11.361.042	14.656.454
Deposito		
1 bulan	100.334.841	105.524.880
3 bulan	101.174.509	126.359.394
6 bulan	33.796.435	21.335.653
12 bulan	35.454.721	12.391.875
Lebih dari 12 bulan	8.573.313	11.715.427
	<u>290.694.861</u>	<u>291.983.683</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	5.765.462	6.721.836
Deposito		
1 bulan	17.730.914	15.552.082
3 bulan	6.829.574	9.877.749
6 bulan	9.387.809	7.114.117
12 bulan	12.268.719	17.505.065
Lebih dari 12 bulan	182.286	273.507
	<u>52.164.764</u>	<u>57.044.356</u>
	<u>342.859.625</u>	<u>349.028.039</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	8.455.214	5.298.872
Deposito		
1 bulan	25.423.311	18.880.984
3 bulan	23.184.874	15.654.291
6 bulan	8.653.181	1.079.504
12 bulan	1.747.715	1.435.763
Lebih dari 12 bulan	-	-
	<u>67.464.295</u>	<u>42.349.414</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	2.803.430	835.828
Deposito		
1 bulan	12.380.936	13.410.028
3 bulan	5.210.486	7.990.114
6 bulan	9.955.265	10.866.152
12 bulan	1.993.392	1.257.681
Lebih dari 12 bulan	683.506	662.294
	<u>33.027.015</u>	<u>35.022.097</u>
	<u>100.491.310</u>	<u>77.371.511</u>
Total	<u>443.350.935</u>	<u>426.399.550</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rupiah	3,64%	5,61%
Mata uang asing	0,92	2,24

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah sebesar Rp225.790 dan Rp460.958 pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, selama tahun 2020 telah dilakukan penempatan dana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Periode penempatan dana tahap I sebesar Rp1.000.000 dan Rp9.000.000 dalam bentuk deposito dengan suku bunga sebesar 3,42% dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020, yang kemudian dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 25 September 2020.
- Periode penempatan dana tahap II sebesar Rp6.000.000 dan Rp9.000.000 dalam bentuk deposito dengan suku bunga sebesar 2,84% dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021, yang kemudian dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021.

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Deposits on call</i>		7.095.000		13.616.500
Deposito berjangka		411.390		506.000
Giro		338.418		348.000
Tabungan		7.415		30.720
<i>Inter-bank call money</i>		-		4.715.000
		7.852.223		19.216.220
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	135.000.000	1.957.500	141.000.000	1.981.050
Giro	73.426.291	1.064.681	23.442.800	329.371
Deposito berjangka	10.000.000	145.000	30.000.000	421.500
		3.167.181		2.731.921
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	95.685.000	1.032.201	52.413.600	555.908
		1.032.201		555.908
		12.051.605		22.504.049
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro		934.432		152.327
		934.432		152.327
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	56.000.000	812.000	80.400.000	1.129.620
Giro	3.911.693	56.720		-
		1.803.152		1.281.947
Total		13.854.757		23.785.996

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata:

	Rupiah		Dolar Amerika Serikat	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<i>Inter-bank call money</i>	-	3,77%	0,24%	0,07%
<i>Deposits on call</i>	3,56%	4,46	-	-
Deposito Berjangka	3,47	4,64	0,88	0,39
Giro	1,67	1,33	0,19	0,02
Tabungan	1,56	1,64	-	-

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021			
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	Total
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Deposits on call</i>	7.095.000	-	-	7.095.000
Deposito berjangka	409.390	2.000	-	411.390
Giro	338.418	-	-	338.418
Tabungan	7.415	-	-	7.415
	7.850.223	2.000	-	7.852.223
<u>Mata Uang Asing</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	53.937	107.875	2.827.889	2.989.701
Giro	1.064.681	-	-	1.064.681
Deposito berjangka	145.000	-	-	145.000
	1.263.618	107.875	2.827.889	4.199.382
	9.113.841	109.875	2.827.889	12.051.605
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	934.432	-	-	934.432
<u>Mata Uang Asing</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	812.000	-	-	812.000
Giro	56.720	-	-	56.720
	1.803.152	-	-	1.803.152
Total	10.916.993	109.875	2.827.889	13.854.757

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Deposits on call	13.616.500	-	-	13.616.500
Inter-bank call money	4.715.000	-	-	4.715.000
Deposito berjangka	478.000	28.000	-	506.000
Giro	348.000	-	-	348.000
Tabungan	30.720	-	-	30.720
	19.188.220	28.000	-	19.216.220
<u>Mata Uang Asing</u>				
Inter-bank call money	2.536.958	-	-	2.536.958
Deposito berjangka	-	421.500	-	421.500
Giro	329.371	-	-	329.371
	2.866.329	421.500	-	3.287.829
	22.054.549	449.500	-	22.504.049
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	152.327	-	-	152.327
<u>Mata Uang Asing</u>				
Inter-bank call money	1.129.620	-	-	1.129.620
	1.281.947	-	-	1.281.947
Total	23.336.496	449.500	-	23.785.996

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

	30 Juni 2021				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
<u>Bank lain</u>					
Obligasi Pemerintah					
FR0063	08 Mar 2021	15 Mei 2023	1.593.000	1.424.873	1.424.873
FR0081	25 Jun 2021	09 Jul 2021	810.000	766.361	766.736
FR0081	28 Jun 2021	12 Jul 2021	770.000	734.419	734.562
FR0081	22 Jun 2021	06 Jul 2021	750.000	713.496	714.054
FR0081	23 Jun 2021	07 Jul 2021	710.000	671.127	671.587
FR0081	30 Jun 2021	14 Jul 2021	610.000	576.673	576.673
FR0053	07 Mei 2019	15 Jul 2021	550.000	519.218	519.218

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

		30 Juni 2021			
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Rupiah (lanjutan)</u>					
<u>Bank lain (lanjutan)</u>					
<u>Obligasi Pemerintah (lanjutan)</u>					
FR0063	07 Nov 2017	15 Mei 2023	500.000	446.090	446.090
FR0053	06 Sep 2016	15 Jul 2021	450.000	437.025	437.025
FR0081	29 Jun 2021	13 Jul 2021	450.000	431.166	431.208
FR0053	09 Sep 2016	15 Jul 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	28 Feb 2017	15 Jul 2021	440.000	382.690	382.690
FR0081	21 Jun 2021	05 Jul 2021	400.000	377.563	377.894
FR0061	28 Feb 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0081	18 Jun 2021	02 Jul 2021	300.000	288.625	288.963
FR0086	29 Jun 2021	13 Jul 2021	200.000	181.304	181.322
FR0081	22 Jun 2021	01 Jul 2021	110.000	103.877	103.958
FR0081	21 Jun 2021	01 Jul 2021	110.000	103.830	103.921
FR0081	24 Jun 2021	08 Jul 2021	100.000	94.640	94.695
FR0081	17 Jun 2021	01 Jul 2021	100.000	94.548	94.668
FR0081	28 Jun 2021	07 Jul 2021	60.000	56.817	56.829
			9.791.000	9.099.064	9.101.688
<u>Mata uang asing</u>					
<u>Bank lain</u>					
<u>Obligasi Pemerintah</u>					
FR0061	03 Jun 2020	15 Mei 2022	842.000	725.749	725.749
FR0043	14 Jan 2019	15 Jul 2022	500.000	461.356	461.356
US TREASURY 0826	16 Jun 2021	16 Sep 2021	159.500	164.604	164.609
RI0124	19 Mar 2021	20 Sep 2021	145.000	157.724	157.859
RI0124	18 Mar 2021	20 Sep 2021	145.000	156.002	156.137
RI1023	12 Apr 2021	12 Jul 2021	145.000	149.096	149.201
RI0422	13 Apr 2021	13 Jul 2021	145.000	144.403	144.525
FR0061	27 Des 2018	12 Mei 2022	150.000	117.675	117.675
RI1023	23 Okt 2020	13 Okt 2021	101.500	109.047	109.509
US TREASURY 0523	15 Jun 2021	15 Des 2021	101.500	101.459	101.464
RI0124	12 Apr 2021	12 Jul 2021	72.500	79.000	79.055
RI0423	23 Okt 2020	13 Okt 2021	72.500	73.008	73.317
US TREASURY 0623	11 Mar 2021	13 Sep 2021	72.500	72.602	72.644
US TREASURY 0623	18 Jun 2021	20 Sep 2021	58.000	58.087	58.089
RI0125	12 Apr 2021	12 Jul 2021	43.500	45.788	45.820
US TREASURY 0422	16 Jun 2021	16 Sep 2021	29.000	29.017	29.018
			2.782.500	2.644.617	2.646.027
<u>Sukuk Berharga Syariah Negara</u>					
INDOIS 26	17 Jun 2021	17 Sep 2021	145.000	158.068	158.081
INDOIS 24	15 Jun 2021	15 Des 2021	145.000	153.936	153.952
INDOIS 24	18 Mei 2021	18 Nov 2021	145.000	152.420	152.470
INDOIS 22	23 Okt 2020	13 Okt 2021	58.000	57.291	57.534
			493.000	521.715	522.037
			3.275.500	3.166.332	3.168.064
Total			13.066.500	12.265.396	12.269.752

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2020					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
<u>Bank lain</u>					
Obligasi Pemerintah					
FR0084	28 Des 2020	04 Jan 2021	2.500.000	5.288.593	5.290.355
FR0086	30 Des 2020	06 Jan 2021	2.500.000	5.065.403	5.065.965
FR0053	19 Des 2020	05 Jan 2021	2.500.000	4.993.115	4.994.225
FR0086	29 Des 2020	29 Jan 2021	2.500.000	2.295.707	2.296.198
FR0061	14 Des 2020	14 Jan 2021	2.000.000	1.881.568	1.884.944
FR0087	17 Des 2020	15 Jan 2021	1.869.300	1.869.300	1.872.062
FR0053	14 Des 2020	14 Jan 2021	1.000.000	928.450	930.116
FR0086	21 Des 2020	21 Jan 2021	1.000.000	915.750	916.717
FR0086	28 Des 2020	11 Jan 2021	1.000.000	911.235	911.523
FR0086	23 Des 2020	22 Jan 2021	908.999	908.999	909.769
FR0063	16 Des 2020	15 Jan 2021	750.000	696.279	697.382
FR0084	28 Des 2020	25 Jan 2021	500.000	529.038	529.217
FR0084	28 Des 2020	11 Jan 2021	500.000	529.038	529.216
FR0053	07 Mei 2019	15 Jul 2021	550.000	519.218	519.218
FR0087	16 Des 2020	15 Jan 2021	500.000	465.256	465.992
FR0086	18 Des 2020	18 Jan 2021	458.889	458.889	459.519
FR0086	18 Des 2020	08 Jan 2021	458.889	458.889	459.511
FR0063	07 Nov 2017	15 Jun 2021	500.000	446.090	446.090
FR0053	06 Sep 2016	15 Mei 2023	450.000	437.025	437.025
FR0053	09 Sep 2016	15 Jul 2021	416.000	390.000	390.000
FR0053	28 Feb 2017	15 Jul 2021	440.000	382.690	382.690
FR0034	06 Sep 2016	15 Jul 2021	300.000	344.315	344.315
FR0034	07 Mei 2019	15 Jun 2021	300.000	313.520	314.480
FR0061	28 Feb 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0086	28 Des 2020	06 Jan 2021	300.000	273.370	273.457
FR0086	28 Des 2020	07 Jan 2021	300.000	273.370	273.457
FR0073	16 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	213.904	214.238
FR0053	15 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	185.673	185.987
FR0086	30 Des 2020	14 Jan 2021	200.000	183.769	183.788
FR0086	29 Des 2020	12 Jan 2021	200.000	183.657	183.695
FR0086	28 Des 2020	05 Jan 2021	200.000	182.247	182.305
			25.864.077	32.829.079	32.848.178
<u>Mata uang asing</u>					
<u>Bank lain</u>					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	30 Des 2020	30 Mar 2021	1.475.250	1.404.438	1.404.456
FRI0124	28 Des 2020	29 Mar 2021	1.475.250	1.387.208	1.387.260
FR0061	03 Jun 2020	15 Mei 2022	842.000	703.226	703.226
RI0126	23 Des 2020	23 Mar 2021	702.500	669.101	669.168
FR0043	14 Jan 2019	15 Jul 2022	500.000	447.038	447.038
RI0126	28 Des 2020	28 Jan 2021	351.250	380.765	380.774
RI0521	29 Des 2020	29 Mar 2021	351.250	326.603	326.610
RI0124	30 Des 2020	30 Mar 2021	210.750	225.349	225.351
RI0521	25 Nov 2020	25 Jan 2021	140.500	136.373	136.430
RI0230	30 Des 2020	23 Jun 2021	140.500	130.090	130.092
FR0061	27 Des 2018	12 Mei 2022	150.000	114.023	114.023
SIGB 0625	11 Des 2020	11 Feb 2021	106.062	112.635	112.654
RI10223	23 Okt 2020	13 Okt 2021	98.350	105.662	105.786
US TREASURY 0526	30 Des 2020	29 Jan 2021	70.250	74.676	74.677
RI0423	23 Okt 2020	13 Okt 2021	70.250	70.742	70.824
RI0428	30 Des 2020	23 Jun 2021	70.250	69.738	69.740
US TREASURY 0623	18 Des 2020	17 Feb 2021	70.250	68.987	69.008
US TREASURY 0523	18 Des 2020	17 Feb 2021	70.250	68.708	68.729
US TREASURY 0623	30 Des 2020	29 Jan 2021	56.200	56.341	56.341
			6.951.112	6.551.703	6.552.187

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2020				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>					
<u>Bank lain (lanjutan)</u>					
Sukuk Berharga Syariah Negara					
INDOIS 27	18 Des 2020	19 Jan 2021	351.250	368.607	368.640
INDOIS 22	23 Okt 2020	13 Okt 2021	56.200	55.513	55.578
			407.450	424.120	424.218
			7.358.562	6.975.823	6.976.405
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	17 Des 2020	15 Jan 2021	483.663	467.324	468.015
FR0063	15 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	185.760	186.074
			683.663	653.084	654.089
Total			33.906.302	40.457.986	40.478.672

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Berkelanjutan I BRI		
Tahap II Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp53 pada tanggal 31 Desember 2020		
	-	2.647.705
Tahap III Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp54 pada tanggal 31 Desember 2020		
	-	681.740
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp4.220 dan Rp2.287 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
	2.930.509	2.944.204
Tahap II Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp722 dan Rp1.206 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
	2.208.353	2.224.294
Tahap III Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.187 dan Rp1.793 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		
	4.147.093	4.146.745

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)		
Tahap IV Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.017 dan Rp1.611 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	2.431.017	2.430.539
Obligasi Berkelanjutan III BRI		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp4.177 dan Rp5.421 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	4.219.038	4.218.115
<i>Negotiable Certificate Deposits</i> Tahun 2020		
setelah dikurang biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp22.984 pada tanggal 31 Desember 2020	-	827.016
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp241 dan Rp351 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	218.129	218.051
MTN I BRI Finance Tahun 2019		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp298 dan Rp436 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	158.859	158.497
	<u>16.312.998</u>	<u>20.496.906</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<i>Senior Unsecured Notes Due 2023</i>		
(<i>Global Bond BRI</i>)		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp22.732 dan Rp27.504 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	7.227.268	6.997.936
<i>Senior Unsecured Notes Due 2024</i>		
(<i>Sustainability Bond BRI Tahun 2019</i>)		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp27.112 dan Rp30.752 pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	7.222.888	6.994.249
	<u>14.450.156</u>	<u>13.992.185</u>
Total	<u>30.763.154</u>	<u>34.489.091</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.755 dan Rp70.079.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI

Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 19 Januari 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.650.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp808.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.018.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.823.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Mei 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 4 Mei 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.350.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.212.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.437.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp701.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Obligasi Berkelanjutan I BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri B dan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp655.000, Rp925.000, Rp1.420.000, Rp808.000, Rp1.018.500, Rp2.823.500, Rp1.212.000, Rp2.437.000 dan Rp701.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 Obligasi Berkelanjutan II BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri B dan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp616.000, Rp964.000, Rp1.131.000 dan Rp1.743.500 dan Rp980.500 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

c) Obligasi Berkelanjutan III BRI

Pada tanggal 7 November 2019, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp737.850 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.089.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.172.800 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Februari 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Obligasi Berkelanjutan III BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri A dengan nilai Rp737.850 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

d) Obligasi I BRI Agro

Pada tanggal 7 Juli 2017, setelah menerima Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK No. S-348/D.04/2017 tertanggal 22 Juni 2017, BRI Agro menerbitkan Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp261.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp239.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022.

Bunga Obligasi I BRI Agro dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Oktober 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 Obligasi I BRI Agro memperoleh *rating* AA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) Obligasi I BRI Agro (lanjutan)

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi I BRI Agro adalah BRI Agro tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Obligasi I BRI Agro Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp261.000 telah dilunasi oleh BRI Agro pada tanggal jatuh temponya.

e) *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)*

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% atau setara dengan ASD498.480.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)* Tahun 2018 memperoleh *rating* Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

f) *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)*

Pada tanggal 28 Maret 2019, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2019 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tingkat bunga tetap 3,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,713% atau setara dengan ASD498.565.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2019.

Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)* memperoleh *rating* BAA2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

g) MTN I BRI Finance Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, BRI Finance menerbitkan MTN I BRI Finance Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp300.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 13 Maret 2020. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA-.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 MTN I BRI Finance Tahun 2019 memperoleh peringkat AA- dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI Finance tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing ratio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000 juta, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

h) *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020

Pada tanggal 29 Juni 2020, BRI menerbitkan *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut :

- Seri A : Nilai pokok sebesar Rp630.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,35% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.
- Seri B : Nilai pokok sebesar Rp520.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,30% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.
- Seri C : Nilai pokok sebesar Rp850.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021.

Penerimaan neto dari penerbitan *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Seri A, B dan C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp630.000, Rp520.000 dan Rp850.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.667	15.656
Pinjaman lainnya	12.273	12.273
Pinjaman lainnya	497.169	249.630
	<u>525.109</u>	<u>277.559</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman sindikasi <i>club loan</i> setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	21.651.646	20.908.211
Pinjaman dari BNP Paribas setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	453.401	492.892
Pinjaman lainnya	11.583.757	13.402.921
	<u>33.688.804</u>	<u>34.804.024</u>
	<u>34.213.913</u>	<u>35.081.583</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Pinjaman dari		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	982.613	852.352
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	17.031	17.319
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.406	17.731
	<u>1.014.050</u>	<u>887.402</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman dari		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	72.500	-
	<u>72.500</u>	<u>-</u>
	<u>1.086.550</u>	<u>887.402</u>
Total	<u>35.300.463</u>	<u>35.968.985</u>

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	247.293	71
> 3 bulan - 1 tahun	256.420	256.092
> 1 tahun - 5 tahun	7.802	7.802
> 5 tahun	13.594	13.594
	<u>525.109</u>	<u>277.559</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	9.422.524	3.792.929
> 1 bulan - 3 bulan	2.928.065	4.080.807
> 3 bulan - 1 tahun	7.696.146	14.786.730
> 1 tahun - 5 tahun	13.642.069	12.143.558
	<u>33.688.804</u>	<u>34.804.024</u>
	<u>34.213.913</u>	<u>35.081.583</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	997.019	852.352
> 3 bulan - 1 tahun	-	17.731
> 5 tahun	17.031	17.319
	<u>1.014.050</u>	<u>887.402</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	72.500	-
	<u>72.500</u>	<u>-</u>
	<u>1.086.550</u>	<u>887.402</u>
Total	<u>35.300.463</u>	<u>35.968.985</u>

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Pinjaman ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman sindikasi *club loan*

Pada tanggal 30 September 2015, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (*agent*), yang terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- Bank of America N.A., sebesar ASD50.000.000,
- Citibank, N.A., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
- Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi club loan (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2015, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD550.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (*agent*), yang terbagi atas (lanjutan):

- a. Fasilitas A sebesar ASD325.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 42 (empat puluh dua) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah (lanjutan):
 - The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebesar ASD50.000.000,
 - Westpac Banking Corporation sebesar ASD25.000.000,
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
 - BNP Paribas sebesar ASD20.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000, dan
 - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD155.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - Oversea-Chinese Banking Corporation Limited sebesar ASD50.000.000,
 - BNP Paribas sebesar ASD30.000.000,
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - United Overseas Bank Limited sebesar ASD20.000.000,
 - Westpac Banking Corporation sebesar ASD15.000.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD70.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal perjanjian (termasuk *grace period*) dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - CTBC Bank Co., Ltd. sebesar ASD30.000.000,
 - Australia and New Zealand Banking Group Limited sebesar ASD10.000.000,
 - DBS Bank Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - United Overseas Bank Limited sebesar ASD10.000.000, dan
 - Westpac Banking Corporation sebesar ASD10.000.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* BRI. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi club loan (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2018, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (*agent*), yang terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
 - Commerzbank AG, sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - PT Bank HSBC Indonesia, sebesar ASD10.000.000,
 - Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD55.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD22.500.000,
 - Wells Fargo Bank, N.A., cabang London sebesar ASD52.500.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD235.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - Cathay United Bank, sebesar ASD30.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD10.000.000,
 - Commerzbank AG, sebesar ASD30.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD30.000.000,
 - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD32.500.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD32.500.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD265.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - Cathay United Bank, sebesar ASD20.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Hong Kong sebesar ASD20.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD36.000.000,
 - DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Standard Chartered Bank, cabang Singapura ASD63.500.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD25.000.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD20.500.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi club loan (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2018, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (*agent*), yang terbagi atas (lanjutan):

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* BRI. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD1.000.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh Citicorp International Limited (*agent*), penarikan yang telah dilakukan terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Agustus 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- MUFG Bank Ltd sebesar ASD32.000.000,
 - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD86.000.000,
 - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD20.000.000,
 - CTBC Bank Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000,
 - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD22.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD20.000.000.

Pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilakukan penarikan untuk sisa fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* sebesar ASD800.000.000 (angka penuh) yang difasilitasi oleh Citicorp International Limited (*agent*), sebagai berikut:

- a. Fasilitas A sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- MUFG Bank Ltd sebesar ASD48.000.000,
 - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD129.000.000,
 - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD30.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD33.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD27.000.000,
 - Wells Fargo Bank, sebesar ASD900.000,
 - The Hyakugo Bank, Ltd., sebesar ASD600.000,
 - PT Bank Permata Tbk, sebesar ASD600.000,
 - DZ Bank AG, Deutsche Zentral, sebesar ASD900.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi club loan (lanjutan)

Pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilakukan penarikan untuk sisa fasilitas pinjaman sindikasi berupa club loan sebesar ASD800.000.000 (angka penuh) yang difasilitasi oleh Citicorp International Limited (agent), sebagai berikut (lanjutan):

b. Fasilitas B sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD20.000.000,
- BNP Paribas, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000,
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD10.000.000,
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD50.000.000,
- United Overseas Bank Limited, sebesar ASD70.000.000.

c. Fasilitas C sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025. Bank yang berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- China Development Bank, sebesar ASD150.000.000,
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD25.000.000,
- MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
- Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebesar ASD50.000.000,
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000,
- United Overseas Bank Limited, sebesar ASD5.000.000.

c) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECF) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh *Arianespace* Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche Banque Publique d'Investissement* (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (angka penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas *Tranche Hermes* senilai ASD9.901.308,77 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche BPI*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (angka penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche Hermes*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD660.087 sampai dengan jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman lainnya

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Victoria Internasional		249.947		249.630
PT Bank CIMB Niaga		247.222		-
Bank Indonesia		12.273		12.273
		509.442		261.903
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
MUFG Bank	210.397.131	3.050.759	195.100.000	2.741.986
BNP Paribas	150.359.220	2.180.209	159.453.336	2.240.319
The Bank of New York Mellon	100.000.000	1.450.000	100.000.000	1.405.000
PT Bank UOB	100.000.000	1.450.000	50.000.000	702.500
JP Morgan	20.057.037	290.827	10.238.969	143.858
PT Bank CTBC Indonesia	16.912.000	245.224	22.416.682	316.188
PT Bank BTPN Tbk	10.227.178	148.294	9.870.000	139.216
UOB Singapore	-	-	55.000.000	772.750
Wells Fargo Bank, N.A.	-	-	50.000.000	702.500
Bank of Montreal	-	-	50.000.000	702.500
Citibank, N.A.	-	-	50.000.000	702.500
Standard Chartered Bank	-	-	45.000.000	632.250
		8.815.313		11.201.567
<u>Euro Eropa</u>				
Commerzbank AG	1.334.597	23.030		-
JP Morgan	213.811	3.690		-
		26.720		-
<u>Dolar Singapura</u>				
Wells Fargo Bank, N.A.	186.920.250	2.016.400	104.438.000	1.107.688
Chinatrust Commercial Bank Singapore Branch	67.237.500	725.324	66.100.000	701.068
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	-	-	37.016.000	392.598
		2.741.724		2.201.354
		11.583.757		13.402.921
Total		12.093.199		13.664.824

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah margin tertentu, termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh BRI.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, BRI dan entitas anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

e) Pinjaman Diterima BRI Multifinance Indonesia

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Sumitomo sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh). Berdasarkan *addendum* pada tanggal 18 Desember 2017, pinjaman tersebut berubah dari ASD20.000.000 (nilai penuh) menjadi ASD40.000.000 (nilai penuh). Perpanjangan dan *addendum* terakhir pada 21 Desember 2019, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang kembali sampai dengan 31 Desember 2021. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia telah melakukan merger dengan PT Bank BTPN Tbk di tahun 2019 menjadi PT Bank BTPN Tbk.

Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,8% ditambah biaya pendanaan yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *Standby Letter of Credit (SBLC)* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, entitas induk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman ini seluruhnya telah dilindungi nilai dengan kontrak *forward and foreign exchange swap*.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti *gearing ratio* tidak melebihi rasio 8,5 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Seluruh pinjaman yang diterima dipergunakan untuk modal kerja kegiatan perusahaan.

MUFG Bank, Ltd. Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen sebesar ASD60.000.000 (nilai penuh). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan satu tahun sejak tanggal penandatanganan kredit. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar ICE Libor + 1,00% (ASD) dan Jibor + 1,50% (IDR) dengan jangka waktu pinjaman maksimum 6 bulan.

Berdasarkan perubahan atas Perjanjian Kredit No. 20-0116-GC-LN tanggal 26 Juli 2020, MUFG Jakarta setuju untuk mengubah jatuh tempo fasilitas pembiayaan menjadi tanggal 26 Juli 2021.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti *gearing ratio* tidak melebihi rasio 10 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 10 Juli 2019, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk Kredit Jangka Pendek yang sifatnya *revolving* senilai Rp500.000 dan penambahan fasilitas baru Kredit Modal Kerja senilai Rp500.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

e) Pinjaman Diterima BRI Multifinance Indonesia (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 10 Juli 2020, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk Kredit Jangka Pendek yang sifatnya *revolving* senilai Rp500.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2021.

Pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja yang sifatnya *non-revolving* senilai Rp250.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang yang tidak memiliki tunggakan yang lebih besar dari 90 hari sebesar 100% dari total saldo pinjaman.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 6 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk *Demand Loan* yang sifatnya *revolving* senilai Rp250.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang yang tidak memiliki tunggakan yang lebih besar dari 90 hari sebesar 100% dari total saldo pinjaman.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 6 Agustus 2021.

PT Bank CTBC Indonesia

Pada tanggal 14 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk Fasilitas Club Deal yang sifatnya *Non revolving* senilai ASD50.000.000 (nilai penuh). Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang yang tidak memiliki tunggakan yang lebih besar dari 90 hari sebesar 100% dari total saldo pinjaman.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8,5 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

e) Pinjaman Diterima BRI Multifinance Indonesia (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* sebesar Rp300.000.000. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*).

Fasilitas ini dijamin dengan piutang lancar dari total saldo pinjaman yang diterima sebesar 100%.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2020, BNI mengubah pemberian fasilitas pinjaman dari fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* menjadi *Uncommitted Kredit Modal Kerja* sebesar Rp300.000. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Tingkat suku bunga sebesar 8,00%-8,50%.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2021.

Sehubungan dengan seluruh pinjaman yang diterima, Perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati para kreditur.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 27 Januari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Committed Kredit Modal Kerja* sebesar Rp 300.000.000. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Tingkat suku bunga indikatif sebesar 8%.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang lancar dari total saldo pinjaman yang diterima sebesar 100% dan *promissory notes*.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio pinjaman terhadap modal maksimum 7 kali. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2022.

f) Pinjaman Diterima BRI Agroniaga Tbk

PT Sarana Multigriya Finansial

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyaluran KPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% per tahun dan *availability period* sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Angsuran pokok fasilitas pinjaman dibayarkan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga, dimana angsuran pokok pertama kali akan mulai dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp157.003 sampai dengan jatuh tempo. Bank tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

f) Pinjaman Diterima BRI Agroniaga Tbk (lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) penting dalam perjanjian-perjanjian ini antara lain, sebelum memperoleh persetujuan tertulis, Bank tidak diperkenankan untuk:

- Mengajukan permohonan pailit;
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan harta kekayaan Bank;
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tanggal 14 Juni 2021, BRI Agroniaga melakukan transaksi *borrowing* di pasar uang antar bank (*inter-bank call money*) dengan Indonesia Eximbank (LPEI) dalam rangka pemenuhan likuiditas USD BRI Agroniaga. Transaksi ini memiliki jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga sebesar 0,17%.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) penting dalam melakukan transaksi *borrowing* di pasar uang antar bank (*inter-bank call money*) ini antara lain, sebelum memperoleh persetujuan tertulis, Bank tidak diperkenankan untuk:

- Mengajukan permohonan pailit;
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan hartakekayaan Bank;
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	2.347.232	935.042
Fasilitas kredit yang belum ditarik	2.005.107	1.796.137
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	124.855	105.426
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	1.196.333	633.465
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	756.265	101.696
Fasilitas kredit yang belum ditarik	37.398	109.943
Total	6.467.190	3.681.709

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (diluar fasilitas kredit yang belum ditarik):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		13.292.652		11.789.349
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		725.879		1.261.016
		14.018.531		13.050.365
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	500.823.899	7.261.947	624.841.432	8.779.022
Euro Eropa	98.687.819	1.703.001	105.080.484	1.811.002
Ringgit Malaysia	6.000.000	20.959		-
Yen Jepang	8.950.287	1.174		-
Dolar Australia	49.045	535	49.045	527
		8.987.616		10.590.551
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	183.189.147	2.656.243	143.235.231	2.012.455
Euro Eropa	8.299.261	143.216	8.691.602	149.795
Renminbi	29.767.679	66.830	86.683.075	186.391
Yen Jepang	175.439.892	23.012	698.161	94.929
Pound Sterling Inggris	374.093	7.503	838.999	15.951
Dolar Australia	256.080	2.791		-
Dolar Singapura	61.170	660	1.401.751	14.867
Ringgit Malaysia		-	91.061	317
		2.900.255		2.474.705
		11.887.871		13.065.256
		25.906.402		26.115.621
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		12.976.118		12.253.235
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		799.025		1.332.481
		13.775.143		13.585.716
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	627.289.756	9.095.701	653.483.434	9.181.442
Yen Jepang	2.984.790.525	391.515	3.057.637.714	415.747
Ringgit Malaysia	87.939.128	307.184	98.782.000	343.877
Euro Eropa	5.832.908	100.655	4.653.595	80.202
Baht Thailand	49.744.000	22.519	49.744.000	23.285
Dolar Kanada		-	620.000	6.808
		9.917.574		10.051.361

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (diluar fasilitas kredit yang belum ditarik) (lanjutan):

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	426.725.998	6.187.527	257.485.694	3.617.674
Euro Eropa	17.296.601	298.478	12.096.427	208.475
Yen Jepang	942.589.595	123.639	514.584.099	69.968
Dolar Singapura	883.900	9.535	220.504	2.339
Pound Sterling Inggris	357.228	7.165	396.139	7.532
		6.626.344		3.905.988
		16.543.918		13.957.349
		30.319.061		27.543.065
Total		56.225.463		53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(4.424.685)		(1.783.876)
Bersih		51.800.778		51.874.810

c) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Lancar	152.247.254	177.122.324
Dalam perhatian khusus	1.692.905	860.669
Kurang lancar	775	30.199
Diragukan	-	753.424
Macet	4.163	68.761
Total	153.945.097	178.835.377
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(6.467.190)	(3.681.709)
Bersih	147.477.907	175.153.668

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	8.582.638	372.705	4.396	8.959.739
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	42	-	-	42
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	8.230.749	854.294	2.832	9.087.875
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(8.316.330)	1.271.123	(4.396)	(7.049.603)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	4.370	49.080	-	53.450
	8.501.469	2.547.202	2.832	11.051.503
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	14.451
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(14.451)
Nilai tercatat akhir	8.501.469	2.547.202	2.832	11.051.503

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	6.297.120	157.646	-	6.454.766
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(1.029.897)	-	-	(1.029.897)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	10.496.419	372.705	4.396	10.873.520
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(7.257.499)	(157.646)	-	(7.415.145)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	76.495	-	-	76.495
	8.582.638	372.705	4.396	8.959.739
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	4.715
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	9.736
Nilai tercatat akhir	8.582.638	372.705	4.396	8.974.190

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	76.327	134.646	4.396	215.369
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(1.710)	325.876	-	324.166
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	69.944	410.539	2.997	483.480
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(45.428)	(92.705)	(4.561)	(142.694)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	52	747	-	799
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	99.185	779.103	2.832	881.120
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	135.313
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	34.803
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	22.917	147.199	-	170.116
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(7.107)	-	-	(7.107)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	77.224	18.421	4.396	100.041
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(16.918)	(31.230)	-	(48.148)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	211	256	-	467
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	76.327	134.646	4.396	215.369

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	42.799.528	1.514.795	1.299	44.315.622
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	11.339.814	-	-	11.339.814
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	16.783.730	3.938.568	1.638	20.723.936
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(29.502.830)	(2.197.681)	(830)	(31.701.341)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	457.639	38.290	-	495.929
	41.877.881	3.293.972	2.107	45.173.960
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	368.874
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(368.874)
Nilai tercatat akhir	41.877.881	3.293.972	2.107	45.173.960
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	43.952.185	789.582	103.666	44.845.433
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	50.049	1.622.054	-	1.672.103
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	20.319.890	-	-	20.319.890
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(22.853.295)	(896.841)	(102.367)	(23.852.503)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.330.699	-	-	1.330.699
	42.799.528	1.514.795	1.299	44.315.622
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	205.932
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	162.942
Nilai tercatat akhir	42.799.528	1.514.795	1.299	44.684.496

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	919.432	644.176	1.299	1.564.907
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	498.124	-	-	498.124
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	662.693	1.598.564	1.297	2.262.554
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(726.506)	(54.188)	(830)	(781.524)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(496)	-	-	(496)
	1.353.247	2.188.552	1.766	3.543.565
Nilai cadangan kerugian dengan prinsip syariah	-	-	-	3.600
Mutasi cadangan kerugian dengan prinsip syariah	-	-	-	(3.600)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.353.247	2.188.552	1.766	3.543.565
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	472.244
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	393.390
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	184.517	577.451	103.666	865.634
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(105.935)	(21.301)	-	(127.236)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	1.542.653	396.989	-	1.939.642
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(463.057)	(47.277)	(102.367)	(612.701)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(238.746)	(261.686)	-	(500.432)
	919.432	644.176	1.299	1.564.907
Nilai cadangan kerugian dengan prinsip syariah	-	-	-	1.936
Mutasi cadangan kerugian dengan prinsip Syariah	-	-	-	1.664
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	919.432	644.176	1.299	1.568.507

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	30 Juni 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	107.385.138	16.633.800	539.301	124.558.239
Pengalihan ke				
Stage 1	537.736	(490.700)	(47.036)	-
Stage 2	(1.637.542)	1.648.125	(10.583)	-
Stage 3	(243.973)	(159.662)	403.635	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	8.324.041	(2.322.059)	(145.682)	5.856.300
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	4.941.171	572.516	56.700	5.570.387
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(37.865.017)	(447.163)	(85.396)	(38.397.576)
Penghapusbukuan	(211)	(566)	(46.266)	(47.043)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	179.282	45	-	179.327
	81.620.625	15.434.336	664.673	97.719.634
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	618.452
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(618.452)
Nilai tercatat akhir	81.620.625	15.434.336	664.673	97.719.634

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	91.702.174	39.578.171	65.279	131.345.624
Pengalihan ke				
Stage 1	1.763.691	(1.723.453)	(40.238)	-
Stage 2	(1.015.757)	1.046.973	(31.216)	-
Stage 3	(215.615)	(126.872)	342.487	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	(1.864.242)	(981.600)	(13.273)	(2.859.115)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	19.715.413	1.357.890	520.174	21.593.477
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(4.579.841)	(22.347.746)	(140.751)	(27.068.338)
Penghapusbukuan	(10.817)	(171.570)	(163.163)	(345.550)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.890.132	2.007	2	1.892.141
	107.385.138	16.633.800	539.301	124.558.239
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	145.544
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	472.908
Nilai tercatat akhir	107.385.138	16.633.800	539.301	125.176.691

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

30 Juni 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	769.843	984.971	143.019	1.897.833
Pengalihan ke				
Stage 1	28.387	(26.328)	(2.059)	-
Stage 2	(19.390)	21.993	(2.603)	-
Stage 3	(3.530)	(10.761)	14.291	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(108.896)	430.008	(80.024)	241.088
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	77.420	23.269	1	100.690
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(158.129)	(24.254)	(15.329)	(197.712)
Penghapusbukuan	(411)	(566)	(46.266)	(47.243)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.662	46.186	1	47.849
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	586.956	1.444.518	11.031	2.042.505

31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	1.084.883
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	435.781	516.097	133.005	1.084.883
Pengalihan ke				
Stage 1	43.602	(37.871)	(5.731)	-
Stage 2	(7.669)	16.507	(8.838)	-
Stage 3	(1.813)	(4.601)	6.414	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(91.044)	169.782	32.281	111.019
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	977.562	326.046	292.297	1.595.905
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(591.133)	-	(302.641)	(893.774)
Penghapusbukuan	(298)	(1.031)	(3.769)	(5.098)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	4.855	42	1	4.898
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	769.843	984.971	143.019	1.897.833

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara kolektif dan individual dengan menggunakan bukti objektif.

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.600 pada tanggal 31 Desember 2020.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah memadai.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Cadangan Bonus dan Insentif	4.576.252	3.505.408
Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja (Catatan 42)	6.658.203	6.552.009
Cadangan Tunjangan Hari Raya	602.600	423.882
Cadangan pekerja kontrak	48.826	-
Cadangan khusus PHK (Qonun)	-	339.784
Total	11.885.881	10.821.083

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja meliputi program pensiun imbalan pasti, program tunjangan hari tua dan program imbalan jangka panjang lain (Program penghargaan tanda jasa, cuti besar, BPJS kesehatan pasca kerja dan manfaat lain dana manfaat tambahan) sesuai dengan kebijakan BRI dan entitas anak yang dihitung sesuai dengan perhitungan aktuarial independen.

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Liabilitas manfaat polis masa depan	6.649.644	6.530.727
Liabilitas kontrak investasi	3.412.687	3.145.743
Premi yang belum merupakan pendapatan	1.576.413	1.213.923
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 45b)	1.123.196	1.141.920
Utang bunga	884.925	1.078.530
Estimasi liabilitas klaim	241.367	268.710
Liabilitas kartu kredit	190.237	105.606
Dana <i>syirkah</i> temporer	160.960	153.260
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu	133.011	140.036
Utang reasuransi	119.390	155.609
Cadangan pajak hadiah simpedes	27.476	22.139
Setoran jaminan	15.153	16.128
Pendapatan diterima di muka	10.569	47.610
Bagi hasil yang masih harus dibayar	-	178.087
Lain-lain	4.757.531	4.247.597
	19.302.576	18.445.625

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Liabilitas lain-lain terdiri atas (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Mata uang asing</u>		
Utang bunga	311.463	367.850
Pendapatan diterima di muka	228.078	202.819
Lain-lain	2.754.275	612.123
	<u>3.293.816</u>	<u>1.182.792</u>
Total	<u>22.596.392</u>	<u>19.628.417</u>

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I	-	964.505
Pinjaman <i>two-step loan</i>	2.851	3.175
Obligasi Subordinasi III	498.135	497.712
	<u>500.986</u>	<u>1.465.392</u>
Total	<u>500.986</u>	<u>1.465.392</u>

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I

Pada tanggal 17 November 2016, BRIS menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dengan pendapatan bagi hasil yang diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini diperingkat oleh Fitch Ratings dengan peringkat A+(idn).

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya, dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A(idn) dari Fitch Ratings. Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I (lanjutan)

Pembatasan dan kewajiban BRIS atas Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya BRIS, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik BRIS kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik BRIS berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan BRIS atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh BRIS dari pihak ketiga yang bukan terafiliasinya dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger bank syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal "Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri".

b. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat suku bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,09% dan 2,00% masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

c. Obligasi Subordinasi III Tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dibayarkan 3 (tiga) bulanan sejak tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* AA.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Obligasi Subordinasi III tahun 2018 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
> 1 tahun - 5 tahun	499.046	1.462.217
> 5 tahun	1.940	3.175
Total	500.986	1.465.392

30. OPSI SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Maret 2016, pemegang saham menyetujui untuk mengalihkan saham BRI dari hasil pembelian kembali yang disimpan dalam saham treasuri untuk program kepemilikan saham manajemen dan pekerja.

Tujuan program ini untuk mendorong kepemilikan saham BRI oleh peserta program, menyelaraskan tujuan BRI dengan tujuan peserta program yang merupakan manajemen dan pekerja BRI, serta meningkatkan kinerjanya.

BRI menerbitkan program MESOP pada tanggal 15 Mei 2020 (tanggal pemberian) sejumlah 194.008.300 lembar saham dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I sebanyak 97.004.150 lembar saham dengan periode *vesting* berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.
- b. Tahap II sebanyak 97.004.150 lembar saham dengan periode *vesting* berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Masa berlaku opsi sejak tanggal pendistribusian sampai dengan 31 Oktober 2021. Setelah tanggal tersebut, seluruh hak opsi yang tidak digunakan akan menjadi gugur.

Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima MESOP adalah direksi, dewan komisaris kecuali komisaris independen dan karyawan tetap dengan mengacu kepada masa kerja, penilaian kinerja, kelompok jabatan dan jabatan.

Perhitungan, metode dan asumsi mengenai MESOP diperoleh dari laporan aktuaris independen, Willis Towers Watson pada tanggal 6 Agustus 2020.

Beban kompensasi yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian sehubungan dengan opsi saham Tahap I dan Tahap II untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp14.686 yang dikreditkan ke opsi saham di ekuitas. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp33.466 dan Rp22.370.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. OPSI SAHAM (lanjutan)

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model "Black-scholes", dengan asumsi utama sebagai berikut:

	MESOP Tahap 1	MESOP Tahap 2
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	5,5	12,5
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	2.240	2.240
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	2.240	2.240
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	345	382
Volatilitas harga saham	58,46%	43,85%
Suku bunga bebas risiko	5,23	5,56
Tingkat dividen	5,10	5,10

31. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Dewan Komisaris:				
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto	564.100	50	28.205.000	0,00
- Hadiyanto	625.800	50	31.290.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	1.008.000	50	50.400.000	0,00
- Catur Budi Harto	329.200	50	16.460.000	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	1.819.400	50	90.970.000	0,00
- Indra Utoyo	1.726.400	50	86.320.000	0,00
- Handayani	1.564.500	50	78.225.000	0,00
- Supari	1.248.400	50	62.420.000	0,00
- Agus Noorsanto	383.900	50	19.195.000	0,00
- Agus Sudiarto	294.600	50	14.730.000	0,00
- Amam Sukriyanto	129.500	50	6.475.000	0,00
- Agus Winardono	129.100	50	6.455.000	0,00
- Viviana Dyah Ayu Retno	105.000	50	5.250.000	0,00
- Arga Mahanana Nugraha	57.300	50	2.865.000	0,00
Masyarakat	52.587.542.300	50	2.629.377.115.000	42,64
	122.597.527.500		6.129.876.375.000	99,39
Saham treasury (Catatan 1d)	748.282.500		37.414.125.000	0,61
Total	123.345.810.000		6.167.290.500.000	100,00

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Dewan Komisaris:				
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto	816.300	50	40.815.000	0,00
- Hadiyanto	625.800	50	31.290.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	1.008.000	50	50.400.000	0,00
- Catur Budi Harto	329.200	50	16.460.000	0,00
- Haru Koesmahargyo	1.835.600	50	91.780.000	0,00
- Priyastomo	1.835.600	50	91.780.000	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	1.819.400	50	90.970.000	0,00
- Indra Utoyo	1.726.400	50	86.320.000	0,00
- Handayani	1.602.500	50	80.125.000	0,00
- Supari	1.242.300	50	62.115.000	0,00
- Agus Noorsanto	380.800	50	19.040.000	0,00
- Herdy Rosadi Harman	311.900	50	15.595.000	0,00
- Agus Sudiarto	294.600	50	14.730.000	0,00
Masyarakat	52.581.518.100	50	2.629.075.905.000	42,64%
	122.595.346.500		6.129.767.325.000	99,39%
Saham treasuri (Catatan 1d)	750.463.500		37.523.175.000	0,61
Total	123.345.810.000		6.167.290.500.000	100,00%

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2018	(81.195)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2019	207.665
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2020	511.485
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2021	4.112
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	565.210
Total	3.981.135

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003, jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasi ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	589.762

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan (MSOP)*).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Transaksi entitas sependengali

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan kepemilikan saham PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f), dan berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Sekuritas), sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f).

Transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sependengali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventures	3.090	2.424	666
Jumlah	449.978	368.783	81.195

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Kehilangan pengendalian atas entitas anak (BRIS)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Berdasarkan rasio penggabungan kepemilikan BRI atas BSI adalah sebesar 17,29% atau sebanyak 7.092.761.655 lembar saham senilai Rp3.546.381.

Transaksi penggabungan ini merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, BNI, Mandiri, BSM, BRIS dan BNIS adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah tercatat investasi sebelumnya dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah tercatat Investasi sebelumnya	Jumlah tercatat investasi akibat merger	Tambahan modal disetor
Kepemilikan BRI atas BSI	2.981.171	3.546.381	565.210

c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura dan Timor-Leste) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong dan Dolar Singapura ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ai). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 25 Maret 2021 dan 18 Februari 2020 pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan	
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Konsolidasian	12.125.589	20.623.565

e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang "Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

f. Saham bonus BRI

Memperhatikan perkembangan kinerja bisnis BRI serta dalam rangka meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang kepada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Direksi BRI dan entitas anak memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi manajemen dan pekerja (*Employee Stock Allocation* (ESA)). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Pembayaran Program ESA I BRI Tahap 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direksi No. 751-DIR/KHC/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Implementasi *Management and Employee Stock Ownership Program* kepada 50.775 pekerja sebanyak 143.415.500 lembar saham (Catatan 1d).

Pembayaran Program ESA I BRI Tahap 2 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat No. B.442-DIR/HCS/03/2020 kepada 173 pekerja sebanyak 4.396.700 lembar saham (Catatan 1d).

Sesuai surat Direksi No. B.03-DIR/HCS/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, BRI kembali melaksanakan program ESA II yang didistribusikan kepada 54.527 pekerja yaitu sebanyak 226.714.300 lembar saham (Catatan 1d). ESA III dan ESA IV yang masing-masing didistribusikan kepada 57.111 pekerja dan masing-masing sebanyak 261.177.000 lembar saham.

Nilai wajar dari ESA II BRI pada saat pemberian adalah sebesar Rp995.148 yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. BRI telah melaksanakan pembayaran atas ESA II di 25 Februari 2020.

Nilai wajar dari ESA III dan ESA IV pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2020 masing-masing sebesar Rp953.005 dan Rp930.721. Nilai wajar ESA III dan ESA IV diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

f. Saham bonus BRI (lanjutan)

Biaya ESA III dan ESA IV yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp188.922 dan Rp231.084.

Program ESA III telah diselesaikan pada tanggal 31 Maret 2021 dan ESA IV akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021 dan akan dibayarkan dengan saham BRI.

Per tanggal 5 Februari dan 31 Maret 2021 terdapat pembayaran atas ESA I dan ESA II sebanyak 2.181.000 lembar (catatan 1d).

g. Perubahan proporsi kepemilikan oleh kepentingan nonpengendali di PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana para Pemegang Saham menyetujui untuk menerbitkan saham baru sehingga modal dasar BRI Life menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) (Catatan 1f).

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 Maret 2021, FWD Financial Services Pte. Ltd akan mengambil alih sebanyak 936.458 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham sebagai kelanjutan dari kerjasama strategis jangka panjang. Sehingga komposisi kepemilikan saham BRI Life adalah BRI sebesar 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 6,31% dan FWD Financial Services Pte. Ltd sebesar 29,86% (Catatan 1f).

Dikarenakan proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, BRI menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendalian dan kepentingan nonpengendalian untuk mencerminkan perubahan kepemilikan dalam BRI Life. Perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima BRI diakui secara langsung dalam ekuitas yaitu pada akun "Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali" sebesar Rp1.758.580.

h. Kepentingan non pengendali

Berikut di bawah ini adalah rincian dari kepentingan non-pengendali:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Entitas Anak</u>		
PT Asuransi BRI Life	2.421.113	368.471
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	610.631	547.974
PT BRI Asuransi Indonesia	118.850	103.859
PT Danareksa Sekuritas	67.238	60.681
PT Bank BRI Syariah Tbk	-	1.452.824
Total	3.217.832	2.533.809

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
<u>Rupiah</u>		
Kredit yang diberikan		
Mikro	29.456.454	22.484.901
Ritel	20.018.196	19.351.244
Korporasi	1.402.857	4.167.762
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	78.088	225.132
Obligasi	8.928	24.182
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	400
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	2.280.975	2.164.536
Obligasi	462.198	415.868
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	10.316	37.028
<i>Medium-Term Note</i>	9.540	16.027
Sertifikat Bank Indonesia	-	2.306
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	2.036.822	1.201.243
Obligasi	362.315	98.056
<i>Medium-Term Note</i>	2.147	3.161
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	5.259
Sertifikat Bank Indonesia	-	9.931
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Biaya perolehan diamortisasi	-	20.924
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
<i>Inter-bank call money</i>	1.152	31.367
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	192.239	285.963
Lain-lain	144.386	84.902
Giro pada Bank Indonesia	4.809	119
Lain-lain	618.005	1.507.580
	57.089.427	52.137.891
<u>Mata uang asing</u>		
Kredit yang diberikan		
Korporasi	1.537.047	1.216.737
Ritel	170.951	180.657
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	2.340	345
Obligasi	155	10.971
Sertifikat Bank Indonesia		
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	556.215	416.789
Obligasi	38.404	98.208
Sertifikat Bank Indonesia	11.519	68.867

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>		
Efek-efek (lanjutan)		
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	350.122	230.989
Obligasi	11.944	3.711
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	15.505	116.353
<i>Inter-bank call money</i>	36.307	19.415
Lain-lain	44.068	-
Giro pada Bank Indonesia	6.305	-
Lain-lain	2.791	18.629
	2.783.673	2.381.674
	59.873.100	54.519.565
Pendapatan syariah diperoleh dari:		
<i>Murabahah</i>	-	842.635
<i>Musarakah</i>	-	610.528
Lain-lain	840	605.574
	840	2.058.737
Total	59.873.940	56.578.302

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
<u>Rupiah</u>		
Deposito berjangka	6.140.124	10.625.019
Tabungan	1.180.721	1.465.644
Giro	980.641	1.517.700
Surat berharga yang diterbitkan	759.723	1.012.622
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	258.104	290.033
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	156.841	508.945
Pinjaman yang diterima	55.718	50.004
Pinjaman Subordinasi	24.903	19.534
Lain-lain	1.778.021	1.648.107
	11.334.796	17.137.608

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Akun ini merupakan beban bunga atas (lanjutan):

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Mata uang asing		
Deposito berjangka	416.839	1.208.777
Surat berharga yang diterbitkan	326.785	318.224
Pinjaman yang diterima	284.667	268.636
Giro	235.236	185.388
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	74.649	73.946
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	15.058	35.542
Tabungan	2.939	3.297
Lain-lain	39.975	164.943
	1.396.148	2.258.753
	12.730.944	19.396.361
Beban syariah terdiri atas:		
Deposito <i>mudharabah</i>	-	562.664
Lain-lain	-	116.828
Total Beban Syariah	-	679.492
Total	12.730.944	20.075.853

34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Kredit yang diberikan (Catatan 11f)	18.703.088	8.884.950
Piutang dan pembiayaan Syariah (Catatan 12)	-	470.953
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 13c)	18.819	26.734
Efek-efek (Catatan 7j)	507.144	34.389
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya (Catatan 8d)	(33.055)	50.151
Tagihan Akseptasi (Catatan 14d)	(345.587)	(58.446)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 9b)	-	(1)
Giro pada Bank lain (Catatan 5e)	255	10.361
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 6e)	(8.758)	365
Lainnya	-	316
Total	18.841.906	9.419.772

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Gaji, upah dan tunjangan	7.332.575	7.887.306
Bonus, insentif dan tantiem	3.000.041	2.553.783
Pensiun imbalan pasti (Catatan 42a dan 42e)	698.618	192.948
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 42d)	504.680	79.631
Biaya kompensasi saham (Catatan 30 dan 31f)	434.692	1.621.044
Iuran Jamsostek	416.983	416.610
Cuti besar (Catatan 42e)	401.468	182.572
Pensiun iuran pasti (Catatan 42c)	190.621	175.440
Tunjangan kesehatan	183.604	111.966
Penghargaan tanda jasa (Catatan 42e)	107.075	120.121
Pendidikan dan pelatihan	86.156	183.020
Program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 42e)	75.212	15.839
Lain-lain	768.569	384.853
Total	14.200.294	13.925.133

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp59.976 dan Rp57.471 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, sedangkan jumlah gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp24.747 dan Rp20.291 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Catatan 44).

Jumlah tantiem, bonus dan insentif Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci BRI yang dibayarkan adalah sebesar Rp67.905 dan Rp423.768 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Catatan 44).

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Jasa <i>outsourcing</i>	1.732.905	1.753.085
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	1.256.909	1.256.395
<i>E-Channel</i>	1.012.732	835.890
Barang dan jasa pihak ketiga	880.792	668.689
Sewa	647.313	592.441
Perbaikan dan pemeliharaan	546.182	633.552
Transportasi	380.302	392.676
Listrik dan air	285.488	313.553
Jasa profesional	187.262	135.424
Percetakan dan benda pos	185.964	203.708
Peralatan kantor	173.346	161.180
Komunikasi	86.642	75.045
Instalasi komputer	28.334	27.676
Penelitian dan pengembangan produk	9.492	9.778
Lain-lain	799.339	1.020.107
Total	8.213.002	8.079.199

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	22.985	6.225
Pendapatan sewa	678	3.362
Sumbangan	(4.389)	(3.571)
<i>Corporate Social Responsibility</i>	(27.120)	(15.015)
Lain-lain - neto	17.680	35.375
Total	9.834	26.376

38. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>BRI (entitas induk)</u>		
Pajak penghasilan		
Pasal 25	775.960	-
Pasal 29	3.117.259	1.064.461
	3.893.219	1.064.461
<u>Entitas anak</u>		
Pajak penghasilan	115.907	324.745
Pajak Pertambahan Nilai	24.754	11.432
	140.661	336.177
Total	4.033.880	1.400.638

b) Beban Pajak

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
<u>BRI (entitas induk)</u>		
Beban pajak kini dari:		
Periode berjalan	6.214.740	2.445.529
(Manfaat)/Beban pajak penghasilan tangguhan	(2.404.324)	2.802.955
	3.810.416	5.248.484
<u>Entitas anak</u>		
Beban pajak kini dari:		
Periode berjalan	120.541	86.127
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	-	5.670
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	(91.266)	(1.880)
	29.275	89.917
Total	3.839.691	5.338.401

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Bagian laba entitas anak	16.379.527 (121.421)	15.539.443 (89.878)
Laba sebelum beban pajak BRI (entitas induk)	16.258.106	15.449.565
Perbedaan temporer:		
Cadangan kerugian aset produktif	9.614.504	(2.091.879)
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.780.822	(274.307)
Pembentukan penyisihan beban pegawai	995.719	(214.947)
Pembayaran <i>benefit</i> karyawan berbasis saham	434.692	599.439
Penyusutan aset tetap	221.521	117.471
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	95.818	(16.560)
	<u>14.143.076</u>	<u>(1.880.783)</u>
Perbedaan permanen:		
Representasi dan sumbangan	81.111	79.695
Humas	25.696	92.453
Pembinaan jasmani dan rohani	15.922	13.848
Bagian laba entitas asosiasi	(221.502)	(584)
Lain-lain	2.406.747	(882.990)
	<u>2.307.974</u>	<u>(697.578)</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>32.709.156</u>	<u>12.871.204</u>
<u>Entitas induk</u>		
Beban pajak-kini	(6.214.740)	(2.445.529)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama periode berjalan	3.097.481	2.907.619
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>(3.117.259)</u>	<u>462.090</u>
<u>Entitas anak</u>		
Beban pajak-kini	(120.541)	(86.127)
Pembayaran angsuran pajak penghasilan selama periode berjalan	32.600	58.577
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29^{*)} - neto	<u>(87.941)</u>	<u>(27.550)</u>

^{*)} Pada tanggal 30 Juni 2020 termasuk estimasi tagihan pajak penghasilan sebesar Rp30.714.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	16.379.527	15.539.443
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	3.115.753	2.955.191
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan		
BRI	438.515	(132.540)
Entitas anak	2.561	41.537
Pengaruh penurunan tarif pajak	282.862	2.474.213
	3.839.691	5.338.401

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
<u>Entitas Induk</u>		
Pembentukan (Pembalikan) cadangan kerugian aset produktif	1.634.466	(2.324.515)
Pembentukan cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	472.740	(179.290)
Pembentukan/(pembalikan) penyisihan beban pegawai	169.272	(474.350)
Pembayaran <i>benefit</i> karyawan berbasis saham	73.898	112.586
Penyusutan aset tetap	37.659	63.020
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	16.289	(406)
	2.404.324	(2.802.955)
<u>Entitas anak</u>	91.260	1.880
Total	2.495.584	(2.801.075)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

c) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Entitas induk</u>		
Cadangan kerugian aset produktif ⁾	7.669.826	6.035.360
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi ⁾	1.096.290	623.550
Penyisihan beban pegawai	1.632.594	1.463.322
Penyusutan aset tetap	(69.629)	(107.288)
Pengukuran kembali program imbalan pasti (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	337.368	296.183
	(9.956)	(26.245)
Pembayaran <i>benefit</i> karyawan berbasis saham (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	292.286	218.388
	(462.768)	(898.168)
	<u>10.486.011</u>	<u>7.605.102</u>
<u>Entitas anak</u>	516.826	708.443
Total	<u>11.002.837</u>	<u>8.313.545</u>

⁾ Termasuk dampak penerapan awal PSAK No. 71 yang dibebankan ke saldo laba 1 Januari 2020 untuk cadangan kerugian aset produktif dan cadangan estimasi komitmen dan kontinjensi masing-masing sebesar Rp3.681.136 dan Rp377.994.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020.

Adapun aturan tersebut telah menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan surat keterangan No. DE/VII/2021-2572 tanggal 2 Juli 2021 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2021, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2020-0282 tanggal 8 Januari 2021 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2020, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah terpenuhi.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya pembentukan cadangan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan entitas anak) sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan *Internal Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya.

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

	30 Juni 2021		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.169.560	17.143.832	25.728
	31 Desember 2020		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	46.756.681	61.887

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya. (lanjutan)

Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	30 Juni 2021							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	38.818.367	4.140	347	8.505	3.744	4.382	-	38.839.485
Giro pada Bank lain	13.827.180	31	21	32	85	7.121	1.592.762	15.427.232
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	84.020.051	123.850	-	83.500	3.200	9.500	11.500.813	95.740.914
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	20.500.775	-	-	-	-	-	-	20.500.775
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.386.933	-	-	-	-	-	-	171.386.933
Biaya perolehan di amortisasi	110.106.916	-	-	-	-	-	-	110.106.916
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	19.949.891	753.606	77.290	1.323.764	2.409.220	2.239.499	330.961	27.084.231
Efek-efek yang dibeli								
dengan janji dijual kembali	17.169.560	-	-	-	-	-	-	17.169.560
Tagihan derivatif	620.356	-	-	-	-	-	-	620.356
Kredit yang diberikan								
Mikro	32.132.650	41.265.902	68.092.052	58.334.545	76.199.202	114.500.909	6.139.862	396.665.122
Ritel	90.332.916	25.102.403	39.034.173	46.086.862	56.139.054	91.322.101	4.723.414	352.740.923
Korporasi	135.719.714	10.058.572	2.620.634	4.950.859	12.326.671	3.423.903	10.896.065	179.996.418
Piutang sewa pembiayaan	1.145.553	1.143.291	304.180	509.907	503.937	562.362	-	4.169.230
Tagihan akseptasi	4.942.775	33.214	80.593	530.345	23.829	111.860	-	5.722.616
Penyertaan saham*)	1.328.565	-	-	-	-	-	-	1.328.565
Aset lain-lain**)	11.819.044	463.240	26.509	35.149	77.436	44.489	227.948	12.693.815
Total	753.821.246	78.948.249	110.235.799	111.863.468	147.686.378	212.226.126	35.411.825	1.450.193.091
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(80.799.233)
Bersih								1.369.393.858
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.173.641	2.512.239	11.644	606.923	1.509.484	237.572	-	11.051.503
Garansi yang diterbitkan	33.674.025	4.045.755	689.565	1.373.361	1.557.729	3.833.525	-	45.173.960
Total	39.847.666	6.557.994	701.209	1.980.284	3.067.213	4.071.097	-	56.225.463
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(4.424.685)
Bersih								51.800.778

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

	31 Desember 2020							Total
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada Bank lain	8.201.321	1.680	66	6.629	253	7.387	937.042	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	66.502.919	17.900	1.835	1.356	3.100	9.075	3.500	66.539.685
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	27.666.020	-	-	-	-	-	-	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	177.631.965	-	-	-	-	-	11.913.977	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	107.679.856	-	-	-	-	-	2.723.837	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	21.887.866	825.026	217.788	921.541	1.407.817	2.218.397	94.569	27.573.004
Efek-efek yang dibeli								
dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	-	-	-	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan								
Mikro	30.784.349	39.669.772	64.515.810	54.571.523	71.801.130	116.299.548	-	377.642.132
Ritel	98.761.708	24.846.548	37.790.804	44.162.935	54.519.359	93.180.749	957.586	354.219.689
Korporasi	121.152.740	10.103.872	3.436.499	5.152.959	12.931.601	4.355.262	10.463.453	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	9.077.999	3.852.646	2.675.118	3.320.262	15.055.087	4.934.561	-	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	1.130.127	917.082	287.264	410.643	425.240	448.868	-	3.619.224
Tagihan akseptasi	5.724.790	537.162	77.519	252.610	225.355	-	-	6.817.436
Penyertaan saham*)	1.035.206	-	-	-	-	-	-	1.035.206
Aset lain-lain**)	10.296.455	49.513	37.687	59.098	143.016	69.487	15.546.836	26.202.092
Total	787.459.517	80.821.201	109.040.390	108.859.556	156.511.958	221.523.334	42.640.800	1.506.856.756
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(69.160.855)
Bersih								1.437.695.901
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.980.956	2.784.047	1.063	662.244	1.459.418	86.462	-	8.974.190
Garansi yang diterbitkan	35.346.682	2.343.702	789.155	1.034.316	2.006.160	3.164.481	-	44.684.496
Total	39.327.638	5.127.749	790.218	1.696.560	3.465.578	3.250.943	-	53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(1.783.876)
Bersih								51.874.810

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

	30 Juni 2021							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	38.839.485	-	-	-	-	-	-	38.839.485
Giro pada bank lain	-	15.427.232	-	-	-	-	-	15.427.232
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	80.676.023	15.064.891	-	-	-	-	-	95.740.914
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	12.801.273	7.507.438	60.013	36.467	-	52.051	43.533	20.500.775
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	152.783.289	10.168.609	8.089	4.860.584	-	3.070.610	495.752	171.386.933
Biaya perolehan di amortisasi	101.078.665	7.663.531	11.000	776.457	-	531.883	45.380	110.106.916
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	806.801	-	8.650	6.990.862	4.110.152	4.089.505	11.078.261	27.084.231
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.169.560	-	-	-	-	-	-	17.169.560
Tagihan derivatif	-	620.356	-	-	-	-	-	620.356
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	74.719.575	30.792.100	167.417.116	28.739.403	94.996.928	396.665.122
Ritel	-	374.571	21.751.164	14.646.275	132.802.520	11.430.664	171.735.729	352.740.923
Korporasi	62.098	1.797.349	29.914.855	41.452.239	14.661.335	14.365.947	77.742.595	179.996.418
Piutang sewa pembiayaan	-	193.363	-	1.729.048	520.443	1.714.218	12.158	4.169.230
Tagihan akseptasi	1.367.933	-	692.183	470.127	3.662	2.759.343	429.368	5.722.616
Penyertaan saham*)	-	13.959	-	-	-	-	1.314.606	1.328.565
Aset lain-lain**)	3.231.397	135.931	3.440	781.623	1.243	220.509	8.319.672	12.693.815
Total	408.816.524	58.967.230	127.168.969	102.535.782	319.516.471	66.974.133	366.213.982	1.450.193.091
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(80.799.233)
Bersih								1.369.393.858
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.543.153	-	-	64.339	14.982	5.781	4.423.248	11.051.503
Garansi yang diterbitkan	19.666.473	217.379	603.009	167.537	222.831	346.198	23.950.533	45.173.960
Total	26.209.626	217.379	603.009	231.876	237.813	351.979	28.373.781	56.225.463
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(4.424.685)
Bersih								51.800.778

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan):

	31 Desember 2020							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada bank lain	-	9.154.378	-	-	-	-	-	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	55.983.929	10.555.756	-	-	-	-	-	66.539.685
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	18.575.636	8.570.911	-	60.078	-	119.645	339.750	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.197.849	10.975.012	-	517.953	-	2.940.380	3.914.748	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	105.100.849	3.544.179	11.000	75.000	-	990.298	682.367	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1.782.970	-	55.250	12.940.357	212.171	887.213	11.695.043	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	-	1.576.659	-	-	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	67.504.500	27.772.846	159.725.383	27.132.382	95.507.021	377.642.132
Ritel	-	420.250	22.084.410	20.700.294	128.759.972	12.361.178	169.893.585	354.219.689
Korporasi	82.797	2.120.147	31.054.552	36.570.772	11.290.133	9.855.574	76.622.411	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	-	75.180	3.770.249	3.453.591	8.182.701	1.580.982	21.852.970	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	-	227.270	68.387	583.887	555.131	379.753	1.804.796	3.619.224
Tagihan akseptasi	1.659.002	-	-	65.401	1.017	20.000	5.072.016	6.817.436
Penyertaan saham*)	-	14.179	-	-	-	-	1.021.027	1.035.206
Aset lain-lain**)	3.349.799	109.055	-	1.071.776	-	156.882	21.514.580	26.202.092
Total	456.082.368	47.342.976	124.548.348	103.811.955	308.726.508	56.424.287	409.920.314	1.506.856.756
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(69.160.855)
Bersih								1.437.695.901
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.611.858	-	-	170.961	3.869	1.379	4.186.123	8.974.190
Garansi yang diterbitkan	17.144.401	284	563.200	1.570.424	305.548	131.872	24.968.767	44.684.496
Total	21.756.259	284	563.200	1.741.385	309.417	133.251	29.154.890	53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(1.783.876)
Bersih								51.874.810

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

a. Giro pada bank lain

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan)

c. Efek-efek

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, seluruh efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International Tbk diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

d. Piutang sewa pembiayaan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Mengalami penurunan nilai	145.408	188.226
Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	424.173	109.595
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	3.599.649	3.321.403
	<u>4.169.230</u>	<u>3.619.224</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(216.247)	(213.060)
Total	<u>3.952.983</u>	<u>3.406.164</u>

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021				Total
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>	Nilai	Nilai	
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	187.591.318	90.456.378	18.441.987	12.293.419	308.783.102
Pertanian	79.809.511	13.745.499	3.306.633	17.772.939	114.634.582
Perindustrian	38.634.955	9.565.709	2.224.728	7.531.776	57.957.168
Jasa dunia usaha	30.542.113	11.468.851	2.432.002	5.299.049	49.742.015
Konstruksi	18.722.882	2.424.239	687.753	12.054.338	33.889.212
Listrik, gas dan air	17.992.755	313.031	58.743	922.553	19.287.082
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.051.707	3.850.801	751.133	5.568.934	18.222.575

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	30 Juni 2021				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>					
Jasa pelayanan sosial	3.498.456	1.757.411	293.519	589.635	6.139.021
Pertambangan	1.475.072	498.670	114.308	752.396	2.840.446
Lain-lain	210.491.205	13.340.235	5.933.366	3.176.334	232.941.140
	<u>596.809.974</u>	<u>147.420.824</u>	<u>34.244.172</u>	<u>65.961.373</u>	<u>844.436.343</u>
<u>Mata uang asing</u>					
Perindustrian	20.733.557	406.465	116.005	7.764.275	29.020.302
Listrik, gas dan air	17.581.086	-	-	2.063.753	19.644.839
Pertanian	9.693.007	-	-	2.059.507	11.752.514
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.040.892	3.746	-	207.600	6.252.238
Jasa dunia usaha	3.812.950	7.144	-	2.907.254	6.727.348
Konstruksi	3.606.817	1.740	-	2.206	3.610.763
Pertambangan	2.945.792	2.173	-	2.490.979	5.438.944
Jasa pelayanan sosial	871.559	-	-	-	871.559
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	619.163	30.491	-	144.523	794.177
Lain-lain	839.998	-	7.849	5.589	853.436
	<u>66.744.821</u>	<u>451.759</u>	<u>123.854</u>	<u>17.645.686</u>	<u>84.966.120</u>
Total	<u>663.554.795</u>	<u>147.872.583</u>	<u>34.368.026</u>	<u>83.607.059</u>	<u>929.402.463</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(78.132.193)
Bersih					<u>851.270.270</u>

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	163.908.099	110.067.665	9.222.345	14.231.370	297.429.479
Pertanian	73.636.779	16.927.192	2.060.920	16.897.255	109.522.146
Perindustrian	36.507.839	11.676.410	1.640.743	6.761.985	56.586.977
Jasa dunia usaha	29.574.829	13.943.230	1.176.694	3.506.634	48.201.387
Konstruksi	30.259.390	4.233.431	240.850	7.828.544	42.562.215
Listrik, gas dan air	19.702.738	2.112.042	33.044	954.341	22.802.165
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	12.928.540	4.779.216	629.292	4.017.269	22.354.317
Jasa pelayanan sosial	3.279.131	2.093.247	275.769	906.276	6.554.423
Pertambangan	3.462.082	878.113	58.750	918.308	5.317.253
Lain-lain	222.812.618	15.507.275	4.936.286	3.372.589	246.628.768
	<u>596.072.045</u>	<u>182.217.821</u>	<u>20.274.693</u>	<u>59.394.571</u>	<u>857.959.130</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Mata Mata uang asing</u>					
Perindustrian	22.395.817	21.365	12.360	7.441.701	29.871.243
Pertanian	10.992.105	-	-	2.003.688	12.995.793
Perdagangan, perhotelan dan restoran	3.820.819	6.227	14.442	237.085	4.078.573
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	717.064	29.551	-	140.500	887.115
Listrik, gas dan air	13.948.658	-	-	1.991.101	15.939.759
Jasa pelayanan sosial	1.462.131	-	-	-	1.462.131
Pertambangan	2.356.956	2.402	-	2.580.731	4.940.089
Konstruksi	3.669.656	1.686	-	2.138	3.673.480
Jasa dunia usaha	5.697.699	-	-	7.471	5.705.170
Lain-lain	845.356	-	11.889	4.152	861.397
	65.906.261	61.231	38.691	14.408.567	80.414.750
Total	661.978.306	182.279.052	20.313.384	73.803.138	938.373.880
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(66.614.491)
Bersih					871.759.389

f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 aset keuangan ini mengalami penurunan nilai baik secara individu dan kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif dan individual.

h. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

i. Aset lain-lain

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan)

j. Rekening administratif

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	26.268.770	24.042.584
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	1.524.904	2.593.497
	<u>27.793.674</u>	<u>26.636.081</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	18.905.190	20.641.912
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	9.526.599	6.380.693
	<u>28.431.789</u>	<u>27.022.605</u>
	56.225.463	53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.424.685)	(1.783.876)
Total	<u>51.800.778</u>	<u>51.874.810</u>

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	30 Juni 2021				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Aset</u>					
Giro pada Bank Indonesia	38.839.485	-	-	-	38.839.485
Giro pada bank lain	14.889.822	537.410	-	-	15.427.232
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	95.740.914	-	-	-	95.740.914
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	20.500.556	219	-	-	20.500.775
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.386.933	-	-	-	171.386.933
Biaya perolehan di amortisasi	110.102.116	4.042	-	758	110.106.916
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.063.960	-	-	20.271	27.084.231
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.169.560	-	-	-	17.169.560
Tagihan derivatif	620.356	-	-	-	620.356
Kredit yang diberikan					
Mikro	300.754.140	72.706.120	17.140.735	6.064.127	396.665.122
Ritel	240.530.135	75.166.464	17.111.286	19.933.038	352.740.923
Korporasi	122.270.519	-	116.005	57.609.894	179.996.418
Piutang sewa pembiayaan	2.885.872	713.777	424.173	145.408	4.169.230
Tagihan akseptasi	5.722.616	-	-	-	5.722.616
Penyertaan saham*)	1.328.565	-	-	-	1.328.565
Aset lain-lain**)	11.002.506	1.686.222	2.425	2.662	12.693.815
Total	<u>1.180.808.055</u>	<u>150.814.254</u>	<u>34.794.624</u>	<u>83.776.158</u>	<u>1.450.193.091</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*. (lanjutan)

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai	Total
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	51.530.969
Giro pada bank lain	8.741.212	413.166	-	-	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	66.539.685	-	-	-	66.539.685
Efek efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	27.514.581	151.439	-	-	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	189.545.942	-	-	-	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	109.911.692	491.243	-	758	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	-	-	-	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan					
Mikro	274.708.930	90.438.104	9.366.739	3.128.359	377.642.132
Ritel	234.974.111	84.188.435	9.567.427	25.489.716	354.219.689
Korporasi	123.396.105	209.567	-	43.990.714	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	28.899.160	7.442.946	1.379.218	1.194.349	38.915.673
Piutang sewa pembiayaan	2.317.690	1.003.713	109.595	188.226	3.619.224
Tagihan akseptasi	6.817.436	-	-	-	6.817.436
Penyertaan saham*)	1.035.206	-	-	-	1.035.206
Aset lain-lain**)	24.558.173	1.643.919	-	-	26.202.092
Total	1.226.459.123	185.982.532	20.422.979	73.992.122	1.506.856.756

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (*High Grade*)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturasikan.
- c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's), atau A3 (Moody's).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

1. Tingkat Tinggi (*High Grade*) (lanjutan)

- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

2. Tingkat Standar (*Standard Grade*)

- a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.
- c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

Analisis Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdorong, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

1. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
2. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank juga menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

1. Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD)
2. Indikator kualitatif
3. Tertunggak lebih dari 30 hari.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

b. *Credit Risk Grades*

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

c. Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur *PD term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan bervariasi untuk setiap portofolio dan termasuk perubahan kuantitatif pada PD dan faktor kualitatif, termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan.

Risiko kredit dari eksposur tertentu dianggap telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika, berdasarkan permodelan kuantitatif Bank, *probability of default* (PD) atas umur tersisa telah meningkat signifikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank juga dapat menggunakan penilaian dari analisis kredit dan, jika mungkin, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa mungkin eksposur telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dan pengaruhnya mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam analisis kuantitatif secara tepat waktu.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara *reviu berkala*.

e. Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

f. Definisi Gagal Bayar (*Default*)

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari kelompok usahanya; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada kelompok usahanya.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif - seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif - seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2020	2021
Pertumbuhan PDB	dasar -0,89% Kisaran antara -1,21 hingga -0,59%	dasar 4,58% Kisaran antara 3,98 hingga 5,18%
Tingkat Konsumsi	dasar 1,97% Kisaran antara -1,38 hingga 2,87%	dasar 5,48% Kisaran antara 1,12 hingga 5,67%
Tingkat Investasi	dasar 6,71% Kisaran antara 0,97 hingga 7,17%	dasar 6,83% Kisaran antara 0,95 hingga 7,25%

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo.

5. Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan piutang sewa pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	30 Juni 2021			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	9.295.373	3.991.471	3.853.891	17.140.735
Ritel	10.350.043	3.581.618	3.179.625	17.111.286
Korporasi	116.005	-	-	116.005
Piutang sewa pembiayaan	353.852	53.511	16.810	424.173
Total	20.115.273	7.626.600	7.050.326	34.792.199
	31 Desember 2020			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.813.047	2.629.162	1.924.530	9.366.739
Ritel	5.214.733	2.332.029	2.020.665	9.567.427
Piutang dan pembiayaan syariah	912.212	264.890	202.116	1.379.218
Piutang sewa pembiayaan	41.123	56.141	12.331	109.595
Total	10.981.115	5.282.222	4.159.642	20.422.979

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BRI.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (*maturity gap*), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (*stress*). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*), dan limit risiko likuiditas.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi *mismatch* likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

30 Juni 2021						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	17.803.670	-	-	-	-	17.803.670
Giro pada Bank Indonesia	38.839.485	38.839.485	-	-	-	-
Giro pada bank lain	15.427.232	15.427.232	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(94.098)	-	-	-	-	(94.098)
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	95.740.914	86.980.990	7.382.424	1.377.500	-	-
Cadangan kerugian	(9.312)	-	-	-	-	(9.312)
Efek-efek	301.994.624	199.645.219	2.608.280	8.769.805	90.971.320	-
Cadangan kerugian	(856.335)	-	-	-	-	(856.335)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.084.231	6.316.722	11.411.232	9.356.277	-	-
Cadangan kerugian	(1.290.798)	-	-	-	-	(1.290.798)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.169.560	12.735.578	3.386.767	1.047.215	-	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan):

30 Juni 2021						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset (lanjutan)						
Tagihan Derivatif	620.356	195.195	123.841	82.975	218.345	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	396.665.122	4.188.404	8.793.203	45.756.058	337.927.457	-
Ritel	352.740.923	16.240.617	12.809.018	98.152.762	225.538.526	-
Korporasi	179.996.418	17.034.210	5.212.931	23.334.530	134.414.747	-
Cadangan kerugian	(78.132.193)	-	-	-	-	(78.132.193)
Piutang sewa pembiayaan	4.169.230	51.607	79.369	462.387	3.575.867	-
Cadangan kerugian	(216.247)	-	-	-	-	(216.247)
Tagihan akseptasi	5.722.616	15.480	1.939.330	3.767.806	-	-
Cadangan kerugian	(200.250)	-	-	-	-	(200.250)
Penyertaan saham*)	1.328.565	-	-	-	-	1.328.565
Aset lain-lain**)	12.693.815	492.691	2.617.418	2.085.720	207.738	7.290.248
	1.387.197.528	398.163.430	56.363.813	194.193.035	792.854.000	(54.376.750)
Liabilitas						
Liabilitas segera	10.229.737	10.229.737	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	191.391.820	191.391.820	-	-	-	-
Tabungan	461.701.911	461.701.911	-	-	-	-
Deposito berjangka	443.350.935	234.291.889	110.162.659	49.757.138	49.139.249	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	13.854.757	10.916.993	109.875	2.827.889	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.269.752	7.344.604	796.437	1.796.392	2.332.319	-
Liabilitas derivatif	634.275	154.286	227.289	95.491	157.209	-
Liabilitas akseptasi	5.722.616	15.480	1.939.330	3.767.806	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	30.763.154	-	-	192.277	30.570.877	-
Pinjaman yang diterima	35.300.463	10.739.336	2.928.065	7.952.566	13.680.496	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	500.986	-	-	-	500.986	-
Liabilitas lain-lain***)	10.963.063	743.482	1.663.802	1.229.740	6.682.259	643.780
	1.216.683.469	927.529.538	117.827.457	67.619.299	103.063.395	643.780
Perbedaan Jatuh Tempo	170.514.059	(529.366.108)	(61.463.644)	126.573.736	689.790.605	(55.020.530)

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan):

31 Desember 2020						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	32.161.564	-	-	-	-	32.161.564
Giro pada Bank						
Indonesia	51.530.969	51.530.969	-	-	-	-
Giro pada bank lain	9.154.378	9.154.378	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(93.843)	-	-	-	-	(93.843)
Penempatan pada Bank						
Indonesia dan lembaga keuangan lain	66.539.685	57.614.764	8.433.171	491.750	-	-
Cadangan kerugian	(18.070)	-	-	-	-	(18.070)
Efek-efek	327.615.655	218.442.222	940.587	12.324.225	95.908.621	-
Cadangan kerugian	(348.941)	-	-	-	-	(348.941)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	6.797.656	11.192.438	9.582.910	-	-
Cadangan kerugian	(1.326.190)	-	-	-	-	(1.326.190)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	44.433.840	1.259.335	1.125.393	-	-
Tagihan Derivatif	1.576.659	608.655	621.679	135.996	210.329	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	377.642.132	3.793.736	7.954.228	40.686.582	325.207.586	-
Ritel	354.219.689	11.443.327	20.564.387	97.680.377	224.531.598	-
Korporasi	167.596.386	8.415.684	12.319.777	21.307.757	125.553.168	-
Cadangan kerugian	(65.165.002)	-	-	-	-	(65.165.002)
Piutang dan pembiayaan syariah	38.915.673	1.728.557	1.666.653	3.574.110	31.946.353	-
Cadangan kerugian	(1.449.489)	-	-	-	-	(1.449.489)
Piutang sewa pembiayaan	3.619.224	41.251	42.680	486.485	3.048.808	-
Cadangan kerugian	(213.060)	-	-	-	-	(213.060)
Tagihan akseptasi	6.817.436	2.166	3.170.443	3.644.827	-	-
Cadangan kerugian	(546.260)	-	-	-	-	(546.260)
Penyertaan saham*)	1.035.206	-	-	-	-	1.035.206
Aset lain-lain**)	26.202.092	452.394	2.635.364	2.061.124	188.692	20.864.518
	1.469.857.465	414.459.599	70.800.742	193.101.536	806.595.155	(15.099.567)
Liabilitas						
Liabilitas segera	11.845.910	11.845.910	-	-	-	-
Simpanan nasabah						
Giro	185.151.229	185.151.229	-	-	-	-
Giro <i>Wadiah</i>	6.303.202	6.303.202	-	-	-	-
Giro <i>Mudharabah</i>	1.623.563	1.623.563	-	-	-	-
Tabungan	460.453.588	460.453.588	-	-	-	-
Tabungan <i>Wadiah</i>	9.247.604	9.247.604	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	6.147.015	6.147.015	-	-	-	-
Deposito berjangka	426.399.550	245.018.175	124.908.581	48.032.767	8.440.027	-
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	25.776.398	18.322.475	6.722.692	731.231	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	23.785.996	23.336.496	449.500	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	40.478.672	31.380.589	4.263.236	2.819.748	2.015.099	-
Liabilitas derivatif	407.774	102.160	136.061	26.960	142.593	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 (lanjutan):

31 Desember 2020						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas (lanjutan)						
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	6.817.436	2.166	3.170.443	3.644.827	-	-
Pinjaman yang diterima	34.489.091	-	2.823.443	1.720.897	29.944.751	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	35.968.985	4.645.352	4.080.807	15.060.553	12.182.273	-
Liabilitas lain-lain***)	1.465.392	1.465.392	-	-	-	-
	9.054.084	1.349.947	485.666	818.382	6.101.205	298.884
	1.285.415.489	1.006.394.863	147.040.429	72.855.365	58.825.948	298.884
Perbedaan Jatuh Tempo	184.441.976	(591.935.264)	(76.239.687)	120.246.171	747.769.207	(15.398.451)

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana syirkah temporer.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (*Value-at-Risk*) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar.

1. Value-at-Risk (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model *internal* untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

2. Asumsi Value-at-Risk (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 (tidak diaudit):

	30 Juni 2021	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	13.063,13	85.231,62
Tertinggi	32.807,51	501.987,12
Terendah	224,84	12.496,36
	31 Desember 2020	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	7.549,36	19.796,99
Tertinggi	13.946,91	29.419,18
Terendah	134,90	14.237,66

*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

3. Back Testing

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

4. Risiko Pasar di luar Trading Book

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

BRI telah mengembangkan metodologi pengukuran dampak pengaruh pergerakan suku bunga dalam banking book melalui *Interest Rate Risk in The Banking Book* sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Posisi Juni 2021, secara individu BRI mempunyai nilai *delta* EVE (Economic Value of Equity) sebesar 7,43% (perbandingan terhadap modal Tier 1).

Direksi dan Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

	Rupiah (%)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Aset</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	3,21	3,34
Efek-efek	7,01	6,90
Kredit yang diberikan	10,31	10,40
Piutang sewa pembiayaan	17,25	18,53
<u>Liabilitas</u>		
Simpanan nasabah		
Giro	1,96	2,85
Tabungan	0,51	0,69
Deposito	3,64	5,61
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	2,57	3,17
Pinjaman yang diterima	0,02	0,02
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	4,90	4,85
Surat berharga yang diterbitkan	7,90	8,12

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (lanjutan):

	Valas (%)	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Aset</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,32	0,40
Efek-efek	2,16	2,74
Kredit yang diberikan	3,83	3,80
Piutang sewa pembiayaan	6,19	5,63
<u>Liabilitas</u>		
Simpanan nasabah		
Giro	0,77	0,96
Tabungan	0,20	0,31
Deposito	0,92	2,24
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	0,44	0,16
Pinjaman yang diterima	1,28	1,30
Surat berharga yang diterbitkan	4,29	4,29

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book* (tidak diaudit), dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

30 Juni 2021	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 1.903.949
31 Desember 2020	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 1.929.169

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit):

30 Juni 2021

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset						
Kas	-	-	-	-	17.803.670	17.803.670
Giro pada Bank						
Indonesia	38.839.485	-	-	-	-	38.839.485
Giro pada Bank lain	15.427.232	-	-	-	-	15.427.232
Penempatan pada Bank						
Indonesia dan lembaga keuangan lain	86.980.990	7.382.424	1.377.500	-	-	95.740.914
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	20.500.775	-	20.500.775
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	171.386.933	-	171.386.933
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	110.106.916	-	110.106.916
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.084.231	-	-	-	-	27.084.231
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	15.987.417	1.182.143	-	-	-	17.169.560
Tagihan derivatif	-	-	-	-	620.356	620.356
Kredit yang diberikan						
Mikro	338.152	1.979.132	27.783.434	366.564.404	-	396.665.122
Ritel	28.891.230	96.307.007	124.937.832	102.604.854	-	352.740.923
Korporasi	22.247.141	23.334.530	134.414.747	-	-	179.996.418
Piutang sewa pembiayaan	130.976	462.387	3.575.867	-	-	4.169.230
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	5.722.616	5.722.616
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.328.565	1.328.565
Aset lain-lain**)	1.620.337	251	6.339	-	11.066.888	12.693.815
	237.547.191	130.647.874	292.095.719	771.163.882	36.542.095	1.467.996.761
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	10.229.737	10.229.737
Simpanan nasabah						
Giro	-	-	-	191.391.820	-	191.391.820
Tabungan	200.193.844	-	-	261.508.067	-	461.701.911
Deposito berjangka	234.291.889	110.162.659	98.896.387	-	-	443.350.935
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	11.026.868	2.827.889	-	-	-	13.854.757
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.141.041	1.796.392	2.332.319	-	-	12.269.752
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	634.275	634.275
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	5.722.616	5.722.616

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit):

30 Juni 2021						
Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas (lanjutan)						
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	30.763.154	-	30.763.154
Pinjaman yang diterima	11.493.620	11.564.293	12.242.550	-	-	35.300.463
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	500.986	-	500.986
Liabilitas lain-lain****)	2.407.284	1.229.740	6.682.259	-	643.780	10.963.063
	467.554.546	127.580.973	120.153.515	484.164.027	17.230.408	1.216.683.469
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(230.007.355)	3.066.901	171.942.204	286.999.855	19.311.687	251.313.292
31 Desember 2020						
Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	-	-	-	-	32.161.564	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada Bank lain	6.749.966	-	-	95.674	2.308.738	9.154.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	57.614.764	8.924.921	-	-	-	66.539.685
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	27.666.020	-	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	189.545.942	-	189.545.942
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	110.403.693	-	110.403.693
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	-	-	-	-	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	45.693.175	1.125.393	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	-	-	-	-	1.567.659	1.567.659
Kredit yang diberikan						
Mikro	11.747.964	64.883.617	-	301.010.551	-	377.642.132
Ritel	32.007.715	172.870.293	50.002.634	99.339.047	-	354.219.689
Korporasi	20.735.461	146.860.925	-	-	-	167.596.386
Piutang dan pembiayaan syariah	-	-	-	-	38.915.673	38.915.673

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (tidak diaudit):

31 Desember 2020

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Piutang sewa pembiayaan	22.834	111.590	415.550	3.067.748	1.502	3.619.224
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	6.817.436	6.817.436
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.035.206	1.035.206
Aset lain-lain**)	1.576.987	-	-	-	24.625.105	26.202.092
	255.252.839	394.776.739	50.418.184	731.128.675	107.432.883	1.539.009.320
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	11.845.910	11.845.910
Simpanan nasabah						
Giro	-	-	-	185.151.229	-	185.151.229
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	6.303.202	6.303.202
Giro <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	1.623.563	1.623.563
Tabungan	213.506.040	-	-	246.947.548	-	460.453.588
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	9.247.604	9.247.604
Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	6.147.015	6.147.015
Deposito berjangka	369.926.756	48.032.767	8.440.027	-	-	426.399.550
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	25.776.398	25.776.398
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	23.785.996	-	-	-	-	23.785.996
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	35.643.825	2.819.748	2.015.099	-	-	40.478.672
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	407.774	407.774
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	6.817.436	6.817.436
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	34.489.091	-	34.489.091
Pinjaman yang diterima	8.200.862	15.042.822	12.725.301	-	-	35.968.985
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	500.887	964.505	1.465.392
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	9.054.084	9.054.084
	651.063.479	65.895.337	23.180.427	467.088.755	78.187.491	1.285.415.489
Perbedaan (gap) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(395.810.640)	328.881.402	27.237.757	264.039.920	29.245.392	253.593.831

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *Tabarru'* dan dana *Syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, per mata uang, sebagai berikut:

Mata Uang	30 Juni 2021		
	Aset	Liabilitas	PDN
<u>Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	290.208.932	287.423.181	2.785.751
Euro Eropa	3.211.482	3.621.040	409.558
Dolar Singapura	14.453.872	14.748.285	294.413
Dolar Australia	313.634	376.358	62.724
Pound Sterling Inggris	137.590	193.545	55.955
Yen Jepang	1.578.162	1.625.559	47.397
Renminbi	1.204.986	1.246.901	41.915
Dolar Kanada	23.891	56.493	32.602
Lain-lain	1.048.996	845.289	203.707
			3.934.022
Modal (Catatan 48a)			182.527.428
Rasio PDN			2,16%
Mata Uang	31 Desember 2020		
	Aset	Liabilitas	PDN
<u>Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	268.939.015	267.729.710	1.209.305
Dolar Singapura	13.361.892	13.785.073	423.181
Dolar Kanada	7.635	40.090	32.455
Euro Eropa	4.068.561	4.046.125	22.436
Yen Jepang	909.294	888.710	20.584
Dolar Australia	354.057	344.763	9.294
Pound Sterling Inggris	213.020	219.389	6.369
Renminbi	1.025.266	1.019.655	5.611
Lain-lain	728.317	503.740	224.577
			1.953.812
Modal (Catatan 48a)			183.337.537
Rasio PDN			1,07%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup pilar-pilar pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksud ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penerapan proses manajemen risiko dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (Divisi/Desk), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Sentra Layanan BRI Prioritas dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Satuan kerja manajemen risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Di samping itu juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi *anti fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko dimaksud. Dalam rangka pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional dilaksanakan forum melalui forum *Risk Management Committee* (RMC) yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dalam memperkuat penerapan manajemen risiko, maka dibentuk *Digital Risk Department* di Kantor Pusat dan *Regional Risk Management* (RRM) di Wilayah. Organisasi RRM terdiri dari Vice President RRM dan *Regional Risk Management & Compliance* (RMC) yang menjadi partner Pimpinan Kantor Wilayah, serta *Branch Risk & Compliance* (BRC) dan *Unit Risk & Compliance* (URC) yang menjadi partner Pimpinan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan BRI Unit dalam mengelola risiko dan kepatuhan, sekaligus *membangun Governance, Risk & Compliance* (GRC) Culture di seluruh Unit Kerja BRI.

Audit Intern selaku *third line of defence* yang meliputi Audit Kantor Pusat dan Audit Intern Wilayah BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal pada manajemen risiko operasional di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa BRI *Operational Risk Assessor* (BRI OPRA) yang mencakup modul *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI)/*Loss Even Database* (LED), Forum MR dan Maturitas. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional telah dikinikan dalam Surat Edaran No. S.17-DIR/MOP/03/2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

Upaya pemahaman manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional BRI.

1. *Risk Control and Self Assessment (RCSA)*

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (*impact*) dan kemungkinan kejadian (*likelihood*), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/Desk Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu dan Sentra Layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

Laporan hasil konsolidasi RCSA tersebut dilaporkan secara rutin kepada seluruh Direksi BRI dalam *Risk Management Committee* (RMC) yang dilaksanakan setiap triwulan.

2. Manajemen Insiden (MI) dan *Loss Event Database* (LED)

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss* dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III *Framework*.

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI) (lanjutan)

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan Unit Kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko Kantor Wilayah yang di-*monitor* secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI.

5. Maturitas

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemampuan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

6. Business Continuity Management (BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan BCM diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.26-DIR/DMR/12/2016.

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan* (ER Plan) dan kebijakan *Business Continuity Plan* (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritis. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba ER Plan dan BC Plan dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. Business Continuity Management (BCM) (lanjutan)

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI. Ketentuan mengenai tanggap darurat bencana di tempat kerja dirumuskan melalui Surat Edaran No. 110-DIR/MOP/12/2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB yang dimaksud.

Digital and Operational Risk Management Division dan Pasar bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.89-DIR/MOP/11/2017.

8. Penerapan Strategi Anti Fraud BRI

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap pencegahan agar kejadian *fraud* dapat diminimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut BRI telah mengembangkan alat sebagai *early warning system*. Manajemen BRI telah berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap *fraud* (*zero tolerance*). Sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*, Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI secara berkala menandatangani Komitmen *Anti Fraud* sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* yang diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.18-DIR/MOP/03/2020.

Dampak penyebaran virus Covid-19

Kondisi perekonomian global menunjukkan tren pemulihan. Hal ini terlihat pada tingkat *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur Global yang pada bulan April 2021 meningkat menjadi 55,8 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 39,6 (April 2020). Tren positif tersebut berlanjut pada bulan Juni 2021, PMI Global kembali mengalami peningkatan menjadi 62,1. China dan Amerika Serikat masih menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi global, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di kedua negara tersebut. Pada Kuartal I tahun 2021, perekonomian China tumbuh 0,6% yoy, sedangkan Amerika Serikat tumbuh sebesar 0,4% yoy. Selain itu, penerapan kebijakan moneter yang akomodatif oleh Amerika Serikat juga merespon positif oleh pasar, sehingga ketidakpastian global pun menunjukkan tren yang menurun. Namun, dengan munculnya gelombang 3 pandemi Covid-19 yang saat ini sudah tersebar di 96 negara dapat menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi global.

Dari kondisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I tahun 2021 masih berkontraksi pada 0,74% yoy, namun hal ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal IV tahun 2020 yang tumbuh minus 2,19% yoy. Indeks penjualan ritel pada bulan Mei 2021 juga meningkat sebesar 12,9% yoy, hal ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik mengalami peningkatan. Sementara itu, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) juga menunjukkan angka yang mengindikasikan pemulihan. Pada bulan Juni 2021, NPI mencatatkan surplus sebesar USD1,32 miliar atau tumbuh 5,4% yoy. Surplus neraca perdagangan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Namun, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi sejak akhir bulan Juni 2021 dan pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada awal bulan Juli 2021 berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 direvisi ke bawah. Kementerian Keuangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2021 tetap tumbuh menjadi 3,7%-4,5% (sebelumnya 4,5%-5,5%). Sementara BI ikut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 3,5%-4,3%.

Industri perbankan Indonesia secara keseluruhan turut terkena dampak pelemahan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan pada bulan Mei 2021 masih berkontraksi 1,23% yoy, disertai kenaikan NPL dari 3,06% pada posisi Desember 2020 menjadi 3,35% pada bulan Mei 2021. Memburuknya kualitas kredit yang disalurkan perbankan tersebut tidak terlepas dari menurunnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Sementara itu, kecenderungan masyarakat dan pelaku bisnis yang menahan pengeluaran dan investasi menyebabkan perhimpunan dana masyarakat di perbankan meningkat, hal ini tercermin dari pertumbuhan DPK nasional di bulan Mei 2021 yang tumbuh sebesar 10,73% yoy.

Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan akan masih tertahan akibat gelombang kedua Covid-19. Akselerasi pemulihan akan sangat bergantung oleh penanganan kasus Covid-19 di dalam negeri dan percepatan vaksinasi. Proses penanganan Covid-19 yang baik akan memberikan dampak langsung pada perekonomian maupun bisnis perbankan.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen BRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan *People's First*

- a. Penerapan protokol Kesehatan dan keamanan;
 1. Pelaksanaan disinfeksi dan sterilisasi lingkungan kerja;
 2. Vaksinasi bagi pekerja; dan
 3. Penyediaan alat-alat penunjang bagi pekerja dalam rangka antisipasi persebaran Covid-19 seperti *hand sanitizer*, masker, dan vitamin
- b. Kebijakan *Work from Home*
 1. Pembatasan jam kerja operasional;
 2. *Work From Home* (WFH); dan
 3. Penyediaan *flexible office space*
- c. Optimalisasi Inisiatif Digital
 1. Aplikasi *digital office*;
 2. Aplikasi digital *loan processing*; dan
 3. *Dashboard monitoring* harian Melakukan langkah-langkah antisipatif melalui restrukturisasi pada sektor yang terdampak apabila terdapat gejala penurunan *cash flow*.

2. Strategi pertumbuhan yang *sustainable*

a. *Loan portfolio*

1. Pertumbuhan bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, serta melakukan eksplorasi *new growth engine* termasuk *ultramicro business*
2. Program restrukturisasi
3. Program relaksasi pinjaman

b. *Liquidity and market activities*

1. Menjaga GWM, *secondary reserve*, *loan to deposit ratio*, dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)
2. Menjaga posisi devisa neto pada *long position*
3. Menjaga *cash ratio*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen BRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut (lanjutan):

2. Strategi pertumbuhan yang *sustainable* (lanjutan)

c. *Asset Quality*

Menjaga kualitas aset bisnis, termasuk meningkatkan kualitas *enabler* bisnis (*Capability* HC dan Sistem) di antaranya melalui :

1. *Fraud risk management*
2. *Credit Decision Engine & Credit Risk Model*
3. Penguatan EWS

d. *Efficiency*

Upaya efisiensi sebagai bentuk atas adaptasi perlambatan ekonomi dilakukan melalui pengendalian biaya dana, biaya operasional melalui digitalisasi dan *business process re-engineering*.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset				
Kas	17.803.670	17.803.670	32.161.564	32.161.564
Giro pada Bank Indonesia	38.839.485	38.839.485	51.530.969	51.530.969
Giro pada bank lain	15.333.134	15.333.134	9.060.535	9.060.535
Penempatan pada bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	95.731.602	95.731.602	66.521.615	66.521.615
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi	20.500.775	20.500.775	27.666.020	27.666.020
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.386.933	171.386.933	189.545.942	189.545.942
Biaya perolehan diamortisasi	109.250.581	110.106.916	110.054.752	118.327.334
Wesel Ekspor dan tagihan lainnya	25.793.433	25.793.433	26.246.814	26.246.814
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	17.169.560	17.169.560	46.818.568	46.818.568
Tagihan derivatif	620.356	620.356	1.576.659	1.576.659
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	851.270.270	842.432.311	871.759.389	855.687.745
Piutang sewa pembiayaan	3.592.983	3.076.191	3.406.164	4.409.062
Tagihan akseptasi	5.522.366	5.522.366	6.271.176	6.271.176
Penyertaan saham *)	1.328.566	1.328.566	1.035.217	1.035.217
Aset lain-lain **)	12.693.814	12.693.814	26.202.091	26.202.091
Total	1.386.837.528	1.378.339.112	1.469.857.475	1.463.061.311

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas				
Liabilitas segera	10.229.737	10.229.737	11.845.910	11.845.910
Simpanan nasabah ***)				
Giro	191.391.820	191.391.820	191.454.431	191.454.431
Tabungan	461.701.911	461.701.911	469.701.192	469.701.192
Deposito berjangka	443.350.935	443.350.935	426.399.550	426.399.550
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	2.394.251	2.394.251	829.698	829.698
Tabungan	7.415	7.415	30.720	30.720
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	7.651.390	7.651.390	14.544.000	14.544.000
<i>Inter-bank call money</i>	3.801.701	3.801.701	8.381.578	8.381.578
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.269.752	12.269.752	40.478.672	40.478.672
Liabilitas derivatif	634.275	634.275	407.774	407.774
Liabilitas akseptasi	5.722.616	5.722.616	6.817.436	6.817.437
Surat berharga yang diterbitkan	30.763.154	32.455.535	34.489.091	35.911.853
Pinjaman yang diterima	35.300.463	35.300.463	35.968.985	35.968.985
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	500.986	518.326	1.465.392	1.479.040
Liabilitas lain-lain *****)	10.963.063	10.963.063	9.054.084	9.054.084
Total	1.216.683.469	1.218.393.190	1.251.868.513	1.253.304.924

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.

*****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu, kecuali efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan dan liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan serta pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap liabilitas keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b) Efek-efek

Nilai wajar untuk efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut (lanjutan):

c) Kredit yang diberikan dan Piutang dan Pembiayaan Syariah

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Portofolio piutang dan pembiayaan syariah secara umum memiliki tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan syariah yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap.

d) Piutang Sewa Pembiayaan

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

e) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	30 Juni 2021			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	12.801.273	12.801.273	-	-
Reksadana	7.142.744	7.142.744	-	-
Tagihan derivatif	620.356	-	620.356	-
Obligasi	140.309	140.309	-	-
Obligasi Subordinasi	51.112	51.112	-	-
Surat Berharga Komersial	48.308	48.308	-	-
Lainnya	317.029	317.029	-	-
	21.121.131	20.500.775	620.356	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	30 Juni 2021			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan (lanjutan)				
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	139.935.156	139.935.156	-	-
Obligasi	16.506.250	16.506.250	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	10.763.950	10.763.950	-	-
Reksadana	1.226.200	1.226.200	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	249.316	249.316	-	-
<i>MAS Bills</i>	830.394	830.394	-	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	800.206	800.206	-	-
Obligasi Subordinasi	193.734	193.734	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	202.084	202.084	-	-
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	453.583	453.583	-	-
Lainnya	226.060	226.060	-	-
	171.386.933	171.386.933	-	-
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	101.078.665	101.078.665	-	-
Obligasi	1.820.434	1.820.434	-	-
Obligasi Subordinasi	41.575	41.575	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	11.000	11.000	-	-
<i>Tagihan Risk Participation</i>	7.155.242	7.155.242	-	-
	110.106.916	110.106.916	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan	842.432.311	-	775.543.176	66.889.135
Piutang sewa pembiayaan	3.076.191	-	-	3.076.191
	845.508.502	-	775.543.176	69.965.326
Total aset keuangan	1.148.123.482	301.994.624	776.163.532	69.965.326
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	634.275	-	634.275	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	32.455.535	32.455.535	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	518.326	518.326	-	-
	32.973.861	32.973.861	-	-
Total liabilitas keuangan	33.608.136	32.973.861	634.275	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	18.560.819	18.560.819	-	-
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	10.606	10.606	-	-
Reksadana	8.283.969	8.283.969	-	-
Obligasi	388.491	388.491	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	49.419	49.419	-	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	14.816	14.816	-	-
Obligasi Subordinasi	48.313	48.313	-	-
Lainnya	309.587	309.587	-	-
Tagihan derivatif	1.576.659	-	1.576.659	-
	<u>29.242.679</u>	<u>27.666.020</u>	<u>1.576.659</u>	<u>-</u>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	159.132.122	159.132.122	-	-
Obligasi	15.545.018	15.545.018	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	10.674.207	10.674.207	-	-
Reksadana	473.676	473.676	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	680.462	680.462	-	-
<i>MAS Bills</i>	816.470	816.470	-	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	778.499	778.499	-	-
<i>U.S Treasury Bills</i>	210.746	210.746	-	-
Obligasi Subordinasi	196.344	196.344	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	341.167	341.167	-	-
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	402.275	402.275	-	-
Lainnya	294.956	294.956	-	-
	<u>189.545.942</u>	<u>189.545.942</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	112.701.400	112.701.400	-	-
Obligasi	2.716.319	2.716.319	-	-
Obligasi Subordinasi	37.587	37.587	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	114.299	114.299	-	-
Tagihan <i>Risk Participation</i>	2.723.837	2.723.837	-	-
<i>Treasury Bill</i>	33.892	33.892	-	-
	<u>118.327.334</u>	<u>118.327.334</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	855.687.745	-	793.504.738	62.183.007
Piutang sewa pembiayaan	4.409.062	-	-	4.409.062
	<u>860.096.807</u>	<u>-</u>	<u>793.504.738</u>	<u>66.592.069</u>
Total aset keuangan	<u>1.197.212.762</u>	<u>335.539.296</u>	<u>795.081.397</u>	<u>66.592.069</u>
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	407.774	-	407.774	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	35.911.853	35.911.853	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.479.040	1.479.040	-	-
	<u>37.390.893</u>	<u>37.390.893</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total liabilitas keuangan	<u>37.798.667</u>	<u>37.390.893</u>	<u>407.774</u>	<u>-</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a. Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Sekuritas
PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura
PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk*)	Perbankan Syariah

*) Sejak 1 Februari 2021 sudah tidak menjadi entitas anak BRI

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit)

Keterangan	Tanggal 30 Juni 2021 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					Total
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	
Pendapatan bunga dan premi - neto	24.861.209	13.473.503	464.050	7.553.118	1.376.331	47.728.211
Pendapatan operasional lainnya	6.013.728	5.333.328	1.582.715	3.372.038	339.572	16.641.381
Total pendapatan	30.874.937	18.806.831	2.046.765	10.925.156	1.715.903	64.369.592
Beban operasional lainnya	(14.476.169)	(7.890.049)	(793.269)	(1.704.295)	(1.344.145)	(26.207.927)
Beban CKPN	(5.251.345)	(3.881.244)	(11.884.944)	(511.839)	(262.600)	(21.791.972)
Total beban	(19.727.514)	(11.771.293)	(12.678.213)	(2.216.134)	(1.606.745)	(47.999.899)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	107.667	(109.334)	(3.866)	3.104	12.263	9.834
Laba sebelum beban pajak	11.255.090	6.926.204	(10.635.314)	8.712.126	121.421	16.379.527
Beban pajak	(1.463.162)	(900.407)	-	(1.446.847)	(29.275)	(3.839.691)
Laba tahun berjalan	9.791.928	6.025.797	(10.635.314)	7.265.279	92.146	12.539.836
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	366.573.436	363.881.346	181.617.143	-	21.499.768	933.571.693
Total aset	346.214.023	344.938.269	175.120.245	534.866.486	38.765.203	1.439.904.226
Liabilitas segmen						
Total simpanan nasabah	326.290.853	404.790.963	347.990.665	-	17.372.185	1.096.444.666
Total liabilitas	326.290.853	404.790.963	360.104.884	127.080.439	32.436.610	1.250.703.749

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

b. Segmen Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit)

Tanggal 30 Juni 2020 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut						
Keterangan	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	15.726.899	13.586.766	2.242.425	2.996.085	2.533.762	37.085.937
Pendapatan operasional lainnya	5.058.904	5.514.376	1.545.243	1.595.058	22.897	13.736.478
Total pendapatan	20.785.803	19.101.142	3.787.668	4.591.143	2.556.659	50.822.415
Beban operasional lainnya	(9.603.127)	(10.001.303)	(1.614.168)	(2.391.078)	(1.807.934)	(25.417.610)
Beban CKPN	(3.737.890)	(3.693.679)	(1.308.394)	(460.393)	(691.382)	(9.891.738)
Total beban	(13.341.017)	(13.694.982)	(2.922.562)	(2.851.471)	(2.499.316)	(35.309.348)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(30.271)	25.610	(2.784)	1.286	32.535	26.376
Laba sebelum beban pajak	7.414.515	5.431.770	862.322	1.740.958	89.878	15.539.443
Beban pajak	(2.518.839)	(1.845.266)	(292.946)	(591.433)	(89.917)	(5.338.401)
Laba tahun berjalan	4.895.676	3.586.504	569.376	1.149.525	(39)	10.201.042
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	398.613.023	279.585.086	190.844.075	-	57.646.098	926.688.282
Total aset	381.277.034	267.489.621	168.427.487	486.803.629	77.811.896	1.381.809.667
Liabilitas segmen						
Total simpanan nasabah	297.460.545	404.643.224	311.051.814	-	31.797.485	1.044.953.068
Total liabilitas	297.460.545	404.643.224	311.051.814	113.069.983	46.151.022	1.172.376.588

Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut						
Keterangan	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	35.234.044	27.969.778	4.685.993	7.257.183	4.944.570	80.091.568
Pendapatan operasional lainnya	9.074.782	12.020.213	3.583.072	3.752.066	1.033.706	29.463.839
Total pendapatan	44.308.826	39.989.991	8.269.065	11.009.249	5.978.276	109.555.407
Beban operasional lainnya	(19.658.307)	(18.911.219)	(3.129.596)	(4.697.136)	(3.535.101)	(49.931.359)
Beban CKPN	(12.370.463)	(12.654.674)	(3.488.650)	(2.475.351)	(1.860.746)	(32.849.884)
Total beban	(32.028.770)	(31.565.893)	(6.618.246)	(7.172.487)	(5.395.847)	(82.781.243)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(38.614)	37.234	(30.077)	833	(18.694)	(49.318)
Laba sebelum beban pajak	12.241.442	8.461.332	1.620.742	3.837.595	563.735	26.724.846
Beban pajak	(3.653.469)	(2.525.292)	(483.712)	(1.145.335)	(256.645)	(8.064.453)
Laba tahun berjalan	8.587.973	5.936.040	1.137.030	2.692.260	307.090	18.660.393
Aset segmen						
Kredit yang diberikan - bruto	351.356.224	360.333.387	168.985.146	-	61.318.347	941.993.104
Total aset	334.248.320	341.745.828	140.551.343	597.634.414	89.311.178	1.503.491.083
Liabilitas segmen						
Total simpanan Nasabah	335.422.171	410.298.277	306.943.422	-	34.891.303	1.087.555.173
Total liabilitas	335.422.171	410.298.277	306.943.422	174.762.035	50.920.371	1.278.346.276

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

b. Segmen Geografi

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografi:

Keterangan	Total Pendapatan	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Indonesia	63.992.262	50.450.040
Amerika Serikat	242.830	232.674
Singapura	85.360	84.971
Timor-Leste	48.363	50.296
Hong Kong	777	4.434
Total	64.369.592	50.822.415

Keterangan	Laba sebelum beban pajak	
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Indonesia	16.155.656	15.285.749
Amerika Serikat	145.279	157.144
Singapura	43.860	63.249
Timor-Leste	34.555	33.150
Hong Kong	177	151
Total	16.379.527	15.539.443

Keterangan	Total Aset	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
	Indonesia	1.402.782.879
Amerika Serikat	21.591.339	19.708.131
Singapura	14.274.866	11.695.606
Timor-Leste	1.242.621	1.186.169
Hong Kong	12.521	8.482
Total	1.439.904.226	1.503.491.083

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

b. Segmen Geografi (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

Keterangan	Total Liabilitas	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Indonesia	1.214.414.759	1.246.806.862
Amerika Serikat	21.128.084	18.970.475
Singapura	14.067.176	11.500.136
Timor-Leste	1.089.753	1.067.486
Hong Kong	3.977	1.317
Total	1.250.703.749	1.278.346.276

42. PROGRAM BAGI PEKERJA

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja terdiri atas:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Program cuti besar	2.330.616	2.174.576
Program penghargaan tanda jasa	1.538.284	1.431.862
Program pensiun imbalan pasti	1.237.229	987.014
Program pemutusan hubungan kerja	917.128	918.734
Program kesehatan pasca kerja BPJS	578.405	774.578
Program manfaat lain dana manfaat tambahan	56.541	265.245
Total (Catatan 27)	6.658.203	6.552.009

Penilaian aktuarial atas program imbalan kerja masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dilakukan oleh aktuaris independen sebagai berikut:

Entitas	Aktuarial Independen	Tanggal Laporan	
		30 Juni 2021	31 Desember 2020
Entitas induk	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	19 Juli 2021	15 Januari 2021
Entitas anak			
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk)	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	-	4 Januari 2021
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	15 Juli 2021	4 Januari 2021
PT Asuransi BRI Life	PT Padma Radya Aktuarial	2 Juli 2021	4 Januari 2021
PT BRI Multifinance Indonesia	PT Jasa Aktuarial	9 Juli 2021	8 Januari 2021
PT BRI Danareksa Sekuritas	Praptasentosa Gunajasa PT Jasa Aktuarial	16 Juli 2021	22 Januari 2021
PT BRI Ventura Investama	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	1 Juli 2021	4 Januari 2021
PT BRI Asuransi Indonesia	KKA Steven & Mourits	4 Juli 2021	3 Januari 2021

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 42,96% dari penghasilan dasar pensiun.

Penilaian aktuarial atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Tingkat diskonto	7,90%	7,70%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,50	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

Mutasi atas nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti awal tahun	20.671.028	18.794.249
Beban bunga	784.174	1.499.133
Biaya jasa kini	178.037	330.869
Biaya jasa lalu	410.193	-
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(605.751)	(1.024.290)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(128.256)	1.071.067
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti akhir tahun	21.309.425	20.671.028

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai wajar aset program awal tahun	19.684.014	17.580.301
Hasil pengembangan riil	(158.865)	1.164.900
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja	1.120.569	1.894.813
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) peserta program	32.229	68.290
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(605.751)	(1.024.290)
Total aset program	20.072.196	19.684.014

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	987.014	1.213.949
Beban pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 35)	589.552	342.140
Pembayaran iuran tahun berjalan	(1.120.569)	(1.894.813)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti - neto	781.232	1.325.738
Saldo akhir (Catatan 27)	1.237.229	987.014

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	1.976.136	650.398
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(128.256)	1.071.067
Imbal hasil atas aset program	909.488	254.671
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	2.757.368	1.976.136

Beban pensiun imbalan pasti untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa kini	178.037	170.858
luran peserta program	(32.229)	(34.914)
Beban bunga - neto	33.551	44.860
Biaya jasa lalu	410.193	-
Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 35)	589.552	180.804

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuarial atas THT masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Tingkat diskonto	7,80%	7,20%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status THT sesuai dengan penilaian aktuarial masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai wajar aset	4.943.759	4.929.907
Nilai kini liabilitas THT	(2.601.470)	(2.672.216)
Surplus	2.342.289	2.257.691

Mutasi atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	-	-
Beban THT	86.602	138.778
Pengukuran kembali liabilitas THT - neto	(26.448)	(21.690)
Pembayaran iuran periode berjalan	(60.154)	(117.088)
Saldo akhir liabilitas	-	-

Pengukuran kembali atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	278.118	299.809
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(150.447)	286.505
Imbal hasil atas liabilitas (aset) program	120.679	(346.934)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	3.321	38.738
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas THT - neto	251.671	278.118

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Perhitungan beban THT untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa kini	116.894	89.755
Iuran peserta program	(28.693)	(27.717)
Beban bunga - neto	(1.599)	(1.738)
Beban THT	86.602	60.300

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (entitas induk)

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp190.190 dan Rp175.044 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Catatan 35). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh DPBRI.

(ii) BRI Agro (entitas anak)

BRI Agro menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi BRI Agro untuk dana pensiun adalah sebesar 87,8% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing karyawan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sebesar Rp431 dan Rp396 masing-masing untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (Catatan 35).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perhitungan PHK dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuarial atas kewajiban perseroan yang berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan yang berlaku, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,90%	7,60%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	7,20 - 8,30%	6,50 - 7,80%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00 - 10,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI 2019 TMI-II 1999	TMI 2019 TMI-II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	5,00 - 10% dari tingkat kematian	5,00 - 10% dari tingkat kematian

Mutasi atas liabilitas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	918.734	754.471
Beban PHK (Catatan 35)	504.680	177.916
Pembayaran manfaat aktual	(459.235)	(136.932)
Pengukuran kembali liabilitas/(aset) PHK - neto	(44.652)	127.666
luran yang dibayarkan	(2.399)	(3.617)
Biaya terminasi	-	(770)
Saldo akhir (Catatan 27)	917.128	918.734

Pengukuran kembali atas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	(1.074.118)	(1.205.929)
Keuntungan aktuarial	(44.652)	131.811
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas PHK - neto	(1.118.770)	(1.074.118)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Perhitungan beban program PHK untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa kini	59.380	50.507
Beban bunga	33.049	28.606
Beban Pesangon	411.579	14
Beban jasa lalu	672	72
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	-	140
Pembayaran biaya terminasi	-	292
Beban PHK (Catatan 35)	504.680	79.631

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI dan entitas anak juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain dana manfaat tambahan.

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuaria atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,80%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI	10,00% dari TMI
Entitas anak		
Tingkat diskonto	4,70 - 7,69%	7,75 - 8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 10,00	7,00 - 10,00
Tingkat kenaikan harga emas	8,00 (BRI Agro)	8,00 (BRI Agro)
Tingkat kematian	TMI II 1999 dan TMI IV 2019	TMI II 1999 dan TMI IV 2019
Tingkat cacat jasmaniah	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

Mutasi untuk liabilitas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal liabilitas	1.431.862	1.328.634
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	107.075	234.875
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(653)	(131.647)
Liabilitas penghargaan tanda jasa (Catatan 27)	1.538.284	1.431.862

Beban penghargaan tanda jasa untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa kini	64.614	62.991
Beban bunga	52.157	53.905
Biaya jasa lalu	-	4.124
Selisih imbalan kerja	90	-
Keuntungan aktuaria yang diakui	(9.786)	(899)
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	107.075	120.121

(ii) Cuti besar

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,50%	6,90%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

Perhitungan aktuarial atas cuti besar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuarial adalah sebagai berikut (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Entitas anak		
Tingkat diskonto	5,00 - 7,82%	4,90 - 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 - 10,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI 2019 TMI-II 1999	TMI 2019 TMI-II 1999
Tingkat cacat jasmaniah	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian	5,00 - 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi liabilitas atas cuti besar masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal liabilitas	2.174.576	2.146.923
Beban cuti besar (Catatan 35)	401.468	305.765
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(245.428)	(278.112)
Liabilitas cuti besar (Catatan 27)	2.330.616	2.174.576

Beban cuti besar untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa kini	149.083	154.218
Beban bunga	69.792	81.759
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	182.393	(53.527)
Biaya jasa lalu	200	122
Beban cuti besar (Catatan 35)	401.468	182.572

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

Perhitungan aktuarial atas program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi (entitas induk) sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Tingkat diskonto	7,70%	7,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	4,88	4,88
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status program kesehatan pasca kerja BPJS sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai kini liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	2.028.710	2.242.107
Nilai wajar aset	(1.450.305)	(1.467.529)
Defisit	578.405	774.578

Mutasi liabilitas atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal liabilitas	774.578	22.737
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	75.212	906.326
Pembayaran iuran periode berjalan	-	(570.082)
Pengukuran kembali (aset)/liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	(271.385)	415.597
Liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 27)	578.405	774.578

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	395.603	(19.994)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(317.411)	335.603
Imbal hasil atas aset program	46.025	79.994
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto	124.217	395.603

Beban program kesehatan pasca kerja di BPJS untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa kini	47.714	18.968
Beban bunga - neto	27.498	(3.129)
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	75.212	15.839

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan

Penilaian aktuarial atas program manfaat lain dana manfaat tambahan BRI pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	7,90%	7,70%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI 2019	10% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Nilai kini liabilitas awal tahun	1.998.863	1.893.175
Biaya bunga	74.896	145.101
Biaya jasa kini	9.320	18.071
Biaya jasa lalu	91.412	-
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(107.049)	(247.304)
(Keuntungan) kerugian aktuarial	(73.665)	189.820
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.993.777	1.998.863

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Nilai wajar aset program awal tahun	1.733.620	1.827.092
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(107.049)	(247.304)
Hasil pengembangan riil	213.130	149.547
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja	97.535	4.285
Total aset program	1.937.236	1.733.620

Mutasi atas kewajiban program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	265.245	66.084
Beban program		
manfaat lain dana manfaat tambahan - neto (Catatan 35)	109.066	23.315
Pengukuran kembali (aset)/liabilitas - neto	(220.235)	180.131
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja	(97.535)	(4.285)
Saldo akhir (Catatan 27)	56.541	265.245

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	208.702	28.571
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(73.665)	189.820
Imbal hasil atas aset program	(146.569)	(9.689)
Jumlah pengukuran kembali atas (aset) liabilitas imbalan pasti - neto	(11.532)	208.702

Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Biaya jasa lalu	91.412	-
Biaya jasa kini	9.320	9.434
Bunga - neto	8.334	2.710
Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan (Catatan 35)	109.066	12.144

f. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) :

(i) Program pemutusan hubungan kerja (PHK)

	30 Juni 2021	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(78.681)
Penurunan	-1,00%	204.484
	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(83.766)
Penurunan	-1,00%	227.117

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- f. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

- (i) Program pemutusan hubungan kerja (PHK) (lanjutan)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	57.259	56.458
1 - < 2 tahun	52.897	51.710
2 - < 3 tahun	48.722	48.008
3 - < 4 tahun	44.593	44.129
4 - < 5 tahun	41.132	40.531
> 5 tahun	458.538	460.918

- (ii) Program pensiun imbalan pasti

	<u>30 Juni 2021</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(924.439)
Penurunan	-1,00%	148.781
	<u>31 Desember 2020</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(509.615)
Penurunan	-1,00%	570.339

Juran Jatuh Tempo

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	302.911	313.033
1 - < 2 tahun	276.688	284.962
2 - < 3 tahun	272.061	281.411
3 - < 4 tahun	266.790	276.288
4 - < 5 tahun	260.205	269.731
> 5 tahun	785.464	811.185

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- f. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(iii) Program tunjangan hari tua

		30 Juni 2021	
		Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
	Kenaikan	+1,00%	(206.155)
	Penurunan	-1,00%	237.505
		31 Desember 2020	
		Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
	Kenaikan	+1,00%	(217.042)
	Penurunan	-1,00%	250.687
<u>Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti</u>			
		30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Jatuh Tempo</u>			
	< 1 tahun	157.480	160.660
	1 - < 2 tahun	117.649	118.883
	2 - < 3 tahun	122.349	123.256
	3 - < 4 tahun	120.092	120.447
	4 - < 5 tahun	114.983	117.896
	> 5 tahun	1.968.917	2.031.073

(iv) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

		30 Juni 2021	
		Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
	Kenaikan	+1,00%	(298.091)
	Penurunan	-1,00%	387.086
		31 Desember 2020	
		Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
	Kenaikan	+1,00%	(347.202)
	Penurunan	-1,00%	455.622

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- f. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

- (iv) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Juran Jatuh Tempo

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	79.098	94.360
1 - < 2 tahun	83.431	98.986
2 - < 3 tahun	87.876	103.970
3 - < 4 tahun	92.438	108.924
4 - < 5 tahun	97.281	114.058
> 5 tahun	3.028.682	3.464.172

- (v) Cadangan penghargaan tanda jasa

	<u>30 Juni 2021</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(135.289)
Penurunan	-1,00%	156.994
	<u>31 Desember 2020</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(133.063)
Penurunan	-1,00%	154.967

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	131.551	89.521
1 - < 2 tahun	91.539	86.669
2 - < 3 tahun	60.689	53.155
3 - < 4 tahun	54.163	52.553
4 - < 5 tahun	83.382	72.089
> 5 tahun	1.094.498	1.055.471

- (vi) Cuti besar

	<u>30 Juni 2021</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(144.553)
Penurunan	-1,00%	163.041

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- f. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(vi) Cuti besar (lanjutan)

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(136.108)
Penurunan	-1,00%	153.998
 <u>Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti</u>		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	321.724	296.462
1 - < 2 tahun	190.474	168.277
2 - < 3 tahun	145.924	128.931
3 - < 4 tahun	184.387	139.280
4 - < 5 tahun	174.418	161.658
> 5 tahun	1.284.039	1.195.996

43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<u>Komitmen</u>		
Tagihan komitmen		
Pembelian <i>spot</i> dan berjangka mata uang asing	9.878.092	3.078.534
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 26d)	97.719.634	125.176.691
Penjualan <i>spot</i> dan berjangka mata uang asing	76.478.825	55.418.797
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26d)	11.051.503	8.974.190
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	-	618.452
	<u>185.249.962</u>	<u>190.188.130</u>
Komitmen - neto	(175.371.870)	(187.109.596)
<u>Kontinjensi</u>		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	3.555	144.901
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26d) dalam bentuk:		
Garansi bank	34.936.652	35.931.693
Stand by L/C	10.237.308	8.752.803
	<u>45.173.960</u>	<u>44.684.496</u>
Kontinjensi - neto	(45.170.405)	(44.539.595)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Karyawan Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Simpanan nasabah
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor,
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan akseptasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan, Wesel ekspor dan tagihan lainnya, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Len Industri (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Rekayasa Industri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Bio Farma (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Adhi Persada Beton	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Petrosida Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Utama Karya (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang sewa pembiayaan
PT Utama Karya Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang sewa pembiayaan
PT Hakaaston	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang sewa pembiayaan
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84.896	37.842
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	33.084	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.108	59.627
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.374	5.936
PT Bank Syariah Mandiri	-	329
PT Bank BNI Syariah	-	7
	<u>145.462</u>	<u>103.741</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.227.490	1.098.850
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	393.900	271.750
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	313.855	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	122.300	113.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	70.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	-	12.000
PT Bank BNI Syariah	-	6.500
	<u>2.127.545</u>	<u>1.502.100</u>
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	253.815.094	282.793.766
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.082.537	2.144.784
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.160.662	1.374.914
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.104.286	871.371
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.079.751	1.003.489
PT Pupuk Indonesia (Persero)	911.312	333.297
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	883.128	1.455.260
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	829.625	899.102
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	812.333	937.076
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	788.504	-
Lainnya	6.610.739	6.839.166
	<u>270.077.971</u>	<u>298.652.225</u>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya (Catatan 8)		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	809.620	-
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	475.744	388.003
PT Petrokimia Gresik	450.829	594
PT Pindad (Persero)	277.757	78.889
PT PP Presisi Tbk	247.497	90.658
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	175.627	824.381
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	118.090	63.244
PT Adhi Persada Beton	112.483	1.286
PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk	69.080	10.228
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	68.919	-
Lainnya	329.212	358.409
	<u>3.134.858</u>	<u>1.815.692</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Aset (lanjutan)		
Kredit yang diberikan (Catatan 11)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	14.899.971	16.182.590
Perum BULOG	8.100.915	5.841.839
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	3.605.663	2.414.805
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.711.025	2.617.195
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.509.091	2.800.000
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.215.048	1.813.992
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.086.259	2.031.937
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.082.744	2.355.585
PT Pegadaian (Persero)	1.797.349	2.120.147
PT Trans Jabar Tol	1.775.555	1.848.697
Karyawan Kunci	151.606	186.633
Lain-lain	34.968.784	34.546.291
	<u>76.904.010</u>	<u>74.759.711</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 12)		
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	1.000.000
PT Pegadaian (Persero)	-	558.387
PT Waskita Beton Precast Tbk	-	470.000
PT Semen Indonesia Tbk	-	341.088
PT Citra Waspphutowa	-	324.529
PT Kimia Farma Apotek	-	270.000
PT Jasa Marga JalanLayang Cikampek	-	180.255
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	101.276
PT Cimanggis Cibitung Tollways	-	98.773
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	-	84.919
Karyawan kunci	-	8.274
Lainnya	-	361.356
	<u>-</u>	<u>3.798.857</u>
Piutang Sewa Pembiayaan (Catatan 13)		
PT Hutama Karya Infrastruktur	20.479	24.478
PT Hakaaston	5.859	13.667
PT Hutama Karya (Persero)	83	3.008
	<u>26.421</u>	<u>41.153</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Aset (lanjutan)		
Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (Catatan 14)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	559.667	683.041
PT Pertamina (Persero)	84.676	-
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	57.366	92.157
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	55.407	38.271
PT Petrosida Gresik	47.735	21.702
PT Rekayasa Industri	28.798	19.153
PT Pindad (Persero)	27.402	33.119
PT Wijaya Karya Industri Energi	13.146	36.389
PT Len Industri (Persero)	1.102	3.441
Lainnya	-	845.807
	<u>875.299</u>	<u>1.773.080</u>
Penyertaan saham (Catatan 15)		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.761.832	-
PT Fintek Karya Nusantara	565.564	565.245
PT Danareksa Investment Management	385.221	380.198
PT Bahana Artha Ventura	75.423	74.396
	<u>4.788.040</u>	<u>1.019.839</u>
Total aset dari pihak-pihak berelasi	358.079.606	383.466.398
Total aset konsolidasian	1.450.907.063	1.511.804.628
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	<u>24,68%</u>	<u>25,36%</u>
Liabilitas		
Giro (Catatan 19)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	66.686.207	57.426.534
Karyawan kunci	25.898	17.430
Lain-lain	110.635	427.677
	<u>66.822.740</u>	<u>57.871.641</u>
Tabungan (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	220.046	158.893
Karyawan kunci	220.895	221.796
Lain-lain	-	279.585
	<u>449.941</u>	<u>660.274</u>
Deposito Berjangka (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	100.322.857	75.966.314
Karyawan kunci	168.453	176.670
Lain-lain	-	1.228.527
	<u>100.491.310</u>	<u>77.371.511</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Liabilitas (lanjutan)		
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 22) Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.803.152	1.281.947
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23) Entitas dan Lembaga Pemerintah	-	654.089
Pinjaman yang Diterima (Catatan 25) Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.086.550	887.402
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 42)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	699.979	745.340
Nilai kini kewajiban PHK	94.709	117.881
Nilai kini kewajiban THT	164.493	173.811
Nilai kini kewajiban cuti besar	82.721	79.271
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	69.536	61.502
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	18.000	19.544
Nilai kini kewajiban BPJS	24.167	28.964
	<u>1.153.605</u>	<u>1.226.313</u>
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	171.807.298	139.953.177
Total liabilitas konsolidasian	1.250.703.749	1.278.346.276
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	13,74%	10,95%
Dana Syirkah Temporer Entitas, Lembaga Pemerintah dan karyawan kunci	-	6.613.045
Persentase terhadap total dana syirkah temporer	-	19,71%
	<u>30 Juni 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26b)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.723.705	3.662.833
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3.524.329	5.172.180
PT Pertamina (Persero)	3.385.166	1.571.164
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	3.010.349	1.545.340
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	970.582	459.194
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	940.524	1.058.282
PT Pertamina Hulu Rokan	725.000	702.500
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	669.341	661.492
PT Telekomunikasi Selular	619.008	590.219
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	575.790	1.613.297
Lain-lain	4.749.898	5.268.095
	<u>22.893.692</u>	<u>22.304.596</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Komitmen dan Kontinjensi pada		
Rekening Administratif (lanjutan)		
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26b)		
Perum BULOG	2.128.871	21.873
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.764.908	1.812.164
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	597.255	522.705
PT Bio Farma (Persero)	549.545	-
PT Krakatau Steel (Persero)	539.311	71.417
PT Petrokimia Gresik	375.704	236.615
PT Pertamina (Persero)	322.629	633.404
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	277.087	428.660
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	156.639	299.607
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	165.544	134.566
Lain-lain	547.876	1.077.458
	7.425.369	5.238.469
	Periode enam bulan yang berakhir	
	pada tanggal 30 Juni	
	2021	2020
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 35)		
Gaji dan tunjangan Direksi	59.976	57.471
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	24.747	20.291
Total	84.723	77.762
Tantiem, bonus dan insentif		
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci (Catatan 35)		
Tantiem Direksi	5.925	226.706
Tantiem Dewan Komisaris	2.457	87.295
Bonus dan insentif karyawan kunci	59.523	109.767
Total	67.905	423.768

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Aset		
Giro pada Bank lain	0,010%	0,007%
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,147	0,099
Efek-efek	18,614	19,755
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0,216	0,120
Kredit yang diberikan	5,300	4,945
Piutang dan pembiayaan syariah	-	0,251
Piutang sewa pembiayaan	0,002	0,003
Tagihan akseptasi	0,060	0,117
Penyertaan saham	0,330	0,067
Total	24.679%	25,364%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Liabilitas		
Giro	5,343%	4,527%
Tabungan	0,036	0,052
Deposito berjangka	8,035	6,052
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,144	0,100
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	0,051
Pinjaman yang diterima	0,087	0,069
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci	0,092	0,096
Total	13,737%	10,947%

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

- 1) Pada tanggal 3 Mei 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT SAP Indonesia sehubungan dengan Pengadaan *Software* BRIFIRST untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp280.000.
- 2) Pada tanggal 29 Maret 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan Perangkat Pendukungnya untuk Integrasi Fase 4 untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp225.435.
- 3) Pada tanggal 2 Maret 2021, BRI menandatangani Perjanjian Distribusi (*Distribution Agreement*) dengan BRI Life sehubungan dengan kerjasama pemasaran produk BRI Life melalui saluran distribusi BRI.
- 4) Pada tanggal 4 Februari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Layanan 145.500 Simcard M2M EDC Provider Telkomsel untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp96.030.
- 5) Pada tanggal 28 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perpanjangan SPK Sewa Jaringan Komunikasi MPLS Provider PT Telekomunikasi Indonesia dengan nilai kontrak Rp65.713.
- 6) Pada tanggal 20 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Menara BRI Medan untuk jangka waktu 420 (empat ratus dua puluh) hari dengan nilai kontrak senilai Rp316.500.
- 7) Pada tanggal 15 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan SPK Sewa Jaringan Komunikasi MPLS Provider Satkomindo untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp82.144.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

- 8) Pada tanggal 13 November 2020 dan 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi dan PT Datindo Infonet Prima sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* CRM RBB Tahun 2020 (Zona 1, 2 dan 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp682.328 dan Rp308.396.
- 9) Pada tanggal 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Seluler sehubungan dengan Pengadaan Sewa Saluran Komunikasi untuk Kebutuhan Penggantian Perangkat BRISPOT bagi Pejabat Kredit Lini Bisnis Mikro dengan nilai kontrak Rp260.899.
- 10) Pada tanggal 8 Juli 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan Pengadaan *Managed Service* VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISat Fase 3 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp181.777.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp1.123.196 dan Rp1.141.920 (Catatan 28). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebaskan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Selanjutnya, Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang “Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum”, Program penjaminan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) telah berakhir pada tanggal 22 September 2005 untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang “Lembaga Penjamin Simpanan”, dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang “Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan” yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan pasal 29 bahwa Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 4,00% dan 4,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 0,50% dan 1,00%.

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022:

- a. Amendemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”. Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- b. Amendemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak”. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian “10 per sen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan”. Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

- a. Amendemen PSAK No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang”, penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 (lanjutan):

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- a. PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Saat ini BRI dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

48. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

CAR pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, BRI wajib membentuk tambahan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge*, yang wajib dibentuk secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pembentukan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* yang wajib dibentuk oleh BRI berdasarkan persentase tertentu dari ATMR adalah masing-masing 2,5%, 0% dan 2,5%. Sesuai Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19)", kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal sebesar 2,5% dari ATMR bagi Bank Buku 3 dan Buku 4 sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2022.

Berdasarkan profil risiko BRI pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan BRI terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

CAR BRI (entitas induk) pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Modal Inti (Tier 1)		
Modal Inti Utama (CET 1)	173.158.887	174.297.803
Modal Pelengkap (Tier 2)	9.368.541	9.039.734
Total Modal	182.527.428	183.337.537
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko Kredit ^{*)}	732.803.735	702.318.932
ATMR untuk Risiko Pasar ^{**)}	5.746.555	4.705.830
ATMR untuk Risiko Operasional ^{***)}	191.178.694	182.571.933
Total ATMR	929.728.984	889.596.695
	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rasio CAR		
Rasio CET 1	18,62%	19,59%
Rasio Tier 1	18,62	19,59
Rasio Tier 2	1,01	1,02
Rasio Total	19,63	20,61
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,00	9,00

^{*)} Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

^{**)} Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

^{***)} Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, rasio NPL BRI adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian (BRI dan BRI Agro pada tanggal 30 Juni 2021 serta BRI, BRI Agro, dan BRISyariah pada 31 Desember 2020)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Rasio NPL - kotor	3,30%	2,99%
Rasio NPL - neto	0,96	0,87

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (*safe keeping services*) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement handling*);
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri.

BRI memiliki 406 (empat ratus enam) dan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana dan institusi lainnya.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp493.279.190 dan Rp440.482.007 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pemantau

BRI memiliki 52 (lima puluh dua) dan 49 (empat puluh sembilan) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Jumlah obligasi yang diwaliamanati oleh BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp86.857.789 dan Rp83.480.339 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

e. *Jasa Trust* (lanjutan)

Ruang lingkup layanan *Jasa Trust* BRI meliputi:

- Layanan *Jasa Agen Pembayar*
- Layanan *Jasa Agen Peminjaman*
- Layanan *Jasa Agen Investasi*
- Layanan *Jasa Keagenan Lainnya*, seperti misalnya *Agen Penampungan* dan *Agen Jaminan*

BRI saat ini telah memberikan pelayanan *Jasa Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan *Jasa Trust*, BRI juga memberikan layanan *Jasa Agen Pembayar* dan *Agen Penampungan* (non *Trust*) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, *Jasa Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

Nilai proyek kelolaan *Jasa Trust* BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp141.944.143 dan Rp139.644.120 masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

f. *Agen Sindikasi*

BRI saat ini memberikan pelayanan *Jasa Agen Sindikasi* untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan *Syndication & Financial Services Division* dan *Jasa Lembaga Keuangan* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*
- *Agen Fasilitas*
- *Agen Jaminan*
- *Agen Penampungan*

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek (tidak diaudit) adalah sebesar Rp475.830.242 dan Rp464.327.597, masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

49. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba per lembar saham dasar dan dilusian untuk BRI (entitas induk) adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021		
	Laba Periode Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Periode Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	12.472.627	122.596.686.616	102
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	568.605.622	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	12.472.627	123.165.292.238	101

	30 Juni 2020		
	Laba Periode Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Periode Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	10.178.335	122.533.339.740	83
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	599.673.617	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	10.178.335	123.133.013.357	83

50. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

	31 Desember 2020	Arus Kas		Perubahan Non Kas	30 Juni 2021
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	35.968.985	1.249.590	(2.311.335)	393.223	35.300.463
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.392	-	-	(964.406)	500.986
Surat berharga yang diterbitkan	34.489.091	-	(4.374.500)	648.563	30.763.154
Total	71.923.468	1.249.590	(6.685.835)	77.380	66.564.603

	31 Desember 2019	Arus Kas		Perubahan Non Kas	30 Juni 2020
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	30.921.771	-	(8.090.430)	72.112	22.903.453
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.366	-	-	69	1.465.435
Surat berharga yang diterbitkan	38.620.837	1.998.840	(1.743.500)	281.882	39.158.059
Total	71.007.974	1.998.840	(9.833.930)	354.063	63.526.947

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
Tanggal 30 Juni 2021
serta untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus Indonesia dan dokumen penawaran internasional sehubungan dengan rencana penawaran efek ekuitas BRI dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu masing-masing untuk: (a) di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan (b) di luar Indonesia di mana efek ekuitas akan ditawarkan kepada: (i) pemegang saham BRI yang berada di Amerika Serikat atau merupakan *US Person* (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Regulation S* dari *United States Securities Act of 1933* ("*Securities Act*") dan merupakan *Qualified Institutional Buyer* (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Rule 144A* dari *Securities Act*), dan (ii) *non-US Person* (sebagaimana yang didefinisikan dalam *Regulation S* dari *Securities Act*) dan berlokasi di luar Amerika Serikat, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

52. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi BRI pada tanggal 30 Agustus 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
ASET		
Kas	17.782.194	31.020.724
Giro pada Bank Indonesia	38.099.286	49.690.493
Giro pada Bank lain	14.887.297	9.591.417
Cadangan kerugian penurunan nilai	(92.266)	(92.690)
	<u>14.795.031</u>	<u>9.498.727</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	94.823.724	64.941.821
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.529)	(8.998)
	<u>94.817.195</u>	<u>64.932.823</u>
Efek-efek	284.868.002	300.759.740
Cadangan kerugian penurunan nilai	(842.788)	(340.375)
	<u>284.025.214</u>	<u>300.419.365</u>
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	27.075.084	27.521.765
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.290.788)	(1.326.171)
	<u>25.784.296</u>	<u>26.195.594</u>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	16.062.171	43.770.835
Tagihan Derivatif	619.936	1.576.659
Kredit yang Diberikan	912.071.925	880.674.757
Cadangan kerugian penurunan nilai	(77.048.953)	(64.129.266)
	<u>835.022.972</u>	<u>816.545.491</u>
Tagihan Akseptasi	5.665.454	6.773.743
Cadangan kerugian penurunan nilai	(200.185)	(546.260)
	<u>5.465.269</u>	<u>6.227.483</u>
Penyertaan Saham	13.353.135	12.566.424
Aset Tetap		
Biaya perolehan	46.587.472	44.189.284
Akumulasi penyusutan	(14.639.943)	(13.659.238)
Nilai buku - neto	<u>31.947.529</u>	<u>30.530.046</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	10.486.011	7.605.102
Aset Lain-lain - neto	23.364.795	21.205.241
TOTAL ASET	<u>1.411.625.034</u>	<u>1.421.785.007</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	10.199.675	11.392.992
Simpanan Nasabah		
Giro	189.304.596	183.002.153
Tabungan	459.232.964	459.148.270
Deposito Berjangka	430.534.921	410.513.447
Total Simpanan Nasabah	<u>1.079.072.481</u>	<u>1.052.663.870</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	13.875.431	25.318.719
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	12.269.752	40.478.672
Liabilitas Derivatif	634.275	397.088
Liabilitas Akseptasi	5.665.454	6.773.743
Utang Pajak	3.893.219	1.064.461
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.557.767	34.450.311
Pinjaman yang Diterima	33.172.468	34.163.564
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	6.448.765	3.667.943
Liabilitas Imbalan Kerja	11.588.013	10.350.028
Liabilitas Lain-lain	10.388.853	6.203.627
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	500.986	500.887
TOTAL LIABILITAS	<u>1.218.267.139</u>	<u>1.227.425.905</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 30 Juni 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021 (tidak diaudit)	31 Desember 2020
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)		
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor	4.062.330	3.493.008
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	16.864.083	16.864.083
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(72.080)	(54.510)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2.259.396	4.385.145
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	948.176	935.856
Keuntungan pengukuran kembali program imbangan pasti - bersih	(1.647.151)	(1.446.069)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(1.644.317)	(1.649.076)
Opsi Saham	70.522	55.836
Cadangan kompensasi atas saham bonus	1.648.811	1.228.805
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	161.678.149	161.356.048
Total Saldo Laba	164.700.834	164.378.733
TOTAL EKUITAS	193.357.895	194.359.102
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.411.625.034	1.421.785.007

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	58.555.674	53.161.981
Beban Bunga	(12.203.794)	(18.609.806)
Pendapatan Bunga - neto	46.351.880	34.552.175
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	8.165.082	7.429.505
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	4.235.675	2.858.194
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	849.564	228.723
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	1.760.047	1.056.754
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	58.567	58.503
Lain-lain	1.232.874	2.081.902
Total Pendapatan Operasional lainnya	16.301.809	13.713.581
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(18.586.656)	(8.775.581)
Beban penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	(2.780.822)	(421.667)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan	(161.894)	(3.108)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan Umum dan administrasi	(13.880.283)	(13.237.785)
Lain-lain	(7.892.077)	(7.543.793)
Total Beban Operasional lainnya	(24.863.782)	(23.609.676)
LABA OPERASIONAL	16.260.535	15.455.724
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	(2.429)	(6.159)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	16.258.106	15.449.565
BEBAN PAJAK	(3.810.416)	(5.248.484)
LABA PERIODE BERJALAN	12.447.690	10.201.081

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM ENTITAS INDUK
(lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
Penghasilan komprehensif lainnya:		
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti	(242.267)	(187.534)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	41.185	63.590
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(17.570)	(16.738)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.561.143)	444.028
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.320	116.687
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	435.394	(69.565)
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan - Setelah Pajak	(2.332.081)	350.468
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	10.115.609	10.551.549
LABA PERIODE BERJALAN PER SAHAM		
Dasar (dalam Rupiah penuh)	102	83
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	101	83

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM ENTITAS INDIK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasury	Cadangan kompensasi saham kepada karyawan	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
									Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	6.167.291	2.981.523	(14.868)	726.681	198.584	(2.106.014)	21.796	16.864.083	3.022.685	175.803.701	203.665.462
Dampak penyesuaian atas Penerapan PSAK No.71	-	-	-	111.385	-	-	-	-	-	(12.177.391)	(12.066.006)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian	6.167.291	2.981.523	(14.868)	838.066	198.584	(2.106.014)	21.796	16.864.083	3.022.685	163.626.310	191.599.456
Laba periode berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.201.081	10.201.081
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(16.738)	491.150	(123.944)	-	-	-	-	-	350.468
Total penghasilan komprehensif untuk periode berjalan	-	-	(16.738)	491.150	(123.944)	-	-	-	-	10.201.081	10.551.549
Pembagian laba Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.623.565)	(20.623.565)
Opsi saham	-	-	-	-	-	-	13.583	-	-	-	13.583
Saham bonus	-	511.485	-	-	-	456.938	585.855	-	-	-	1.554.278
Saldo pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit)	6.167.291	3.493.008	(31.606)	1.329.216	74.640	(1.649.076)	621.234	16.864.083	3.022.685	153.203.826	183.095.301

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tanggungan	Saham treasury	Cadangan kompensasi saham kepada karyawan	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditemukan penggunaannya	Belum ditemukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	6.167.291	3.493.008	935.856	(54.510)	4.385.145	(1.446.069)	(1.649.076)	1.284.641	16.864.083	3.022.685	161.356.048	194.359.102
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.447.690	12.447.690
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	12.320	(17.570)	(2.125.749)	(201.082)	-	-	-	-	-	(2.332.081)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	12.320	(17.570)	(2.125.749)	(201.082)	-	-	-	-	12.447.690	10.115.609
Pembagian laba dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.125.589)	(12.125.589)
Selisih nilai transaksi Restrukturisasi entitas anak	-	565.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.210
Opsi saham	-	-	-	-	-	-	-	14.686	-	-	-	14.686
Saham bonus	-	4.112	-	-	-	-	4.759	420.006	-	-	-	428.877
Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 (tidak diaudit)	6.167.291	4.062.330	948.176	(72.080)	2.259.396	(1.647.151)	(1.644.317)	1.719.333	16.864.083	3.022.685	161.678.149	193.357.895

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN ARUS KAS INTERIM ENTITAS INDUK
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan bunga	55.695.279	51.844.446
Pembayaran bunga	(12.441.963)	(18.852.073)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	4.235.675	2.852.266
Pendapatan operasional lainnya	12.741.201	11.303.781
Beban operasional lainnya	(23.485.626)	(22.865.184)
(Beban) pendapatan non operasional - neto	(24.335)	(13.340)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(3.363.262)	(835.712)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	33.356.969	23.434.184
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	364.228	1.559.435
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	10.401.129	(5.699.633)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	446.681	5.241.611
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	27.708.664	(34.548.751)
Kredit yang diberikan	(35.832.640)	(15.894.939)
Aset lain-lain	2.515.025	(3.071.982)
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	(1.193.317)	(15.611)
Simpanan:		
Giro	6.302.443	4.920.355
Tabungan	84.694	(3.268.310)
Deposito berjangka	20.021.474	41.753.533
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(11.443.288)	(5.455.092)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(28.208.920)	(38.954.300)
Liabilitas lain-lain	2.788.388	(2.683.437)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan operasi	27.311.530	(32.682.937)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
LAPORAN ARUS KAS INTERIM ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Penerimaan dividen	-	5.530
Perolehan aset tetap	(2.605.674)	(1.150.052)
Hasil penjualan aset tetap	21.906	7.181
Penurunan/(kenaikan) efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	(7.297.027)	(28.285.759)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan investasi	(9.880.795)	(29.423.100)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN (Pembayaran) penerimaan pinjaman yang diterima	(991.096)	(7.634.848)
Pembagian laba untuk dividen	(12.125.589)	(20.623.565)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	-	1.998.840
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(4.374.500)	(1.743.500)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(17.491.185)	(28.003.073)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(60.450)	(90.109.110)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	100.986	520.425
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	162.899.663	229.425.777
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	162.940.199	139.837.092
Kas dan Setara Kas akhir periode terdiri dari:		
Kas	17.782.194	19.145.742
Giro pada Bank Indonesia	38.099.286	40.982.241
Giro pada bank lain	14.887.297	12.203.035
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	92.171.422	59.737.307
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	7.768.767
Total Kas dan Setara Kas	162.940.199	139.837.092

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT ENTITAS INDUK
Tanggal 30 Juni 2021
serta Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 4, “Laporan Keuangan Tersendiri”.

PSAK No. 4 mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas dengan menggunakan metode biaya perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut:

	30 Juni 2021		31 Desember 2020	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk)	-	-	2.981.171	71,64%
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	3.454.636	86,13%	3.454.636	87,10
BRI Remittance Co. Limited	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI Life	1.626.643	63,83	1.626.643	91,00
PT BRI Multifinance Indonesia	1.055.003	99,88	1.055.003	99,88
PT BRI Danareksa Sekuritas	446.888	67,00	446.888	67,00
PT BRI Ventura Investama	1.503.090	99,97	1.503.090	99,97
PT BRI Asuransi Indonesia	1.041.000	90,00	1.041.000	90,00

